



Peraturan Gubernur Papua Nomor 33 Tahun 2025

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH [RKPD] PROVINSI PAPUA TAHUN 2026



**BAPPERIDA**

2025



“Percepatan Pembangunan  
Struktur Ekonomi yang Inklusif  
melalui Akselerasi Potensi  
Unggulan Daerah”



**RKPD**  
TAHUN 2026  
**PAPUA**



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

### **NOMOR 33 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

#### **PROVINSI PAPUA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah di susun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kabijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang ...../3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4817);
13. Peraturan ...../4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

20. Peraturan ...../5



20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan ...../6

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
30. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 Nomor 2);
32. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2026.



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lainnya adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2023.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
  - b. rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - c. prioritas pembangunan daerah Tahun 2026;
  - d. rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
  - e. hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025.
- (3) RKPD Provinsi Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
- (5) Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
- (6) Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
- (7) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (8) Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memperhatikan hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2025.

**Pasal 3**

- (1) Rancangan akhir RKPD tahun 2026 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2026.
- (2) Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
- (3) Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
  - a. surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
  - b. rancangan akhir RKPD tahun 2026;
  - c. berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD tahun 2026;

d. hasil ...../9

- d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
  - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD;
  - f. hasil reviu aparat pengawasan internal pemerintah Daerah; dan
  - g. daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2026.
- (4) Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Penjabaran dari RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
- (2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPD.
- (3) Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- (4) Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RPD dan Rentsra perangkat Daerah.

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan:
  - a. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026; dan
  - b. RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2026;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2026;
  - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2026;
  - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2026;
  - f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2026.



- (3) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

## **Pasal 6**

Penetapan RKPD Tahun 2026 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 23 Juni 2025

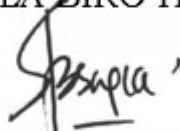
Pj. GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si  
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 24 Juni 2025

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD  
SUZANA D. WANGGAI, S.Pd., MsocSc

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum  
NIP. 19700912 199712 2 001

# Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Papua dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2026 ini tetap memedomani Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024–2026 dan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029, Dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2026 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, para Kepala Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Provinsi Papua demi mewujudkan Visi Provinsi Papua pada RPJPD tahun 2005-2025 yaitu “Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik” sekaligus menjadi dasar bagi RPJPD 2025-2045. Karena itu RKPD Tahun 2026 diberi tema **“Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah”**.

Jayapura, Mei 2025  
Pj. Gubernur Papua

Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong, S.IP., M.Si.







## KANTOR GOVERNUR PAPUA



# Daftar Isi

|                                                                                                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kata Pengantar .....                                                                                 | i           |
| Daftar Isi .....                                                                                     | iii         |
| Daftar Tabel .....                                                                                   | v           |
| Daftar Gambar .....                                                                                  | xi          |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                        | <b>I.1</b>  |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                                                             | I.1         |
| 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....                                                                      | I.5         |
| 1.3 MAKSUD dan TUJUAN.....                                                                           | I.8         |
| 1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....                                                                     | I.8         |
| 1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .....                                                                   | I.10        |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>                                                     | <b>II.1</b> |
| 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....                                                               | II.1        |
| 2.1.1 Aspek Geografi.....                                                                            | II.1        |
| 2.1.2 Aspek Demografi.....                                                                           | II.33       |
| 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....                                                             | II.35       |
| 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....                                                                       | II.35       |
| 2.2.2 Struktur Ekonomi.....                                                                          | II.36       |
| 2.2.3 Indeks Gini .....                                                                              | II.38       |
| 2.2.4 Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal .....                                                 | II.39       |
| 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....                                                                | II.45       |
| 2.2.6 Angka Harapan Hidup .....                                                                      | II.47       |
| 2.2.7 Harapan Lama Sekolah.....                                                                      | II.48       |
| 2.2.8 Rata-rata Lama Sekolah .....                                                                   | II.49       |
| 2.2.9 Prevalensi Stunting .....                                                                      | II.51       |
| 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....                                                                        | II.52       |
| 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....                                                 | II.52       |
| 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar .....                                            | II.83       |
| 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....                                                               | II.114      |
| 2.4 ASPEK DAYA SAING .....                                                                           | II.119      |
| 2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah .....                                                                | II.119      |
| 2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia .....                                                           | II.122      |
| 2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....                                                | II.124      |
| 2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi .....                                                               | II.126      |
| 2.5 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI<br>TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD..... | II.129      |
| 2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.....                                                             | II.132      |
| 2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan<br>Sasaran Pembangunan Daerah.....   | II.132      |
| 2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah<br>Daerah.....                     | II.140      |



|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>                            | <b>III.1</b>  |
| 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI .....                                                     | III.1         |
| 3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional .....                           | III.1         |
| 3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah Provinsi Papua .....                  | III.5         |
| 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....                                             | III.13        |
| 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....                                         | III.14        |
| 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....                                            | III.20        |
| 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....                                         | III.24        |
| 3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus .....         | III.27        |
| <b>BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>                          | <b>IV.1</b>   |
| 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .....                                             | IV.1          |
| 4.1.1 Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....                            | IV.1          |
| 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Provinsi Papua Tahun 2026 .....                             | IV.18         |
| 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026 .....                               | IV.21         |
| 4.2.2. Tema dan Prioritas RKP Tahun 2026 .....                                       | IV.21         |
| 4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRP .....                                                | IV.23         |
| 4.2.4. Tema dan Prioritas Provinsi Papua Tahun 2026 .....                            | IV.28         |
| 4.3. PRORGAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2026 .....                   | IV.34         |
| <b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH .....</b>                                | <b>V.1</b>    |
| 5.1 Kerangka Pengembangan Wilayah .....                                              | V.1           |
| 5.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua Berbasis Wilayah Adat.....                       | V.4           |
| 5.2.1 Wilayah Adat Tabi.....                                                         | V.4           |
| 5.2.2 Wilayah Adat Saireri .....                                                     | V.5           |
| 5.3 Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arahan RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042..... | V.6           |
| <b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>                                | <b>VI.1</b>   |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>                     | <b>VII.1</b>  |
| 7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....                                                   | VII.1         |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                                        | <b>VIII-1</b> |

# Daftar Tabel

|                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel II.1 Luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023 .....                                                                  | II.1  |
| Tabel II.2 Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua Tahun 2023 .....                                                                        | II.2  |
| Tabel II.3 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021 .....       | II.3  |
| Tabel II.4 Kawasan Perkotaan dalam Sistem Pusat Pemukiman .....                                                                                     | II.4  |
| Tabel II.5 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua .....                                                                              | II.10 |
| Tabel II.6 Kelerengan Provinsi Papua.....                                                                                                           | II.11 |
| Tabel II.7 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua.....                                                                                                  | II.12 |
| Tabel II.8 Wilayah Sungai di Provinsi Papua .....                                                                                                   | II.16 |
| Tabel II.9 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua .....                                                                                               | II.19 |
| Tabel II.10 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2022–2024 ..... | II.20 |
| Tabel II.11 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Provinsi Papua Tahun 2023-2042.....                                                                   | II.20 |
| Tabel II.12 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Provinsi Papua Tahun 2023-2042 .....                                                                   | II.21 |
| Tabel II.13 Tutupan Lahan Provinsi Papua Tahun 2024.....                                                                                            | II.22 |
| Tabel II.14 Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2024 .....                                                    | II.24 |
| Tabel II.15 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2024 .....                                       | II.25 |
| Tabel II.16 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi .....                                                                                           | II.28 |
| Tabel II.17 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi .....                                                                                      | II.28 |
| Tabel II.18 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi .....                                                                                       | II.29 |
| Tabel II.19 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi.....                                                                                               | II.30 |
| Tabel II.20 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2020-2024 .....                                                                                 | II.33 |
| Tabel II.21 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Juta Rupiah) .....                                                  | II.36 |
| Tabel II.22 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 .....                                                     | II.36 |
| Tabel II.23 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023.....                                                                 | II.37 |
| Tabel II.24 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 .....                                                     | II.37 |
| Tabel II.25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 .....                                                                         | II.39 |
| Tabel II.26 Indikator Makro Dan Indeks Daerah Tertinggal Wilayah Papua .....                                                                        | II.40 |
| Tabel II.27 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua .....                                                             | II.41 |

|                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel II.28 Indeks Desa Membangun di Provinsi Papua .....                                                                                                    | II.41 |
| Tabel II.29 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Pendidikan Tahun 2024 .....                                                                                    | II.54 |
| Tabel II.30 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Kesehatan Tahun 2024 .....                                                                                     | II.55 |
| Tabel II.31 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 .....                                                                                | II.57 |
| Tabel II.32 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Perumahan Tahun 2024 .....                                                                                     | II.59 |
| Tabel II.33 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024 .....                                                                               | II.60 |
| Tabel II.34 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Sosial Tahun 2024 .....                                                                                        | II.61 |
| Tabel II.35 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2023/2024 .....                                                                       | II.66 |
| Tabel II.36 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023 .....                                                                | II.67 |
| Tabel II.37 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023 .....                                                                 | II.68 |
| Tabel II.38 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2023.....                                              | II.68 |
| Tabel II.39 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....                                           | II.69 |
| Tabel II.40 Panjang Jalan Menurut Kewenangant di Provinsi Papua (km).....                                                                                    | II.70 |
| Tabel II.41 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km).....                                                                                                        | II.70 |
| Tabel II.42 Presentase Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua .....                                                                               | II.71 |
| Tabel II.43 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2024 .....                                                                                           | II.71 |
| Tabel II.44 Backlog Kepemilikan Rumah .....                                                                                                                  | II.73 |
| Tabel II.45 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 ..... | II.75 |
| Tabel II.46 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 .....                                  | II.77 |
| Tabel II.47 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2022 .....                                                           | II.80 |
| Tabel II.48 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa) .....                                           | II.81 |
| Tabel II.49 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 .....                        | II.82 |
| Tabel II.50 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....                           | II.82 |
| Tabel II.51 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023 .....         | II.83 |
| Tabel II.52 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023 .....    | II.84 |

|                                                                                                                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel II.53 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023 ..... | II.84  |
| Tabel II.54 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2023 .....                                                  | II.88  |
| Tabel II.55 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 .....                                                            | II.89  |
| Tabel II.56 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....                                                       | II.89  |
| Tabel II.57 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 .....                                                                    | II.91  |
| Tabel II.58 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020.....                                                                                       | II.92  |
| Tabel II.59 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020 .....                                                                                                      | II.92  |
| Tabel II.60 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua .....                                                                                           | II.94  |
| Tabel II.61 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 .                                      | II.96  |
| Tabel II.62 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha) .....                                                                                                         | II.96  |
| Tabel II.63 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya .....                                                                                                               | II.97  |
| Tabel II.64 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya .....                                                                                                               | II.98  |
| Tabel II.65 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023.....                            | II.98  |
| Tabel II.66 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020.....                                                        | II.100 |
| Tabel II.67 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar).....                                                                                                                    | II.101 |
| Tabel II.68 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa) .....                                                                                        | II.102 |
| Tabel II.69 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2022 (km/unit).....                                                                            | II.103 |
| Tabel II.70 Jumlah Penumpang menurut Pelabuhan dan Jenis Pelayaran di Provinsi Papua Tahun 2022-2023 .....                                                                       | II.104 |
| Tabel II.71 Jumlah Kapal dan Arus Barang menurut Pelabuhan di Provinsi Papua Tahun 2022-2023 .....                                                                               | II.104 |
| Tabel II.72 Jumlah Pesawat dan Penumpang pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2021-2023 .....                                                                               | II.105 |
| Tabel II.73 Jumlah Muatan Barang (Kargo) pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2022-2023 .....                                                                               | II.106 |
| Tabel II.74 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$) .....                                                              | II.107 |
| Tabel II.75 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia .....                                                                                    | II.109 |



|                                                                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel II.76 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021 .....                                  | II.110 |
| Tabel II.77 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua .....                                                                                                       | II.111 |
| Tabel II.78 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua .....                                                                      | II.114 |
| Tabel II.79 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....                                                                 | II.116 |
| Tabel II.80 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....                                                                      | II.117 |
| Tabel II.81 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan .....                                                                       | II.117 |
| Tabel II.82 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (kWh) .....                                                                            | II.118 |
| Tabel II.83 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020 .....                                                                             | II.119 |
| Tabel II.84 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua .....                                                                     | II.120 |
| Tabel II.85 PDRB Per Kapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota .....                                                                                       | II.121 |
| Tabel II.86 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua .....                                                 | II.122 |
| Tabel II.87 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler ..... | II.125 |
| Tabel II.88 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi .....                                                                           | II.125 |
| Tabel II.89 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023 .....                                                                                             | II.127 |
| Tabel II.90 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020 .....                                                             | II.127 |
| Tabel II.91 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022 .....                                     | II.127 |
| Tabel II.92 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021 .....                                                                                     | II.128 |
| Tabel II.93 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021 .....                                                                                  | II.128 |
| Tabel II.94 Kriteria Penilaian Kinerja Per Urusan Provinsi Papua .....                                                                                       | II.129 |
| Tabel II.95 Kriteria Rekapitulasi Distribusi Program Menurut Urusan .....                                                                                    | II.129 |
| Tabel II.96 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024 Menurut Organisasi Perangkat Daerah .....                                         | II.130 |
| Tabel II.97 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah .....                                                                       | II.132 |
| Tabel II.98 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya .....                                                                  | II.134 |
| Tabel II.99 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua .....                                                               | II.137 |
| Tabel II.100 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022 ...                                                                             | II.139 |
| Tabel II.101 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .....                                                                                     | II.140 |
| Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 .....                                                                                            | III.3  |

|                                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tabel III.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2026.....                                                                   | III.4  |
| Tabel III.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026.....                                                                               | III.5  |
| Gambar III.4 Pertumbuhan PDRB Papua Triwulan III-2022 – Triwulan III-2024.....                                                  | III.6  |
| Gambar III.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2021-2024<br>.....                                           | III.7  |
| Tabel III.6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Papua<br>Tahun 2021-2024 (persen).....                      | III.7  |
| Tabel III.7 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Tahun<br>2021-2024 (persen) .....                           | III.8  |
| Tabel III.8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi<br>Papua Tahun 2021-2024 (persen).....                   | III.8  |
| Tabel III.9 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun<br>2021-2024 (persen) .....                        | III.10 |
| Gambar III.10 Inflasi Nasional dan Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen).....                                                 | III.10 |
| Tabel III.11 Indikator Kemiskinan dan Persentasi Penduduk Miskin Provinsi Papua<br>Tahun 2021-2024 .....                        | III.11 |
| Gambar III.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Tahun 2021-<br>2024 (persen) .....                              | III.12 |
| Gambar III.13 Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2021-2024 .....                                                                   | III.12 |
| Tabel III.14 Target Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2026.....                                                              | III.12 |
| Gambar IV.1 Visi dan Misi Nasional 2025-2029 .....                                                                              | IV.6   |
| Tabel IV.2 Matriks Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran<br>Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026..... | IV.18  |
| Tabel IV.3 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 .....                                                                        | IV.23  |
| Tabel IV.4 Telaah Pokok Pikiran DPRP Papua .....                                                                                | IV.23  |
| Tabel IV.5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas<br>Pembangunan Daerah 2026.....                         | IV.30  |
| Tabel IV.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD 2025 dengan RKP 2025 .....                                                       | IV.32  |
| Tabel IV.7 Sasaran Target Pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Tahun 2026<br>.....                                           | IV.33  |
| Tabel IV.8 Sinkronisasi Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 .....                                                   | IV.34  |
| Tabel V.1 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di<br>Provinsi Papua.....                                  | V-10   |
| Tabel VI.1 Proyeksi APBD Provinsi Papua Tahun 2025-2029.....                                                                    | VI.1   |
| Tabel VI.2 Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 .....                                                                | VI.2   |
| Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2026.....                                                              | VII.1  |
| Tabel VII.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Tahun 2026.....                                                             | VII.4  |





# Daftar Gambar

|                                                                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar I.1 Proses Penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026.....                                                                                                                           | I.4   |
| Gambar I.2 Keterkaitan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 dengan Dokumen<br>Rencana Pembangunan Lainnya .....                                                                                  | I.9   |
| Gambar II.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua .....                                                                                                                                   | II.2  |
| Gambar II.2 Peta Wilayah Adat Provinsi Papua .....                                                                                                                                         | II.4  |
| Gambar II.3 Peta Topografi Provinsi Papua .....                                                                                                                                            | II.10 |
| Gambar II.4 Peta Wilayah Sungai Provinsi Papua.....                                                                                                                                        | II.16 |
| Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua.....                                                                                                                            | II.18 |
| Gambar II.6 Peta Klimatologi Provinsi Papua .....                                                                                                                                          | II.19 |
| Gambar II.7 Peta Pola Ruang Perda RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042 .....                                                                                                                | II.22 |
| Gambar II.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua Tahun 2019-2024.....                                                                                                                | II.24 |
| Gambar II.9 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua.....                                                                                                                              | II.27 |
| Gambar II.10 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua .....                                                                                                                    | II.29 |
| Gambar II.11 Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua .....                                                                                                                             | II.30 |
| Gambar II.12 Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua.....                                                                                                                        | II.31 |
| Gambar II.13 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2023 .....                                                                                                                             | II.34 |
| Gambar II.14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua<br>Tahun 2020-2024 .....                                                                                      | II.34 |
| Gambar II.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2023 .....                                                                                                                      | II.35 |
| Gambar II.16 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-<br>2023.....                                                                                                 | II.38 |
| Gambar II.17 Status IDM Provinsi Papua Tahun 2024 .....                                                                                                                                    | II.42 |
| Gambar II.18 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan<br>Ekstrem di Indonesia .....                                                                                      | II.43 |
| Gambar II.19 Sebaran Penduduk Miskin di Papua (<P18) .....                                                                                                                                 | II.43 |
| Gambar II.20 Lokasi Penduduk Miskin di Papua (<P18) .....                                                                                                                                  | II.44 |
| Gambar II.21 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat<br>Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<18) dengan<br>Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua ..... | II.45 |
| Gambar II.22 Persebaran Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan<br>Berat di Provinsi Papua .....                                                                              | II.45 |
| Gambar II.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi<br>Papua 2020-2024 .....                                                                                        | II.46 |
| Gambar II.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi<br>Papua Tahun 2020-2024 .....                                                                                  | II.46 |
| Gambar II.25 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2020-2024 .....                                                                                                             | II.47 |
| Gambar II.26 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi<br>Papua 2017-2023 .....                                                                                         | II.47 |



|                                                                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar II.27 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 .....                              | II.48 |
| Gambar II.28 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2023 (Tahun) .....                        | II.49 |
| Gambar II.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun) .....               | II.49 |
| Gambar II.30 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun) .....                                 | II.50 |
| Gambar II.31 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023 (Tahun) .....                                  | II.50 |
| Gambar II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun) .....                   | II.51 |
| Gambar II.33 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2024 .....                                      | II.52 |
| Gambar II.34 Urutan Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang Tahun 2024 .....                                                           | II.52 |
| Gambar II.35 Gambar II.36 Urutan Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang Tahun 2024 .....                                              | II.53 |
| Gambar II.37 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021 .....                                          | II.65 |
| Gambar II.38 Tingkat Pendidikan dan Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan di Papua, 2023 .....                                      | II.65 |
| Gambar II.39 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua .....          | II.66 |
| Gambar II.40 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua .....       | II.67 |
| Gambar II.41 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 .....                       | II.69 |
| Gambar II.42 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 .....                                    | II.74 |
| Gambar II.43 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 ..... | II.75 |
| Gambar II.44 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020 .....  | II.77 |
| Gambar II.45 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 .....                                          | II.78 |
| Gambar II.46 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022 .....                                                           | II.78 |
| Gambar II.47 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2020 .....                                                 | II.79 |
| Gambar II.48 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021 .....      | II.81 |
| Gambar II.49 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022 .....                                 | II.85 |

|                                                                                                                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar II.50 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023 .....                                      | II.86  |
| Gambar II.51 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus di Provinsi Papua 2023.....                                                                         | II.86  |
| Gambar II.52 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023 .....                                             | II.87  |
| Gambar II.53 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2023 .....                                                      | II.87  |
| Gambar II.54 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023 .....                                                     | II.88  |
| Gambar II.55 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2023 .....                                                                          | II.90  |
| Gambar II.56 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 .....                                       | II.91  |
| Gambar II.57 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)..... | II.93  |
| Gambar II.58 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.....                                                                                                               | II.93  |
| Gambar II.59 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022.....                                                                                                             | II.94  |
| Gambar II.60 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....                                                                         | II.95  |
| Gambar II.61 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022.....                                                                              | II.97  |
| Gambar II.62 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020 .....                                    | II.99  |
| Gambar II.63 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun.....                                                                                 | II.99  |
| Gambar II.64 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022 .....                                                                        | II.100 |
| Gambar II.65 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua .....                                                                                                                  | II.101 |
| Gambar II.66 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ..                                                                                            | II.102 |
| Gambar II.67 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang) .....                                                                                                             | II.102 |
| Gambar II.68 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit).....                                                                   | II.103 |
| Gambar II.69 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019.....                                       | II.108 |
| Gambar II.70 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit).....                                                                         | II.109 |
| Gambar II.71 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019 .....                                                                                              | II.111 |
| Gambar II.72 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional.....                 | II.112 |

|                                                                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Gambar II.73 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional ..... | II.113 |
| Gambar II.74 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional.....                                                                                   | II.113 |
| Gambar II.75 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016.....                                                  | II.114 |
| Gambar II.76 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2016-2021 .....                                                                                | II.115 |
| Gambar II.77 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2021 .....                                                                             | II.116 |
| Gambar II.78 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah).....                                                     | II.122 |
| Gambar IV.1 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua .....                                                                                    | IV.4   |
| Gambar IV.2 17 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Provinsi .....                                                                      | IV.8   |
| Tabel IV.3 17 Highlight Indikasi Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana di Provinsi Papua .....                                                | IV.9   |
| Gambar IV.4 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan.....                                                                                            | IV.22  |
| Gambar IV.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026 .....                                                                          | IV.28  |
| Gambar V.1 Arah Pengembangan Wilayah Adat Tabi .....                                                                                                | V.5    |
| Gambar V.2 Arah Pengembangan Wilayah Saireri .....                                                                                                  | V.6    |
| Gambar V.3 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua.....                                                                                            | V.7    |
| Gambar V.4 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042 .....                                                                         | V.8    |
| Gambar V.5 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2042 .....                                                                      | V.9    |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan menjadi kunci keberhasilan pembangunan karena melalui perencanaan pembangunan, target pembangunan dan tahapan pencapaian target pembangunan akan lebih terukur dan terarah. Dalam pelaksanaannya, untuk mampu mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien maka perencanaan pembangunan disusun dengan memastikan kesinambungan antar wilayah dan antar waktu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di level nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dilaksanakan diatur dalam satu koridor dengan kesatuan tata cara perencanaan. Dengan demikian, SPPN dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan tiga horizon waktu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 tahun.

Sesuai dengan amanat dari peraturan dan perundang-undangan tersebut, maka pada tahun ini pemerintah provinsi menyusun RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi Papua Tahun 2026 yang telah disusun sebelumnya dalam rangka mengisi kekosongan perencanaan jangka menengah sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan tahunan. RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 ini merupakan dokumen yang memiliki nilai sangat strategis dan terasa istimewa karena: (1) Akhir dari pembangunan jangka panjang periode pertama yaitu RPJPD tahun 2005-2025; (2) Awal dari tahapan pembangunan lima tahunan pertama dari RPJPD periode kedua yaitu RPJPD Tahun 2025-2045. Dengan kata lain RKPD 2026 merupakan rintisan pertama dari RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJPD Tahun 2025-2045; dan (3) Berpedoman pada dokumen RPD yang bersifat teknokratis tanpa memiliki visi dan misi kepala daerah. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan tahun 2026 memiliki fokus pada program-program pembangunan periode sebelumnya yang masih perlu dilanjutkan.

Secara substansi penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 dilakukan dengan menggunakan pendekatan THIS yaitu : Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Tematik



adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Sedangkan Holistik adalah penjabaran tematik program Kepala Daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan. Ini berarti pendekatan Tematik-Holistik adalah pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Berikutnya, pendekatan Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kepala Daerah yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Pendekatan integratif ini dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Terakhir, pendekatan Spasial adalah penjabaran program Kepala Daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Pendekatan spasial ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selain ke-4 pendekatan di atas, penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 juga menggunakan 5 (lima) pendekatan proses, yakni: teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom up). Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menyusun RKPD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Adapun pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD. Selanjutnya pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Kemudian, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, distrik, kota, provinsi, hingga nasional.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, maka sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16, penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 dilakukan secara bertahap sebagai berikut.

### **1. Persiapan Penyusunan RKPD**

Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun dokumen RKPD Tahun 2026, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.

### **2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f)

penelaahan terhadap sasaran RPJMD/ RPD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD/RPD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRP; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

### **3. Penyusunan Rancangan RKPD**

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Papua, RKP dan program strategis nasional.

### **4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

Musrenbang RKPD di Provinsi Papua meliputi tahapan persiapan, Musrenbang Kampung kabupaten/kota. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, dalam rangka antara lain, menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, program, kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program/kegiatan dengan prioritas nasional dan provinsi, dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRP, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan tokoh perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.

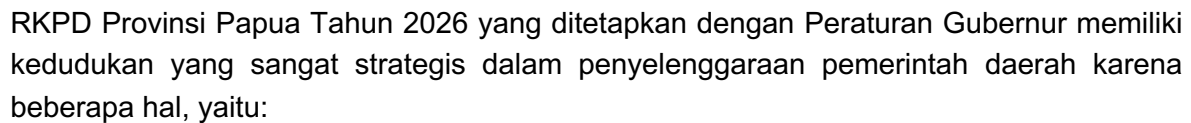
### **5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD**

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan Akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Perumusan Rancangan Akhir RKPD bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dan dikirim kepada menteri melalui Kementerian Dalam. Negeri untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD.

### **6. Penetapan RKPD tahun 206**

Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan, penetapan dan pengundangan.

**Gambar I.1 Proses Penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026**



- ## I.4 | BAB I Pendahuluan

3. Secara faktual RKPD menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disini RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Singkatnya, dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 ini mempunyai nilai strategis dan penting oleh karena : (1) dalam proses perencanaan, penganggaran dan pertanggung jawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan, maka salah satu yang memiliki fungsi dan peran cukup krusial adalah dokumen RKPD; (2) RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026; (2) RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2026; dan (3) RKPD merupakan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

## **1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  - 8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan; Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
  - 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan

- Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
- 20) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  - 21) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  - 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
  - 28) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
  - 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 30) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  - 31) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  - 32) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah Tahun 2025-2029.
  - 33) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun

- 2023 Nomo 9);
- 34) Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

### 1.3 MAKSUD dan TUJUAN

RKPD yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud:

- a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026; serta
- b. mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan RKPD adalah:

- a. sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026;
- b. menjadi landasan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
- c. sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026;
- d. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

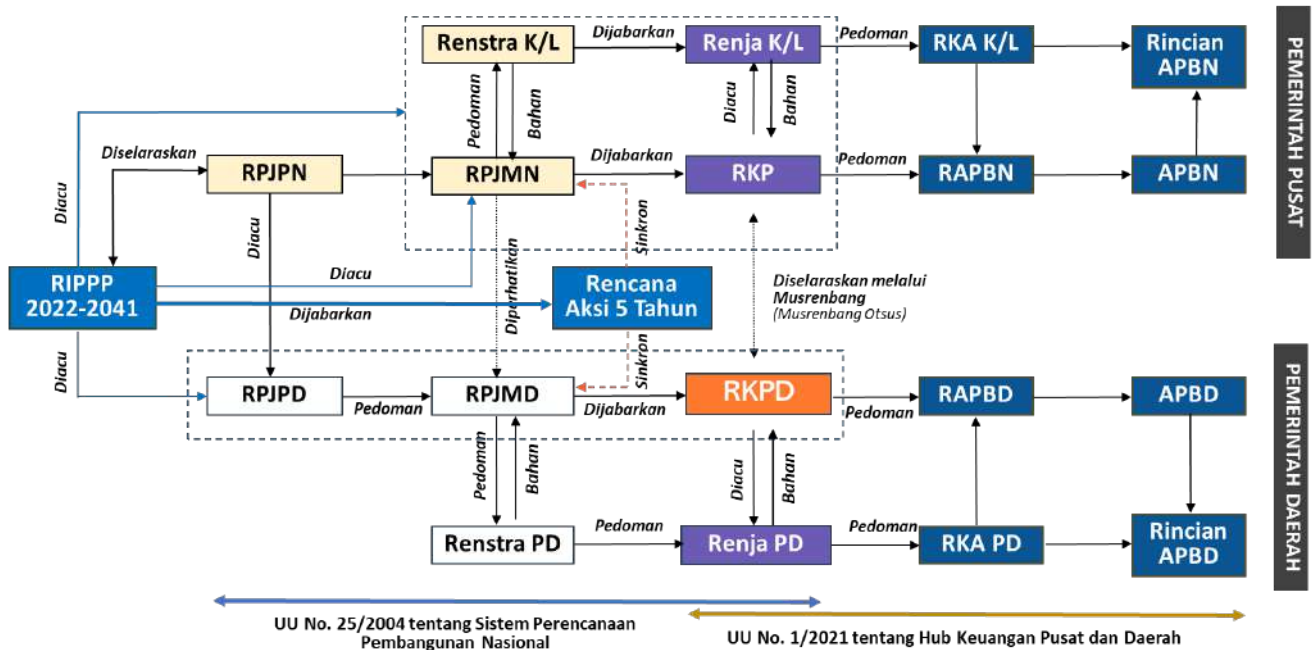
### 1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 selain disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 yang merupakan dokumen transisi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelum terpilih Gubernur yang baru, juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, RPJPD, RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

RPD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya

baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

**Gambar I.2 Keterkaitan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya**



Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD 2026 ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar I.2.

Mengacu pada Gambar I.2 tersebut dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPD,
- Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD. Dokumen ini akan bermanfaat bagi OPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program, kegiatan dan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber seperti APBN dan APBD.



- d. program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2026, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2026.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 ini selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

## **1.6 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 ini terdiri atas 8 (delapan) Bab yang saling berkaitan, sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pembahasan bab ini terdiri atas latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan RKPD Provinsi Papua 2026.

### **BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bab ini memuat kondisi umum daerah serta evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dengan memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan. Pembahasan kondisi umum daerah terdiri atas aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

### **BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Bab ini memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Bab ini memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### **BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah**

Bab ini memuat arah kebijakan pembangunan wilayah yang perlu diperhatikan Kabupaten/kota dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan agar terjadi sinergitas dalam rangka mendukung capaian pembangunan Provinsi Papua.

## **BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD 2026, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2026.

## **BAB VIII Penutup**

Bab ini memuat kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2026 yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.



# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1 Aspek Geografi

##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

###### 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Papua kurang lebih 131.582.85 km<sup>2</sup> yang terdiri atas wilayah darat seluas 82.688,37 km<sup>2</sup> atau 62,84% yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dan wilayah laut yang merupakan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai darat kearah laut sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provins seluas kurang lebih 48.894,48 km<sup>2</sup> atau 37,16% yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Secara administrasi wilayah Provinsi Papua berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cenderawasih; dan
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

**Tabel II.1 Luas Wilayah Provinsi Papua berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023**

| No             | Kabupaten/Kota  | Ibukota       | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persentase (%) |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 1              | Jayapura        | Sentani       | 14.082,62               | 17,03          |
| 2              | Kepulauan Yapen | Serui         | 2.428,42                | 2,94           |
| 3              | Biak Numfor     | Biak          | 2.260,02                | 2,73           |
| 4              | Sarmi           | Sarmi         | 14.069,02               | 17,01          |
| 5              | Keerom          | Waris         | 9.526,32                | 11,52          |
| 6              | Waropen         | Botawa        | 10.782,13               | 13,04          |
| 7              | Supiori         | Sorendiweri   | 660,69                  | 0,80           |
| 8              | Mamberamo Raya  | Burmeso       | 28.043,47               | 33,91          |
| 9              | Kota Jayapura   | Jayapura      | 835,69                  | 1,01           |
| Provinsi Papua |                 | Kota Jayapura | 82.688,37               | 100,00         |

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Secara administratif Provinsi Papua terdiri atas 9 Kabupaten/Kota (8 Kabupaten dan 1 Kota) dan mempunyai 115 Distrik serta 1.032 Kelurahan/Kampung. Kabupate/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Mamberamo Raya yakni seluas 28.043,47 km<sup>2</sup> atau 33,91 persen dari luas total Provinsi Papua, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kabupaten Supiori yakni



660,69 km<sup>2</sup> setara 0,80 persen dari luas Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi memiliki distrik terbanyak yaitu 19 distrik. Kabupaten Biak Numfor juga menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki kampung/kelurahan terbanyak yaitu 268 kampung sedangkan Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura memiliki distrik paling sedikit yaitu 5 distrik. Kabupaten Biak Numfor memiliki kampung paling terbanyak yaitu 268 kampung Kabupaten Supiori menjadi kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan paling sedikit yaitu berjumlah 38 kampung/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.1. dan Gambar II.1.

**Gambar II.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua**



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2043

**Tabel II.2 Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua Tahun 2023**

| No | Kabupaten/Kota       | Distrik    | Kampung/Kelurahan | Jumlah Pulau |
|----|----------------------|------------|-------------------|--------------|
| 1  | Kab. Jayapura        | 19         | 144               | 58           |
| 2  | Kab. Kepulauan Yapen | 16         | 165               | 142          |
| 3  | Kab. Biak Numfor     | 19         | 268               | 126          |
| 4  | Kab. Sarmi           | 19         | 111               | 1            |
| 5  | Kab. Keerom          | 11         | 91                | 15           |
| 6  | Kab. Waropen         | 12         | 117               | 1            |
| 7  | Kab. Supiori         | 5          | 38                | 164          |
| 8  | Kab. Mamberamo Raya  | 9          | 59                | 2            |
| 9  | Kota Jayapura        | 5          | 39                | 19           |
|    | <b>TOTAL</b>         | <b>115</b> | <b>1.032</b>      | <b>527</b>   |

Sumber: BPS, Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial ST2023, Kondisi 2022 Semester 1 dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024



**Tabel II.3 Jumlah Kampung/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan Geografi dan Topografi Wilayah di Provinsi Papua Tahun 2014-2021**

| Kabupaten             | Letak Geografi |            |            |                 |              |              | Topografi Wilayah |            |            |               |              |              |              |              |              |
|-----------------------|----------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | Tepi Laut      |            |            | Bukan Tepi Laut |              |              | Lembah            |            |            | Lereng/Puncak |              |              | Dataran      |              |              |
|                       | 2014           | 2018       | 2021       | 2014            | 2018         | 2021         | 2014              | 2018       | 2021       | 2014          | 2018         | 2021         | 2014         | 2018         | 2021         |
| Jayapura              | 24             | 24         | 25         | 120             | 120          | 119          | 30                | 22         | 6          | 23            | 28           | 95           | 91           | 94           | 43           |
| Kepulauan Yapen       | 142            | 142        | 115        | 23              | 23           | 50           | 12                | 21         | 2          | 38            | 4            | 130          | 115          | 140          | 33           |
| Sarmi                 | 64             | 64         | 59         | 46              | 46           | 52           | 5                 | 5          | 2          | 1             | 1            | 39           | 104          | 104          | 70           |
| Keerom                | -              | -          | -          | 61              | 91           | 91           | 9                 | 13         | 5          | 2             | 4            | 40           | 50           | 74           | 46           |
| Waropen               | 39             | 53         | 19         | 41              | 64           | 92           | 17                | -          | 1          | -             | 26           | 37           | 63           | 91           | 73           |
| Supiori               | 38             | 38         | 38         | -               | -            | -            | -                 | -          | -          | -             | -            | 31           | 38           | 38           | 7            |
| Mamberamo Raya        | 3              | 3          | 9          | 56              | 56           | 50           | 9                 | 9          | -          | 6             | 6            | 7            | 44           | 44           | 52           |
| Kota Jayapura         | 21             | 22         | 23         | 18              | 17           | 16           | 3                 | 3          | -          | 1             | 2            | 28           | 35           | 34           | 11           |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>646</b>     | <b>662</b> | <b>590</b> | <b>4.225</b>    | <b>4.890</b> | <b>4.965</b> | <b>551</b>        | <b>644</b> | <b>162</b> | <b>2.452</b>  | <b>2.638</b> | <b>3.836</b> | <b>1.868</b> | <b>2.270</b> | <b>1.557</b> |

\*Catatan : Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan nagari di Provinsi Sumatera Barat, Data citra satelit yang sudah dikonfirmasi oleh aparat desa. Kategori Lereng/Puncak termasuk juga Tebing.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes) dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

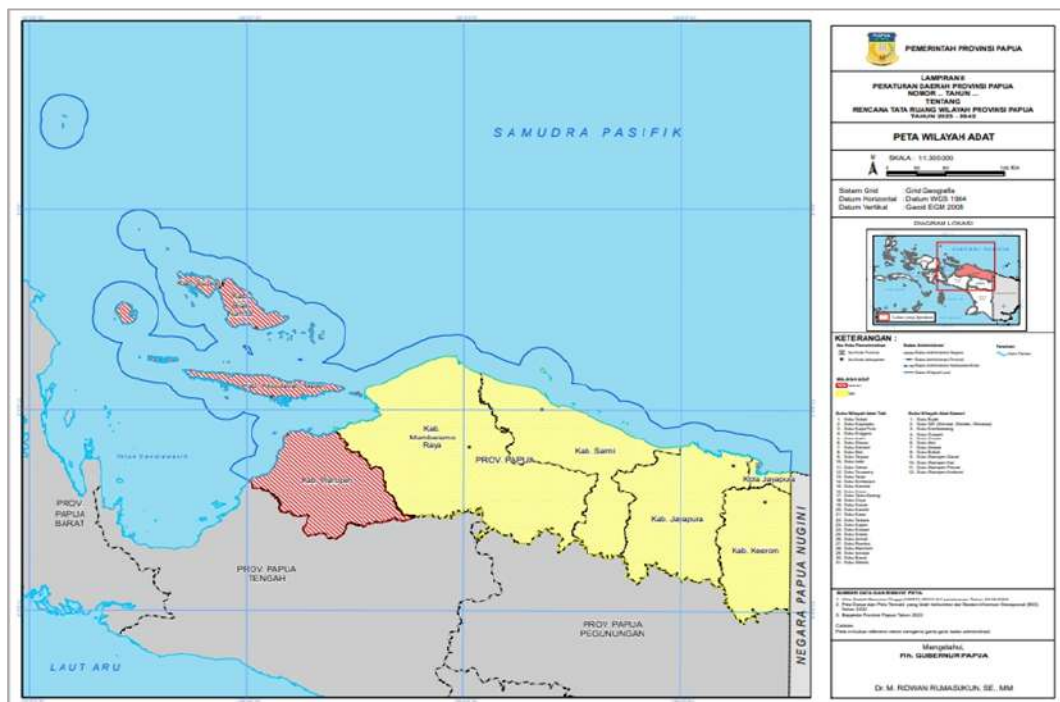
Wilayah adat mencakup 2 wilayah yang berada di ruang darat dan maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang ditunjukkan pada Gambar II.2. Secara budaya, keduanya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar beberapa kabupaten sebagai berikut:

- a. Wilayah Mamta/TABI meliputi:
  - 1) Kota Jayapura,
  - 2) Kabupaten Jayapura,
  - 3) Kabupaten Keerom,
  - 4) Kabupaten Sarmi, dan
  - 5) Kabupaten Mamberamo Raya
- b. Wilayah Saireri meliputi:
  - 1) Kabupaten Biak Numfor,
  - 2) Kabupaten Supiori,
  - 3) Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
  - 4) Kabupaten Waropen.

#### 2.1.1.1.2 Posisi Astronomis

Provinsi Papua secara geografis berada di antara garis koordinat 1° 8' 20.862" LU - 4° 6' 58.620" LS dan 134° 5' 58.860" - 141° 0' 37.593" BT. Wilayah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua adalah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut dengan luas kurang lebih 4.889.448 hektar yang terdiri dari 9 kabupaten/kota dan memiliki 527 Pulau. Berdasarkan data BIG tahun 2018, Provinsi Papua memiliki 4 pulau yang terluar yang merupakan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi di Kabupaten Supiori dan Pulau Liki di Kabupaten Sarmi.

**Gambar II.2 Peta Wilayah Adat Provinsi Papua**



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

### 2.1.1.1.3 Kondisi/Kawasan

#### a. Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang RTRW Provinsi Papua, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Papua diantaranya meliputi sistem pusat permukiman, yang meliputi PKN, PKW, PKSN dan PKL. Kawasan perkotaan dalam Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel Tabel II.4.

**Tabel II.4 Kawasan Perkotaan dalam Sistem Pusat Pemukiman**

| No | Pusat Kegiatan                | Lokasi                                                                                            | Fungsi                                                                  |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pusat Kegiatan Nasional (PKN) | 1. Kota Jayapura<br>2. Sebagian Kabupaten Jayapura                                                | Melayani Kegiatan Skala Internasional, Nasional atau Beberapa Provinsi. |
| 2  | Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)  | 1. Biak di Kabupaten Biak Numfor;<br>2. Sarmi di Kabupaten Sarmi;<br>3. Arso di Kabupaten Keerom. | Melayani Kegiatan Skala Provinsi atan Beberapa Kabupaten/Kota.          |

| No | Pusat Kegiatan                           | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fungsi                                                   |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3  | Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) | 1. Jayapura di Kota Jayapura;<br>2. Biak di Kabupaten Biak Numfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mendorong Pengembangan Kawasan Perbatasan Negera.        |
| 4  | Pusat Kegiatan Lokal (PKL)               | 1. Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura;<br>2. Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura;<br>3. Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor;<br>4. Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor;<br>5. Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor;<br>6. Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom;<br>7. Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom;<br>8. Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi;<br>9. Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;<br>10. Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen;<br>11. Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen;<br>12. Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen;<br>13. Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori;<br>14. Perkotaan Sorendiwari di Kabupaten Supiori;<br>15. Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya; dan<br>16. Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya. | Melayani Kegiatan Skala Kabupaten atau Beberapa Distrik. |

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

#### b. Kawasan Pedalaman

Kawasan pedalaman merupakan daerah yang terletak jauh dari pusat-pusat urbanisasi atau daerah yang lebih berkembang. Kawasan ini sering kali memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang membedakannya dari wilayah perkotaan dan semiperkotaan. Secara keseluruhan, kawasan pedalaman memainkan peran penting dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan. Upaya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas hidup di daerah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah gambaran umum mengenai kondisi kawasan pedalaman di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Geografi.
- b. Aksesibilitas.
- c. Infrastruktur
- d. Ekonomi dan Mata Pencaharian

- e. Budaya dan Masyarakat
- f. Lingkungan dan Ekosistem

Secara keseluruhan, kawasan pedalaman Papua adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, sambil tetap menghargai dan melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan yang ada.

Kawasan pedalaman di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya, sebagian Distrik di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori.

### **c. Kawasan Terpencil**

Kawasan terpencil merupakan kawasan yang terletak jauh dari pusat kegiatan ekonomi, administrasi, dan sosial. Kawasan ini biasanya memiliki akses yang terbatas dan sering kali menghadapi berbagai tantangan terkait dengan infrastruktur, layanan dasar, dan integrasi dengan pusat-pusat utama. Kawasan terpencil di Provinsi Papua menghadapi berbagai tantangan unik yang mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Berikut adalah gambaran kondisi umum di kawasan terpencil di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Geografi dan Aksesibilitas
- b. Infrastruktur
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan
- e. Ekonomi
- f. Kesejahteraan Sosial
- g. Isolasi Sosial dan Budaya
- h. Konservasi dan Lingkungan
- i. Upaya Pembangunan

Secara keseluruhan, kawasan terpencil di Provinsi Papua menghadapi tantangan yang memerlukan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Upaya yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah ini. Kawasan terpencil di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, sebagian distrik di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

### **d. Kawasan Pesisir**

Kawasan pesisir merupakan area di sepanjang garis pantai di mana daratan bertemu dengan lautan, sungai, atau danau besar. Kawasan ini mencakup wilayah yang memiliki karakteristik khusus dan fungsi ekologis serta sosial yang penting. Kondisi kawasan pesisir di Provinsi Papua sangat beragam dan mencerminkan keunikan geografis serta tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara kosisten darat dan laut yang dipengaruhi oleh

perubahan di darat dan laut. Berikut adalah gambaran umum tentang kondisi kawasan pesisir di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek yaitu:

- a. Geografi dan Karakteristik
  - 1) Topografi:
    - Pantai dan Delta.
    - Pulau dan Kepulauan.
  - 2) Ekosistem:
    - Hutan Mangrove.
    - Terumbu Karang.
- b. Kondisi Lingkungan
  - 1) Keanekaragaman Hayati:
    - Flora dan Fauna.
    - Kawasan Konservasi.
  - 2) Risiko Lingkungan:
    - Perubahan Iklim.
    - Kerusakan Lingkungan.
- c. Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi
  - 1) Mata Pencaharian:
    - Perikanan.
    - Pariwisata.
  - 2) Infrastruktur :
    - Aksesibilitas
    - Layanan Publik.
  - 3) Pembangunan Berkelanjutan:
    - Program Pembangunan.

Kawasan pesisir di Provinsi Papua memiliki keanekaragaman yang luar biasa serta potensi ekonomi dan ekologis yang besar. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur memerlukan perhatian dan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kawasan Pesisir di Provinsi Papua terletak di sepanjang pesisir Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen. Sementara Kawasan pesisir terdapat juga di Kabupaten Kepulauan meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori dan Kepulauan Yapen.

#### **e. Kawasan Pegunungan**

Pegunungan adalah *landform* yang memiliki signifikansi atas perbedaan dibandingkan dengan lapisan tanah sekitarnya, biasanya membentuk seperti puncak dan teksturnya lebih curam, lebih tinggi, dan lebih menonjol daripada arti perbukitan. Kawasan pegunungan di Provinsi Papua terdapat mulai dari Kota Jayapura sampai dengan Kabupaten Waropen. Terdapat 10 Kawasan Pegunungan di Provinsi Papua yaitu:

- 1) Kawasan Pegunungan Puja di Kabupaten Sarmi
- 2) Kawasan Pegunungan Vanres di Kabupaten Mamberamo Raya



- 3) Kawasan Pegunungan Gautier di Kabupaten Sarmi.
- 4) Kawasan Pegunungan Siduari di Kabupaten Sarmi
- 5) Kawasan Pegunungan Foju di Kabupaten Sarmi
- 6) Kawasan Pegunungan Baugenville di Kota Jayapura
- 7) Kawasan Pegunungan Djar di Kota Jayapura
- 8) Kawasan Pegunungan Karamor di Kabupaten Sarmi

Sementara jumlah gunung di Provinsi Papua sebanyak: 383, yang tersebar di 6 Kabupaten dan 1 Kota kecuali Kabupaten Biak dan Kabupaten Supiori.

#### **f. Kawasan Kepulauan**

Kawasan kepulauan adalah suatu kumpulan pulau yang berada dalam satu wilayah geografis tertentu. Menurut ahli geografi definisi kawasan kepulauan adalah kumpulan pulau yang sering kali membentuk suatu unit geologis atau ekosistem. Misalnya, kepulauan vulkanik terbentuk dari aktivitas gunung berapi yang menciptakan pulau-pulau baru, sedangkan kepulauan karst terbentuk dari proses pelarutan batuan kapur. Sedangkan menurut ahli ekologi: Kepulauan adalah kumpulan pulau yang dapat memiliki hubungan ekologis satu sama lain, misalnya dalam hal migrasi spesies atau dinamika ekosistem. Dalam konteks ini, kepulauan dapat dianggap sebagai unit ekologi yang penting untuk memahami hubungan antar pulau dan konservasi spesies.

Kepulauan di Provinsi Papua memiliki beberapa karakteristik yang khas, mencerminkan keragaman geografis, biologis, dan budaya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kepulauan di Provinsi Papua dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

- 1) Geografi dan Topografi:
- 2) Keanekaragaman Hayati:
- 3) Kultur dan Etnis:
- 4) Ekonomi dan Infrastruktur:

Kepulauan Papua merupakan wilayah yang sangat beragam dan kompleks, dengan berbagai karakteristik yang mempengaruhi kehidupan dan lingkungan di sana. Keunikan geografis dan budaya menjadikannya salah satu wilayah yang paling menarik untuk dipelajari dan dilestarikan.

Jumlah pulau di Provinsi Papua sejumlah 540 pulau, dengan perincian 512 pulau terletak membentang dari Kabupaten Waropen sampai Kota Jayapura dan dikelilingi oleh lautan termasuk pulau-pulau yang berada di Kabupaten Biak, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara 28 pulau lainnya berada ditengah-tengah Danau Sentani Kabupaten Jayapura.

#### **g. Kawasan Perbatasan**

Menurut UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan

pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Berdasarkan penjelasan atas UU nomor 43 tahun 2008, sisi terluar dari wilayah negara atau wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka dibutuhkan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup sesuai dengan batas-batasnya.

Berikut adalah karakteristik dan aspek-aspek penting dari Kawasan Perbatasan yaitu:

- a. Karakteristik Kawasan Perbatasan
- b. Menurut Soegijoko (1994:154) terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang mendasari karakteristik daerah perbatasan yaitu sosial ekonomi, pertahanan keamanan dan politis.
- c. Aspek Kunci dari Kawasan Perbatasan yaitu:
  - 1) Pengaturan Hukum dan Keamanan: Perbatasan sering memerlukan pengawasan untuk menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pencegahan pelanggaran.
  - 2) Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti pos perbatasan, jalan, dan jembatan untuk memfasilitasi administrasi dan mobilitas di sepanjang perbatasan.
  - 3) Kerjasama dan Diplomasi: Perbatasan internasional sering kali memerlukan kerjasama antar negara untuk mengelola isu-isu bersama dan menyelesaikan sengketa.
  - 4) Hak dan Kewajiban: Perbatasan menentukan hak dan kewajiban terkait sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap warga negara.
  - 5) Resolusi Sengketa: Dalam kasus sengketa perbatasan, penyelesaian biasanya melibatkan dialog diplomatik, perjanjian resmi, atau intervensi internasional.

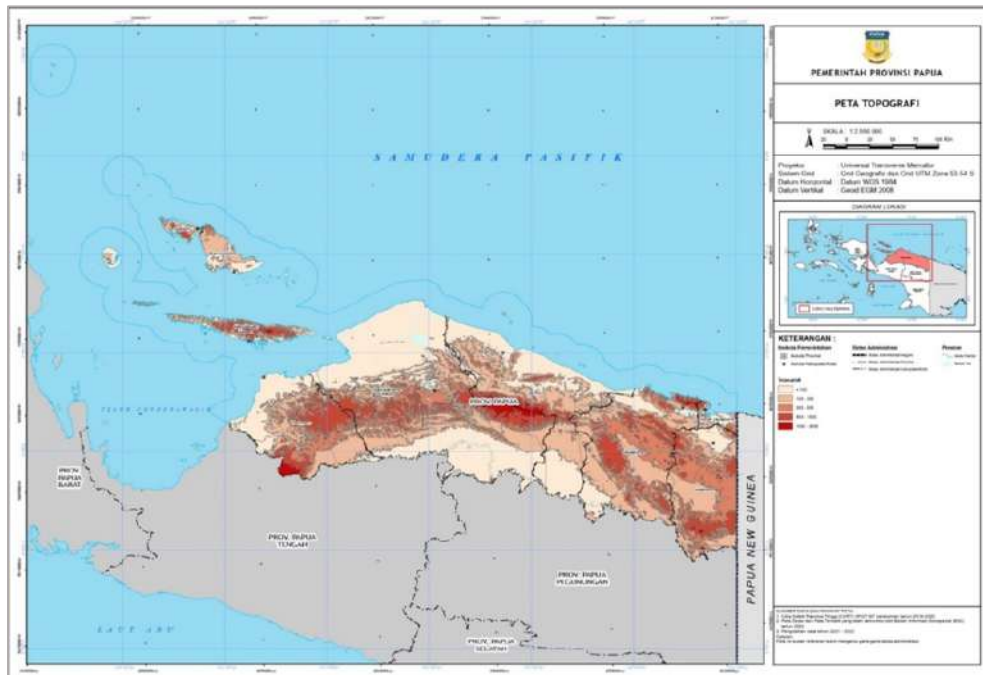
Secara umum, perbatasan memainkan peran penting dalam pengaturan wilayah, pengelolaan sumber daya, dan interaksi antara entitas yang berbeda, baik dalam konteks negara, administrasi, maupun sosial.

Terdapat 1 Kota yaitu Kota Jayapura dan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom berbatasan darat dengan Negara Papua Nugini. Terdapat 3 (tiga) titik pelintasan utama di daerah perbatasan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura dan 2 (dua) titik lagi di Kabupaten Keerom yaitu di Distrik Arso Timur dan Distrik Waris. Untuk Distrik Arso Timur belum ada PLBNnya, sementara untuk Distrik Waris rencana tahun depan (2025) akan dibangun PLBN tipe C. Sementara Kabupaten Supiori berbatasan laut dengan Negara Palau.

### **2.1.1.2 Topografi**

Topografi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Provinsi Papua didominasi oleh dataran (39,20%) yang berada di bagian pesisir selatan (terluas) dan pesisir utara, dan pegunungan (60,79%) yang berada di bagian tengah wilayah provinsi. Morfologi dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas yaitu sebesar 5.027.142,57 ha (53,3%). Sedangkan ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit dengan luas sebesar 3.241.694.74 ha (39,20%). Berikut peta topografi yang dapat dilihat pada Gambar II.3.

**Gambar II.3 Peta Topografi Provinsi Papua**



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Ketinggian di wilayah Provinsi Papua cenderung memiliki elevasi yang beragam, yaitu 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl, dan >3000 mdpl. Wilayah dengan elevasi 0-100 mdpl memiliki luas sebesar 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl sebesar 5.025.909 ha, dan elevasi >3000 mdpl sebesar 1.233,57 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yang memiliki elevasi 0-100 mdpl dan 100-3000 mdpl dengan luas masing-masingnya adalah 1.360.180,62 ha dan 1.444.166,45 ha. Sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan wilayah elevasi >3000 mdpl terluas yaitu seluas 1.233,57 ha. Tingkat elevasi kabupaten/kota di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Tabel II.5.

**Tabel II.5 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua**

| Elevasi (Mdpl) | Kabupaten/Kota  | Area (Ha)    |
|----------------|-----------------|--------------|
| 0-100          | Mamberamo Raya  | 1,360,180.62 |
|                | Sarmi           | 626,262.05   |
|                | Waropen         | 746,554.32   |
|                | Jayapura        | 185,319.99   |
|                | Biak Numfor     | 116,564.00   |
|                | Keerom          | 75,299.98    |
|                | Kepulauan Yapen | 69,214.21    |
|                | Supiori         | 25,702.05    |
|                | Kota Jayapura   | 36,597.52    |
| 0-100 Total    |                 | 3.241.694.74 |
| 100-3000       | Jayapura        | 1,222,941.63 |
|                | Mamberamo Raya  | 1,444,166.45 |

| Elevasi (Mdpl)    | Kabupaten/Kota  | Area (Ha)    |
|-------------------|-----------------|--------------|
|                   | Keerom          | 876,097.99   |
|                   | Sarmi           | 780,639.91   |
|                   | Waropen         | 331,658.57   |
|                   | Kepulauan Yapen | 173,628.00   |
|                   | Biak Numfor     | 109,437.70   |
|                   | Kota Jayapura   | 46,971.47    |
| Elevasi<br>(mdpl) |                 |              |
|                   | Kabupaten       | Area (ha)    |
|                   | Supiori         | 40,367.28    |
| 100-3000 Total    |                 | 5.025.909    |
| >3000             | Keerom          | 1,233.57     |
| >3000 Total       |                 | 1,233.57     |
| Grand Total       |                 | 8.268.837.32 |

Sumber: Perda Provinsi Papua No. 9/2023 tentang RTRWP Papua Tahun 2023-2042

Tingkat kemiringan lereng seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.5, diklasifikasikan dalam beberapa rentang, yaitu 0-8%, 15-25%, 25-45%, dan > 45%. Kemiringan lereng 0-8 % seluas 3.849.082,03 ha, 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, 25-45% seluas 1.013.710,94 ha, dan >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% dan 15-25% terluas dengan masing-masing luasnya sebesar 1.517.691,61 ha dan 484.150,73 ha. Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 8-15% terluas sebesar 360.181,45 ha, diikuti Kabupaten Sarmi dengan kemiringan lereng >45% terluas sebesar 57.217,56 ha. Tingkat kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Provinsi Papua adalah landai (0-8%) dengan persentase sebesar 45,9% dan sangat terjal (>40%) sebesar 43,3%.

**Tabel II.6 Kelerengan Provinsi Papua**

| No                   | Kemiringan Lereng | Kabupaten/Kota  | Area (Ha)           |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1                    | 0-8 %             | Mamberamo Raya  | 1,517,691.61        |
|                      |                   | Sarmi           | 786,828.96          |
|                      |                   | Jayapura        | 550,385.44          |
|                      |                   | Keerom          | 433,272.53          |
|                      |                   | Waropen         | 516,193.64          |
|                      |                   | Biak Numfor     | 186,892.61          |
|                      |                   | Kepulauan Yapen | 38,772.07           |
|                      |                   | Supiori         | 19,971.85           |
|                      |                   | Kota Jayapura   | 56,722.06           |
| <b>Total 0 – 8 %</b> |                   |                 | <b>4,106,730.77</b> |
| 2                    | 8-15%             | Jayapura        | 295,881.08          |
|                      |                   | Mamberamo Raya  | 478,660.73          |
|                      |                   | Sarmi           | 191,828.18          |
|                      |                   | Keerom          | 179,566.75          |
|                      |                   | Waropen         | 257,370.93          |
|                      |                   | Kepulauan Yapen | 26,625.90           |
|                      |                   | Biak Numfor     | 18,831.22           |

| No                   | Kemiringan Lereng | Kabupaten/Kota  | Area (Ha)           |
|----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                      |                   | Supiori         | 13,209.59           |
|                      |                   | Kota Jayapura   | 13,741.82           |
| <b>Total 8–15 %</b>  |                   |                 | <b>1,475,716.20</b> |
| 3                    | 15-25%            | Mamberamo Raya  | 484,150.73          |
|                      |                   | Jayapura        | 350,131.45          |
|                      |                   | Sarmi           | 215,357.06          |
|                      |                   | Keerom          | 194,529.88          |
|                      |                   | Waropen         | 200,660.97          |
|                      |                   | Kepulauan Yapen | 60,503.87           |
|                      |                   | Supiori         | 19,902.39           |
|                      |                   | Biak Numfor     | 12,683.64           |
|                      |                   | Kota Jayapura   | 17,129.85           |
| <b>Total 15-25%</b>  |                   |                 | <b>1,555,049.84</b> |
| 4                    | 25-45%            | Mamberamo Raya  | 310,648.06          |
|                      |                   | Jayapura        | 188,532.54          |
|                      |                   | Sarmi           | 155,670.20          |
|                      |                   | Keerom          | 129,997.55          |
|                      |                   | Waropen         | 101,890.17          |
|                      |                   | Kepulauan Yapen | 96,899.04           |
|                      |                   | Supiori         | 11,410.49           |
|                      |                   | Biak Numfor     | 6,625.39            |
|                      |                   | Kota Jayapura   | 12,037.50           |
| <b>Total 25-45%</b>  |                   |                 | <b>1,013,710.94</b> |
| 5                    | >45%              | Sarmi           | 47,217.56           |
|                      |                   | Jayapura        | 16,331.11           |
|                      |                   | Kepulauan Yapen | 19,911.49           |
|                      |                   | Keerom          | 15,264.83           |
|                      |                   | Mamberamo Raya  | 13,195.94           |
|                      |                   | Waropen         | 2,097.18            |
|                      |                   | Supiori         | 1,575.01            |
|                      |                   | Biak Numfor     | 968.84              |
|                      |                   | Kota Jayapura   | 1,067.61            |
| <b>&gt;45% Total</b> |                   |                 | <b>117,629.57</b>   |
| <b>Grand Total</b>   |                   |                 | <b>8,268,837.32</b> |

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2023

### 2.1.1.3 Jenis Tanah

Beberapa jenis tanah di Provinsi Papua di antaranya adalah jenis tanah entisol, inceptisol, mollisol, histosol, dan ultisol. Luas jenis tanah yang ada di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.7.

**Tabel II.7 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua**

| Jenis Tanah | Kabupaten/Kota           | Area (Ha) |
|-------------|--------------------------|-----------|
| Entisols    | Kabupaten Sarmi          | 95.060,48 |
|             | Kabupaten Mamberamo Raya | 57.806,27 |
|             | Kabupaten Waropen        | 48.955,23 |
|             | Kabupaten Jayapura       | 45.312,74 |



| Jenis Tanah                 | Kabupaten/Kota            | Area (Ha)           |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
|                             | Kota Jayapura             | 34.151,52           |
|                             | Kabupaten Keerom          | 31.502,84           |
|                             | Kabupaten Supiori         | 9.428,63            |
| <b>Entisols Total</b>       |                           | <b>322.217,71</b>   |
| Inceptisols                 | Kabupaten Mamberamo Raya  | 1.477.352,81        |
|                             | Kabupaten Sarmi           | 913.496,30          |
|                             | Kabupaten Jayapura        | 620.843,28          |
|                             | Kabupaten Waropen         | 166.698,33          |
|                             | Kabupaten Keerom          | 98.038,18           |
|                             | Kabupaten Kepulauan Yapen | 26.293,22           |
|                             | Kota Jayapura             | 17.811,94           |
|                             | Kabupaten Supiori         | 6.316,86            |
| <b>Inceptisols Total</b>    |                           | <b>3.326.850,92</b> |
| Mollisols                   | Kabupaten Biak Numfor     | 163.713,81          |
|                             | Kabupaten Jayapura        | 57.414,34           |
|                             | Kabupaten Kepulauan Yapen | 9.020,44            |
|                             | Kabupaten Supiori         | 834,76              |
|                             | Kabupaten Sarmi           | 310,87              |
| <b>Mollisols Total</b>      |                           | <b>231.294,22</b>   |
| Histosols                   | Kabupaten Mamberamo Raya  | 597.148,74          |
|                             | Kabupaten Waropen         | 128.925,63          |
|                             | Kabupaten Sarmi           | 29.634,57           |
|                             | Kabupaten Keerom          | 3.690,51            |
|                             | Kabupaten Biak Numfor     | 959,97              |
|                             | Kabupaten Kepulauan Yapen | 957,40              |
|                             | Kota Jayapura             | 891,31              |
|                             | Kabupaten Supiori         | 448,21              |
|                             | Kabupaten Jayapura        | 211,33              |
| <b>Histosols Total</b>      |                           | <b>762.867,67</b>   |
| Ultisols                    | Kabupaten Keerom          | 795.344,59          |
|                             | Kabupaten Jayapura        | 702.901,07          |
|                             | Kabupaten Mamberamo Raya  | 359.557,57          |
|                             | Kabupaten Sarmi           | 356.243,64          |
|                             | Kabupaten Waropen         | 238.450,11          |
|                             | Kabupaten Kepulauan Yapen | 204.626,59          |
|                             | Kabupaten Biak Numfor     | 60.764,33           |
|                             | Kabupaten Supiori         | 50.073,73           |
|                             | Kota Jayapura             | 57,38               |
| <b>Ultisols Total</b>       |                           | <b>2.768.019,01</b> |
| Tidak Ada Data              | Kota Jayapura             | 8.428,14            |
|                             | Kabupaten Sarmi           | 2.345,23            |
|                             | Kabupaten Waropen         | 294,52              |
|                             | Kabupaten Supiori         | 3,96                |
|                             | Kabupaten Biak Numfor     | 0,40                |
|                             | Kabupaten Jayapura        | 0,12                |
| <b>Tidak Ada Data Total</b> |                           | <b>11.072,37</b>    |
| Tubuh Air                   | Kabupaten Mamberamo Raya  | 71.983,24           |

| Jenis Tanah            | Kabupaten/Kota            | Area (Ha)           |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
|                        | Kota Jayapura             | 21.692,73           |
|                        | Kabupaten Sarmi           | 13.701,46           |
|                        | Kabupaten Keerom          | 13.341,30           |
|                        | Kabupaten Waropen         | 3.463,13            |
|                        | Kabupaten Kepulauan Yapen | 83,22               |
|                        | Kabupaten Biak Numfor     | 14,21               |
| <b>Tubuh Air Total</b> |                           | <b>124.279,29</b>   |
| <b>Grand Total</b>     |                           | <b>7.546.601,19</b> |

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Adapun jenis-jenis tanah di Provinsi Papua terbagi dalam lima jenis yang dijabarkan sebagai berikut.

#### a. Entisol

Jenis tanah yang berkembang dari bahan asal atau bahan induknya dan pembentukannya terjadi oleh beberapa akibat seperti iklim yang sangat kering sehingga reaksi kimia dan pelapukan terjadi sangat lambat, erosi kuat sehingga bahan yang tererosi lebih banyak dari yang terbentuk, pengendapan terus-menerus, dan jenuh air yang menghambat perkembangan horison. Tanah entisol cocok untuk pertanian khususnya di daerah endapan sungai. Provinsi Papua memiliki jenis tanah entisol seluas 322.217,71 ha yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori.

#### b. Inceptisol

Jenis tanah yang belum matang dan masih menyerupai bahan induknya. Tanah inceptisol digunakan secara bergaam untuk pertanian maupun non pertanian. Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah inceptisol memiliki luas 3.326.850292 ha yang berada di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Supiori.

#### c. Mollisol

Jenis tanah yang terbentuk dari proses pembentukan tanah berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Tanah mollisol sebagian besar digunakan untuk pertanian. Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah mollisol memiliki luas 231.294,22 ha yang berada pada beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Sarmi.

#### d. Histosol

Jenis tanah yang terbentuk akibat penimbunan bahan organik yang lebih besar dari mineralisasinya dan terbentuk pada tempat yang tergenang air sehingga sirkulasi oksigen terhambat dan terjadi akumulasi bahan organik. Agar dapat digunakan untuk usaha pertanian, perbaikan drainase perlu dilakukan bagi tanah histosol. Tanah histosol dapat digunakan untuk bertanam sayur, bawang merah, padi, dan sebagainya. Wilayah di

Provinsi Papua memiliki tanah histosol seluas 762.867,67 ha yang berada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Jayapura.

#### **a. Ultisol**

Jenis tanah yang sudah berkembang dan memiliki horison argilik, bersifat masam dan kejenuhan basa rendah (<35%). Penggunaan tanah ini sedikit memiliki kendala karena reaksi masam, kejenuhan basa rendah, kadar aluminium tinggi yang dapat meracuni tanaman, unsur hara rendah, dan fiksasi fosfor yang tinggi. Wilayah di Provinsi Papua memiliki jenis tanah ultisol seluas 2.768.019,01 ha yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura.

### **2.1.1.4 Stratigrafi**

Provinsi Papua secara garis besar dibedakan dalam 3 kelompok stratigrafi, yaitu batuan Kraton Australia, batuan Lempeng Pasifik, dan batuan campuran dari kedua lempeng tersebut. Batuan Kraton Australia tersusun dari batuan alas, batuan malihan dengan derajat rendah hingga tinggi, dan sebagiannya diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat.

### **2.1.1.5 Tektonik**

Terdapat 2 mandala struktur geologi terpenting di Provinsi Papua berdasarkan peristiwa tektonik regional, di antaranya:

#### **a. Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)**

Berada pada daerah Pegunungan Tengah Papua, jalur sesar sungkup berarah timur barat dan memiliki panjang 100 km. Batu gamping New Guinea menjadi satuan litologi yang paling dominan di JNSPT dengan ketebalan 2000 m. Bentuk daerah JNSPT termodifikasi pada awal Pliosen diduga terbentuk dari penebalan batuan kerak. Perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan menjadi awal tempat Gautier (*The Gautier off set*).

#### **b. Jalur Sesar Naik Mamberamo**

Terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) serta memanjang 100 km ke arah selatan sehingga menggeser sedikit-demi sedikit batuan Plio–Pleistosen Formasi–Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang berada di bawahnya.

### **2.1.1.6 Hidrologi**

Hidrologi berkaitan dengan karakteristik kuantitas dan kualitas air di bumi menurut waktu dan ruang. Hidrologi dapat terbentuk oleh proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen, Kondisi Hidrologi di Provinsi Papua dapat dilihat dari banyaknya sungai yang ada. Banyaknya daerah aliran



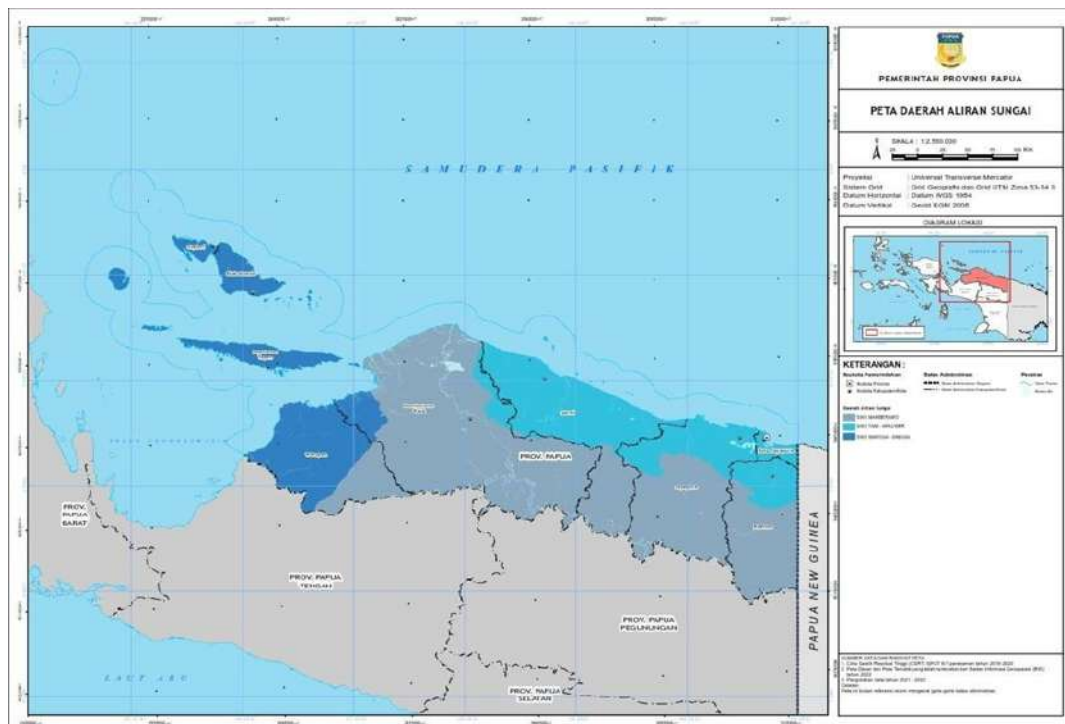
| No.                                  | Kewenangan Wilayah Sungai | Kabupaten                   | DAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                           |                             | <ul style="list-style-type: none"><li>DAS Sentani (Kab. Jayapura dan Kota Jayapura)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |                           | 3) Kabupaten Sarmi          | <ul style="list-style-type: none"><li>DAS Muwar (Kab. Sarmi dan Mamberamo Raya)</li><li>DAS Nenkam</li><li>DAS Woske</li><li>DAS Bu</li><li>DAS Bier</li><li>DAS Biri (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura)</li><li>DAS Niki</li><li>DAS Orai</li></ul>                                                                                |
|                                      |                           | 4) Kabupaten Mamberamo Raya | DAS Rambori<br>DAS Gesa<br>DAS Andarwaren<br>DAS Manembo<br>DAS Wakamba<br>DAS Waremburi<br>DAS Idomba<br>DAS Apiri<br>DAS Mamberamo (Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Kab. Jayapura, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah)<br>DAS Marest<br>DAS Apauvar<br>DAS Kurudu |
| Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A                                    | WS Wapoga-Mimika          | 1) Kabupaten Supiori        | <ul style="list-style-type: none"><li>DAS Bepondi</li><li>DAS Rusdori</li><li>DAS Wafordori</li><li>DAS Waradokdo</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
|                                      |                           | 2) Kabupaten Biak Numfor    | <ul style="list-style-type: none"><li>DAS Surdori</li><li>DAS Sarwodari</li><li>DAS Korem</li><li>DAS Wardo</li><li>DAS Owi</li><li>DAS Auki</li><li>DAS Pai</li><li>DAS Padaidori</li><li>DAS Bromsi</li><li>DAS Numfor</li></ul>                                                                                              |
|                                      |                           | 3) Kabupaten Mamberamo Raya | <ul style="list-style-type: none"><li>DAS Sorabi</li><li>DAS Bariworo</li><li>DAS Barapasi</li><li>DAS Naduboi</li><li>DAS Rawiwa</li><li>DAS Wankai</li><li>DAS Sosoro</li></ul>                                                                                                                                               |
|                                      |                           | 4) Kabupaten Waropen        | <ul style="list-style-type: none"><li>DAS Waron</li><li>DAS Wanasanu</li><li>DAS Boi</li><li>DAS Binatanaboa</li><li>DAS Sanoringga</li><li>DAS Sabia</li><li>DAS Rombak</li><li>DAS Rondisi</li></ul>                                                                                                                          |



| No. | Kewenangan Wilayah Sungai | Kabupaten                    | DAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Dambo</li> <li>• DAS Seram</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                           | 5) Kabupaten Kepulauan Yapen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAS Wadapi</li> <li>• DAS Menawi</li> <li>• DAS Borai</li> <li>• DAS Amboi</li> <li>• DAS Mariadey</li> <li>• DAS Warui</li> <li>• DAS Pamawari</li> <li>• DAS Sumbu</li> <li>• DAS Koanda</li> <li>• DAS Sasawa</li> <li>• DAS Parida</li> <li>• DAS Papuma</li> <li>• DAS Ansus</li> <li>• DAS Marau</li> <li>• DAS Antunai</li> <li>• DAS Jauri</li> <li>• DAS Aibondeni</li> <li>• DAS Kairawi</li> <li>• DAS Wooi</li> </ul> |

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

**Gambar II.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua**



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

Cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Papua dibagi berdasarkan 2 kewenangan yaitu CAT dalam wilayah provinsi dan CAT lintas negara. CAT dalam wilayah Provinsi Papua meliputi CAT Numfor, CAT Warsa, CAT Biak, CAT Pom, CAT Ansar, CAT Serui, CAT Samberdada,

CAT Waren-Demta, CAT Taritatu, Cat Hulu S. Senggi, CAT Timur Arso, CAT Lereh-Leweh dan CAT Ubrub. CAT di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.8.

Tabel II.9 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua

| No | Kewenangan                 | Cekungan Air Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CAT dalam wilayah Provinsi | a. CAT Pom di Kabupaten Yapen Waropen<br>b. CAT Ansar di Kabupaten Yapen Waropen<br>c. CAT Serui di Kabupaten Yapen Waropen<br>d. CAT Samberdada di Kabupaten Kepulauan Yapen<br>e. CAT Waren-Demta di Kab. Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura<br>f. CAT Taritatu di Kab. Waropen, Sarmi, Jayapura, Keerom<br>g. Cat Hulu S. Senggi di Kabupaten Keerom<br>h. CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom<br>i. CAT Lereh-Leweh di Kabupaten Keerom dan Jayapura<br>j. CAT Ubrub di Kabupaten Keerom |
| 2  | CAT lintas negara          | CAT Jayapura di Kabupaten Jayapura dan Keerom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

2.1.1.7 Klimatologi

Klimatologi merupakan salah satu hal terpenting dalam melihat perubahan iklim selama beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim menjadi salah satu isu internasional untuk menjaga lingkungan. Klimatologi berkaitan akan dampaknya bagi kelangsungan hidup penduduk dilihat dari perubahan iklim yang terjadi serta pola dan perilaku suatu penduduk. Klimatologi dilihat dari rata-rata temperatur, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan atmosfer. Peta klimatologi di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.6.

Gambar II.6 Peta Klimatologi Provinsi Papua



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

Hasil catatan pengamatan BMKG yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Sentani dalam mengamati unsur iklim sebagai komponen data klimatologi ditunjukkan pada Berdasarkan

data tahun 2022-2025, diketahui bahwa rata-rata suhu dan tekanan udara tertinggi terjadi pada tahun 2022, untuk kelembaban tertinggi pada tahun 2025 sedangkan kecepatan angin pada tahun 2022.

**Tabel II.10 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2022–2024**

| Unsur Iklim              | 2022   |           |          | 2023    |           |          | 2024    |           |        |
|--------------------------|--------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|--------|
|                          | Min.   | Rata-Rata | Maks.    | Min.    | Rata-Rata | Maks.    | Min.    | Rata-Rata | Maks.  |
| Suhu (°C)                | 22,60  | 27,03     | 35,00    | 22,60   | 27,03     | 35,00    | 22,60   | 27,07     | 33,28  |
| Kelembaban (%)           | 45,00  | 77,74     | 93,00    | 45,00   | 77,74     | 93,00    | 45,00   | 83,57     | 98,19  |
| Kecepatan Angin (m/det)  | -      | 4,06      | 24,00    | -       | 4,06      | 24,00    | -       | 3,19      | 15,11  |
| Tekanan Udara(mb)        | 991,20 | 997,04    | 1.002,60 | 991,20  | 997,04    | 1.002,60 | 991,20  | 990,02    | 994,54 |
| Jumlah Curah Hujan (mm)  | 217,40 |           |          | 1641,60 |           |          | 2867,60 |           |        |
| Jumlah Hari Hujan (hari) | 25,00  |           |          | 242,00  |           |          | 296,00  |           |        |
| Penyinaran Matahari (%)  | 2,45   |           |          | 4,70    |           |          | 4,84    |           |        |

\*Catatan: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Provinsi Papua dalam Angka 2023-2025

### 2.1.1.8 Penggunaan Lahan

#### A. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 luas Kawasan budidaya 8.884.607,79 Ha atau sekitar 69,75 % yang di dalam kawasan budidaya termasuk luas wilayah laut 4.101.800,35 ha yang merupakan Kawasan perikanan dalam Pola Ruang.

**Tabel II.11 Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya Provinsi Papua Tahun 2023-2042**

| No | Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya                                            | Luas (ha)    | Persentase (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1  | Kawasan Hutan Produksi                                                             | 3,272,076.39 | 25.69          |
| 2  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pariwisata                                          | 562.10       | 0.00           |
| 3  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perikanan                                           | 2,050.92     | 0.02           |
| 4  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Perkebunan Rakyat                                   | 124,653.13   | 0.98           |
| 5  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman                                          | 33,342.84    | 0.26           |
| 6  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian                                           | 643,434.71   | 5.05           |
| 7  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri                                 | 68.18        | 0.00           |
| 8  | Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Transportasi                                        | 84.31        | 0.00           |
| 9  | Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman                                              | 1,399.08     | 0.01           |
| 10 | Kawasan Konservasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan                                 | 29.88        | 0.00           |
| 11 | Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian                                               | 1,138.08     | 0.01           |
| 12 | Kawasan Konservasi/Kawasan Transportasi                                            | 235.71       | 0.00           |
| 13 | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan | 78,68        | 0,00           |

| No                            | Jenis Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya                                                          | Luas (ha)           | Persentase (%) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 14                            | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman              | 653,72              | 0,01           |
| 15                            | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertahanan dan Keamanan | 235,47              | 0,00           |
| 16                            | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian               | 17,805,24           | 0,14           |
| 17                            | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi            | 541,15              | 0,00           |
| 18                            | Kawasan Pariwisata                                                                               | 72,545.77           | 0.57           |
| 19                            | Kawasan Perikanan                                                                                | 4,101,800.35        | 32.20          |
| 20                            | Kawasan Perkebunan Rakyat                                                                        | 8,655.92            | 0,07           |
| 21                            | Kawasan Permukiman                                                                               | 209,208.97          | 1.64           |
| 22                            | Kawasan Pertahanan dan Keamanan                                                                  | 1,232.91            | 0.01           |
| 23                            | Kawasan Pertambangan dan Energi                                                                  | 20,63               | 0,00           |
| 24                            | Kawasan Pertanian                                                                                | 377,194.44          | 2.96           |
| 25                            | Kawasan Peruntukan Industri                                                                      | 7,702.71            | 0.06           |
| 26                            | Kawasan Transportasi                                                                             | 27,170.74           | 0.21           |
| <b>Total Kawasan Budidaya</b> |                                                                                                  | <b>8.903.922,05</b> | <b>69,90</b>   |

Sumber : Perda No. 9 Tahun 2023 RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Dari tabel II.11 menunjukkan bahwa Kawasan Budidaya terbesar ada di Kawasan Perikanan seluas 4.099.677 hektar atau 43,31 % Kawasan perikanan tersebut merupakan wilayah laut dari 0-12 mil yang merupakan kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah Provinsi dan Kawasan hutan produksi seluas 4.061.078 hektar atau 42,90% sedangkan proporsi terkecil untuk Kawasan budidaya yaitu pertambangan dan energi seluas 20 hektar atau 0,001%

## B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup SDA dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 3.844.508 hektar atau sekitar 29,21% dari luas wilayah Provinsi Papua, termasuk di dalamnya wilayah laut 0-12 mil, (Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042).

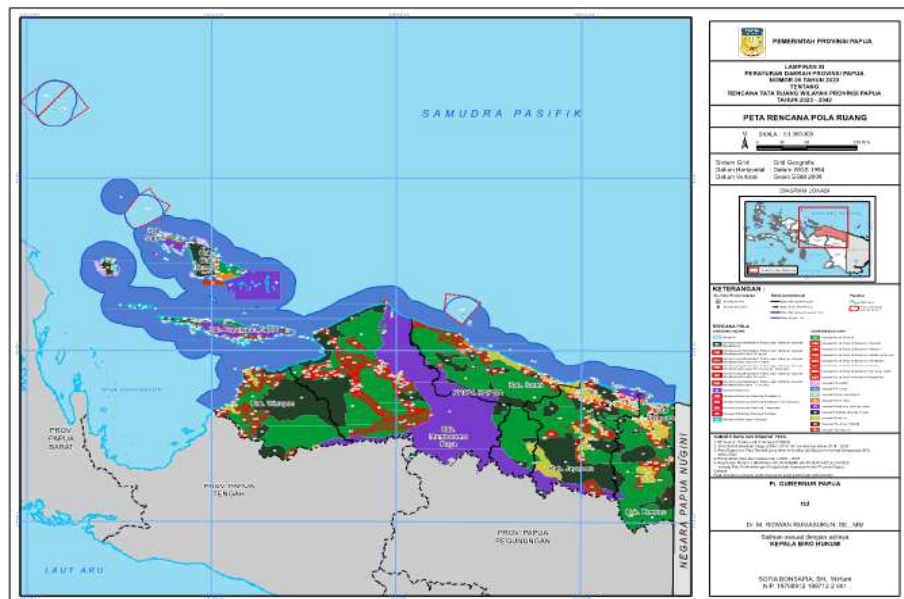
**Tabel II.12 Penggunaan Lahan Kawasan Lindung Provinsi Papua Tahun 2023-2042**

| No | Kawasan Lindung                                                                                  | Luas (ha) | Persen (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya                                 | 1.875.799 | 48,79      |
| 2  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Perikanan               | 78        | 0,00       |
| 3  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Permukiman              | 652       | 0,02       |
| 4  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertahanan dan Keamanan | 236       | 0,01       |
| 5  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian               | 17.724    | 0,46       |
| 6  | Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Transportasi            | 541       | 0,01       |
| 7  | Kawasan Konservasi                                                                               | 1.925.868 | 50,09      |
| 8  | Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman                                                            | 1.399     | 0,04       |

| No                          | Kawasan Lindung                                    | Luas (ha)        | Persen (%)    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 9                           | Kawasan Konservasi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan | 30               | 0,00          |
| 10                          | Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian               | 1.135            | 0,03          |
| 11                          | Kawasan Konservasi/Kawasan Transportasi            | 236              | 0,01          |
| 12                          | Kawasan Perlindungan Setempat                      | 5.408            | 0,14          |
| 13                          | Badan Air                                          | 15.402           | 0,40          |
| <b>Luas Kawasan Lindung</b> |                                                    | <b>3.844.508</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2023 RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

**Gambar II.7 Peta Pola Ruang Perda RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042**



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

### 2.1.1.9 Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh tutupan lahan hutan lahan kering primer sebesar 5.029,862,23 ha atau 60,83%, hutan lahan kering sekunder/bekas tegalan seluas 1.111.482,47 ha atau 13,44 % dan hutan rawa primer seluas 1.093.951,28 ha atau 13,23 % terhadap luas wilayah provinsi. Tutupan lahan di Provinsi Papua selain hutan terkecil adalah tambak seluas 708,48 ha atau 0,001, bandara/Pelabuhan seluas 685,63 ha atau 0,01%.

**Tabel II.13 Tutupan Lahan Provinsi Papua Tahun 2024**

| No | Tutupan Lahan                              | Luas (ha)    | Prosentase (%) |
|----|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1  | Bandara/Pelabuhan                          | 685,63       | 0.01           |
| 2  | Hutan Lahan Kering Primer                  | 5.029.862,23 | 60.83          |
| 3  | Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan | 1.111.482,47 | 13.44          |
| 4  | Hutan Mangrove Primer                      | 102.931,15   | 1.24           |
| 5  | Hutan Mangrover Seklunder                  | 52.181,44    | 0.63           |
| 6  | Hutan Rawa Primer                          | 1.093.951,28 | 13.23          |
| 7  | Hutan Rawa Sekunder                        | 293.158,72   | 3.55           |
| 8  | Hutan Tanaman                              | 0,00         | -              |
| 9  | Permukiman/Lahan Terbangun                 | 28.370,06    | 0.34           |
| 10 | Perkebunan/ kebun                          | 44.004,58    | 0.53           |
| 11 | Pertanian Lahan Kering                     | 26.770,88    | 0.32           |
| 12 | Pertanian Lahan Kering Campur Semak        | 107.383,88   | 1.30           |



| No                 | Tutupan Lahan        | Luas (ha)           | Prosentase (%) |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 13                 | Rawa                 | 16.116,03           | 0.19           |
| 14                 | Savana/Padang Rumput | 12.188,40           | 0.15           |
| 15                 | Sawah                | 4.177,48            | 0.05           |
| 16                 | Semak Belukar        | 74.133,70           | 0.90           |
| 17                 | Semak Belukar Rawa   | 117.021,94          | 1.42           |
| 18.                | Tambak               | 708,48              | 0.01           |
| 19.                | Pertambangan         | 0,00                | -              |
| 20.                | Tanah Terbuka        | 10.562,25           | 0.13           |
| 21                 | Transmigrasi         | 13.374,83           | 0.16           |
| 22                 | Tubuh Air            | 129.771,88          | 1.57           |
| <b>Grand Total</b> |                      | <b>8,268,837.31</b> | <b>100,00</b>  |

**Gambar II.7 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022**



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

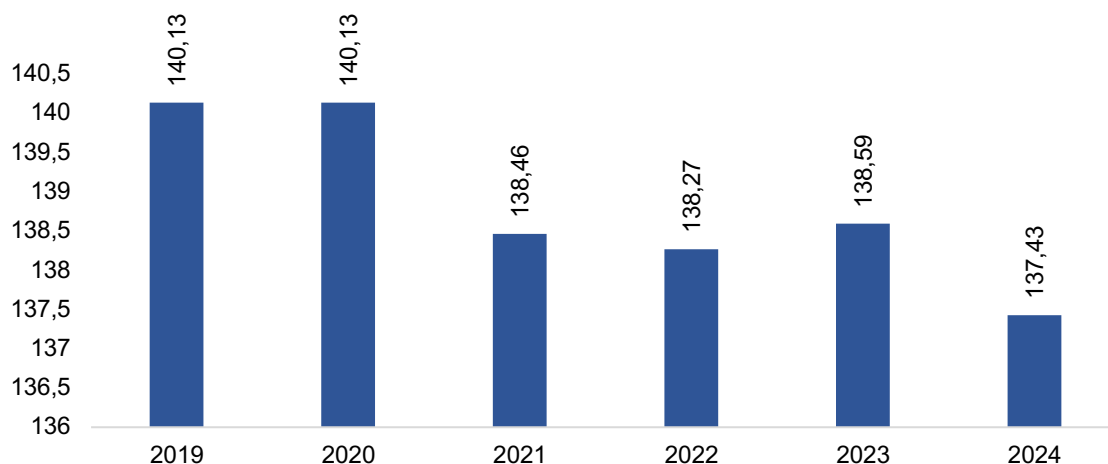
#### 2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Papua dilalui oleh dua lempeng benua yaitu Australia dan Samudera Pasifik aktif serta dikelilingi dua samudera besar yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Papua secara geografis memiliki berbagai kerawanan akan bencana. Guna mengantisipasi bencana, diperlukan adanya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat bersifat preventif, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Provinsi Papua rawan terhadap bencana geologi berupa gempa bumi dan gerakan tanah. Pergerakan ini juga dapat menyebabkan tsunami yang dapat terjadi pada beberapa daerah rawan bencana tsunami seperti Pulau Biak, Yapen, dan bagian utara Kabupaten Waropen. Pengukuran risiko bencana di Indonesia diukur melalui indeks risiko bencana yang dilihat berdasarkan tiga faktor utama yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*).

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua periode 2019–2024, menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana mengalami penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Nilai IRB

tercatat sebesar 140,13 pada tahun 2019 dan 2020, kemudian turun menjadi 138,46 (2021), 138,27 (2022), 138,59 (2023), dan mencapai titik terendah pada tahun 2024 dengan nilai 137,43. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui mitigasi, kesiapsiagaan, maupun penanganan pascabencana, telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, nilai IRB yang masih berada di atas 100 menandakan bahwa Papua tetap merupakan wilayah dengan kategori risiko bencana menengah hingga tinggi, sehingga diperlukan terus menerus upaya strategis untuk memperkuat ketahanan dan adaptasi masyarakat serta infrastruktur terhadap ancaman bencana.

**Gambar II.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua Tahun 2019-2024**



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB (data diolah)

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2019–2024, terlihat bahwa tiga kabupaten memiliki kategori risiko tinggi, yaitu Jayapura (199,01), Sarmi (172,50), dan Mamberamo Raya (165,60). Sementara itu, enam wilayah lainnya masuk dalam kategori risiko sedang, dengan nilai IRB berkisar antara 92,40 (Supiori) hingga 140,00 (Waropen).

Kota Jayapura menunjukkan penurunan risiko yang signifikan dari 143,94 (2019) menjadi 103,94 (2024), mencerminkan upaya mitigasi yang efektif. Sebaliknya, Kabupaten Sarmi mengalami peningkatan risiko dari 166,98 (2019) menjadi 172,50 (2024). Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan risiko di beberapa wilayah, tantangan utama masih terletak pada kabupaten dengan risiko tinggi yang memerlukan intervensi lebih intensif untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

**Tabel II.14 Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2024**

| Kabupaten/Kota | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Kelas Risiko |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Jayapura       | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 203,20 | 199,01 | tinggi       |
| Sarmi          | 166,98 | 166,98 | 166,98 | 169,63 | 172,50 | 172,50 | tinggi       |
| Mamberamo Raya | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | tinggi       |
| Waropen        | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | sedang       |
| Biak Numfor    | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | 138,40 | sedang       |

| Kabupaten/Kota  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Kelas Risiko |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Keerom          | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | 127,20 | sedang       |
| Kota Jayapura   | 143,94 | 143,94 | 128,86 | 114,40 | 114,40 | 103,94 | sedang       |
| Kepulauan Yapen | 83,48  | 83,48  | 83,48  | 93,60  | 93,60  | 93,60  | sedang       |
| Supiori         | 92,40  | 92,40  | 92,40  | 92,40  | 92,40  | 92,40  | sedang       |

Sumber: BNPB dalam dokumen "Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2019-2023"

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) per ancaman di Provinsi Papua Tahun 2024, tiga kabupaten dengan risiko tertinggi secara keseluruhan adalah Jayapura (199,01), Sarmi (172,50), dan Mamberamo Raya (165,60). Ketiganya memiliki skor tinggi untuk hampir semua jenis bencana, terutama banjir, gempabumi, kekeringan, dan tanah longsor. Kabupaten Jayapura bahkan menghadapi ancaman tinggi dari seluruh jenis bencana kecuali cuaca ekstrem yang termasuk kategori sedang.

Di wilayah dengan risiko sedang, seperti Waropen (140,00) dan Biak Numfor (138,40), ancaman dominan berasal dari kekeringan, tsunami, serta gelombang ekstrem dan abrasi. Kota Jayapura (103,94) menunjukkan profil risiko yang lebih rendah, dengan hanya banjir dan kekeringan yang termasuk dalam kategori tinggi, sementara ancaman lainnya seperti gempabumi dan tsunami berada pada tingkat sedang.

Kabupaten dengan risiko terendah, seperti Kepulauan Yapen (93,60) dan Supiori (92,40), masih menghadapi beberapa ancaman tinggi, khususnya gempabumi, tsunami, dan kekeringan. Namun, intensitas dan cakupan risikonya lebih terbatas dibandingkan kabupaten dengan IRB tinggi.

Secara keseluruhan, banjir dan kekeringan merupakan ancaman yang paling umum dan serius di hampir semua wilayah, diikuti oleh gempabumi dan tanah longsor. Data ini menggarisbawahi perlunya strategi mitigasi yang spesifik untuk setiap jenis bencana dan kondisi lokal, serta penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat di seluruh provinsi.

**Tabel II.15 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2024**

| Kabupaten | Nilai IRB | Kelas Risiko | Jenis Bencana                | Skor  | Kelas Risiko |
|-----------|-----------|--------------|------------------------------|-------|--------------|
| Jayapura  | 199,01    | Tinggi       | Banjir                       | 36,00 | Tinggi       |
|           |           |              | Gempabumi                    | 32,40 | Tinggi       |
|           |           |              | Tsunami                      | 14,40 | Tinggi       |
|           |           |              | Karhutla                     | 24,00 | Tinggi       |
|           |           |              | Tanah Longsor                | 36,00 | Tinggi       |
|           |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 17,60 | Tinggi       |
|           |           |              | Kekeringan                   | 36,00 | Tinggi       |
|           |           |              | Cuaca Ekstrim                | 6,80  | Sedang       |
| Sarmi     | 172,50    | Tinggi       | Banjir                       | 33,58 | Tinggi       |
|           |           |              | Gempabumi                    | 13,43 | Tinggi       |
|           |           |              | Tsunami                      | 22,39 | Tinggi       |
|           |           |              | Karhutla                     | 15,67 | Tinggi       |
|           |           |              | Tanah Longsor                | 23,51 | Tinggi       |
|           |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 19,03 | Tinggi       |

| Kabupaten       | Nilai IRB | Kelas Risiko | Jenis Bencana                | Skor  | Kelas Risiko |
|-----------------|-----------|--------------|------------------------------|-------|--------------|
| Mamberamo Raya  | 165,60    | Tinggi       | Kekeringan                   | 29,11 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 3,36  | Rendah       |
|                 |           |              | Banjir                       | 36,00 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gempabumi                    | 21,60 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tsunami                      | 19,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 20,40 | Tinggi       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 31,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 3,60  | Rendah       |
| Waropen         | 140,00    | Sedang       | Banjir                       | 36,00 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gempabumi                    | 14,40 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tsunami                      | 14,40 | Tinggi       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 13,60 | Tinggi       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 20,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 7,20  | Sedang       |
| Biak Numfor     | 138,40    | Sedang       | Gempabumi                    | 14,40 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tsunami                      | 24,00 | Tinggi       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 25,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 20,00 | Tinggi       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 31,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 6,80  | Sedang       |
| Keerom          | 127,20    | Sedang       | Banjir                       | 36,00 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gempabumi                    | 14,40 | Tinggi       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 25,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 31,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 3,60  | Rendah       |
| Kota Jayapura   | 103,94    | Sedang       | Banjir                       | 18,26 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gempabumi                    | 10,95 | Sedang       |
|                 |           |              | Tsunami                      | 8,11  | Sedang       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 4,26  | Rendah       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 8,52  | Sedang       |
|                 |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 10,14 | Sedang       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 15,82 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 3,45  | Rendah       |
| Kepulauan Yapen | 93,60     | Sedang       | Gempabumi                    | 21,60 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tsunami                      | 24,00 | Tinggi       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 8,40  | Sedang       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 25,20 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 13,60 | Tinggi       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 20,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 3,60  | Rendah       |
| Supiori         | 92,40     | Sedang       | Gempabumi                    | 14,40 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tsunami                      | 6,40  | Sedang       |
|                 |           |              | Karhutla                     | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Tanah Longsor                | 16,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Gelombang Ekstrim dan Abrasi | 13,60 | Tinggi       |
|                 |           |              | Kekeringan                   | 20,80 | Tinggi       |
|                 |           |              | Cuaca Ekstrim                | 3,60  | Rendah       |

Sumber: IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023, BNPB

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi. Jenis bencana dengan risiko kerawanan tinggi di Provinsi Papua antara lain adalah tanah longsor, banjir bandang, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrem.

**Gambar II.9 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua**



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Wilayah rawan bencana di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan beberapa jenis bencana yang terjadi di antaranya adalah gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan bencana alam lainnya yang berpotensi membawa bencana. Masing-masing jenis bencana dijabarkan sebagai berikut.

#### **a. Gempa Bumi**

Terdapat 2 mandala struktur geologi terpenting di Provinsi Papua berdasarkan peristiwa tektonik regional, di antaranya:

##### **1) Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)**

Berada pada daerah Pegunungan Tengah Papua, jalur sesar sungkup berarah timur barat dan memiliki panjang 100 km. Batu gamping New Guinea menjadi satuan litologi yang paling dominan di JNSPT dengan ketebalan 2000 m. Bentuk daerah JNSPT termodifikasi pada awal Pliosen diduga terbentuk dari penebalan batuan kerak. Perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan menjadi awal tempat Gautier (*The Gautier off set*).

##### **2) Jalur Sesar Naik Mamberamo**

Terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) serta memanjang 100 km ke arah selatan sehingga menggeser sedikit-demi sedikit batuan Plio–Pleistosen Formasi–Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang berada di bawahnya.

Provinsi Papua rawan gempa bumi akibat dari tatanan tektonik di Pulau New Guinea. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana gempa bumi



dan tsunami berdasarkan kajian kerawanan bencana gempa bumi di Indonesia. Adapun tingkat kerawanan gempa bumi berada di jalur pegunungan tengah hingga bagian utara Pulau Papua tergolong menengah hingga tinggi dengan percepatan tanah maksimal. Berdasarkan catatan Balai BMKG wilayah V Jayapura, sebanyak lebih dari 2600 kali terjadi gempa bumi di Provinsi Papua pada tahun 1988-2007. Gempa bumi kuat dan dapat merusak berpusat di sekitar Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, dan Jayapura.

**Tabel II.16 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi**

| NO           | KABUPATEN/KOTA  | JUMLAH (ha)         | PROPORSI (%) |
|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 1            | Jayapura        | 667,913.15          | 19.94        |
| 2            | Kepulauan Yapen | 195,268.72          | 5.83         |
| 3            | Biak Numfor     | 124.55              | 0.00         |
| 4            | Sarmi           | 624,831.77          | 18.66        |
| 5            | Keerom          | 36,642.82           | 1.09         |
| 6            | Waropen         | 65,968.39           | 1.97         |
| 7            | Supiori         | 30.85               | 0.00         |
| 8            | Mamberamo Raya  | 1,698,934.93        | 50.73        |
| 9            | Kota Jayapura   | 59,148.48           | 1.77         |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>3,348,863.66</b> | <b>100</b>   |

*Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042*

Daerah rawan gempa bumi di Provinsi Papua berada di satu wilayah yaitu pulau Biak-Yapen yang secara umum berada di bagian utara pegunungan tengah Papua. Gempa bumi yang biasa terjadi adalah gempa tektonik yang terjadi akibat tubrukan dari dua lempeng. Gempa dangkal sering kali berhubungan dengan aktivitas sesar yang ada di jalur pegunungan tengah Papua. Gempa yang terjadi akibat pergerakan sesar Sorong secara berkelanjutan dirasakan di Pulau Biak dan Yapen serta dapat terjadi di darat dan di bawah laut. Wilayah dengan bahaya gempa bumi tinggi ditunjukkan pada Tabel II.16.

#### **a. Longsor**

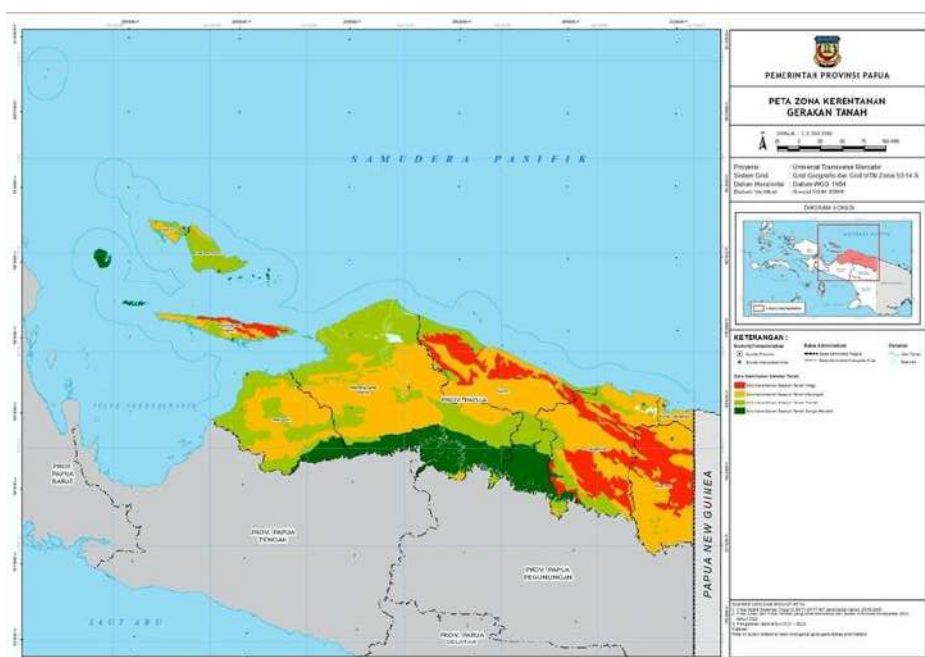
Longsor terbagi dalam 3 kategori yaitu zona kerentanan gerakan tanah tinggi, zona kerentanan gerakan tanah menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah rendah. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah dengan tingkat kerentanan tinggi yang dapat terkena gerakan tanah. Zona kerentanan gerakan tanah menengah merupakan daerah dengan tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah dan zona kerentanan gerakan tanah rendah merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah.

**Tabel II.17 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi**

| No           | Kabupaten/Kota  | Jumlah (Ha)       | Proporsi (%) |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1            | Jayapura        | 219,388.10        | 51.68        |
| 2            | Kepulauan Yapen | 58,886.97         | 13.87        |
| 3            | Biak Numfor     |                   | 0.00         |
| 4            | Sarmi           | 53,175.90         | 12.53        |
| 5            | Keerom          | 87,688.31         | 20.66        |
| 6            | Waropen         | 0                 | 0.00         |
| 7            | Supiori         | 0                 | 0.00         |
| 8            | Mamberamo Raya  | 3,044.21          | 0.72         |
| 9            | Kota Jayapura   | 2,314.49          | 0.55         |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>424,497.98</b> | <b>100</b>   |

*Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042*

**Gambar II.10 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua**



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Provinsi Papua berada pada daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi khususnya pada jalur pegunungan tengah dan pegunungan utara Papua. Bahaya longsor tinggi di Provinsi Papua meliputi seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Jayapura menjadi wilayah dengan bahaya longsor tinggi terluas diikuti Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

## b. Banjir

Banjir terjadi akibat beberapa faktor di antaranya curah hujan yang tinggi dan lama, lokasi topografi yang cenderung datar dengan pola sungai berbelok-belok dan dataran banjir yang luas, keadaan tanah maupun batuan yang lambat dalam meresap air, dan kapasitas sungai yang penuh sehingga tidak memungkinkan untuk menampung dan mengalirkan air ke laut.

**Tabel II.18 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi**

| No           | Kabupaten/Kota  | Jumlah (Ha)       | Proporsi (%) |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1            | Jayapura        | 48,859.59         | 8.24         |
| 2            | Kepulauan Yapen | 739.34            | 0.12         |
| 3            | Biak Numfor     | 1,318.71          | 0.22         |
| 4            | Sarmi           | 63,365.16         | 10.68        |
| 5            | Keerom          | 26,972.71         | 4.55         |
| 6            | Waropen         | 62,418.33         | 10.52        |
| 7            | Supiori         | 282.66            | 0.05         |
| 8            | Mamberamo Raya  | 385,285.77        | 64.95        |
| 9            | Kota Jayapura   | 3,939.93          | 0.66         |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>593,182.20</b> | <b>100</b>   |

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Wilayah rawan banjir di Provinsi Papua berada di bagian pesisir utara yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Waropen seperti terlihat pada Gambar II.11. Bahaya banjir tinggi terdapat pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan

wilayah bahaya banjir terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya diikuti Kabupaten Sarmi dan Waropen.

**Gambar II.11 Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua**



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

### c. Tsunami

Provinsi Papua melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2006, mencatat kejadian tsunami di Provinsi Papua tepatnya di pulau Yapen pada tahun 1900, 1914, 1957, 1979, dan 1996. Wilayah rawan tsunami di Provinsi Papua diprediksi berada di bagian pesisir utara Papua termasuk semenanjung Wondama (Teluk Cenderawasih). Terdapat 8 kabupaten/kota dengan risiko tsunami tinggi di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki area rawan tsunami tinggi terluas diikuti Kepulauan Yapen dan Sarmi. Wilayah dan bahaya tsunami tinggi ditunjukkan pada Tabel II.16.

**Tabel II.19 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi**

| No           | Kabupaten/Kota  | Jumlah (Ha)      | Proporsi (%) |
|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1            | Jayapura        | 503.16           | 2.37         |
| 2            | Kepulauan Yapen | 3,429.65         | 16.13        |
| 3            | Biak Numfor     | 2,749.78         | 12.93        |
| 4            | Sarmi           | 3,062.08         | 14.40        |
| 5            | Keerom          | 1,171.63         | 5.51         |
| 6            | Waropen         | 1,812.36         | 8.52         |
| 7            | Supiori         | 7,886.21         | 37.09        |
| 8            | Mamberamo Raya  | 544.89           | 2.56         |
| 9            | Kota Jayapura   | 503.16           | 2.37         |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>21,159.76</b> | <b>100</b>   |

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

#### d. Kekeringan

Kekeringan dapat terjadi ketika terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Beberapa dampak langsung yang dapat dirasakan dari kekeringan adalah produksi pangan yang semakin berkurang dan kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahan pangan yang cenderung sulit didapatkan pada masa kemarau mengakibatkan harganya menjadi mahal. Selain itu, air bersih menjadi sulit didapatkan dan hewan dapat mati dan menimbulkan wabah penyakit.

Provinsi Papua memiliki bahaya kekeringan pertanian yang lebih menonjol dibandingkan dengan jenis kekeringan lainnya. Bahaya kekeringan pertanian di Provinsi Papua sering ditemukan di pegunungan yang memiliki topografi tinggi dan curam serta memiliki kondisi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrem namun dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Wilayah rawan kekeringan di Provinsi Papua masih belum dipetakan secara lebih rinci dan lengkap karena informasinya lebih banyak berasal dari instansi teknis pertanian. Informasi mengenai penyebab dan antisipasi penanganan bahaya kekeringan masih belum tertangani dengan baik.

#### e. Bencana Alam Lainnya

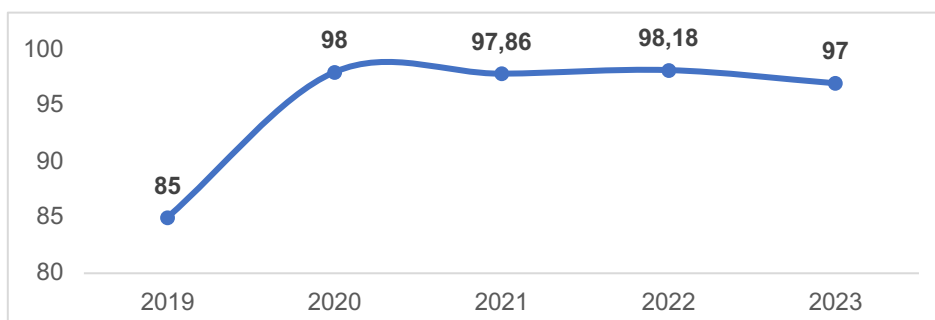
Bencana lain yang dapat terjadi dan mengancam serta memiliki risiko tinggi di antaranya adalah banjir bandang, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan.

##### 2.1.1.1.1 Pemanfaatan ruang

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik itu RJPD, RPJMD, RKPD maupun dokumen lainnya. Implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang Perda RTRW Provinsi Papua khususnya untuk struktur dan pola ruang masih menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Berdasarkan data bahwa tahun 2019 ketaatan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang sebesar 85% namun tahun 2020 mengalami peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 98%. Tahun 2020-2023 ketataan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami tren penurunan dari tahun 2020 sebesar 98 % di tahun 2023 turun menjadi 97%. Pelaksanaan ketaatan pelaksanaan dapat digambarkan pada Gambar II.12.

**Gambar II.12 Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua**



Sumber : Lakip Provinsi Papua Tahun 2024

Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya, yaitu:

1. Kabupaten Keerom sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, jagung, kakao), sektor pariwisata (Telaga Cinta Yowong), sektor pertambangan, dan sektor Peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian (food estate dan tanaman pangan, sektor perkebunan dan sektor pertambangan);
2. Kabupaten Sarmi sebagai PKW, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao), sektor pertambangan (nikel), sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor pariwisata dengan fokus pengembangan pada sektor industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICHO/Papua Home industri Coconut Oil);
3. Kabupaten Jayapura sebagai PKN, memiliki potensi di sektor Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu), sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata (kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani), sektor pertambangan, sektor industri dan sektor Kehutanan dengan fokus pengembangan pada sektor pertanian dan industri; serta
4. Kota Jayapura sebagai PKN dan PKSN, memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sektor jasa dengan fokus pengembangan sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata.

b. **Wilayah pengembangan II**, yaitu:

1. Kabupaten Biak Numfor sebagai PKW dan PKSN, memiliki potensi di sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor peternakan dengan fokus pengembangan sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari;
2. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi di sektor pariwisata (Kampung wisata Alam), sektor perikanan (ikan dan rumput laut), sektor perkebunan (sagu, kakao), sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor peternakan dengan fokus pengembangan pada sektor perikanan dan wisata bahari; serta
3. Kabupaten Supiori memiliki potensi pengembangan di sektor perikanan dan pariwisata; dan

c. **Wilayah pengembangan III**, yaitu:

1. Kabupaten Mamberamo Raya memiliki potensi di sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan rakyat, sektor pertambangan (batu bara), sektor perikanan, sektor pariwisata (pariwisata alam), dan sektor kehutanan dengan fokus pengembangan pada pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta



- Kabupaten Waropen memiliki potensi di sektor pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove), sektor perikanan (ikan, udang, kepiting), sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan (sagu), sektor kehutanan, dan sektor pertambangan dengan fokus pengembangan meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar II.12 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

### 2.1.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Jumlah Penduduk di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota periode 2020–2024, terlihat bahwa seluruh wilayah mengalami pertumbuhan penduduk yang konsisten. Total penduduk provinsi meningkat dari 1.008.086 jiwa (2020) menjadi 1.060.600 jiwa (2024). Kota Jayapura tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, meningkat dari 398.478 jiwa (2020) menjadi 420.600 jiwa (2024). Diikuti oleh Kabupaten Jayapura (173.300 jiwa) dan Biak Numfor (141.100 jiwa). Sementara itu, Kabupaten Supiori memiliki jumlah penduduk terendah, meskipun meningkat dari 22.547 jiwa (2020) menjadi 24.500 jiwa (2024). Pertumbuhan penduduk terkecil terjadi di Kabupaten Sarmi (43.100 jiwa) dan Waropen (35.800 jiwa).

Tabel II.20 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2020-2024

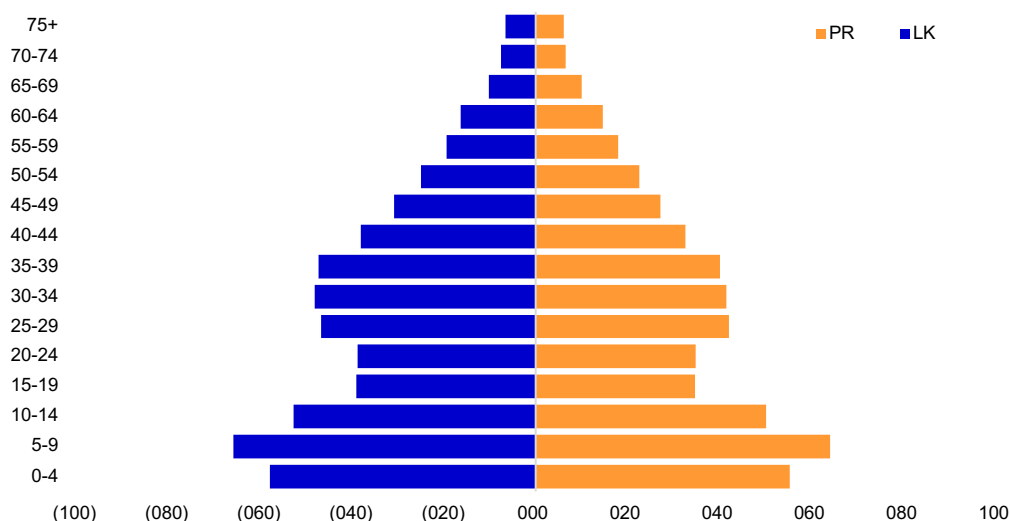
| Kabupaten/ Kota | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Jayapura        | 166.171 | 168.476 | 171.331 | 171.610 | 173,30 |
| Kepulauan Yapen | 112.676 | 114.210 | 116.107 | 117.030 | 118,60 |
| Biak Numfor     | 134.650 | 135.231 | 135.796 | 139.390 | 141,10 |
| Sarmi           | 41.515  | 41.849  | 42.233  | 42.680  | 43,10  |

| Kabupaten/ Kota       | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024            |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Keerom                | 61.623           | 62.157           | 62.777           | 6.350            | 64,20           |
| Waropen               | 33.943           | 34.414           | 34.997           | 35.320           | 35,80           |
| Supiori               | 22.547           | 22.860           | 23.247           | 24.010           | 24,50           |
| Mamberamo Raya        | 36.483           | 36.989           | 37.616           | 38.640           | 39,40           |
| Kota Jayapura         | 398.478          | 404.004          | 410.852          | 414.860          | 420,60          |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>1.008.086</b> | <b>1.020.190</b> | <b>1.034.956</b> | <b>1.047.100</b> | <b>1.060,60</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024

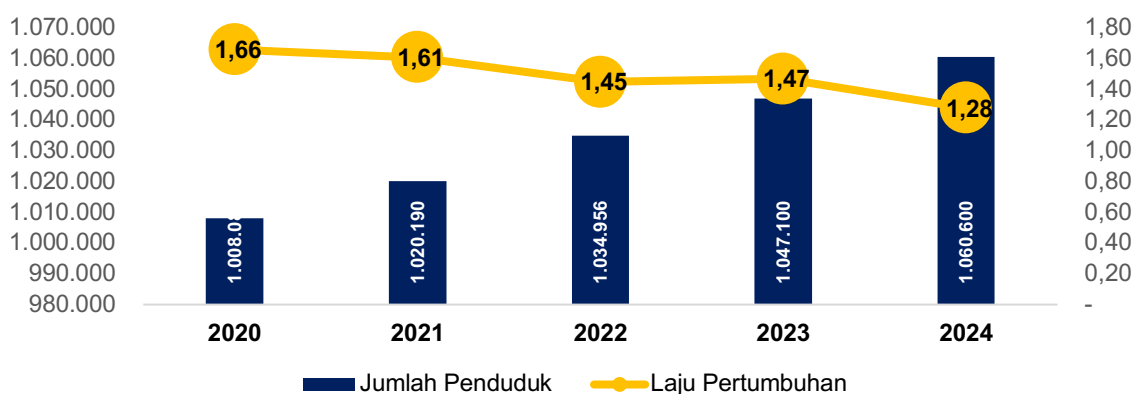
Pada tahun 2023, terjadi pemekaran wilayah di Provinsi Papua yang menyebabkan perubahan signifikan dalam jumlah penduduk yang tercatat. Sebelum pemekaran, jumlah penduduk pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.418.571 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,45%. Namun, setelah pemekaran, jumlah penduduk yang tercatat menurun drastis menjadi 1.047.100 jiwa dengan laju pertumbuhan negatif sebesar -76,30%.

**Gambar II.13 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2023**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

**Gambar II.14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Prov Papua (Diolah)

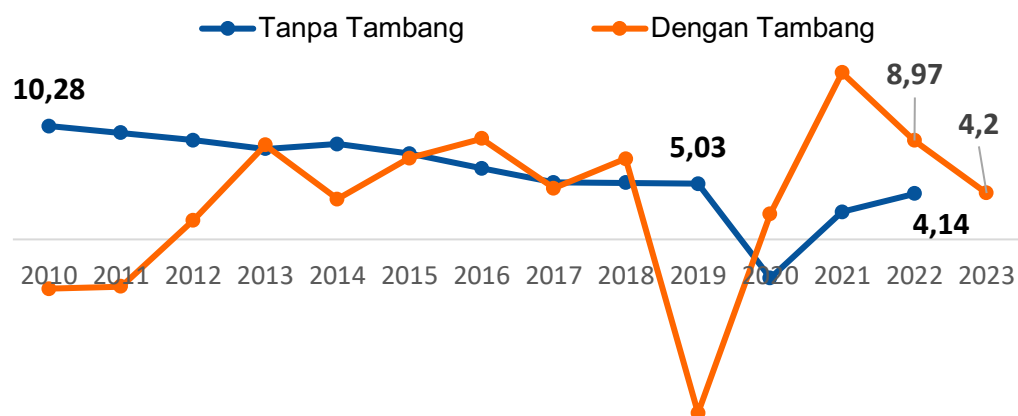
Kondisi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua periode 2020–2024, menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dari 1.008.086 jiwa pada tahun 2020 menjadi 1.060.600 jiwa pada tahun 2024. Namun, laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang terus menurun, dari 1,66% (2020) menjadi 1,28% (2024). Penurunan laju pertumbuhan ini mengindikasikan perlambatan dalam dinamika kependudukan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penurunan tingkat kelahiran, migrasi, atau efektivitas program pengendalian penduduk.

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor basis dan PDRB ADHK digunakan untuk melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi.

Gambar II.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Grafik II.15 dibawah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Papua dari tahun 2019 hingga 2023 dengan perbandingan antara sektor tanpa tambang dan sektor dengan tambang. Pada tahun 2019, sektor dengan tambang mengalami penurunan drastis hingga mencapai titik terendah dalam satu dekade ini, sementara sektor tanpa tambang tetap stabil. Pada tahun 2020, sektor dengan tambang pulih dengan cepat, mencapai 5,03%, sedangkan sektor tanpa tambang mengalami sedikit penurunan. Tahun 2021 menunjukkan tren positif untuk kedua sektor, dengan sektor tanpa tambang naik ke 4,14% dan sektor dengan tambang melonjak tajam. Tahun 2022 adalah puncak bagi sektor dengan tambang yang mencapai 8,97%, sedangkan sektor tanpa tambang juga naik meski lebih rendah. Pada tahun 2023, sektor dengan tambang turun menjadi 4,2%, dan data untuk sektor tanpa tambang tidak dihitung lagi oleh BPS karena adanya pemekaran wilayah di Papua.

## 2.2.2 Struktur Ekonomi

Adapun perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.21.

**Tabel II.21 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Juta Rupiah)**

| Lapangan Usaha                                                     | 2019       | 2020       | 2021       | 2022*      | 2023**    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                              | 24.177,23  | 24.456,61  | 25.514,22  | 27.044,54  | 11.820,47 |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                     | 44.642,21  | 56.199,83  | 86.696,05  | 101.334,79 | 680,81    |
| C. Industri Pengolahan                                             | 4.305,29   | 4.140,13   | 4.241,31   | 4.433,59   | 2.397,74  |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 84,25      | 83,23      | 88,52      | 98,33      | 51,80     |
| E. Pengadaan Air                                                   | 103,67     | 100,37     | 104,79     | 113,23     | 82,04     |
| F. Konstruksi                                                      | 30.559,27  | 30.733,60  | 32.636,11  | 36.100,10  | 16.682,48 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 20.668,63  | 20.935,42  | 22.058,45  | 24.140,91  | 13.041,48 |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                    | 12.826,18  | 8.688,28   | 9.044,13   | 11.606,77  | 6.578,46  |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.792,05   | 1.526,75   | 1.566,84   | 1.669,83   | 1.040,55  |
| J. Informasi dan Komunikasi                                        | 8.195,28   | 8.456,43   | 8.819,97   | 9.372,36   | 4.983,60  |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 3.370,13   | 3.325,39   | 3.573,54   | 4.067,52   | 3.061,83  |
| L. Real Estate                                                     | 5.788,84   | 5.774,49   | 6.283,74   | 6.666,29   | 3.838,07  |
| M,N. Jasa Perusahaan                                               | 2.606,43   | 2.450,76   | 2.424,31   | 2.702,72   | 2.009,33  |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 20.490,38  | 22.048,00  | 21.999,18  | 22.396,29  | 9.483,70  |
| P. Jasa Pendidikan                                                 | 4.031,56   | 4.089,98   | 3.918,51   | 4.091,41   | 2.186,61  |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 3.548,67   | 3.839,76   | 3.994,08   | 4.137,21   | 2.317,25  |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                              | 2.320,64   | 2.337,54   | 2.422,36   | 2.539,92   | 1.481,71  |
| PDRB                                                               | 189.510,70 | 199.186,57 | 235.486,12 | 262.515,82 | 81.737,92 |

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel II.22 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023**

| Lapangan Usaha                                                     | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Rata-rata |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                              | 12,76 | 12,91 | 13,46 | 14,27 | 6,24 | 11,93     |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                     | 23,56 | 29,66 | 45,75 | 53,47 | 0,36 | 30,56     |
| C. Industri Pengolahan                                             | 2,27  | 2,18  | 2,24  | 2,34  | 1,27 | 2,06      |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,05  | 0,03 | 0,04      |
| E. Pengadaan Air                                                   | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,06  | 0,04 | 0,05      |
| F. Konstruksi                                                      | 16,13 | 16,22 | 17,22 | 19,05 | 8,80 | 15,48     |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 10,91 | 11,05 | 11,64 | 12,74 | 6,88 | 10,64     |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                    | 6,77  | 4,58  | 4,77  | 6,12  | 3,47 | 5,14      |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 0,95  | 0,81  | 0,83  | 0,88  | 0,55 | 0,80      |
| J. Informasi dan Komunikasi                                        | 4,32  | 4,46  | 4,65  | 4,95  | 2,63 | 4,20      |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1,78  | 1,75  | 1,89  | 2,15  | 1,62 | 1,84      |
| L. Real Estate                                                     | 3,05  | 3,05  | 3,32  | 3,52  | 2,03 | 2,99      |
| M,N. Jasa Perusahaan                                               | 1,38  | 1,29  | 1,28  | 1,43  | 1,06 | 1,29      |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 10,81 | 11,63 | 11,61 | 11,82 | 5,00 | 10,18     |
| P. Jasa Pendidikan                                                 | 2,13  | 2,16  | 2,07  | 2,16  | 1,15 | 1,93      |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,87  | 2,03  | 2,11  | 2,18  | 1,22 | 1,88      |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                              | 1,22  | 1,23  | 1,28  | 1,34  | 0,78 | 1,17      |

Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan rata-rata PDRB ADHB menurut lapangan usaha di Provinsi Papua tahun 2017-2023, diketahui bahwa sektor Pertambangan menjadi sektor dengan distribusi tertinggi (30,56%) yang diikuti dengan sektor Konstruksi (15,48%), dan Pertanian Kehutanan dan Perikanan (11,93%).

**Tabel II.23 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023**

| Lapangan Usaha                                                     | 2019       | 2020       | 2021       | 2022*      | 2023**    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                              | 16.608,11  | 16.490,61  | 16.754,98  | 17.133,42  | 7.017,87  |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                     | 38.925,05  | 45.395,19  | 63.915,45  | 74.225,10  | 451,53    |
| C. Industri Pengolahan                                             | 3.010,41   | 2.859,43   | 2.853,50   | 2.855,82   | 1.418,04  |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 55,48      | 54,95      | 58,12      | 62,03      | 33,80     |
| E. Pengadaan Air                                                   | 81,12      | 78,78      | 81,79      | 86,58      | 61,08     |
| F. Konstruksi                                                      | 18.685,26  | 18.523,22  | 19.325,89  | 20.158,25  | 9.023,20  |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 13.470,15  | 13.137,88  | 13.888,81  | 14.543,06  | 7.729,26  |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                    | 7.232,58   | 4.911,21   | 5.090,76   | 5.948,66   | 3.240,90  |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1.113,67   | 925,15     | 938,47     | 976,45     | 592,05    |
| J. Informasi dan Komunikasi                                        | 5.887,49   | 6.106,73   | 6.295,32   | 6.639,24   | 3.724,89  |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 2.273,75   | 2.240,42   | 2.293,48   | 2.409,12   | 1.733,02  |
| L. Real Estate                                                     | 3.974,61   | 3.967,86   | 4.247,22   | 4.449,45   | 2.600,14  |
| M,N. Jasa Perusahaan                                               | 1.888,21   | 1.744,31   | 1.778,50   | 1.844,32   | 1.274,86  |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 13.716,33  | 13.690,53  | 13.561,13  | 13.876,90  | 6.239,86  |
| P. Jasa Pendidikan                                                 | 3.406,33   | 3.384,49   | 3.222,26   | 3.273,86   | 1.812,42  |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 2.492,20   | 2.587,41   | 2.619,67   | 2.620,86   | 1.502,43  |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                              | 1.745,17   | 1.689,10   | 1.748,97   | 1.801,71   | 1.097,38  |
| PDRB                                                               | 134.565,89 | 137.787,29 | 158.674,30 | 172.904,85 | 49.552,73 |

Sumber: BPS Provinsi Papua

**Tabel II.24 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2023**

| Lapangan Usaha                                                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 | Rata-Rata |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-----------|
| A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 12,34 | 12,25 | 12,45 | 12,73 | 5,22 | 11,00     |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                   | 28,93 | 33,73 | 47,50 | 55,16 | 0,34 | 33,13     |
| C. Industri Pengolahan                                           | 2,24  | 2,12  | 2,12  | 2,12  | 1,05 | 1,93      |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,05  | 0,03 | 0,04      |
| E. Pengadaan Air                                                 | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,05 | 0,06      |
| F. Konstruksi                                                    | 13,89 | 13,77 | 14,36 | 14,98 | 6,71 | 12,74     |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,01 | 9,76  | 10,32 | 10,81 | 5,74 | 9,33      |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                  | 5,37  | 3,65  | 3,78  | 4,42  | 2,41 | 3,93      |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 0,83  | 0,69  | 0,70  | 0,73  | 0,44 | 0,68      |
| J. Informasi dan Komunikasi                                      | 4,38  | 4,54  | 4,68  | 4,93  | 2,77 | 4,26      |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 1,69  | 1,66  | 1,70  | 1,79  | 1,29 | 1,63      |
| L. Real Estate                                                   | 2,95  | 2,95  | 3,16  | 3,31  | 1,93 | 2,86      |



| Lapangan Usaha                                                     | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | Rata-Rata |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| M,N. Jasa Perusahaan                                               | 1,40   | 1,30   | 1,32   | 1,37   | 0,95   | 1,27      |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 10,19  | 10,17  | 10,08  | 10,31  | 4,64   | 9,08      |
| P. Jasa Pendidikan                                                 | 2,53   | 2,52   | 2,39   | 2,43   | 1,35   | 2,24      |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,85   | 1,92   | 1,95   | 1,95   | 1,12   | 1,76      |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya                                              | 1,30   | 1,26   | 1,30   | 1,34   | 0,82   | 1,20      |
| PDRB                                                               | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00    |

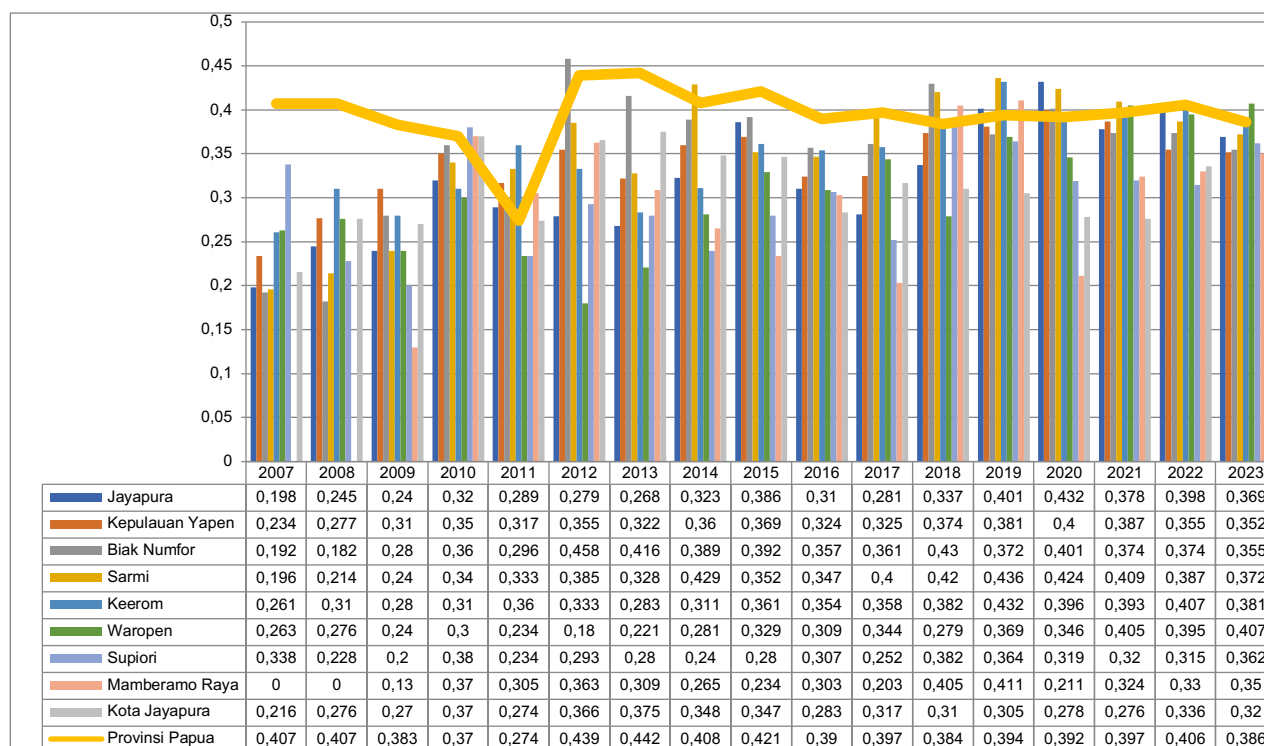
Sumber: BPS Provinsi Papua

Berdasarkan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor dengan kontribusi rata-rata terbesar adalah sektor Pertambangan (33,13%) yang diikuti dengan sektor Konstruksi (12,74%), dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (11%).

### 2.2.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk menunjukkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Indeks Gini menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua dari tahun 2007-2021 ditunjukkan pada Gambar II.16.

Gambar II.16 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Semakin kecil rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi semakin menurun antar masyarakat. Sebaliknya semakin tinggi rasio gini, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi antar masyarakat semakin tinggi. Tahun 2011 menjadi tahun dengan rasio gini terendah di Provinsi Papua yaitu sebesar 0,274. Sementara tahun 2013 menjadi tahun

dengan capaian rasio gini tertinggi yaitu sebesar 0,442. Berdasarkan Gambar II.16, terlihat bahwa indeks gini pada mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah garis provinsi terkecuali pada Kabupaten Waropen.

### 2.2.4 Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua periode 2020–2024, menunjukkan penurunan yang signifikan secara keseluruhan pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan provinsi turun drastis dari 26,03% (2023) menjadi 17,26% (2024). Namun, tren ini tidak seragam di semua kabupaten/kota.

**Tabel II.25 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024**

| Kabupaten/Kota        | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jayapura              | 12,44        | 12,13        | 11,94        | 11,45        | 11,6         |
| Kepulauan Yapen       | 26,30        | 26,09        | 26,15        | 25,89        | 25,69        |
| Biak Numfor           | 24,57        | 24,45        | 24,48        | 23,53        | 23,46        |
| Sarmi                 | 13,87        | 13,84        | 13,76        | 13,21        | 14,05        |
| Keerom                | 16,32        | 16,00        | 15,77        | 15,68        | 15,84        |
| Waropen               | 29,54        | 29,85        | 30,22        | 29,16        | 29,85        |
| Supiori               | 36,91        | 37,91        | 37,70        | 36,99        | 37,72        |
| Mamberamo Raya        | 28,38        | 28,78        | 30,73        | 29,63        | 30,29        |
| Kota Jayapura         | 11,16        | 11,39        | 11,12        | 10,50        | 10,72        |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>26,64</b> | <b>26,86</b> | <b>26,56</b> | <b>26,03</b> | <b>17,26</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua

Kota Jayapura konsisten menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan terendah, meskipun mengalami sedikit kenaikan dari 10,50% (2023) menjadi 10,72% (2024). Kabupaten Jayapura juga mencatat tingkat kemiskinan relatif rendah (11,60%). Sebaliknya, Kabupaten Supiori masih memiliki persentase kemiskinan tertinggi (37,72%), diikuti oleh Waropen (29,85%) dan Mamberamo Raya (30,29%). Beberapa wilayah seperti Sarmi dan Keerom mengalami fluktuasi, dengan Sarmi menunjukkan kenaikan dari 13,21% (2023) menjadi 14,05% (2024).

#### 2.2.4.1 Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan 62 Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, sebelum terbentuknya Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua terdapat 22 (dua puluh dua) Daerah Tertinggal. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal dinilai dari aspek Indeks Pembangunan Manusia dan Persentase Penduduk Miskin. Apabila rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah lebih kecil dari 62,2 dan Persentase Penduduk Miskinnya (PPM) lebih besar dari 24% maka daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tertinggal.

Perkembangan IPM di Daerah Tertinggal Tahun 2020 rata-rata sebesar 60,32 dan sementara rata-rata nasional sebesar 71,94. Untuk Tahun 2021 IPM di daerah Tertinggal rata-rata sebesar 60,63, sementara rata-rata nasional sebesar 72,29 dan untuk Tahun 2022

IPM rata-rata daerah tertinggal sebesar 61,27 sementara rata-rata nasional sebesar 71,91. Target IPM daerah tertinggal sampai dengan 2024 adalah 62,2-62,7. Sampai tahun 2022, masih terdapat gap sebesar 11,64 antara rata-rata IPM 62 DT (61,27) dengan Rata-Rata IPM Nasional (72,91) yang secara signifikan dipengaruhi IPM wilayah Papua;

Perkembangan IPM di wilayah Papua sendiri menunjukkan informasi sebagai berikut : IPM Wilayah Papua Tahun 2020 sebesar 53,78, Untuk Tahun 2021 sebesar 54,01 dan untuk Tahun 2022 sebesar 54,81. Sedangkan perkembangan IPM khusus untuk Provinsi Papua adalah sebagai berikut : Tahun 2020 sebesar 60,44, Tahun 2021 sebesar 60,62 dan Tahun 2022 sebesar 61,39, Tahun 2023 sebesar 61,39 dan Tahun 2024 sebesar 62,25. Sementara itu perkembangan PPM di daerah Tertinggal Tahun 2020 rata-rata sebesar 25,32% dan sementara rata-rata nasional sebesar 9,78%. Untuk Tahun 2021 PPM di daerah Tertinggal rata-rata sebesar 25,5%, sementara rata-rata nasional sebesar 10,14% dan untuk Tahun 2022 PPM rata-rata daerah tertinggal sebesar 24,56% sementara rata-rata nasional sebesar 9,54%. Target PPM daerah tertinggal sampai dengan 2024 adalah 24%.

**Tabel II.26 Indikator Makro Dan Indeks Daerah Tertinggal Wilayah Papua**

| Provinsi         | Kabupaten         | Indeks Pembangunan Manusia |       |       |         |                | Ket.   | Persentase Penduduk Miskin |         |         |                | Ket.  | Indeks Daerah Tertinggal |       |                |  | Ket. |
|------------------|-------------------|----------------------------|-------|-------|---------|----------------|--------|----------------------------|---------|---------|----------------|-------|--------------------------|-------|----------------|--|------|
|                  |                   | 2020                       | 2021  | 2022  | 2024    | 2020           |        | 2021                       | 2022    | 2024    | 2020           |       | 2021                     | 2022  |                |  |      |
|                  |                   | Capaian                    |       |       | Sasaran | Capaian        |        |                            | Sasaran | Capaian |                |       | Sasaran                  |       |                |  |      |
| Papua Barat      | Teluk Wondama     | 60,21                      | 60,33 | 60,87 | 63,36   | Belum Tercapai | 30,91% | 31,61%                     | 30,06%  | 28,47%  | Belum Tercapai | 62,93 | 60,61                    | 59,75 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Barat      | Teluk Bintuni     | 64,55                      | 64,65 | 65,27 | 67,54   | Belum Tercapai | 29,39% | 29,79%                     | 29,73%  | 27,33%  | Belum Tercapai | 61,48 | 62,25                    | 62,56 | Tercapai       |  |      |
| Papua Barat      | Manokwari Selatan | 59,84                      | 59,85 | 60,68 | 63,26   | Belum Tercapai | 28,88% | 29,30%                     | 28,55%  | 25,93%  | Belum Tercapai | 54,66 | 57,51                    | 57,46 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Barat      | Pegunungan Arfak  | 56,33                      | 56,13 | 57,01 | 59,69   | Belum Tercapai | 33,81% | 34,70%                     | 33,71%  | 30,85%  | Belum Tercapai | 35,76 | 38,19                    | 38,59 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Barat Daya | Sorong Selatan    | 62,42                      | 62,46 | 63,08 | 65,47   | Belum Tercapai | 16,28% | 16,55%                     | 16,43%  | 15,16%  | Belum Tercapai | 56,59 | 57,87                    | 56,37 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Barat Daya | Sorong            | 65,74                      | 65,77 | 66,69 | 68,83   | Belum Tercapai | 27,48% | 27,78%                     | 27,58%  | 21,66%  | Belum Tercapai | 62,47 | 62,22                    | 61,79 | Tercapai       |  |      |
| Papua Barat Daya | Tambrau           | 53,45                      | 53,71 | 54,63 | 56,44   | Belum Tercapai | 32,80% | 33,86%                     | 32,45%  | 29,16%  | Belum Tercapai | 43,47 | 47,39                    | 46,92 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Barat Daya | Maybrat           | 59,52                      | 59,70 | 60,49 | 62,69   | Belum Tercapai | 30,78% | 31,39%                     | 31,14%  | 29,14%  | Belum Tercapai | 53,03 | 56,10                    | 57,02 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua            | Keerom            | 66,40                      | 66,49 | 67,24 | 70,13   | Belum Tercapai | 16,32% | 16,00%                     | 15,77%  | 14,07%  | Belum Tercapai | 60,41 | 59,86                    | 60,42 | Tercapai       |  |      |
| Papua            | Waropen           | 64,94                      | 65,10 | 65,67 | 68,88   | Belum Tercapai | 29,54% | 29,85%                     | 30,22%  | 21,16%  | Belum Tercapai | 55,02 | 52,99                    | 55,24 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua            | Supiori           | 62,30                      | 62,72 | 63,65 | 65,84   | Belum Tercapai | 36,91% | 37,91%                     | 37,70%  | 28,41%  | Belum Tercapai | 63,21 | 62,47                    | 62,94 | Tercapai       |  |      |
| Papua            | Mamberamo Raya    | 51,78                      | 52,18 | 53,10 | 55,74   | Belum Tercapai | 28,38% | 28,78%                     | 30,73%  | 24,41%  | Belum Tercapai | 50,23 | 52,66                    | 54,53 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Selatan    | Boven Digoel      | 61,53                      | 61,62 | 62,52 | 65,05   | Belum Tercapai | 19,41% | 19,90%                     | 20,04%  | 16,62%  | Belum Tercapai | 57,46 | 55,32                    | 56,92 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Selatan    | Mappi             | 58,15                      | 58,70 | 59,61 | 61,84   | Belum Tercapai | 25,04% | 26,05%                     | 26,04%  | 20,60%  | Belum Tercapai | 45,14 | 46,23                    | 49,04 | Belum Tercapai |  |      |
| Papua Selatan    | Asmet             | 50,55                      | 51,29 | 52,22 | 53,91   | Belum Tercapai | 25,49% | 24,83%                     | 24,87%  | 23,02%  | Belum Tercapai | 39,20 | 41,93                    | 40,25 | Belum Tercapai |  |      |

Sumber Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2023 diolah

Perkembangan PPM di wilayah Papua sendiri menunjukkan informasi sebagai berikut : PPM Wilayah Papua Tahun 2020 sebesar 32,27%, Untuk Tahun 2021 sebesar 32,57% dan untuk Tahun 2022 sebesar 32,13%. Sehingga sampai dengan tahun 2022, masih terdapat gap sebesar 15,02% antara rata-rata PPM 62 DT (24,56%) dengan Rata-Rata PPM Nasional (9,54%) yang secara signifikan dipengaruhi PPM wilayah Papua; PPM wilayah Papua pada tahun 2020 sebesar 32,27%, tahun 2021 sebesar 32,55% dan pada tahun 2022 sebesar 32,13%. Akan tetapi khusus untuk Provinsi Papua sendiri PPM tahun 2020 sebesar 36,91%, Tahun 2021 sebesar 37,91% dan Tahun 2022 sebesar 37,70%, Tahun 2023 sebesar 26,56 %, dan Tahun 2024 sebesar 26,03%.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Indikator Penetapan Daerah Tertinggal, berikut disampaikan Indikator Makro dan Indeks Daerah Tertinggal Wilayah Papua yaitu:

Pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 490 Tahun 2024 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan 2020-2024, disebutkan bahwa Kabupaten Keerom dan Kabupaten Supiori Tahun 2024 termasuk Daerah Entas dari Keteringgalan, sementara 2 kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen masih dalam kategori sebagai Daerah Tertinggal. Hal ini disebabkan karena 2 (dua) kabupaten tersebut nilai Indek Pembangunan Manusia dan Persentasi Penduduk Miskinnya masih dibawah dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga jumlah daerah tertinggal di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mamberamo Raya. Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.27 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Keteringgalan di Provinsi Papua**

| No | Kabupaten/<br>Kota | Penyebab Utama Keteringgalan (Menurut Urutan) |               |                      |         |     |                 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-----|-----------------|
|    |                    | 1                                             | 2             | 3                    | 4       | 5   | 6               |
| 1  | Mamberamo Raya     | Sarpras                                       | Aksesibilitas | Karakteristik Daerah | Ekonomi | SDM | Keuangan Daerah |
| 2  | Waropen            | Sarpras                                       | Aksesibilitas | Karakteristik Daerah | -       | SDM | Keuangan Daerah |

Sumber: Nilai Indeks Daerah Tertinggal, Tahun 2022

**Tabel II.28 Indeks Desa Membangun di Provinsi Papua**

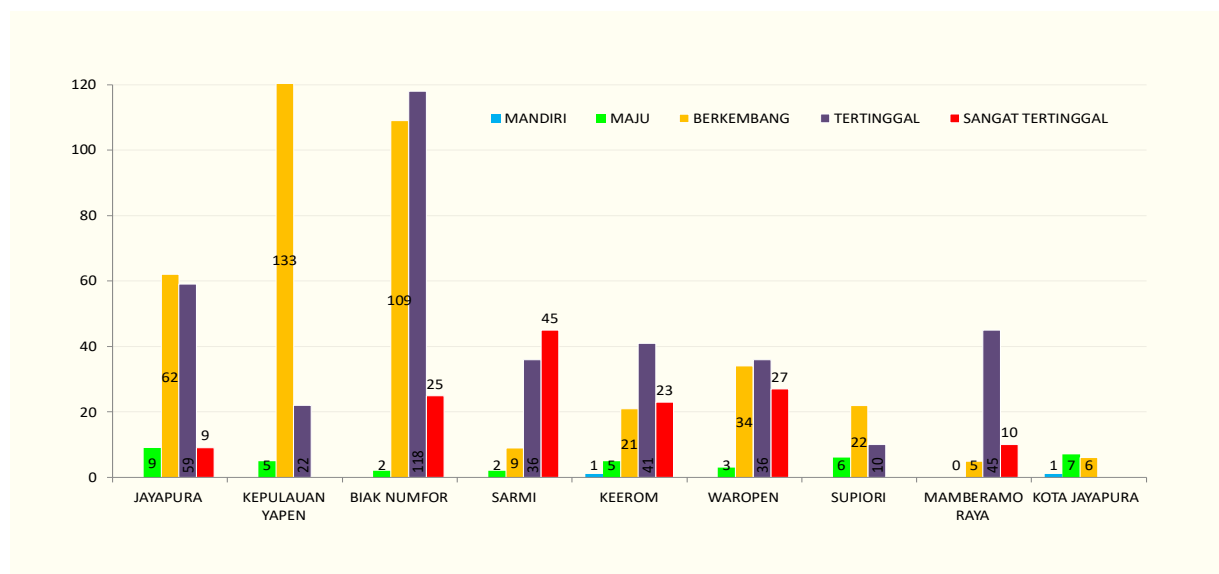
| NO | KABUPATEN       | ID   | JUMLAH DESA | MANDIRI | MAJU | BERKEMBANG | TERTINGGAL | SANGAT TERTINGGAL | STATUS TERINPUT |
|----|-----------------|------|-------------|---------|------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| 1  | JAYAPURA        | 9103 | 139         | 0       | 9    | 62         | 59         | 9                 | 139             |
| 2  | KEPULAUAN YAPEN | 9105 | 160         | 0       | 5    | 133        | 22         | 0                 | 160             |
| 3  | BIAK NUMFOR     | 9106 | 254         | 0       | 2    | 109        | 118        | 25                | 254             |
| 4  | SARMI           | 9110 | 92          | 0       | 2    | 9          | 36         | 45                | 92              |
| 5  | KEEROM          | 9111 | 91          | 1       | 5    | 21         | 41         | 23                | 91              |
| 6  | WAROPEN         | 9115 | 100         | 0       | 3    | 34         | 36         | 27                | 100             |
| 7  | SUPIORI         | 9119 | 38          | 0       | 6    | 22         | 10         | 0                 | 38              |
| 8  | MAMBERAMO RAYA  | 9120 | 60          | 0       | 0    | 5          | 45         | 10                | 60              |
| 9  | KOTA JAYAPURA   | 9171 | 14          | 1       | 7    | 6          | 0          | 0                 | 14              |
|    | PAPUA           | 91   | 948         | 2       | 39   | 401        | 367        | 139               | 948             |

Sumber: Kemen Desa PD TT, Indeks Desa Membangun 2024

Sementara itu klasifikasi Indeks Desa Membangun Tahun 2024 Provinsi Papua berdasarkan hasil klasifikasi status IDM Tingkat Kabupaten, dari 948 Kampung yang terdaftar terdapat 2 (dua) Kampung atau 0,21% dalam status mandiri, 39 (tiga puluh sembilan) kampung atau 4,11% dalam status maju, 401 (empat ratus satu) kampung atau 42,30% dalam status berkembang, 367 (tiga ratus enam puluh tujuh ) kampung atau 38,71% dalam status tertinggal dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) kampung atau 14,66% dalam status sangat tertinggal. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Dengan memperhatikan diatas, dapat di lihat bahwa dari 9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua, terdapat 1 ( satu) Kota yaitu Kota Jayapura yang tidak ada satu kampungpun dalam status tertinggal dan sangat tertinggal. Ini tentunya menjadi contoh yang baik bagi kabupaten lain untuk terus komitmen dan fokus dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah maju. Status Indeks Desa Membangun Provinsi Papua Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

**Gambar II.17 Status IDM Provinsi Papua Tahun 2024**



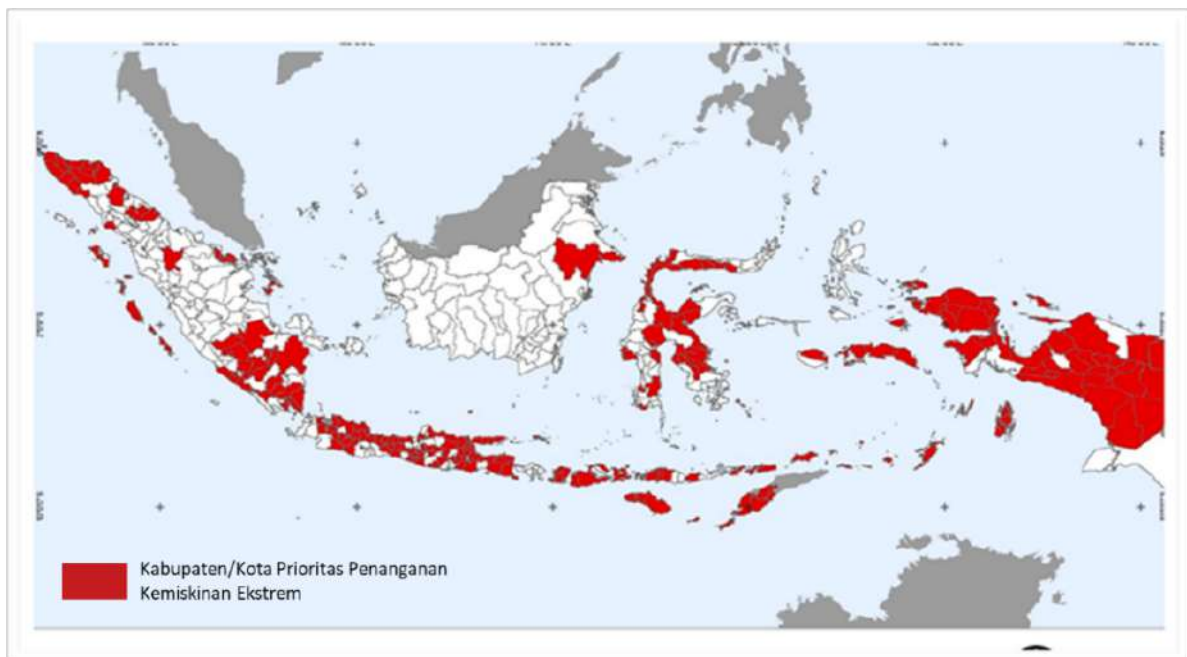
Sumber: Kemen Desa PD TT, Indeks Desa Membangun 2024

#### 2.2.4.2 Kemiskinan Ekstrem

Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua akan dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan program kemiskinan Ekstrem sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu.



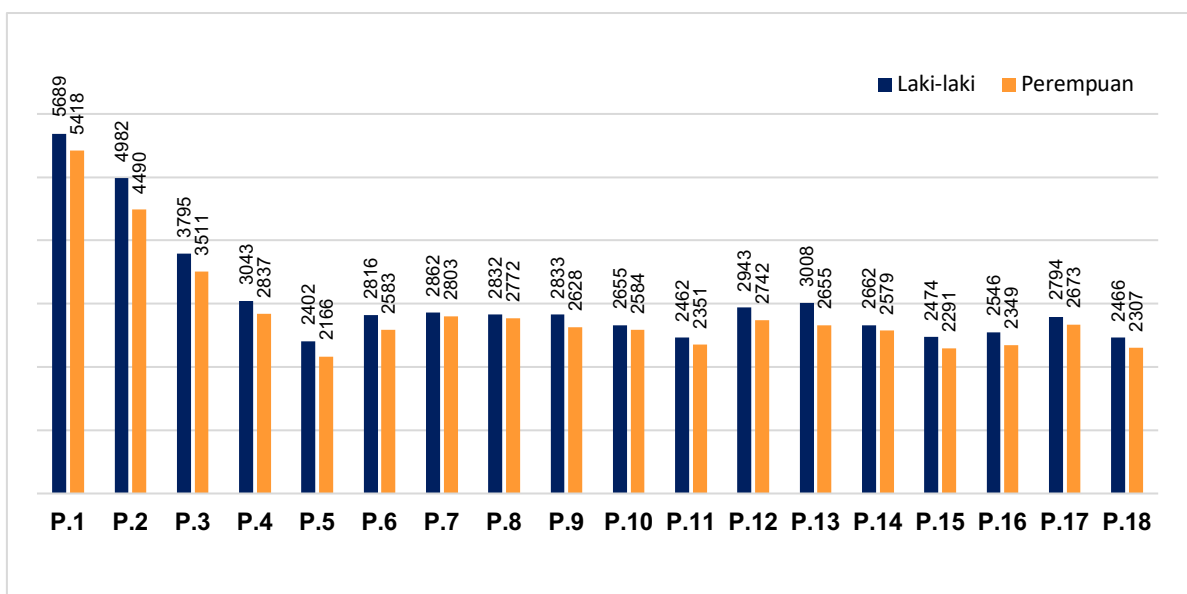
**Gambar II.18 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia**



Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022

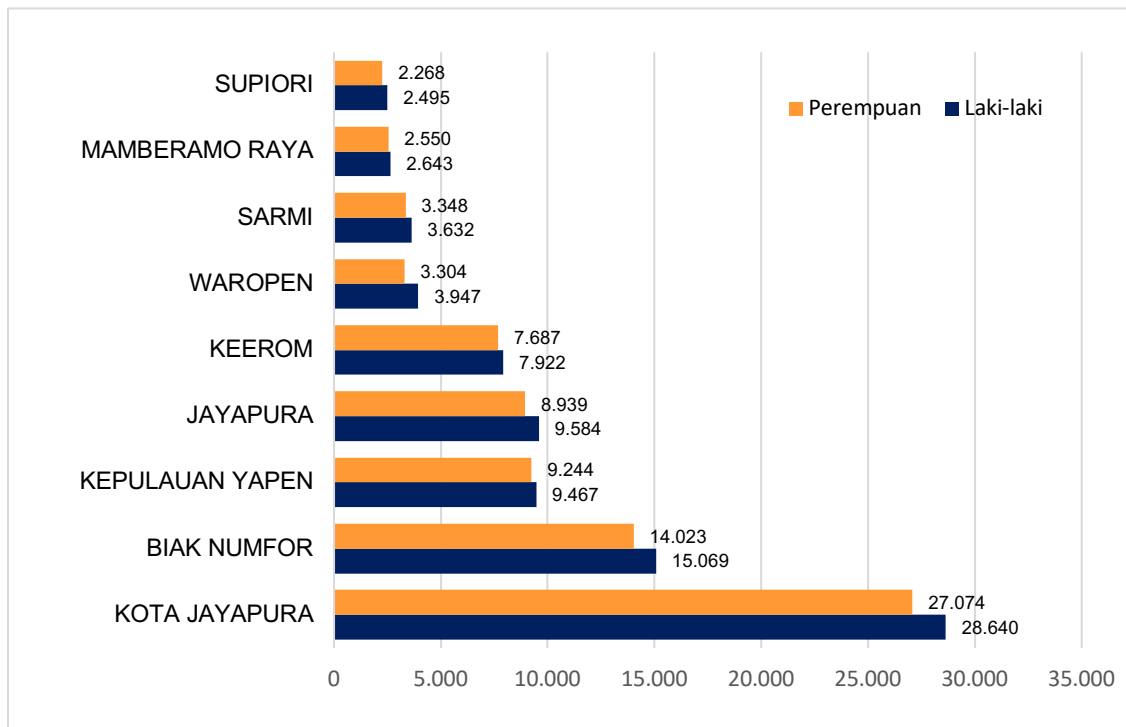
Berdasarkan Gambar II.18 diketahui bahwa kabupaten di Provinsi Papua termasuk dalam wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Keerom, Jayapura, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Supiori dan Biak Numfor. Gambar II.19 dan Gambar II.20 menunjukkan sebaran penduduk miskin di Provinsi Papua (<P18) berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.19 dan Gambar II.20 diketahui bahwa sebanyak 107.003 penduduk (17,93%) dari total 596.774 penduduk berada pada 20% termiskin di Papua, didominasi oleh laki-laki.

**Gambar II.19 Sebaran Penduduk Miskin di Papua (<P18)**



Sumber: Regsosek, 2022

**Gambar II.20 Lokasi Penduduk Miskin di Papua (<P18)**



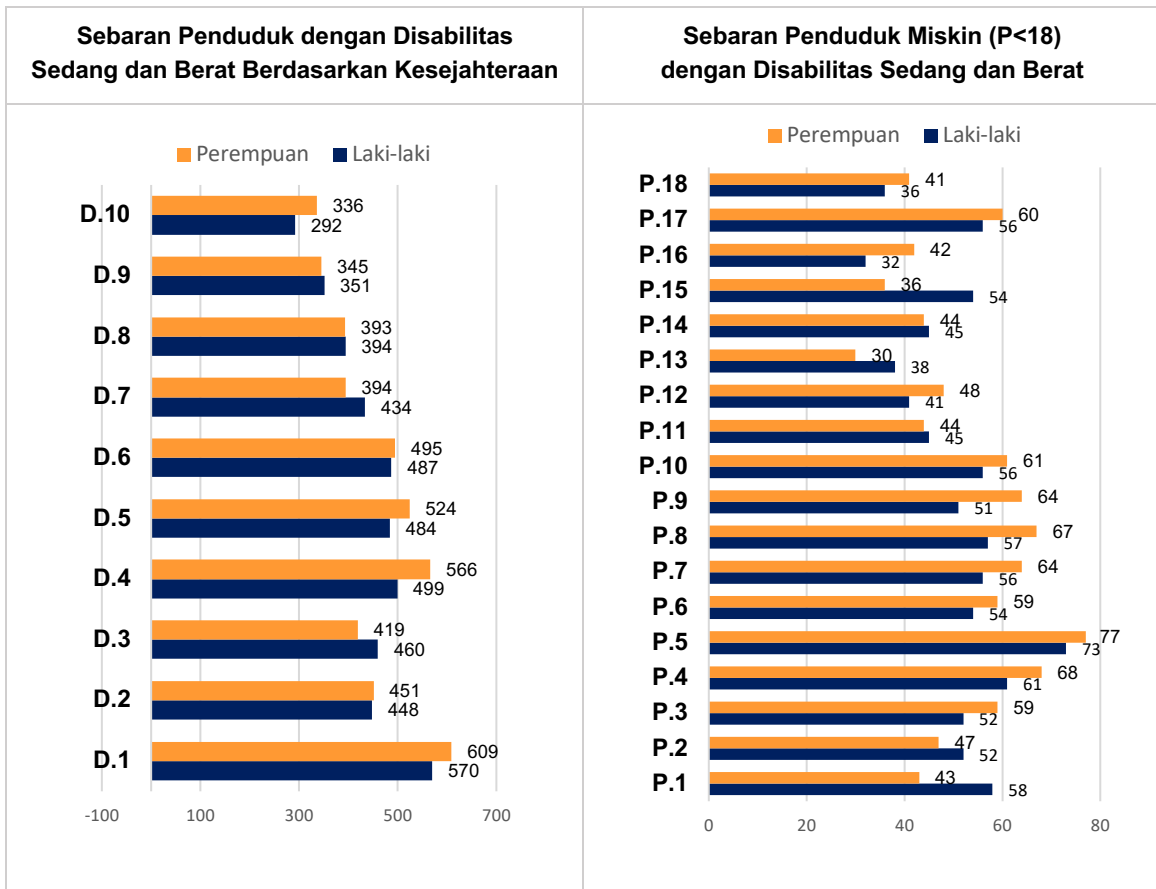
Sumber: Regsosek, 2022

Dari sebarannya, penduduk miskin terkonsentrasi di 2% termiskin di Papua sebanyak 20.579 penduduk (3,44%) dari total penduduk di Papua. Mereka tergolong dalam kelompok miskin ekstrim Papua. Berdasarkan wilayahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Penanganan kemiskinan dapat difokuskan pada lokasi tersebut. Dalam hal ini, Kota Jayapura merupakan ibukota provinsi Papua – yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Papua.

#### 2.2.4.3 Kondisi Kemiskinan Kelompok Disabilitas (Sedang dan Berat)

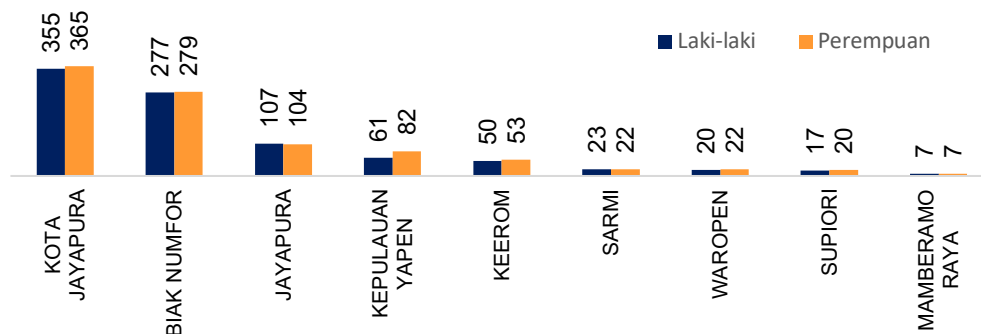
Gambar II.21 menunjukkan sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan kesejahteraan serta penduduk miskin (P<18) dengan disabilitas sedang dan berat di Provinsi Papua. Berdasarkan Gambar II.21 diketahui sebanyak 8.951 (1,49%) dari 596.774 penduduk di Papua mengalami disabilitas sedang dan berat yang harus diprioritaskan. Sebanyak 924(0,15%) dari total penduduk di Papua mengalami disabilitas sedang dan berat dengan status miskin. Penduduk disabilitas sedang dan berat yang berstatus miskin terbanyak berada di 5% termiskin dan berjenis kelamin Perempuan. Berdasarkan lokasinya, penyandang disabilitas di Papua dengan status miskin paling banyak berada di Kota Jayapura.

**Gambar II.21 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Kesejahteraan serta Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua**



Sumber: Regsosek, 2022

**Gambar II.22 Persebaran Penduduk Miskin (P<18) dengan Disabilitas Sedang dan Berat di Provinsi Papua**



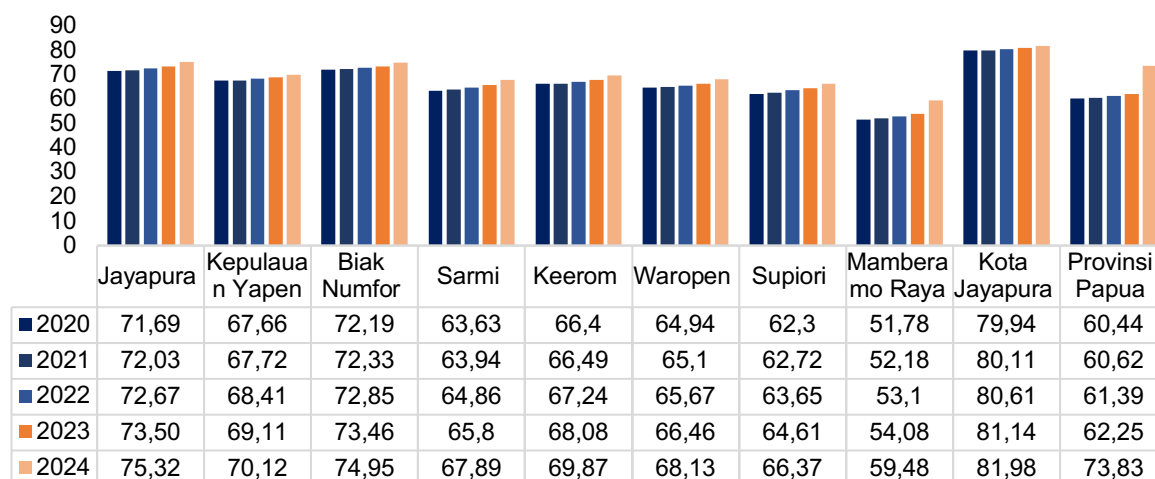
Sumber: Regsosek, 2022

## 2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua periode 2020–2024, menunjukkan seluruh wilayah mengalami peningkatan IPM yang konsisten, dengan lonjakan signifikan secara keseluruhan pada tahun 2024. IPM Provinsi Papua meningkat dari 62,25 pada tahun 2023 menjadi 73,83 pada tahun 2024.

Kota Jayapura tetap menjadi wilayah dengan IPM tertinggi, meningkat dari 81,14 (2023) menjadi 81,98 (2024). Diikuti oleh Kabupaten Jayapura (75,32) dan Biak Numfor (74,95). Sementara itu, Kabupaten Mamberamo Raya, meskipun masih memiliki IPM terendah, menunjukkan kemajuan paling pesat dengan peningkatan dari 54,08 (2023) menjadi 59,48 (2024). Kabupaten lainnya seperti Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, dan Kepulauan Yapen juga mengalami kenaikan IPM, meskipun nilainya masih di bawah rata-rata provinsi.

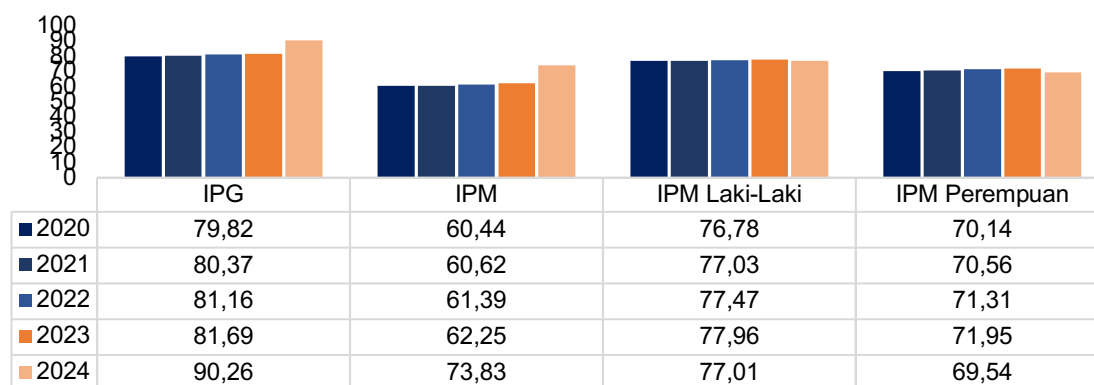
**Gambar II.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2020-2024**



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah, 2025)

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua periode 2020–2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. IPG meningkat drastis dari 81,69 pada tahun 2023 menjadi 90,26 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan dalam kesetaraan gender. Sementara itu, IPM juga mengalami lonjakan dari 62,25 menjadi 73,83, menunjukkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat. Namun, disparitas gender masih terlihat pada komponen IPM. IPM Laki-Laki sedikit menurun dari 77,96 (2023) menjadi 77,01 (2024), sedangkan IPM Perempuan turun lebih tajam dari 71,95 menjadi 69,54.

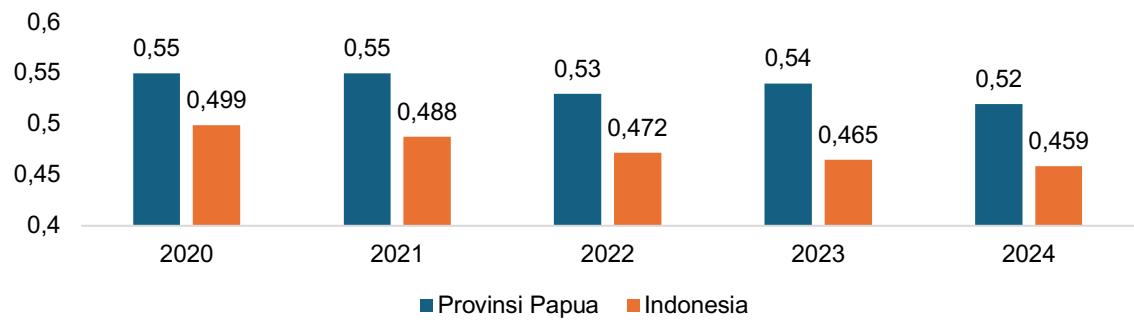
**Gambar II.24 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS RI, 2025 (data diolah)

Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami peningkatan IPG menuju 100 yang menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan yang terjadi antara Perempuan dan laki-laki di Provinsi Papua. Adapun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua menunjukkan penurunan yang diartikan bahwa kesetaraan gender semakin membaik di Provinsi Papua yang ditunjukkan melalui Gambar II.18.

Gambar II.25 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

2.2.6 Angka Harapan Hidup

Berdasarkan Gambar II.26 diketahui bahwa AHH baik secara provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2017-2023. Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Jayapura dengan tingkat AHH tertinggi, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah di Provinsi Papua.

Gambar II.26 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2017-2023

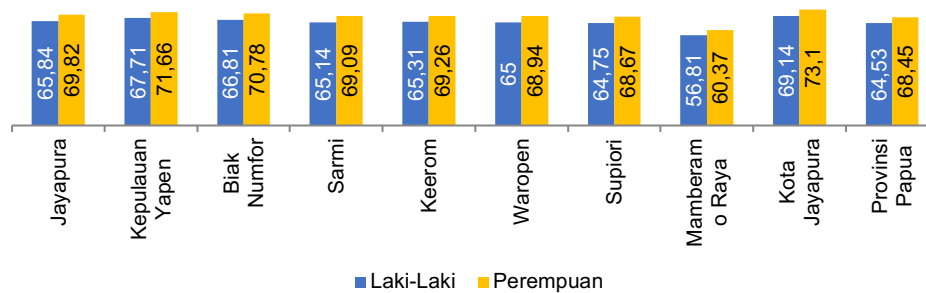


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024



Berdasarkan Gambar II.26 diketahui bahwa Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2023 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2023 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

**Gambar II.27 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

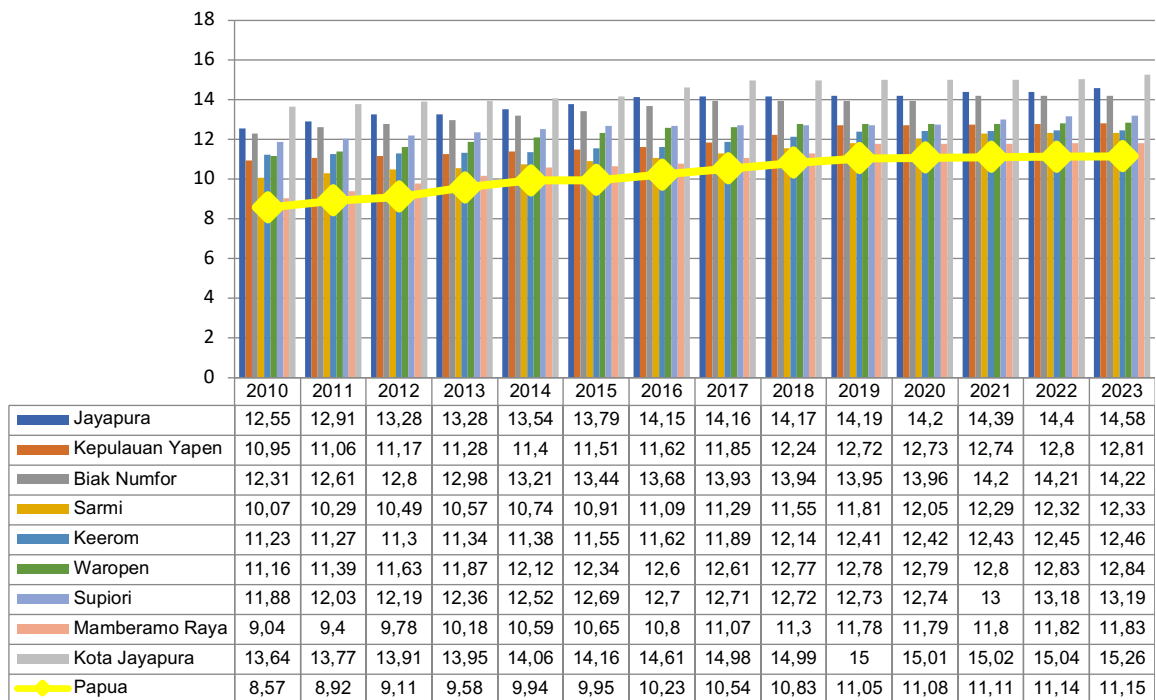
Berdasarkan Gambar II.27 diketahui bahwa Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2023 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2023 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

## 2.2.7 Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan Gambar II.28, HLS di Provinsi Papua mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Papua secara terus menerus meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan bagi penduduk usia sekolah di atas 7 tahun di Provinsi Papua. Kenaikan secara Provinsi juga sudah diikuti dengan kenaikan HLS pada masing-masing kabupaten/kota yang ada.

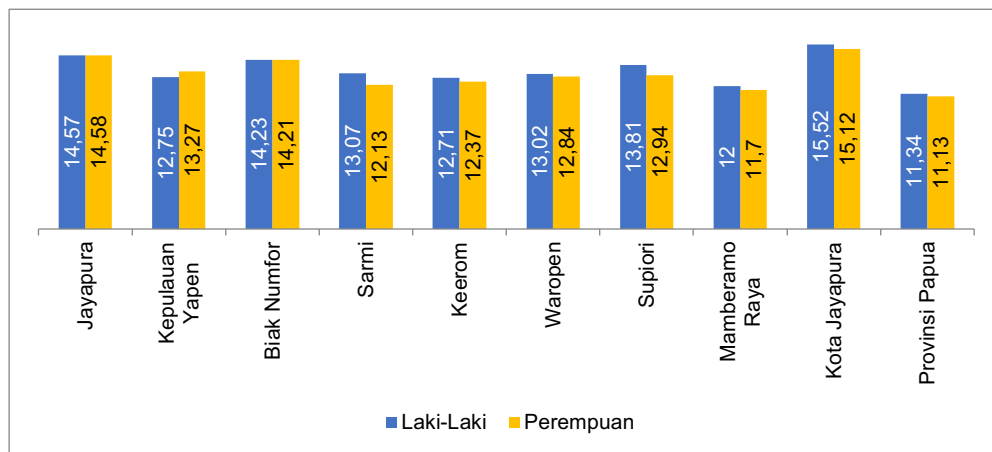
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan Gambar II.29 HLS Provinsi Papua ditunjukkan melalui masing-masing kabupaten/kota berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023. Diketahui bahwa, Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan angka HLS tertinggi untuk kedua jenis kelamin diikuti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan angka HLS terendah pada tahun 2023. Angka HLS berdasarkan gender pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua diketahui telah berada di atas rata-rata provinsi.

**Gambar II.28 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2023 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

**Gambar II.29 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)**

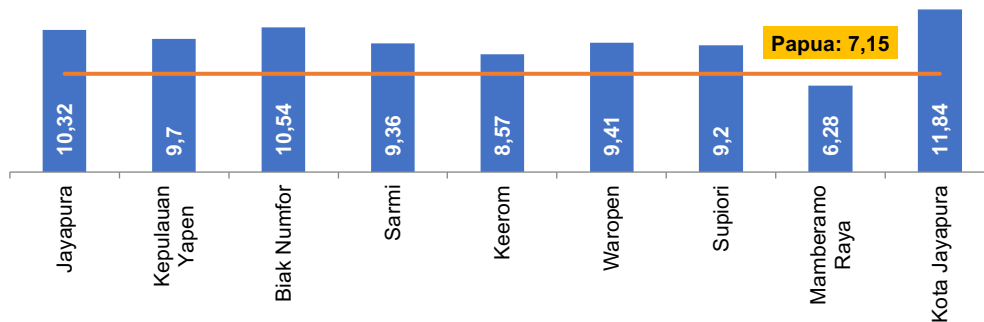


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

## 2.2.8 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan perhitungan jumlah tahun oleh penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

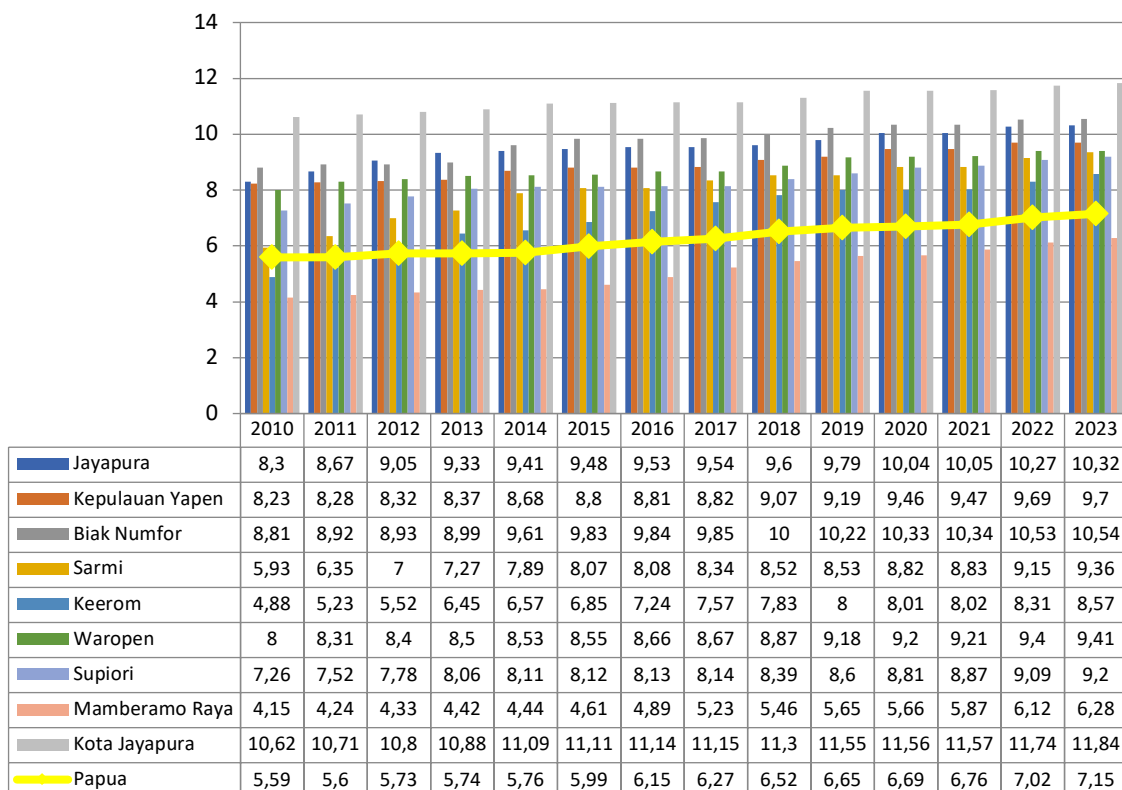
**Gambar II.30 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

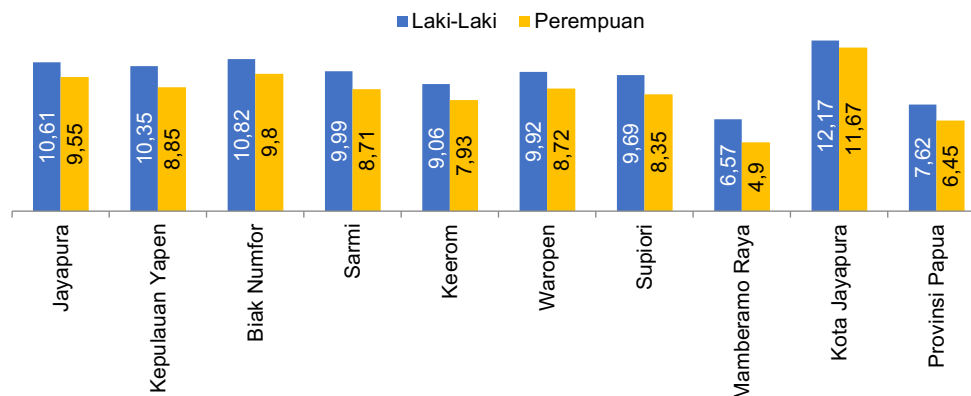
Berdasarkan Gambar II.30, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua berada di atas rata-rata Provinsi. Masih terdapat kabupaten dengan RLS di bawah rata-rata Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. RLS tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan RLS di Provinsi Papua menurut masing-masing kabupaten/kota mengalami peningkatan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Secara kabupaten/kota, Kota Jayapura memiliki RLS tertinggi selama lebih dari 10 tahun terakhir namun hal tersebut belum diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya yang memiliki RLS masih di bawah RLS Provinsi Papua.

**Gambar II.31 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2023 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

**Gambar II.32 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2023 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Gambar II.32 menunjukkan rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Papua berdasarkan gender. Angka RLS tertinggi di Provinsi Papua untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2023 adalah Kota Jayapura. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan RLS berdasarkan gender terendah di Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Raya juga menjadi kabupaten dengan capaian RLS yang masih berada di bawah garis rata-rata secara provinsi. Berdasarkan Gambar II.32 juga dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki cenderung mendominasi perolehan RLS berdasarkan gender di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Kota Jayapura cenderung memiliki capaian RLS yang hampir serupa untuk kedua jenis kelamin.

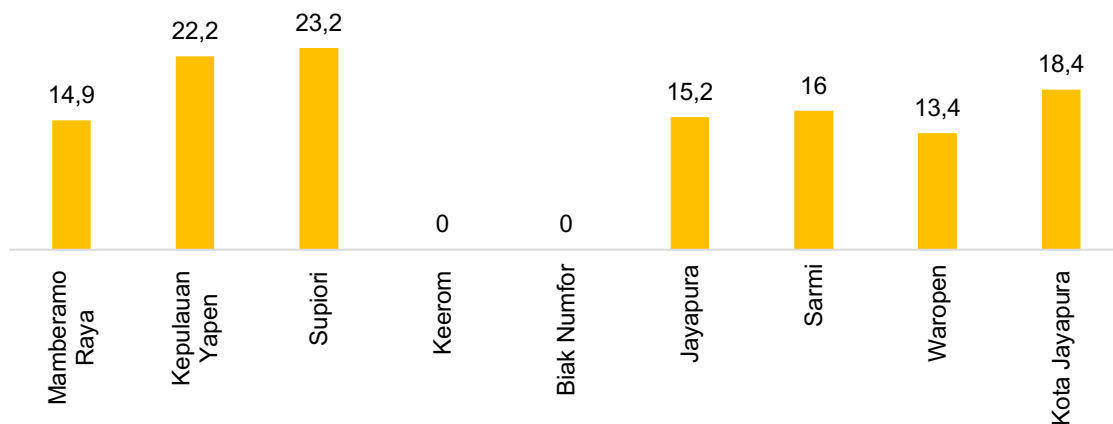
## 2.2.9 Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Berdasarkan data Prevalensi Balita Stunting di Provinsi Papua Tahun 2024, terdapat variasi angka stunting yang signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Waropen mencatat prevalensi terendah sebesar 13,4%, disusul oleh Kabupaten Mamberamo Raya dengan 14,9% dan Kabupaten Jayapura dengan 15,2%. Sementara itu, Kabupaten Sarmi berada pada angka 16% dan Kota Jayapura tercatat sebesar 18,4%. Prevalensi yang lebih tinggi ditemukan di Kepulauan Yapen (22,2%) dan Supiori (23,2%). Data untuk Kabupaten Keerom dan Biak Numfor tidak tersedia (-). Secara keseluruhan, disparitas ini

mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih terfokus dan spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah untuk menekan angka stunting di Papua.

**Gambar II.33 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2024**



Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, 2024

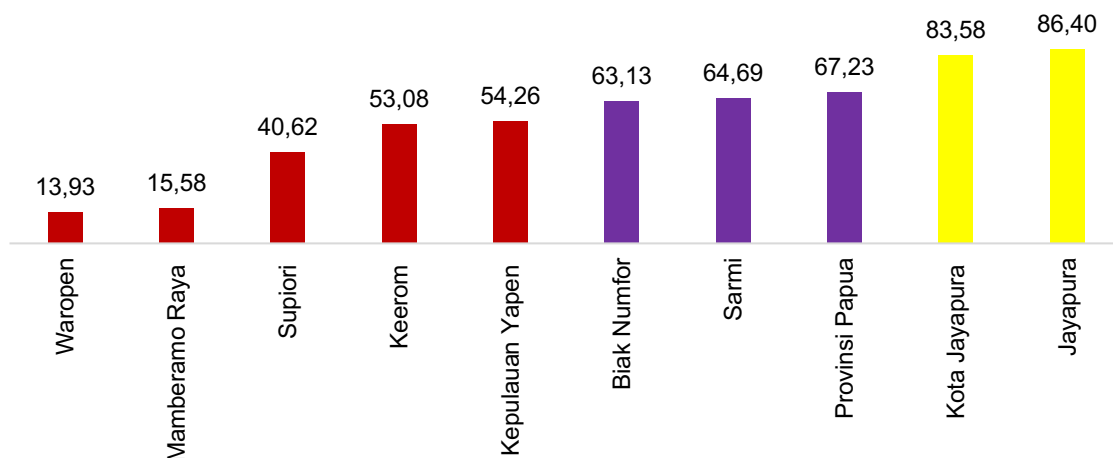
## 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

### 2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

#### 2.3.1.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM adalah singkatan dari Standar Pelayanan Minimal. Ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dalam urusan pemerintahan wajib. SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang setara dan terstandarisasi, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kesejahteraan sosial, dan perumahan.

**Gambar II.34 Urutan Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang Tahun 2024**

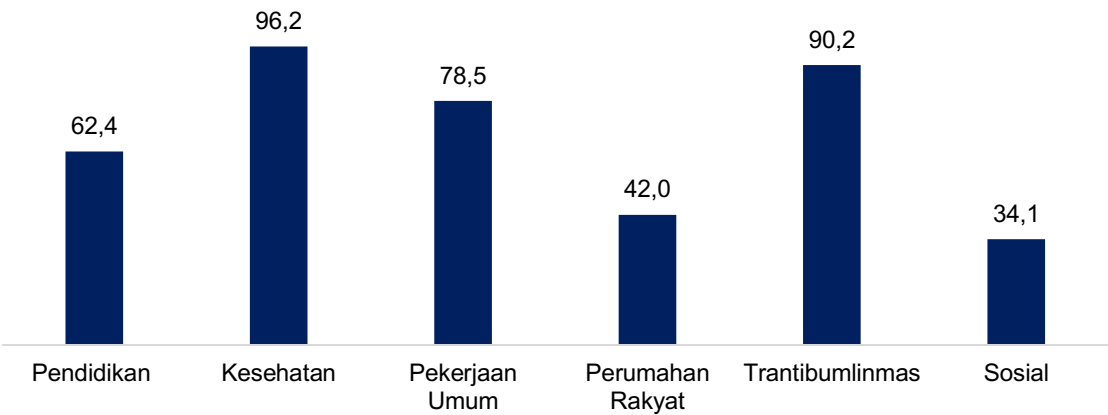


Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024



Dari Gambar diatas, capaian Papua untuk SPM belum menggembirakan, karena masih belum tuntas (67,23 %). Untuk level Kab/Kota, tampak baru 2 Kabupaten di Provinsi Papua yang secara umum telah mencapai capaian tinggi diatas 80 % dan telah berwarna kuning, yaitu Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. 2 kabupaten lainnya berada pada kategori sedang yaitu Kabupaten Biak dan Kabupaten Sarmi. Sementara 5 kabupaten sisanya yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen capaiannya masih berada dibawah 55 %, atau masuk kategori rendah (tidak tuntas).

**Gambar II.35 Gambar II.36 Urutan Persentase Capaian Untuk Setiap Bidang Tahun 2024**



*Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024*

Sedangkan berdasarkan persentase pencapaian SPM terhadap bidang urusan, Urusan yang realisasinya tertinggi ditempati Kesehatan dan Trantibumlinmas (didas 90%), diikuti Pekerjaan Umum (78,5%), Pendidikan (62,5%), Perumahan Rakyat (42%). Yang terendah ditempati Urusan Sosial yang mencapai (34,15%).

Kendala yang dihadapi terkait Realisasi Capaian SPM yang belum sesuai Target yaitu 100 % untuk semua Urusan SPM kepada Sasaran Prioritas Warga Masyarakat yang telah ditetapkan, cukup beragam, diantaranya : Terbatasnya Anggaran OPD, Kapasitas SDM yang masih terbatas, kendala jaringan dan sebagainya.

Data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Papua Bidang Pendidikan Tahun 2024, secara keseluruhan mencapai 62,39%. Capaian pada layanan Pendidikan Khusus juga menunjukkan angka yang sama, yaitu 62,39%. Namun, dari segi penerima layanan dasar, realisasi yang dicapai baru 45,31% dari target sebesar 80%. Sebanyak 461 orang (56,63%) dari total 814 orang yang membutuhkan telah menerima layanan, sementara 353 orang (43,37%) masih belum tertangani.

Dari aspek mutu layanan, pencapaian rata-ratanya sebesar 17,09%. Beberapa indikator mutu menunjukkan hasil yang beragam. Angka Partisipasi Kasar (APK) mencapai 85,06%,

sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) hanya 56,61%. Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masing-masing berada pada level 72,56% dan 55,74%. Indeks iklim pendidikan seperti keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu berturut-turut 78,26%, 70,44%, dan 76,98%. Sementara itu, beberapa indikator terkait guru seperti distribusi dan sertifikasi secara formal tercapai 100% terhadap target tahunan, meskipun nilai aktualnya masih sangat rendah, seperti distribusi guru hanya 0,20% dan proporsi PTK bersertifikat 25,98%.

**Tabel II.29 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Pendidikan Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                         | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output                     |                                              |                                              | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|    | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>                         |        |                                                   |                                              |                                              | <b>62.39 %</b>   |
| 1. | <b>Pendidikan Khusus</b>                                      |        |                                                   |                                              |                                              | <b>62.39 %</b>   |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>     |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>           | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>           | <b>Yang Belum Terlayani</b>                  | <b>45.31 %</b>   |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                        | Orang  | 814                                               | 461                                          | 353                                          | <b>56.63 %</b>   |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b> |        |                                                   |                                              |                                              | <b>17.09 %</b>   |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                     |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>85.43 %</b>   |
|    | 1 . Angka partisipasi kasar                                   | %      | 100                                               | 85.06                                        | 14.94                                        | 100.00 %         |
|    | 2 . Angka partisipasi sekolah                                 | %      | 100                                               | 56.61                                        | 43.39                                        | 56.61 %          |
|    | 3 . Kemampuan literasi                                        | Nilai  | 100                                               | 72.56                                        | 27.44                                        | 72.56 %          |
|    | 4 . Kemampuan numerasi                                        | Nilai  | 100                                               | 55.74                                        | 44.26                                        | 55.74 %          |
|    | 5 . Perbedaan skor literasi                                   | Nilai  | 100                                               | 43.04                                        | 56.96                                        | 100.00 %         |
|    | 6 . Perbedaan skor numerasi                                   | Nilai  | 100                                               | 34.72                                        | 65.28                                        | 100.00 %         |
|    | 7 . Indeks iklim keamanan                                     | Nilai  | 100                                               | 78.26                                        | 21.74                                        | 78.26 %          |
|    | 8 . Indeks iklim kebhinekaan                                  | Nilai  | 100                                               | 70.44                                        | 29.56                                        | 70.44 %          |
|    | 9 . Indeks iklim inklusivitas                                 | Nilai  | 100                                               | 76.98                                        | 23.02                                        | 76.98 %          |
|    | 10 . Kecukupan formasi guru ASN                               | %      | 0                                                 | 0                                            | 0                                            | 100.00 %         |
|    | 11 . Indeks distribusi guru                                   | %      | 100                                               | 0.20                                         | 99.8                                         | 100.00 %         |
|    | 12 . Proporsi PTK bersertifikat                               | %      | 100                                               | 25.98                                        | 74.02                                        | 100.00 %         |
|    | 13 . Proporsi PTK penggerak*                                  | %      | 0                                                 | 0                                            | 0                                            | 100.00 %         |

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024

Kemudian untuk bidang Kesehatan, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Papua Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 96,18% dengan kategori TUNTAS UTAMA. Capaian ini terbagi dalam dua jenis layanan utama. Pertama, Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi mencapai 95,18%. Kedua, Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi mencapai 97,18%.

Pada layanan pra krisis kesehatan, seluruh target penerima layanan dasar (6.495 orang) telah terpenuhi (100%). Edukasi pengurangan risiko dan ketersediaan sarana prasarana (139 unit) juga mencapai 100%. Namun, dari aspek mutu, pencapaian rata-ratanya adalah 15,18%. Ketersediaan tenaga medis, kesehatan, atau non kesehatan masih sangat rendah, dimana dari 47 orang yang dibutuhkan, baru 13 orang (27,66%) yang terpenuhi.

Pada layanan kondisi berpotensi KLB, seluruh target penerima layanan dasar (296 orang) juga telah terlayani (100%) dengan pencapaian mutu minimal 17,18%. Sebagian besar indikator mutu terpenuhi dengan baik, seperti ketersediaan APD, profilaksis, tenaga medis, dan tenaga kesehatan masyarakat yang mencapai 100%. Namun, beberapa indikator masih mengalami kekurangan, seperti wadah pengiriman spesimen (67,57%), tempat sampah biologis (0%), formulir penyelidikan epidemiologi (67,57%), serta alat dan bahan pengambilan spesimen (67,57%).

**Tabel II.30 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Kesehatan Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                        | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output              |                                        |                                       | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|    | <b>KATEGORI INDEKS</b>                                                                                                                       |        | <b>TUNTAS UTAMA</b>                        |                                        |                                       | <b>96.18 %</b>   |
|    | <b>PENCAPAIAN SPM</b>                                                                                                                        |        |                                            |                                        |                                       |                  |
| 1. | Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi                             |        |                                            |                                        |                                       | 95.18 %          |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                    |        | Jumlah Total                               | Jumlah Total                           | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|    |                                                                                                                                              |        | Yang Harus Dilayani                        | Yang Terlayani                         |                                       |                  |
|    | Pra Krisis Kesehatan                                                                                                                         |        |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                       | Orang  | 6495                                       | 6495                                   | 0                                     | 100.00 %         |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                                |        |                                            |                                        |                                       | 15.18 %          |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                    |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 75.89 %          |
|    | 1 . Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana<br>(peserta/masyarakat)             | Orang  | 6495                                       | 6495                                   | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2 . Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan                                                                                | Orang  | 47                                         | 13                                     | 34                                    | 27.66 %          |
|    | 3 . Sarana dan prasarana                                                                                                                     | Unit   | 139                                        | 139                                    | 0                                     | 100.00 %         |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi                                                                  |        |                                            |                                        |                                       | 97.18 %          |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                    |        | Jumlah Total                               | Jumlah Total                           | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|    |                                                                                                                                              |        | Yang Harus Dilayani                        | Yang Terlayani                         |                                       |                  |
|    | Kondisi Berpotensi KLB                                                                                                                       |        |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                       | Orang  | 296                                        | 296                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                                |        |                                            |                                        |                                       | 17.18 %          |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                    |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 85.91 %          |
|    | 1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)                  | Unit   | 2                                          | 2                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepada kontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit) | Unit   | 296                                        | 296                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)                                          | Unit   | 296                                        | 200                                    | 96                                    | 67.57 %          |
|    | 4 . Tempat sampah biologis                                                                                                                   | Unit   | 2                                          | 0                                      | 2                                     | 0.00 %           |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                         | SATUAN   | Indikator Pencapaian / Output |     |    | Total Pencapaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----|----|------------------|
|    | (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)                                                                                                                              |          |                               |     |    |                  |
|    | 5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan<br>(untuk membantu melakukan investigasi kasus, suspek, kontak dan populasi berisiko serta faktor risiko) | Formulir | 296                           | 200 | 96 | 67.57 %          |
|    | 6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen, tes diagnostik cepat, dll)<br>(untuk membantu penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium)                        | Unit     | 296                           | 200 | 96 | 67.57 %          |
|    | 7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)<br>(untuk membantu penegakan diagnosis)                                                                     | Unit     | 2                             | 2   | 0  | 100.00 %         |
|    | 8 . Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                     | Orang    | 507                           | 507 | 0  | 100.00 %         |
|    | 9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi                                                                                                               | Orang    | 431                           | 431 | 0  | 100.00 %         |
|    | 10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan                                                                                                      | Orang    | 193                           | 193 | 0  | 100.00 %         |
|    | 11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi                                                                                                                | Orang    | 1                             | 1   | 0  | 100.00 %         |
|    | 12 . Tenaga Laboratorium                                                                                                                                                                      | Orang    | 504                           | 504 | 0  | 100.00 %         |
|    | 13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan                                                                                                                                                        | Orang    | 1                             | 1   | 0  | 100.00 %         |
|    | 14 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi                                                                                                               | Orang    | 2                             | 2   | 0  | 100.00 %         |

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024

Kemudian untuk Bidang Pekerjaan Umum, Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Papua Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 78,52% dengan kategori TUNTAS PRATAMA. Capaian ini terdiri dari dua layanan utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui penyelenggaraan SPAM mencapai 67,04%. Kedua, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota mencapai 90,00%.

Pada layanan SPAM, capaian penerima layanan dasar adalah 56,71%. Dari 4.232 orang yang harus dilayani, baru 3.000 orang (70,89%) yang terpenuhi, sehingga masih terdapat 1.232 orang (29,11%) yang belum mendapatkan layanan. Pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 10,33%. Kuantitas air minum yang disalurkan melalui SPAM regional masih sangat rendah, dimana dari target 30 liter/detik, realisasinya hanya 1 liter/detik (3,33%). Namun, kualitas air minum telah memenuhi standar kesehatan (100%) dan bantuan keuangan untuk pembinaan pengelolaan SPAM kabupaten/kota juga telah tersalurkan dengan baik (100%).

Pada layanan pengolahan air limbah domestik (SPALD), capaian penerima layanan dasar adalah 80,00%. Tidak ada target penerima layanan yang harus dipenuhi (0 orang), sehingga pencapaiannya 100%. Pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 10,00%.

Bantuan keuangan untuk pembinaan pengelolaan SPALD kabupaten/kota telah tersalurkan (100%), namun rekapitulasi data pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPALD kabupaten/kota belum dilakukan (0%).

Dari aspek pendataan, kondisi SPAM dan SPALD regional telah terdata dengan baik (masing-masing 100%). Pada perhitungan, rumah terlayani SPALD regional telah terhitung (100%), namun rumah terlayani SPAM regional belum terdata (0%). Untuk perencanaan, dokumen rencana pemenuhan air minum provinsi dan rencana pemenuhan air limbah domestik sama-sama belum tersusun (masing-masing 0%).

**Tabel II.31 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                  | SATUAN      | Indikator Pencapaian / Output              |                                        |                                       | Total Pencapaian |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|    | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>                                                                                                                                                                  |             |                                            |                                        |                                       | 78.52 %          |
| 1. | <b>Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota</b>                                                                                    |             |                                            |                                        |                                       | 67.04 %          |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                                              |             | Jumlah Total                               | Jumlah Total                           | Yang Belum                            | 56.71 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                        |             | Yang Harus Dilayani                        | Yang Terlayani                         | Terlayani                             |                  |
|    | Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                |             |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                                                 | Orang       | 4232                                       | 3000                                   | 1232                                  | 70.89 %          |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                                                                                          |             |                                            |                                        |                                       | 10.33 %          |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                              |             | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 51.67 %          |
|    | 1 SPAM Lintas Regional                                                                                                                                                                                 |             | 30                                         | 1                                      | 29                                    | 3.33 %           |
|    | a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM                  | Liter/detik | 30                                         | 1                                      | 29                                    | 3.33 %           |
|    | b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | Liter/detik | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|    | 2 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota                           | Rupiah      | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
| 2. | <b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota</b>                                                                                                              |             |                                            |                                        |                                       | 90.00 %          |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                                                                                                                              |             | Jumlah Total                               | Jumlah Total                           | Yang Belum                            | 80.00 %          |
|    |                                                                                                                                                                                                        |             | Yang Harus Dilayani                        | Yang Terlayani                         | Terlayani                             |                  |
|    | Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)                                                                                                          |             |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                                                 | Orang       | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                                                                                                                                          |             |                                            |                                        |                                       | 10.00 %          |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                 | SATUAN          | Indikator Pencapaian / Output              |                                        |                                       | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                                                                    |                 | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 50.00 %          |
|    | 1 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota         | Rupiah          | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|    | 2 Rekapitulasi SPALD Kab/Kota Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan) | Jumlah Kab/Kota | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|    | <b>1.PENDATAAN</b>                                                                                                                                                                    |                 |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | FORM 3.A.1 KONDISI SPAM REGIONAL                                                                                                                                                      |                 |                                            |                                        |                                       | 100              |
|    | FORM 3.A.2 KONDISI SPALD REGIONAL                                                                                                                                                     |                 |                                            |                                        |                                       | 100              |
|    | <b>2.PERHITUNGAN</b>                                                                                                                                                                  |                 |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | FORM 3.B.1 RUMAH TERLAYANI SPAM REGIONAL                                                                                                                                              |                 |                                            |                                        |                                       | 0                |
|    | FORM 3.B.2 RUMAH TERLAYANI SPALD REGIONAL                                                                                                                                             |                 |                                            |                                        |                                       | 100              |
|    | <b>3.PERENCANAAN</b>                                                                                                                                                                  |                 |                                            |                                        |                                       |                  |
|    | FORM 3.C.1 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM PROVINSI                                                                                                                                       |                 |                                            |                                        |                                       | 0                |
|    | FORM 3.C.2 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK                                                                                                                                      |                 |                                            |                                        |                                       | 0                |

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024

Untuk Bidang Perumahan, berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Papua Tahun 2024, secara keseluruhan baru mencapai 41,97% dengan kategori BELUM TUNTAS. Capaian ini terdiri dari dua layanan utama. Pertama, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi mencapai 55,00%. Kedua, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi mencapai 28,94%.

Pada layanan bagi korban bencana, capaian penerima layanan dasar adalah 40,00%. Dari 1.000 orang yang harus dilayani, baru 500 orang (50,00%) yang terpenuhi, sehingga masih terdapat 500 orang (50,00%) yang belum mendapatkan layanan. Pencapaian mutu layanan dasar sebesar 15,00%. Meskipun tidak ada target fisik rehabilitasi, pembangunan kembali, pemukiman kembali, atau bantuan sewa rumah yang direncanakan (0 unit), indikator mutu untuk rehabilitasi, pemukiman kembali, dan bantuan akses sewa menunjukkan capaian 100%, sementara pembangunan kembali rumah tercatat 0%.

Pada layanan fasilitasi relokasi, capaian penerima layanan dasar adalah 16,84%. Dari 950 orang yang harus dilayani, hanya 200 orang (21,05%) yang terpenuhi, sehingga masih terdapat 750 orang (78,95%) yang belum tertangani. Pencapaian mutu layanan dasar sebesar 12,10%. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan masih sangat rendah, dimana dari target 238 rumah, realisasinya hanya 50 rumah (21,01%). Proses sosialisasi kepada masyarakat juga mencapai 21,01%, sementara



penilaian oleh tim penaksir dan proses penggantian untung belum dilakukan (0%). Bantuan akses rumah sewa layak huni telah tercapai 100%, namun tidak ada target yang direncanakan (0 unit).

**Tabel II.32 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Perumahan Tahun 2024**

| No                                             | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output              |                                        |                                       | Total Pencapaian |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                                                | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                                                                                       |        |                                            |                                        |                                       | 41.97 %          |
| 1 .                                            | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi                                         |        |                                            |                                        |                                       | 55.00 %          |
|                                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                   |        |                                            |                                        | -80%                                  | 40.00 %          |
|                                                |                                                                                                                      |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  |                  |
| Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)         |                                                                                                                      |        |                                            |                                        |                                       |                  |
|                                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                      | Orang  | 1000                                       | 500                                    | 500                                   | 50.00 %          |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) |                                                                                                                      |        |                                            |                                        | -20%                                  | 15.00 %          |
|                                                | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                        |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi   | Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi   | Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi   | 75.00 %          |
|                                                | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                   |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |
|                                                | 1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana                                                                           | Rumah  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|                                                | 2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana                                                                    | Rumah  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                                                | 3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana                                                                            | Rumah  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|                                                | 4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana                                                          | Rumah  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 100.00 %         |
| 2 .                                            | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi |        |                                            |                                        |                                       | 28.94 %          |
|                                                | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                                   |        |                                            |                                        | -80%                                  | 16.84 %          |
|                                                |                                                                                                                      |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  |                  |
| Ada Relokasi Program Pemerintah                |                                                                                                                      |        |                                            |                                        |                                       |                  |
|                                                | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                      | Orang  | 950                                        | 200                                    | 750                                   | 21.05 %          |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%) |                                                                                                                      |        |                                            |                                        | -20%                                  | 12.10 %          |
|                                                | B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI                                                        |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi   | Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi   | Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi   | 60.50 %          |
|                                                | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                   |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi |                  |
|                                                | 1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan                                               | Rumah  | 238                                        | 50                                     | 188                                   | 21.01 %          |
|                                                | a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal):                                                                          | Rumah  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                      | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output |    |     | Total Pencapaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|----|-----|------------------|
|    | b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan                               | Rumah  | 238                           | 50 | 188 | 21.01 %          |
|    | c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi | Rumah  | 0                             | 0  | 0   | 0.00 %           |
|    | 2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni                                    | Rumah  | 0                             | 0  | 0   | 100.00 %         |

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024

Kemudian untuk Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Papua Tahun 2024, secara keseluruhan telah mencapai 90,23% dengan kategori TUNTAS UTAMA. Seluruh target penerima layanan dasar sebanyak 166 orang telah terpenuhi, sehingga capaian pada aspek ini mencapai 100%. Namun, pencapaian mutu minimal layanan dasar masih relatif rendah, yaitu 10,23%, dengan rata-rata capaian indikator mutu sebesar 51,17%.

Beberapa indikator mutu menunjukkan kinerja yang baik, seperti penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP yang telah mencapai 15 dokumen dari target yang ditetapkan (100%), peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat yang juga terpenuhi untuk 116 orang (100%), serta penyediaan dokumen koordinasi penanganan dampak gangguan Trantibum yang telah terselesaikan. Namun, penyediaan sarana prasarana Satpol PP masih menjadi tantangan serius, dimana dari target 455 unit, realisasinya hanya 32 unit (7,03%). Sementara itu, layanan kerugian materiil dan pengobatan secara formal tercatat 100% meskipun tidak ada masyarakat yang ditargetkan untuk menerima layanan tersebut.

**Tabel II.33 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Trantibumlinmas Tahun 2024**

| No  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                      | SATUAN  | Indikator Pencapaian / Output                     |                                               |                                              | Total Pencapaian |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|     | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>                                                      |         |                                                   |                                               |                                              | 90.23 %          |
| 1 . | <b>Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum Provinsi</b>                                   |         |                                                   |                                               |                                              | 90.23 %          |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                  |         | <b>Jumlah Total</b>                               | <b>Jumlah Total</b>                           | <b>Yang Belum</b>                            | <b>80.00 %</b>   |
|     |                                                                                            |         | <b>Yang Harus Dilayani</b>                        | <b>Yang Terlayani</b>                         | <b>Terlayani</b>                             |                  |
|     | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                     | Orang   | 166                                               | 166                                           | 0                                            | 100.00 %         |
|     | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                              |         |                                                   |                                               |                                              | 10.23 %          |
|     | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                  |         | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | 51.17 %          |
|     | 1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara  | unit    | 455                                               | 32                                            | 423 423 423                                  | 7.03 %           |
|     | 2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* | dokumen | 15                                                | 15                                            | 0 0 0                                        | 0.00 %           |

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN  | Indikator Pencapaian / Output |     |       | Total Pencapaian |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-----|-------|------------------|
|    | 3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***                                                                                                                            | orang   | 116                           | 116 | 0 0 0 | 100.00 %         |
|    | 4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal | dokumen | 1                             | 1   | 0 0 0 | 0.00 %           |
|    | 5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | orang   | 0                             | 0   | 0 0 0 | 100.00 %         |
|    | 6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | orang   | 0                             | 0   | 0 0 0 | 100.00 %         |

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024

Untuk Bidang Sosial, berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Papua Tahun 2024, secara keseluruhan baru mencapai 34,09% dengan kategori BELUM TUNTAS. Capaian ini terdiri dari lima layanan utama dengan hasil yang sangat beragam. Pada layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, capaian mencapai 85,45%. Seluruh target 18 orang penerima layanan telah terpenuhi (100%). Pencapaian mutu layanan dasar sebesar 5,45%, dengan pemenuhan layanan permakanan, asrama, dan perbekalan kesehatan mencapai 100%. Namun, layanan sandang, alat bantu, bimbingan, fasilitasi dokumen kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, serta penelusuran keluarga sama sekali tidak terlaksana (0%).

Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar dan Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) menunjukkan capaian 0%. Tidak ada target penerima layanan yang ditetapkan (0 orang) dan tidak ada indikator mutu yang terpenuhi. Pada layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar, capaian mencapai 85,00%. Seluruh target 39 orang penerima layanan telah terpenuhi (100%). Pencapaian mutu layanan dasar sebesar 5,00%, dengan pemenuhan layanan permakanan, asrama, dan perbekalan kesehatan kembali mencapai 100%. Namun, layanan pemulasaraan jenazah tidak terlaksana sama sekali (0% untuk 19 orang), dan layanan-layanan pendukung lainnya juga tidak tersedia (0%). Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pasca Bencana juga mencatat capaian 0% tanpa target penerima layanan dan tanpa realisasi indikator mutu.

**Tabel II.34 Capaian SPM Provinsi Papua Bidang Sosial Tahun 2024**

| No    | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                    | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output    |                             |                      | Total Pencapaian |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 01.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti |        |                                  |                             |                      | 85.45 %          |
|       | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                       |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani | Jumlah Total Yang Terlayani | Yang Belum Terlayani | 80.00 %          |

| No    | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                       | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output                     |                                               |                                              | Total Pencapaian |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
|       |                                                                                             |        |                                                   |                                               |                                              |                  |
|       | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                      | Orang  | 18                                                | 18                                            | 0                                            | 100.00 %         |
|       | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                               |        |                                                   |                                               |                                              | 5.45 %           |
|       | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                   |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | 27.27 %          |
|       | 1 . Penyediaan permakanan                                                                   | Orang  | 18                                                | 18                                            | 0                                            | 100.00 %         |
|       | 2 . Penyediaan sandang                                                                      | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 2 . Penyediaan sandang                                                                      | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses                                                    | Unit   | 18                                                | 18                                            | 0                                            | 100.00 %         |
|       | 4 . Penyediaan alat bantu                                                                   | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti                                           | Orang  | 18                                                | 18                                            | 0                                            | 100.00 %         |
|       | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                 | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari                                         | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                     | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                         | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                     | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                               | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
| 02.00 | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti</b>                               |        |                                                   |                                               |                                              | 0.00 %           |
|       | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                   |        | <b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>           | <b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>            | <b>Yang Belum Terlayani</b>                  | 0.00 %           |
|       | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                      | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                               |        |                                                   |                                               |                                              | 0.00 %           |
|       | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                   |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | 0.00 %           |
|       | 1 . Pengasuhan                                                                              | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 2 . Penyediaan permakanan                                                                   | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 3 . Penyediaan sandang                                                                      | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses                                                    | Unit   | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti                                           | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                                 | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari                                         | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                         | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                     | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |
|       | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                               | Orang  | 0                                                 | 0                                             | 0                                            | 0.00 %           |

| No    | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                   | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output              |                                        |                                       | Total Pencapaian |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|       | 12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti                                 | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
| 03.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti                           |        |                                            |                                        |                                       | 85.00 %          |
|       | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                      |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|       | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                         | Orang  | 39                                         | 39                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|       | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                  |        |                                            |                                        |                                       | 5.00 %           |
|       | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                      |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 25.00 %          |
|       | 1 . Penyediaan permakanan                                                               | Orang  | 39                                         | 39                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|       |                                                                                         |        |                                            |                                        |                                       | 100.00 %         |
|       | 2 . Penyediaan sandang                                                                  | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses                                                | Unit   | 39                                         | 39                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|       | 4 . Penyediaan alat bantu                                                               | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti                                       | Orang  | 39                                         | 39                                     | 0                                     | 100.00 %         |
|       | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                             | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari                                     | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK                 | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 9 . Akses ke layanan kesehatan dasar                                                    | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga                 | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga                                           | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 12 . Pemulasaraan                                                                       | Orang  | 19                                         | 0                                      | 19                                    | 0.00 %           |
|       | Ya, Ada Gepeng                                                                          |        |                                            |                                        |                                       |                  |
| 04.00 | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti |        |                                            |                                        |                                       | 0.00 %           |
|       | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                      |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 0.00 %           |
|       | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                         | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                  |        |                                            |                                        |                                       | 0.00 %           |
|       | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                      |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 0.00 %           |
|       | 1 . Penyediaan permakanan                                                               | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       |                                                                                         |        |                                            |                                        |                                       | 0.00 %           |
|       | 2 . Penyediaan sandang                                                                  | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses                                                | Unit   | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 4 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti                                       | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial                             | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 6 . Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari                                  | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 7 . Pemberian bimbingan keterampilan dasar                                              | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|       | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan,                                      | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |

| No                  | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                                                                      | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output              |                                        |                                       | Total Pencapaian |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
|                     | Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak                        |        |                                            |                                        |                                       |                  |
|                     | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar                                                        | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                     | 10 . Pemulangan ke daerah asal                                                                             | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
| 05.00               | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi |        |                                            |                                        |                                       | 0.00 %           |
|                     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                                         |        | Jumlah Total<br>Yang Harus Dilayani        | Jumlah Total<br>Yang Terlayani         | Yang Belum<br>Terlayani               | 0.00 %           |
| Ya, Terjadi Bencana |                                                                                                            |        |                                            |                                        |                                       |                  |
|                     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                            | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                                     |        |                                            |                                        |                                       | 0.00 %           |
|                     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                         |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 0.00 %           |
|                     | 1 . Penyediaan permakanan                                                                                  | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                     | 2 . Penyediaan sandang                                                                                     | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                     | 3.Penyediaan tempat penampungan pengungsi                                                                  | Unit   | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                     | 4.Penanganan khusus bagi kelompok rentan                                                                   | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |
|                     | 5.Pelayanan dukungan Psikososial                                                                           | Orang  | 0                                          | 0                                      | 0                                     | 0.00 %           |

Sumber : SPM.Bangda.Kemendagri.go.id, 2024

### 2.3.1.2 Pendidikan

#### 2.3.1.2.1 Partisipasi Sekolah

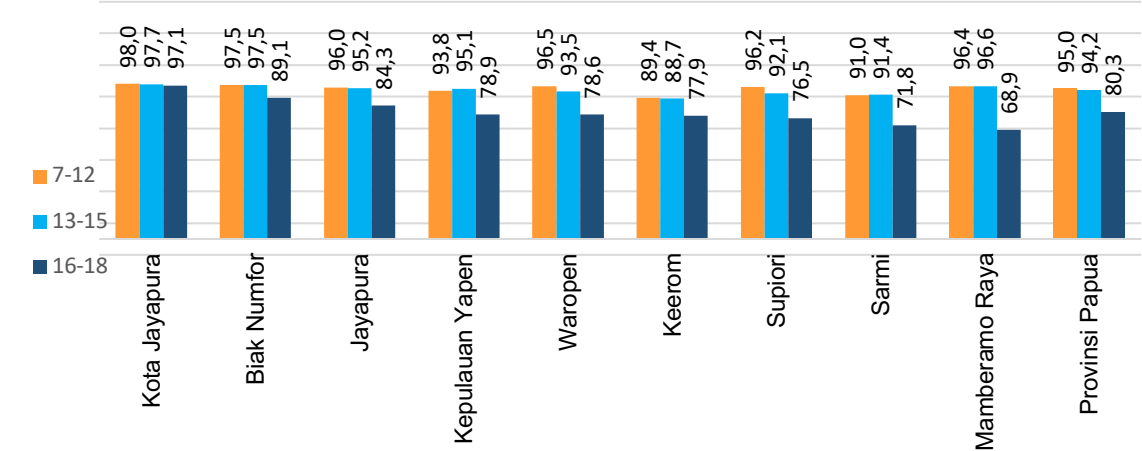
Tingkat keikutsertaan penduduk di Provinsi Papua dalam pendidikan formal yang dinyatakan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara umum tidak jauh tertinggal daripada capaian nasional. APS menunjukkan jumlah dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok umur yang sama. APS cenderung menurun dengan makin tingginya kelompok umur penduduk yang juga menunjukkan jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh. APS di Provinsi Papua pada tahun 2021 pada kelompok usia 7-12 tahun menunjukkan angka 95,0%, lebih rendah daripada angka nasional 99,1%. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 94,2% sedikit lebih rendah daripada angka nasional 95,8%. Sementara APS untuk kelompok usia 16-18 tahun, lebih tinggi daripada angka nasional yakni 80,3% (nasional: 70,7%). Jika dilihat angka-angka kabupaten/kota, APS tertinggi untuk ketiga kelompok umur terdapat di Kota Jayapura, sedangkan kabupaten dengan angka terendah yaitu Sarmi dan Mamberamo Raya. Gambar II.37 menunjukkan APS per kabupaten/kota dan Provinsi.

Gambar II.38 menunjukkan tingkat pendidikan dan penduduk bekerja berdasarkan pendidikan di Provinsi Papua berdasarkan Susenas (2023). Berdasarkan Gambar II.38



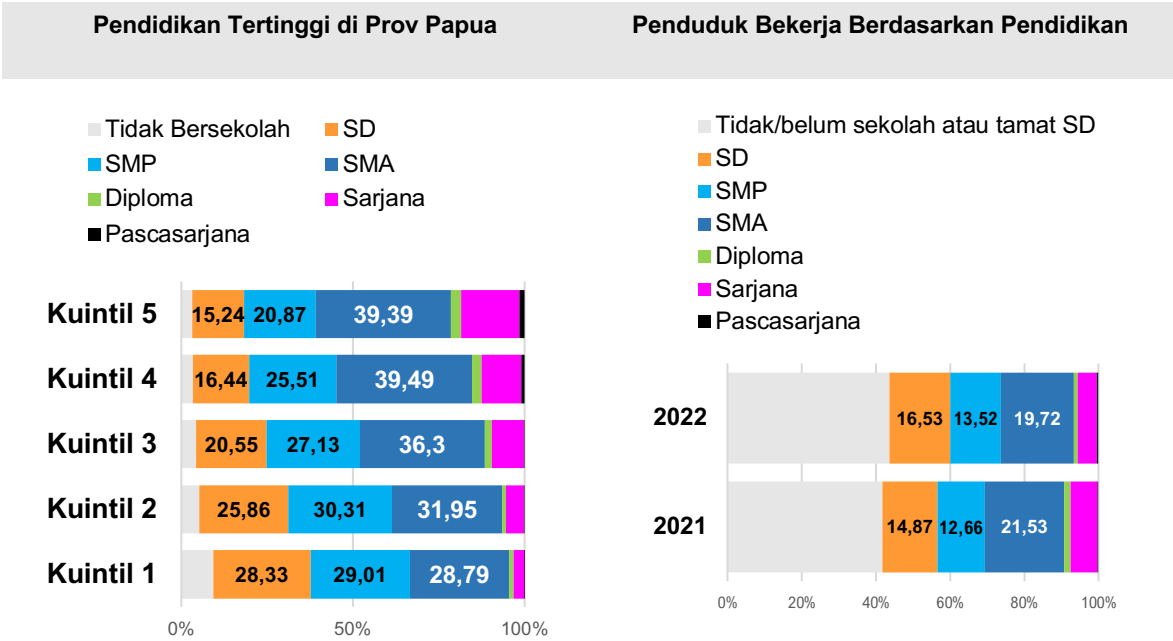
diketahui bahwa jenjang pendidikan tertinggi di Provinsi Papua didominasi oleh jenjang SMA/setara, yang terkonsentrasi pada Kuintil 3-4. Sementara itu, pendidikan tertinggi penduduk 20% termiskin didominasi oleh mereka lulusan SMP/setara. Berbeda dengan kondisi penyerapan tenaga kerja di Papua didominasi oleh mereka yang tidak/belum sekolah yang nilainya semakin meningkat dari 2021-2022. Jenjang SMA dan SMP yang memiliki porsi yang tinggi di Papua hanya mampu menyerap 19,72% dan 13,52% dari total penduduk bekerja di Provinsi Papua. Peningkatan pendidikan yang tinggi di Provinsi Papua perlu sejalan dengan penyerapan tenaga kerja yang tersedia juga sehingga ada motivasi dari penduduknya untuk dapat mencapai Pendidikan yang tinggi.

Gambar II.37 Angka Partisipasi Sekolah per Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023, (Data diolah)

Gambar II.38 Tingkat Pendidikan dan Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan di Papua, 2023



Sumber: Susenas 2023 dalam SEPAKAT

### 2.3.1.2.2 Fasilitas Pendidikan

Pada tahun ajaran 2023-2024, fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Papua adalah 255 unit TK/RA, 860 unit SD/MI, 293 unit SMP/MTs, 177 unit SMA/SMK/MA dan 31 unit Perguruan Tinggi. Sebaran fasilitas Pendidikan berdasarkan kabupaten/kota cukup merata, kecuali perguruan tinggi hanya terdapat di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Biak Numfor.

**Tabel II.35 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Papua Tahun Ajaran 2023/2024**

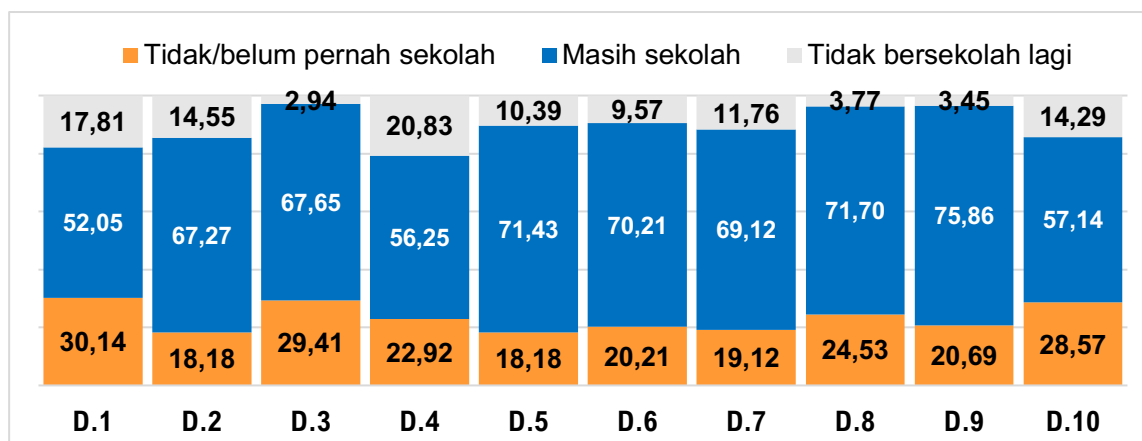
| No           | Kabupaten/Kota  | Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan |            |            |            |           |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|              |                 | TK/RA                                     | SD/MI      | SMP/MTs    | SMA/SMK/MA | PT        |
| 1            | Jayapura        | 53                                        | 144        | 54         | 35         | 5         |
| 2            | Kepulauan Yapen | 15                                        | 125        | 37         | 20         | 2         |
| 3            | Biak Numfor     | 20                                        | 167        | 56         | 28         | 6         |
| 4            | Sarmi           | 10                                        | 67         | 21         | 10         | 0         |
| 5            | Keerom          | 51                                        | 84         | 21         | 13         | 0         |
| 6            | Waropen         | 3                                         | 54         | 19         | 8          | 0         |
| 7            | Supiori         | 30                                        | 40         | 14         | 9          | 0         |
| 8            | Mamberamo Raya  | 5                                         | 73         | 22         | 6          | 0         |
| 9            | Kota Jayapura   | 68                                        | 106        | 49         | 48         | 18        |
| <b>Total</b> |                 | <b>255</b>                                | <b>860</b> | <b>293</b> | <b>177</b> | <b>31</b> |

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, 2023

### 2.3.1.2.3 Pendidikan Khusus

Gambar II.39 menunjukkan persentase penduduk dengan disabilitas sedang dan berat berdasarkan partisipasi sekolah di Papua berdasarkan Regsosek (2022). Dari total 596.774 penduduk di Papua yang mengalami disabilitas sedang dan berat, diantaranya terdapat 538 anak usia sekolah (7-18 tahun). Mayoritas anak usia sekolah yang disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, yaitu sebesar 357 penduduk (66,36%). Sisanya, sebanyak 120 penduduk (22,30%) tidak/belum sekolah dan 61 penduduk (11,33%) tidak sekolah lagi. Mereka yang tidak bersekolah, secara proporsinya paling banyak berada di kelompok rentan (< 40% Termiskin). Artinya, bukan hanya berkaitan dengan ekonomi saja tetapi juga soal akses dan fasilitas yang kurang memadai sehingga baik kelompok miskin maupun rentan tidak/belum bersekolah.

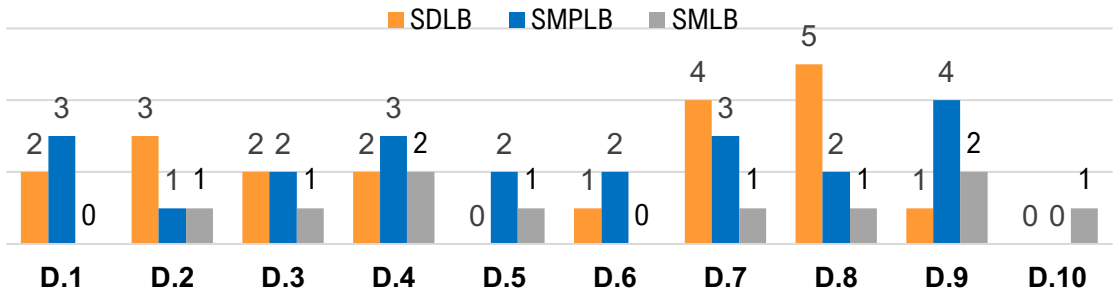
**Gambar II.39 Persentase Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat Berdasarkan Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua**



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

Gambar II.40 menunjukkan Sebaran penduduk dengan disabilitas sedang dan berat yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua berdasarkan Regsosek (2022). Berdasarkan Gambar II.40 diketahui hanya terdapat 52 penduduk dari total 357 penduduk disabilitas sedang dan berat yang masih bersekolah, bersekolah di Sekolah Luar Biasa. Padahal penduduk dengan disabilitas sedang dan berat membutuhkan pendamping/sistem pendidikan khusus.

**Gambar II.40 Sebaran Penduduk dengan Disabilitas Sedang dan Berat yang Bersekolah di Sekolah Luar Biasa di Provinsi Papua**



Sumber: Regsosek 2022 dalam SEPAKAT

### 2.3.1.3 Kesehatan

#### 2.3.1.3.1 Angka Kematian Bayi

Salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) yang menunjukkan jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Menurut hasil Sensus Penduduk 2020, AKB di Provinsi Papua sebelum pemekaran Provinsi sebesar 38,2 per 1.000 Kelahiran Hidup. Angka ini lebih dari 2 kali lipat angka nasional yang besarnya 16,9 per 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan data per kabupaten/kota berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2023 menjadi 14 per 1.000 KH.

**Tabel II.36 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023**

| No             | Kabupaten/Kota  | Jumlah kematian bayi | Jumlah kelahiran hidup | AKB/1000 KH |
|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 1              | Sarmi           | 18                   | 558                    | 32          |
| 2              | Mamberamo Raya  | 3                    | 285                    | 11          |
| 3              | Kota Jayapura   | 25                   | 5036                   | 5           |
| 4              | Jayapura        | 70                   | 2,588                  | 27          |
| 5              | Supiori         | 2                    | 202                    | 10          |
| 6              | Biak Numfor     | 36                   | 3306                   | 11          |
| 7              | Keerom          | 7                    | 1015                   | 7           |
| 8              | Kepulauan Yapen | 33                   | 1489                   | 22          |
| 9              | Waropen         | 4                    | 132                    | 30          |
| Provinsi Papua |                 | 198                  | 14,611                 | 14          |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2023

### 2.3.1.3.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian IBU (AKI) adalah indikator penting lainnya dalam mengukur derajat Kesehatan Masyarakat. AKI adalah banyaknya kematian perempuan sejak saat hamil hingga 42 hari sejak berakhirnya kehamilan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, AKI di Provinsi Papua sebelum pembentukan DOB adalah 565 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini 3 kali lebih tinggi daripada angka nasional yakni 189 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan Dinas Kesehatan Tahun 2023 menunjukkan angka yang lebih rendah daripada angka nasional. Sama halnya dengan angka kematian bayi, ada kemungkinan pencatatan dan pelaporan dari tingkat kabupaten ke bawah tidak cukup lengkap dan teratur sehingga terdapat perbedaan antara angka laporan Dinas Kesehatan dan angka hasil sensus penduduk.

**Tabel II.37 Angka Kematian Ibu Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2023**

| No             | Kabupaten/Kota  | Jumlah kematian ibu | Jumlah kelahiran hidup | AKI/100.000 KH |
|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 1              | Sarmi           | 2                   | 558                    | 358            |
| 2              | Mamberamo Raya  | 1                   | 285                    | 351            |
| 3              | Kota Jayapura   | 6                   | 5.036                  | 119            |
| 4              | Biak Numfor     | 2                   | 3.306                  | 60             |
| 5              | Kepulauan Yapen | 5                   | 1.489                  | 336            |
| 6              | Jayapura        | 9                   | 2.588                  | 348            |
| 7              | Supiori         | -                   | 202                    | 0              |
| 8              | Keerom          | 2                   | 1.015                  | 197            |
| 9              | Waropen         | -                   | 132                    | 0              |
| Provinsi Papua |                 | 27                  | 14.611                 | 185            |

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2023

### 2.3.1.3.3 Fasilitas Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas di Provinsi Papua jika dilihat dari sebaran wilayah telah cukup memadai, yakni telah tersedia setidaknya 1 Rumah Sakit di setiap kabupaten, serta jumlah puskesmas berdasarkan jumlah distrik di tiap kabupaten/ kota. Tabel berikut menampilkan jumlah RS dan Puskesmas di tiap kabupaten pada tahun 2022.

**Tabel II.38 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2023**

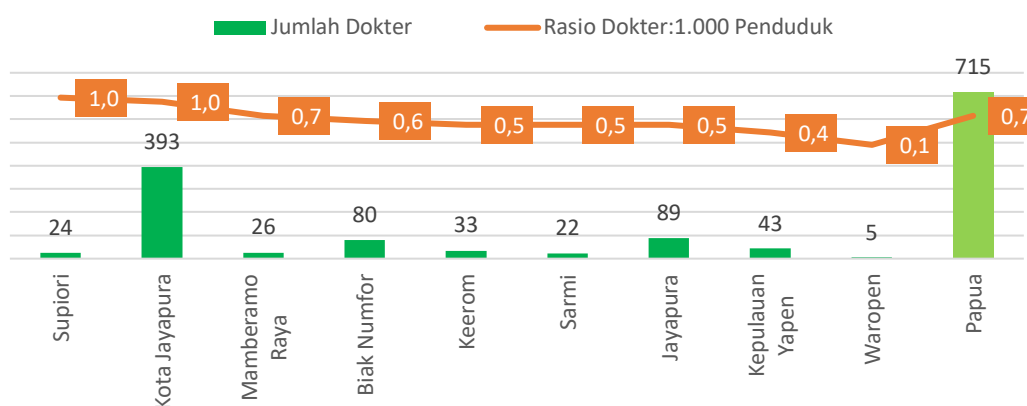
| Kabupaten/Kota  | Rumah Sakit Umum | Puskesmas (Terakreditasi) |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| Jayapura        | 1                | 19                        |
| Kepulauan Yapen | 1                | 8                         |
| Biak Numfor     | 2                | 10                        |
| Sarmi           | 1                | 8                         |
| Keerom          | 1                | 1                         |
| Waropen         | 1                | 7                         |
| Supiori         | 1                | 2                         |
| Mamberamo Raya  | 1                | -                         |
| Kota Jayapura   | 9                | 5                         |
| Papua           | 18               | 60                        |

Sumber: LKJ Dinkes Provinsi Papua, 2023

#### 2.3.1.3.4 Tenaga Kesehatan

Sebaran tenaga Kesehatan berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan jumlah yang belum memenuhi standar dibandingkan dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dari segi kuantitas, tenaga perawat dan bidan menunjukkan jumlah yang cukup tinggi di semua kabupaten/kota, seperti ditunjukkan oleh Tabel II.39. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, untuk tenaga dokter umum baru 2 kabupaten yang telah memenuhi standar WHO yaitu 1 dokter untuk 1.000 penduduk, yakni Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. Dalam tingkat provinsi, rasio dokter per 1000 penduduk baru mencapai 0,7.

**Gambar II.41 Rasio Dokter Umum per 1.000 Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022**



Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023 (diolah)

**Tabel II.39 Jumlah Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Tahun 2022**

| Kabupaten/ Kota | Dokter     | Perawat     | Bidan       | Farmasi    | Ahli Gizi  |
|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Jayapura        | 89         | 461         | 241         | 74         | 51         |
| Kepulauan Yapen | 43         | 411         | 134         | 36         | 28         |
| Biak Numfor     | 80         | 556         | 266         | 58         | 30         |
| Sarmi           | 22         | 196         | 139         | 20         | 13         |
| Keerom          | 33         | 234         | 114         | 30         | 29         |
| Waropen         | 5          | 133         | 38          | 7          | 8          |
| Supiori         | 24         | 177         | 71          | 15         | 13         |
| Mamberamo Raya  | 26         | 130         | 58          | 12         | 8          |
| Kota Jayapura   | 393        | 1 293       | 305         | 193        | 95         |
| <b>Papua</b>    | <b>715</b> | <b>2298</b> | <b>1366</b> | <b>445</b> | <b>275</b> |

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka, BPS, 2023

#### 2.3.1.4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

##### 2.3.1.4.1 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap

Secara keseluruhan, total panjang jalan di Provinsi Papua pada tahun 2021 mencapai 7.244,5km, yang terdiri dari 874,0km jalan Nasional, 1.275,4 km jalan Provinsi, dan 5.095,1km jalan Kabupaten/kota. Jaringan jalan dengan kondisi aksesibilitas terpanjang di

Provinsi Papua terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 1.194,9 km (66,4%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Sedangkan kabupaten Supiori merupakan wilayah dengan aksesibilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 282,4 km (1,57%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua (lihat Tabel II.30).

**Tabel II.40 Panjang Jalan Menurut Kewenangant di Provinsi Papua (km)**

| No           | Kabupaten     | PanjangJalan(km) |                |                |                |
|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |               | Nasional         | Provinsi       | Kabupaten/Kota | Jumlah         |
| 1            | Jayapura      | 192,2            | 384            | 618,7          | 1.194,9        |
| 2            | Kep.Yapen     | 75,3             | 148,1          | 511,3          | 734,7          |
| 3            | BiakNumfor    | 75,6             | 344            | 712,1          | 1.131,7        |
| 4            | Sarmi         | 179,2            | 37,7           | 638,2          | 855,1          |
| 5            | Keerom        | 256,7            | 86,8           | 673,7          | 1.017,2        |
| 6            | Waropen       | 0                | 46             | 448,1          | 494,1          |
| 7            | Supiori       | 0                | 79,2           | 203,2          | 282,4          |
| 8            | MemberamoRaya | 0                | 65,6           | 1.031,5        | 1.097,1        |
| 9            | KotaJayapura  | 95               | 84             | 258,3          | 437,3          |
| <b>Total</b> |               | <b>874</b>       | <b>1.275,4</b> | <b>5.095,1</b> | <b>7.244,5</b> |

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2025 (Data diolah)

Pada tabel II.33 berikut, dapat dilihat Panjang Jalan per kabupaten dengan kondisi aksesibilitas beraspal dan kondisi lainnya. Kondisi jalan beraspal terpanjang di Provinsi Papua terdapat pada Kabupaten Jayapura dengan total 384,1 km (31,42%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua. Kabupaten Sarmi merupakan wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paling rendah di Provinsi Papua dengan 37,7 km (3,08%) dari total keseluruhan aksesibilitas yang ada di Provinsi Papua (lihat Tabel II.30).

**Tabel II.41 Panjang Jalan di Provinsi Papua (km)**

| Kabupaten/Kota        | Aspal         | Lainnya       | Total          |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Jayapura              | 178           | 206.1         | 384.1          |
| Kepulauan Yapen       | 58            | 117.01        | 175.01         |
| Biak Numfor           | 164.4         | 7.6           | 172            |
| Sarmi                 | 0             | 37.7          | 37.7           |
| Keerom                | 12            | 79.8          | 91.8           |
| Waropen               | 45.5          | 57            | 102.5          |
| Supiori               | 30            | 49.21         | 79.21          |
| Mamberamo Raya        | 0             | 75.6          | 75.6           |
| Kota Jayapura         | 96.38         | 8             | 104.38         |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>584.28</b> | <b>638.02</b> | <b>1.222.3</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Provinsi Papua 2023 (Data diolah)

#### 2.3.1.4.2 Penataan Ruang

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Dokumen Rencana Tata Ruang



Wilayah merupakan dokumen acuan spasial yang dijadikan dasar dalam melakukan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Papua dilihat dari Persentase luas kawasan peruntukannya sesuai dengan RTRW menunjukkan kesesuaian dengan angka 97 ditahun 2023. meskipun angka ditahun 2022 kesesuaian dengan angka 98,18 menunjukkan penurunan di tahun 2023, angka capaian ini relatif bagus.

**Tabel II.42 Presentase Ketaatan Terhadap Pelaksanaan RTRW Provinsi Papua**

| Indikator                         | Tahun |       |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Presentase Ketaatan terhadap RTRW | 85,00 | 96,00 | 97,86 | 98,18 | 97,00 |

*Sumber : Bapperida Provinsi Papua Tahun 2023*

Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 diundangkan pada tanggal 30 Desember 2013, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Papua dan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### 2.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua. Jumlah rumah layak huni selama tahun 2016-2024 dapat dilihat pada Tabel II.43.

**Tabel II.43 Jumlah Rumah Layak Huni Provinsi Papua 2016-2024**

| Jenis                                                  | Tahun | Biak Numfor | Jayapura | Keekom | Kep. Yapen | Mamberamo | Sarmi | Suptiori | Waropen | Kota Jayapura | Total |
|--------------------------------------------------------|-------|-------------|----------|--------|------------|-----------|-------|----------|---------|---------------|-------|
| RUMAH SWADAYA (UNIT)                                   | 2016  | 300         | 200      | -      | -          | -         | -     | 200      | -       | 300           | 1000  |
|                                                        | 2017  | 320         | -        | -      | -          | 270       | 200   | 550      | 190     | 150           | 1600  |
|                                                        | 2018  | 450         | 725      | 615    | 290        | 70        | 156   | 180      | 160     | 460           | 1700  |
|                                                        | 2019  | 160         | 431      | 150    | 166        | 150       | 185   | 100      | 170     | 205           | 1768  |
|                                                        | 2020  | 100         | 261      | 100    | 250        | -         | -     | -        | 250     | 444           | 1940  |
|                                                        | 2021  | -           | 66       | 129    | 165        | -         | -     | -        | -       | 20            | 380   |
|                                                        | 2022  | 35          | 162      | 177    | 155        | -         | 109   | -        | -       | 550           | 1089  |
|                                                        | 2023  | 60          | 180      | 502    | 571        | -         | -     | -        | -       | 147           | 1629  |
|                                                        | 2024  | -           | 34       | 296    | 950        | -         | -     | -        | -       | -             | 3400  |
| REVITALISASI DAN BANGUN BARU RUSUN TOWER BANGUNAN (TB) | 2016  | -           | 1        | -      | -          | -         | -     | -        | -       | 1             | 2     |
|                                                        | 2017  | -           | 2        | -      | 1          | -         | -     | -        | -       | 2             | 5     |
|                                                        | 2018  | -           | -        | -      | -          | -         | -     | -        | -       | 2             | 2     |
|                                                        | 2019  | -           | 1        | -      | -          | -         | -     | -        | -       | 2             | 3     |
|                                                        | 2020  | -           | 1        | -      | -          | -         | -     | -        | -       | 2             | 3     |

| Jenis               | Tahun | Biak Numfor | Jayapura | Keelom | Kep. Yapen | Mamberamo | Sarmi | Supiori | Waropen | Kota Jayapura | Total |
|---------------------|-------|-------------|----------|--------|------------|-----------|-------|---------|---------|---------------|-------|
|                     | 2021  | -           | 2        | -      | -          | -         | -     | -       | 1       | 1             | 4     |
|                     | 2022  | -           | 1        | -      | 1          | -         | -     | -       | -       | 1             | 3     |
|                     | 2023  | -           | -        | -      | -          | -         | -     | -       | -       | -             | 0     |
|                     | 2024  | -           | -        | -      | -          | -         | -     | -       | -       | 1             | 1     |
| RUMAH KHUSUS (UNIT) | 2016  | 87          | 50       | -      | 110        | -         | -     | -       | -       | -             | 247   |
|                     | 2017  | 25          | 25       | -      | 25         | 25        | 10    | 19      | -       | -             | 129   |
|                     | 2018  | 10          | 25       | -      | -          | -         | -     | -       | -       | -             | 35    |
|                     | 2019  | -           | 25       | -      | -          | -         | -     | -       | -       | -             | 25    |
|                     | 2020  | -           | 12       | -      | -          | -         | 20    | -       | 29      | -             | 61    |
|                     | 2021  | -           | -        | -      | -          | -         | -     | -       | -       | -             | 0     |
|                     | 2022  | -           | -        | -      | 20         | -         | -     | -       | -       | -             | 20    |
|                     | 2023  | -           | -        | -      | -          | -         | -     | -       | -       | -             | 0     |
|                     | 2024  | -           | -        | -      | -          | -         | -     | -       | -       | -             | 0     |
| BANTUAN PSU         | 2021  | -           | 60       | -      | -          | -         | -     | -       | -       | 235           | 295   |
|                     | 2022  | -           | 92       | -      | -          | -         | -     | -       | -       | 454           | 546   |
|                     | 2023  | -           | 73       | -      | -          | -         | -     | -       | -       | 552           | 625   |
|                     | 2024  | -           | 100      | -      | -          | -         | -     | -       | -       | 262           | 362   |

Sumber : RTLH dari aplikasi e-RTLH yang sudah di input oleh Kabupaten/ Kota (Periode Agustus 2025)

Data dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua untuk periode sembilan tahun dari 2016 hingga 2024 ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat di Provinsi Papua. Secara keseluruhan, program ini telah membangun 15.286 unit rumah swadaya. Namun, angka yang lebih signifikan adalah keberhasilan program dalam meningkatkan kualitas hunian, di mana tercatat 10.835 unit rumah berhasil ditingkatkan statusnya dari tidak layak huni menjadi layak huni. Dengan demikian, penambahan netto rumah layak huni yang dicatat dalam periode ini adalah sebanyak 4.451 unit.

Program perumahan ini tidak hanya berfokus pada satu jenis bantuan saja, melainkan mengalami evolusi dan diversifikasi seiring waktu. Pada awal periode, dari tahun 2016 hingga 2020, fokus utama program adalah pada pemberian bantuan rumah swadaya. Kemudian, mulai tahun 2021, muncul program baru seperti Rumah Khusus yang ditujukan bagi kelompok tertentu seperti aparatur sipil negara, serta Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, air bersih, dan listrik. Peralihan tren ini menunjukkan pendekatan yang semakin holistik, yang tidak hanya menyediakan unit tempat tinggal, tetapi juga memastikan terbentuknya lingkungan hunian yang lengkap dan berkelanjutan.

Dari sisi distribusi geografis, terlihat bahwa Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menjadi daerah dengan realisasi program yang paling menonjol. Kota Jayapura, sebagai ibu kota provinsi, menerima alokasi terbesar untuk hampir semua program, termasuk rumah swadaya, revitalisasi kawasan berupa pembangunan menara hunian, rumah khusus, dan bantuan PSU. Kabupaten Jayapura juga menunjukkan kinerja yang kuat, terutama dalam program Rumah Khusus dan Bantuan PSU. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti

Mamberamo Raya dan Supiori tidak mencatatkan program baru setelah tahun 2019, yang dapat mengindikasikan adanya kendala atau telah tercapainya target sementara.

Data ini juga mengungkap beberapa tantangan dan peluang. Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat selisih yang besar antara jumlah rumah swadaya yang dibangun dan jumlah pengurangan rumah tidak layak huni. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak semua bantuan rumah swadaya berhasil mengkonversi status ketidaklayakan hunian, mungkin karena bantuan tersebut dialokasikan untuk pembangunan unit baru atau adanya tantangan dalam pendataan. Di sisi lain, peningkatan alokasi Bantuan PSU pada tahun-tahun terakhir merupakan perkembangan yang positif, karena infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk menciptakan kawasan permukiman yang layak dan manusiawi. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan komitmen berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan layak di Papua. Strateginya bergerak dari sekadar membangun unit fisik, menjadi pendekatan yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan kualitas hunian existing, kebutuhan tenaga profesional, dan kelengkapan infrastruktur dasar. Ke depan, pemerataan program ke seluruh kabupaten dan konsistensi pendanaan akan menjadi faktor penentu untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Papua.

Selanjutnya, berdasarkan data yang ada, total backlog atau kekurangan kepemilikan rumah di wilayah yang tercakup mencapai 142.999 unit. Angka ini mengungkapkan tantangan penyediaan hunian yang tidak merata, dengan distribusi backlog yang sangat terkonsentrasi dan berbeda karakteristiknya di tiap jenis kawasan.

**Tabel II.44 Backlog Kepemilikan Rumah**

| No        | Kabupaten/Kota             | Backlog Kepemilikan Rumah | Keterangan                  |
|-----------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>A.</b> | <b>DELINEASI PERKOTAAN</b> |                           |                             |
| 1         | Kota Jayapura              | 98.683                    | Kota Jpr. Backlog Tertinggi |
| <b>B.</b> | <b>DELINEASI PERDESAAN</b> |                           |                             |
| 1         | Kabupaten Keerom           | 7.319                     |                             |
| 2         | Kabupaten Mamberamo Raya   | 1.957                     |                             |
| <b>C.</b> | <b>DELINEASI PESISIR</b>   |                           |                             |
| 1         | Kabupaten Jayapura         | 0                         |                             |
| 2         | Kabupaten Biak Numfor      | 2.784                     |                             |
| 3         | Kabupaten Supiori          | 2.716                     |                             |
| 4         | Kabupaten Sarmi            | 3.079                     |                             |
| 5         | Kabupaten Waropen          | 3.448                     |                             |
| 6         | Kabupaten Kepulauan Yapen  | 23.013                    |                             |
|           | <b>TOTAL</b>               | <b>142.999</b>            |                             |

*Sumber: Disperkim 9 Kabupaten/Kota, Update Juni 2025 ((Data diperoleh dari Dinas PUPRPKP)*

Di kawasan perkotaan, yang dalam hal ini diwakili sepenuhnya oleh Kota Jayapura, ditemukan backlog terbesar dan tertinggi secara absolut, yaitu 98.683 unit. Jumlah ini saja telah menyumbang hampir 69% dari total backlog seluruh kawasan. Fenomena ini

mencerminkan tekanan permintaan hunian yang sangat besar di pusat pertumbuhan ekonomi dan jasa, seperti ibu kota provinsi, yang dipicu oleh faktor seperti urbanisasi, keterbatasan lahan, dan tingginya biaya hidup.

Sementara itu, kawasan perdesaan menunjukkan angka backlog yang secara signifikan lebih rendah. Kabupaten Keerom mencatat backlog sebanyak 7.319 unit, sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 1.957 unit. Meski jumlahnya lebih kecil, backlog di perdesaan tetap menjadi perhatian penting karena berkaitan dengan akses terhadap material bangunan, infrastruktur pendukung, dan daya beli masyarakat.

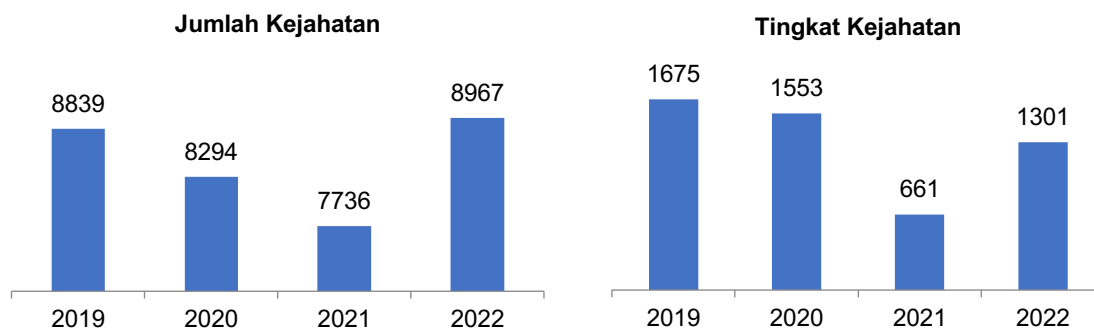
Karakteristik yang menarik terlihat pada kawasan pesisir. Backlog di kawasan ini tersebar di banyak kabupaten dengan variasi angka yang cukup lebar. Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi wilayah dengan backlog tertinggi di kawasan pesisir, yakni 23.013 unit, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi geografis kepulauan yang menantang. Kabupaten pesisir lainnya seperti Waropen (3.448 unit), Sarmi (3.079 unit), Biak Numfor (2.784 unit), dan Supiori (2.716 unit) juga menghadapi tantangan serupa. Sangat mencolok bahwa Kabupaten Jayapura yang juga berbatasan dengan pesisir justru mencatat backlog 0 unit untuk kawasan ini, sebuah indikasi yang perlu dikaji lebih lanjut, apakah karena keberhasilan program perumahan atau faktor deliniasi kawasan.

### 2.3.1.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### 2.3.1.6.1 Penurunan Tingkat Kriminalitas

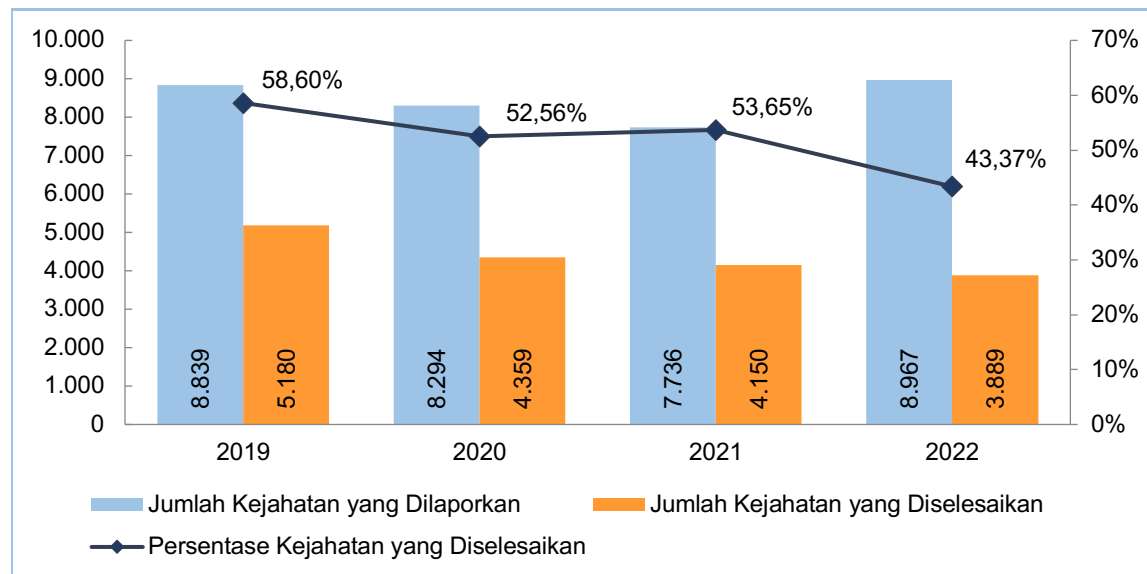
Perkembangan tindak kejahatan terlihat dari rasa aman yang di rasakan masyarakat. Data dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, yang diartikan bahwa semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin tinggi risiko masyarakat terhadap tindak pidana yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman. Dalam konteks lebih luas, terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Gambar II.42 menunjukkan jumlah kejahatan dan tingkat risiko kejahatan di Papua tahun 2019-2022.

**Gambar II.42 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022**



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

**Gambar II.43 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022**



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Gambar II.42 menunjukkan jumlah kejahatan sempat mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 7.736 kejadian. Jumlah kejahatan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 8.967 kejadian. Tingkat kejahatan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 661 kejadian namun kembali meningkat menjadi 1.301 kejadian pada tahun 2022. Adapun jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2022, dapat diselesaikan dengan capaian 43,37%. Persentase tersebut cenderung menurun bila dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 53,65%. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*crime clock*) pada tahun 2019 adalah 01.00'32" (1 jam 32 detik) yang kemudian memanjang menjadi sebesar 1.03'32" (1 jam 3 menit 32 detik) pada tahun 2020. Interval terjadinya tindak kejahatan juga menjadi semakin panjang yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 01.07'56" (1 jam 7 menit 56 detik). Berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya, interval pada tahun 2022 memendek menjadi 00.58'37" (58 menit 37 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

**Tabel II.45 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Diselesaikan, dan Persentase yang Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022**

| Jenis Kejahatan                |                              | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan |      |      |      | Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan |      |      |      | Persentase yang Diselesaikan |       |       |       |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|
|                                |                              | 2019                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2019                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2019                         | 2020  | 2021  | 2022  |
| Kejahatan terhadap Nyawa       | Pembunuhan                   | 35                               | 35   | 39   | 51   | 21                                 | 20   | 30   | 34   | 60                           | 57,14 | 76,92 | 66,76 |
|                                | Penganiayaan Ringan          |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | Penganiayaan Berat           | 1482                             | 1446 | 1538 | 1513 | 1081                               | 986  | 1155 | 956  | 72,94                        | 68,19 | 75,1  | 63,19 |
|                                | Kekerasan dalam Rumah Tangga |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan  | Perkosaan                    | 110                              | 85   | 110  | 91   | 80                                 | 57   | 99   | 67   | 72,73                        | 67,06 | 90    | 73,63 |
|                                | Pencabulan                   |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |

| Jenis Kejahatan                                                  |                                                              | Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan |      |      |      | Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan |      |      |      | Persentase yang Diselesaikan |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                                  |                                                              | 2019                             | 2020 | 2021 | 2022 | 2019                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2019                         | 2020  | 2021  | 2022  |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang                             | Penculikan                                                   |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Mempekerjakan Anak di Bawah Umur                             | N/A                              | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                          | N/A   | N/A   | N/A   |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan | Pencurian dengan Kekerasan                                   |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)   | N/A                              | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                          | N/A   | N/A   | N/A   |
|                                                                  | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang                              | Pencurian                                                    |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Pencurian dengan pemberatan                                  |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Pencurian Kendaraan Bermotor                                 | 3679                             | 3936 | 3611 | 4079 | 1831                               | 1733 | 1531 | 1353 | 49,77                        | 44,03 | 42,4  | 33,17 |
|                                                                  | Pengrusakan/ Penghancuran Barang                             |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Pembakaran dengan Sengaja                                    |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Penadahan                                                    |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
| Kejahatan Terkait Narkotika                                      | Narkotika dan Psikotropika                                   | 110                              | 133  | 68   | 96   | 109                                | 124  | 57   | 86   | 99,09                        | 93,23 | 83,82 | 89,58 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi              | Penipuan/ Perbuatan Curang                                   |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
|                                                                  | Penggelapan                                                  | 1226                             | 1167 | 1035 | 1099 | 745                                | 606  | 471  | 935  | 60,77                        | 51,93 | 45,51 | 85,08 |
|                                                                  | Korupsi                                                      |                                  |      |      |      |                                    |      |      |      |                              |       |       |       |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum                               | Terhadap Ketertiban Umum                                     | 113                              | 177  | 287  | 118  | 67                                 | 42   | 203  | 50   | 59,29                        | 23,73 | 70,73 | 42,37 |

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Diketahui bahwa jenis kejahatan dengan jumlah laporan tertinggi adalah Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang. Pada tahun 2022, jumlah laporan terkait kejahatan ini menembus sebanyak 4.079 laporan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.611 laporan. Meskipun kejahatan jenis ini memiliki jumlah laporan tertinggi, namun jumlah maupun persentase yang diselesaikan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya. Pada tahun 2022, jenis kejahatan ini mampu diselesaikan dengan persentase 33,17% berkurang dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 42,4%. Kejahatan terhadap fisik dan badan juga menjadi jenis kejahatan dengan laporan terbanyak. Pada tahun 2022, jumlah laporan kejahatan jenis ini mencapai 1.513 laporan. Jumlah laporan cenderung menurun dibandingkan tahun 2021 namun meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2019 dan 2020 yang berkisar pada angka 1400-an laporan. Kejahatan terkait narkoba menjadi salah satu kejahatan dengan jumlah maupun persentase tertinggi yang diselesaikan. Pada tahun 2019, diketahui bahwa sebesar 99,09% jenis kejahatan ini dapat diselesaikan sebelum mengalami penurunan hingga tahun 2021 menjadi 83,82% dan kembali meningkat menjadi 89,58% pada tahun 2022.



**Tabel II.46 Karakteristik Penduduk Papua Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2019-2022**

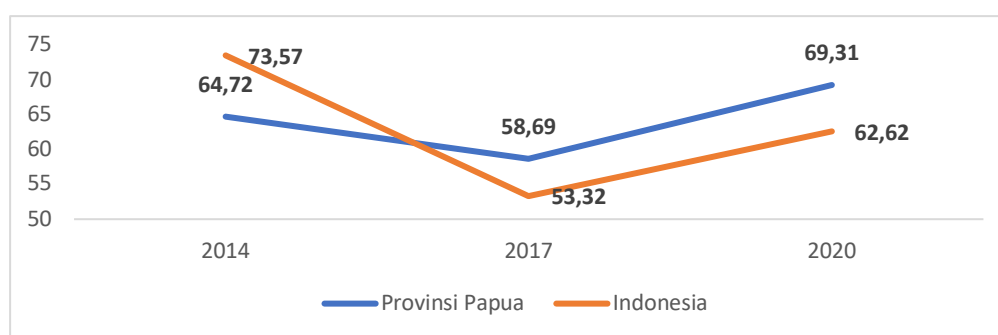
| Korban Kejahatan                                      | Laki-Laki |       |       |       | Perempuan |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|                                                       | 2019      | 2020  | 2021  | 2022  | 2019      | 2020  | 2021  | 2022  |
| Terhadap Nyawa                                        | 87,1      | 73,91 | 76,19 | 95,83 | 12,9      | 26,09 | 23,81 | 4,17  |
| Terhadap Fisik/Badan                                  | 67,02     | 75,66 | 63,66 | 80,53 | 32,98     | 24,34 | 36,34 | 19,47 |
| Terhadap Kesusilaan                                   | 1,59      | 0     | 4,29  | 54,84 | 98,41     | 100   | 95,71 | 45,16 |
| Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | 66,67     | 63,39 | 62,07 | 86,05 | 33,33     | 36,61 | 37,93 | 13,95 |

Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Diketahui bahwa mayoritas korban kejahatan terhadap nyawa, fisik/badan, dan hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terjadi pada jenis kelamin laki-laki. Sebaliknya, korban kejahatan terhadap kesusilaan terjadi paling banyak terhadap jenis kelamin perempuan.

Unsur rasa aman juga menjadi kebutuhan dan hak dasar setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oleh sebab itu, rasa aman diperlukan sebagai dasar ketertiban Masyarakat untuk mencapai perencanaan Pembangunan khususnya di Provinsi Papua. Berdasarkan data Susenas Modul Hansos pada Gambar II.44, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya di Provinsi Papua adalah sebesar 69,31 pada tahun 2020. Proporsi ini meningkat dibandingkan pada tahun 2017 dengan proporsi sebesar 58,69.

**Gambar II.44 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Papua Tahun 2014-2020**



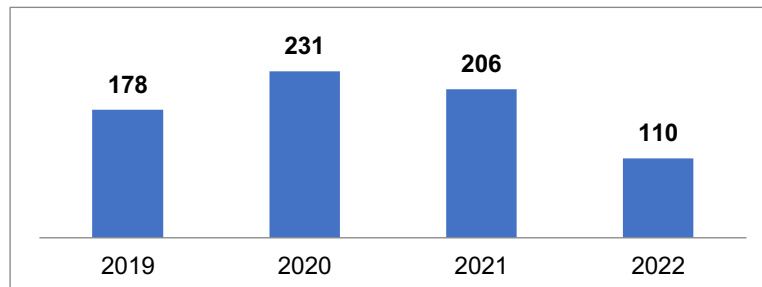
Sumber: Susenas Modul Hansos dalam BPS, 2020

#### 2.3.1.6.2 Unsur Penegak Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Aspek pertahanan keamanan merupakan faktor hakiki guna menjamin kelangsungan hidup negara. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Salah satu faktor tersebut adalah komposisi penduduk.

Komposisi penduduk di Provinsi Papua yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok apabila hubungan antar kelompok tidak dikelola dengan baik. Jumlah personil keamanan (Polisi) juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan semakin memudahkan pengawasan terhadap kondisi lingkungan.

**Gambar II.45 Rasio Penduduk Terhadap Personil Polisi di Provinsi Papua Tahun 2019-2022**

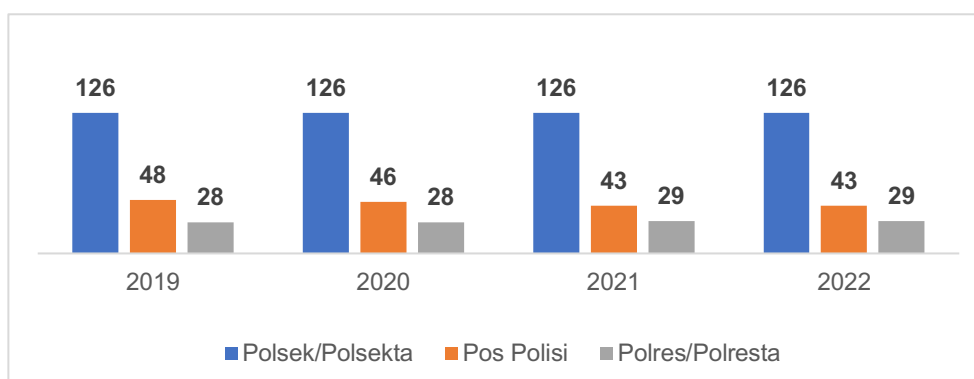


Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan Gambar II.45, diketahui bahwa pada tahun 2022 rasio penduduk terhadap personil polisi di Provinsi Papua adalah 1:110. Hal ini diartikan bahwa 1 polisi berbanding 110 penduduk di Papua. Pada kondisi ideal, rasio polisi dan penduduk adalah 1:350, yang artinya 1 polisi berbanding 350 penduduk. Berdasarkan hal tersebut, maka rasio penduduk terhadap polisi di Provinsi Papua sudah mencapai kondisi ideal tiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022.

Keamanan suatu wilayah juga perlu ditinjau berdasarkan sarana keamanan yang ada. Jumlah sarana kewanan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.33. Jumlah Polsek/Polsektu tetap sama sejak tahun 2019 hingga 2022. Jumlah pos polisi mengalami penurunan dari 48 unit di tahun 2019 menjadi 43 unit pada tahun 2022. Sementara Polres/Polresta mengalami penambahan 1 unit pada tahun 2021 menjadi 29 unit.

**Gambar II.46 Jumlah Sarana Keamanan di Provinsi Papua Tahun 2019-2022**



Sumber: Polda Provinsi Papua dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023

Guna menjaga ketentraman, ketertiban, dan melindungi masyarakat, diperlukan adanya campur tangan masyarakat dan pemerintah. Unsur pemerintah yang berkaitan dengan hal

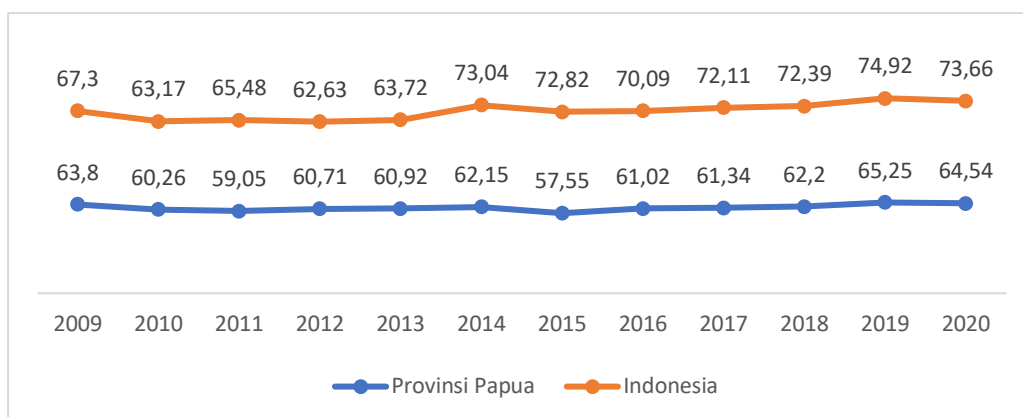
tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Salah satu prasyarat dalam pelaksanaan pembangunan adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib. Pengamanan dari Satpol PP dan personil Linmas dibutuhkan untuk mencapai kondisi tersebut khususnya pada lokasi yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Di lain sisi, diperlukan juga kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk mendukung hal tersebut.

### 2.3.1.6.3 Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan dan penerapan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2009-2020, IDI Provinsi pernah mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga mencapai angka dibawah angka 60. Perkembangan IDI di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Gambar II.47.

**Gambar II.47 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Papua Tahun 2009-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020

Per tahun 2021, perhitungan IDI sudah menggunakan metode baru dengan 3 aspek penyusun yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia dalam BPS, pada tahun 2021 IDI di Provinsi Papua mencapai angka 66,39 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 66,65. Kenaikan angka menuju 100 menandakan bahwa kinerja demokrasi di Provinsi Papua semakin meningkat.

IDI Provinsi Papua masih berada dalam kategori “**sedang**”, meskipun begitu terdapat perubahan signifikan pada capaian aspek penyusun IDI seperti pada capaian Aspek Kesetaraan yang melampaui Aspek Kebebasan. Meskipun keseluruhan aspek masih berada dalam kategori "sedang", namun peningkatan yang terjadi menandai pergeseran fokus dalam pembangunan demokrasi, penekanan pemberdayaan kesetaraan tetapi juga menegaskan perlunya perbaikan dalam kapasitas lembaga demokrasi.

**Tabel II.47 Capaian IDI Provinsi Papua Berdasarkan Aspek dan Indikator Penyusunnya 2021-2022**

| No                                       | Indikator IDI                                                                                                  | 2021  | 2022  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Aspek Kebebasan</b>                   |                                                                                                                |       |       |
| 1                                        | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara                   | 54,15 | 0     |
| 2                                        | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat                     | 0     | 0     |
| 3                                        | Terjaminnya kebebasan berkeyakinan                                                                             | 100   | 100   |
| 4                                        | Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan | 100   | 100   |
| 5                                        | Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu                                                               | 99,48 | 99,48 |
| 6                                        | Pemenuhan hak hak pekerja                                                                                      | 100   | 94,32 |
| 7                                        | Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya                                                          | 68,87 | 75,57 |
| <b>Aspek Kesenjangan</b>                 |                                                                                                                |       |       |
| 8                                        | Kesenjangan gender                                                                                             | 89,01 | 90,54 |
| 9                                        | Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan                           | 43,48 | 100   |
| 10                                       | Anti monopoli sumber daya ekonomi                                                                              | 54    | 57,5  |
| 11                                       | Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial                                                        | 50,32 | 39,86 |
| 12                                       | Kesenjangan kesempatan kerja antar wilayah                                                                     | 96,67 | 97,17 |
| 13                                       | Akses masyarakat terhadap informasi publik                                                                     | 66,37 | 63,03 |
| 14                                       | Kesenjangan dalam pelayanan dasar                                                                              | 48,43 | 50,22 |
| <b>Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi</b> |                                                                                                                |       |       |
| 15                                       | Kinerja lembaga legislatif                                                                                     | 4,17  | 16,22 |
| 16                                       | Kinerja lembaga yudikatif                                                                                      | 87,23 | 91,45 |
| 17                                       | Netralitas penyelenggara pemilu                                                                                | 85    | 85    |
| 18                                       | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah                               | 71,67 | 88,33 |
| 19                                       | Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat                                  | 80,23 | 81,46 |
| 20                                       | Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah                                 | 57,14 | 42,86 |
| 21                                       | Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik                                                                       | 75,2  | 65    |
| 22                                       | Pendidikan politik pada kader partai politik                                                                   | 10,77 | 33,85 |

*Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia dalam Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Papua Tahun 2023*

### 2.3.1.7 Sosial

#### 2.3.1.7.1 Agama dan Kepercayaan

Keagamaan menjadi salah satu aspek sosial mendasar di Provinsi Papua. Provinsi Papua memiliki latar belakang keagamaan maupun kepercayaan yang telah berkembang sejak lama dan turun-temurun. Agama dan kepercayaan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel II.48. Agama dan kepercayaan yang mendominasi di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota adalah agama Protestan sebanyak 625.247 jiwa diikuti agama Islam sebanyak 252.315 jiwa dan agama Katolik sebanyak 110.249 jiwa. Kota Jayapura menjadi kota dengan pemeluk agama Islam, Katolik, Hindu, dan Budha terbanyak pada tahun 2020,

sementara Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan pemeluk agama Protestan terbanyak.

**Tabel II.48 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua Tahun 2020 (Jiwa)**

| Kabupaten       | Islam   | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
|-----------------|---------|-----------|---------|-------|-------|---------|
| Jayapura        | 34.069  | 150.327   | 293     | 233   | 196   | -       |
| Kepulauan Yapen | 10.973  | 113.868   | 2.045   | 47    | 22    | -       |
| Biak Numfor     | 3.004   | 118.501   | 3.546   | 150   | 301   | -       |
| Sarmi           | 6.706   | 29.311    | 152     | 35    | -     | -       |
| Keerom          | 2.705   | 22.506    | 17.661  | 366   | 15    | -       |
| Waropen         | 9.722   | 34.661    | 1.777   | 20    | -     | -       |
| Supiori         | 486     | 18.975    | 162     | 10    | -     | -       |
| Mamberamo Raya  | 2.031   | 7.035     | 135     | -     | 6     | -       |
| Kota Jayapura   | 182.619 | 130.063   | 84.478  | 741   | 1.237 | -       |
| Provinsi Papua  | 252.315 | 625.247   | 110.249 | 1.602 | 1.777 | -       |

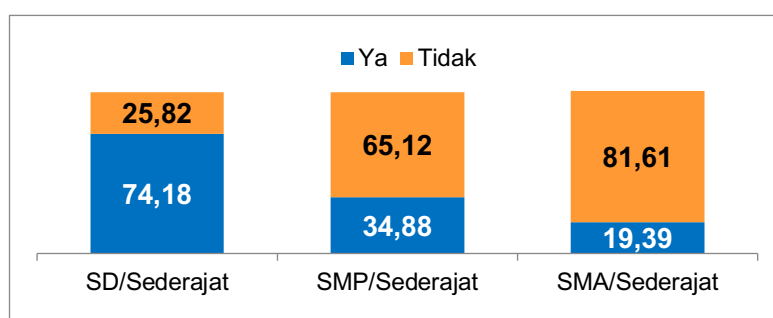
Sumber: Kementerian Agama Provinsi Papua, 2020 (data diolah)

#### 2.3.1.7.2 Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Papua menjadi salah satu isu pembangunan strategis. Masalah terkait kesejahteraan sosial di Provinsi Papua antara lain adalah ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial. Upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah masih belum optimal dalam menangani permasalahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, guna mewujudkan kesejahteraan sosial, terdapat beberapa bantuan yang dapat diterima oleh penerima bantuan di Provinsi Papua seperti Program Indonesia Pintar (PIP), akses terhadap perlindungan sosial, dan penerima kredit dalam setahun.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah salah satu program pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan. PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan pemberian bantuan tunai untuk anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

**Gambar II.48 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar Menurut Jenis PIP di Provinsi Papua Tahun 2021**



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2021 dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2023

Persentase rumah tangga sebagai sasaran utama penerima PIP masih tergolong sangat rendah yaitu hanya 9,27%. Rumah tangga penerima PIP paling banyak berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yaitu 74,18%. Jenjang Pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing berada pada persentase 34,88% dan 19,39%. Jenjang pendidikan SMA/ Sederajat menjadi persentase paling sedikit penerima PIP.

**Tabel II.49 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Jaminan Sosial Menurut Jenis Jaminan Sosial di Provinsi Papua Tahun 2019-2023**

| Jenis Jaminan Sosial         | Cakupan Penerima Manfaat (%) |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
|                              | 2019                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jaminan Pensiun              | 6,52                         | 7,46 | 5,65 | 4,71 | 6,14 |
| Jaminan Hari Tua             | 5,1                          | 5,29 | 3,68 | 3,1  | 4,15 |
| Asuransi Kecelakaan Kerja    | 4,22                         | 4,53 | 3,54 | 2,91 | 3,75 |
| Jaminan / Asuransi Kematian  | 4,56                         | 4,33 | 3,48 | 2,94 | 3,34 |
| Jaminan Kehilangan Pekerjaan | N/A                          | N/A  | N/A  | N/A  | 0,75 |
| Pesangon PHK                 | 1,62                         | 1,84 | 0,81 | 1,03 | 0,67 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023*

Akses terhadap perlindungan sosial termasuk dalam sistem jaminan sosial nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional tanpa terkecuali. Jenis jaminan sosial mencakup Jaminan Pensiun/veteran, Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Jaminan/Asuransi Kematian dan Pesangon (PHK). Jaminan pensiun menjadi jenis jaminan sosial dengan cakupan persentase penerima tertinggi sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 di Provinsi Papua. Sebaliknya, pesangon PHK menjadi jenis jaminan sosial dengan persentase terendah pada tahun 2023 yaitu 0,67% diikuti jaminan kehilangan pekerjaan yang terdata sejak tahun 2023 yaitu 0,75%.

**Tabel II.50 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun Menurut Jenis Kredit di Provinsi Papua Tahun 2019-2023**

| Jenis Kredit                              | Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                           | 2019                                                       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Kredit Usaha Rakyat (KUR)                 | 32,13                                                      | 36,96 | 34,3  | 39,75 | 42,78 |
| Kredit dari Bank Umum selain KUR          | 46,27                                                      | 39,46 | 41,02 | 32,21 | 34,18 |
| Bank Perkreditan Rakyat (BPR)             | 5,63                                                       | 6     | 6,46  | 12,2  | 5,35  |
| Kredit dari Koperasi                      | 7,47                                                       | 6,41  | 7,19  | 7,14  | 7,88  |
| Kredit Perorangan/Perorangan dengan Bunga | 3,51                                                       | 4,78  | 2,4   | 2,42  | 4,98  |
| Pegadaian                                 | 1,67                                                       | 2,71  | 5,23  | 3,94  | 4,11  |
| Perusahaan Leasing                        | 3,47                                                       | 4,59  | 4,55  | 4,92  | 7,66  |
| Kelompok Usaha Bersama                    | 1,85                                                       | 0,2   | 0,97  | N/A   | N/A   |



| Jenis Kredit              | Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit dalam Setahun |      |      |      |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                           | 2019                                                       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Badan Usaha Milik Kampung | 1,29                                                       | 0,48 | 1,38 | 0,27 | 0,85 |
| Pinjaman Online           | N/A                                                        | N/A  | N/A  | 0,27 | 0,47 |
| Lainnya                   | 6,04                                                       | 3,64 | 1,86 | 4,76 | 8,02 |

Sumber: Susenas Maret dalam Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2019-2023

Kredit usaha merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial lainnya yang diterima penduduk di Provinsi Papua. Kredit usaha lebih berfokus pada kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan, koperasi, pegadaian, maupun perorangan. Berdasarkan Tabel II.37, diketahui bahwa jenis kredit yang paling banyak diterima masyarakat di Provinsi Papua adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase rumah tangga penerima KUR lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Sebaliknya, BUMDES menjadi jenis kredit dengan persentase terendah diikuti pinjaman online. Sejak tahun 2022, jenis kredit pinjaman online mulai terdata dan meningkat di tahun 2023 menjadi 0,47 dari 0,27 pada tahun 2022.

## 2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

### 2.3.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK dan TPT dilihat dari penduduk dengan usia di atas 15 tahun yang terbagi dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah Angkatan Kerja secara provinsi adalah sebanyak 2.516.129 jiwa dengan persentase bekerja terhadap angkatan kerja adalah sebesar 97,33%. Adapun Jumlah Bukan Angkatan Kerja adalah sebesar 743.102 jiwa yang terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya.

**Tabel II.51 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Papua Tahun 2023**

| No | Kabupaten       | Angkatan Kerja |                |                      |        |                       | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja |                       |         |                             |
|----|-----------------|----------------|----------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
|    |                 | Bekerja        | Pengangguran   |                      |        | Jumlah Angkatan Kerja |                                            | Sekolah              | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah Bukan Angkatan Kerja |
|    |                 |                | Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah |                       |                                            |                      |                       |         |                             |
| 1  | Jayapura        | 70.469         | 913            | 2.076                | 2.989  | 73.458                | 95,93                                      | 10.327               | 20.225                | 4.508   | 35.060                      |
| 2  | Kepulauan Yapen | 44.746         | N/A            | 1.871                | 1.871  | 46.617                | 95,99                                      | 6.754                | 16.779                | 6.214   | 29.747                      |
| 3  | Biak Numfor     | 57.919         | 1.323          | 2.194                | 3.517  | 61.436                | 94,28                                      | 8.014                | 19.213                | 4.469   | 31.696                      |
| 4  | Sarmi           | 17.303         | 97             | 454                  | 551    | 17.854                | 96,91                                      | 2.427                | 5.462                 | 1.419   | 9.308                       |
| 5  | Keerom          | 30.851         | N/A            | 357                  | 470    | 31.321                | 98,5                                       | 2.814                | 4.866                 | 1.787   | 9.467                       |
| 6  | Waropen         | 13.453         | N/A            | 556                  | 651    | 14.104                | 95,38                                      | 2.009                | 3.484                 | 1.603   | 7.096                       |
| 7  | Supiori         | 7.842          | N/A            | 347                  | 396    | 8.238                 | 95,19                                      | 1.158                | 3.792                 | 1.145   | 6.095                       |
| 8  | Mamberamo Raya  | 10.846         | N/A            | 44                   | N/A    | 10.890                | 99,6                                       | 911                  | 9.206                 | 4.433   | 14.550                      |

| No | Kabupaten      | Angkatan Kerja |                |                      |        |                       | Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja |                       |         |                             |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
|    |                | Bekerja        | Pengangguran   |                      |        | Jumlah Angkatan Kerja |                                            | Sekolah              | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | Jumlah Bukan Angkatan Kerja |
|    |                |                | Pernah Bekerja | Tidak Pernah Bekerja | Jumlah |                       |                                            |                      |                       |         |                             |
| 9  | Kota Jayapura  | 178.808        | 4.789          | 16.779               | 21.568 | 200.376               | 89,24                                      | 25.848               | 58.215                | 12.978  | 97.041                      |
|    | Provinsi Papua | 2.448.947      | 14.821         | 52.361               | 67.182 | 2.516.129             | 97,33                                      | 156.725              | 441.573               | 144.804 | 743.102                     |

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Apabila kegiatan utama di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan gender seperti terlihat pada Tabel II.52, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki yaitu 1,52 juta jiwa. Angka ini merupakan angka Provinsi Papua sebelum pemekaran. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua adalah sebanyak 2,45 juta jiwa yang juga didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 60,12%.

**Tabel II.52 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2023**

| Kegiatan Utama              | Laki-Laki        | Perempuan        | Laki-Laki + Perempuan |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Angkatan Kerja</b>       | 1.515.065        | 1.001.064        | 2.516.129             |
| i. Bekerja                  | 1.472.266        | 976.681          | 2.448.947             |
| ii. Pengangguran Terbuka    | 42.799           | 24.383           | 67.182                |
| <b>Bukan Angkatan Kerja</b> | 233.618          | 509.484          | 743.102               |
| i. Sekolah                  | 79.412           | 77.313           | 156.725               |
| ii. Mengurus Rumah Tangga   | 58.641           | 382.932          | 441.573               |
| iii. Lainnya                | 95.565           | 49.239           | 144.804               |
| <b>Jumlah</b>               | <b>1.748.683</b> | <b>1.510.548</b> | <b>3.259.231</b>      |

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Secara provinsi, TPT di Provinsi Papua pada Agustus 2021-2023 menunjukkan penurunan persentase dari 3,33% menjadi 2,67%. Penurunan persentase TPT pada selang tahun yang sama juga diikuti oleh penurunan TPAK. Persentase TPAK secara provinsi mengalami penurunan dari 78,29% pada tahun 2021 menjadi 77,2% pada tahun 2023. Persentase TPT dan TPAK ditunjukkan pada Tabel II.53.

**Tabel II.53 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) – Agustus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2021-2023**

| No | Kabupaten/Kota  | Tingkat Pengangguran Terbuka |      |      | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |       |       |
|----|-----------------|------------------------------|------|------|------------------------------------|-------|-------|
|    |                 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2021                               | 2022  | 2023  |
| 1  | Jayapura        | 7,87                         | 5,94 | 4,07 | 67,97                              | 65,13 | 67,69 |
| 2  | Kepulauan Yapen | 2,47                         | 3,6  | 4,01 | 63,94                              | 68,36 | 61,05 |
| 3  | Biak Numfor     | 9,49                         | 7,4  | 5,72 | 69,47                              | 72,31 | 65,97 |
| 4  | Sarmi           | 2                            | 2,09 | 3,09 | 68,57                              | 68,96 | 65,73 |

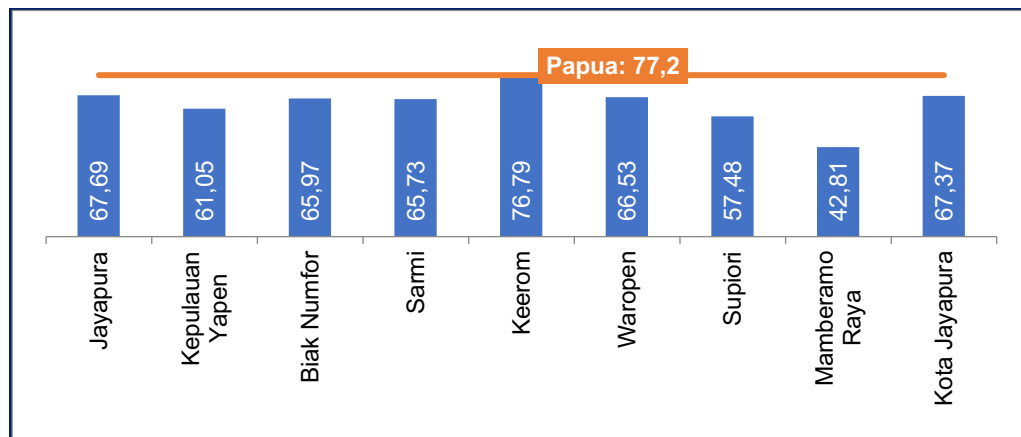
| No             | Kabupaten/Kota | Tingkat Pengangguran Terbuka |      |       | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja |       |       |
|----------------|----------------|------------------------------|------|-------|------------------------------------|-------|-------|
|                |                | 2021                         | 2022 | 2023  | 2021                               | 2022  | 2023  |
| 5              | Keerom         | 1,41                         | 2,49 | 1,5   | 76,91                              | 74,75 | 76,79 |
| 6              | Waropen        | 8,56                         | 6,64 | 4,62  | 56,39                              | 56,98 | 66,53 |
| 7              | Supiori        | 2,66                         | 2,93 | 4,81  | 68,56                              | 61,22 | 57,48 |
| 8              | Mamberamo Raya | 1,91                         | 2,32 | N/A   | 66,84                              | 63,19 | 42,81 |
| 9              | Kota Jayapura  | 11,67                        | 9,71 | 10,76 | 63,75                              | 60,61 | 67,37 |
| Provinsi Papua |                | 3,33                         | 2,83 | 2,67  | 78,29                              | 77,75 | 77,2  |

Sumber: Sakernas Agustus dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

### 2.3.2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) - Agustus tertinggi di Provinsi Papua pada tahun 2023 berada di Kabupaten Keerom dengan persentase sebesar 76,79%. Persentase TPAK yang semakin meningkat di suatu daerah mengindikasikan bahwa penduduk dalam usia angkatan kerja di daerah tersebut secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan persentase TPAK terendah di Provinsi Papua pada tahun 2023. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, persentase TPAK pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua masih berada di bawah garis TPAK provinsi. Persentase TPAK di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar II.49.

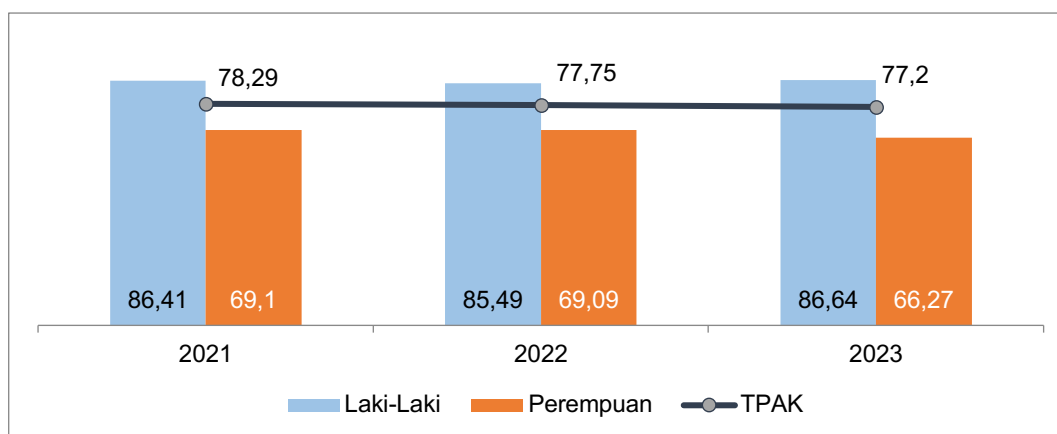
Gambar II.49 Persentase Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) - Agustus di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

TPAK di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan gender atau jenis kelamin. Diketahui bahwa TPAK di Provinsi Papua didominasi oleh laki-laki. TPAK laki-laki mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 86,64% dari 85,49% pada tahun 2022. TPAK perempuan pada tahun 2023 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Tahun 2023, persentase TPAK perempuan adalah sebesar 66,27% dari sebelumnya 69,10% pada tahun 2021 dan 69,09% pada tahun 2022. Adapun TPAK laki-laki berada di atas garis rata-rata provinsi sementara perempuan berada di bawah garis rata-rata provinsi.

**Gambar II.50 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023**

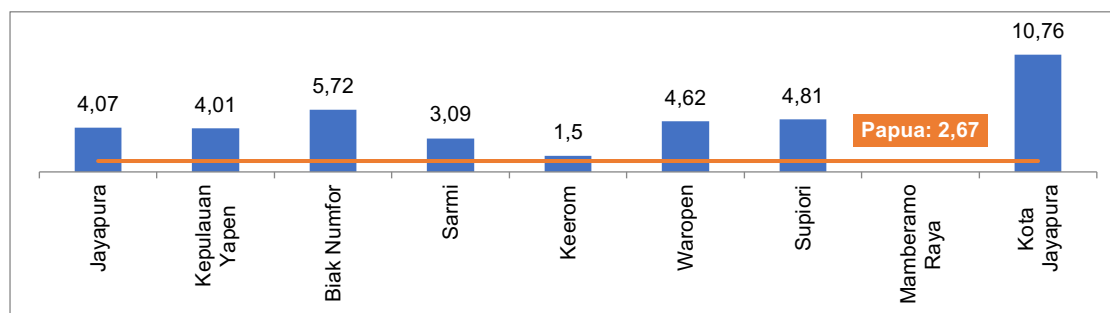


Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

### 2.3.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua pada Agustus 2023 adalah sebesar 2,67%. Kota Jayapura menjadi kota dengan persentase TPT tertinggi di Provinsi Papua yaitu sebesar 10,76%, sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan persentase TPT terendah yaitu sebesar 1,5%. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua memiliki persentase TPT diatas garis TPT provinsi. Adapun data persentase TPT Kabupaten Mamberamo Raya masih belum tersedia. Persentase TPT di Provinsi Papua pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar II.51.

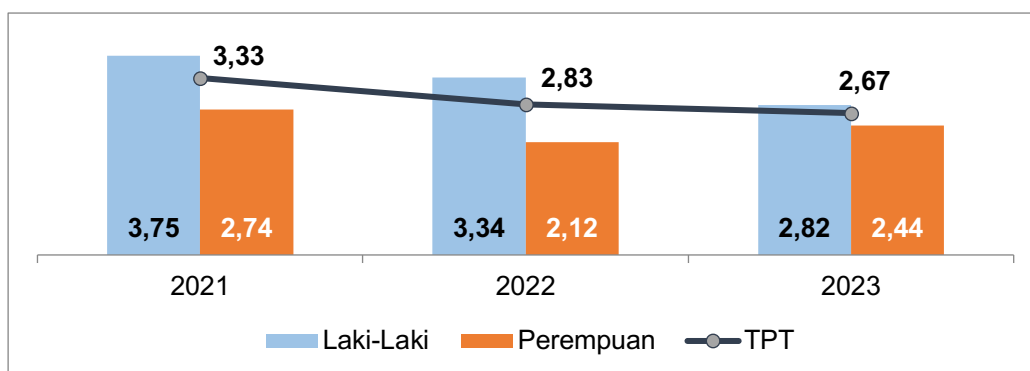
**Gambar II.51 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - Agustus di Provinsi Papua 2023**



Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua dapat dilihat berdasarkan gender atau jenis kelamin. Tahun 2023, TPT laki-laki adalah sebesar 2,82% lebih tinggi dibanding TPT perempuan yaitu sebesar 2,44%. TPT laki-laki mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2023, TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,32 dibandingkan pada tahun 2022. TPT perempuan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu sebesar 2,12% namun kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 2,44%. Adapun TPT perempuan masih berada di bawah garis rata-rata TPT secara provinsi sedangkan TPT laki-laki berada di atas garis rata-rata.

**Gambar II.52 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2023**



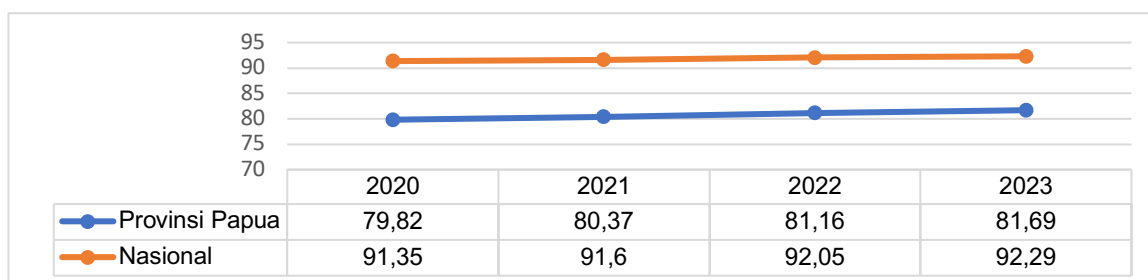
Sumber: Sakernas Agustus dalam Indikator Penting Provinsi Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) Edisi Februari 2024

### 2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 2.3.2.2.1 Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang menekankan pada status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah.

**Gambar II.53 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2018-2023**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan Gambar II.53, diketahui bahwa IPG Provinsi Papua dari tahun 2020–2023 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 IPD Provinsi Papua sebesar 79,82 yang meningkat menjadi 81,69 pada tahun 2023. Meskipun demikian, IPG Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah IPG Nasional yang mencapai 92,29 pada 2023. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Papua, maka IPG tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh Kota Jayapura (94,76), Jayapura (91,60), dan Biak Numfor (90,97), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.54.

**Tabel II.54 Perbandingan Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2023**

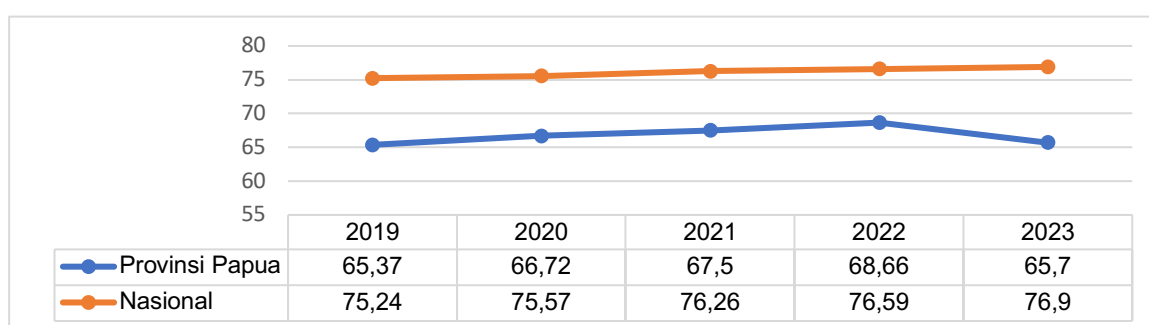
| Kabupaten             | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jayapura              | 90,91        | 91,09        | 91,43        | 91,60        |
| Kepulauan Yapen       | 88,98        | 89,10        | 90,05        | 89,90        |
| Biak Numfor           | 90,13        | 90,20        | 90,58        | 90,97        |
| Sarmi                 | 82,49        | 82,71        | 83,44        | 83,76        |
| Keerom                | 86,25        | 86,27        | 87,37        | 87,96        |
| Waropen               | 70,23        | 70,45        | 71,00        | 71,56        |
| Supiori               | 76,51        | 76,93        | 77,93        | 78,33        |
| Mamberamo Raya        | 82,11        | 82,68        | 83,36        | 83,77        |
| Kota Jayapura         | 94,37        | 94,63        | 94,74        | 94,76        |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>91,35</b> | <b>91,60</b> | <b>92,05</b> | <b>92,29</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

#### 2.3.2.2.2 Pemberdayaan Gender

Pembangunan gender tidak lepas dari adanya pemberdayaan gender. Pemberdayaan gender adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan, dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar. Tujuan pemberdayaan gender adalah untuk menghasilkan persamaan derajat antara laki-laki dan Perempuan. Tinjauan pemberdayaan gender dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan ekonomi.

**Gambar II.54 Perbandingan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Gambar II.54 memperlihatkan ilustrasi dan data capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua dibandingkan dengan nasional. IDG Provinsi Papua pada tahun 2023 sebesar 65,70 di bawah IDG Nasional sebesar 76,90. Jika dipilih berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Papua, wilayah dengan IDG tertinggi adalah Kota Jayapura (77,65), Biak Numfor (70,71), Sarmi (70,35), dan Jayapura (70,20).



**Tabel II.55 Perbandingan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tahun 2019-2023**

| Kabupaten             | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jayapura              | 69,70        | 68,77        | 70,20        | 69,50        | 70,20        |
| Kepulauan Yapen       | 70,32        | 68,95        | 67,73        | 64,65        | 68,76        |
| Biak Numfor           | 70,56        | 69,95        | 68,87        | 69,84        | 70,71        |
| Sarmi                 | 73,09        | 74,19        | 72,92        | 68,85        | 70,35        |
| Keerom                | 58,06        | 59,31        | 59,83        | 54,04        | 63,87        |
| Waropen               | 47,78        | 50,82        | 50,39        | 50,86        | 55,92        |
| Supiori               | 66,33        | 64,07        | 62,65        | 63,21        | 64,18        |
| Mamberamo Raya        | 58,23        | 53,80        | 59,29        | 55,13        | 54,83        |
| Kota Jayapura         | 82,75        | 81,05        | 80,25        | 75,55        | 77,65        |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>65,37</b> | <b>66,72</b> | <b>67,50</b> | <b>68,66</b> | <b>65,70</b> |

Sumber: BPS RI, 2023

### 2.3.2.2.3 Keterlibatan sebagai Aparatur Sipil Negara

Pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua dilihat dari kontribusi perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perempuan yang bekerja sebagai PNS di Provinsi Papua pada tahun 2022 adalah sebanyak 13.433 jiwa.

**Tabel II.56 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022**

| No                    | Kabupaten/Kota       | Laki-Laki     | Perempuan     | Jumlah        |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1</b>              | <b>Jayapura</b>      | <b>1.771</b>  | <b>2.311</b>  | <b>4.082</b>  |
| 2                     | Kepulauan Yapen      | 1.911         | 1.617         | 3.528         |
| 3                     | Biak Numfor          | 1.974         | 1.972         | 3.946         |
| 4                     | Sarmi                | 1.188         | 898           | 2.086         |
| 5                     | Keerom               | 1.602         | 1469          | 3.071         |
| 6                     | Waropen              | 1.375         | 951           | 2.362         |
| 7                     | Supiori              | 1.371         | 1.137         | 2.508         |
| 8                     | Mamberamo raya       | 1.252         | 606           | 1.858         |
| <b>9</b>              | <b>Kota Jayapura</b> | <b>1.603</b>  | <b>2.472</b>  | <b>4.075</b>  |
| <b>Provinsi Papua</b> |                      | <b>14.047</b> | <b>13.433</b> | <b>27.480</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

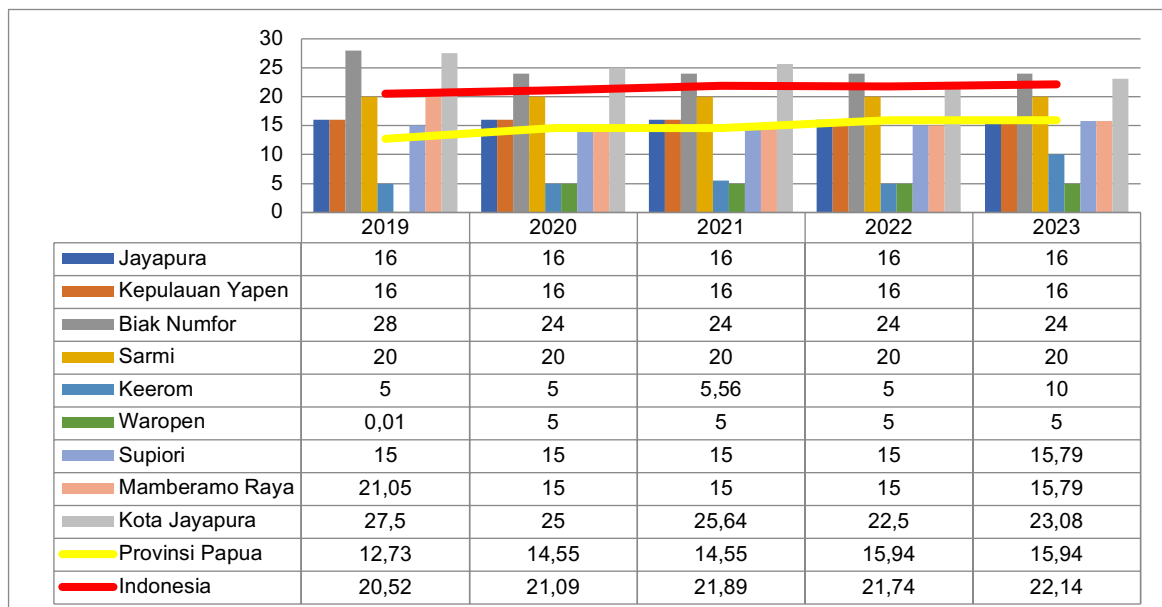
Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dan kota dengan jumlah PNS perempuan terbanyak dengan masing-masingnya berjumlah 2.311 dan 2.472 jiwa. Apabila dibandingkan secara total dengan jumlah laki-laki, jumlah perempuan dalam kepegawaian negeri sipil cenderung tidak memiliki perbandingan yang begitu tinggi. Jumlah tersebut ditunjukkan pada Tabel II.56.

### 2.3.2.2.2 Keterlibatan di Parlemen

Pemberdayaan perempuan juga dapat terlihat dari keterlibatannya di parlemen. Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara dalam keterwakilan perempuan di parlemen menurut data World Bank tahun 2019. Hal tersebut mencerminkan bahwa angka keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen masih rendah dan berpengaruh terhadap kebijakan kesetaraan gender. Keterlibatan perempuan di Parlemen dari Provinsi Papua pada tahun 2019-2023 ditunjukkan pada Gambar II.55.

Jika dilihat secara nasional, keterlibatan perempuan dalam parlemen di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Secara provinsi, terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua yang sudah memiliki persentase keterlibatan perempuan di parlemen di atas garis provinsi. Kabupaten/kota dengan persentase keterlibatan perempuan di parlemen tertinggi adalah Kota Jayapura dan kabupaten/kota dengan persentase terendah adalah Kabupaten Keerom dan Waropen.

**Gambar II.55 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Papua Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Provinsi Papua

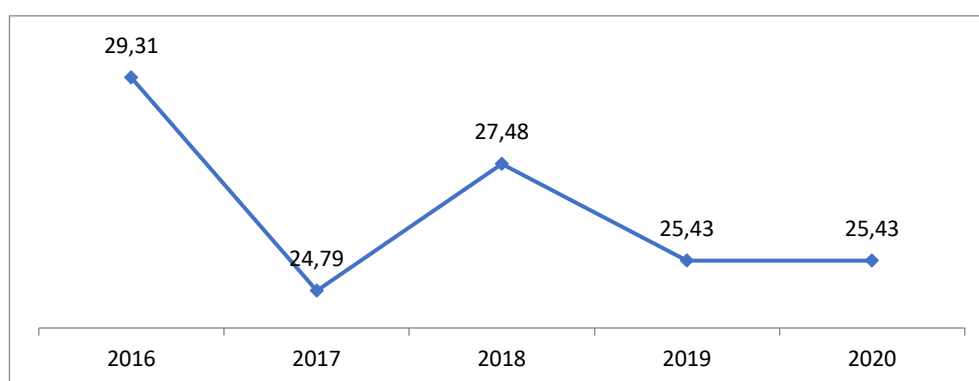
Partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan di Papua menjadi fokus penting untuk mencapai representasi yang lebih inklusif dan merata. Partisipasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun begitu perempuan di Papua semakin aktif terlibat dalam berbagai tingkatan politik dan pemerintahan. Terdapat sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan di Papua, mencakup advokasi untuk peningkatan jumlah perempuan di lembaga-lembaga legislatif, peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam agenda politik, serta dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik.

### 2.3.2.3 Pangan

#### 2.3.2.3.1. Asumsi Kalori Minimum di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari

Tubuh memerlukan minimal 1400 kkal asupan untuk dapat melakukan aktivitas dalam sehari. Apabila penduduk belum memenuhi kebutuhan kalori minimum per hari maka hal tersebut mengindikasikan kurangnya kebutuhan kalori penduduk yang sesuai dengan standar. Adapun penduduk di Provinsi Papua dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari semakin mengalami penurunan sejak tahun 2016 meskipun sempat meningkat pada tahun 2018 sebelum kembali menurun hingga tahun 2020.

**Gambar II.56 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/Kapita/Hari di Provinsi Papua Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS RI, 2022

Rata-rata konsumsi per kapita ditinjau dari kalori dan protein per hari dan kelompok bahan makanan lainnya. Berdasarkan Tabel II.57, diketahui bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari di Provinsi Papua cenderung mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir. Sementara rata-rata konsumsi protein per kapita per hari sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 namun perlahan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 46,8 gram dari 45,07 gram. Meskipun rata-rata kalori dan protein mengalami kecenderungan untuk meningkat, tetapi masih belum bisa mencapai rata-rata nasional.

**Tabel II.57 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Papua Tahun 2019-2023**

| Wilayah   | Kalori (kkal) |          |          |          |          | Protein (gram) |       |       |       |       |
|-----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|           | 2019          | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2019           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Papua     | 1.863,07      | 1.914,12 | 1.879,71 | 1.902,04 | 1.902,72 | 44,66          | 46,52 | 44,94 | 45,07 | 46,8  |
| Indonesia | 2.120,52      | 2.112,06 | 2.143,21 | 2.079,09 | 2.087,64 | 62,13          | 61,98 | 62,28 | 62,21 | 62,33 |

Sumber: Publikasi Statistik Indonesia dalam BPS, 2023

#### 2.3.2.3.2. Konsumsi Setara Kedelai

Konsumsi setara kedelai dilihat berdasarkan jenis pengolahan kedelai dalam bentuk tahu, tempe, dan kecap. Konsumsi tahu, tempe, dan kecap di Provinsi Papua diketahui masih

berada di bawah angka konsumsi nasional yang ditunjukkan pada Tabel II.58 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020.

**Tabel II.58 Konsumsi Setara Kedelai (Tahu, Tempe, Kecap) di Provinsi Papua Tahun 2020**

| Uraian    | Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun) |       |       |       |
|-----------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|
|           | Tahu                                      | Tempe | Kecap | Total |
| Papua     | 2,23                                      | 1,65  | 0,34  | 4,22  |
| Indonesia | 2,78                                      | 3,64  | 0,74  | 7,17  |

Sumber: BPS RI, 2022

Apabila dilihat secara tahunan mulai dari tahun 2018 hingga 2020, konsumsi total setara kedelai cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2018, konsumsi setara kedelai meraih angka 3,42 hingga pada tahun 2020 meraih angka 4,22. Laju pertumbuhan konsumsi setara kedelai di Provinsi Papua adalah sebesar 11,09 per tahunnya. Konsumsi setara kedelai dan laju pertumbuhannya pada tahun 2018-2020 ditunjukkan pada Tabel II.59.

**Tabel II.59 Konsumsi Setara Kedelai di Provinsi Papua Tahun 2018-2020**

| Uraian    | Konsumsi Setara Kedelai (kg/kapita/tahun) |      |      | Pertumbuhan |
|-----------|-------------------------------------------|------|------|-------------|
|           | 2018                                      | 2019 | 2020 |             |
| Papua     | 3,42                                      | 3,66 | 4,22 | 11,09       |
| Indonesia | 7,51                                      | 7,14 | 7,17 | -2,29       |

Sumber: BPS RI, 2022

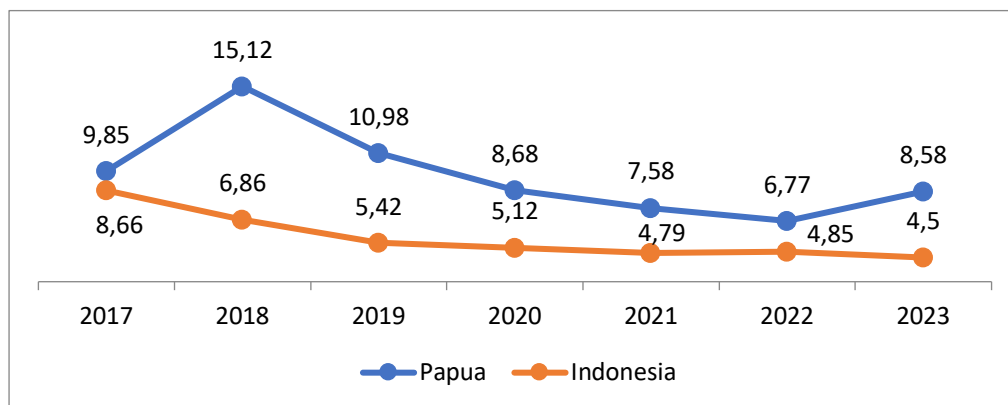
#### 2.3.2.3.3. Kerawanan Pangan dan Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Kerawanan pangan menunjukkan kondisi ketidakcukupan pangan di suatu daerah. Prevalensi penduduk di Provinsi Papua dengan kerawanan pangan baik sedang maupun berat yang didasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan tahun 2017-2023. Tingkat keparahan kerawanan pangan bersifat laten, yang diukur berdasarkan Skala Kerawanan Pengalaman Kerawanan Pangan. Skala ini memungkinkan untuk menganalisa prevalensi kerawanan pangan secara konsisten. Tingkat keparahan kondisi kerawanan pangan yang diukur melalui skala ini dapat memberikan gambaran secara langsung terkait ketidakmampuan rumah tangga atau individu dalam mengakses makanan yang dibutuhkan secara regular. Berdasarkan Gambar II.42, angka prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan mengalami fluktuasi. Tahun 2018 menjadi tahun dengan perolehan prevalensi tertinggi di Provinsi Papua yaitu mencapai 15,12% yang ditunjukkan pada Gambar II.57.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu dimana konsumsi energi sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Papua sejak tahun 2017 menjadi yang terbesar secara Nasional dan jauh berada di atas garis nasional. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi

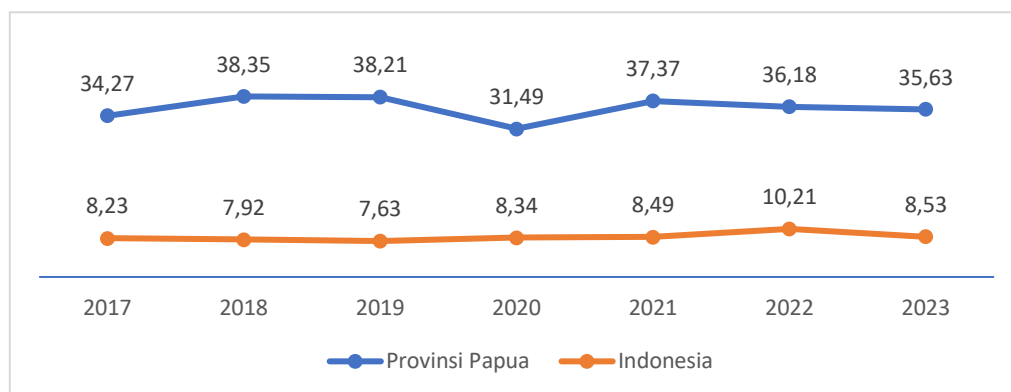
Papua berstatus “sangat tinggi” pada tahun 2019 dan 2021, serta berstatus “tinggi” pada tahun 2020. Prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.58.

**Gambar II.57 Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat Berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan di Provinsi Papua Tahun 2017-2023 (Persen)**



Sumber: Susenas dalam BPS RI, 2023

**Gambar II.58 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**

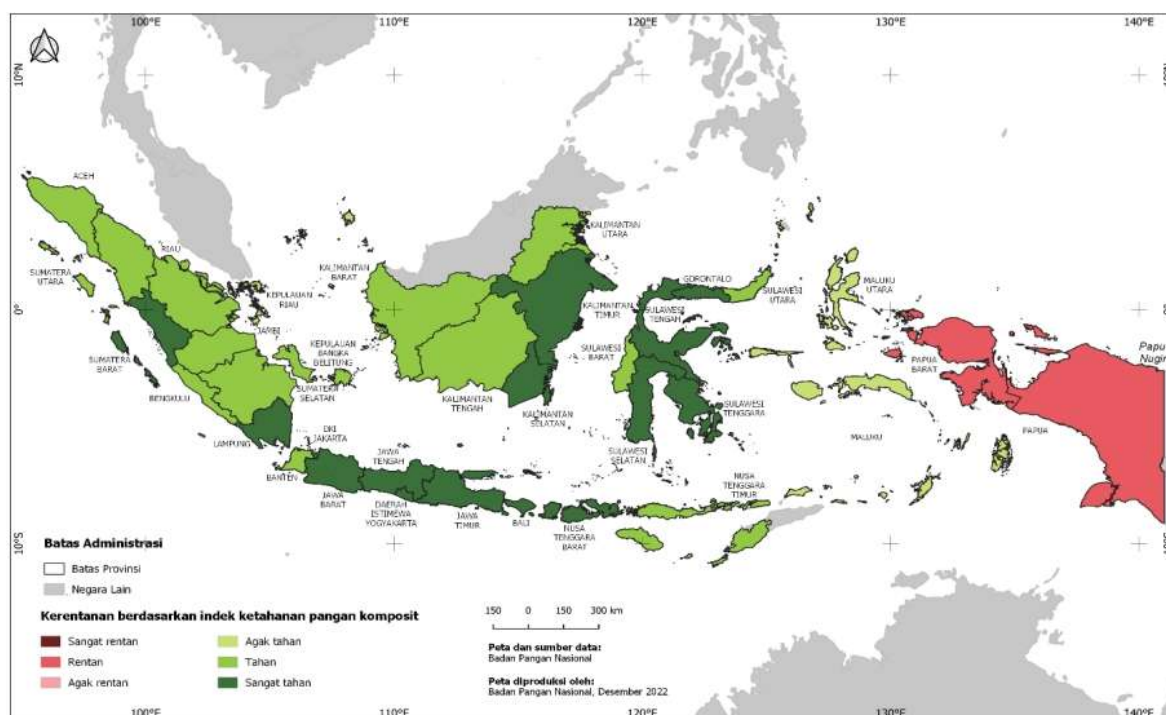


Sumber: Susenas dalam BPS, 2024

#### 2.3.2.3.4. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Provinsi Papua dapat dilihat dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indikator penyusun ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada 3 aspek yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan/distribusi, dan pemanfaatan pangan di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2022, yaitu dari 34,79 menjadi 37,80. Meskipun begitu, Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan peringkat “**rendah**” dalam skor IKP dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini menjadikan Provinsi Papua menjadi provinsi Prioritas 1 untuk peningkatan skor IKP.

**Gambar II.59 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2022**



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022

IKP dibedakan berdasarkan kabupaten dan kota untuk menentukan tingkatan kelompok kerentanan. Berdasarkan data IKP tahun 2022, sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP rendah, salah satunya adalah kabupaten di Provinsi Papua. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua. Berdasarkan pengelompokan terhadap kabupaten pada Tabel II.45, terlihat bahwa Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten Prioritas 1 dalam kurun 3 tahun terakhir. Sebaliknya Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan tingkat kerentanan yang cukup baik yaitu berada pada Prioritas 4 selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan tinjauan kota, Kota Jayapura sebagai satu-satunya kota di Provinsi Papua menunjukkan ketahanan pangan sangat baik dengan berada pada Prioritas 5. IKP Provinsi Papua berdasarkan kabupaten dan kota ditunjukkan pada Tabel II.45.

**Tabel II.60 Indeks Ketahanan Pangan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua**

| Wilayah        | Uraian                      | 2020                                            | 2021                                            | 2022                                            |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Provinsi Papua | <b>IKP (indeks)</b>         | <b>34,79</b>                                    | <b>35,48</b>                                    | <b>37,8</b>                                     |
|                | <b>Kategori</b>             | <b>Prioritas 1</b>                              | <b>Prioritas 1</b>                              | <b>Prioritas 1</b>                              |
|                | <b>Interpretasi</b>         | Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi | Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi | Tingkat kerentanan pangan relatif sangat tinggi |
|                | a. Indeks Ketersediaan (IK) | 7,98                                            | 8,89                                            | 17,68                                           |
|                | b. Indeks Keterjangkauan    | 49,49                                           | 49                                              | 49,89                                           |
|                | c. Indeks Pemanfaatan (IP)  | 42,29                                           | 43,71                                           | 42,34                                           |



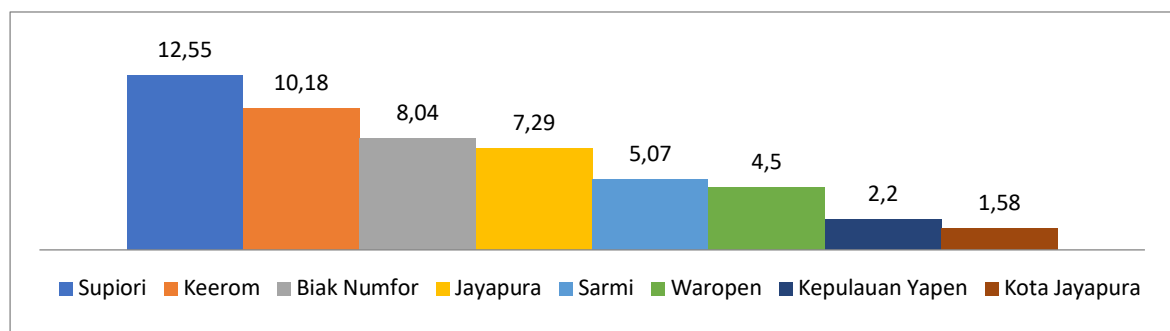
| Wilayah          | Uraian          | 2020         | 2021        | 2022        |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Kabupaten</b> |                 |              |             |             |
| 1                | Jayapura        | IKP (indeks) | 58,11       | 54,91       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 3 | Prioritas 3 |
| 2                | Kepulauan Yapen | IKP (indeks) | 43,38       | 43,92       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 2 | Prioritas 2 |
| 3                | Biak Numfor     | IKP (indeks) | 48,51       | 49,07       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 2 | Prioritas 2 |
| 4                | Sarmi           | IKP (indeks) | 44,68       | 44,73       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 2 | Prioritas 2 |
| 5                | Keerom          | IKP (indeks) | 60,24       | 61,38       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 4 | Prioritas 4 |
| 6                | Waropen         | IKP (indeks) | 37,5        | 50,03       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 1 | Prioritas 2 |
| 7                | Supiori         | IKP (indeks) | 31,59       | 28,11       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 1 | Prioritas 1 |
| 8                | Mamberamo Raya  | IKP (indeks) | 19,8        | 21,95       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 1 | Prioritas 1 |
| 9                | Kota Jayapura   | IKP (indeks) | 68,83       | 70,18       |
|                  |                 | Kategori     | Prioritas 5 | Prioritas 5 |

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan, 2020-2022

### 2.3.2.3.5 Program Bantuan Pangan

Provinsi Papua termasuk dalam wilayah program bantuan pangan. Bantuan pangan berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sembako. BPNT merupakan bantuan sosial pangan non tunai yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari pemerintah sebesar 110.000 rupiah tiap bulan melalui mekanisme perbankan. Bantuan Sembako adalah pengembangan BPNT yang dilakukan sejak tahun dimulainya yaitu tahun 2020. KPM memperoleh program bantuan Sembako sebesar 150.000 rupiah melalui mekanisme perbankan. Adapun persentase KPM di Provinsi Papua yang menerima BPNT maupun Bantuan Sembako pada tahun 2023 ditunjukkan pada Gambar II.60.

**Gambar II.60 Persentase Penerima BPNT dan Bantuan Sembako Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023**



Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua, 2023

Adapun realisasi jumlah KPM Bansos Pangan di Provinsi Papua pada tahun 2022 berjumlah 1.205.586 KPM dengan rencana jumlah KPM adalah sebesar 1.500.427 KPM.

Realisasi jumlah KPM cenderung mendekati rencana jumlah KPM Bansos Pangan. Hal serupa juga berlaku pada rencana dan realisasi anggaran Bansos Pangan di tahun yang sama seperti ditunjukkan pada Tabel II.61.

**Tabel II.61 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022**

| Kabupaten/Kota  | Rencana Jumlah KPM | Realisasi Jumlah KPM | Rencana Anggaran       | Realisasi Anggaran     |
|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Jayapura        | 19.364             | 17.672               | 11.609.600.000         | 10.596.800.000         |
| Kepulauan Yapen | 41.321             | 38.174               | 24.776.200.000         | 22.899.600.000         |
| Biak Numfor     | 44.572             | 42.894               | 26.718.400.000         | 25.727.600.000         |
| Sarmi           | 12.908             | 11.610               | 7.742.000.000          | 6.964.800.000          |
| Keerom          | 15.431             | 14.483               | 9.253.400.000          | 8.687.800.000          |
| Waropen         | 10.207             | 9.622                | 6.120.600.000          | 5.769.600.000          |
| Supiori         | 7.977              | 7.918                | 4.784.200.000          | 4.748.800.000          |
| Mamberamo Raya  | 8.212              | 6.600                | 4.926.000.000          | 3.958.800.000          |
| Kota Jayapura   | 36.769             | 31.033               | 21.997.800.000         | 18.577.400.000         |
| <b>Papua</b>    | <b>1.500.427</b>   | <b>1.205.586</b>     | <b>899.932.600.000</b> | <b>723.129.600.000</b> |

Sumber: BPS RI, 2023

#### 2.3.2.4 Pertanian

Urusan pertanian di Provinsi Papua dilihat dari peralihan tanah. Peralihan tanah memiliki beberapa pengelompokan di antaranya jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang. Pada tahun 2016-2017, pertanian di Provinsi Papua mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel II.47, diketahui bahwa pertanian berdasarkan jual-beli, pewarisan, hibah, tukar-menukar, dan lelang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 penurunan peralihan tanah menjadi sebesar 5.887 ha.

**Tabel II.62 Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)**

| Tahun | Jual-Beli | Pewarisan | Hibah | Tukar Menukar | Lelang | Total |
|-------|-----------|-----------|-------|---------------|--------|-------|
| 2016  | 6.208     | 559       | 254   | 6             | 30     | 7.057 |
| 2017  | 5.211     | 451       | 197   | 3             | 25     | 5.887 |

Sumber: Bapperida Papua

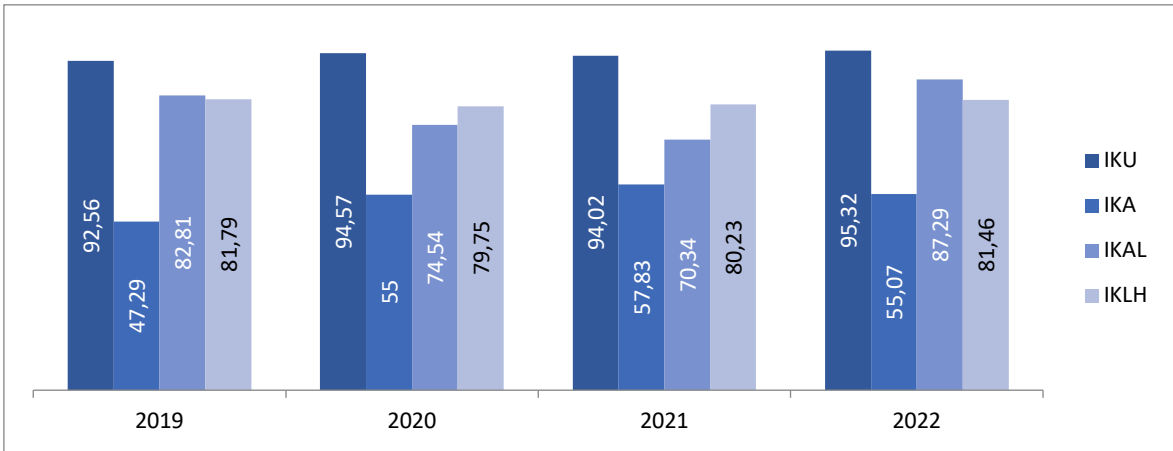
#### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

##### 2.3.2.5.1 Indeks Lingkungan Hidup

Provinsi Papua memiliki kekayaan akan sumber daya alam sehingga perencanaan dan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga unsur lingkungan hidup. Perubahan kondisi lingkungan menjadi salah satu isu penting terkait pengelolaan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan Gambar

II.61, diketahui bahwa IKLH Provinsi Papua pada tahun 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020-2022. IKLH Provinsi Papua ditunjukkan pada Gambar II.61.

Gambar II.61 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya di Papua Tahun 2019-2022



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (data diolah, 2023)

Pada tahun 2023, perolehan IKLH Provinsi Papua dengan menggunakan metode lama masih mengungguli rata-rata IKLH Nasional. Skor IKLH Provinsi Papua sebesar 81,31, lebih tinggi 8,78 poin dibandingkan nasional yaitu sebesar 72,53. Sama halnya dengan perolehan IKLH, nilai komposit (IKU, IKA, IKL, IKAL) Provinsi Papua juga cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan menggunakan rumus baru di tahun yang sama, IKLH Provinsi Papua mengalami kenaikan sebanyak 0,57 poin menjadi 81,88. Namun kenaikan ini tidak disertai dengan kenaikan pada salah satu nilai kompositnya. Perolehan IKA dengan rumus baru cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yaitu 70,74 dari 72,01. Penurunan tersebut terjadi karena terdapat penambahan parameter yang membuat nilai IKU cenderung turun. Selain itu pada rumus terbaru, terdapat perubahan metode perhitungan pada IKA menjadi metode IKA-INA serta klasifikasi tutupan lahan ditambahkan dalam perhitungan IKL dan penambahan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut (FKEG) bagi kabupaten/kota dengan sistem gambut.

Tabel II.63 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya

| Provinsi | Capaian 2023 (Rumus Lama) |       |       |       |       | Capaian 2023 (Rumus Baru) |       |       |        |       |
|----------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|--------|-------|
|          | IKLH                      | IKU   | IKA   | IKL   | IKAL  | IKLH                      | IKU   | IKA   | IKL    | IKAL  |
| Papua    | 81,31                     | 95,87 | 54,73 | 100   | 84,56 | 81,88                     | 84,47 | 70,74 | 100,01 | 84,56 |
| Nasional | 72,53                     | 88,67 | 54,59 | 61,79 | 78,84 | 76,09                     | 78,14 | 72,01 | 77,87  | 78,84 |

Sumber: Bapperida 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

Apabila ditinjau secara kabupaten, Supiori menjadi kabupaten dengan perolehan IKLH tertinggi baik menggunakan rumus lama maupun baru pada tahun 2023 yaitu sebesar 87,44 dan 85,37. Sebaliknya, Kota Jayapura menjadi kota dengan perolehan IKLH terendah dengan kedua rumus tersebut di tahun 2023 yaitu sebesar 73,5 dan 78,65.

**Tabel II.64 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Kompositnya**

| Kab/Kota        | Gambut/Non Gambut | Capaian 2023 (Rumus Lama) |       |       |       | Capaian 2023 (Rumus Baru) |       |       |       |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|
|                 |                   | IKLH                      | IKU   | IKA   | IKL   | IKLH                      | IKU   | IKA   | IKL   |
| Biak Numfor     | Non Gambut        | 82,84                     | 95,23 | 62    | 95,71 | 82,12                     | 84,13 | 70,74 | 97,94 |
| Jayapura        | Gambut            | 79,62                     | 94,54 | 51,67 | 100   | 84,84                     | 83,5  | 77,44 | 100   |
| Keerom          | Gambut            | 77,7                      | 94,46 | 46,67 | 100   | 80,14                     | 84,08 | 64,33 | 100   |
| Kepulauan Yapen | Non Gambut        | 83,85                     | 94,16 | 63,33 | 100   | 83,97                     | 83,63 | 74,99 | 100   |
| Mamberamo Raya  | Gambut            | 84,96                     | 100   | 60    | 100   | 84,08                     | 85,96 | 72,79 | 100   |
| Sarmi           | Gambut            | 78,93                     | 94,4  | 50    | 100   | 80,7                      | 83,97 | 65,94 | 100   |
| Supiori         | Non Gambut        | 87,44                     | 98,89 | 67,78 | 100   | 85,37                     | 85,52 | 76,68 | 100   |
| Waropen         | Gambut            | 81,45                     | 97,52 | 53,33 | 100   | 81,3                      | 85,02 | 66,39 | 100   |
| Kota Jayapura   | Gambut            | 75,5                      | 93,32 | 49    | 88,03 | 78,65                     | 83,36 | 66,54 | 90,75 |

Sumber: Bapperida 2024 mengacu Surat Direktur Jenderal (Ditjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024

### 2.3.2.5.2 Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan salah satu upaya dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Tertuang dalam poin 6 SDGs yaitu air bersih dan sanitasi layak, sanitasi aman diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas air bersih untuk mewujudkan air minum yang aman dan terjangkau. Akses sanitasi aman di Provinsi Papua melalui rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dilihat berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut diantaranya adalah fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, akses terhadap sanitasi layak, praktik buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka, akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T), dan keterlayanan sistem pengelolaan lumpur tinja. Persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi yang dikelola secara aman di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel II.65.

**Tabel II.65 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Layanan Sanitasi yang Dikelola Secara Aman Menurut Tipe Daerah di Provinsi Papua Tahun 2020-2023**

|           | Perkotaan |       |       |       | Perdesaan |      |      |      | Perkotaan + Perdesaan |       |      |      |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|------|------|------|-----------------------|-------|------|------|
|           | 2023      | 2022  | 2021  | 2020  | 2023      | 2022 | 2021 | 2020 | 2023                  | 2022  | 2021 | 2020 |
| Papua     | 4,96      | 8,64  | 5,07  | 5,6   | 0,53      | 5,68 | 1,01 | 1,11 | 1,82                  | 6,47  | 2,13 | 2,32 |
| Indonesia | 13,67     | 13,54 | 10,42 | 11,25 | 5,37      | 5,52 | 3,07 | 3,03 | 10,21                 | 10,16 | 7,25 | 7,64 |

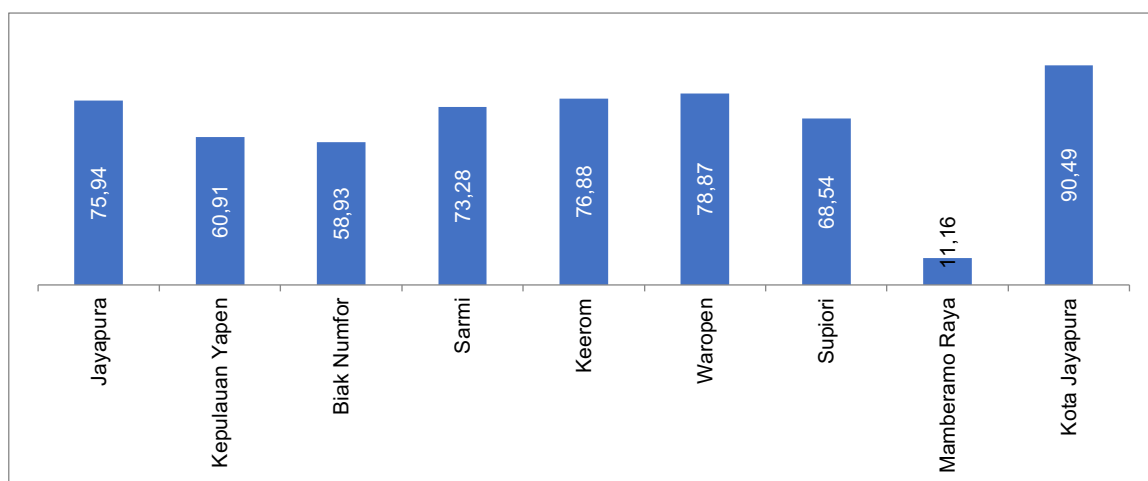
Sumber: Susenas Maret dalam BPS, 2023

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

#### 2.3.2.6.1 Kependudukan

Penduduk pada usia 0-17 tahun di Provinsi Papua yang telah memiliki akta kelahiran di tahun 2020 sudah berada di atas rata-rata yaitu di atas 50% pada masing-masing kabupaten/kota. Meskipun kepemilikan akta kelahiran sudah berada di atas rata-rata, masih terdapat satu kabupaten dengan kepemilikan akta kelahiran di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Mamberamo Raya sebesar 11,16%. Hal tersebut cukup menunjukkan ketimpangan besar dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua. Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun menurut kabupaten/kota pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel II.60.

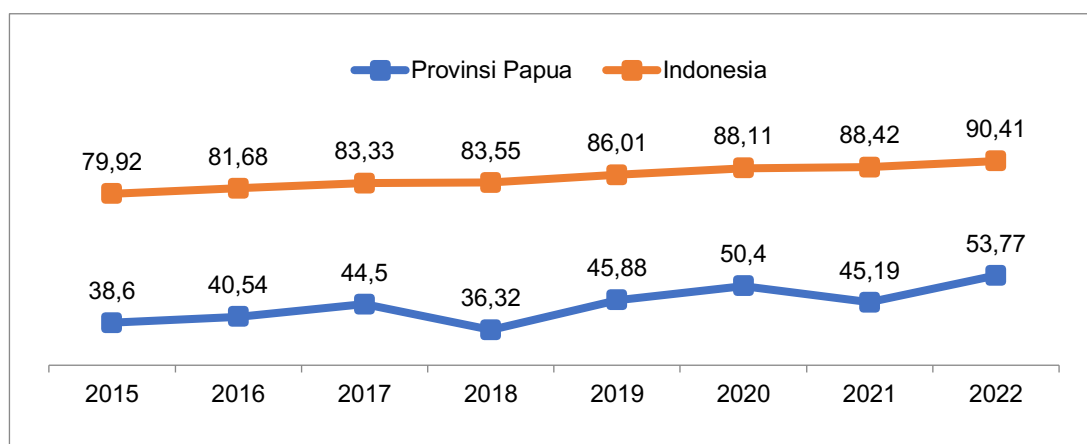
**Gambar II.62 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020**



Sumber: Analisis Profil Penduduk Provinsi Papua, BPS

Jika dilihat secara nasional melalui Gambar II.48, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun di Provinsi Papua masih berada di bawah garis nasional. Meskipun persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran secara provinsi cenderung meningkat namun masih belum dapat mendekati persentase nasional.

**Gambar II.63 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-17 Tahun**



Sumber: Susenas dalam BPS RI

#### 2.3.2.6.2 Catatan Sipil

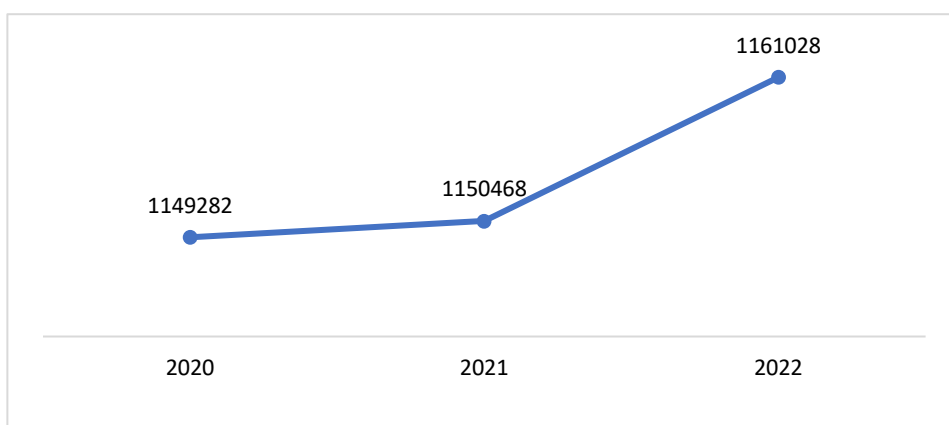
Pencatatan sipil merupakan pelayanan pencatatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sifatnya unik, tunggal, dan melekat pada penduduk yang terdaftar sebagai warga Indonesia. Kepemilikan NIK di Provinsi Papua sudah berada di atas rata-rata yaitu sebesar 80%. Meskipun begitu, masih terdapat satu kabupaten dengan persentase kepemilikan NIK sekaligus kepemilikan KTP terendah yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. Persentase kepemilikan NIK berdasarkan jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel II.66.

**Tabel II.66 Persentase Kepemilikan NIK Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020**

| No | Kabupaten       | Persentase Kepemilikan NIK |           |        |
|----|-----------------|----------------------------|-----------|--------|
|    |                 | Laki-laki                  | Perempuan | Jumlah |
| 1  | Jayapura        | 86.98                      | 86.68     | 86.84  |
| 2  | Kepulauan Yapen | 84.86                      | 83.41     | 84.16  |
| 3  | Biak Numfor     | 89.47                      | 88.69     | 89.09  |
| 4  | Sarmi           | 88.47                      | 88.75     | 88.59  |
| 5  | Keerom          | 82.25                      | 84.46     | 83.24  |
| 6  | Waropen         | 87.94                      | 87.69     | 87.82  |
| 7  | Supiori         | 99.42                      | 98.84     | 99.15  |
| 8  | Mamberamo Raya  | 39.72                      | 41.12     | 40.36  |
| 9  | Kota Jayapura   | 94.95                      | 95.6      | 95.24  |

Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah, 2021)

**Gambar II.64 Cakupan Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua 2020-2022**



Sumber: Capaian Target Stranas AKPSH Bappenas, 2023

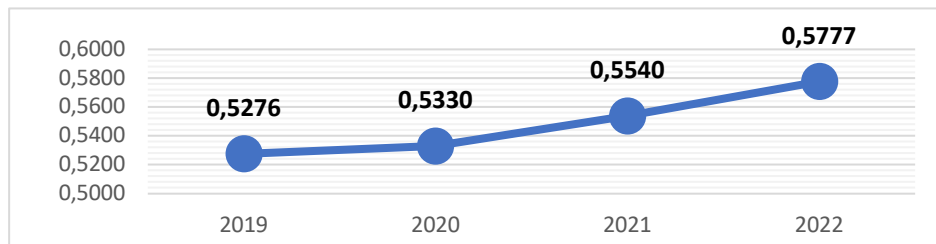
Berdasarkan data Capaian Target Stranas AKPSH oleh Bappenas pada indikator cakupan kepemilikan NIK pada semua penduduk Warga Negara Indonesia, Provinsi Papua mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tercakup dalam kepemilikan NIK. Cakupan kepemilikan NIK dari tahun 2020-2022 di Provinsi Papua.

### 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi Provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Meskipun Demikian, terdapat peningkatan nilai Indeks Desa Membangun dari 0,5276 pada tahun 2019 menjadi 0,5777 pada tahun 2022. Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap.



**Gambar II.65 Indeks Desa Membangun Provinsi Papua**



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (data diolah)  
Catatan : Data Provinsi Papua (9 Kabupaten/Kota)

**Tabel II.67 Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Milyar)**

| Tahun | Uraian            | Dana Desa | Total TKDD | % DD Terhadap TKDD |
|-------|-------------------|-----------|------------|--------------------|
| 2020  | Anggaran          | 964.17    | 7817.78    | 12.33              |
|       | Realisasi         | 964.14    | 7765.70    | 12.42              |
|       | Realisasi Capaian | 100.00    | 99.33      | 100.67             |
| 2021  | Anggaran          | 985.10    | 7807.25    | 12.62              |
|       | Realisasi         | 983.54    | 7735.30    | 12.71              |
|       | Realisasi Capaian | 99.84     | 99.08      | 100.77             |
| 2022  | Anggaran          | 802.71    | 9218.91    | 8.71               |
|       | Realisasi         | 802.12    | 9576.53    | 8.38               |
|       | Realisasi Capaian | 99.93     | 103.88     | 96.19              |

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021, (data diolah)  
Catatan: Data Provinsi Papua (9 Kab/Kota)

Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya, sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan desa tahun sebelumnya.

### 2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Provinsi Papua mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 841.320 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.020.190 jiwa pada tahun 2021. Meskipun demikian, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dari 2,91% pada 2018 menjadi 1,54% pada tahun 2021. diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua sebanyak 4-5 orang per keluarga yang mengindikasikan terdapat upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Papua. Hal ini pun terlihat dari Tabel II.64 yang

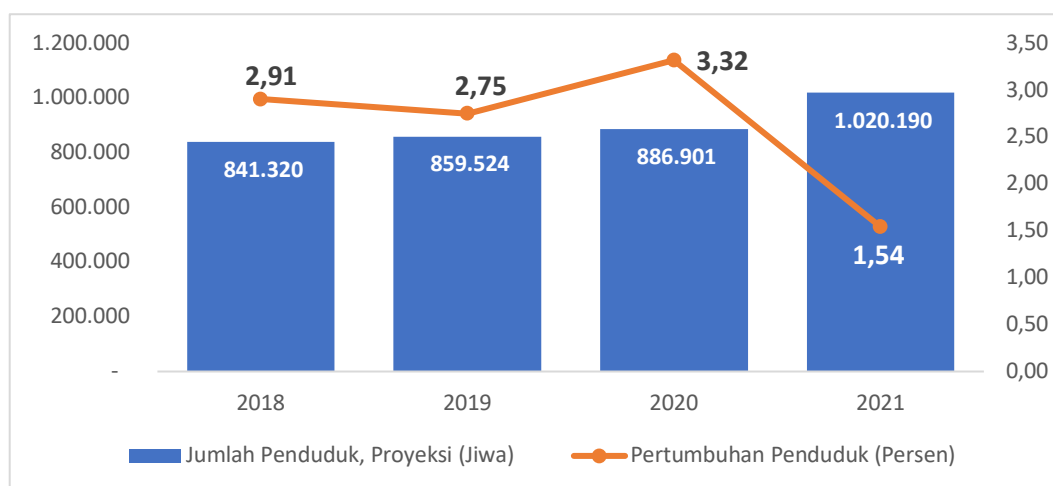
menunjukkan jumlah peserta KB aktif di Provinsi Papua yang cukup tinggi pada tahun 2017-2021, meskipun dalam kondisi fluktuatif setiap tahunnya.

**Tabel II.68 Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (Jiwa)**

| No           | Kabupaten       | 2017           | 2018          | 2019           | 2020          | 2021          |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1            | Jayapura        | 22,729         | 24,189        | 13,814         | 1,143         | 1,865         |
| 2            | Kepulauan Yapen | 5,113          | 7,474         | 478            | 5,209         | 6,426         |
| 3            | Biak Numfor     | 13,378         | 15,189        | 18,031         | 1,653         | 7,568         |
| 4            | Sarmi           | 514            | 1,354         | 19,093         | 19,093        | 7,901         |
| 5            | Keerom          | 2,863          | 4,588         | 6,824          | 8,225         | 8,984         |
| 6            | Waropen         | 865            | 2,340         | 5,602          | 5,977         | 7,179         |
| 7            | Supiori         | 463            | 651           | 876            | 889           | 76            |
| 8            | Mamberamo Raya  | 961            | 171           | 299            | 907           | 907           |
| 9            | Kota Jayapura   | 60,326         | 33,394        | 48,066         | 46,727        | 50,876        |
| <b>Papua</b> |                 | <b>107,212</b> | <b>89,350</b> | <b>113,083</b> | <b>89,823</b> | <b>91,782</b> |

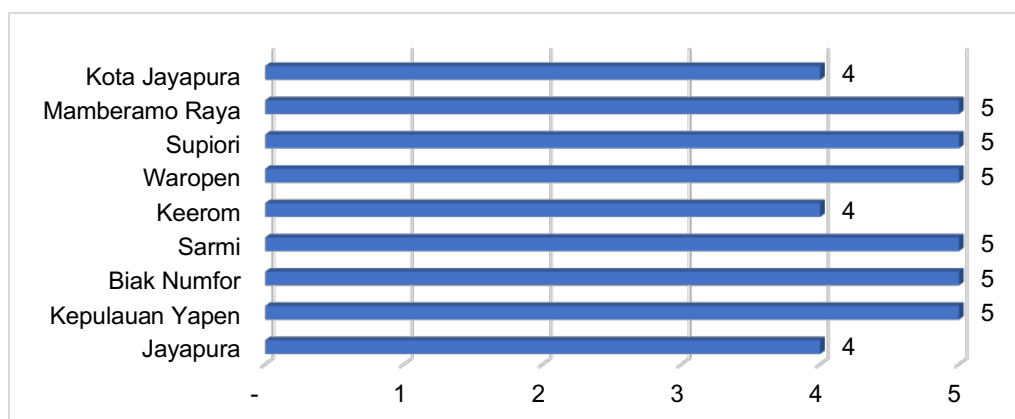
Sumber: BPS Provinsi Papua

**Gambar II.66 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)**



Sumber: BPS Provinsi Papua (Data Provinsi Papua 9 Kab/Kota)

**Gambar II.67 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Orang)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

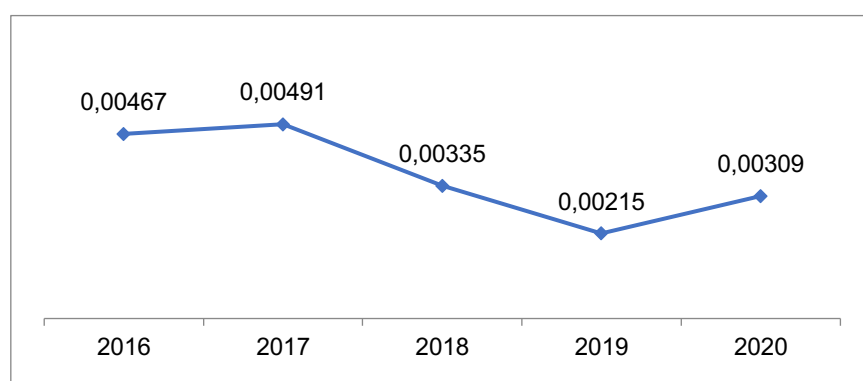
### 2.3.2.9 Perhubungan

#### 2.3.2.9.1 Transportasi Darat

Terminal penumpang di Provinsi Papua terdiri dari terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B. Untuk terminal penumpang tipe A berlokasi di terminal Entrop, di Kota Jayapura. Sedangkan terminal penumpang tipe B berlokasi di beberapa kabupaten/kota sebagai berikut:

- Terminal Heram di Kota Jayapura;
- Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura;
- Terminal Arso di Kabupaten Keerom;
- Terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi;
- Terminal Darfuar di Kabupaten Biak Numfor; dan
- Terminal Marsram di Kabupaten Supiori.

**Gambar II.68 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

Penggunaan transportasi darat di Provinsi darat dilihat dari ketersediaan aksesibilitas berupa jalan terhadap jumlah kendaraan. Tahun 2016-2020 ketersediaan jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan. Rata-rata perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor pada tahun 2016 adalah 1 km/467 unit kendaraan dan menurun hingga tahun 2020 sebesar 1 km/309 unit kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2017.

**Tabel II.69 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2022 (km/unit)**

| Tahun | Rasio Panjang jalan/jumlah kendaraan |
|-------|--------------------------------------|
| 2016  | 0,00467                              |
| 2017  | 0,00491                              |
| 2018  | 0,00335                              |
| 2019  | 0,00215                              |
| 2020  | 0,00309                              |
| 2021  | 0.0158                               |
| 2022  | 0.0139                               |

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Statistik Transportasi Provinsi Papua Tahun 2022

Penggunaan transportasi darat di Provinsi darat dilihat dari ketersediaan aksesibilitas berupa jalan terhadap jumlah kendaraan. Pada tabel di atas dapat dilihat ketersediaan jalan terhadap jumlah kendaraan mengalami penurunan pada tahun 2017-2019, kemudian pada tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 dapat dilihat perbandingan panjang jalan dengan kendaraan bermotor adalah 1 km/467 unit kendaraan dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1 km/1.390 unit kendaraan.

### 2.3.2.9.2 Transportasi Laut

Angkutan laut menjadi salah satu moda transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi terutama untuk wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau melalui jalur darat maupun udara. Angkutan laut masih menjadi pilihan moda transportasi bagi masyarakat yang bergerak di dalam wilayah maupun di luar Provinsi Papua yang dapat dijangkau melalui laut karena tarifnya yang relatif masih murah jika dibandingkan dengan transportasi udara untuk tujuan yang sama.

**Tabel II.70 Jumlah Penumpang menurut Pelabuhan dan Jenis Pelayaran di Provinsi Papua Tahun 2022-2023**

| Pelabuhan | Kapal                                             | Tahun 2022 |         |         | Tahun 2023 |         |         |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
|           |                                                   | Masuk      | Keluar  | Total   | Masuk      | Keluar  | Total   |
| Jayapura  | Kapal Luar Negeri                                 |            |         |         |            |         |         |
|           | Kapal PELNI dan Kapal Swasta                      | 80,329     | 101,321 | 181,650 | 130,859    | 127,777 | 258,636 |
|           | Kapal Perintis                                    | 11,906     | 9,943   | 21,849  | 11,384     | 10,517  | 21,901  |
| Serui     | Kapal Luar Negeri                                 | -          | -       | -       | -          | -       | -       |
|           | Kapal PELNI/ Swasta/ Perintis/ ASDP/ Kapal Rakyat | 76,367     | 79,089  | 155,456 | -          | -       | -       |
|           | Kapal PELNI dan Kapal Swasta                      | -          | -       | -       | 45,837     | 45,691  | 91,528  |
|           | Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat                  | -          | -       | -       | 27,890     | 26,922  | 54,812  |
| Biak      | Kapal Luar Negeri                                 | -          | -       | -       | 300        | 263     | 563     |
|           | Kapal PELNI dan Kapal Swasta                      | -          | -       | -       | 20,149     | 43,376  | 63,525  |
|           | Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat                  | 1,864      | 789     | 2,653   | 33,834     | 18,237  | 52,071  |
| Sarmi     | Kapal Luar Negeri                                 | -          | -       | -       | -          | -       | -       |
|           | Kapal PELNI dan Kapal Swasta                      | 37,240     | 28,786  | 66,026  |            |         |         |
|           | Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat                  | 30,042     | 11,418  | 41,460  | 1,507      | 1,565   | 3,072   |
| Waren     | Kapal Luar Negeri                                 | -          | -       | -       | -          | -       | -       |
|           | Kapal Swasta                                      | 9,465      | 7,654   | 17,119  | -          | -       | -       |
|           | Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat                  | 33,818     | 26,701  | 60,519  | 21,431     | 18,137  | 39,568  |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Tahun 2024

Transportasi laut di Provinsi Papua dilihat dari jumlah penumpang yang menggunakan mode transportasi laut kapal baik berangkat maupun datang yang dipisahkan berdasarkan jenis pelayaran. Pada tabel di atas dapat dilihat jumlah penumpang yang datang maupun berangkat dengan jenis pelayaran yang berbeda di 5 (lima) pelabuhan di Papua. Pada tahun 2023, jumlah penumpang dengan Kapal PELNI dan Kapal Swasta tertinggi berada di pelabuhan Jayapura yaitu 258.636 orang. Sedangkan pelabuhan Sarmi merupakan pelabuhan dengan jumlah penumpang dengan jenis pelayaran Kapal Perintis/ASDP/Kapal Rakyat terendah yaitu 3.072 orang. Untuk Kapal Luar Negeri pada tahun 2023, kabupaten Biak mendapatkan jumlah kedatangan dan keberangkatan sebesar 563 orang.

**Tabel II.71 Jumlah Kapal dan Arus Barang menurut Pelabuhan di Provinsi Papua Tahun 2022-2023**

| Pelabuhan | Tahun | Jumlah Kapal (Unit) | Arus Barang (Ton/M3) |            |              |
|-----------|-------|---------------------|----------------------|------------|--------------|
|           |       |                     | Masuk                | Keluar     | Total        |
| Jayapura  | 2022  | 649                 | 1,555,044.89         | 315,455    | 1,870,499.89 |
|           | 2023  | 833                 | 1,511,618.19         | 466,567.26 | 1,978,185.45 |
| Serui     | 2022  | 1,556               | 549,314              | 128,050    | 677,364.00   |
|           | 2023  | 1,159               | 187,667              | 96,447     | 284,114.00   |
| Biak      | 2022  | 727                 | 113,652              | 71,920     | 185,572.00   |
|           | 2023  | 1,111               | 49,361               | 31,237     | 80,598.00    |
| Sarmi     | 2022  | 177                 | 10,808               | 97,920     | 108,728.00   |
|           | 2023  | 191                 | 6,781.50             | 131,439.96 | 138,221.46   |
| Waren     | 2022  | 733                 | 440                  | 0          | 440.00       |
|           | 2023  | 1,026               | 13,156               | 0          | 13,156.00    |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Tahun 2024

Selain jumlah penumpang yang datang maupun berangkat, pada tabel di atas dapat dilihat jumlah kunjungan kapal dan barang pada masing-masing pelabuhan di Provinsi Papua pada tahun 2022 dan 2023. pada tahun 2023, pelabuhan Serui mendapatkan kunjungan kapal terbanyak yaitu 1.159 unit dengan jumlah muatan sebanyak 284.114 Ton/M3. Jika dilihat dari jumlah arus keluar dan masuk barang, maka pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan dengan jumlah muatan terbanyak pada tahun 2023 yaitu 1,978.185,45 Ton/M3. Sedangkan pelabuhan Sarmi mendapatkan kunjungan kapal paling sedikit yaitu 191 unit kapal dengan jumlah muatan 166.387GT. Namun jika dilihat dari jumlah arus barang bongkar muat, maka pelabuhan Jayapura merupakan pelabuhan dengan jumlah bongkar terbanyak sebesar 138.221,46 Ton/M3.

### 2.3.2.9.3 Transportasi Udara

Transportasi udara menjadi salah satu transportasi pilihan untuk perjalanan di dalam pulau maupun keluar Provinsi Papua. Salah satu mode yang digunakan pada transportasi udara di Provinsi Papua adalah pesawat. Uraian terkait transportasi udara di Provinsi Papua dapat dilihat dari jumlah kedatangan dan keberangkatan baik pesawat maupun penumpang. Terdapat tiga bandara yang beroperasi di Provinsi Papua di antaranya yaitu Bandar Udara Sentani (Kabupaten Jayapura), Frans Kaisiepo (Kabupaten Baik Numfor), dan Stevanus Rumbewas (Kabupaten Kep. Yapen).

**Tabel II.72 Jumlah Pesawat dan Penumpang pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2021-2023**

| Bandar Udara              | Tahun/<br>Domestik/<br>Internasional | Pesawat |        |       |        | Penumpang |         |         |           |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
|                           |                                      | Datang  | Pergi  | Lokal | Jumlah | Datang    | Pergi   | Transit | Jumlah    |
| Sentani<br>Jayapura       | 2021                                 | 21,039  | 20,844 | -     | 41,883 | 61,358    | 69,716  | -       | 131,074   |
|                           | 2022                                 | 21,959  | 22,990 | 104   | 45,053 | 669,939   | 627,589 | 116,346 | 1,413,874 |
|                           | 2023                                 |         |        |       |        |           |         |         |           |
|                           | Domestik                             | 22,262  | 23,326 | 357   | 45,945 | 861,588   | 725,439 | 147,311 | 1,734,338 |
|                           | Internasional                        | 25      | 16     | -     | 41     | 233       | 55      | 3       | 291       |
| Frans<br>Kaiseipo<br>Biak | 2021                                 | 1863    | 1862   | -     | 3,725  | 61,213    | 69,715  | -       | 130,928   |
|                           | 2022                                 | 5,542   | 5,547  | 1,231 | 12,320 | 139,044   | 143,284 | 104,410 | 386,738   |
|                           | 2023                                 |         |        |       |        |           |         |         |           |
|                           | Domestik                             | 1,649   | 1,653  | 6     | 3,308  | 108,472   | 110,187 | 78,673  | 297,332   |
|                           | Internasional                        | 25      | 21     | -     | 46     | 122       | 128     | 7       | 257       |

| Bandar Udara      | Tahun/<br>Domestik/<br>Internasional | Pesawat |       |       |        | Penumpang |       |         |        |
|-------------------|--------------------------------------|---------|-------|-------|--------|-----------|-------|---------|--------|
|                   |                                      | Datang  | Pergi | Lokal | Jumlah | Datang    | Pergi | Transit | Jumlah |
| Stevanus Rumbewas | 2021                                 | 244     | 244   | -     | 488    | 7,210     | 7,356 | -       | 14,566 |
|                   | 2022                                 | -       | -     | -     | -      | -         | -     | -       | -      |
|                   | 2023                                 | -       | -     | -     | -      | -         | -     | -       | -      |

Sumber: Dinas Perhubungan, Provinsi Papua Tahun 2024

Pada Tabel II.72, dapat dilihat Bandara Sentani (Jayapura) menjadi bandara dengan jumlah keberangkatan/kedatangan pesawat dan penumpang domestik tertinggi pada tahun 2023, masing-masingnya 45.945 unit dan 1.734.338 orang. Sedangkan Bandara Frans Kaiseipo (Biak Numfor) pada tahun 2023 memiliki keberangkatan/kedatangan pesawat dan penumpang masing-masing sebanyak 3.308 unit dan 297.332 penumpang. Adapun Bandara Stevanus Rumbewas (Kepulauan Yapen) memiliki total keberangkatan/kedatangan pesawat dan penumpang paling rendah yaitu 488 unit dan 14.566 orang pada tahun 2021. Selain penumpang domestik, bandara Sentani dan Frans Kaiseipo juga melayani penumpang internasional, dimana pada tahun 2023 dapat dilihat jumlah penumpang kedatangan/keberangkatan dan transit terbanyak berada di Sentani yaitu 291 orang.

**Tabel II.73 Jumlah Muatan Barang (Kargo) pada Bandar Udara di Provinsi Papua Tahun 2022-2023**

| Bandar Udara               | Kargo (Ton) |             |         |             |
|----------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|
|                            | Bongkar     | Muat        | Transit | Jumlah      |
| <b>Sentani Jayapura</b>    |             |             |         |             |
| 2021                       | -           | -           | -       | -           |
| 2022                       | 9,263,208   | 116,270,396 | -       | 125,533,604 |
| 2023                       |             |             |         |             |
| Domestik                   | 9,799,863   | 122,490,371 | 112,216 | 132,402,450 |
| Internasional              | -           | 19,691      | -       | 19,691      |
| <b>Frans Kaiseipo Biak</b> |             |             |         |             |
| 2021                       |             |             |         |             |
| 2022                       | 753,738     | 522,092     | 978,001 | 2,253,831   |
| 2023                       |             |             |         |             |
| Domestik                   | 456,471     | 344,600     | 289,879 | 1,090,950   |
| Internasional              | -           | -           | -       | -           |
| <b>Stevanus Rumbewas</b>   |             |             |         |             |
| 2021                       | -           | -           | -       | -           |
| 2022                       | -           | -           | -       | -           |
| 2023                       | -           | -           | -       | -           |

Sumber: Dinas Perhubungan, Provinsi Papua Tahun 2024

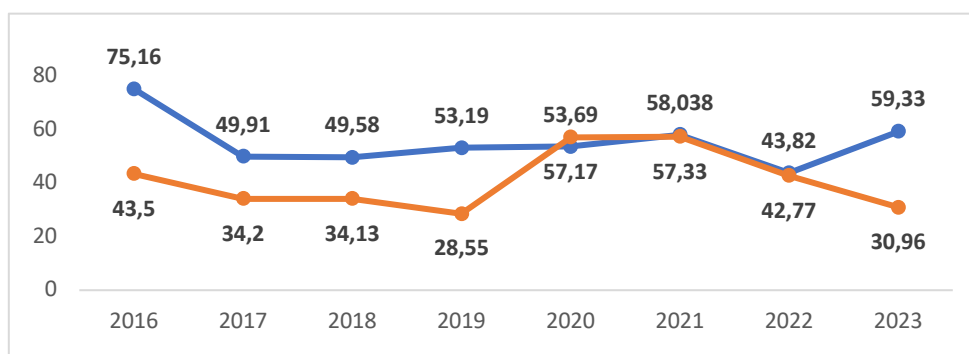
Selain penumpang, pesawat juga membawa barang (kargo) yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tabel di atas dapat dilihat, bandara Sentani merupakan bandara dengan jumlah kargo terbanyak pada tahun 2023 yaitu 132.402.450 Ton. Sedangkan bandar udara Frans Kaiseipo di Biak Numfor, jumlah kargo pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 48,4% sebesar 1.090.950 Ton. Selain kargo domestik, pada bandar udara Sentani juga melayani kargo internasional, dimana pada tahun 2023 terdapat 19,691 Ton barang yang dikirim ke luar negeri.



#### 2.3.2.9.4 Konektivitas

Konektivitas di Provinsi Papua juga dapat dilihat dari keterhubungan aksesibilitas berupa jalan daerah. Jalan daerah merupakan jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang didalamnya berisikan kemantapan jalan baik secara provinsi maupun kabupaten dan kota. Jalan daerah dalam kondisi mantap artinya jalan daerah dalam kondisi baik dan sedang. Persentase kemantapan jalan provinsi maupun kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

**Gambar II.57 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap di Provinsi Papua Tahun 2016-2023**



Sumber : Jalan Provinsi (kecuali DKI Jakarta) : Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (SiPDJD)

#### 2.3.2.10 Penanaman Modal

Penanaman modal di Provinsi Papua dilihat dari realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri dan Dalam Negeri. Adapun jumlah investor di Provinsi Papua pada tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019 jumlah proyek mencapai 127 unit dan di tahun 2023 menurun mencapai 73 unit. Realisasi investasi penanaman modal luar negeri di Provinsi Papua juga mengalami penurunan menjadi 8,3 juta US\$ pada tahun 2023. Jumlah proyek dan realisasi investasi pada tahun 2019-2023.

**Tabel II.74 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Juta US\$)**

| Uraian    | Proyek (Unit) |        |        |        |        | Investasi (Juta US\$) |          |          |         |          |
|-----------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|----------|----------|---------|----------|
|           | 2019          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2019                  | 2020     | 2021     | 2022    | 2023     |
| Papua     | 127           | 184    | 95     | 86     | 73     | 941                   | 567,7    | 1.489,1  | 1.260,5 | 8,3      |
| Indonesia | 30.354        | 36.726 | 27.271 | 32.681 | 70.898 | 28.208,8              | 28.666,3 | 31.093,1 | 45.605  | 50.267,5 |

Sumber: BPS RI, 2024

Jumlah proyek pada penanaman modal dalam negeri cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019 hingga 2023 dengan proyek pada tahun 2019 sebanyak 68 unit dan 2023 sebanyak 971 unit. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Jumlah proyek dan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri pada tahun 2023 mencapai 971 unit dengan realisasi investasi sebesar 1.174,1 miliar rupiah.

**Tabel II.55 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri  
Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (Unit) (Miliar Rupiah)**

| Uraian    | Proyek (Unit) |        |         |         |         | Investasi (Miliar Rupiah) |           |           |         |           |
|-----------|---------------|--------|---------|---------|---------|---------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|           | 2019          | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2019                      | 2020      | 2021      | 2022    | 2023      |
| Papua     | 68            | 323    | 473     | 754     | 971     | 567,7                     | 2.722,2   | 911       | 1.311,8 | 1.174,1   |
| Indonesia | 30.451        | 96.623 | 106.002 | 124.582 | 266.722 | 386.498,4                 | 413.535,5 | 447.063,6 | 552.769 | 674.923,4 |

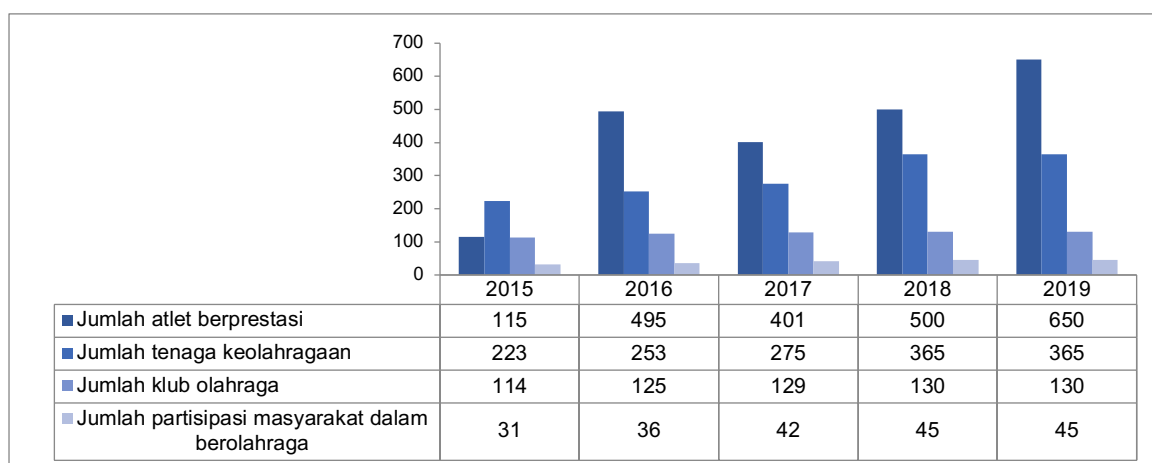
*Sumber: BPS RI, 2024*

### 2.3.2.1.1 Kepemudaan dan Olahraga

#### a. Organisasi Keolahragaan

Organisasi keolahragaan menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin mengembangkan minatnya pada bidang olahraga. Provinsi Papua mengalami kenaikan klub olahraga dikarenakan semakin banyaknya kegiatan olahraga dari berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga nasional. Pemberdayaan organisasi keolahragaan dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga di Provinsi Papua.

**Gambar II.69 Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2015-2019**



*Sumber: Bapperida Provinsi Papua, 2021*

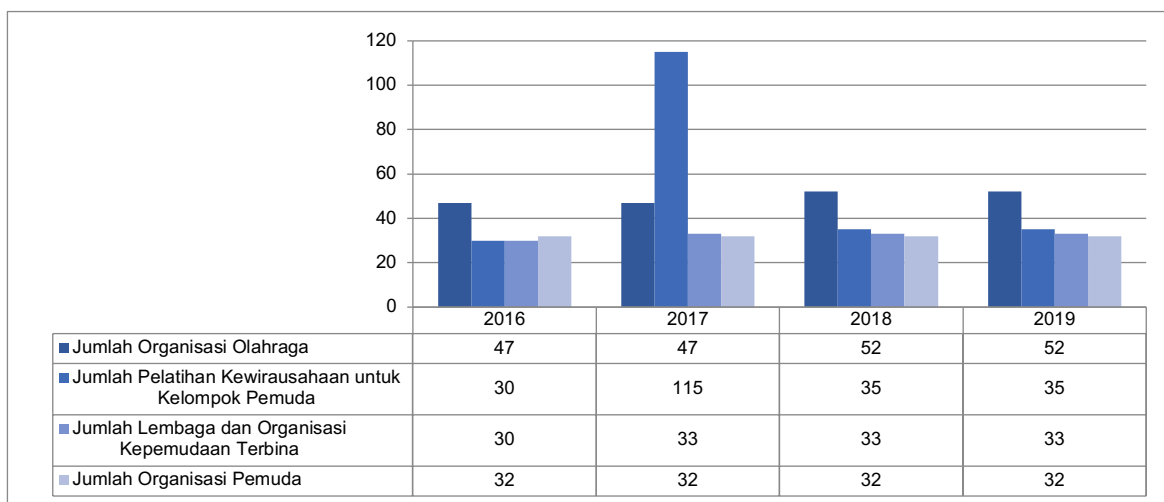
Diketahui bahwa, jumlah partisipasi masyarakat dalam berolahraga semakin meningkat dari tahun 2015-2019 begitu juga dengan jumlah atlet berprestasi, klub olahraga, dan jumlah tenaga keolahragaan. Banyaknya klub olahraga juga diikuti dengan meningkatnya jumlah atlet-atlet berprestasi di tingkat kabupaten hingga internasional dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan jumlah tersebut, organisasi keolahragaan di Provinsi Papua semakin mengalami peningkatan dalam mendukung bidang olahraga.

#### b. Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu bentuk atau wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan diri. Terdapat empat indikator bagi pemberdayaan pemuda di Provinsi Papua pada tahun 2016-2019, di antaranya adalah organisasi olahraga, lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, organisasi pemuda, dan pelatihan kewirausahaan

untuk Kelompok Pemuda. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah unit yang ada. Jumlah unit organisasi olahraga di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, diikuti dengan jumlah unit lembaga dan organisasi kepemudaan terbina, dan jumlah organisasi pemuda. Satu indikator yang mengalami penurunan ditinjau dari unit adalah jumlah pelatihan kewirausahaan untuk kelompok pemuda. Keempat indikator tersebut beserta jumlah unit pada tahun 2016-2019.

**Gambar II.70 Jumlah Organisasi Pemberdayaan Pemuda di Provinsi Papua Tahun 2016-2019 (Unit)**



Sumber: Bapperida Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Kepemudaan di Provinsi Papua juga ditinjau berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Papua semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dari 49,83 menjadi 52,00. Penyumbang kenaikan pada angka IPP bersumber dari domain kesehatan dari 67,50 menjadi 75,00 dan domain partisipasi kepemimpinan dari 46,67 menjadi 53,33.

**Tabel II.75 Perkembangan Nilai IPP dan Domain Penyusun IPP Provinsi Papua dan Indonesia**

| WILAYAH   | INDIKATOR                              |                                      | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PAPUA     | <b>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</b> |                                      | <b>49.83</b> | <b>50.17</b> | <b>52.00</b> |
|           | a.                                     | Domain Pendidikan                    | 56.67        | 56.67        | 56.67        |
|           | b.                                     | Domain Kesehatan dan Kesejahteraan   | 67.50        | 67.50        | 75.00        |
|           | c.                                     | Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja | 45.00        | 50.00        | 45.00        |
|           | d.                                     | Domain Partisipasi dan Kepemimpinan  | 46.67        | 46.67        | 53.33        |
|           | e.                                     | Domain Gender dan Diskriminasi       | 33.33        | 30.00        | 30.00        |
| INDONESIA | <b>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</b> |                                      | <b>52.67</b> | <b>51.00</b> | <b>53.33</b> |
|           | a.                                     | Domain Pendidikan                    | 70.02        | 70.01        | 70.00        |
|           | b.                                     | Domain Kesehatan dan Kesejahteraan   | 55.00        | 55.00        | 60.00        |
|           | c.                                     | Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja | 45.00        | 40.00        | 40.00        |
|           | d.                                     | Domain Partisipasi dan Kepemimpinan  | 46.66        | 46.67        | 43.33        |
|           | e.                                     | Domain Gender dan Diskriminasi       | 46.67        | 43.33        | 53.33        |

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam dokumen Indeks Pembangunan Pemuda 2022

### c. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga merupakan fasilitas fisik untuk menunjang kebutuhan dalam berolahraga. Provinsi Papua memiliki sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang penduduk melakukan kegiatan olahraga. Berdasarkan Tabel II.76, diketahui bahwa terdapat sejumlah fasilitas penunjang berbagai jenis olahraga yang ada di Provinsi Papua ditinjau dari kampung/kelurahan. Pada tahun 2021, fasilitas olahraga terbanyak pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua adalah fasilitas sepak bola dan bola voli.

**Tabel II.76 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas Lapangan Olahraga di Provinsi Papua Tahun 2021**

| No | Kabupaten       | Sepak Bola | Bola Voli | Bulu Tangkis | Bola Basket | Tenis Lapangan | Tenis Meja | Futsal | Renang | Bela Diri | Bilyard | Lainnya |
|----|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|----------------|------------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| 1  | Jayapura        | 74         | 120       | 29           | 16          | 4              | 15         | 26     | 4      | 7         | 7       | 2       |
| 2  | Kepulauan Yapen | 36         | 61        | 3            | 1           | 1              | 2          | 4      | 1      | 2         | 3       | 1       |
| 3  | Biak Numfor     | 116        | 192       | 7            | 3           | 4              | 4          | 9      | 1      | 2         | 3       | 0       |
| 4  | Sarmi           | 36         | 53        | 4            | 1           | 1              | 1          | 8      | 0      | 3         | 1       | 0       |
| 5  | Keerom          | 34         | 76        | 18           | 4           | 0              | 12         | 7      | 1      | 14        | 3       | 0       |
| 6  | Waropen         | 10         | 28        | 2            | 1           | 0              | 3          | 3      | 0      | 1         | 0       | 0       |
| 7  | Supiori         | 17         | 37        | 2            | 2           | 0              | 2          | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       |
| 8  | Mamberamo Raya  | 34         | 47        | 1            | 0           | 0              | 0          | 0      | 0      | 0         | 0       | 0       |
| 9  | Kota Jayapura   | 23         | 30        | 15           | 14          | 11             | 5          | 14     | 5      | 11        | 5       | 1       |

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

### 2.3.2.12 Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar untuk statistik sebelumnya dilaksanakan melalui Pusat Data dan Analisa Pembangunan Daerah, dengan melaksanakan kegiatan Penyusunan sampai Penyebarluasan Data informasi Pembangunan. Dalam hal ini Pusat Data dan Analisa – Bapperida Provinsi Papua melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan telah menyusun output dokumen pada table berikut.

| No | Dokumen                              | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Analisis Kerangka Pembangunan Daerah | ada  | ada  | ada  | ada  | ada  |

### 2.3.2.13 Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu

Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

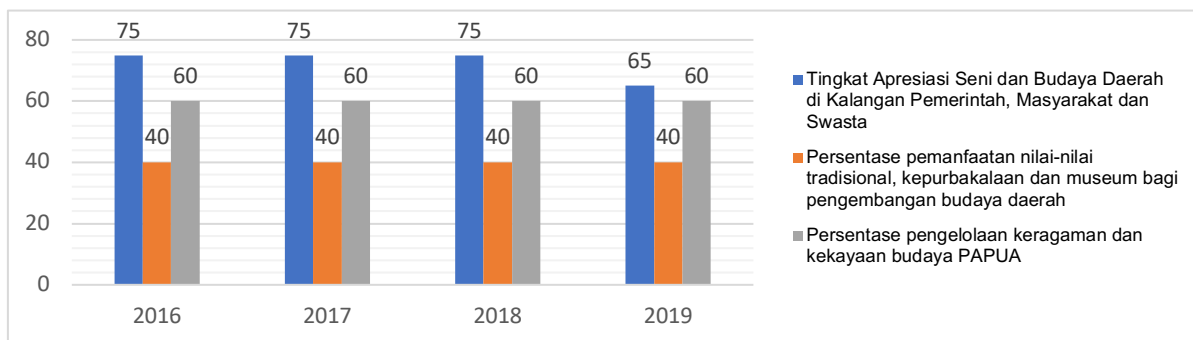
Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik. Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua.

**Tabel II.77 Perkembangan Warisan Tak Benda Papua**

| Tahun | No  | Karya Budaya | Kategori                                                     |
|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 2013  | 67  | Yosim Pancar | Seni Pertunjukan                                             |
|       | 68  | Ukiran Asmat | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
|       | 69  | Barappen     | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan                 |
|       | 70  | Tifa         | Seni Pertunjukan                                             |
|       | 77  | Noken        | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
| 2015  | 119 | Papeda       | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
|       | 120 | Tomako Batu  | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
|       | 121 | Koteka       | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
| 2016  | 141 | Wor Biak     | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan                 |
|       | 142 | Elha         | Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta |
|       | 143 | Aker         | Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta |
|       | 144 | Honai        | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
|       | 145 | Khombow      | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
|       | 146 | Terfo        | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |
| 2017  | 142 | Ndambu       | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan                 |
|       | 143 | Yu           | Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan                 |
|       | 144 | Pokem        | Kemahiran dan Kerajinan Tradisional                          |

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018' (Catatan : Belum dipisah 29 Kab/Kota)

**Gambar II.71 Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019**



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua

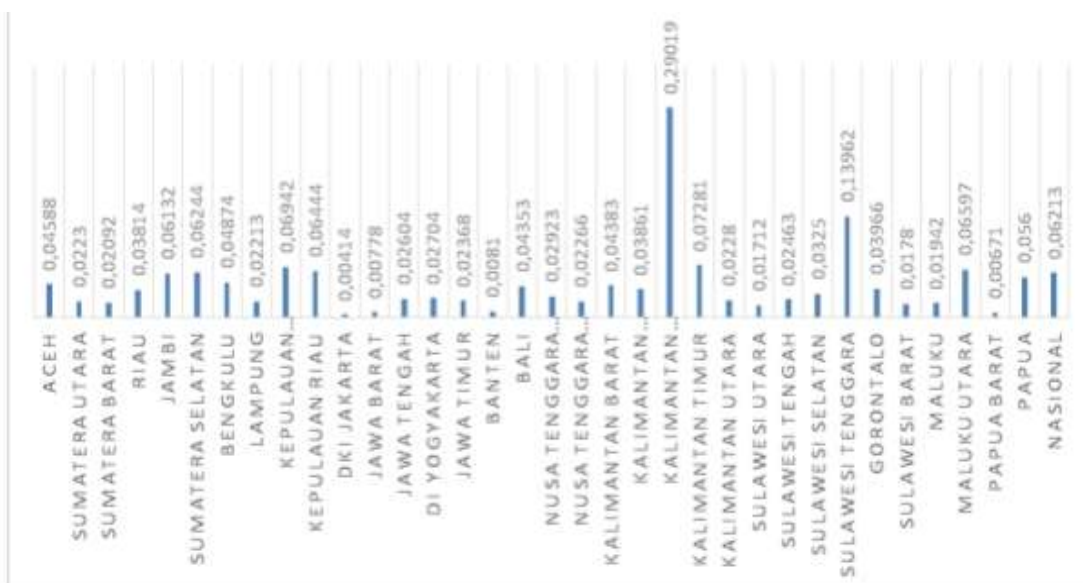
Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken.

Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya Tercatat pada tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

#### 2.3.2.14 Perpustakaan

Perpustakaan di Provinsi Papua dapat dilihat dari ketercukupan jumlah koleksi. Jumlah koleksi dapat dikatakan mencukupi jika setiap satu orang penduduk membaca dua koleksi berdasarkan ketentuan IFLA/UNESCO. Secara nasional, rasio ketercukupan jumlah koleksi masih belum mencukupi ketentuan IFLA/UNESCO. Berdasarkan data rasio jumlah koleksi koleksi dari IFLA/UNESCO, Provinsi Papua memiliki rasio sebesar 0,056.

**Gambar II.72 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori Dari IFLA/UNESCO pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional**

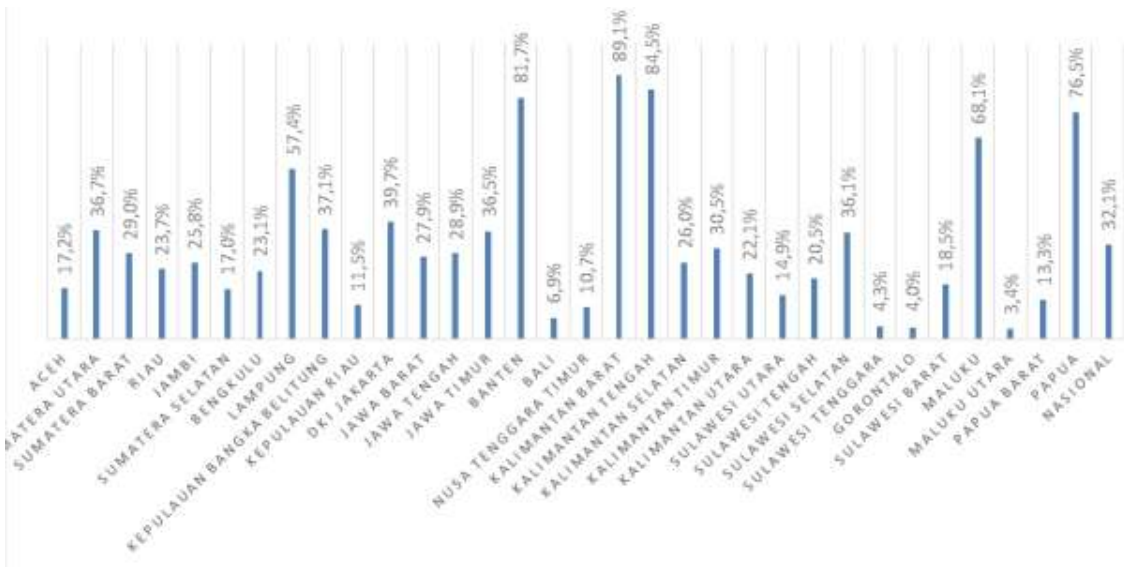


Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan data rasio ketercukupan dengan penilaian IFLA/UNESCO pada Gambar II.61, diketahui bahwa seluruh provinsi di Indonesia masih belum memenuhi ketercukupan jumlah koleksi memenuhi ketercukupan jumlah koleksi. Meski begitu, secara persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam terhadap keseluruhan koleksi buku, Provinsi Papua menjadi salah satu provinsi dengan persentase tertinggi setelah Provinsi Banten. Persentase tersebut ditunjukkan pada Gambar II.62.

**Gambar II.73 Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam Terhadap Keseluruhan Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional**



Sumber: Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data perpustnas dalam website pendataan perpustakaan berbasis wilayah, jumlah perpustakaan di Provinsi Papua mencapai 1077 unit yang meliputi perpustakaan sekolah sebanyak 918 unit, umum sebanyak 81 unit, perguruan tinggi sebanyak 48 unit, dan khusus sebanyak 30 unit. Jumlah perpustakaan ditunjukkan pada Gambar II.74.

**Gambar II.74 Sebaran Perpustakaan Dalam Peta Secara Nasional**

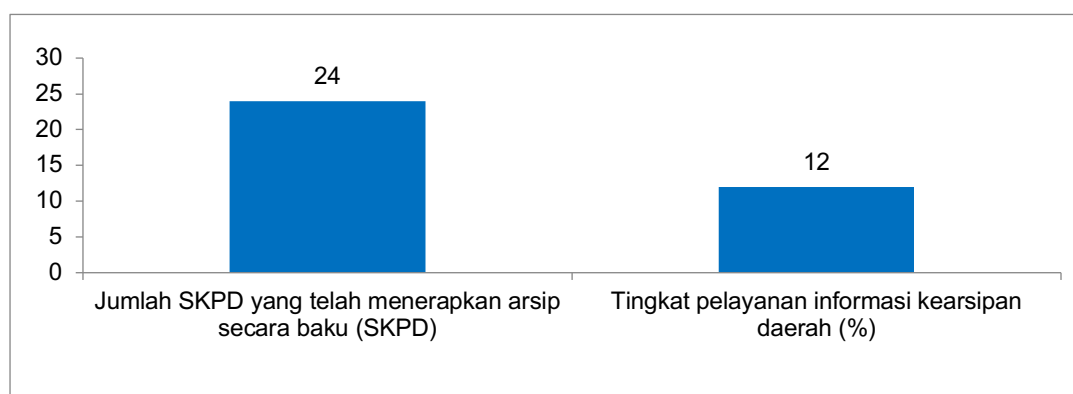


Sumber: data.perpusnas.go.id

### 2.3.2.15 Kearsipan

Urusan kearsipan di Provinsi Papua meliputi berbagai kegiatan di dalamnya meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam arsip nasional. Pengelolaan arsip didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, dan lainnya. Tenaga arsip dalam mengelola kearsipan merupakan tenaga arsip dari Perangkat Daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku dan telah mengikuti berbagai pembekalan terkait kearsipan. Perangkat Daerah di Provinsi Papua yang telah menerapkan arsip buku secara baku baru berjumlah 24 PD, sehingga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa PD yang belum menerapkan arsip secara baku.

**Gambar II.75 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016**



Sumber: Bapperida Provinsi Papua, 2021

## 2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

### 2.3.3.1 Pariwisata

Data menunjukkan bahwa wilayah seperti Jayapura, Kota Jayapura, dan Biak Numfor secara konsisten memiliki kapasitas akomodasi terbesar jika dibandingkan dengan wilayah lain di Papua, baik dari sisi jumlah hotel, jumlah kamar, maupun jumlah tempat tidur. Secara umum, dari tahun ke tahun terdapat kecenderungan peningkatan jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur di sebagian besar wilayah, meskipun di beberapa daerah fluktuasi dapat terjadi, misalnya penurunan sementara yang dapat berasal dari penutupan, renovasi, atau pendataan ulang unit usaha.

**Tabel II.78 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur di Hotel pada Provinsi Papua**

| Kabupaten/Kota | 2019      |       |              | 2020      |       |              | 2021      |       |              | 2022      |       |              | 2023      |       |              | 2024      |       |              |
|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|
|                | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur |
| Jayapura       | 25        | 855   | 1.167        | 25        | 712   | 1.163        | 26        | 948   | 1.293        | 28        | 1.086 |              | 27        | 1.133 | 623          | 26        | 886   | 1.283        |
| Kep. Yapen     | 9         | 224   | 312          | 9         | 234   | 316          | 9         | 219   | 316          | 11        | 221   |              | 6         | 168   | 189          | 5         | 168   | 215          |
| Biak Numfor    | 17        | 417   | 624          | 17        | 435   | 651          | 10        | 267   | 376          | 17        | 501   |              | 19        | 501   | 488          | 17        | 550   | 863          |
| Sarmi          | 7         | 65    | 100          | 7         | 64    | 98           | 7         | 64    | 96           | 8         | 69    |              | 9         | 89    | 150          | 10        | 102   | 164          |

| Kabupaten/Kota | 2019       |              |              | 2020      |              |              | 2021       |              |              | 2022       |              |              | 2023       |              |              | 2024       |              |              |
|----------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                | Akomodasi  | Kamar        | Tempat Tidur | Akomodasi | Kamar        | Tempat Tidur | Akomodasi  | Kamar        | Tempat Tidur | Akomodasi  | Kamar        | Tempat Tidur | Akomodasi  | Kamar        | Tempat Tidur | Akomodasi  | Kamar        | Tempat Tidur |
| Keerom         |            |              |              |           |              |              | 2          | 72           | 132          | 1          | 34           |              | 1          | 34           | 59           | 1          | 34           | 50           |
| Waropen        | 2          | 47           | 89           | 2         | 60           | 105          | 2          | 60           | 105          | 2          | 60           |              | 2          | 60           | 115          | 1          | 37           | 74           |
| Supiori        | 2          | 19           | 23           | 2         | 20           | 39           | 2          | 19           | 36           | 2          | 16           |              | 3          | 24           | 46           | 2          | 33           | 60           |
| Mamb. Raya     | 1          | 6            | 6            | 1         | 26           | 8            | 1          | 6            | 7            | 2          | 19           |              | 1          | 12           | 24           | 1          | 10           | 10           |
| Kota Jayapura  | 66         | 2.533        | 3.772        | 35        | 1.574        | 2.308        | 63         | 2.797        | 6.090        | 69         | 3.176        |              | 63         | 3.138        | 1.464        | 77         | 3.150        | 4.229        |
| <b>Papua</b>   | <b>129</b> | <b>4.166</b> | <b>6.093</b> | <b>98</b> | <b>3.125</b> | <b>4.688</b> | <b>122</b> | <b>4.452</b> | <b>8.451</b> | <b>140</b> | <b>5.182</b> | <b>0</b>     | <b>131</b> | <b>5.159</b> | <b>3.158</b> | <b>140</b> | <b>4.970</b> | <b>6.948</b> |

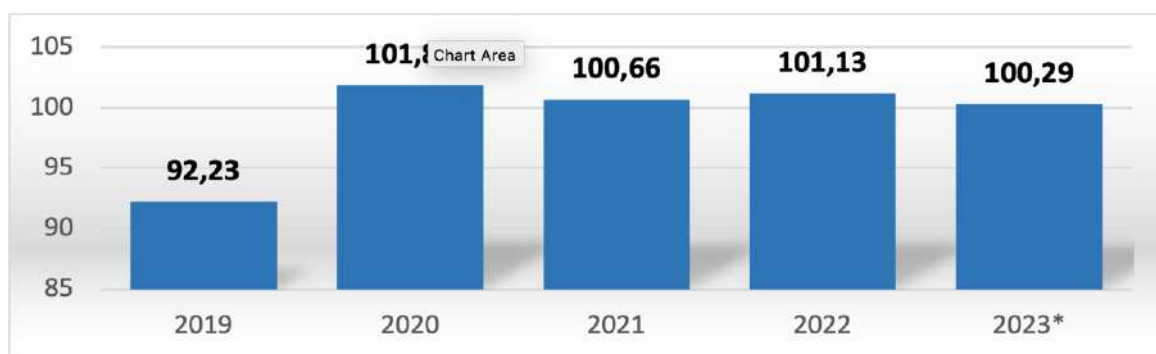
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Pada tingkat provinsi, agregasi seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, total jumlah unit akomodasi untuk Papua adalah 129, dengan 4.166 kamar dan 6.093 tempat tidur. Pada tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi 140 unit akomodasi, 4.970 kamar, dan 6.948 tempat tidur. Artinya, secara keseluruhan terdapat pertumbuhan kapasitas akomodasi di Papua selama lima tahun terakhir. Daerah dengan data kosong pada tabel menandakan tidak adanya hotel atau pendataan yang belum masuk pada tahun tersebut untuk daerah tersebut.

### 2.3.3.2 Pertanian

NTP (Nilai Tukar Pertani) di Provinsi Papua sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat, tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani dan barang serta jasa yang dikonsumsi petani. Pada tahun 2023 NTP di Provinsi Papua turun sebesar 100,29, penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani sebesar 0,07 persen berubah lebih lambat dari pada perubahan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,40 persen.

Gambar II.76 Nilai Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2016-2021

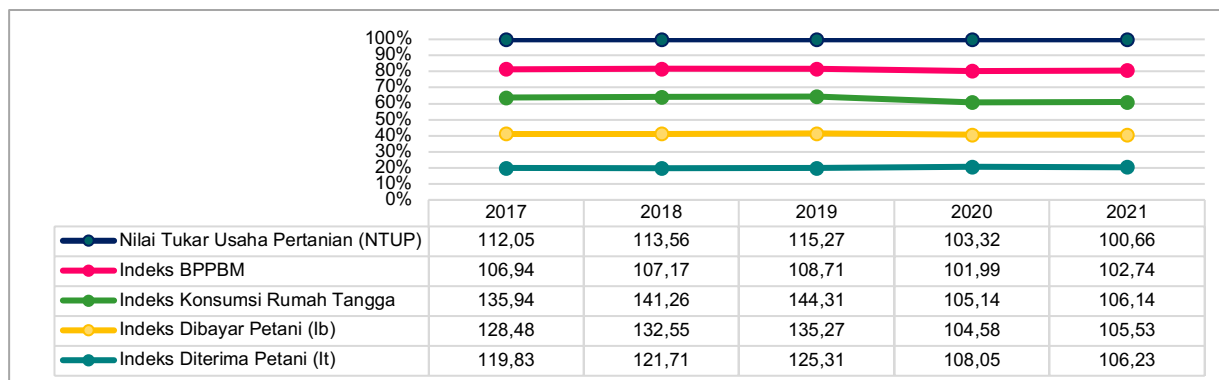


Sumber: BPS Papua 2019-2023\* (data diolah)

Mulai tahun 2018-2020 terindikasi harga produksinya lebih rendah dibandingkan kenaikan harga konsumsinya sehingga pendapatan petani mengalami penurunan lebih jauh dari pengeluarannya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan para petani semakin berkurang dibandingkan tingkat kesejahteraan sebelumnya. Selanjutnya, apabila dilihat berdasarkan masing-masing komponen pembentuk NTP Papua, terlihat seluruh komponen mengalami

trend negatif. Meskipun demikian capaian komponen nilai tukar petani berada pada angka rata-rata diatas 100 persen. Sehingga hal tersebut memiliki dampak yang baik dalam peningkatan kesejahteraan petani di Papua.

**Gambar II.77 Komponen Tukar Petani Provinsi Papua Tahun 2017-2021**



Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

Produksi komoditas tahun 2023 di Provinsi Papua paling tinggi yaitu Produksi Ubi Kayu dengan total produksi sebesar 153,94 ribu ton dan produksi ubi kayu menurut Kabupaten/Kota paling tinggi adalah Kabupaten Keerom dengan total produksi sebesar 36,77 ribu ton. Produksi komoditas ubi Kayu dan ubi jalar merupakan komoditi paling tinggi karena komoditi tersebut merupakan komoditas unggulan lokal di Provinsi Papua.

**Tabel II.79 Produksi Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

| Kabupaten/Kota |                | Padi (Ton) | Jagung (Ton) | Kedelai (Ton) | Kacang Hijau (Ton) | Ubi Jalar (Ton) | Ubi Kayu (Ton) |
|----------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 1              | Jayapura       | 2,430      | 3,617.7      | 23.0          | 10.5               | 12,431.5        | 11,341.41      |
| 2              | Yapen          | 38         | 2,233.5      | 25.2          | 12.0               | 13,623.0        | 23,847.03      |
| 3              | Biak Numfor    |            | 3,633.5      | 6.8           | 257.3              | 20,809.3        | 21,284.74      |
| 4              | Sarmi          | 4,141      | 7,512.0      | 593.5         | 403.8              | 7,738.6         | 18,861.23      |
| 5              | Keerom         | 376        | 19,354.5     | 321.3         | 115.5              | 11,961.5        | 36,776.70      |
| 6              | Waropen        | 931        | 2,573.7      | 68.0          | 70.5               | 8,744.4         | 11,976.20      |
| 7              | Supiori        | 94         | 855.6        | 8.5           | 85.5               | 3,630.8         | 7,568.65       |
| 8              | Mamberamo Raya | 47         | 614.1        |               | 27.0               | 7,273.3         | 12,156.10      |
| 9              | Kota Jayapura  | 2,195      | 4,086.9      | 11.9          | 32.0               | 6,410.8         | 10,136.08      |
| Provinsi Papua |                | 10,252.00  | 44,481.50    | 1,058.20      | 1,014.10           | 92,623.20       | 153,948.14     |

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua, 2023

### 2.3.3.3 Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai produksi tercatat sesuai data BPS diantaranya adalah hasil perikanan tangkap di laut dan juga perikanan umum di daratan. Dari wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak memiliki hasil produksi perikanan tangkap di laut,

sedangkan wilayah dengan hasil yang lengkap adalah di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen. Produksi hasil perikanan tangkap di laut Provinsi Papua tahun 2021 ada sebanyak 126.675 ton.

**Tabel II.80 Produksi Komoditas Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

| Kabupaten/Kota |                | Perikanan tangkap di laut |                      | Perikanan perairan umum daratan |                      |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|                |                | Volume (Ton)              | Nilai/value (000 Rp) | Volume (Ton)                    | Nilai/value (000 Rp) |
| 1              | Jayapura       | 19.015                    | 690.399.360          | 741                             | 6.704.392            |
| 2              | Yapen          | 6.165                     | 193.500.017          | -                               | -                    |
| 3              | Biak Numfor    | 41.124                    | 1.474.923.137        | -                               | -                    |
| 4              | Sarmi          | 16.396                    | 489.494.238          | -                               | -                    |
| 5              | Keerom         | -                         | -                    | -                               | -                    |
| 6              | Waropen        | 831                       | 21.100.857           | 511                             | 4.602.888            |
| 7              | Supriori       | 1.889                     | 54.290.770           | -                               | -                    |
| 8              | Mamberamo Raya | -                         | -                    | -                               | -                    |
| 9              | Kota Jayapura  | 41.255                    | 1.496.675.020        | -                               | -                    |
| Provinsi Papua |                | 126.675                   | 4.420.383.399        | 1.252                           | 11.307.280           |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

#### 2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi terutama fasilitas kelistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karena kebutuhan listrik tidak hanya bersumber dari rumah tangga, tetapi juga kebutuhan instansi pemerintah, perkantoran dan industri. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, maka pembangunan sarana dan prasarana energi juga menjadi kebutuhan vital dan mendesak di Papua. Tabel II.81 menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan di Papua. Berdasarkan Tabel II.62 diketahui bahwa rata-rata rumah tangga yang telah memiliki sumber penerangan listrik di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua sebanyak 74,04%. Dalam hal ini, daerah yang perlu diprioritaskan dalam percepatan akses listrik di Provinsi Papua adalah Kabupaten Mamberamo Raya dan Supiori.

**Tabel II.81 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan**

| No | Kabupaten/Kota  | Listrik PLN | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik | Jumlah |
|----|-----------------|-------------|-----------------|---------------|--------|
| 1  | Jayapura        | 91,47       | 3,25            | 5,28          | 100,00 |
| 2  | Kepulauan Yapen | 70,95       | 12,20           | 16,85         | 100,00 |
| 3  | Biak Numfor     | 99,79       | 0,20            | 0,01          | 100,00 |
| 4  | Sarmi           | 87,91       | 7,83            | 4,27          | 100,00 |
| 5  | Keerom          | 82,82       | 6,27            | 10,91         | 100,00 |
| 6  | Waropen         | 63,35       | 26,12           | 10,54         | 100,00 |
| 7  | Supiori         | 66,14       | 7,18            | 26,68         | 100,00 |
| 8  | Mamberamo Raya  | 4,46        | 86,46           | 9,08          | 100,00 |

| No                                          | Kabupaten/Kota | Listrik PLN  | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik | Jumlah        |
|---------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|
| 9                                           | Kota Jayapura  | 99,45        | 0,18            | 0,37          | 100,00        |
| <b>Provinsi Papua (*rata-rata kab/kota)</b> |                | <b>74,04</b> | <b>16,63</b>    | <b>9,33</b>   | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel II.82 menunjukkan produksi listrik menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2022. Berdasarkan Tabel II.82 diketahui bahwa daya listrik terpasang di Provinsi Papua adalah 271.635 KW dengan produksi listrik sebesar 693.684.781 KWh, listrik terjual sebesar 614.472.107 KWh, dipakai sendiri sebesar 8.903.206 KWh, susut/hilang sebesar 70.309.468 KWh.

**Tabel II.82 Produksi Listrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (kWh)**

| Kabupaten/Kota        | Daya terpasang | Produksi listrik   | Listrik terjual    | Dipakai sendiri  | Susut hilang      |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 1 Jayapura            | 32.876         | 114.740.369        | 104.309.426        | -                | 10.430.943        |
| 2 Yapen               | 1.400          | 34.819.284         | 28.826.054         | 2.015            | 5.991.215         |
| 3 Biak Numfor         | 49.892         | 79.862.556         | 71.349.975         | 995.682          | 7.516.899         |
| 4 Sarmi               | 4.890          | 12.730.661         | 11.366.662         | -                | 1.363.999         |
| 5 Keerom              | 306            | 24.068.325         | 22.121.622         | -                | 1.946.703         |
| 6 Waropen             | 1.172          | 8.206.725          | 7.147.972          | -                | 1.058.753         |
| 7 Supriori            | -              | 10.068.731         | 8.832.220          | -                | 1.236.511         |
| 8 Mamberamo Raya      | -              | -                  | -                  | -                | -                 |
| 9 Kota Jayapura       | 181.099        | 409.188.130        | 360.518.176        | 7.905.509        | 40.764.445        |
| <b>Provinsi Papua</b> | <b>271.635</b> | <b>693.684.781</b> | <b>614.472.107</b> | <b>8.903.206</b> | <b>70.309.468</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

### 2.3.3.5 Perdagangan

Provinsi Papua melakukan ekspor bijih tembaga dan konsentrat (HS26) dengan volume ekspor mencapai 1.728.475.100 ton atau sekitar 90,99 persen dari total volume ekspor provinsi Papua pada tahun 2021. Total volume ekspor Provinsi Papua sendiri adalah sekitar 1.899.612.101 ton di tahun tersebut. Negara penerima ekspor terbesar dari Papua adalah Negara Jepang, dengan nilai ekspor ke negara tersebut sekitar US\$ 1.366.460.621. Selain Jepang, dua negara lain yang menjadi penerima ekspor terbesar Papua adalah negara Asia lainnya dan Korea Selatan dengan nilai ekspor masing-masing mencapai US\$ 648.696.536 dan US\$ 637.536.734. Perkembangan impor di Provinsi Papua cukup fluktuatif, dengan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dalam satu tahun terakhir. Nilai impor Papua mengalami peningkatan dari US\$ 191.719.492 di tahun 2020 menjadi US\$ 272.239.487 di tahun 2021.



### 2.3.3.6 Perindustrian

Perusahaan industri besar dan sedang di Papua tahun 2020 tersebar di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kabupaten Jayapura (7 industri), Kota Jayapura (10 industri), Kepulauan Yapen (1 industri) dan Biak Numfor (3 industri). Perusahaan industri besar dan sedang mampu menyerap tenaga kerja di Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 1165 tenaga kerja. Adapun lokasi dengan penyerapan tenaga kerja industri besar dan sedang tertinggi terdapat di Kabupaten Biak Numfor (452 tenaga kerja) dan Kota Jayapura (386 tenaga kerja).

**Tabel II.83 Jumlah Industri Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020**

| Kabupaten/Kota  | Industri Mikro dan Kecil |               | Industri Besar dan Sedang |              |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
|                 | Perusahaan               | Tenaga Kerja  | Perusahaan                | Tenaga Kerja |
| Jayapura        | 1.227                    | 2.011         | 7                         | 325          |
| Kepulauan Yapen | 1.731                    | 3.403         | 1                         | 2            |
| Biak Numfor     | 2.542                    | 4.230         | 3                         | 452          |
| Sarmi           | 96                       | 98            | 0                         | 0            |
| Keerom          | 179                      | 307           | 0                         | 0            |
| Waropen         | 455                      | 776           | 0                         | 0            |
| Supiori         | 1.745                    | 2.414         | 0                         | 0            |
| Mamberamo Raya  | 89                       | 208           | 0                         | 0            |
| Kota Jayapura   | 1.684                    | 3.389         | 10                        | 386          |
| Papua           | <b>9.748</b>             | <b>16.836</b> | <b>21</b>                 | <b>1.165</b> |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan survei industri mikro dan kecil tahunan, dari total industri di Provinsi Papua didominasi usaha industri mikro dan kecil yang mencapai 9.748 industri pada tahun 2020 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Industri mikro dan kecil di Provinsi Papua mampu menyerap tenaga kerja sebesar 16.836 tenaga kerja. Lokasi industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Kabupaten Biak Numfor (2.542 industri), Kabupaten Supiori (1.745 industri), dan Kepulauan Yapen (1.731 industri). Adapun penyerapan tenaga kerja industri mikro dan kecil terbanyak terdapat di Biak Numfor (4.230 tenaga kerja), Kepulauan Yapen (3.403 tenaga kerja), serta Kota Jayapura (3.389 tenaga kerja).

## 2.4 ASPEK DAYA SAING

### 2.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.4.1.1 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu perhitungan untuk melihat tingkat kemakmuran pada suatu wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan menghitung pendapatan rata-rata penduduk dari hasil pembagian PDRB dengan populasi yang ada pada suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita artinya semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu wilayah. Berdasarkan Tabel II.84 diketahui bahwa PDRB ADHB per kapita tertinggi baik dengan maupun tanpa tambang dicapai oleh Kabupaten Jayapura. Diketahui juga bahwa pertumbuhannya semakin meningkat dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2020

hingga tahun 2022. Adapun capaian PDRB AHB per kapita dengan tambang di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp106.313.271,76 dan tanpa tambang adalah sebesar Rp104.964.183,97. Sebaliknya, kabupaten dengan capaian PDRB AHB terendah baik dengan maupun tanpa tambang adalah Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun terus mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu 2020 hingga 2022, namun Kabupaten Kepulauan Yapen masih menjadi kabupaten dengan PDRB ADHB terendah. Adapun capaian PDRB AHB dengan tambang pada tahun 2022 di Kepulauan Yapen adalah sebesar Rp40.116.433,93 dan tanpa tambang adalah sebesar Rp39.868.948,14.

**Tabel II.84 PDRB Per Kapita Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

| Kabupaten/Kota                               | 2020          | 2021           | 2022           |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>PDRB ADHB Per Kapita (Dengan Tambang)</b> |               |                |                |
| Jayapura                                     | 96.474.479,70 | 101.050.658,79 | 106.313.271,04 |
| Kep. Yapen                                   | 36.960.294,10 | 39.162.856,92  | 40.116.433,93  |
| Biak Numfor                                  | 38.802.783,39 | 40.671.417,61  | 43.342.696,78  |
| Sarmi                                        | 70.862.080,01 | 74.486.213,89  | 78.241.330,17  |
| Keerom                                       | 47.547.769,86 | 49.237.050,54  | 51.072.907,23  |
| Waropen                                      | 60.452.726,53 | 61.436.297,86  | 66.108.619,73  |
| Supiori                                      | 46.379.140,67 | 47.565.472,69  | 49.004.238,36  |
| Mamberamo Raya                               | 47.377.017,46 | 49.624.541,45  | 52.541.672,67  |
| Kota Jayapura                                | 80.637.679,49 | 82.026.393,17  | 86.232.327,04  |
| <b>PDRB ADHB Per Kapita (Tanpa Tambang)</b>  |               |                |                |
| Jayapura                                     | 95.181.722,02 | 99.719.028,96  | 104.964.183,97 |
| Kep. Yapen                                   | 36.737.720,30 | 38.925.438,73  | 39.868.948,14  |
| Biak Numfor                                  | 38.407.220,85 | 40.254.445,17  | 42.913.724,29  |
| Sarmi                                        | 70.026.860,07 | 73.626.725,41  | 77.350.454,82  |
| Keerom                                       | 46.997.874,73 | 48.662.579,60  | 50.471.465,62  |
| Waropen                                      | 60.038.358,85 | 61.011.998,67  | 65.654.285,12  |
| Supiori                                      | 46.180.698,58 | 47.355.343,06  | 48.785.034,55  |
| Mamberamo Raya                               | 46.455.221,80 | 48.654.360,54  | 51.536.145,77  |
| Kota Jayapura                                | 80.226.476,77 | 81.595.984,10  | 85.801.827,25  |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Apabila ditinjau berdasarkan harga konstan baik dengan maupun tanpa tambang, Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan PDRB ADHK per kapita tertinggi di Provinsi Papua. PDRB ADHK per kapita dengan tambang di Kabupaten Jayapura pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 61.795.088,11 dan tanpa tambang sebesar Rp 60.601.798,77. Terlihat juga bahwa PDRB ADHK per kapita terendah baik dengan maupun tanpa tambang dicapai oleh Kabupaten Biak Numfor. Adapun pada tahun 2022, PDRB ADHK per kapita dengan tambang di Kabupaten Biak Numfor mencapai Rp 25.793.581,69 dan tanpa tambang mencapai Rp 25.557.692,76.

**Tabel II.85 PDRB Per Kapita Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota**

| Kabupaten/Kota                                          | 2020          | 2021          | 2022          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>PDRB ADHK per Kapita Per Kapita (Dengan Tambang)</b> |               |               |               |
| Jayapura                                                | 58.759.284,89 | 60.578.455,61 | 61.795.088,11 |
| Kep. Yapen                                              | 24.646.163,46 | 25.391.966,29 | 25.965.277,53 |
| Biak Numfor                                             | 24.185.719,85 | 24.673.103,81 | 25.793.581,69 |
| Sarmi                                                   | 44.245.545,07 | 44.563.984,48 | 45.109.012,73 |
| Keerom                                                  | 32.405.890,76 | 32.940.723,03 | 33.554.747,44 |
| Waropen                                                 | 43.335.939,16 | 43.168.889,26 | 44.453.491,80 |
| Supiori                                                 | 34.231.781,25 | 34.172.339,64 | 34.589.729,71 |
| Mamberamo Raya                                          | 27.981.105,92 | 27.865.427,90 | 28.249.998,31 |
| Kota Jayapura                                           | 55.701.902,69 | 56.482.331,11 | 57.692.330,94 |
| <b>PDRB ADHK per Kapita Per Kapita (Tanpa Tambang)</b>  |               |               |               |
| Jayapura                                                | 57.581.943,27 | 59.381.132,55 | 60.601.798,77 |
| Kep. Yapen                                              | 24.497.540,22 | 25.235.976,06 | 25.808.014,87 |
| Biak Numfor                                             | 23.956.185,34 | 24.439.052,27 | 25.557.692,76 |
| Sarmi                                                   | 43.601.910,03 | 43.919.054,92 | 44.458.230,08 |
| Keerom                                                  | 32.046.800,09 | 32.572.735,32 | 33.185.491,18 |
| Waropen                                                 | 42.980.627,40 | 42.811.438,34 | 44.092.026,08 |
| Supiori                                                 | 34.112.495,73 | 34.049.593,63 | 34.464.844,62 |
| Mamberamo Raya                                          | 27.263.857,02 | 27.129.325,27 | 27.508.944,06 |
| Kota Jayapura                                           | 55.474.188,04 | 56.255.886,84 | 57.468.591,63 |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

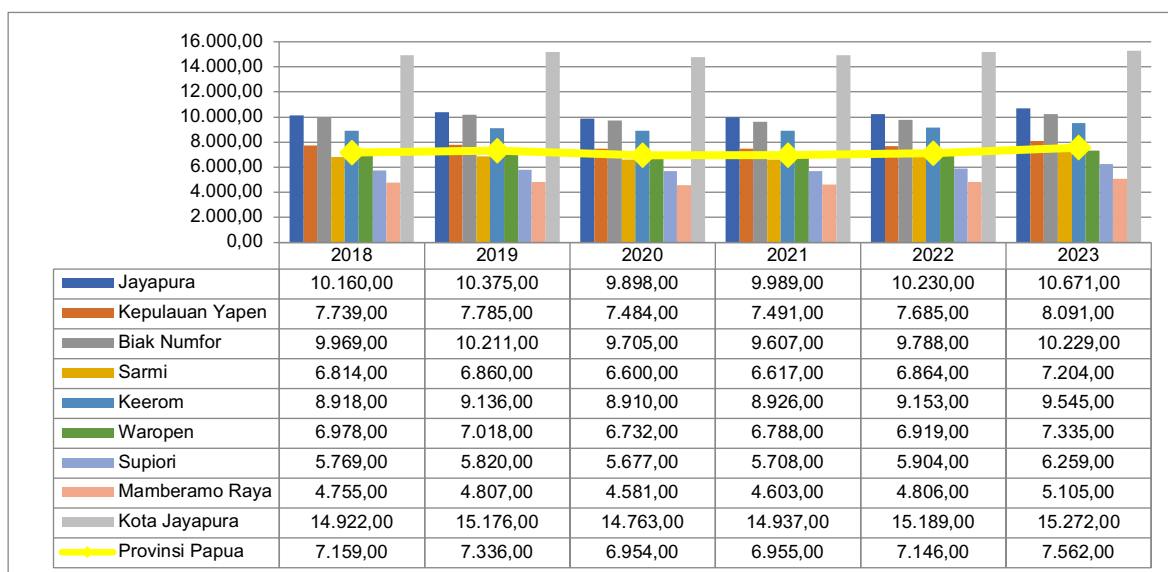
#### 2.4.1.2 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru. Adapun pengeluaran per kapita di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota ditunjukkan pada Gambar II.67.

Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru.

Pengeluaran per kapita tertinggi dari tahun 2018-2023 adalah Kota Jayapura dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 15.272 rupiah diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 10.671 rupiah dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 10.229 rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar 5.105 rupiah pada tahun 2023.

**Gambar II.78 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

## 2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

### 2.4.2.1 Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Guna mencapai tujuan pembangunan, salah satu hal yang dimuat di dalamnya adalah mengenai aparatur pemerintah. Pemerintah perlu bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, profesional, dapat memberikan pelayanan publik, dan berperan sebagai perekat kesatuan bangsa. Tugas aparatur sipil negara adalah melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantuan tertentu. Penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kualitas secara proporsional di semua instansi menjadi arahan terkait kebijakan pembangunan kepegawaian di daerah.

**Tabel II.86 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua**

| Tingkat Pendidikan   | Laki-laki    |              |             | Perempuan    |              |             | Jumlah       |              |             |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                      | 2021         | 2022         | 2023        | 2021         | 2022         | 2023        | 2021         | 2022         | 2023        |
| SD                   | 109          | 70           | 31          | 9            | 8            | 3           | 118          | 78           | 34          |
| SMP                  | 205          | 171          | 78          | 31           | 27           | 10          | 236          | 198          | 88          |
| SMA                  | 4402         | 4095         | 1074        | 1962         | 1680         | 547         | 6364         | 5775         | 1621        |
| Diploma I/Akta I     | 208          | 216          | 3           | 75           | 86           | 10          | 283          | 302          | 13          |
| Diploma II/Akta II   | 118          | 101          | 7           | 37           | 29           | 4           | 155          | 130          | 11          |
| Diploma III/Akta III | 1217         | 1339         | 315         | 1192         | 1231         | 596         | 2409         | 2570         | 911         |
| Diploma IV/Akta IV   | 440          | 496          | 54          | 256          | 256          | 75          | 696          | 752          | 129         |
| S1/Sarjana           | 6809         | 6591         | 1557        | 6178         | 6011         | 1551        | 12987        | 12602        | 3108        |
| S2/Pasca Sarjana     | 2013         | 2109         | 583         | 1263         | 1422         | 453         | 3276         | 3531         | 1036        |
| S3/Doktor/Ph.D       | 122          | 129          | 23          | 38           | 42           | 5           | 160          | 171          | 28          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>15643</b> | <b>15317</b> | <b>3725</b> | <b>11041</b> | <b>10792</b> | <b>3254</b> | <b>26684</b> | <b>26109</b> | <b>6979</b> |

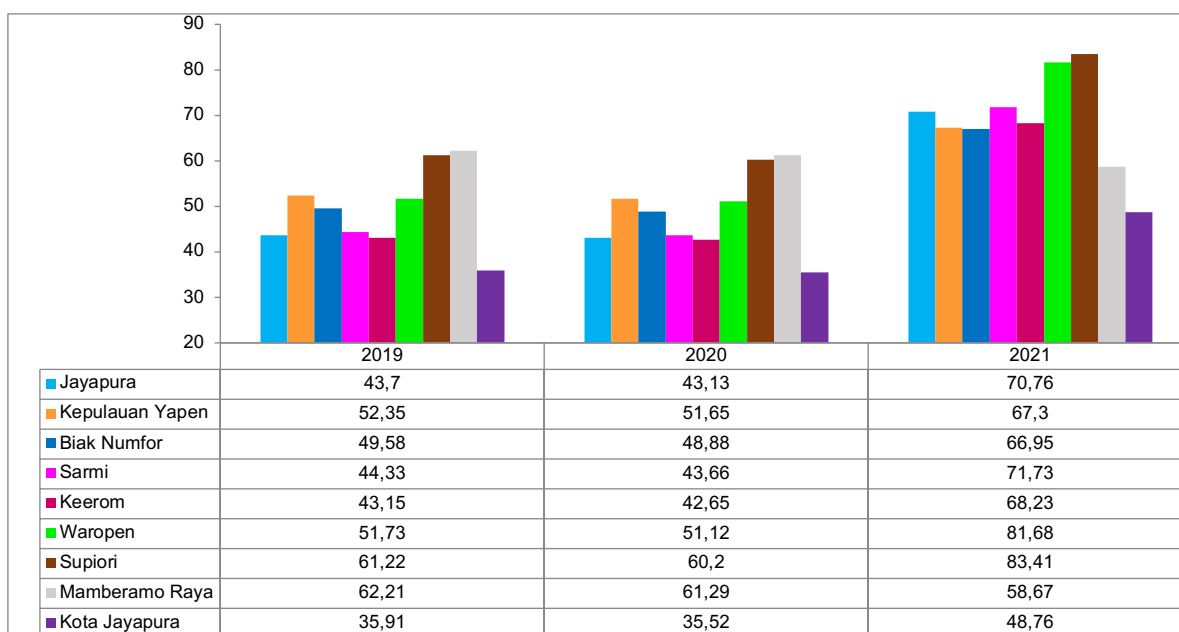
Sumber: BPS dalam Provinsi Papua Dalam Angka 2024

Salah satu aparat sipil negara daerah di Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2023, PNS di lingkungan instansi Provinsi Papua berjumlah 6.979 orang berdasarkan hasil pencatatan dari Badan Kepegawaian Negara. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, data untuk tahun 2023 cenderung mengalami penurunan jumlah. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 2023, data masih merupakan data sebelum pemekaran. Jumlah PNS pada tahun 2023 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 3.725 orang. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh PNS di Provinsi Papua adalah S1 yaitu sebanyak 3.108 orang.

#### 2.4.2.2 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan ekonomi yang digolongkan dalam negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif maupun tidak produktif lagi menjadi semakin tinggi.

**Gambar II.68 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

Persentase rasio ketergantungan di Provinsi Papua pada tahun 2019-2021. Berdasarkan Gambar II.73 diketahui bahwa rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua meningkat pada tahun 2021. Kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura menjadi kota dengan rasio ketergantungan terendah pada tahun 2021. Rasio ketergantungan yang cenderung meningkat pada tahun 2021 di Provinsi Papua menandakan bahwa semakin banyak penduduk produktif yang harus menanggung sejumlah penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi.

## 2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

### 2.4.3.1 Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi merupakan sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lain-lain yang digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas. Oleh karenanya, ketersediaan prasarana transportasi menjadi salah satu fasilitas digunakan untuk meningkatkan daya saing daerah. Jenis prasarana transportasi darat menjadi jenis transportasi dengan jumlah terbanyak yang digunakan oleh Masyarakat. Adapun prasarana transportasi darat dan darat dan air terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor dengan masing-masingnya sebanyak 195 unit dan 69 unit. Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi air terbanyak. Lalu Kabupaten Waropen menjadi kabupaten dengan prasarana transportasi udara terbanyak yaitu berjumlah 10 unit. Adapun ketersediaan angkutan umum dengan dan tanpa trayek tetap terbanyak berada di Kabupaten Biak Numfor yaitu 172 unit dan 73 unit. Sedangkan angkutan umum terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu sebanyak 71 unit disusul Kabupaten Waropen sebanyak 70 unit.

**Tabel II.68 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum**

| Kabupaten       | Jenis Prasarana Transportasi |     |               |       | Ketersediaan Angkutan Umum |                         |               |
|-----------------|------------------------------|-----|---------------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------|
|                 | Darat                        | Air | Darat dan Air | Udara | Ada, Dengan Trayek Tetap   | Ada, Tanpa Trayek Tetap | Angkutan Umum |
| Jayapura        | 109                          | 16  | 19            | 0     | 83                         | 43                      | 18            |
| Kepulauan Yapen | 64                           | 50  | 49            | 2     | 53                         | 41                      | 71            |
| Biak Numfor     | 195                          | 4   | 69            | 0     | 172                        | 73                      | 23            |
| Sarmi           | 84                           | 14  | 13            | 0     | 64                         | 16                      | 31            |
| Keerom          | 82                           | 4   | 5             | 0     | 13                         | 14                      | 64            |
| Waropen         | 62                           | 3   | 36            | 10    | 0                          | 41                      | 70            |
| Supiori         | 14                           | 8   | 16            | 0     | 22                         | 13                      | 3             |
| Mamberamo Raya  | 1                            | 43  | 15            | 0     | 3                          | 6                       | 50            |
| Kota Jayapura   | 36                           | 1   | 2             | 0     | 34                         | 5                       | 0             |

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

### 2.4.3.2 Infrastruktur Komunikasi

Infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan masyarakat untuk menjalin komunikasi dan berjejaring. Wilayah Provinsi Papua yang luas juga disertai kebutuhan akan komunikasi dan jejaring yang tinggi bagi masyarakat, infrastruktur komunikasi menjadi salah satu infrastruktur penting di wilayah Papua. Apabila ditinjau berdasarkan masing-masing kampung/kelurahan, angka ketersediaan BTS pada kategori “tidak ada”, jauh lebih banyak dibandingkan area yang telah terlayani oleh BTS, kecuali Kota Jayapura. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah pada masing-masing kabupaten/kota yang masih belum terlayani oleh sinyal seluler. Sinyal internet telepon



seluler juga telah menjangkau beberapa kampung/kelurahan pada masing-masing kabupaten dengan paling banyak sudah terlayani oleh sinyal 4G/LTE. Namun juga masih ditemukan beberapa area pada masing-masing kabupaten yang belum terlayani sinyal internet. Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten dengan jumlah kampung/kelurahan terbanyak yang tidak memiliki sinyal akses internet.

**Tabel II.87 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler, dan Sinyal Internet Telepon Seluler**

| Kabupaten       | Keberadaan BTS |           | Kekuatan Sinyal Seluler |      |       |                  | Sinyal Internet Telepon Seluler |               |             |                           |
|-----------------|----------------|-----------|-------------------------|------|-------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|                 | Ada            | Tidak Ada | Sangat Kuat             | Kuat | Lemah | Tidak Ada Sinyal | 4G/LTE                          | 3G/H/H+/E VDO | 2,5G/1/GPRS | Tidak Ada Sinyal Internet |
| Jayapura        | 36             | 108       | 33                      | 51   | 37    | 23               | 63                              | 31            | 8           | 19                        |
| Kepulauan Yapen | 16             | 149       | 4                       | 41   | 51    | 69               | 61                              | 9             | 8           | 18                        |
| Biak Numfor     | 57             | 211       | 77                      | 76   | 75    | 40               | 149                             | 10            | 30          | 39                        |
| Sarmi           | 25             | 86        | 18                      | 33   | 30    | 30               | 40                              | 18            | 14          | 9                         |
| Keerom          | 28             | 63        | 16                      | 22   | 22    | 31               | 36                              | 9             | 1           | 14                        |
| Waropen         | 11             | 100       | 2                       | 25   | 13    | 71               | 24                              | 1             | 0           | 15                        |
| Supiori         | 16             | 22        | 1                       | 14   | 16    | 7                | 9                               | 4             | 4           | 14                        |
| Mamberamo Raya  | 14             | 45        | 4                       | 10   | 5     | 40               | 10                              | 2             | 2           | 5                         |
| Kota Jayapura   | 31             | 8         | 23                      | 14   | 1     | 1                | 38                              | 0             | 0           | 0                         |

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

Adapun warnet menjadi keberadaan sarana komunikasi terbanyak yang dimiliki masing-masing kampung/kelurahan di Provinsi Papua. Selain itu, keberadaan sarana komunikasi lainnya yang dapat melayani masyarakat di antaranya adalah keberadaan kantor pos/pos pembantu, pos keliling, dan perusahaan jasa ekspedisi swasta.

**Tabel II.88 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi**

| Kabupaten       | Warnet | Kantor Pos/Pos Pembantu | Pos Keliling | Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta |
|-----------------|--------|-------------------------|--------------|----------------------------------|
| Jayapura        | 26     | 5                       | 7            | 7                                |
| Kepulauan Yapen | 14     | 1                       | 0            | 3                                |
| Biak Numfor     | 32     | 11                      | 15           | 8                                |
| Sarmi           | 10     | 1                       | 1            | 1                                |
| Keerom          | 9      | 1                       | 4            | 4                                |
| Waropen         | 7      | 1                       | 0            | 5                                |
| Supiori         | 3      | 2                       | 1            | 2                                |
| Mamberamo Raya  | 4      | 1                       | 0            | 0                                |
| Kota Jayapura   | 20     | 9                       | 1            | 16                               |

Sumber: BPS dalam Statistik Potensi Desa 2021 Provinsi Papua

#### 2.4.3.3 Penataan Ruang

Penataan ruang Provinsi Papua diselenggarakan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW.

Provinsi Papua telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tahun 2023-2042 yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033, yang memuat kesesuaian dengan kebutuhan ruang untuk pembangunan di Provinsi Papua dikarenakan terjadinya dinamika pembangunan, perubahan regulasi sektoral, RTRW Nasional, serta banyaknya kegiatan strategis di tingkat nasional dan regional.

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua telah memiliki Perda RTRW namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu dilakukan revisi terhadap Perda RTRW Kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan regional, nasional, provinsi maupun kebijakan sektoral dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan investasi sedangkan untuk RDTR baru kabupaten Jayapura menetapkan Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Sentani dan Kabupaten Biak Numfor menetapkan Peraturan Bupati tentang RDTR Pekotaan Biak.

## **2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi**

### **2.4.4.1 Laju Inflasi Daerah**

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. I

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi. Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year-on-year pada Januari 2023, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, biaya

akademi/ perguruan tinggi dan angkutan dalam kota. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi year-on-year antara lain: biaya ponsel, ikan ekor kuning, bawang putih, ikan tongkol, dan kangkung.

**Tabel II.89 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023**

| No | Kabupaten/Kota                      | 2021  | 2022 | 2023  |
|----|-------------------------------------|-------|------|-------|
| 1  | <i>Month to Month (mtm) Januari</i> | -0,27 | 0,03 | -0,40 |
| 2  | <i>Year to Date (ytd) Januari</i>   | -0,27 | 0,03 | -0,40 |
| 3  | <i>Year on Year (yoy) Januari</i>   | 0,93  | 2,10 | 5,23  |

Sumber: BPS Provinsi Papua

#### 2.4.4.2 Kondisi Politik dan Keamanan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2016 IDI Papua adalah sebesar 61,02 persen meningkat 3,52 point pada tahun 2020 menjadi 64,54 persen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari komponen pembentuk dari setiap aspek diantaranya Aspek Kebebasan Sipil (Persen); Aspek Hak-Hak Politik (Persen); dan Aspek Lembaga Demokrasi (Persen).

**Tabel II.90 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020**

| Uraian                                     | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)</b> | <b>61,02</b> | <b>61,34</b> | <b>62,20</b> | <b>65,25</b> | <b>64,54</b> |
| Aspek Kebebasan Sipil (Persen)             | 92,15        | 89,09        | 84,36        | 93,08        | 89,32        |
| Aspek Hak-Hak Politik (Persen)             | 41,13        | 42,16        | 47,90        | 51,16        | 53,54        |
| Aspek Lembaga Demokrasi (Persen)           | 53,45        | 56,91        | 57,05        | 52,61        | 51,83        |

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan aspek pembentuk IDI, persentase hak-hak politik cenderung meningkat meskipun nilainya tergolong cukup rendah. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yaitu kebebasan hak sipil dan Lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Meskipun cenderung aspek kebebasan sipil terlihat mengalami penurunan, tetapi capaian rata-rata pertahun tergolong cukup tinggi.

**Tabel II.91 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Berdasarkan Metode Baru di Provinsi Papua, 2021-2022**

| Uraian                                     | 2021         | 2022         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Indeks Demokrasi Indonesia (Persen)</b> | <b>66,39</b> | <b>66,65</b> |
| Aspek Kebebasan (Persen)                   | 75,64        | 67,23        |
| Aspek Kesenjangan (Persen)                 | 62,3         | 67,85        |
| Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (Persen) | 62,15        | 64,63        |

Sumber: BPS RI, 2023

Berdasarkan metode baru perhitungan IDI, terdapat perubahan indikator dalam aspek-aspek perhitungan IDI. Penggunaan indikator-indikator baru menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan bagi Provinsi Papua. Adapun nilai IDI provinsi mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 66,65 dari sebelumnya 66,39.

Tingkat kriminalitas di Papua tercatat dalam tiga tahun terakhir mengalami perbaikan. Tercatat terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan setiap tahunnya, sama halnya dengan resiko penduduk yang berpotensi ditindakpidanakan. Penyelesaian tindak pidana sampai dengan tahun 2021 sebesar 42,82 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,79 persen. Penyelesaian kasus tindak pidana merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun angkanya tercatat menurun setiap tahunnya.

**Tabel II.92 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021**

| Uraian                                                       | 2019  | 2020   | 2021   |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)                                  | 3.347 | 4.304  | 4.355  |
| Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (kasus)                     | 8.551 | 8.005  | 6.864  |
| Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (per 100.000 Penduduk) | 248,7 | 234,28 | 199,64 |
| Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)               | 50,18 | 45,79  | 42,82  |
| Tingkat Kriminalitas (Persen)                                | 25,55 | 18,60  | 15,76  |

*Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)*

#### 2.4.4.3 Produktivitas Total Daerah

Kontribusi tenaga kerja di Papua selama lima tahun terakhir terhadap produk domestik regional bruto (PDRB ADHB Tanpa Tambang) semakin baik. Jika dilihat berdasarkan trend perkembangan produktivitas total daerah selama 2017-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

**Tabel II.93 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021**

| Uraian                                | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PDRB ADHB Tanpa tambang (Rp. Juta)    | 122.457.689  | 133.409.669  | 144.899.565  | 142.683.470  | 148.652.165  |
| Angkatan Kerja (jiwa/orang)           | 1.762.841    | 1.835.963    | 1.842.203    | 1.769.403    | 1.952.777    |
| <b>Produktivitas total daerah (P)</b> | <b>69,47</b> | <b>72,66</b> | <b>78,66</b> | <b>80,64</b> | <b>76,12</b> |

Komponen pembentuk produktivitas total pada indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pada Angkatan kerja terjadi penurunan pada periode 2019-2020. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja khususnya pada sektor swasta. Sehingga meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan di Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2021 produktivitas TK dalam perekonomian dalam perekonomian adalah sebesar Rp.76,12 Juta/TK/tahun yang tercatat menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp.80,64 Juta/TK/tahun.

## 2.5 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2024 dapat diukur dari realisasi ketercapaian indikator program pembangunan daerah ppada pelaksanaan RKPD tahun 2024 dibandingkan dengan target tahun 2024 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2027 Nilai peringkat kinerja reaisasi RKPD Tahun 2024 berdasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi dengan rician sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel II.94 Kriteria Penilaian Kinerja Per Urusan Provinsi Papua**

| No. | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Intervensi Nilai Realisasi s/d Triwulan IV 2023 | Jumlah Urusan |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Sangat Tinggi                        | $x > 91 \%$                                     | 26 Urusan     |
| 2.  | Tinggi                               | $76 \% \leq x < 90 \%$                          | 11 Urusan     |
| 3.  | Sedang                               | $66 \% \leq x < 75 \%$                          | 2 Urusan      |
| 4.  | Rendah                               | $51 \% \leq x < 65 \%$                          | -             |
| 5.  | Sangat Rendah                        | $< 50 \%$                                       | -             |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Rekapitulasi distribusi Program menurut urusan secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.95 Krit Rekapitulasi Distribusi Program Menurut Urusan**

| No | SKPD (RKPD)                                                           | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1  | Dinas Pendidikan                                                      | 4              | 18              |
| 2  | Dinas Kesehatan                                                       | 6              | 23              |
| 3  | Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura                                      | 3              | 9               |
| 4  | Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)                               | 1              | 1               |
| 5  | Rumah Sakit Umum Daerah Abepura                                       | 3              | 10              |
| 6  | Rumah Sakit Jiwa Daerah                                               | 3              | 10              |
| 7  | Rumah Sakit Umum Daerah Abepura (BLUD)                                | 1              | 1               |
| 8  | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman  | 14             | 25              |
| 9  | Satuan Polisi Pamong Praja                                            | 3              | 12              |
| 10 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                   | 2              | 11              |
| 11 | Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil                           | 11             | 29              |
| 12 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM                                  | 10             | 24              |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 8              | 24              |
| 14 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan                         | 10             | 23              |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat                        | 6              | 16              |
| 16 | Dinas Perhubungan                                                     | 4              | 12              |
| 17 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                      | 4              | 9               |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                | 6              | 17              |
| 19 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup                                  | 13             | 32              |
| 20 | Cabang Dinas Kehutanan Jayapura                                       | 2              | 3               |
| 21 | Cabang Dinas Kehutanan Sarmi                                          | 2              | 3               |
| 22 | Cabang Dinas Kehutanan Keerom                                         | 2              | 3               |
| 23 | Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya                                 | 2              | 3               |

| No | SKPD (RKPD)                                                    | JUMLAH PROGRAM | JUMLAH KEGIATAN |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 24 | KPHP UNIT XVII Waropen                                         | 2              | 5               |
| 25 | KPHP UNIT XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya                      | 2              | 5               |
| 26 | KPHP UNIT XXIII Sarmi                                          | 2              | 5               |
| 27 | KPHP UNIT XIX Kepulauan Yapen                                  | 2              | 5               |
| 28 | KPHL Unit XX Biak                                              | 2              | 5               |
| 29 | KPHP UNIT XXVIII Kota Jayapura                                 | 2              | 5               |
| 30 | KPHP UNIT XXIX Keerom                                          | 2              | 5               |
| 31 | UPTD Kebun Raya Koya Koso                                      | 1              | 1               |
| 32 | BPTH Papua                                                     | 1              | 1               |
| 33 | UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek                            | 1              | 1               |
| 34 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua              | 1              | 1               |
| 35 | Dinas Olahraga dan Pemuda                                      | 4              | 15              |
| 36 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                | 10             | 18              |
| 37 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                            | 5              | 11              |
| 38 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Penanaman Modal dan PTSP  | 11             | 34              |
| 39 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                   | 6              | 49              |
| 40 | Dinas Perkebunan dan Peternakan                                | 5              | 15              |
| 41 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                            | 15             | 31              |
| 42 | Biro Tata Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat | 6              | 12              |
| 43 | Biro Organisasi                                                | 3              | 11              |
| 44 | Biro Hukum                                                     | 2              | 8               |
| 45 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                 | 2              | 11              |
| 46 | Sekretariat Daerah                                             | 1              | 8               |
| 47 | Biro Umum dan Administrasi Pimpinan                            | 2              | 8               |
| 48 | Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                 | 3              | 10              |
| 49 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua                      | 4              | 19              |
| 50 | Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah         | 4              | 18              |
| 51 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset                           | 3              | 15              |
| 52 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                            | 2              | 9               |
| 53 | Badan Kepegawaian Daerah                                       | 2              | 12              |
| 54 | Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur                        | 2              | 9               |
| 55 | Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama                     | 2              | 10              |
| 56 | Badan Penghubung Daerah                                        | 2              | 11              |
| 57 | Inpektorat                                                     | 3              | 8               |
| 58 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                              | 6              | 11              |
| 59 | Sekretariat Majelis Rakyat Papua                               | 2              | 9               |

Sumber: Hasil Analisis (Data diolah, 2024)

Hasil evaluasi rata-rata tingkat capaian kinerja RPJMD tahun 2024 pada 59 perangkat daerah di Provinsi Papua secara keseluruhan mencapai 79,96 persen (**TINGGI**). Rekapitulasi ketercapaian indikator kinerja Program tahun 2024 menurut Organisasi Perangkat Daerah secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.96 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024 Menurut Organisasi Perangkat Daerah**

| No | Organisasi Perangkat Daerah     | Jumlah Pagu/OPD | Rerata Capaian Program | Predikat Capaian |
|----|---------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 1  | Cabang Dinas Kehutanan Jayapura | 1.749.059.894   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 2  | Cabang Dinas Kehutanan Keerom   | 2.649.999.180   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 3  | KPHP UNIT XVII Waropen          | 1.849.993.000   | 100                    | Sangat Tinggi    |



| No | Organisasi Perangkat Daerah                                          | Jumlah Pagu/OPD | Rerata Capaian Prorgam | Predikat Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 4  | KPHP UNIT XXIX Keerom                                                | 1.499.999.940   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 5  | UPTD Kebun Raya Koya Koso                                            | 1.049.997.580   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 6  | BPTH Papua                                                           | 2.049.648.456   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 7  | UPTD Taman Burung Dan Taman Anggrek                                  | 5.549.991.400   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 8  | Biro Hukum                                                           | 8.137.510.115   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 9  | Biro Organisasi                                                      | 5.241.901.510   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 10 | Biro Tata Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat      | 44.331.852.796  | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 11 | KPHP UNIT XIX Kepulauan Yapen                                        | 3.349.992.179   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 12 | KPHL UNIT XX Biak                                                    | 3.933.311.550   | 100                    | Sangat Tinggi    |
| 13 | Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura                                     | 122.727.820.717 | 99,97                  | Sangat Tinggi    |
| 14 | UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua                    | 749.978.205     | 99,56                  | Sangat Tinggi    |
| 15 | Satuan Polisi Pamong Praja                                           | 29.094.309.582  | 99,52                  | Sangat Tinggi    |
| 16 | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata                                      | 32.588.515.385  | 99,44                  | Sangat Tinggi    |
| 17 | Badan Penghubung Daerah                                              | 8.158.839.845   | 98,09                  | Sangat Tinggi    |
| 18 | Dinas Kesehatan                                                      | 266.991.894.815 | 98,32                  | Sangat Tinggi    |
| 19 | Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil                         | 25.149.395.879  | 96,02                  | Sangat Tinggi    |
| 20 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah                                  | 23.368.868.741  | 95,85                  | Sangat Tinggi    |
| 21 | Biro Umum Dan Administrasi Pimpinan                                  | 58.075.158.240  | 95,34                  | Sangat Tinggi    |
| 22 | Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup                                 | 84.026.998.482  | 95,04                  | Sangat Tinggi    |
| 23 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan                                  | 30.825.680.254  | 92,46                  | Tinggi           |
| 24 | Rumah Sakit Jiwa Abepura                                             | 28.753.450.320  | 88,78                  | Tinggi           |
| 25 | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Pangan                       | 70.552.146.737  | 87,21                  | Tinggi           |
| 26 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                    | 307.407.151.087 | 86,64                  | Tinggi           |
| 27 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Adat                       | 21.138.028.411  | 85,81                  | Tinggi           |
| 28 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                  | 23.857.873.536  | 86,44                  | Tinggi           |
| 29 | Dinas Olah Raga dan Pemuda                                           | 85.104.839.060  | 85,31                  | Tinggi           |
| 30 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                     | 66.953.221.080  | 84,56                  | Tinggi           |
| 31 | Sekretariat Daerah                                                   | 189.917.320.160 | 82,47                  | Tinggi           |
| 32 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                         | 45.749.747.673  | 78,37                  | Tinggi           |
| 33 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                       | 5.300.000.000   | 77,78                  | Tinggi           |
| 34 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua                            | 366.087.425.072 | 75,63                  | Tinggi           |
| 35 | KPHP UNIT XXIII Sarmi                                                | 1.699.783.020   | 74,95                  | Sedang           |
| 36 | Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama                             | 14.525.318.273  | 73,31                  | Sedang           |
| 37 | Inspektorat                                                          | 43.948.457.823  | 72,73                  | Sedang           |
| 38 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                  | 58.298.283.073  | 72,71                  | Sedang           |
| 39 | KPHP UNIT XXVIII Kota Jayapura                                       | 1.599.988.948   | 71,24                  | Sedang           |
| 40 | KPHP UNIT XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya                            | 1.499.887.760   | 70,06                  | Sedang           |
| 41 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah              | 57.638.451.207  | 69,92                  | Sedang           |
| 42 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset                                 | 424.187.760.577 | 67,99                  | Sedang           |
| 43 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 802.444.148.303 | 64,69                  | Rendah           |
| 44 | Cabang Dinas Kehutanan Sarmi                                         | 1.300.000.000   | 61,54                  | Rendah           |
| 45 | Sekretariat Majelis Rakyat Papua                                     | 83.763.643.422  | 61,36                  | Rendah           |
| 46 | Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya                                | 1.049.976.500   | 60,26                  | Rendah           |
| 47 | Badan Kepegawaian Daerah                                             | 25.887.591.577  | 60,05                  | Rendah           |
| 48 | Rumah Sakit Khusus Daerah Abepura                                    | 83.933.020.139  | 58,83                  | Rendah           |

| No | Organisasi Perangkat Daerah                                           | Jumlah Pagu/OPD | Rerata Capaian Prorgam | Predikat Capaian |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|
| 49 | Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, Penanaman Modal dan PTSP         | 45.240.249.012  | 52,35                  | Rendah           |
| 50 | Dinas Pendidikan                                                      | 463.948.104.954 | 50,45                  | Sangat Rendah    |
| 51 | Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM                                  | 22.773.995.673  | 49,24                  | Sangat Rendah    |
| 52 | Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur                               | 26.947.076.854  | 47,32                  | Sangat Rendah    |
| 53 | Dinas Perkebunan dan Peternakan                                       | 19.696.034.644  | 47,24                  | Sangat Rendah    |
| 54 | Dinas Perhubungan                                                     | 79.649.686.450  | 44,5                   | Sangat Rendah    |
| 55 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 16.120.758.895  | 31,34                  | Sangat Rendah    |
| 56 | Dinas Perekonomian dan Administrasi Pembangunan                       | 5.204.000.000   | 27,1                   | Sangat Rendah    |

Sumber: Hasil Analisis (Data diolah, 2024)

Hasil Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun anggaran 2024 disampaikan secara detail Lampiran 2 dokumen RKPD ini.

## 2.6 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 2.6.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

#### 2.6.1.1 Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah

Kualitas pembangunan ekonomi yang rendah ini ditandai dengan masih tingginya ketimpangan pembangunan ekonomi, kontribusi sektor industri pengolahan dalam perekonomian wilayah sangat rendah, tenaga kerja yang belum berkualitas, daya saing investasi yang rendah, dan tingginya defisit perdagangan antardaerah. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “kualitas pembangunan ekonomi yang masih rendah” ditampilkan dalam Tabel II.97.

**Tabel II.97 Permasalahan Pokok 1: Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah**

| No | Masalah                                            | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi topografi yang sebagian besar berlereng, dengan curah hujan yang tinggi, merupakan kendala utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua karena menyebabkan sulitnya membangun infrastruktur dasar dan tingginya biaya transportasi (high cost). Hal ini menjadi hambatan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi secara merata baik itu antarsektor maupun antarwilayah</li> <li>b. Indeks Ketimpangan Ekonomi (IKE) berdasarkan ukuran koefisien variasi di Provinsi Papua selama tahun 2016-2022 dinilai sangat tinggi, baik itu secara sektoral maupun spasial.</li> <li>c. Secara sektoral rata-rata IKE Papua mencapai 1,6233 poin per tahun, yang bermakna bahwa derajat penyimpangan nilai PDRB dari masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,6233 poin per tahun.</li> <li>d. IKE untuk ketimpangan spasial rata-rata mencapai 1,4377 per tahun yang artinya penyimpangan nilai PDRB per kapita pada masing-masing wilayah terhadap nilai rata-ratanya sebesar 1,4377 poin per tahun. Kedua angka IKE ini masih jauh sekali dari batas IKE terendah sebesar 0,2 poin.</li> </ul> |

| No | Masalah                                                   | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Rendahnya kontribusi industri pengolahan</b>           | <p>a. Selama periode 2018-2022 peranan sektor industri pengolahan dalam menciptakan nilai tambah regional (PDRB) Provinsi Papua sangat rendah, rata-rata hanya mencapai 1,93% per tahun berdasarkan PDRB-DT (PDRB Dengan Tambang), dan 3,10% per tahun pada PDRB-TT (PDRB Tanpa Tambang). Keduanya dengan perkembangan yang cenderung menurun selama periode tersebut.</p> <p>b. Pondasi perekonomian Papua selama ini didominasi oleh sektor-sektor ekonomi yang ekstraktif (pertanian dan pertambangan), hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah melalui berbagai program dan proyek untuk mengaktifkan peran serta dan pemberdayaan ekonomi masyarakat masih belum menunjukkan hasil yang baik, dimana sebagian besar sumber daya alam Papua yang ada dikirim ke luar tanpa melalui proses pengolahan.</p> <p>c. Belum berperannya sektor industri pengolahan dalam menggerakkan perekonomian wilayah menandakan bahwa ada ketergantungan yang berlebih pada pengelolaan SDA sebagai komoditas ekspor, investasi dan pendapatan daerah. Kondisi ini dapat melemahkan pondasi perekonomian wilayah dimasa mendatang, oleh karena volatilitas harga dan jumlah produksi hasil ekstraktif (misal: komoditi pertanian) sangat tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang tinggi juga. Beda halnya dengan produk-produk hasil industri pengolahan yang bersifat durable goods (barang-barang tahan lama), harga dan produksinya cenderung terus mengalami peningkatan, memiliki umur ekonomi yang panjang, dapat disimpan lebih lama, harga yang lebih kompetitif, dan yang paling utama sektor industri pengolahan ini mampu menjadi leading sektor yang lebih mapan dalam perekonomian wilayah.</p> |
| 3  | <b>Kualitas tenaga kerja yang rendah</b>                  | <p>a. Struktur tenaga kerja di Provinsi Papua selama ini lebih dominan pada tenaga kerja dengan pendidikan SD dan kebawah, rata-rata sekitar 59,48% per tahun. Sedangkan untuk tenaga kerja yang berpendidikan SMA/SMK dan ke atas hingga pendidikan tinggi, yang dikategorikan tenaga kerja yang berkualitas, hanya 27,82% per tahun untuk waktu yang sama.</p> <p>b. Struktur tenaga kerja sektoral selama tahun 2021-2023 lebih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan yang kurang memerlukan tenaga kerja berpendidikan, dengan pangsa tenaga kerja sekitar 69,23% per tahun.</p> <p>c. Tingkat upah di sektor pertanian paling rendah, dan sebagian juga merupakan tenaga kerja keluarga, akhirnya kemampuan sektor tersebut untuk mentransmisi pendapatan keluarga di atas garis kemiskinan sangat rendah, sehingga banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian selama ini masih belum mampu mengakselerasi penurunan kemiskinan di Papua lebih baik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | <b>Daya saing investasi yang rendah</b>                   | <p>a. Perkembangan ICOR Provinsi Papua selama periode 2011- 2022 sangat fluktuatif berkisar diantara 15,83 poin paling tinggi di tahun 2012, dan 2,28 poin paling rendah di tahun 2021, dengan asumsi ICOR negatif diabaikan dalam perhitungan.</p> <p>b. Rata-rata ICOR selama periode 2011-2022 mencapai 6,29 poin per tahun, dengan kata lain-lain untuk meningkatkan PDRB Papua sebesar 1 rupiah rata-rata dibutuhkan tambahan investasi sebesar 6,29 rupiah per tahun. Angka ini sangat tinggi jauh di atas batas maksimum ICOR efisien sebesar 4,00 poin. Sehingga terindikasi selama ini ada inefisiensi (pemborosan) dalam perekonomian Papua sebesar 36,40% per tahun, yang menandakan juga daya saing investasi sangat rendah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | <b>Defisit perdagangan antardaerah yang sangat tinggi</b> | <p>a. Keterkaitan dan hubungan kerja sama ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan sangat diperlukan bagi pembangunan di suatu daerah. Karena pada hakikatnya, tidak ada satupun daerah yang mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki sendiri karena adanya keterbatasan dan kelangkaan. Namun begitu, jika keterkaitan dan hubungan tersebut tidak berimbang, dimana ada salah satu yang mendominasi karena sangat kuat, maka hal tersebut tidaklah sehat bagi pembangunan ekonomi wilayah yang posisinya lemah. Kondisi seperti inilah yang terjadi di Papua</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No | Masalah | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | <p>b. Sepanjang tahun 2015-2022 rasio neraca perdagangan antar daerah terhadap PDRB Provinsi Papua lebih banyak mengalami defisit dengan kecenderungan yang meningkat, bahkan di tahun 2021 sempat menyentuh angka -9,98%. Meskipun di tahun 2022 ada koreksi penurunan, akan tetapi kondisi defisit masih tetap besar, yaitu -6,40%.</p> <p>c. Jika dihitung rata-ratanya selama periode 2015-2022, terlihat rasio defisit di Provinsi Papua bisa mencapai -4,24% per tahun. Dengan kata lain ada kebocoran ekonomi rata-rata -4,24% per tahun. Kondisi ini jelas sangat tidak menguntungkan Papua, oleh karena rasio defisit yang besar tersebut menyebabkan: (1) banyak modal yang lari ke luar; (2) hilangnya potensi efek multiplier; (3) ketergantungan ekonomi terhadap daerah luar bertambah tinggi; (4) kesenjangan antardaerah semakin melebar; dan (5) daya saing perekonomian daerah semakin rendah.</p> |

Sumber: Hasil Analisis (2024)

### 2.6.1.2 Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya

Kualitas pembangunan sosial budaya yang belum optimal ini ditandai dengan rendahnya akses dan mutu pendidikan; belum optimalnya akses dan derajat kesehatan, tingginya ketimpangan gender dan rendahnya perlindungan terhadap anak, rendahnya daya saing kepemudaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai. Adapun deskripsi dan data dukung perumusan masalah pokok “belum optimalnya kualitas pembangunan sosial budaya” ditampilkan dalam Tabel II.98.

**Tabel II.98 Permasalahan Pokok 2: Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya**

| No | Masalah                                     | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Rendahnya akses dan mutu pendidikan</b>  | <p>a. Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Papua baru mencapai 7,2 tahun di tahun 2023, yang terlihat hanya meningkat rata-rata 0,1 tahun dari tahun 2010. Apabila akselerasi lama sekolah masih sama seperti periode sebelumnya, maka di tahun 2045 diperkirakan Pemerintah Provinsi Papua hanya sanggup mewujudkan Rata-rata Lama Sekolah bagi penduduknya sebesar 9,8 tahun, ini masih jauh di bawah target generasi emas Indonesia melalui program wajib belajar 12 tahun.</p> <p>b. Selain akses yang belum memadai, kualitas pendidikan di Papua juga terlihat sangat kurang. Hal ini ditandai salah satunya dengan jumlah sekolah yang masih banyak belum terakreditasi, contohnya di tahun 2021 mencapai 43,70% dari total 4.774 Satuan Pendidikan (SP), dengan rincian secara berurutan yang paling tinggi adalah pada satuan pendidikan SD sebanyak 1.176 unit (56,38%), kemudian PAUD sebanyak 540 unit (25,89%), SMP sebanyak 268 unit (12,85%), SMA sebanyak 67 unit (3,21%), dan SMK sebanyak 35 unit (1,68%).</p>               |
| 2  | <b>Belum optimalnya pelayanan kesehatan</b> | <p>a. Berdasarkan hasil Long Form SP2020, AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia adalah 16,85 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dimana AKB tertinggi berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 38,17 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dan AKB terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,38 kematian per 1.000 kelahiran hidup.</p> <p>b. Berdasarkan hasil Long Form SP2020 besaran AKI di Indonesia sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, dengan AKI paling tinggi di Papua sebesar 565 per 100.000 kelahiran hidup, dan terendah sebesar 48 per 100.000 kelahiran hidup di DKI Jakarta.</p> <p>c. Provinsi Papua saat ini masih merupakan endemik malaria tertinggi di Indonesia. Berdasarkan catatan WHO pada tahun 2021 ditemukan 811.636 kasus malaria baru, dimana sekitar 89% dari banyaknya kasus tersebut ada di Provinsi Papua. Sejauh ini Malaria menjadi salah satu penyebab paling besar pada kematian ibu dan anak. Selain malaria, kematian ibu dan anak di Papua juga dipengaruhi infeksi, TB, dan masalah</p> |

| No | Masalah                                           | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | <p>perilaku ibu hamil seperti tekanan darah tinggi, jarang melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta kurang menjaga pola makan.</p> <p>d. Masih banyak puskesmas di Papua yang belum memenuhi standar puskesmas sesuai Permenkes RI No 43 tahun 2019 dan ada yang belum terakreditasi. Sesuai dengan standar yang ditetapkan, setidaknya-tidaknya dalam sebuah Puskesmas tersedia 9 jenis tenaga medis, yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Farmasi, Kesmas, Keslink, Gizi, dan tenaga laboratorium medik. Berdasarkan buku Data Dasar Puskesmas Kondisi 31 Desember 2019 Provinsi Papua yang diterbitkan Kemenkes RI, jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar tersebut hanya sebanyak 27 puskesmas atau sekitar 14,59% dari total Puskesmas yang terdata. Sedangkan untuk proporsi Puskesmas yang belum terakreditasi di tahun 2019 sebanyak 25,43%, dalam proses akreditasi sebanyak 5,61%, dan sudah terakreditasi sebanyak 69.16%.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Masih tingginya ketimpangan gender                | <p>a. IKG (Indeks Ketimpangan Gender) Papua tahun 2023 mencapai 0,515 poin, yang masuk dalam 10 besar tertinggi di Indonesia. Nilai ini hanya terkoreksi 0,02 poin dari data IKG tahun 2021 sebesar 0,535 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian pembangunan manusia di Papua belum inklusif karena terdistorsi oleh adanya ketimpangan gender yang tinggi.</p> <p>b. Keterlibatan perempuan dalam perlemen hanya 15,94% pada tahun 2022, masih jauh dibawah angka ideal 30%.</p> <p>c. Rata-rata Lama Sekolah perempuan 6 tahun, di bawah laki-laki 7,4 tahun.</p> <p>d. Angka Buta Huruf perempuan lebih tinggi sebesar 16,71%, sedangkan laki-laki sebesar 13,67%</p> <p>e. TPAK perempuan lebih rendah sebesar 69,09%, dan laki-laki sebesar 85,49%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Daya saing kepemudaan yang masih rendah           | <p>a. Sepanjang periode 2015-2022, IPP Provinsi Papua bergerak diantara angka 48,00 poin di tahun 2015 dan 55,50 untuk tahun 2022, dengan rata-rata peningkatan 1,07 poin per tahun (Kemenpora RI, 2023). Selama 7 tahun tersebut cenderung IPP Provinsi Papua berada pada urutan terendah di Indonesia.</p> <p>b. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Provinsi Papua dalam pembangunan pemuda (IPP) terdapat pada domain pendidikan yang nilai indeksnya cenderung tidak mengalami perubahan dalam periode 2017–2021, dan terendah di Indonesia. Hal ini terjadi karena capaian indikator-indikator domain ini masih rendah, yang menggambarkan daya saing pemuda di Papua selama ini rendah, yang tercermin pada kondisi dimana sebagian besar pemuda Papua berpendidikan SMU ke bawah, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah dan tidak sedikit pula yang putus sekolah yang disebabkan kondisi sosial ekonomi.</p> <p>c. Rendahnya tingkat pendidikan pemuda, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ketidakmampuan dalam bersaing, terbatasnya peluang kerja yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik.</p> |
| 5  | Pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai | <p>a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang paling banyak ditangani oleh pemerintah Provinsi selama ini adalah keluarga fakir miskin.</p> <p>b. Meskipun pemerintah terlihat cukup berhasil mereduksi tingkat kemiskinan hingga mencapai 26,03% di tahun 2023 (BPS Papua, 2023), akan tetapi penanganan masalah penduduk fakir miskin ternyata belum berjalan optimal, dimana jumlah fakir miskin cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.</p> <p>c. Selain fakir miskin, PMKS yang juga banyak ditangani pemerintah provinsi adalah penyandang HIV/AIDS. Data per Desember 2022 menunjukan sekitar 50.502 orang penderita HIV/AIDS dengan pembagian Laki-laki 23.590 orang dan Perempuan 26.822 orang. Jalur penularan HIV/AIDS paling banyak ditemukan melalui hubungan seksual bebas yang ditularkan dari para pekerja seksual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Sumber: Hasil Analisis (2024)

### **2.6.1.3 Penanganan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Belum Optimal**

Provinsi Papua termasuk 5 (lima) daerah dengan angka kriminalitas tertinggi di Indonesia di tahun 2021. Sebagaimana yang dipublikasikan oleh BPS RI (2022), Crime Rate Papua di tahun 2021 mencapai 186 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tingkat nasional sebesar 90 per 100.000 penduduk. Dimana tingkat penyelesaian tindak pidana di Papua untuk tahun yang sama hanya mencapai 42,45%, paling rendah ketiga di Indonesia, dengan jumlah tindak pidana sebanyak 6.236 kasus. Kemudian dalam hal penanganan bencana daerah, Papua selama ini belum dapat menurunkan level resiko bencana dari kategori Sedang ke Rendah. Selama tahun 2016-2022 nilai IRB (Indeks Resiko Bencana) Papua berkisar diantara 122,15 - 125,31 poin, dimana hingga saat sekarang masih ada 5 daerah yang tergolong resiko tinggi, yaitu Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke dan Nabire. Daerah lainnya termasuk dalam kategori resiko sedang. Seluruh fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat keamanan dan ketertiban umum di Papua belum begitu optimal mendukung pelaksanaan pembangunan daerah selama ini.

### **2.6.1.4 Tingkat Kerawanan Politik dan Demokrasi yang Patut Diwaspadai**

Kebebasan berpendapat di Papua selama ini merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang ditandai oleh partisipasi, transparansi, dan politik yang akuntabel telah menjadi pusat tumbuhnya kebebasan berpendapat, baik di level individu maupun kelompok. Namun, kebebasan yang tidak terkendali saat ini telah mendistorsi demokrasi yang dimanfaatkan untuk menyerang kepentingan orang lain atau kelompok lain tanpa data dan informasi yang valid, ini tercermin dengan semakin maraknya hoax, hate speech, dan propaganda hitam yang cenderung negatif mengganggu pelaksanaan pembangunan di Papua. Sebagai contoh pada tahun 2023 Aparat Kepolisian Daerah Papua menemukan penyebaran berita bohong atau hoaks yang masif di wilayah Papua. Berdasarkan hasil pantauan selama 3 bulan (Januari-Maret 2023), ditemukan 2-3 berita hoaks setiap harinya tersebar di Papua.

Narasi yang disampaikan penyebar hoaks terindikasi ingin memprovokasi masyarakat sehingga memunculkan aksi yang dapat berdampak pada gangguan keamanan dan kriminalitas. Perkembangan teknologi digital dan kemudahan untuk mengakses berbagai media sosial (internet, Instagram, whatsapp, face book, dan lain-lain) menjadi salah satu pemicu beredarnya informasi yang bertendensi negatif tersebut.

Selanjutnya untuk aspek politik, tahun 2019 tingkat partisipasi pemilih di Papua juga dinilai paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 95,75%, akan tetapi tingkat kerawanan politik ternyata dinilai lebih tinggi dari rata-rata Indonesia dengan skor IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) sebesar 49,63 poin. Begitu juga di tahun 2020, tingkat kerawanannya malah meningkat menjadi 51,57 poin, dan terakhir di tahun 2024 diprediksi tingkat kerawanan politik di Papua semakin meningkat menjadi 57,27 poin yang dianggap merupakan tingkat kerawanan patut diwaspadai (Bawaslu RI, 2024).



### 2.6.1.5 Sarana Prasarana dan Konektivitas yang Belum Memadai

Dalam pembangunan daerah sangat diperlukan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, guna mendukung berjalannya aktivitas suatu daerah. Adapun konektivitas merupakan kondisi yang menyebabkan atau memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan saling terhubung untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sarana prasarana dan konektivitas seperti jalan, air bersih, sanitasi, pasar, terminal, dan lain-lain harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang merugikan masyarakat. Tabel II.99 menampilkan permasalahan pembangunan sarana prasarana dan konektivitas di Provinsi Papua.

**Tabel II.99 Permasalahan Pembangunan Sarana Prasarana dan Konektivitas di Provinsi Papua**

| No | Sarana Prasarana         | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Panjang jalan            | Total panjang jalan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 21.563 km, dimana sekitar 44,31% dalam kondisi rusak dan rusak berat, dan hanya 20,77% yang dalam keadaan baik, serta 34,93% yang dalam kondisi sedang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | Air bersih               | Selama periode 2011-2022 kondisi akses air bersih pada masyarakat di Provinsi Papua masih di bawah 50%, yang cenderung mengalami penurunan sekitar -0,33% per tahun yaitu dari 39,43% di tahun 2011 menjadi 35,77% tahun 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | Listrik                  | Tingkat elektrifikasi di Provinsi Papua masih belum memadai dan menyebar tidak merata. Merujuk pada data BPS Provinsi Papua, di tahun 2022 tercatat elektrifikasi penduduk baru mencapai 79,96% yang sebagian besar terdistribusi pada kota-kota besar seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Merauke, Timika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Rumah layak huni         | Kepemilikan rumah layak huni di Provinsi Papua selama tahun 2018-2022 mengalami penurunan sekitar -10,32% per tahun. Dimana pada tahun 2018 proporsi kepemilikan rumah layak huni sebesar 58,23%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 27,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah rumah tangga yang tinggi tidak diimbangi dengan penambahan ketersediaan rumah layak huni secara proporsional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Komunikasi dan informasi | Ketersediaan akses komunikasi dan informasi melalui internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Papua cukup banyak tersedia menara BTS (Base Transceiver Station) yang dapat memfasilitasi akses terhadap internet tersebut melalui jaringan 3g/4g. Tercatat pada tahun 2020 sudah ada 213 unit menara BTS di Papua, yang dikelola oleh Telkomsel sebanyak 175 unit, XL sebanyak 36 unit, dan Indosat sebanyak 2 unit (Kementerian Kominfo RI, 2022). Akan tetapi, dengan jumlah BTS sebanyak itu masih belum mampu untuk melayani kebutuhan akses internet yang memadai, karena hingga tahun 2022 berdasarkan publikasi dari Kemendesa-DT RI melalui rekomendasi IDM 2022 menunjukkan masih sekitar 93,34% kampung yang masyarakatnya belum dapat mengakses internet. |
| 6  | Transportasi darat       | Jumlah kendaraan bermotor di Papua, berdasarkan data BPS RI tahun 2021 sebanyak 449.709 unit kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor sekitar 87,16%, dan 12,84% merupakan mobil yang umumnya untuk angkutan barang. Khusus untuk terminal mobil penumpang umum dan barang, sampai saat ini jumlahnya sangat minim, kurang lebih hanya 7 unit yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Darat yaitu Terminal Tipe A sebanyak 1 unit, Tipe B sebanyak 2 unit, dan lainnya merupakan Tipe C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | Transportasi udara       | Di Papua peran transportasi udara sangat dominan dalam menghubungkan daerah-daerah terdalam atau terpencil, akibat sangat minimnya sarana prasarana transportasi darat yang tersedia. Kondisi ini akhirnya membuat biaya transportasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| No | Sarana Prasarana  | Deskripsi dan Data Dukung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | sangat mahal dan berpengaruh pada harga- harga barang. Contohnya untuk harga barang-barang konstruksi yang tercermin pada IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) yang dipublikasikan oleh BPS Papua (2023). Sepanjang tahun 2018-2022 misalkan, IKK Provinsi Papua selalu paling tinggi di Indonesia, dengan rata-rata nilai IKK sekitar 211,01 poin. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perhubungan RI, di tahun 2022 terdapat 151 bandara di Papua (di luar lapangan terbang yang tidak terdaftar di IATA), dimana hanya 2 Bandara dalam kategori internasional (Jayapura dan Biak Numfor), lainnya merupakan penerbangan domestik dan perintis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | Transportasi laut | Jumlah pelabuhan di Provinsi Papua yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah masih sangat terbatas, dimana sampai dengan tahun 2023 hanya ada 24 pelabuhan yang dikelola KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) dan KUPP (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan), yang lebih banyak pengelolaannya pada KSOP Kelas III (70,83%). Berhubung jumlah pelabuhan sangat kurang, menyebabkan pelayanan rute pelayaran perintis di Papua masih sangat terbatas. Sebagai misal di tahun 2023, dalam menyukseskan program Tol Laut di Papua terdapat 3 (tiga) kapal penumpang yang melayani rute pelayaran Papua, yaitu: (1) KM Sabuk Nusantara 58 dengan rute pelayaran: Jayapura – Teba – Puiwai – Waren – Serui – Biak – Napan Wainami – Nabire (Pulang Pergi); (2) KM Sabuk Nusantara 81 dengan rute pelayaran: Jayapura – Kaipuri – Waren – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari (Pulang Pergi); dan (3) KM Sabuk Nusantara 100 dengan rute pelayaran: Jayapura – Sarmi – Teba – Kurudu – Waren – Serui – Ansus – Wooi – Miosnum – Poom – Biak (Pulang Pergi). |

Sumber: Hasil Analisis (2024)

#### 2.6.1.6 Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal

Dalam hal lingkungan hidup, masih banyak masalah yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini, sebagaimana yang disinyalir oleh Kementerian LH Indonesia (2022) bahwa berdasarkan hasil analisis, isu lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Papua adalah: (1) kualitas air permukaan dan air laut, (2) perubahan ekstrem iklim global, serta (3) alih fungsi lahan dan hutan yang juga menyangkut aspek keanekaragaman hayati, pencemaran air dan pengelolaan persampahan/limbah. Mengacu pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) tahun 2021, nilai IKLH Provinsi Papua adalah sebesar 80,23 poin. Adapun faktor pembentuk IKLH yang skornya paling rendah adalah IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 57,83 poin. Secara umum rendahnya nilai IKA di Papua disebabkan oleh parameter fecal coliform. Hal ini berkaitan dengan sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang belum berjalan dengan baik. Masalah pencemaran air di Ekoregion Papua juga dipengaruhi oleh limbah kegiatan pertambangan/industri. Perubahan ekstrem pada iklim global turut berperan dalam menyebabkan berbagai permasalahan seperti kebakaran hutan, kekeringan, banjir, longsor, coral bleaching, dan lain-lain.

#### 2.6.1.7 Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

United Nations Development Programme atau UNDP mengemukakan bahwa governance atau tata kelola pemerintahan adalah bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua sektor. Governance bisa dikatakan baik (good governance) apabila

sumber daya dan problem yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien, yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik. Sehingga good governance adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik, atau menurut World Bank sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Untuk mengamati perkembangan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Papua selama ini, Tabel II.100 menampilkan beberapa indikator kinerja yang dapat menggambarkan hal tersebut.

**Tabel II.100 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Papua Tahun 2018-2022**

| Indikator Kinerja Tata Kelola Pemerintahan | 2018  | 2019 | 2020 | 2021          | 2022          |
|--------------------------------------------|-------|------|------|---------------|---------------|
| Indeks Pelayanan Publik                    |       |      |      | B-            | B-            |
| SAKIP                                      |       | B    | B    | B             | B             |
| Indeks SPBE                                | 2,240 |      |      |               | 1,876         |
| Indeks RB                                  |       | B    | CC   | CC            | CC            |
| Indeks SPI (Survei Penilaian Integritas)   |       |      |      | Sangat Rentan | Sangat Rentan |
| Opini BPK Terhadap LKPD                    | WTP   | WTP  | WTP  | WTP           | WDP           |

*Sumber: Menpan RB-RI dan KPK-RI (2023)*

Berdasarkan Tabel II.100 terlihat nilai IPP Provinsi Papua untuk tahun 2021 dan 2022 masing-masing berpredikat B- atau dinilai berkinerja “Baik Dengan Catatan”, yang berarti masih ada 3 (tiga) tahapan predikat lagi yang harus dilalui Pemerintah Provinsi Papua untuk memperoleh predikat tertinggi yaitu A atau berkinerja “Pelayanan Prima”.

Kemudian untuk penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, selama tahun 2019 sampai dengan 2022, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Papua hanya bertahan pada predikat B (Baik). Dimana untuk mencapai predikat SAKIP yang tertinggi AA (Sangat Memuaskan), pemerintah provinsi harus melalui tiga tahapan predikat lagi.

Selanjutnya untuk penilaian transparansi, dapat diamati pada nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik secara transparan. Terlihat angka indeks SPBE diantara tahun 2018 dan 2022 cenderung nilainya menurun, yaitu dari 2,240 menjadi 1,876 poin yang masuk dalam predikat Cukup. Pemerintah provinsi tampaknya harus bekerja keras dimasa mendatang untuk mencapai predikat Memuaskan dengan nilai SPBE antara 4,2 - 5,0.

Terkait dengan upaya mereformasi birokrasi yang dilakukan selama ini, terindikasi Pemerintah Provinsi Papua mengalami banyak kendala, sehingga terlihat nilai indeks RB mengalami penurunan dari predikat B (Baik) di tahun 2019 menjadi CC (Cukup) pada tahun 2020, dan sampai tahun 2022 predikatnya tidak pernah naik kembali ke B, selalu bertahan di CC. Padahal untuk memperoleh predikat RB tertinggi, yaitu Istimewa atau AA dengan

skor lebih dari 90 poin, pemerintah provinsi harus melalui 4 (empat) tingkatan predikat RB, yang masih sangat jauh jika dibandingkan predikat CC.

Dalam kaitannya menilai kinerja pemerintahan yang bersih, terdapat salah satu indikator kinerja yang sangat representatif untuk menunjukkan hal tersebut, yaitu Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk rilis tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa Indeks SPI Provinsi Papua masing-masing sebesar 58,04 dan 66,76 poin, keduanya masuk dalam kategori Sangat Rentan. Dimana untuk tahun 2022 KPK-RI menyebutkan tingkat kerawanan korupsi di Papua terbentuk dari 7 (tujuh) komponen penilaian risiko, yang dapat dilaporkan nilainya dari urutan terbesar hingga terendah, yaitu: (1) Risiko Penyalahgunaan Fasilitas Kantor sebesar 61%; (2) Risiko Pengelolaan PBJ sebesar 44%; (3) Risiko Trading In Influence sebesar 39%; (4) Risiko Nepotisme Dalam Pengelolaan SDM sebesar 35%; (5) Risiko Penyalahgunaan Perjalanan Dinas sebesar 31%; (6) Risiko Suap/ Gratifikasi sebesar 29%; dan (7) Risiko Jual/Beli Jabatan sebesar 18%.

Setelah berturut-turut 8 kali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Provinsi Papua dalam pelaporan keuangan tahun 2022 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil kurang memuaskan ini diakui pemerintah provinsi sebagai akibat transisi pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) yang berdampak pada kapasitas fiskal.

## 2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah ini, menyangkut pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap perangkat daerah. Permasalahan yang dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah.

**Tabel II.101 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

| No                                               | Urusan                                          | Permasalahan                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                | <b>Urusan Pendidikan</b>                        | a. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan, sesuai usia sekolah<br>b. Masih rendahnya mutu, kecukupan tenaga pendidik dan fasilitas dukungan pendidikan |
| 2                                                | <b>Urusan Kesehatan</b>                         | a. Masih tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI)<br>b. Rendahnya mutu, ketercukupan tenaga kesehatan dan fasilitas dukungan kesehatan             |
| 3                                                | <b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b> | Rendahnya ketersediaan akses transportasi, berbasis antar moda dalam mendukung ekonomi wilayah/daerah dan dalam kondisi baik                                                          |

| No                                                   | Urusan                                              | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                    | Urusan Perumahan dan Permukiman                     | Rendahnya ketersediaan rumah layak huni dengan tingkat kecukupan fasilitas yang mendukung kesehatan lingkungan                                                                                                                                                     |
| 5                                                    | Urusan Sosial                                       | Belum optimalnya pelayanan pada komunitas PMKS dan KAT                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                    | Urusan Tenaga Kerja                                 | Masih rendahnya angkatan kerja yang belum bekerja                                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                    | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | a. Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan<br>b. Masih rendahnya tingkat pengarusutamaan gender (PUG)                                                                                                                                      |
| 3                                                    | Urusan Pangan                                       | Masih tingginya prevalensi kerawanan dan ketidakcukupan konsumsi pangan masyarakat                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                    | Urusan Pertanahan                                   | Masih tingginya tingkat peralihan tanah adat bersertifikat maupun tidak bersertifikat                                                                                                                                                                              |
| 5                                                    | Urusan Lingkungan Hidup                             | Masih tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan pada intensitas penurunan emisi                                                                                                                     |
| 6                                                    | Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil  | Masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan dan NIK                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                                    | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung          | Belum optimalnya kontribusi kampung terhadap pertumbuhan ekonomi                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                                    | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Belum optimalnya advokasi/sarana pengendalian penduduk melalui KB aktif                                                                                                                                                                                            |
| 9                                                    | Urusan Perhubungan                                  | a. Masih kurangnya tingkat ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat, laut maupun udara<br>b. Masih kurangnya rasio ketersediaan jalan dengan kendaraan                                                                                                     |
| 10                                                   | Urusan Komunikasi dan Informatika                   | a. Masih tingginya angka penggunaan telepon seluler pada rumah tangga Penduduk<br>b. Belum optimalnya pelayanan internet bagi penduduk dan rumah tangga di kelurahan/kampung<br>c. Masih rendahnya kepemilikan atau penggunaan computer bagi rumah tangga penduduk |
| 11                                                   | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah           | a. Belum optimalnya tingkat ketersediaan koperasi aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kampung<br>b. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas<br>c. Masih rendahnya usaha mikro yang menjadi wirausaha                                                       |
| 12                                                   | Urusan Penanaman Modal                              | a. Belum optimalnya tingkat pelayanan publik sesuai regulasi untuk mendukung penanaman modal<br>b. Masih rendahnya nilai investasi baru per tahun<br>c. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah                    |
| 13                                                   | Urusan Olah Raga dan Pemuda                         | a. Masih rendahnya ketersediaan sarana olah raga dan tingkat partisipasi pemuda sesuai cabor<br>b. Belum optimalnya tingkat pembinaan untuk atlit berprestasi dan keberlanjutan di jenjang organisasi keolahragaan                                                 |

| No                                        | Urusan                                | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                        | Urusan Kebudayaan                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya penanganan terhadap nilai-nilai budaya maupun peninggalan situs bersejarah</li> <li>b. Rendahnya tingkat promosi budaya dan ketersediaan tenaga bersertifikat pengelola budaya</li> <li>c. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya</li> <li>d. Masih rendahnya presentase komunitas atau sanggar kesenian yang difasilitasi</li> </ul>                                   |
| 15                                        | Urusan Perpustakaan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya tingkat pelayanan publik</li> <li>b. Masih kurangnya ketersediaan literasibaru (terupdate / terkini)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16                                        | Urusan Kearsipan                      | Belum optimalnya tingkat pelayanan publik dan ketersediaan tenaga khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Urusan Pilihan</b>                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                         | Urusan Pertanian                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan peternakan per tahun</li> <li>b. Masih rendahnya kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian</li> <li>c. Masih tingginya kasus penyakit hewan menular</li> <li>d. Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</li> <li>e. Belum optimalnya pendataan kelompok tani</li> </ul>              |
| 2                                         | Urusan Kelautan dan Perikanan         | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih rendahnya produksi perikanan per tahun</li> <li>b. Masih rendahnya kegiatan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana perikanan dan kelautan</li> <li>c. Belum optimalnya pendataan kelompok tani ikan</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 3                                         | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | Rendahnya tingkat penggunaan energi baru terbarukan (EBT) bagi rumah tangga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4                                         | Urusan Perencanaan                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepatuhan pada konsistensi dokumen perencanaan masih rendah</li> <li>b. Capaian realisasi indikator-indikator dan target serta realisasi menurut prioritas masih rendah</li> <li>c. Capaian kinerja anggaran serta fisik OPD tidak seimbang (<i>balance</i>)</li> <li>d. Rendahnya tingkat pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan daerah secara berkala</li> </ul> |
| <b>Urusan Kekhususan</b>                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kontribusi Pelaksanaan Otsus Papua</b> |                                       | Belum optimalnya implementasi pemanfaatan dana Otsus dengan diiringi asas transparansi dan akuntabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



# BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

Arah kebijakan ekonomi daerah dimaksudkan sebagai panduan dalam menyelesaikan isu strategis dan permasalahan ekonomi daerah sehingga dapat menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang lebih baik guna memacu pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian secara global, nasional, dan regional. Kerangka ekonomi daerah adalah suatu rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah. Rencana ini mencakup arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi daerah, dan kerangka pendanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerangka ekonomi daerah meliputi: **Faktor Eksternal** (Kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, Kebijakan pemerintah provinsi, Perkembangan perekonomian daerah sekitar, Dinamika geopolitik global, Perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama seperti China dan India, dan Transisi global menuju energi hijau), **Faktor Internal** (Kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, Upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, Penyediaan infrastruktur pertanian, Penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, Perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, Pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum.

#### 3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 sebesar 5,03 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,05 persen. Dari sisi lapangan usaha, maka Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,80 persen, kemudian diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,69 persen, serta Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sedangkan pertumbuhan yang terendah adalah Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebesar 0,67 persen. Selanjutnya, lapangan usaha yang berkontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional adalah Industri Pengolahan sebesar 18,98 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,07 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,61 persen, Konstruksi sebesar 10,09 persen, serta Pertambangan dan Pengalihan sebesar 9,15 persen.

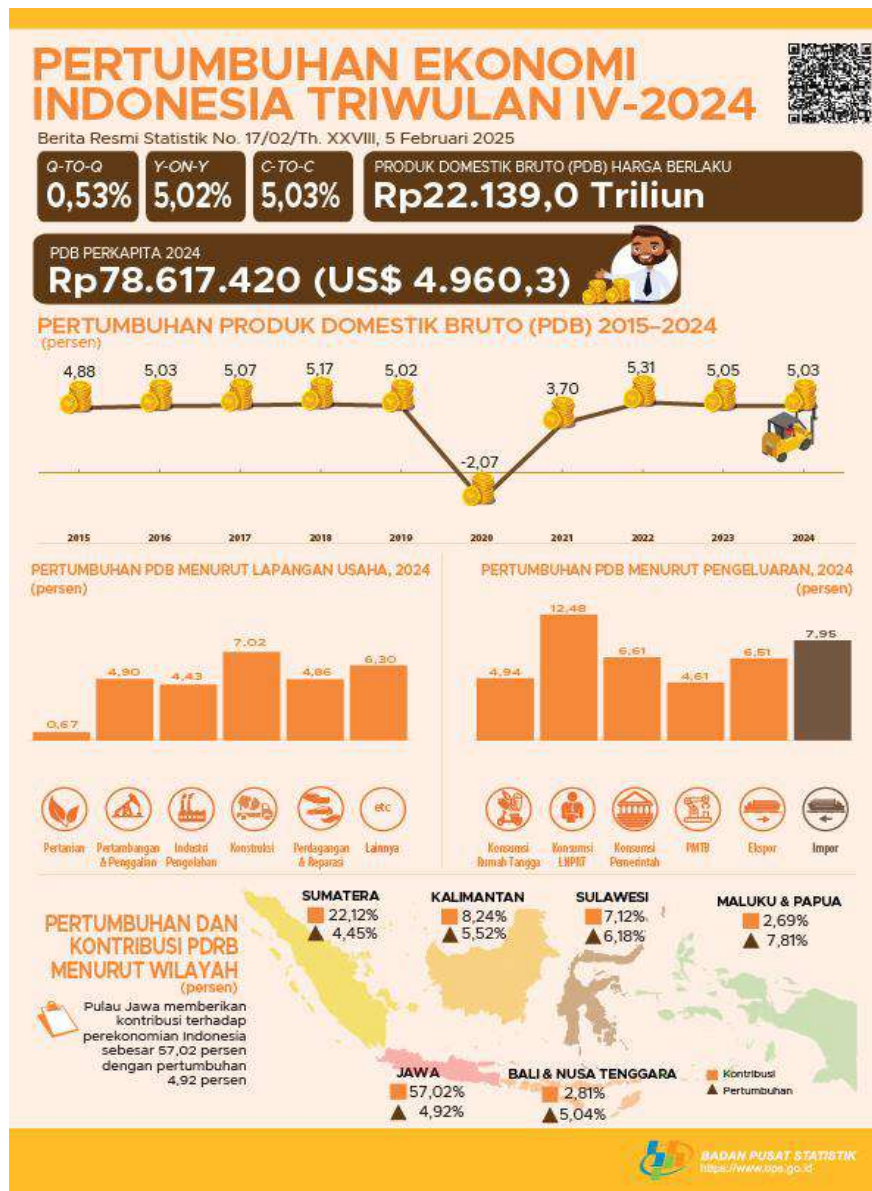
Dari sisi pengeluaran, maka komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 adalah PK-LNPRT sebesar 12,48 persen seiring dengan peningkatan aktifitas selama pelaksanaan Pemilu dan juga Pilkada. Kemudian diikuti oleh komponen Impor sebesar 7,95 persen dan Konsumsi Pemerintah sebesar 6,61 persen. Sedangkan yang terendah adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,61 persen. Komponen yang memberikan kontribusi terbesar adalah Konsumsi Rumah Tangga sebesar 54,04 persen dan diikuti oleh PMTB sebesar 29,15 persen.

Inflasi nasional tahun 2024 sebesar 1,57 persen atau lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,61 persen. Hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu makanan, minuman, dan tembakau (1,90 persen); pakaian dan alas kaki (1,16 persen); perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,59 persen); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (1,04 persen); kesehatan (1,93 persen); rekreasi, olahraga, dan budaya (1,17 persen); Pendidikan (1,94 persen); penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,48 persen); perawatan pribadi dan jasa lainnya (7,02 persen). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah kelompok transportasi (0,30 persen) serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,27 persen).

Tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen atau menurun 0,33 poin dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 9,36 persen. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta jiwa atau menurun 0,68 juta jiwa jika dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 25,90 juta jiwa. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional tahun 2024 sebesar 4,91 persen atau turun 0,41 poin jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 5,32 persen. Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini, di September 2024 sebesar 0,381 atau meningkat dibandingkan Maret 2024 sebesar 0,379 dan menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,388.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 sebesar 6,3 persen, dengan sasaran untuk ekonomi Kawasan Barat Indonesia sebesar 6,1 persen dan Kawasan Timur Indonesia sebesar 7,1 persen. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan wilayah antar Provinsi maupun antara pusat dan daerah sehingga sasaran pembangunan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan) akan dilakukan guna percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kemudian, peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, swasembada energi melalui ekonomi hijau, peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penananaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara merupakan sejumlah strategi dan langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.

Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 17/02/Th.XVIII, BPS

Pemerintah akan terus memantau risiko stagnansi perekonomian global yang diperkirakan masih berlanjut sepanjang tahun 2024. APBN 2024 akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan sebesar 5,2% dapat tercapai. Selain itu, berbagai upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan

sustainable dalam jangka menengah – panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5 – 3,5 persen. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

**Tabel III.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2026**

| No | Indikator                         | Satuan    | Target 2026     |
|----|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi               | %, (yoy)  | 5,5 – 6,0       |
| 2. | Inflasi                           | %, (yoy)  | 1,5 – 3,5       |
| 3. | Nilai Tukar Rupiah                | Rp/USD    | 14.900 – 15.400 |
| 4. | Yield SBN 10 Tahun                | %         | 6,3 – 7 3       |
| 5. | Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP | USD/barel | 70 – 90         |
| 6. | Lifting Minyak                    | rbph      | 593 – 621       |
| 7. | Lifting Gas                       | rbsmph    | 1.087 – 1.151   |

*Sumber : Kesepakatan pada rapat koordinasi antar K/L dan Bank Indonesia tanggal 6 Mei 2024*

Secara keseluruhan, perbaikan ekonomi domestik akan didorong oleh perbaikan pada sektor usaha terkait ekspor sebagai tanggapan terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi di negara maju, yang diharapkan akan meningkatkan permintaan ekspor. Diperkirakan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat, konsumsi rumah tangga akan tumbuh secara positif. Begitu pula, konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat untuk mencapai target pembangunan yang tertunda sejak awal masa pandemi. Sementara itu, perbaikan pada sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, dan hiburan diperkirakan akan pulih secara bertahap setelah pemerintah membuka jalur *travel bubble* bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung.

**Tabel III.3 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026**

| No  | Indikator                                                          | Satuan            | Target 2026      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1.  | Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% , yoy): Akhir Periode | %                 | 1,5–3,5 a)       |
| 2.  | Nilai Tukar Rupiah                                                 | Rp/US\$           | 15.000–15.400 b) |
| 3.  | Cadangan Devisa                                                    | US\$ miliar       | 149,5–153,7      |
| 4.  | Cadangan Devisa                                                    | dalam bulan impor | 6,1–6,1 c)       |
| 5.  | Neraca Transaksi Berjalan                                          | % PDB             | (0,4)–(0,2) d)   |
| 6.  | Kontribusi PDB Industri Pengolahan                                 | %                 | 19,9–20,0        |
| 7.  | Kontribusi PDB Pariwisata                                          | %                 | 4,60             |
| 8.  | Nilai Devisa Pariwisata                                            | miliar US\$)      | 22,10            |
| 9.  | Penerimaan Perpajakan                                              | % PDB             | 10,70–11,20      |
| 10. | Keseimbangan Primer                                                | % PDB             | 0,00–0,00 c)     |
| 11. | Surplus/Defisit APBN                                               | % PDB             | (2,45)–(2,80) d) |
| 12. | Stok Utang Pemerintah                                              | % PDB             | 39,78–39,98      |
| 13. | Pertumbuhan Investasi                                              | %                 | 6,5–7,8          |
| 14. | Nilai Realisasi PMA dan PMDN                                       | Triliun Rp        | 1.868,2–1.905,6  |
| 15. | Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder                       | Triliun Rp        | 805,5–842,2      |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024.

Keterangan: a) Keputusan High Level Meeting Pengendalian Inflasi Tingkat Menteri pada Januari 2024 dan sasaran inflasi dalam RPJPN Tahun 2026-2045; b) Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro tanggal 7 Februari 2024; c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma; serta d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif

## 3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah Provinsi Papua

### 3.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kondisi perekonomian daerah yang telah dijabarkan maka perekonomian Provinsi Papua di tahun 2026 diperkirakan akan terus bertumbuh atau meningkat karena didorong oleh peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat dan juga didukung oleh pemulihan pada sektor-sektor penggerak ekonomi di Provinsi Papua yang diperkirakan akan terus bertumbuh positif di tahun 2026. Peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi tersebut tentunya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga terjadi peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan inflasi dari sisi permintaan. Selain itu, diharapkan akan berdampak pula pada penurunan tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan dan juga menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat. Seperti terlihat dalam gambar 3.2, Perekonomian Provinsi Papua pada Triwulan III tahun 2024 (yoy) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 1,66 persen.

Seperti terlihat dalam gambar 3.3, Pertumbuhan ekonomi Papua tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 4,58 persen. Dari sisi produksi, dari tujuh belas lapangan usaha, seluruhnya mengalami pertumbuhan, kecuali Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,69



persen; diikuti Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,19 persen; dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 7,28 persen.

**Gambar III.4 Pertumbuhan PDRB Papua Triwulan III-2022 – Triwulan III-2024**



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 218/11/94/Th.XVII, BP

Kinerja ekonomi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada triwulan III-2024 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, ditunjukkan oleh kontraksi sebesar -1,94 persen. Kontraksi ini sejalan dengan produksi bijih logam PT Freeport yang lebih rendah pada triwulan ini.

Struktur perekonomian Papua dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada triwulan III- 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi mencapai 42,26 persen. Selanjutnya Lapangan Usaha Konstruksi dengan kontribusi terbesar kedua yang sebesar 12,82 persen. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi kontribusi terbesar ketiga yang mencapai 9,37 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut menyokong perekonomian Papua hingga 64,46 persen pada triwulan III-2024.

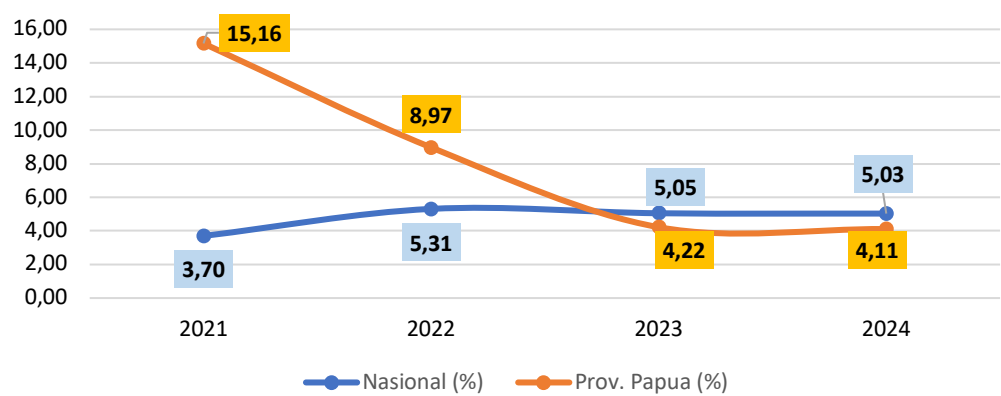
Pertumbuhan ekonomi nasional periode tahun 2022-2024 cenderung mengalami perlambatan seiring dengan perlambatan ekonomi global. Hal ini menggambarkan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi lebih berat. Namun demikian, konsistensi tren pertumbuhan yang berada di angka 5,03 persen di tahun 2024 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat dan masih terjaganya kinerja perekonomian Indonesia ditengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang sebesar 4,11 persen di tahun 2024, sedikit melambat dibandingkan tahun 2023 (4,22 persen). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2024 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun yang sama. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan sektor-sektor utama yang mulai melambat dari tahun sebelumnya. Namun demikian, prospek penguatan pada sektor-sektor yang menjadi



unggulan Provinsi Papua diharapkan dapat menahan kontraksi yang lebih dalam serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakpastian global yang masih berlangsung tentunya juga menjadi faktor penahan pertumbuhan di Provinsi Papua.

Gambar III.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Papua  
Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2024 didorong oleh pertumbuhan komponen Konsumsi LNPRT (13,96 persen); Konsumsi Rumah Tangga (4,22 persen); serta Ekspor Barang dan Jasa (3,51 persen). Pertumbuhan komponen Konsumsi LNPRT yang tinggi disebabkan oleh peningkatan aktifitas partai politik menjelang Pemilu 2024. Sedangkan yang pertumbuhan terendah adalah komponen Impor Barang dan Jasa (-2,03 persen).

Tabel III.6 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen)

| NO | PENGELUARAN                     | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        |
|----|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Konsumsi Rumah Tangga           | 1,22         | 5,39        | 3,84        | 4,22        |
| 2  | Konsumsi LNPRT                  | 4,95         | 4,59        | 6,14        | 13,96       |
| 3  | Konsumsi Pemerintah             | 3,13         | 0,38        | 3,68        | 1,86        |
| 4  | Pembentukan Modal Tetap Bruto   | 9,73         | 2,36        | 2,16        | 2,20        |
| 5  | Perubahan Inventori             | 0            | 0           | 0           | 0           |
| 6  | Ekspor Barang dan Jasa          | 42,69        | 32,12       | -2,61       | 3,51        |
| 7  | Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 7,89         | 15,09       | 5,54        | -2,03       |
|    | <b>PDRB</b>                     | <b>15,16</b> | <b>8,97</b> | <b>4,22</b> | <b>4,11</b> |

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Papua 2020-2024, BPS Provinsi Papua  
Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

Struktur perekonomian Provinsi Papua menurut pengeluaran selama periode 2021-2024 tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan. Untuk tahun 2024, kontribusi terbesar berasal dari komponen Konsumsi Rumah Tangga (55,44 persen) dan diikuti oleh Impor Barang dan Jasa (53,87 persen), Pembentukan Modal Tetap Bruto (38,90 persen), serta Konsumsi Pemerintah (31,18 persen).

Komposisi komponen Konsumsi Rumah Tangga didominasi oleh konsumsi makanan masyarakat di Provinsi Papua (54,76 persen) dan sisanya berasal dari konsumsi nonmakanan. Sementara itu, kontribusi komponen Impor Barang dan Jasa yang besar menunjukkan bahwa banyak produk konsumsi yang berasal dari impor dan bukan berasal dari produk yang dihasilkan sendiri di Provinsi Papua.

**Tabel III.7 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen)**

| NO | PENGELUARAN                     | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|----|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Konsumsi Rumah Tangga           | 44,04         | 43,49         | 54,69         | 55,44         |
| 2  | Konsumsi LNPRT                  | 2,04          | 1,99          | 5,41          | 5,99          |
| 3  | Konsumsi Pemerintah             | 19,71         | 18,17         | 31,39         | 31,18         |
| 4  | Pembentukan Modal Tetap Bruto   | 32,82         | 31,92         | 39,49         | 38,90         |
| 5  | Perubahan Inventori             | 0,23          | -0,97         | 3,26          | 1,04          |
| 6  | Ekspor Barang dan Jasa          | 46,17         | 55,14         | 21,52         | 21,32         |
| 7  | Dikurangi Impor Barang dan Jasa | 45,01         | 49,75         | 55,77         | 53,87         |
|    | <b>PDRB</b>                     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

*Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Papua 2020-2024 (BPS Provinsi Papua)*

*Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)*

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama periode tahun 2021-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Untuk tahun 2024, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif walaupun ada beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,74 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,2 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,73 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,14 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,91 persen. Sedangkan lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah (pertumbuhan terendah) adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,80 persen.

**Tabel III.8 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen)**

| NO | LAPANGAN USAHA                                                | 2021  | 2022  | 2023  | 2024 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 1,61  | 2,27  | 1,90  | 0,80 |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                   | 40,80 | 16,12 | 2,97  | 4,82 |
| 3  | Industri Pengolahan                                           | -0,21 | 0,08  | 1,34  | 5,26 |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 5,77  | 6,77  | 4,64  | 8,74 |
| 5  | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 3,82  | 5,86  | 0,06  | 2,9  |
| 6  | Konstruksi                                                    | 4,33  | 4,26  | 3,25  | 1,89 |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 5,72  | 4,78  | 5,93  | 5,91 |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                  | 3,66  | 16,95 | 9,11  | 6,73 |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 1,44  | 4,05  | 3,15  | 4,47 |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                      | 3,09  | 5,46  | 3,84  | 6,14 |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 2,37  | 5,04  | 12,81 | 2,55 |
| 12 | Real Estate                                                   | 7,04  | 4,76  | 5,83  | 4,47 |
| 13 | Jasa Perusahaan                                               | 1,96  | 3,70  | 8,14  | 3,08 |

| NO | LAPANGAN USAHA                                                  | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | -0,95        | 2,33        | 1,51        | 7,2         |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                 | -4,79        | 1,60        | 4,45        | 3,10        |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,25         | 0,05        | 3,65        | 3,46        |
| 17 | Jasa lainnya                                                    | 3,54         | 3,02        | 3,88        | 1,85        |
|    | <b>PDRB</b>                                                     | <b>15,16</b> | <b>8,97</b> | <b>4,22</b> | <b>4,11</b> |

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Papua

Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

Meningkatnya permintaan akan listrik untuk menunjang segala aktivitas di Provinsi Papua pada tahun 2024 menyebabkan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas bertumbuh paling tinggi. Sementara itu, untuk lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib disebabkan karena adanya pembayaran gaji ketigabelas, THR, dan tunjangan kinerja penuh (100 persen). Untuk lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor disebabkan karena peningkatan pembukaan gerai/pertokoan baru di tahun 2024 dan juga disebabkan oleh kebutuhan akan transportasi yang tinggi dalam segala aktifitas di Provinsi Papua, terutama darat maupun udara sebagai penggerak aktifitas perekonomian. Selain itu, disebabkan oleh penggunaan paket data dan jaringan internet yang tinggi dan pelaksanaan pilkada juga mempengaruhi pertumbuhan lapangan usaha terkait.

Lapangan usaha Industri Pengolahan juga mengalami pertumbuhan yang tinggi sebesar 5,26 persen di tahun 2024 atau meningkat 3,92 poin jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 1,34 persen. Peningkatan ini disebabkan karena diselenggarakannya berbagai acara besar seperti berbagai festival dan lain sebagainya sehingga berpengaruh pada UMKM.

Selama periode tahun 2023-2024 pasca DOB, struktur perekonomian Provinsi Papua didominasi oleh kontribusi dari lapangan usaha Konstruksi (20,09 persen); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,24 persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,09 persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (11,87 persen); dan Transportasi dan Pergudangan (8,29 persen). Sementara itu, lapangan usaha yang memiliki kontribusi terkecil adalah Pengadaan Listrik dan Gas (0,07 persen).

Tingkat pembangunan serta nilai transaksi perdagangan yang tinggi (terutama perdagangan grosir) dan juga sebagai pemasok terbesar kebutuhan sehari-hari untuk Kabupaten-Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya kontribusi lapangan usaha Konstruksi serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di tahun 2024. Sementara itu, kontribusi dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai kontributor terbesar ketiga terhadap perekonomian Provinsi Papua tahun 2024 berasal dari dominasi kontribusi sub kategori perikanan (57,05 persen). Hal ini

disebabkan karena terdapat beberapa kawasan dengan potensi perikanan dan kelautan yang berlimpah serta iklim yang mendukung sub sektor tersebut.

**Tabel III.9 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen)**

| NO | LAPANGAN USAHA                                                  | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                              | 10,83         | 10,30         | 14,46         | 14,09         |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                     | 36,82         | 38,60         | 0,83          | 0,83          |
| 3  | Industri Pengolahan                                             | 1,80          | 1,69          | 2,93          | 2,98          |
| 4  | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,04          | 0,04          | 0,06          | 0,07          |
| 5  | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang       | 0,04          | 0,04          | 0,10          | 0,1           |
| 6  | Konstruksi                                                      | 13,86         | 13,75         | 20,41         | 20,09         |
| 7  | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 9,37          | 9,20          | 15,96         | 16,24         |
| 8  | Transportasi dan Pergudangan                                    | 3,84          | 4,42          | 8,05          | 8,29          |
| 9  | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 0,67          | 0,64          | 1,27          | 1,31          |
| 10 | Informasi dan Komunikasi                                        | 3,75          | 3,57          | 6,10          | 5,98          |
| 11 | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 1,52          | 1,55          | 3,75          | 3,62          |
| 12 | Real Estate                                                     | 2,67          | 2,54          | 4,70          | 4,65          |
| 13 | Jasa Perusahaan                                                 | 1,07          | 1,03          | 2,46          | 2,43          |
| 14 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 9,34          | 8,53          | 11,60         | 11,87         |
| 15 | Jasa Pendidikan                                                 | 1,66          | 1,56          | 2,68          | 2,71          |
| 16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,70          | 1,58          | 2,83          | 2,92          |
| 17 | Jasa lainnya                                                    | 1,03          | 0,97          | 1,81          | 1,81          |
|    | <b>PDRB</b>                                                     | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

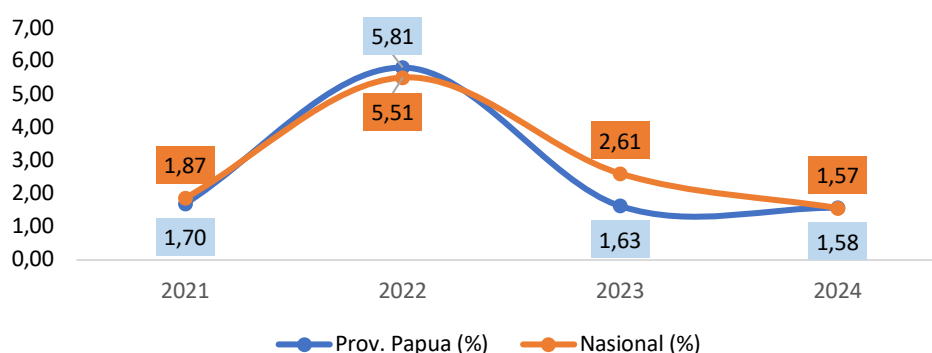
Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2025, BPS Provinsi Papua

Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

### 3.1.2.2 Inflasi

Inflasi Provinsi Papua selama periode 2021-2024 mengalami fluktuasi dengan lonjakan tertinggi terjadi di tahun 2022 yang sebesar 5,81 persen. Sedangkan yang terendah terjadi di tahun 2024 yang sebesar 1,58 persen. Untuk tahun 2024, kenaikan laju inflasi terjadi di bulan Mei pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,76 persen.

**Gambar III.10 Inflasi Nasional dan Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen)**



Sumber: BPS Provinsi Papua

### 3.1.2.3 Tingkat Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua pada periode Maret 2024 sebesar 152,91 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 17,26 persen. Jumlah ini meningkat sebesar 3,36 ribu jiwa dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 149,55 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin terbesar berada di perdesaan sebesar 119,24 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 33,67 persen. Sedangkan yang terendah di perkotaan sebesar 33,68 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,33 persen.

Garis kemiskinan Provinsi Papua tahun 2024 sebesar Rp 674.371,-/kapita/orang, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 462.491,-/kapita/orang (71,85 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp211.880,-/kapita/orang (31,42 persen). Untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Papua tahun 2024 sebesar 4,01. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,091 dan untuk perdesaan sebesar 8,387. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,251. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan sebesar 0,281 dan untuk perdesaan sebesar 2,708.

**Tabel III.11 Indikator Kemiskinan dan Persentasi Penduduk Miskin Provinsi Papua Tahun 2021-2024**

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (persen) | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) | Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 2021  | 151,82                             | 26,86                               | 591.959                            | 5,60                             | 1,69                             |
| 2022  | 153,11                             | 26,56                               | 629.175                            | 6,16                             | 2,10                             |
| 2023  | 149,55                             | 26,03                               | 686.469                            | 6,25                             | 2,15                             |
| 2024  | 152,91                             | 17,26                               | 674.371                            | 4,01                             | 1,25                             |

Sumber: BPS Provinsi Papua

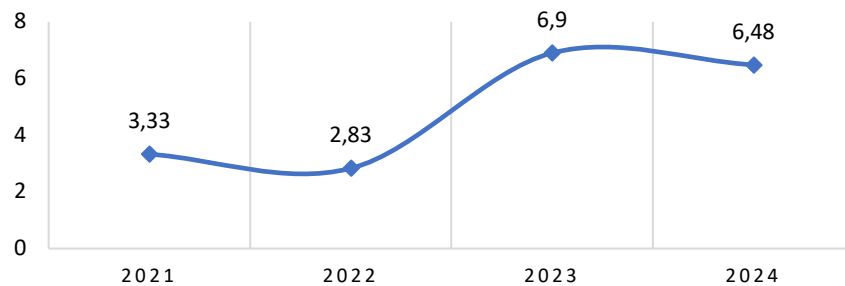
Keterangan: - Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

- Data jumlah penduduk miskin tahun 2021-2024 merupakan gabungan dari data 9 Kabupaten/Kota

### 3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Agustus 2024 sebesar 6,48 persen atau menurun sebesar 0,42 poin dibandingkan Agustus 2023 (6,9 persen). Penurunan ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua atau tenaga kerja yang terserap oleh pasar kerja semakin meningkat. TPT berdasarkan daerah tempat tinggal, pada tahun 2024 di perkotaan sebesar 7,61 persen atau menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 8,71 persen dan di perdesaan sebesar 4,35 atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,26. Hal ini mengindikasikan terjadinya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di perkotaan yang kemungkinan disebabkan karena terjadinya peningkatan aktifitas perekonomian dan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor industri, perdagangan dan jasa. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di perdesaan justru mengalami tantangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan lapangan kerja di sektor pertanian, migrasi tenaga kerja muda ke perkotaan, serta kurangnya investasi di sektor perdesaan.

**Gambar III.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Tahun 2021-2024 (persen)**



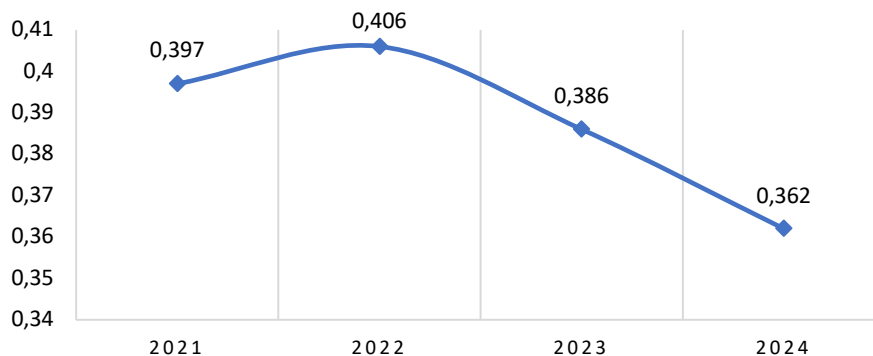
Sumber: BPS Provinsi Papua

Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

### 3.1.2.5 Rasio Gini

Tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Papua yang diukur dengan rasio gini selama periode 2021-2024 menunjukkan kondisi yang terus membaik. Rasio gini Provinsi Papua tahun 2024 sebesar 0,362 atau turun 0,024 poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,386. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin kecil.

**Gambar III.13 Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2021-2024**



Sumber: BPS Provinsi Papua

Keterangan: Data tahun 2023 dan 2024 merupakan data pasca DOB (9 Kabupaten/Kota)

Berdasarkan uraian kondisi perekonomian daerah Provinsi Papua diatas, maka perekonomian Provinsi Papua tahun 2026 diproyeksikan sebagai berikut.

**Tabel III.14 Target Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2026**

| No | Indikator Kinerja                | Target RPD 2024-2026 | Realisasi 2024 | Target RKPD 2026 |
|----|----------------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)     | 6,9 - 7,2            | 4,11           | 4,02-4,15        |
| 2  | PDRB Per Kapita (juta)           | -                    | -              | 53.60 - 100.27   |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi         | -                    | -              | 0.39 - 0.42      |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 4                    | 6,48           | 6,20-6,30        |
| 5  | Tingkat Kemiskinan (%)           | 16,25-16,78          | 17,26          | 16,25-16,78      |



| No | Indikator Kinerja                       | Target RPD 2024-2026 | Realisasi 2024 | Target RKPD 2026 |
|----|-----------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 6  | Rasio Gini (indeks)                     | 0,362 - 0,368        | 0,362          | 0,362-0,368      |
| 7  | Indeks Modal Manusia                    | -                    | -              | 0,45             |
| 8  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)      | 98,23                | 98,16          | 32,50            |
| 9  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | -                    | -              | 83,92            |

Sumber: BPS Provinsi Papua

Diharapkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua tahun 2026, yang diproyeksikan dikisaran 4,02-4,15 persen akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan. Selain itu juga diharapkan akan berdampak pada menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat, yang diukur dengan rasio gini.

Pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2026 diarahkan pada percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif melalui akselerasi potensi unggulan daerah. Untuk pembangunan perekonomian Provinsi Papua tahun 2026 diarahkan pada pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi unggulan lokal dan juga berbasis kampung, terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan pariwisata yang menjadi potensi dan keunggulan Provinsi Papua; pengembangan pariwisata berbasis wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya; pengembangan dan optimalisasi pertambangan dan energi baru terbarukan (EBT); optimalisasi potensi-potensi PAD; peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan; peningkatan daya saing tenaga kerja; serta penelaahan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota agar sesuai dengan pola dan struktur ruang dengan berbasis pada komoditas yang sesuai.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Analisis mengenai situasi dan proyeksi keuangan daerah merupakan langkah penting dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai proyek pembangunan serta memberikan perhatian yang tepat pada strategi isu-isu. Melalui analisis keuangan daerah yang cermat, akan dapat dirumuskan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Komponen keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, pengeluaran atau belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang harus dikelola dengan tertib, memenuhi prinsip hukum, efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban, serta memperhatikan keadilan dan kepentingan masyarakat.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumberdaya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang dan serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah. Komponen keuangan daerah (pendapatan,

belanja, dan pembiayaan daerah) harus dikelola dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sementara itu, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan keuangan daerah yang didalamnya meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, dalam pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah guna mendukung pembangunan daerah, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi pendapatan. Secara khusus, upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mendapatkan perhatian khusus karena kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua mengalami penurunan pasca DOB. Selain itu, masih ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah Provinsi Papua yang berkonsekuensi pada pajak daerah, skema bagi hasil pajak daerah terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk memperluas ruang fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Tabel III. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 – 2024 (Rp juta rupiah)**

| NO           | URAIAN                                                       | 2022 (Rp)                 | 2023 (Rp)                | 2024 (Rp)                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>11.040.109.011.239</b> | <b>3.733.670.617.987</b> | <b>3.059.390.892.686</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>2.226.754.654.927</b>  | <b>770.916.168.972</b>   | <b>674.493.008.029</b>   |
| 1.1.1        | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 1.235.493.977.265         | 518.641.672.099          | 410.938.884.207          |
| 1.1.2        | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 17.713.806.139            | 17.180.906.474           | 42.390.932.062           |
| 1.1.3        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 766.991.557.636           | 45.177.723.145           | 55.982.500.244           |
| 1.1.4        | Lain-lain PAD yang sah                                       | 206.555.313.887           | 189.915.867.254          | 165.180.691.515          |
| <b>1.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>8.808.887.290.115</b>  | <b>2.444.887.208.362</b> | <b>2.381.548.527.733</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>          | <b>5.004.746.236.115</b>  | <b>1.393.688.550.362</b> | <b>1.073.134.997.524</b> |
| 1.2.1.1      | Dana Bagi Hasil                                              | 1.938.939.483.801         | 372.057.176.155          | 136.018.309.000          |
| 1.2.1.4      | Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | 2.314.812.589.728         | 823.921.492.505          | 778.046.831.000          |
| 1.2.1.7      | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                              | 366.834.632.121           | 178.036.462.636          | 139.275.261.124          |

| NO      | URAIAN                                     | 2022 (Rp)                | 2023 (Rp)                | 2024 (Rp)                |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.2.1.8 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik        | 384.159.530.465          | 19.673.419.066           | 19.794.596.400           |
| 1.2.2   | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b> | <b>3.804.141.054.000</b> | <b>1.051.198.658.000</b> | <b>1.088.617.906.000</b> |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus                        | 1.580.796.000.000        | 470.837.581.000          | 0                        |
| 1.2.2.3 | Dana Insentif Daerah                       | 11.485.688.000           | -                        | 0                        |
| 1.2.2.4 | Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)          | 2.211.859.366.000        | 580.361.077.000          | 0                        |
| 1.2.2.5 | Dana Otonomi Khusus dan DTI                | -                        | -                        | 1.088.617.906.000        |
| 1.2.3   | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>    |                          |                          | <b>219.795.624.209</b>   |
| 1.2.3.1 | Bantuan Keuangan                           | -                        | -                        | 219.795.624.209          |
| 1.3     | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>       | <b>4.467.066.197</b>     | <b>517.867.240.653</b>   | <b>3.349.356.924</b>     |
| 1.3.1   | Pendapatan Hibah                           | 4.396.650.135            | 486.710.723.915          | 1.985.543.408            |
| 1.3.2   | Pendapatan Lainnya                         | 70.416.062,00            | 31.156.516.738,00        | 1.363.813.516,00         |

Sumber: BPKAD Provinsi Papua (Audited)

**Tabel III. 2 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 – 2024**

| NO         | URAIAN                                                       | 2022          | 2023          | 2024         |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>20,17</b>  | <b>20,65</b>  | <b>22,05</b> |
| 1.1.1      | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 55,48         | 67,28         | 60,93        |
| 1.1.2      | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 0,80          | 2,23          | 6,28         |
| 1.1.3      | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 34,44         | 5,86          | 8,30         |
| 1.1.4      | Lain-lain PAD yang sah                                       | 9,28          | 24,64         | 24,49        |
| <b>1.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>79,79</b>  | <b>65,48</b>  | <b>77,84</b> |
| 1.2.1      | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>          | <b>56,81</b>  | <b>57,00</b>  | <b>45,06</b> |
| 1.2.1.1    | Dana Bagi Hasil                                              | 38,74         | 26,70         | 12,67        |
| 1.2.1.4    | Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | 46,25         | 59,12         | 72,50        |
| 1.2.1.7    | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                              | 7,33          | 12,77         | 12,98        |
| 1.2.1.8    | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                          | 7,68          | 1,41          | 1,84         |
| 1.2.2      | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA</b>                   | <b>43,19</b>  | <b>43,00</b>  | <b>45,71</b> |
| 1.2.2.1    | Dana Otonomi Khusus                                          | 41,55         | 44,79         | 0,00         |
| 1.2.2.3    | Dana Insentif Daerah                                         | 0,30          | -             | 0,00         |
| 1.2.2.4    | Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)                            | 58,14         | 55,21         | 0,00         |
| 1.2.2.5    | Dana Otonomi Khusus dan DTI                                  | -             | -             | 100,00       |
| 1.2.3      | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>9,23</b>  |
| 1.2.3.1    | Bantuan Keuangan                                             | -             | -             | 100          |
| <b>1.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>0,04</b>   | <b>13,87</b>  | <b>0,11</b>  |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                             | 98,42         | 93,98         | 59,28        |
| 1.3.2      | Pendapatan Lainnya                                           | 1,58          | 6,02          | 40,72        |

Sumber: BPKAD Provinsi Papua (Audited)

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, terutama pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Papua melakukan berbagai upaya dengan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan lainnya, melalui pengendalian untuk meminimalisir kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan yang seiring dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan, serta perluasan basis penerimaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, meliputi:

1. Peningkatan pelayanan pajak daerah yang lebih efektif dan efisien

- a. Pengembangan kemudahan pembayaran pajak berbasis online dan kerjasama dengan berbagai pihak;
  - b. Penguatan inovasi layanan samsat.
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah
  - a. Peningkatan penagihan pajak secara persuasif;
  - b. Penguatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pajak daerah
  - c. Peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak;
  - d. Peningkatan akses dan kemudahan pelayanan pajak daerah;
  - e. Penguatan koordinasi dan kesepahaman dengan berbagai pihak untuk menghindari sengketa pajak.
3. Perumusan dan penerapan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD
  - a. Pengintegrasian ke dalam sistem samsat dan membangun kerjasama untuk optimalisasi pajak alat berat;
  - b. Membangun kerjasama untuk optimalisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - c. Kolaborasi Samsat dengan Kab/Kota dalam penagihan tunggakan PKB dan rekonsiliasi data opsen pajak;
  - d. Membangun kerjasama dengan Dinas ESDM untuk memperkuat data PBBKB.
4. Peningkatan pemanfaatan aset daerah dan pelayanan objek retribusi
  - a. Penguatan koordinasi terkait kejelasan status aset yang akan menjadi sumber retribusi daerah;
  - b. Identifikasi jenis pelayanan OPD dan pembinaan OPD penghasil retribusi daerah;
  - c. Identifikasi sumber retribusi baru;
  - d. Optimalisasi koordinasi aset daerah yang memiliki kejelasan status legalitas;
  - e. Pengembangan elektronifikasi retribusi daerah.
5. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dalam peningkatan realisasi lain-lain PAD yang sah
  - a. Optimalisasi kontribusi BUMD;
  - b. Koordinasi kerjasama pengelolaan aset daerah.
6. Peningkatan akurasi data PAD
  - a. Peningkatan pemutakhiran dan akurasi data wajib pajak;
  - b. Sinkronisasi data antara Samsat dengan BPKAD Kabupaten/Kota.
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan perangkat daerah
  - a. Pendataan dan legalisasi aset internal;
  - b. Pengembangan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
  - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM internal sesuai tugas dan fungsi.

Terkait kebijakan dana perimbangan, Pemerintah Provinsi Papua berfokus pada peningkatan perolehan dana perimbangan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Target pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2025 sebesar 2,289 triliun Rupiah, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 515,406 miliar Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 1,773 triliun Rupiah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,050 triliun Rupiah. Pendapatan Transfer masih menjadi kontributor penyumbang terbesar pada pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2025. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 65,955 miliar Rupiah jika dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang sebesar 581,362 miliar Rupiah.

**Tabel III. 3 Target Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025**

| NO           | URAIAN                                                       | 2025 (Rp)                | 2026 (Rp)                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>2.289.476.299.866</b> | <b>2.254.924.348.593</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>515.406.169.254</b>   | <b>502.350.285.038</b>   |
| 1.1.1        | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 309.296.000.000          | 299.558.000.000          |
| 1.1.2        | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 135.666.617.000          | 33.266.617.000           |
| 1.1.3        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 55.664.802.254           | 58.187.593.277           |
| 1.1.4        | Lain-lain PAD yang Sah                                       | 14.778.750.000           | 111.338.074.761          |
| <b>1.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.773.020.130.612</b> | <b>1.751.524.063.555</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>                  | <b>1.629.713.016.900</b> | <b>1.629.713.016.900</b> |
| 1.2.1.1      | Dana Bagi Hasil                                              | 70.236.569.000           | 70.236.569.000           |
| 1.2.1.4      | Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | 618.047.373.000          | 618.047.373.000          |
| 1.2.1.7      | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                              | 20.983.494.000           | 20.642.550.000           |
| 1.2.1.8      | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                          | 21.145.387.000           | 21.486.331.000           |
| 1.2.1.9      | Dana Otonomi Khusus dan DTI                                  | 899.300.193.900          | 899.300.193.900          |
| <b>1.2.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                      | <b>143.307.113.712</b>   | <b>121.811.046.655</b>   |
| 1.2.2.1      | Bantuan Keuangan                                             | 143.307.113.712          | 121.811.046.655          |
| <b>1.3</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>1.050.000.000</b>     | <b>1.050.000.000</b>     |
| 1.3.1        | Pendapatan Hibah                                             | 1.050.000.000            | 1.050.000.000            |

Sumber: Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2025

Pendapatan daerah Provinsi Papua tahun 2026 diproyeksikan sebesar 2,254 triliun Rupiah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 502,350 miliar Rupiah atau menurun sebesar 13,055 miliar Rupiah, Pendapatan Transfer sebesar 1,751 triliun Rupiah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,050 miliar Rupiah.

Transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah harus dimulai sejak tahap perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga penting, yang berarti bahwa proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang diharapkan dapat mencapai tingkat efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas yang diinginkan.

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, dan opsi pajak yang diterapkan mulai tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan PAD tahun 2023, antara lain sebagai dampak dari pemekaran daerah dan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, terutama terkait kebijakan opsen pajak.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Papua merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Dengan melihat potensi pemulihan ekonomi global, Nasional maupun Provinsi Papua pada tahun 2026 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan pendapatan daerah akan mengalami peningkatan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun kebijakan pajak daerah di Provinsi Papua untuk tahun 2026 adalah Implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Implementasi Kebijakan Pajak Daerah. Untuk itu, dirumuskan beberapa strategi untuk mendukung kebijakan pajak daerah sebagai berikut.

##### **1. Intensifikasi Pajak Daerah**



- a. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah;
  - b. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment;
  - c. Penegakan hukum/*law enforcement* dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah;
  - d. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) mendekati harga pasar yang wajar;
  - e. Meningkatkan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
  - f. Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam proses pemungutan pajak daerah (pertukaran data informasi, *law enforcement*, sosialisasi, dan pendataan).
2. Ekstensifikasi
- a. Pertumbuhan kendaraan bermotor baru baik kendaraan bermotor roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor roda 2 (dua);
  - b. Pengukuhan Wajib Pajak baru berdasarkan pendataan, terutama objek pajak baru sebagai implementasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut adalah Strategi dan Kebijakan Retribusi daerah.

1. Pengembangan Retribusi Online Sistem sebagai sarana pemungutan retribusi.
2. Peningkatan pelayanan yang berdaya saing kepada masyarakat atas objek retribusi.
3. Penyesuaian tarif retribusi secara berkala yang menyesuaikan harga pasar.
4. Penerbitan petunjuk pelaksana terkait tata cara pemungutan retribusi.
5. Perluasan kanal pembayaran retribusi.
6. Melakukan pendataan retribusi untuk perluasan objek retribusi baru.

Adapun arah kebijakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2026 adalah Pengembangan BUMD yang diarahkan untuk penguatan inovasi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung ketahanan BUMD dan pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Untuk meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat meningkatkan kinerja komponen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasio kesehatan serta perbaikan tata kelola BUMD;
2. Menciptakan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
4. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
5. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah (LLPAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini di antaranya berasal dari hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Dalam hal meningkatkan kinerja LLPAD, diperlukan suatu kebijakan sebagai berikut:

1. Pembuatan regulasi terkait pemungutan LLPAD dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam hal optimalisasi penerimaan LLPAD;
2. Pengembangan sistem monitoring LLPAD guna mempermudah proses monitoring dan evaluasi serta rekonsiliasi penerimaan LLPAD;
3. Membuat analisis terkait pendataan potensi LLPAD atas pemanfaatan aset BMD;
4. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah pemungut LLPAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam proses pemungutan LLPAD;
5. Inventarisasi potensi penerimaan denda retribusi berkoordinasi dengan SKPD pemungut Retribusi.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dalam penyusunannya mengedepankan prinsip-prinsip penganggaran yang diterapkan melalui pendekatan berbasis kinerja. Selain itu, kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, yang dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan sesuai dengan prioritas sebagai bentuk dukungan terhadap program/kegiatan strategis daerah serta untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Atau dengan kata lain, arah kebijakan belanja daerah perlu mengedepankan *money follow program priority* sehingga dalam pendanaannya akan memprioritaskan program/kegiatan prioritas Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan daerah serta menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2026. Selain itu juga, dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, untuk mencukupi kebutuhan pelayanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua, serta mendukung prioritas nasional tahun 2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Realisasi belanja daerah Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,229 triliun Rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hampir semua realisasi item belanja mengalami penurunan kecuali item Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Belanja Modal yang mengalami peningkatan sebesar 128,516 miliar Rupiah jika dibandingkan tahun 2023

serta item Belanja Bagi Hasil pada Belanja Transfer yang di tahun 2023 tidak ada tetapi di tahun 2024 sebesar 235,632 miliar Rupiah.

**Tabel III. 4 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2022-2024**

| NO           | URAIAN                                                           | 2022 (Rp)                 | 2023 (Rp)                  | 2024 (Rp)                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>2</b>     | <b>BELANJA</b>                                                   |                           |                            |                          |
| <b>2.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                                           | <b>8.578.410.637.007</b>  | <b>3.936.448.977.955</b>   | <b>3.090.541.305.631</b> |
| 2.1.1        | Belanja Pegawai                                                  | 2.413.293.504.407         | 1.098.194.585.460          | 976.584.477.478          |
| 2.1.2        | Belanja Barang dan Jasa                                          | 4.487.048.045.882         | 2.123.340.461.900          | 1.626.420.065.334        |
| 2.1.3        | Hibah                                                            | 1.634.316.326.642         | 695.069.090.927            | 484.694.762.818          |
| 2.1.4        | Bantuan Sosial                                                   | 43.752.760.076            | 19.844.839.668             | 2.842.000.000            |
| <b>2.2</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>                                             | <b>2.029.533.805.429</b>  | <b>493.844.957.420</b>     | <b>476.126.484.870</b>   |
| 2.2.1        | Belanja Tanah                                                    | 25.000.000.000            | 12.734.748.904             | 10.500.000.000           |
| 2.2.2        | Belanja Peralatan dan Mesin                                      | 236.086.848.453           | 136.329.618.455            | 68.972.541.736           |
| 2.2.3        | Belanja Gedung dan Bangunan                                      | 1.054.570.476.959         | 103.129.046.172            | 27.892.025.918           |
| 2.2.4        | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan                             | 709.924.786.399           | 239.023.566.449            | 367.188.176.089          |
| 2.2.5        | Belanja Aset Tetap Lainnya                                       | 3.951.693.618             | 2.627.977.440              | 1.573.741.128            |
| <b>2.3</b>   | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                       | <b>196.021.127.021</b>    | <b>163.855.515.063</b>     | <b>-</b>                 |
| 2.3.1        | Belanja Tak Terduga                                              | 196.021.127.021           | 163.855.515.063            | -                        |
|              | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                            | <b>10.803.965.569.457</b> | <b>4.594.149.450.438</b>   | <b>3.566.667.790.501</b> |
| <b>2.4</b>   | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                          |                           |                            |                          |
| <b>2.4.1</b> | <b>TRANSFER/BAGI HASIL<br/>PENDAPATAN KE KABUPATEN/<br/>KOTA</b> | <b>650.691.965.709</b>    | <b>425.700.285.073</b>     | <b>235.632.261.999</b>   |
| 2.4.1.1      | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota                               | 650.691.965.709           | 425.700.285.073            | -                        |
| 2.4.1.2      | Belanja Bagi Hasil                                               | -                         | -                          | 235.632.261.999          |
| <b>2.4.2</b> | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                                 | <b>-</b>                  | <b>12.000.000.000</b>      | <b>-</b>                 |
| 2.4.2.1      | Transfer Bantuan Keuangan ke<br>Pemerintah Daerah Lainnya        | -                         | 12.000.000.000             | -                        |
|              | <b>JUMLAH TRANSFER</b>                                           | <b>650.691.965.709</b>    | <b>437.700.285.073</b>     | <b>235.632.261.999</b>   |
|              | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>                               | <b>11.454.657.535.166</b> | <b>5.031.849.735.511</b>   | <b>3.802.300.052.500</b> |
|              | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                                           | <b>(414.548.523.926)</b>  | <b>(1.298.179.117.524)</b> | <b>-742.909.159.814</b>  |

Sumber: BPKAD Provinsi Papua (Audited)

Untuk tahun 2025, anggaran belanja Provinsi Papua turun sebesar 1,327 triliun Rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024. Item belanja yang mengalami peningkatan di tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 adalah item belanja Bantuan Sosial pada Belanja Operasi yang mengalami peningkatan sebesar 3,666 miliar Rupiah dan beberapa item belanja pada Belanja Modal, yaitu Belanja Peralatan dan Mesin meningkat sebesar 18,829 miliar Rupiah, Belanja Gedung dan Bangunan meningkat sebesar 487,228 miliar Rupiah, serta Belanja Aset Lainnya yang di tahun 2024 tidak ada tetapi di tahun 2025 sebesar 2 miliar Rupiah.

**Tabel III. 5 Target Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2025**

| NO         | URAIAN                  | 2025 (Rp)                | 2026 (Rp)                |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2</b>   | <b>BELANJA</b>          |                          |                          |
| <b>2.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>2.068.835.240.701</b> | <b>1.632.671.811.788</b> |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai         | 864.174.672.631          | 696.009.751.298          |
| 2.1.2      | Belanja Barang dan Jasa | 1.175.679.238.743        | 910.810.998.400          |
| 2.1.3      | Hibah                   | 22.473.282.000           | 19.259.063.992           |
| 2.1.4      | Bantuan Sosial          | 6.508.047.327            | 6.591.998.099            |
| <b>2.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>    | <b>260.758.835.834</b>   | <b>461.682.536.805</b>   |

| NO    | URAIAN                                           | 2025 (Rp)                | 2026 (Rp)                |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.2.1 | Belanja Tanah                                    | 250.000.000              | 247.559.524              |
| 2.2.2 | Belanja Peralatan dan Mesin                      | 87.801.698.980           | 88.029.063.992           |
| 2.2.3 | Belanja Gedung dan Bangunan                      | 75.120.575.117           | 76.523.445.841           |
| 2.2.4 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan             | 95.542.061.737           | 294.835.002.926          |
| 2.2.5 | Belanja Aset Tetap Lainnya                       | 44.500.000               | 47.464.521               |
| 2.2.6 | Belanja Aset Lainnya                             | 2.000.000.000            | 2.000.000.000            |
| 2.3   | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                       | <b>7.006.492.869</b>     | <b>10.000.000.000</b>    |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga                              | 7.006.492.869            | 10.000.000.000           |
|       | <b>JUMLAH BELANJA</b>                            | <b>2.336.600.569.404</b> | <b>2.104.354.348.593</b> |
| 2.4   | <b>BELANJA TRANSFER</b>                          |                          |                          |
| 2.4.1 | Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota | 138.283.282.000          | 140.570.000.000          |
|       | <b>JUMLAH TRANSFER</b>                           | <b>138.283.282.000</b>   | <b>140.570.000.000</b>   |
|       | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>               | <b>2.474.883.851.404</b> | <b>2.244.924.348.593</b> |
|       | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                           | <b>(185.407.551.538)</b> | <b>10.000.000.000</b>    |

Sumber: Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2025

Adapun belanja daerah tersebut akan diarahkan pada tema Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif Melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah, dengan berfokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan SDM; pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan; peningkatan keamanan dan ketertiban; percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan konektivitas wilayah; serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga, diarahkan untuk mendukung prioritas nasional tahun 2026.

Perencanaan pembangunan di masa mendatang memerlukan pendekatan yang sistematis, terutama dalam hal kerangka pendanaan. Tujuannya adalah untuk menentukan kapasitas finansial sebenarnya yang dapat dialokasikan oleh daerah untuk mendukung program pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang mengikat, prioritas utama, dan diskresioner belanja, kita dapat memperkirakan kapasitas finansial sebenarnya yang tersedia untuk menambah program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan.

Dalam penyusunan belanja daerah, prinsip-prinsip penganggaran diterapkan melalui pendekatan berbasis kinerja, yang menitikberatkan pada pencapaian hasil dari masukan yang telah direncanakan. Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan kinerja setiap unit kerja di bawah pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan anggaran, serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program, kegiatan, dan subkegiatan.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Selanjutnya, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Dalam hal kebijakan belanja daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua, diarahkan untuk:

1. Menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan daerah, khususnya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar (*sufficient basic services*);
2. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
3. Mengedepankan belanja yang mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta mendukung agenda pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN;
4. Mendorong peran Provinsi Papua sebagai Pusat Bisnis berskala Global;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
  - a. Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
  - b. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
  - c. Bantuan sosial untuk menyentuh kaum marginal dalam rangka pembangunan modal sosial dengan pendekatan inklusifitas;
  - d. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang yang berlaku.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan alternatif sumber pendanaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

**Tabel III. 6 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2022-2024**

| NO         | URAIAN                                | 2022 (Rp)                   | 2023 (Rp)                   | 2024 (Rp)                   |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>          | <b>2.229.401.510.206,04</b> | <b>2.292.871.786.674,57</b> | <b>1.269.092.669.150,82</b> |
| 6.1.01     | Penggunaan SiLPA                      | 1.929.248.255.479,04        | 1.792.871.786.674,57        | 969.092.669.150,00          |
| 6.1.02     | Pencairan Dana Cadangan               | -                           | 500.000.000.000,00          | 300.000.000.000,00          |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>         | <b>20.000.000.000,00</b>    | <b>25.600.000.000,00</b>    | <b>40.000.000.000,00</b>    |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah    | 20.000.000.000,00           | 25.600.000.000,00           | 40.000.000.000,00           |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>               | <b>2.209.401.510.206,04</b> | <b>2.267.271.786.674,57</b> | <b>1.229.092.669.150,00</b> |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>1.794.852.986.279,57</b> | <b>969.092.669.150,82</b>   | <b>486.183.509.336,69</b>   |

Sumber: BPKAD Provinsi Papua

Keterangan: Data tahun 2024 merupakan data non audit

Realisasi pembiayaan daerah Provinsi Papua tahun anggaran 2024, terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar 969,092 miliar Rupiah dan pencairan dana cadangan sebesar 300 miliar Rupiah, serta pengeluaran pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar 40 miliar Rupiah.

Pada APBD tahun anggaran 2025, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

**Tabel III. 7 Anggaran Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025**

| NO         | URAIAN                             | 2025 (Rp)                 | 2026 (Rp)                 |
|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>       | <b>195,407,551,538.00</b> |                           |
| 6.1.01     | Penggunaan SiLPA                   | 195,407,551,538.00        |                           |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>      | <b>10,000,000,000.00</b>  | <b>10,000,000,000.00</b>  |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 10,000,000,000.00         | 10,000,000,000.00         |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>            | <b>185,407,551,538.00</b> | <b>-10,000,000,000.00</b> |



|  |                                           |             |             |
|--|-------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN<br/>ANGGARAN</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------------------------------------|-------------|-------------|

Sumber: Peraturan Kepala Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2025

Pembiayaan daerah untuk tahun 2026 diarahkan pada penerimaan pembiayaan dengan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dengan demikian, kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2026, sebagai berikut.

**Tabel III. 8 Kerangka Pendanaan Provinsi Papua Tahun 2026**

| <b>NO</b>    | <b>URAIAN</b>                                                | <b>2026 (Rp)</b>         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>2.254.924.348.593</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>502.350.285.038</b>   |
| 1.1.1        | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 299.558.000.000          |
| 1.1.2        | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 33.266.617.000           |
| 1.1.3        | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 58.187.593.277           |
| 1.1.4        | Lain-lain PAD yang sah                                       | 111.338.074.761          |
| <b>1.2</b>   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>1.751.524.063.555</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>                             | <b>1.629.713.016.900</b> |
| 1.2.1.1      | Dana Bagi Hasil                                              | 70.236.569.000           |
| 1.2.1.2      | Dana Alokasi Umum (DAU)                                      | 618.047.373.000          |
| 1.2.1.3      | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik                              | 20.642.550.000           |
| 1.2.1.4      | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                          | 21.486.331.000           |
| 1.2.2.5      | Dana Otonomi Khusus dan DTI                                  | 899.300.193.900          |
| <b>1.2.3</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                      | <b>121.811.046.655</b>   |
| 1.2.3.1      | Bantuan Keuangan                                             | 121.811.046.655          |
| <b>1.3</b>   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>                         | <b>1.050.000.000</b>     |
| 1.3.1        | Pendapatan Hibah                                             | 1.050.000.000            |
| <b>2</b>     | <b>BELANJA</b>                                               |                          |
| <b>2.1</b>   | <b>BELANJA OPERASI</b>                                       | <b>1.632.671.811.788</b> |
| 2.1.1        | Belanja Pegawai                                              | 696.009.751.298          |
| 2.1.2        | Belanja Barang dan Jasa                                      | 910.810.998.400          |
| 2.1.5        | Hibah                                                        | 19.259.063.992           |
| 2.1.6        | Bantuan Sosial                                               | 6.591.998.099            |
| <b>2.2</b>   | <b>BELANJA MODAL</b>                                         | <b>461.682.536.805</b>   |
| 2.2.1        | Belanja Tanah                                                | 247.559.524              |
| 2.2.2        | Belanja Peralatan dan Mesin                                  | 88.029.063.992           |
| 2.2.3        | Belanja Gedung dan Bangunan                                  | 76.523.445.841           |
| 2.2.4        | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan                         | 294.835.002.926          |
| 2.2.5        | Belanja Aset Tetap Lainnya                                   | 47.464.521               |
| 2.2.6        | Belanja Aset Lainnya                                         | 2.000.000.000            |
| <b>2.3</b>   | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                   | <b>10.000.000.000</b>    |
| 2.3.1        | Belanja Tak Terduga                                          | 10.000.000.000           |
|              | <b>JUMLAH BELANJA</b>                                        | <b>2.104.354.348.593</b> |

| NO         | URAIAN                                           | 2026 (Rp)                 |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>2.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                          |                           |
| 2.4.1      | Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota | 140.570.000.000           |
|            | <b>JUMLAH TRANSFER</b>                           | <b>140.570.000.000</b>    |
|            | <b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>               | <b>2.244.924.348.593</b>  |
|            | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                           | <b>10.000.000.000</b>     |
|            |                                                  |                           |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                         |                           |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     |                           |
| 6.1.01     | Penggunaan SiLPA                                 |                           |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>10,000,000,000.00</b>  |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah               | 10,000,000,000.00         |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                          | <b>-10,000,000,000.00</b> |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>            | <b>0,00</b>               |

Sumber: BPKAD Provinsi Papua, Bapperida Provinsi Papua; data diolah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa pembiayaan daerah adalah Pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

#### **a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Penerimaan Pengembalian, Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri atas Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

#### **b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali di masa yang akan datang, atau merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atas penerimaan pembiayaan di masa lalu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Penyertaan Modal/Investasi Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Daerah dan pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa isu dihadapi dalam pemberian PMD kepada BUMD tahun 2026, diantaranya masih minimnya motivasi BUMD untuk dapat berkembang, sehingga BUMD perlu didorong untuk aktif dan kreatif dalam mengembangkan usahanya sehingga memberikan manfaat kepada pemerintah daerah. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasio kesehatan serta perbaikan tata kelola BUMD;
2. Menciptakan kepengurusan yang unggul dan profesional dalam pengelolaan bisnis BUMD;
3. Menerapkan strategi bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
4. Meningkatkan inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing secara unggul;
5. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

### **3.2.4 Kebijakan Belanja Daerah yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus**

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, tepat sasaran serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi-provinsi lain dalam wadah NKRI, serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan. Rumusan materi muatan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut dibangun dengan konstruksi yang bersumber dari dua elemen, yaitu:

- a. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- b. kristalisasi penggalan aspirasi masyarakat di Provinsi Papua yang menjadi karakter kekhususan dan kebutuhan prioritas bagi masyarakat Papua.

Kebijakan otsus menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 mengamanatkan tiga pilar penting sebagai penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP);
- b. Pemerintah daerah (Gubernur beserta perangkat daerah); dan
- c. Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dua (2) Formulasi Kebijakan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 pasal 34 ayat 3 huruf e dan f, yaitu:

- a. **Dana Otsus Block Grant** (setara 1% dari DAU Nasional) digunakan untuk :
  - 1) Pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan publik;
  - 2) Peningkatan kesejahteraan orang asli Papua (OAP), penguatan kelembagaan adat;
  - 3) Hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Dana Otsus Specific Grant** (setara 1,25% dari DAU Nasional) digunakan untuk:
  - 1) Belanja pendidikan paling sedikit 30%;
  - 2) Belanja kesehatan paling sedikit 20% ; dan
  - 3) Belanja pemberdayaan ekonomi masyarakat

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, serta Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021, diatur bahwa penggunaan penerimaan provinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Arah kebijakan pengelolaan belanja yang bersumber dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua meliputi:

- a. Pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dengan memprioritaskan OAP;
- b. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan memprioritaskan OAP;
- c. Pembangunan infrastruktur berkualitas terutama yang mendukung pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sanitasi lingkungan,

pemukiman dan perumahan, serta infrastruktur dasar lainnya dengan memprioritaskan distrik dan kampung yang merupakan basis OAP

- d. Peningkatan kesejahteraan kualitas hidup OAP, pemberdayaan perempuan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat adat
- e. Pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan

Arah kebijakan diatas, selanjutnya dijabarkan dalam RIPP, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan RIPP, strategi operasionalisasi yang dilakukan antara lain:

- a. Percepatan pembangunan Papua berbasis sosial budaya, wilayah adat, zona ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan mengutamakan OAP;
- b. Percepatan pembangunan Papua berbasis distrik dan kampung di wilayah terpencil, wilayah tertinggal, wilayah pedalaman, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif yang didukung oleh Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan kebijakan yang berbasis data dan informasi;
- d. Pelaksanaan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat dan MRP dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f. Pemberdayaan pengusaha lokal dengan memprioritaskan pengusaha OAP;
- g. Pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah Papua;
- h. Penguatan kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, wirausaha sosial, filantropi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya; penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam menciptakan wilayah Papua yang aman, stabil, damai;
- i. Peningkatan koordinasi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di wilayah Papua; dan
- j. Pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan terintegrasi.

Selanjutnya sesuai dengan Arah yang dituangkan oleh Pemerintah dalam RKP Tahun 2026 disebutkan bahwa Arah kebijakan umum Dana Otonomi Khusus Papua pada tahun 2026 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional diarahkan untuk mendukung peningkatan peran distrik dan kampung dalam perluasan pelayanan publik di bidang administrasi pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan terutama pada Orang Asli Papua hingga ke tingkat kampung, penataan tanah adat/ulayat, penguatan lembaga adat, dan pengembangan pangan lokal;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional) diarahkan untuk (i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung penyediaan layanan pendidikan dan pengembangan kurikulum kontekstual Papua, serta pemenuhan

tenaga pendidik yang mengutamakan Orang Asli Papua; (ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen) diarahkan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), percepatan penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, pengendalian penyakit, serta pemenuhan tenaga kesehatan yang mengutamakan Orang Asli Papua; serta (iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan dan ekonomi lokal serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; koperasi; dan Badan Usaha Milik Kampung;

- c. Dana Tambahan Infrastruktur diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung pengembangan kawasan pemerintahan dan kawasan perkotaan, termasuk pada ibu kota daerah otonom baru;
- d. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat.

Mengingat arahan penggunaan Dana Otonomi Khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029 untuk mencapai Misi Papua yang Sehat, Cerdas, dan Produktif.



# BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS

### PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026, serta merupakan tahun transisi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta mensinergikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, dan top down-bottom-up planning. Selain itu, digunakan pendekatan perencanaan berbasis kewilayahan yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan sesuai dengan potensi daerah. Perumusan prioritas RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjawab tantangan isu strategis yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan. pembangunan beserta hasil evaluasi pembangunan pada tahun 2025. Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional maupun daerah, maka perumusan sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengacu dan memperhatikan : (1) RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025 – 2045; (2) Evaluasi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026; (3) Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025 – 2029; (4) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Papua Tahun 2023 – 2042; (5) RPJMN Tahun 2025-2029; (6) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026; (7) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan (8) Pembangunan Rendah Karbon

Perumusan isu strategis, tujuan dan sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan pendefinisian terhadap pelaksanaan dan evaluasi tahap akhir RPJMD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dan penjabaran terhadap tujuan dan sasaran arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029.

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

##### 4.1.1 Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

###### 4.1.1.1 Arahan RPJPN 2025-2045

Pemerintah Republik Indonesia merencanakan Visi Indonesia Emas 2045 “**Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**”. Visi ini berlandaskan pada (i) kekuatan modal dasar yang terdiri atas kependudukan, modal sosial dan budaya, dan kemaritiman; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode

sebelumnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya bahari sebagai poros maritim dunia.

Pemerintah Republik Indonesia merencanakan Visi Indonesia Emas 2045 “*Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*”. Visi ini berlandaskan pada (i) kekuatan modal dasar yang terdiri atas kependudukan, modal sosial dan budaya, dan kemaritiman; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya bahari sebagai poros maritim dunia. Hasil perumusan visi kemudian diturunkan menjadi 5 (lima) sasaran utama sebagai berikut:

**a. Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju**

Negara Indonesia diperkirakan memiliki pendapatan per kapita setara negara maju yang berkisar pada US\$ 23.000–30.300 dan termasuk dalam ekonomi lima terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28% dan PDB kemaritiman sebesar 15% berbasis inovasi. Rencana penerapan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, lapangan pekerjaan layak (*decent job*) akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%.

**b. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang**

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan lapangan pekerjaan layak, dan pendapatan menengah, sasaran kedua adalah menurunkan angka kemiskinan menuju 0% pada kisaran 0,5% - 0,8% yang diikuti oleh penurunan jumlah penduduk rentan miskin secara signifikan. Ketimpangan pendapatan yang diindikasikan dengan rasio gini menurun sampai pada kisaran 0,290 – 0,320. Selain ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah juga diperkirakan menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5%.

**c. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat**

Indonesia mengalami perkembangan secara terus menerus dan kemajuan yang berhasil diraih. Sejalan dengan kondisi tersebut, peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional akan mengalami peningkatan. Peningkatan peran dan pengaruh di dunia internasional dicerminkan dari penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global. Pengukuran dilakukan terhadap aspek Global Power Index (GPI) yang diperkirakan termasuk dalam peringkat 15 besar dunia.

**d. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat**

Peningkatan daya saing sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat secara merata dicapai melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan. Pengukuran daya saing sumber daya manusia menggunakan Indeks

Modal Manusia (*Human Capital Index*) yang diperkirakan meningkat menjadi 0,73 pada tahun 2045.

**e. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun Menuju *Net Zero Emission***

Proses pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan diharapkan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Penerapan konsep ramah lingkungan dicantumkan dalam kerangka ekonomi hijau yang diindikasikan oleh penurunan intensitas emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2010. Selain itu, indikator yang termasuk dalam pengukuran sasaran kelima adalah *net zero emission* pada tahun 2060.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, perlu penyusunan misi atau agenda utama pembangunan yang berjumlah 8 (delapan) yaitu transformasi sosial; transformasi ekonomi; transformasi tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; serta kesinambungan pembangunan. Delapan misi atau agenda utama pembangunan dapat dicermati secara detail sebagai berikut:

- a. **Mewujudkan transformasi sosial** untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
- b. **Mewujudkan transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan;
- c. **Mewujudkan transformasi tata kelola** untuk mengoptimalkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
- d. **Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** melalui stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
- e. **Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumberdaya alam;
- f. **Pembangunan kewilayahan** untuk pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan dilakukan sesuai dengan karakteristik tiap wilayah;

- g. **Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan** untuk mengembangkan wilayah sekaligus mendukung agenda transformasi; dan
- h. **Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas** melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

#### 4.1.1.2 Arahan RIPP 2021-2041

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi khusus di tanah Papua maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang memuat langkah-langkah strategis pelaksanaan pembangunan di tanah Papua. RIPP membawa semangat, paradigma, desain, dan terobosan baru dalam rangka mewujudkan lompatan kesejahteraan Papua dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. Secara filosofis, RIPP merupakan penjabaran tujuan dan cita-cita pembangunan di dalam UUD 1945 yang disinergikan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (sustainable development goals).

Dalam dokumen RIPP dinyatakan bahwa Visi Pembangunan Papua 2041: “Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Upaya perwujudan visi pembangunan Papua tersebut ditempuh melalui **3 (tiga) misi dan sasaran indikator** sebagai berikut:

**Gambar IV.1 Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR                               | BASELINE<br>2021 | TARGET<br>2041 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
|  <b>PAPUA SEHAT</b><br>sasaran :<br>Tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk                                                                                   | 1. Umur harapan hidup (UHH) (tahun)     | 65,93 – 66,14    | 68,66 – 68,67  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Prevalensi <i>stunting</i> (%)       | 29,50 – 26,20    | 10,00          |
|  <b>PAPUA CERDAS</b><br>sasaran :<br>Tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk                                                             | 1. Harapan lama sekolah (HLS) (tahun)   | 11,11 – 13,13    | 14,59 – 16,61  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Rata-rata lama sekolah (RLS) (tahun) | 6,76 – 7,69      | 9,36 – 10,37   |
|  <b>PAPUA PRODUKTIF</b><br>sasaran :<br>Tercapainya kemampuan bekerja, berusaha dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk | 1. Tingkat kemiskinan (%)               | 27,38 – 21,82    | 5,99 – 5,00    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Tingkat pengangguran terbuka (%)     | 5,84 – 3,33      | 4,11 – 1,73    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Laju pertumbuhan ekonomi (%)         | 10,30            | 6,30           |

Sumber: Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2022-2041,,2025

- a. **Misi-1:** memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi *stunting*.
- b. **Misi-2:** memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk

pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter dan mampu bekerjasama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

- c. **Misi-3**; meningkatkan kompetensi, kreativitas dan inovasi dengan pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Dimensi pembangunan yang tertuang dalam RIPPP meliputi Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua produktif yang masing-masing dapat diuraikan lagi sebagai berikut:

**a. Papua Sehat**

- 1) Akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- 2) Ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dan sesuai standar di seluruh fasilitas kesehatan; dan
- 3) Cakupan jaminan kesehatan yang menyeluruh.

**b. Papua Cerdas**

- 1) Fasilitas pendidikan yang berkualitas;
- 2) Akses ke pelayanan pendidikan (semua jenjang) yang inklusif;
- 3) Distribusi tenaga pendidik yang merata; dan
- 4) Afirmasi pendidikan bagi OAP, termasuk beasiswa dan pendidikan keterampilan hidup.

**c. Papua Produktif**

- 1) Ekonomi masyarakat adat dan sumber-sumber daya lokal;
- 2) Akses terhadap teknologi, perdagangan, dan pasar nasional, regional, dan global;
- 3) Sumber daya alam yang berkelanjutan;
- 4) Ekonomi lokal; dan
- 5) Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah

Dalam rangka mewujudkan sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, dibutuhkan kondisi perlu yang merupakan prasyarat keberhasilan tercapainya sasaran pembangunan dengan memperhatikan pengarusutamaan dan kaidah pelaksanaan, serta diimplementasikan dalam tiap pentahapan pembangunan. Kondisi perlu meliputi adanya intervensi di bidang infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan dan tanah adat/ulayat, kebudayaan dan harmonisasi sosial.

#### **4.1.1.3 Arahan RPJMN Tahun 2025-2029**

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun

2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Gambar IV.1 Visi dan Misi Nasional 2025-2029



Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Selanjutnya, dalam RPJMN yang menjadi prioritas adalah sebanyak 17 program prioritas Presiden dan diantaranya:

1. **Mencapai swasembada pangan, energi, dan air** Fokus pada ketahanan nasional di bidang pangan, energi, dan air untuk mendukung kemandirian bangsa.
2. **Penyempurnaan sistem penerimaan negara** dengan fokus Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan negara, termasuk reformasi perpajakan dan optimalisasi pendapatan negara.



3. **Reformasi politik, hukum, dan birokrasi** dengan fokus Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat supremasi hukum.
4. **Pencegahan dan pemberantasan korupsi** dengan fokus Memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi di seluruh lini pemerintahan dan masyarakat.
5. **Pemberantasan kemiskinan** dengan fokus Melaksanakan program-program untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan.
6. **Pencegahan dan pemberantasan narkoba** dengan fokus Mengintensifkan upaya pemberantasan narkoba demi menjaga generasi muda dan stabilitas nasional.
7. **Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia**, Termasuk peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
8. **Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi** dengan fokus Meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, dan percepatan transformasi digital nasional.
9. **Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif**, dengan fokus Menjaga stabilitas nasional dan memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.
10. **Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas**, dengan fokus Mendorong keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan.
11. **Menjamin pelestarian lingkungan hidup** dengan fokus Melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.
12. **Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani**, dengan fokus Mendukung produktivitas pertanian nasional.
13. **Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau dan bersanitasi baik**, untuk masyarakat perdesaan, perkotaan, dan rakyat yang membutuhkan.
14. **Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM**, Termasuk program kredit usaha, pembangunan IKN, dan kota-kota inovatif, karakteristik, serta mandiri lainnya.
15. **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim**, dengan fokus Membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mewujudkan keadilan ekonomi.
16. **Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah**, dengan fokus Menjaga toleransi dan harmoni sosial.
17. **Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga**, dengan fokus Mendukung pengembangan budaya, ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga nasional

Secara kewilyahan, intervensi kebijakan di Provinsi Papua dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diantaranya (a) Pengembangan ekosistem dan peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya; (b) Pengembangan dan penataan kota industri, perdagangan dan jasa; dan (c) Penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan ekosistem sentra industry pengolahan berbasis komoditas unggulan.

**Gambar IV.2 17 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Provinsi**



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lampiran IV)

**Tabel IV.3 17 Highlight Indikasi Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana di Provinsi Papua**

| No                                     | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1                                     | Kawasan Pertumbuhan:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>A1: Kawasan Pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih (Kab. Biak Numfor)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penyiapan kawasan pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan daerah</li> <li>Pengembangan atraksi, dengan <i>output</i>: pendukung <i>event</i> daerah dan pengembangan desa wisata</li> <li>Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan <i>output</i>: pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah domestik</li> <li>Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan <i>output</i>: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan bumkam</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A2                                     | Kawasan Pertumbuhan:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>A2: Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura (Kota Jayapura)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan <i>output</i>: rencana induk (masterplan)</li> <li>Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan <i>output</i>: penguatan <i>branding</i> kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota</li> <li>Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual</li> <li>Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan <i>output</i>: pembangunan jalan strategis, SPAM, SPAL, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pemberian bantuan pembangunan rumah swadaya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B1<br>B2<br>B3<br>B4<br>B5<br>B6<br>B7 | Kawasan Komoditas Unggulan:<br>(Komoditas tuna-cakalang-tongkol)<br><br>Sentra Industri<br><ul style="list-style-type: none"> <li>B1: Kota Jayapura</li> <li>B2: Kab. Biak Numfor</li> </ul><br>Sentra Produksi<br><ul style="list-style-type: none"> <li>B3: Kota Jayapura</li> <li>B4: Kab. Biak Numfor</li> <li>B5: Kab. Jayapura</li> <li>B6: Kab. Kepulauan Yapen</li> <li>B7: Kab. Waropen</li> </ul> | Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan sentra produksi perikanan, dengan <i>output</i>: penyaluran bantuan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan serta penyaluran benih ikan air laut ke masyarakat</li> <li>Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan, dengan <i>output</i>: peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI), pengembangan rantai dingin termasuk gudang beku dan kelengkapannya, penyediaan sarana penyimpanan dan distribusi logistik produk, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan IKM/UMKM, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDes, penumbuhan eksportir, industrialisasi koperasi melalui rantai pasok produksi, pembentukan dan penguatan koperasi, pelaku usaha, UMKM dalam rantai pasok, serta revitalisasi pasar rakyat</li> <li>Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan <i>output</i>: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, serta penerapan kurikulum <i>link and match</i> dengan dunia kerja</li> <li>Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan <i>output</i>: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>smart fisheries village</i>), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan</li> <li>Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat</li> <li>Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan, dengan <i>output</i>: hilirisasi produk akuakultur dan produk hilirisasi pangan hasil laut, pemberian bantuan pendanaan <i>matching fund</i> (BOPTN Penelitian) terkait produk hilirisasi kelautan perikanan, serta penerapan teknologi ekonomi digital</li> </ul> |
|                                        | Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan <i>output</i>: pembangunan jembatan strategis,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                           | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>penanganan jalan daerah, serta pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas jalan Jayapura–Sarmi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan <i>output</i>: <i>replacement</i> fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kab. Sarmi, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Padaido dan Pelabuhan Pulau Owi di Kab. Biak Numfor, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Serui di Kab. Kepulauan Yapen, pembangunan fasilitas Pelabuhan Marsram di Kab. Supiori, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyebrangan perintis</li> <li>• Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan <i>output</i>: pengembangan Bandar Udara Numfor di Kab. Biak Numfor dan Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan</li> <li>• Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan <i>output</i>: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi</li> <li>• Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan <i>output</i>: pembangunan BTS 4G/<i>Lastmile</i> dan peningkatan akses internet, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kab. Jayapura (perikanan)</li> <li>• Kab. Biak Numfor (perikanan, dan pariwisata)</li> <li>• Kota Jayapura (perikanan)</li> <li>• Kab. Kepulauan Yapen (perikanan)</li> <li>• Kab. Waropen (perikanan)</li> </ul> | <p>Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan dan penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pelatihan berkualitas, dengan <i>output</i>: jalan menuju fasilitas pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan balai latihan kerja (BLK)</li> <li>• Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang mengikuti <i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i> berstandar industri</li> <li>• Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan <i>output</i>: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja</li> </ul>                                                                                                                    |
| C1 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C1: Kab. Keerom</li> </ul>                                                                                                                                            | <p>Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyiapan pengembangan kawasan, dengan <i>output</i>: optimasi lahan menjadi produktif, pembangunan embung pertanian dan non pertanian, penyiapan jaringan drainase dan irigasi, konektivitas transportasi desa, serta penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju KSPP</li> <li>• Peningkatan produksi, dengan <i>output</i>: penyaluran benih jagung berkualitas, areal pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pangan, dan unit pengolah pupuk organik (UPPO)</li> <li>• Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana produksi, dengan <i>output</i>: peningkatan jalan usaha tani, serta alat dan mesin pertanian</li> <li>• Penguatan pascapanen dan tata kelola, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, pengembangan kelembagaan ekonomi petani, pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan akses pembiayaan modal</li> <li>• Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan <i>output</i>: pengembangan model percontohan pertanian modern, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk <i>digital farming</i></li> <li>• Pencetakan sawah</li> </ul>                                                                                   |



| No                         | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan Bandara Senggi (Kab. Keerom) dalam rangka mendukung KSPP Keerom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C2<br>C3<br>C4<br>C6<br>C7 | <p>Kawasan Potensial Swasembada Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C2: Kab. Jayapura* (padi dan pangan akuatik)</li> <li>C3: Kab. Biak Numfor* (pangan akuatik)</li> <li>C4: Kota Jayapura* (padi dan pangan akuatik)</li> <li>C6: Kab. Kepulauan Yapen* (pangan akuatik)</li> <li>C7: Kab. Sarmi* (pangan akuatik)</li> </ul> <p>Kawasan Rentan Pangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Mamberamo Raya** (padi)</li> <li>Kab. Supiori** (padi)</li> </ul> <p>Keterangan:<br/>*) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi<br/>(**) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan</p> | <p>Penguatan kawasan swasembada pangan padi dan pangan akuatik/bluefood berbasis perikanan tangkap, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan produksi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, pengembangan kawasan padi, pemberian pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian pra panen, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan</li> <li>Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan sarana pasca panen dan sarana pengolahan hasil tanaman pangan, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju sentra pangan lokal, serta pembangunan fasilitas logistik (gudang lumbung pangan) mendukung distribusi bahan pangan bergizi, serta peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan</li> <li>Penguatan kapasitas SDM (petani dan nelayan), dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani serta pelatihan kelompok tani untuk GAP (<i>Good Agriculture Practices</i>), GHP (<i>Good Handling Practices</i>), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu), penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong <i>ownership</i> petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk</li> <li>Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan <i>output</i>: pelatihan kelompok tani, penyediaan inkubator usaha koperasi, pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas, serta penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik</li> </ul> <p>Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan melalui penguatan diversifikasi pangan, dengan <i>output</i>: pengembangan kawasan padi, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan, serta peningkatan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi, serta penyediaan sarana pra, pasca, dan pengolahan hasil tanaman pangan</p> |
| C2<br>C5                   | <p>Kawasan Potensial Swasembada Energi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C2: Kota Jayapura*</li> <li>C5: Kab. Mamberamo Raya*</li> </ul> <p>Kawasan Rendah Elektrifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Supiori**</li> <li>Kab. Kepulauan Yapen**</li> </ul> <p>Keterangan:<br/>*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi<br/>(**) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik</p>                                                                                                                                     | <p>Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan <i>output</i>: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), penyiapan pembangunan pabrik <i>ethanol</i> dalam rangka industrialisasi energi, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik, serta pembangunan infrastruktur gardu induk</li> <li>Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan <i>output</i>: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit</li> </ul> <p>Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan <i>output</i>: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C5<br>C2                   | <p>Kawasan Potensial Swasembada Air:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C2: Kab. Jayapura*</li> <li>C5: Kab. Mamberamo Raya*</li> </ul> <p>Kawasan Rawan Air:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas tampungan/sumber daya, dengan <i>output</i>: pembangunan embung dan tampungan air lainnya</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No                               | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Keerom**</li> <li>Kab. Biak Numfor**</li> </ul> <p>Keterangan:<br/>           *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi<br/>           **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan <i>output</i>: pembangunan embung, pembangunan sarana dan prasarana air baku, penyediaan infrastruktur desalinasi di pulau-pulau kecil, serta pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D1<br>D2<br>D3                   | <p>Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D1: Kab. Mamberamo Raya (sagu dan kakao)</li> <li>D2: Kab. Waropen (kakao dan kelapa)</li> <li>D3: Kab. Supiori (kelapa)</li> </ul> <p>Keterangan:<br/>           *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan <i>output</i>: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, SD yang mendapat pembinaan program afirmasi, aktivasi balai desa dengan pelibatan masyarakat desa, serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif</li> <li>Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian terintegrasi, dengan <i>output</i>: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, peningkatan akses pembiayaan modal, pengembangan UMKM lokal, peningkatan daya saing masyarakat, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis</li> <li>Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarmasyarakat, dengan <i>output</i>: fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU, perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital, pembangunan jalan akses simpul ekonomi, pengembangan sarana angkutan perintis laut, darat, dan udara, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, serta penyediaan dan pengawasan infrastruktur sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS</li> <li>Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna, dengan <i>output</i>: masyarakat di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penguatan mitigasi bencana</li> </ul> |
| D4<br>D5<br>D6<br>D7<br>D8<br>D9 | <p>Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D4: PKSN Jayapura (Kota Jayapura)</li> <li>D5: PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor)</li> </ul> <p>Distrik Perbatasan Prioritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D6: Kec. Sawai (Kab. Mamberamo Raya)</li> <li>D7: Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi)</li> <li>D8: Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom)</li> <li>D9: Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori)</li> </ul> | <p>Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta Distrik perbatasan prioritas, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan layanan dasar, dengan <i>output</i>: penyediaan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, peningkatan SPAM, SPAL, pengelolaan sampah berbasis 3R, serta peningkatan akses internet dan listrik</li> <li>Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan <i>output</i>: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Jayapura dan SKPT Biak) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan</li> <li>Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan <i>output</i>: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Papua</li> <li>Penguatan tata kelola pemerintahan, dengan <i>output</i>: <i>piloting</i> pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN, bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara, serta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kawasan perbatasan negara</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| No  | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D10 | <p>Kawasan Afirmasi</p> <p>Kawasan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>D10: KT Senggi (Kab. Keerom)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan <i>output</i>: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, sarana permukiman di kawasan transmigrasi, serta perluasan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital</li> <li>Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan <i>output</i>: pemberian bantuan sarana produksi pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP (Satuan Kawasan Pengembangan), optimasi kawasan pertanian padi, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, serta pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan</li> <li>Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan <i>output</i>: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi</li> <li>Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan <i>output</i>: perpindahan dan penempatan transmigran</li> <li>Penyediaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja terampil, dengan <i>output</i>: tenaga pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya, penyediaan instruktur yang berkinerja tinggi di kawasan transmigrasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <p>Pengembangan sekolah terbuka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Waropen (Daerah Tertinggal)</li> </ul> <p>Pengembangan sekolah berpola asrama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Distrik Perbatasan Prioritas)</li> <li>Kab. Waropen (Daerah Tertinggal)</li> <li>Kab. Jayapura</li> <li>Kota Jayapura (PKSN Jayapura)</li> </ul> <p>Pengembangan sekolah sepanjang hari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Distrik Perbatasan Prioritas)</li> <li>Kota Jayapura (PKSN Jayapura)</li> </ul> <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua</li> </ul> | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran</li> <li>Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan <i>output</i>: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen</li> <li>Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan <i>output</i>: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket a, SMP/paket b, SMA/paket c, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK)</li> <li>Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan <i>output</i>: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA</li> <li>Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, dengan <i>output</i>: rehabilitasi dan renovasi sekolah dasar dan menengah</li> <li>Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan <i>output</i>: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan</li> <li>Peningkatan literasi, dengan <i>output</i>: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital</li> <li>Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan <i>output</i>: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual</li> </ul> |
|     | Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan <i>output</i>: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan</li> <li>Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan <i>output</i>: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya</li> <li>Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan <i>output</i>: <i>event</i> prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan <i>event</i> film dan musik berbasis budaya lokal</li> <li>Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan <i>output</i>: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| No | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bahasa daerah, serta <i>event</i> prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>Pelayanan kesehatan bergerak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Distrik Perbatasan Prioritas)</li> </ul> <p>Pembangunan RSUD kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Distrik Perbatasan Prioritas)</li> </ul> <p>Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Keerom (Distrik Perbatasan Prioritas)</li> <li>Kab. Waropen (Daerah Tertinggal)</li> <li>Kab. Supiori (Daerah Tertinggal dan Distrik Perbatasan Prioritas)</li> <li>Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Distrik Perbatasan Prioritas)</li> <li>Kab. Sarmi (Distrik Perbatasan Prioritas)</li> </ul> <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua</li> </ul> | <p>Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan <i>telemedicine</i>, dengan <i>output</i>: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan <i>telemedicine</i></li> <li>Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah</li> <li>Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan <i>output</i>: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua</li> <li>Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan</li> <li>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan <i>output</i>: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil melalui konstruksi bangunan modular, serta percepatan operasionalisasi RSUD di Kab. Supiori</li> <li>Pengembangan inovasi obat tradisional dan suplemen kesehatan</li> <li>Penurunan kematian ibu dan anak melalui peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas layanan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <p>Pengendalian penyakit TBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Jayapura</li> <li>Kab. Kepulauan Yapen</li> <li>Kab. Biak Numfor</li> <li>Kab. Sarmi</li> <li>Kab. Waropen</li> <li>Kab. Supiori</li> </ul> <p>Pengendalian penyakit malaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Keerom</li> <li>Kab. Jayapura</li> <li>Kab. Sarmi</li> <li>Kab. Mamberamo Raya</li> <li>Kab. Waropen</li> <li>Kab. Kepulauan Yapen</li> <li>Kab. Biak Numfor</li> <li>Kab. Supiori</li> <li>Kota Jayapura</li> </ul> <p>Pengendalian penyakit filariasis, kusta, frambusia, dan HIV/AIDS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Provinsi Papua</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | <p>Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas hunian tidak layak</li> <li>Eliminasi penyakit kusta, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL</li> <li>Eliminasi penyakit frambusia, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian frambusia, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian frambusia, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL</li> <li>Eliminasi penyakit filariasis, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian filariasis, serta tenaga pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian filariasis, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL</li> <li>Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan <i>output</i>: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL</li> <li>Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan <i>output</i>: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data</li> </ul> |
|    | Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> serta perbaikan gizi lainnya melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua</li> <li>Peningkatan gizi, dengan <i>output</i>: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum <i>stunting</i> terjadi serta pemberian tata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| No             | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>laksananya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dari <i>buffer stock</i>, serta implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan <i>output</i>: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL</li> <li>• Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan <i>stunting</i>, dengan <i>output</i>: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan <i>stunting</i> melalui berbagai media, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan</li> <li>• Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan <i>output</i>: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB</li> <li>• Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Pemberantasan IUU <i>Fishing</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)</li> </ul> Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua</li> </ul>                                                              | Peningkatan pertahanan dan keamanan wilayah, termasuk pemberantasan IUU <i>Fishing</i> pada WPP 717, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakan regulasi dan upaya pertahanan keamanan, dengan <i>output</i>: peningkatan operasi kapal dan <i>speedboat</i> pengawas, serta patroli mandiri</li> <li>• Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan <i>output</i>: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta IUU (<i>illegal, unreported, unregulated</i>) <i>fishing</i>.</li> <li>• Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan <i>output</i>: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)</li> <li>• Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan <i>output</i>: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua</li> <li>• Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan <i>output</i>: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut</li> </ul> |
|                | Provinsi Papua                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan <i>output</i>: peningkatan data inventarisasi tanah ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat</li> <li>• Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan <i>output</i>: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT)</li> <li>• Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan <i>output</i>: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E1<br>E2<br>E3 | Kawasan Konservasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E1: TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen)</li> <li>• E2: TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, dan Kab. Keerom)</li> <li>• E3: KKN Padaido (Kab. Biak Numfor)</li> </ul> | Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21.</li> <li>• Optimalisasi tata kelola kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No | Lokasi Prioritas                                                                                                                                                                             | Highlight Indikasi Intervensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem, dengan <i>output</i>: inventarisasi keterancaman spesies dan konservasi biota yang terancam punah.</li> <li>• Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: penyediaan fasilitas penelitian dan pengembangan, penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon, pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan, dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan</li> <li>• Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan <i>output</i>: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas)</li> <li>• Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E4 | Lingkungan Hidup: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provinsi Papua</li> </ul> Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• E4: Kota Jayapura</li> </ul> | Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan kampung/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pemberian fasilitasi dan pembinaan dalam adaptasi perubahan iklim</li> <li>• Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan <i>output</i>: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan <i>Nature-Based Solution</i> dan <i>Gray Infrastructure</i> untuk mitigasi ancaman tsunami, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik</li> <li>• Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan <i>output</i>: pendampingan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan perlindungan jalur jelajah satwa</li> <li>• Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan <i>output</i>: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan</li> </ul> |
|    | Provinsi Papua                                                                                                                                                                               | Peningkatan <i>smart government</i> , penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dengan <i>output</i>: optimalisasi penerapan SIPD, SIKD, dan SIPPP sebagai <i>platform</i> terintegrasi pemerintahan di daerah</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen kinerja ASN, dengan <i>output</i>: pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur daerah, pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan penganggaran SPM serta pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Percepatan digitalisasi pelayanan publik untuk mendukung <i>smart government</i>, dengan <i>output</i>: portal pelayanan publik dan administrasi serta penerapan PTSP berbasis OSS</li> <li>• Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lampiran IV)

#### 4.1.1.4 Arahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (SDGs). Agenda internasional ini untuk menjawab tuntutan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim yang diupayakan dalam bentuk aksi nyata. Diharapkan agenda ini dapat tercapai di tahun 2030, dengan tujuan dan target meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) meliputi:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia
- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
- g. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs tersebut diatas sangat relevan dengan konteks pembangunan Papua untuk saat ini maupun yang akan datang. Dalam Pergub Nomor 82 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDGs Provinsi Papua juga telah dijabarkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, tanpa kelaparan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Metada Indikator SDGs telah mengalami perubahan menjadi 299 indikator berdasarkan Metada Tahun 2024, dari indikator tersebut terdapat kewenangan Provinsi, dimana 11 (sebelas) prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi penekanan dan urgensi bagi pembangunan di Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. TPB 1 : Tanpa Kemiskinan
- b. TPB 2 : Tanpa Kelaparan

- c. TPB 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- d. TPB 4 : Pendidikan Berkualitas
- e. TPB 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- f. TPB 7 : Energi bersih
- g. TPB 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- h. TPB 10 : Berkurangnya Kesenjangan Wilayah
- i. TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim
- j. TPB 15 : Ekosistem
- k. TPB 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

#### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Provinsi Papua Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2026 tidak dapat dilepaskan dari mandat yang dijalankan oleh Pemerintah Papua sesuai dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPD) Provinsi Papua tahun 2024-2026. Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.2 Matriks Tujuan, Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026**

| Tujuan/Sasaran |                                                                                                                                | Indikator kerja                                         | Satuan        | Target 2026        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| <b>T1</b>      | <b>Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri berbasis kampung</b>                             | <b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>                         | <b>persen</b> | <b>4,02 - 4,15</b> |
| S1             | Pembangunan kampung mandiri ekonomi                                                                                            | Pencapaian pembangunan di lokus kampung mandiri ekonomi | persen        | 25                 |
|                |                                                                                                                                | Status IDM kampung mandiri ekonomi                      | kategori      | Maju               |
| S2             | Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan                                                 | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)               | persen        | 86,8               |
|                |                                                                                                                                | Produktivitas tanaman pangan utama                      | Ha            | 46,41              |
|                |                                                                                                                                | Produktivitas perikanan                                 | Ton/tahun     | 326.944,73         |
|                |                                                                                                                                | Angka Konsumsi Ikan                                     | Kg/KAP/TH     | 36                 |
| S3             | Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan | Produksi perikanan                                      | Ton/Tahun     | 326.944,73         |
|                |                                                                                                                                | Nilai tukar petani sub sektor perikanan                 | indeks        | 118,03             |



| Tujuan/Sasaran |                                                                                                                                                     | Indikator kerja                                                     | Satuan   | Target 2026 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| S4             | Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas                                           | Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | persen   | 11,71       |
|                |                                                                                                                                                     | Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB          | persen   | 12          |
| S5             | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim                                                                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                    | indeks   | 82,35       |
|                |                                                                                                                                                     | tingkat emisi gas rumah kaca                                        | persen   | 1.923       |
|                |                                                                                                                                                     | Indeks Kualitas Udara                                               | indeks   | 98,2        |
|                |                                                                                                                                                     | Indeks Kualitas Air                                                 | indeks   | 56,7418     |
|                |                                                                                                                                                     | Indeks Kualitas air laut                                            | indeks   | 97,29       |
| S6             | Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan                                                                                 | Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan        | persen   | 46,49       |
|                |                                                                                                                                                     | Laju Deforestasi                                                    | Ribu Ha  | 13.000      |
| S7             | Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB                         | persen   | 9,67        |
|                |                                                                                                                                                     | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB       | persen   | 3           |
|                |                                                                                                                                                     | Cakupan bina kelompok pengrajin                                     | kelompok | 1.850       |
|                |                                                                                                                                                     | Jumlah Industri rakyat yang dikembangkan                            | unit     | 8.000       |
|                |                                                                                                                                                     | jumlah koperasi aktif                                               | unit     | 658         |
|                |                                                                                                                                                     | Pertumbuhan Wirausaha Baru                                          | Persen   | 15,56       |
|                |                                                                                                                                                     | Jumlah UMKM OAP yang berkembang                                     | unit     | 389         |
|                |                                                                                                                                                     |                                                                     |          |             |
| S8             | Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan                                                                   | Jumlah unit usaha masyarakat di sektor pertambangan                 | Unit     | 11          |
|                |                                                                                                                                                     | Persentase tenaga kerja sektor pertambangan                         | persen   | 0,13        |
| S9             | Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah                                                                   | Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)                                   | trilyun  | 1820        |
|                |                                                                                                                                                     | Jumlah perusahaan PMDN dan PMA                                      | unit     | 338         |
|                |                                                                                                                                                     | Jumlah tenaga kerja                                                 | Orang    | NA          |
| T2             | Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Daerah                                                                                    | Persentase Kebutuhan Dasar Masyarakat                               | Persen   | 95          |

| Tujuan/Sasaran |                                                                                                                                      | Indikator kerja                                                  | Satuan        | Target 2026  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                | <b>Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar</b>                                                   |                                                                  |               |              |
| S10            | Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten                                                                                     | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi (%) | Persen        | 95           |
|                |                                                                                                                                      | Jumlah rencana rinci tata ruang kabupaten dan kota               | Kabupaten     | 9            |
| S11            | Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah                                                      | Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik (%)    | Persen        | -            |
| S12            | Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah | Cakupan Panjang Jalan (Km)                                       | Km            | 2.250        |
| S13            | Menyiapkan papua gerbang ekspor                                                                                                      | Tersedianya Papua Gerbang ekspor                                 | Unit          | 1            |
| S14            | Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman                                                                   | Cakupan Rumah Layak Huni (%)                                     | Persen        | 95           |
|                |                                                                                                                                      | Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik                         | Persen        |              |
| S15            | Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan                                                                    | Rasio Ketersediaan Daya Listrik                                  | persen        | 50           |
|                |                                                                                                                                      | Jumlah energi Alternatif yang dikembangkan                       | Unit          | -            |
| S16            | Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah                                                       | Cakupan Layanan Telekomunikasi                                   | Persen        | 63           |
| <b>T3</b>      | <b>Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri dan Berdaya Saing</b>                                                          | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>                                | <b>Indeks</b> | <b>68,21</b> |
| S17            | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                                                                                           | Rata-rata lama sekolah                                           | tahun         | 9,26         |
|                |                                                                                                                                      | Harapan lama sekolah                                             | tahun         | 13,48        |

| Tujuan/Sasaran |                                                                | Indikator kerja                           | Satuan         | Target 2026     |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| S18            | Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat                     | Pengeluaran per kapita                    | Rp ribu /Orang | 9.254           |
| S19            | Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat                      | Umur Harapan Hidup                        | tahun          | 66,84           |
| <b>T4</b>      | <b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>          | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>         | <b>Indeks</b>  | <b>80.50.00</b> |
| S20            | Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua      | Nilai SAKIP                               | Nilai          | 80,5            |
| S21            | Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah        | Indeks         | 95              |
| S22            | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                         | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik | Indeks         | 95              |

Sumber: RPD Provinsi Papua. Tahun 2024-2026, 2025

## 4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

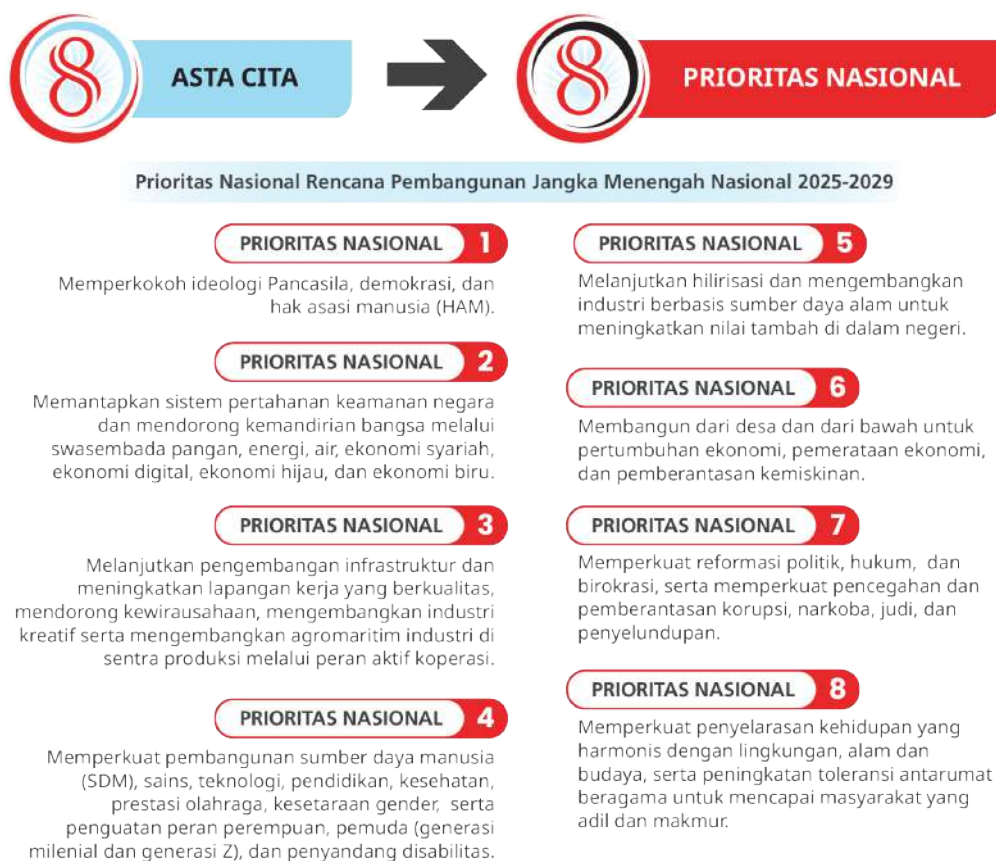
Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2026 merupakan satu proses konsolidasi beberapa arahan yang telah diberikan oleh beberapa dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah lainnya, berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 serta pemetaan terhadap permasalahan serta isu strategis yang mengemuka di Papua. Selain itu, uraian prioritas pembangunan daerah tahun 2026 juga sangat terkait dengan tema pembangunan daerah yang disusung pada tahun 2026 seiring dengan adanya faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua tahun 2026.

### 4.2.2. Tema dan Prioritas RKP Tahun 2026

Visi Presiden periode 2025 – 2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. RPJMN Tahun 2025 – 2029 memuat delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita. Tahun 2026 merupakan tahun kedua transisi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029. RKP Tahun 2026 sebagai tahap kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029 memiliki kedudukan strategis dalam perwujudan fondasi transformasi, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Tema pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 adalah: **"Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif"**, dengan fokus utama pembangunan adalah (a) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dengan target pertumbuhan 6,3 persen; (b) Meningkatkan produktivitas melalui program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, percepatan pembangunan rumah sakit daerah, transformasi digital, dan reformasi birokrasi. (c) Mendukung swasembada pangan dan energi melalui pembangunan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu-hilir; (d) Mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dengan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan, termasuk pembangunan tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan sosial; (e) Meningkatkan investasi produktif, terutama penanaman modal asing berorientasi ekspor, serta memperkuat stabilitas makroekonomi dan fiskal adaptif; dan (f) Melakukan deregulasi perizinan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

**Gambar IV.4 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan**



Sumber : Perpres RPJMN. Tahun 2025 – 2029, Bappenas

Selanjutnya, Setiap wilayah berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka sesuai RKP Tahun 2026 kebijakan

pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Secara ringkas, RKP 2026 fokus pada peningkatan produktivitas nasional, ketahanan pangan dan energi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026**

| No | Indikator                               | Target 2026 |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)            | 5,8 - 6,3   |
| 2  | PDRB Per Kapita (juta)                  | 90,9 - 93,8 |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi                | 0.4         |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)        | 4,44 - 4,96 |
| 5  | Tingkat Kemiskinan (%)                  | 6,5-7,5     |
| 6  | Rasio Gini (indeks)                     | 0,377-0,380 |
| 7  | Indeks Modal Manusia                    | 0.45        |
| 8  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)      | 37,14       |
| 9  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah | 82.35       |

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026

### 4.2.3. Pokok-Pokok Pikiran DPRP

Pokok-pokok pikiran DPRP merupakan bagian dari saran dan masukan DPRP dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPD serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRP melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRP menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2026. Masukan yang telah masuk dalam SIPD-RI Kementerian. Dalam Negeri kemudian diseleksi berdasarkan kewenangan provinsi dan kemudian dilakukan pemilahan berdasarkan prioritas. Berdasarkan saran, masukan, dan usulan DPRP Provinsi Papua dalam penyempurnaan RKPD Tahun 2026, maka telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4 Telaah Pokok Pikiran DPRP Papua**

| No | USULAN                                       | MASALAH                                                                                                                                                                                                                            | ALAMAT LOKASI                                                                     | OPD TUJUAN AWAL                 |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Kurangnya Fasilitas Infrastruktur Pariwisata | Pembuatan Gazebo di pantai                                                                                                                                                                                                         | Kp. Manswang Distrik Biak Kota , Provinsi Papua                                   | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata |
|    |                                              | Pembangunan Eko Wisata Kali Biru di Kampung Brab                                                                                                                                                                                   | Distrik Nimbokrang, Provinsi Papua                                                |                                 |
|    |                                              | Taman Burung dan Anggrek merupakan salah satu obyek wisata di Biak yang didirikan pada tahun 1984. Lokasinya ada di Bosnik, Desa Rim, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Selain sebagai sarana pariwisata, | Desa RIM, Kampung Bosnik Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua |                                 |

| No | USULAN                                                                                                                                                     | MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ALAMAT LOKASI                                                                                                                                  | OPD TUJUAN AWAL                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                            | area ini juga menjadi tempat konservasi, pendidikan dan penelitian yang didalamnya terdapat berbagai koleksi burung dan anggrek. Namun terjadi masalah saat ini, dikarenakan kondisi dilapangan yang perlu di benahi.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Pembuatan Gasebo/Pondok di Kolam Pemandian Kambung Bambar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Distrik Waibhu, Provinsi Papua                                                                                                                 |                                      |
| 2  | Belum Optimalnya Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi                                                                        | Wilayah pesisir terancam mengalami kerusakan akibat abrasi pantai yang semakin parah karena minimnya upaya pelestarian ekosistem hutan bakau yang berfungsi sebagai pelindung alami garis pantai.                                                                                                                                                                                         | Pantai Kampung Suendwerii, Provinsi Papua                                                                                                      | Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup |
|    |                                                                                                                                                            | Pelestarian Hutan bakau di pantai Holtekamp & Hamadi sebagai pelindung dari ancaman tsunami                                                                                                                                                                                                                                                                                               | pantai Holtekamp & Hamadi – Kota Jayapura, Provinsi Papua                                                                                      |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Pelestarian Hutan di gunung cyclop untuk mencegah bencana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cyclop – Sentani – Kab.Jayapura, Provinsi Papua                                                                                                |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Pengadaan mesin/alat pembuatan wood pellet dan briket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kamp Ubiau Distrik Arso, Skanto-Distrik Skanto, Kamp.Gudang Garam, Provinsi Papua                                                              |                                      |
| 3  | Belum Optimalnya Fasilitas Penyediaan Prasarana dan sarana Usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan | Kurangnya fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) di Distrik Wonti menghambat pengawetan hasil panen dan perikanan, sehingga menurunkan nilai ekonomi produk dan pendapatan masyarakat setempat.                                                                                                                                                                                      | Distrik Wonti, Kab. Waropen, Provinsi Papua                                                                                                    | Dinas Kelautan Dan Perikanan         |
|    |                                                                                                                                                            | Kurangnya fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) di Distrik Demba, Kabupaten Waropen menghambat pengawetan hasil panen dan perikanan, sehingga menurunkan nilai ekonomi produk dan pendapatan masyarakat setempat.                                                                                                                                                                   | Distrik Demba Kab. Waropen, Provinsi Papua                                                                                                     |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Nelayan di Kabupaten Waropen menghadapi keterbatasan alat transportasi laut yang memadai seperti perahu fiber dan motor penggerak 15 PK, sehingga menghambat jangkauan penangkapan ikan, mengurangi produktivitas, meningkatkan risiko keselamatan saat melaut, dan berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat nelayan. RetryClaude can make mistakes. Please double-check responses. | Kabupaten Waropen, Provinsi Papua                                                                                                              |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | potensi ekonomi dari budidaya ikan air tawar belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedianya infrastruktur kolam budidaya dan pondok pengunjung yang dapat mendukung kegiatan produksi dan ekowisata perikanan.                                                                                                                                                          | Kampung Wafur , Provinsi Papua                                                                                                                 |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Para nelayan mengalami kendala dalam meningkatkan hasil tangkapan ikan karena ketiadaan rumpon sebagai alat bantu yang berfungsi mengumpulkan ikan di satu lokasi untuk memudahkan proses penangkapan.                                                                                                                                                                                    | Kampung Wafur , Provinsi Papua                                                                                                                 |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Produktivitas dan kualitas hasil tangkapan nelayan terhambat akibat minimnya ketersediaan jaring yang memadai serta coolbox untuk menjaga kesegaran ikan selama proses distribusi dan pemasaran.                                                                                                                                                                                          | Kampung Wafur , Provinsi Papua                                                                                                                 |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Mobilitas dan jangkauan nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut terbatas karena kurangnya motor tempel dan viber berkapasitas 15 PK yang menjadi sarana transportasi utama.                                                                                                                                                                                            | Kompleks Usaha Nelayan dapatkomisi , Provinsi Papua                                                                                            |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Bantuan pengadaan motor tempel untuk nelayan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Biak Kota, Provinsi Papua                                                                                                                      |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Bantuan pengadaan rumpon untuk nelayan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Biak Kota, Provinsi Papua                                                                                                                      |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Unit Motor Tempel dan Perahu Viber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kp. Manwan kel. walipnon Kam. pasi , Provinsi Papua                                                                                            |                                      |
|    |                                                                                                                                                            | Pengadaan Motor Tempel 15 PK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kelompok nelayan Mandala Jaya di Base G, Dok 7 dan Dok 4, Kel.Tanjung Ria RT 005/RW 002 - Distrik Jayapura Utara-Kota Jayapura, Provinsi Papua |                                      |



| No | USULAN                                                                   | MASALAH                                                                                                                                                                                                     | ALAMAT LOKASI                                                                                                                          | OPD TUJUAN AWAL                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          | Pengadaan Perahu Fiber 12 Ft.                                                                                                                                                                               | kelompok usaha nelayan KOMPAK Base G, Dok 7 dan Dok 4 Kel.Mandala, RT 10/RW 01 -Distrik Jayapura Utara – Kota Jayapura, Provinsi Papua |                                                                      |
|    |                                                                          | Pengadaan Cool Box 600 Liter                                                                                                                                                                                | kelompok usaha nelayan di Base G, Dok 7 dan Dok 4, Distrik Jayapura Utara. , Provinsi Papua                                            |                                                                      |
|    |                                                                          | Pengadaan Alat Penangkapan dan Jaring                                                                                                                                                                       | kelompok usaha nelayan TORANI di Base G, Dok 7 dan Dok 4, Kel.Mandala -Distrik Jayapura Utara-Kota Jayapura. , Provinsi Papua          |                                                                      |
|    |                                                                          | Pelatihan dan Peralatan untuk produksi ikan asin dari ikan air tawar                                                                                                                                        | Kamp.Molok Distrik Senggi, Provinsi Papua                                                                                              |                                                                      |
|    |                                                                          | Pengadaan alat produksi untuk pengasapan ikan                                                                                                                                                               | Kp Mansawang Distrik Biak Kota Kab Biak Numfor, Provinsi Papua                                                                         |                                                                      |
|    |                                                                          | Tidak Maksimalnya Penataan Aset dan Pengelolaan kepada PPI Biak Numfor bertujuan untuk memperhatikan Tenaga Kerja dari Masyarakat local, tidak lagi menggunakan SDM luar (bitung), penyerapan tenaga kerja. | Kabupaten Blak Numfor, Provinsi Papua                                                                                                  |                                                                      |
|    |                                                                          | Pembangunan Rumah Penampungan Hasil Laut serta kelengkapannya (Low Price Walk In Refrigerator) di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura.                                                                       | Distrik Depapre, Provinsi Papua                                                                                                        |                                                                      |
| 4  | Belum Optimalnya Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Batuan Keramba Ikan Air Tawar beserta Bibit Ikan kampung yakombe                                                                                                                                            | Distrik Waibu, Provinsi Papua                                                                                                          | Dinas Kelautan Dan Perikanan                                         |
| 5  | Aksesibilitas infrastruktur yang sangat rendah                           | Pengadaan lampu jalan                                                                                                                                                                                       | Kampung Dousi – Distrik Biak Barat -Kab.Biak Numfor, Provinsi Papua                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|    |                                                                          | Pembangunan Talud di Pulau Mjos Mangguandy                                                                                                                                                                  | Pulau Mjos Mangguandy – Distrik Aimando (pulau terluar)-Kab.Biak Numfor, Provinsi Papua                                                |                                                                      |
|    |                                                                          | Penerangan di depan kantor Gubernur. Sangat tidak aman karena ada orang mabuk, ganja dan lain-lain. Dibutuhkan penerangan di sekitar Pantai Dok 2.                                                          | Pantai Dok 2 - Distrik Jayapura Utara-Kota Jayapura, Provinsi Papua                                                                    |                                                                      |
|    |                                                                          | Normalisasi Kali Sarwa – Swandiwe, di Biak Numfor                                                                                                                                                           | Sarwa – Swandiwe, Provinsi Papua                                                                                                       |                                                                      |
|    |                                                                          | Rawan kecelakaan, agar perlu di pasang pagar pembatas di Jln. Sam Ratulangi, di depan Polda                                                                                                                 | Jln. Sam Ratulangi RT/RW 007/004, Provinsi Papua                                                                                       |                                                                      |
| 6  | Belum Optimalnya /Rekontruksi Peningkatan Jalan                          | Peningkatan Jalan Provinsi Biak - Supiori melalui jalur Barat                                                                                                                                               | Biak Supiori, Provinsi Papua                                                                                                           | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|    |                                                                          | Peningkatan jalan (aspal) Botawa - koweda - barapasi, waropen                                                                                                                                               | Botawa - koweda - barapasi, Provinsi Papua                                                                                             |                                                                      |
|    |                                                                          | Pembuatan Guardrail, road barrier, atau traffic cone pembatas/pelindung jalan jurang JALAN YOKA-ARSO                                                                                                        | YOKA-ARSO, Provinsi Papua                                                                                                              |                                                                      |
|    |                                                                          | Jalan tanjakan yoka-puay pembuatan Penahan pengurangan dan pemerataan tebing                                                                                                                                | Jalan yoka-puay, Provinsi Papua                                                                                                        |                                                                      |
|    |                                                                          | Peningkatan ruas jalan                                                                                                                                                                                      | Yoka,Arso 4, Arso 14 Kwarjab – Kab.Keerom, Provinsi Papua                                                                              |                                                                      |
|    |                                                                          | Pemasangan Marka Jalan Poros Biak – Supiori di Biak Numfor dan Supiori                                                                                                                                      | alan Poros Biak – Supiori, Provinsi Papua                                                                                              |                                                                      |
|    |                                                                          | Peningkatan jalan (aspal) jalan Waren - Botawa 10 km, waropen                                                                                                                                               | jalan Waren - Botawa, Provinsi Papua                                                                                                   |                                                                      |
|    |                                                                          | Peningkatan jalan (aspal) Botawa - koweda - barapasi, waropen                                                                                                                                               | Botawa - koweda - barapasi, Provinsi Papua                                                                                             |                                                                      |
|    |                                                                          | Struktur tanah penopang jalan berpotensi longsong sehingga perlu dibuatkan Talud                                                                                                                            | Jl. Amphibi, Kelurahan Hamadi , Provinsi Papua                                                                                         |                                                                      |
| 7  | Belum optimalnya ketersediaan air baku                                   | Pembangunan SPAM Kampung Masyai di Supiori – Supiori Barat                                                                                                                                                  | Kampung Masyai di Supiori , Provinsi Papua                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan                        |

| No | USULAN                                                                   | MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALAMAT LOKASI                                                           | OPD TUJUAN AWAL                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Dan Kawasan Permukiman                                               |
| 8  | Belum Optimalnya ketersediaan air bersih yang belum                      | Masyarakat Kampung Tawerma di Kabupaten Supiori mengalami kesulitan akses terhadap air bersih karena ketiadaan sarana penampungan air yang memadai, sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sanitasi, dan kesehatan penduduk setempat.                                                                        | Kampung Yawerma Supiori, Provinsi Papua                                 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|    |                                                                          | Warga Kampung Sorendiwieri menghadapi krisis penyimpanan air bersih akibat tidak tersedianya bak penampungan yang layak, mengakibatkan kesulitan pemenuhan kebutuhan air untuk konsumsi dan kebersihan, terutama pada musim kemarau, yang berpotensi memicu masalah kesehatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. | Kampung Yawerma Supiori , Provinsi Papua                                |                                                                      |
|    |                                                                          | kurangnya ketersediaan dan akses air bersih                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arso 14, Provinsi Papua                                                 |                                                                      |
| 9  | Belum Optimalnya Pembangunan Jalan                                       | Pembangunan (buka jalan) jalan natabui - karawi 15 km, yapen                                                                                                                                                                                                                                                                   | jalan natabui - karawi, Provinsi Papua                                  | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
|    |                                                                          | Pemeliharaan Jalan Ruas Nimbonton – Taja – Lere (Yapsi Kab. Jayapura)                                                                                                                                                                                                                                                          | Taja – Lere (Yapsi Kab. Jayapura), Provinsi Papua                       |                                                                      |
|    |                                                                          | Ruas Jalan Junction – Wardo ( Ruas Darfuar – Wardo ) di Biak Barat - Yendidori                                                                                                                                                                                                                                                 | Junction – Wardo ( Ruas Darfuar – Wardo ), Provinsi Papua               |                                                                      |
|    |                                                                          | Pemeliharaan/Pembersihan Jalan Yoka-Puay dan Puay-Arso 4 Skanto                                                                                                                                                                                                                                                                | Jalan Yoka-Puay dan Puay-Arso 4 Skanto, Provinsi Papua                  |                                                                      |
|    |                                                                          | Ketika hujan selalu ada genangan air di jalan Sam Ratulangi depan Mal Jayapura                                                                                                                                                                                                                                                 | Kel. Bhayangkara, Dist. Jayapura Utara RT/RW 007/004, Provinsi Papua    |                                                                      |
| 10 | Memenuhi Kebutuhan Air Bersih Untuk Pelayanan Dasar dan Kegiatan Ekonomi | Pembangunan Jaringan Air Bersih di Kelurahan Asano Distrik Abepura                                                                                                                                                                                                                                                             | Asano Distrik Abepura, Provinsi Papua                                   | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 11 | Mengoptimalkan Pembangunan Jembatan                                      | Pembangunan jembatan demba                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Distrik demba, Provinsi Papua                                           | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman |
| 12 | Anak Tidak Sekolah Masih Tinggi (ATS)                                    | Mahalnya Biaya Masuk SD, SMP dan SMA/SMK sehingga banyak anak-anak yang putus sekolah                                                                                                                                                                                                                                          | Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Provinsi Papua                         | Dinas Pendidikan                                                     |
| 13 | Daya saing pendidikan Masih rendah                                       | Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Kedokteran Beridentitas KTP Kabupaten Kepulauan Yapen dan Mahasiswa Kedokteran Beridentitas KTP Kabupaten Waropen                                                                                                                                                                            | Kota Jayapura, Provinsi Papua                                           | Dinas Pendidikan                                                     |
| 14 | Rendahnya akses pasar atas produk pertanian/perkebunan lokal             | Masyarakat menghadapi kesulitan dalam melakukan aktivitas jual beli pinang karena tidak tersedianya pondok khusus yang dapat menjadi pusat transaksi dan penyimpanan komoditas pinang secara memadai.                                                                                                                          | Kampung Yawerma Supiori , Provinsi Papua                                | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian                                  |
| 15 | Teknik Produksi yang belum update                                        | Pengadaan alat produksi kripik keladi dan kripik pisang                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kp. Manswang Distrik Biak Kota , Provinsi Papua                         | Dinas Perdagangan Dan Perindustrian                                  |
|    |                                                                          | Pembangunan rumah untuk Home Industry                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kp. Manswang Distrik Biak Kota , Provinsi Papua                         |                                                                      |
|    |                                                                          | Pembuatan Pondok Jualan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kp. Oपुरi Distrik Biak Kota , Provinsi Papua                            |                                                                      |
| 16 | Belum Optimalnya Prasarana Pertanian Terbatas                            | Pengadaan alat-alat Pertanian, Bibit tanaman Pertanian dan Pupuk yang masih terbatas                                                                                                                                                                                                                                           | KAMPUNG JATURAHARJA ARSO 10 , Provinsi Papua                            | Dinas Perkebunan Dan Peternakan                                      |
|    |                                                                          | Kekurangan Bantuan Bagi petani terutama Bibit pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kampung Buton Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Provinsi Papua |                                                                      |
| 17 | Belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian/perkebunan            | Pengadaan mesin Pengupas Kelapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kab.Keerom,Kab.Sarmi, Kab.Sarmi,Kab.Biak,Kab.Supiori, Provinsi Papua    | Dinas Perkebunan Dan Peternakan                                      |

| No | USULAN                                                                                  | MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALAMAT LOKASI                                                              | OPD TUJUAN AWAL                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 18 | Kurangnya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | Banyak petani yang masih tidak mendapatkan bantuan pupuk subsidi dan kekurangan biaya untuk memperoleh pupuk non subsidi                                                                                                                                                                                | Jl. Kampung Gambut Koya Barat, Muara Tami., Provinsi Papua                 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Pangan |
|    |                                                                                         | Pengadaan/Bantuan Pupuk kepada Petani di Distrik Muara Tami Kota Jayapura                                                                                                                                                                                                                               | Distrik Muara Tami, Provinsi Papua                                         | Dinas Perkebunan Dan Peternakan                |
| 19 | Rendahnya Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan                  | Mesin Pengolahan Sagu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kamp.Workwana Distrik Arso,Kamp.Suskun Distrik Manen, Provinsi Papua       | Dinas Perkebunan Dan Peternakan                |
|    |                                                                                         | Penyediaan bibit Kakao dan perawatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Distrik Waris dan Distrik Web – Kabupaten Keerom, Provinsi Papua           |                                                |
|    |                                                                                         | Pengadaan mesin cocopeat                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kab.Keerom,Kab.Sarmi, Kab.Sarmi,Kab.Biak,Kab.Supiori , Provinsi Papua      |                                                |
| 20 | Rendahnya populasi dan produksi hasil Peternakan                                        | Keterbatasan fasilitas peternakan (ranch) sapi di Kabupaten Waropen menghambat pengembangan sektor peternakan, sehingga mengurangi potensi produksi daging lokal dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat peternak.                                                                                   | Distrik Waropen Bawah, Kab. Waropen, Provinsi Papua                        | Dinas Perkebunan Dan Peternakan                |
|    |                                                                                         | Kegiatan pertanian tradisional mengalami kendala dalam pengolahan lahan dan transportasi hasil panen karena terbatasnya layanan rental sewa sapi yang biasa digunakan sebagai hewan pembajak dan pengangkut.                                                                                            | Kampung Wafur , Provinsi Papua                                             |                                                |
|    |                                                                                         | Keterbatasan fasilitas peternakan (ranch) sapi di Kabupaten Waropen menghambat pengembangan sektor peternakan, sehingga mengurangi potensi produksi daging lokal dan peluang peningkatan ekonomi masyarakat peternak.                                                                                   | Kp. Kemon Jaya - SP 5 , Provinsi Papua                                     |                                                |
|    |                                                                                         | Pengadaan bibit ternak babi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kp.Dousi – Distrik Biak Barat - Kab.Biak Numfor, Provinsi Papua            |                                                |
|    |                                                                                         | Permintaan sapi untuk pengembangan peternakan di Kabupaten Waropen terhambat oleh minimnya fasilitas ranch yang memadai, sehingga menyebabkan rendahnya produksi daging lokal dan tertundanya peningkatan kesejahteraan ekonomi para peternak meskipun potensi pasar sangat menjanjikan.                | Distrik Waropen Bawah, Kab. Waropen,, Provinsi Papua                       |                                                |
|    |                                                                                         | UPTD pembibitan ternak dengan kelengkapan sesuai standart Perkiraan anggaran Rp 4,5 Milyar                                                                                                                                                                                                              | Kota Jayapura, Provinsi Papua                                              |                                                |
|    |                                                                                         | Pengadaan bibit babi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas peternakan lokal yang sulit mendapatkan sumber bibit berkualitas                                                                                                                                                                       | Kota Jayapura, Provinsi Papua                                              |                                                |
|    |                                                                                         | Kegiatan pertanian tradisional mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan biaya produksi akibat terbatasnya ketersediaan sapi untuk pembajakan lahan dan transportasi hasil panen, sehingga diperlukan pengadaan sapi tambahan untuk mengatasi kendala tersebut.                                 | Kota Jayapura, Provinsi Papua                                              |                                                |
|    |                                                                                         | Masyarakat Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, menghadapi kendala dalam pengembangan usaha peternakan ayam petelur karena keterbatasan akses terhadap bibit ayam petelur berkualitas, sehingga menghambat upaya peningkatan produksi telur dan pendapatan ekonomi rumah tangga di wilayah tersebut. | Lokasi Kampung Waibron,Distrik Sentani- Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua |                                                |
|    |                                                                                         | Masyarakat Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, mengalami kesulitan dalam mengembangkan peternakan sapi akibat tidak tersedianya bibit sapi unggul, sehingga menghambat upaya diversifikasi usaha peternakan dan peningkatan sumber protein hewani bagi kebutuhan masyarakat setempat.               | Lokasi Kampung Waibron,Distrik Sentani- Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua |                                                |
|    |                                                                                         | Masyarakat Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, terkendala dalam memenuhi permintaan pasar akan daging babi karena keterbatasan bibit ternak babi yang berkualitas, sehingga menghambat pengembangan usaha peternakan                                                                                | Lokasi Kampung Waibron,Distrik Sentani- Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua |                                                |

| No | USULAN                                                                                                     | MASALAH                                                                            | ALAMAT LOKASI                                                                                          | OPD TUJUAN AWAL                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                                            | tradisional yang memiliki nilai ekonomi dan kultural tinggi bagi masyarakat lokal. |                                                                                                        |                                                |
| 21 | Belum adanya kontrol yang baik untuk menjaga konsumsi dan keamanan pangan                                  | Bantuan pupuk bersubsidi                                                           | Kota Biak, Provinsi Papua                                                                              | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Pangan |
| 22 | Belum Optimalnya Peningkatan Ketahanan Pangan                                                              | Pengadaan Pupuk bersubsidi                                                         | Kp.Dousi – Distrik Biak Barat - Kab.Biak Numfor, Provinsi Papua                                        | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Pangan |
| 23 | Kurangnya Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan dan hewan | Olah lahan cabe dan bawang merah                                                   | Kampung Arsopura,Ubiyau,Jaifuri,Yuwanain, Naramben,Sarafan,Swakarsa - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Pangan |

#### 4.2.4. Tema dan Prioritas Provinsi Papua Tahun 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021, disamping isu strategis paling mutakhir yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2026. Berkaitan dengan hal tersebut, Tema Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Gambar IV.5 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2026



Sumber : Materi Konsultasi Publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2026, (2025)

Berdasarkan Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2026 yang telah dirumuskan diatas maka dirumuskan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2026 yaitu:

- a. **PRIORITAS I Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM** dengan fokus utama Peningkatan layanan dasar terutama Daerah 3T, Perwujudan akademi komunitas, Peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga lapangan lainnya terutama pada daerah 3T, Pelatihan dan keterampilan bagi kelompok rentan dalam rangka meningkatkan partisipasi angkatan kerja, Pencegahan penyakit endemik malaria, TB, HIV/AIDS.
- b. **PRIORITAS II Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan** dengan fokus utama Pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi unggulan lokal dan juga berbasis kampung, Pengembangan pariwisata berbasis wisata alam, Bahari dan budaya, pengembangan dan optimalisasi pertambangan dan Energi Baru Terbarukan (EBT), Optimalisasi potensi-potensi PAD, Penataan aset daerah provinsi sebagai salah satu potensi penerimaan PAD, Pemberdayaan kelompok rentan melalui usaha ekonomi produktif, Meningkatkan daya saing dan realisasi investasi pada sektor sektor unggulan, Meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dan Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM tenaga kerja lokal khususnya OAP, utamanya terkait pertanian, perikanan, dan pariwisata. Penelaahan atas RTRW Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota agar sesuai dengan pola dan struktur ruang dengan berbasis komoditas yang sesuai
- c. **PRIORITAS III Peningkatan Keamanan dan Ketertiban** dengan fokus utama Peningkatan ruang dialog dan pelibatan aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan dan penyelesaian konflik sosial, dan Penertiban Penjualan Miras Ilegal, Narkotika (NAPZA).
- d. **PRIORITAS IV Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah** dengan fokus utama Pengembangan jaringan komunikasi terutama daerah 3T, Pengembangan jaringan air bersih terutama daerah 3T, Peningkatan sanitasi layak, Peningkatan konektivitas antar wilayah (transportasi terpadu), dan Penertiban pemanfaatan ruang.
- e. **PRIORITAS V Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan pelayanan publik** dengan fokus utama Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan daerah dan redistribusi daerah, Percepatan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG), Pengendalian inflasi daerah, Percepatan Penyediaan data terpilah OAP, Pendampingan pemetaan hutan adat oleh kampung atau masyarakat hukum adat, dan Peningkatan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah

Kelima Prioritas pembangunan daerah diatas telah selaras dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel IV.5 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah 2026**

| No  | Permasalahan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| I.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya Aksesibilitas dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan kesehatan</li> <li>b. Rendahnya budaya baca pada masyarakat</li> <li>c. Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat</li> <li>d. Kurangnya Prestasi Olah Raga</li> <li>e. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah</li> <li>f. Belum terinternalisasinya nilai adat dan budaya asli tanah tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat</li> <li>g. Belum efektifnya upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP</li> <li>h. Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan</li> <li>i. Masih kurangnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak</li> </ul> | <p><b>Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Sosial Budaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Angka Putus Sekolah Cukup Tinggi</li> <li>2) Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Terutama daerah 3T</li> <li>3) Masih tingginya ketimpangan gender</li> <li>4) Daya saing kepemudaan yang masih rendah</li> <li>5) Pelayanan kesejahteraan sosial yang belum memadai</li> </ul>               | Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM                          |
| II. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas</li> <li>b. Belum optimalnya perananan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan</li> <li>c. Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim</li> <li>d. Belum terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal terutama pada sektor- sektor industri manufaktur, jasa, dan ekonomi kreatif</li> <li>e. Rendahnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan</li> </ul>                                            | <p><b>Kualitas Pembangunan Ekonomi yang Masih Rendah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi</li> <li>2) Rendahnya kontribusi industri pengolahan</li> <li>3) Kualitas tenaga kerja yang rendah</li> <li>4) Daya saing investasi yang rendah</li> <li>5) Defisit perdagangan antardaerah yang sangat tinggi</li> <li>6) Rendahnya Pendapatan Asli Daerah</li> </ul> | Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan |



| No   | Permasalahan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Kurangnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja</li> <li>g. Kurangnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah</li> <li>h. Kurang tersedianya pangan yang berkelanjutan</li> <li>i. Rendahnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta rendahnya kontribusi sektor pariwisata</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |
| IV.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum</li> <li>b. Kurangnya keharmonisan dan kohesifitas masyarakat</li> <li>c. Belum optimalnya Penegakan HAM</li> <li>d. Kurangnya kebebasan sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Penanganan Terhadap Keamanan dan Ketertiban Umum Belum Optimal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Angka kriminalitas yang cukup tinggi</li> </ol> <p><b>Tingkat Kerawanan Politik dan Demokrasi yang Patut Diwaspadai</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Semakin maraknya hoax, hate speech, dan propaganda hitam yang cenderung negatif mengganggu pelaksanaan pembangunan</li> <li>3) Tingkat kerawanan politik ternyata dinilai cukup tinggi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peningkatan Keamanan dan Ketertiban                                                |
| III. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kurangnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah</li> <li>b. Belum terimplementasinya Rencana Tata Ruang secara konsisten</li> <li>c. Belum tersedianya sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah</li> <li>d. Masih kurangnya pemenuhan rumah layak huni dan penataan pemukiman</li> <li>e. Kurangnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan</li> <li>f. Minimnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah</li> <li>g. Rendahnya kualitas pembangunan berbasis kampung</li> <li>h. Belum optimalnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan</li> <li>i. Kurangnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan</li> </ul> | <p><b>Sarana Prasarana dan Konektivitas yang Belum Memadai,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) akses air bersih masih rendah</li> <li>2) Tingkat elektrifikasi di Provinsi Papua masih belum memadai</li> <li>3) Kepemilikan rumah layak huni belum merata</li> <li>4) Akses komunikasi dan telekomunikasi belum merata</li> <li>5) Transportasi yang belum memadai</li> </ol> <p>1) sistem sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang belum berjalan dengan baik</p> <p><b>Kualitas Lingkungan Hidup yang Belum Maksimal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Kurangnya daerah serapan dan ruang hijau terbuka</li> <li>3) Masih tingginya alih fungsi kawasan serta penanganan banjir yang belum komprehensif</li> <li>4) Penanganan sampah yang belum optimal</li> </ol> | Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah |

| No | Permasalahan Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | kesiapsiagaan bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| V. | a. Rendahnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua<br>b. Rendahnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik<br>c. Rendahnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah<br>d. Belum optimalnya sistem akuntabilitas<br>e. pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah | <b>Belum Optimalnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b><br>1) nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Papua hanya bertahan pada predikat B (Baik).<br>2) angka indeks SPBE masih rendah<br>3) Provinsi Papua mengalami banyak kendala dalam mencapai reformasi birokrasi<br>4) Indeks SPI Provinsi Papua masuk dalam kategori Sangat Rentan | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan<br>Peningkatan pelayanan publik |

Adapun keselarasan tema dan prioritas pembangunan daerah RKPD Tahun 2026 dengan Tema dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.6 Keselarasan Tema dan Prioritas RKPD 2025 dengan RKP 2025**

| RKP 2026                                                                                                                                                                                                                                                       | RKPD PAPUA 2026                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tema:</b><br>Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif                                                                                                                                    | <b>Tema:</b><br>Percepatan Pembangunan Struktur Ekonomi yang Inklusif melalui Akselerasi Potensi Unggulan Daerah                                                                                                 |
| <b>PRIORITAS NASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PRIORITAS DAERAH</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prioritas Nasional 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)                                                                                                                                                            | <b>Prioritas Daerah 3:</b> Peningkatan Keamanan dan Ketertiban                                                                                                                                                   |
| <b>Prioritas Nasional 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru                                          | <b>Prioritas Daerah 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan                                                                                                                      |
| <b>Prioritas Nasional 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | <b>Prioritas Daerah 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan<br><br><b>Prioritas Daerah 4:</b> Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah |
| <b>Prioritas Nasional 4:</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,                                                                 | <b>Prioritas Daerah 1:</b> Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM                                                                                                                                               |

| RKP 2026                                                                                                                                                                                                 | RKPD PAPUA 2026                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| pemuda, dan penyandang disabilitas                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
| <b>Prioritas Nasional 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri                                                 | <b>Prioritas Daerah 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan |
| <b>Prioritas Nasional 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                                                                    | <b>Prioritas Daerah 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan |
| <b>Prioritas Nasional 7:</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba                                                       | <b>Prioritas Daerah 3:</b> Peningkatan Keamanan dan Ketertiban                              |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Prioritas Daerah 5:</b> Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik        |
| <b>Prioritas Nasional 8:</b> Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | <b>Prioritas Daerah 3:</b> Peningkatan Keamanan dan Ketertiban                              |
|                                                                                                                                                                                                          | <b>Prioritas Daerah 5:</b> Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik        |

Sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tersebut diatas, Sasaran pembangunan nasional dan Papua Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.7 Sasaran Target Pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Tahun 2026**

| No | Indikator Kinerja                | Target RPJMN 2025-2029 |             | Target RPD 2024-2026 | Target Nasional (RKP)        | Target Provinsi (RKP) | Realisasi 2024 | Target RKPD 2026 |
|----|----------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)     | 2025-2029              | 6,4         | 6,9 - 7,2            | 5,8 - 6,3                    | 5,0-5,7               | 4,11           | 4,02-4,15        |
| 2  | PDRB Per Kapita (Rp juta)        | 2025                   | 88,0        |                      | 5.870 (GNI per Kapita, US\$) | 90,9 – 93,8           | 49,60          | 53.60 - 100.27   |
|    |                                  | 2029                   | 126,9       |                      |                              |                       |                |                  |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi (%)     | 2025-2029              | 0,4         |                      | -                            | 0,4                   |                | 0,39 – 0,42      |
| 4  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 2025                   | 6,00-6,40   | 4,00                 | 4,44 - 4,96                  | 6,20-6,30             | 6,48           | 6,20-6,30        |
|    |                                  | 2029                   | 5,48-6,00   |                      |                              |                       |                |                  |
| 5  | Tingkat Kemiskinan (%)           | 2025                   | 16,00-16,50 | 16,25-16,78          | 6,5-7,5                      | 15,80-16,00           | 17,26          | 16,25-16,78      |
|    |                                  | 2029                   | 12,65-13,65 |                      |                              |                       |                |                  |
| 6  | Rasio Gini (indeks)              | 2025                   | 0,380-0,383 | 0,363-0,389          | 0,377-0,380                  | 0,362-0,368           | 0,362          | 0,362-0,368      |
|    |                                  | 2029                   | 0,355-0,359 |                      |                              |                       |                |                  |
| 7  |                                  | 2025                   | 0,44        |                      | Rasio 0,57                   | 0,45                  |                | 0,51             |

| No | Indikator Kinerja                              | Target RPJMN 2025-2029 |       | Target RPD 2024-2026 | Target Nasional (RKP) | Target Provinsi (RKP) | Realisasi 2024 | Target RKPD 2026 |
|----|------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|    | Indeks Modal Manusia                           | 2029                   | 0,47  |                      |                       |                       |                |                  |
| 8  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)             | 2025                   | 59,28 | 98,23                | 37,14                 | 63,46                 | 98,16          | 33,50            |
|    |                                                | 2029                   | 78,99 |                      |                       |                       |                |                  |
| 9  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah | 2025                   | 82,19 | 83,92                | 76,67                 | 82,35                 |                | 82,35            |
|    |                                                | 2029                   | 82,83 |                      |                       |                       |                |                  |

#### 4.3. PRORGAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2026

Sesuai dengan tema dan prioritas daerah yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2026 maka selanjutnya harus diuraikan kedalam konsep teknokratis program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di Provinsi Papua sehingga akan memunculkan satu gerakan komprehensif program yang berdampak serta memberi kontribusi terhadap pencapaian sasaran pokok yang disepakati secara bersama sama oleh berbagai pihak di Provinsi Papua, sebagai berikut:

**Tabel IV.8 Sinkronisasi Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026**

| Prioritas Nasional                                                                     | Prioritas Daerah                                    | Program Prioritas                                                                                          | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PN 1:</b><br>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | <b>PD 3:</b><br>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |     |                    |        |          | Pemerintahan Umum (Kesbangpol); Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
|                                                                                        |                                                     | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                               |     |                    |        |          |                                                                                               |
|                                                                                        |                                                     | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                              |     |                    |        |          |                                                                                               |
|                                                                                        |                                                     | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                   |     |                    |        |          |                                                                                               |
|                                                                                        |                                                     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |     |                    |        |          |                                                                                               |
|                                                                                        |                                                     | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                       |     |                    |        |          |                                                                                               |

| Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                       | Prioritas Daerah                                                                 | Program Prioritas                                                                        | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Penanggulangan Bencana                                                           |     |                    |        |          |                                                                                             |
| <b>PN 2:</b><br>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru | <b>PD 2:</b><br>Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil                             |     |                    |        |          | Pangan; Pertanian; Kelautan Perikanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Lingkungan Hidup |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                    |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                   |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                         |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                    |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                    |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                                   |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                          |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)                 |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengembangan UMKM                                                                |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                     |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Penyuluhan Pertanian                                                             |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                  |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                      |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengembangan Ekspor                                                              |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                         |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional                         |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Pengelolaan ketenagalistrikan                                                            |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Pengelolaan aspek kegeologian                                                            |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                     |     |                    |        |          |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                      |     |                    |        |          |                                                                                             |

| Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas Daerah                                                                                | Program Prioritas                                                                                                       | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengelolaan Hutan                                                                                               |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                         |     |                    |        |          |                                                        |
| <b>PN 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro- maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | <b>PD 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan                   | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                  |     |                    |        |          | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;; Pariwisata         |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                                     |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                            |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                         |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                      |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PD 4:</b> Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                    |     |                    |        |          | Komunikasi dan Informatika; Pariwisata; dan Kebudayaan |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Permukiman                                                                                         |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                        |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                           |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                    |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Perumahan                                                                                          |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                                     |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                         |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual                      |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                            |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLaj)                                                           |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                           |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengelolaan Penerbangan                                                                                         |     |                    |        |          |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                                                     |     |                    |        |          |                                                        |



| Prioritas Nasional                                                                                                                                                                                                | Prioritas Daerah                                     | Program Prioritas                                                           | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                    |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PN 4:</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas | <b>PD 1:</b> Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM | Program Pengelolaan Pendidikan                                              |     |                    |        |          | Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan; Kesehatan; Kepemudaan dan olahraga; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pengendalian Penduduk dan KB; Tenaga Kerja; Pemberdayaan Masyarakat dan desa; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengembangan Kurikulum                                              |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                   |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pembinaan Perpustakaan                                              |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno                        |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan                  |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengelolaan Arsip                                                   |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                                 |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Akreditasi dan Sertifikasi                                          |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                        |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan                                |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Rehabilitasi Sosial                                                 |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pemberdayaan Sosial                                                 |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                     |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Penanganan Bencana                                                  |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pencatatan Sipil                                                    |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                     |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                   |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Perlindungan Perempuan                                              |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                            |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Prioritas Nasional                                                                                                                       | Prioritas Daerah                                                              | Program Prioritas                                                                   | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Perlindungan Khusus Anak                                                    |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                                |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                               |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                        |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja                              |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                     |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Hubungan Industrial                                                         |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pengawasan Ketenagakerjaan                                                  |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pengembangan Kebudayaan                                                     |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                           |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pembinaan Sejarah                                                           |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                    |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pengelolaan Permuseuman                                                     |     |                    |        |          |                                                                                  |
| <b>PN 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri | <b>PD 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                                     |     |                    |        |          | Perindustrian ; Penanaman Modal Perdagangan; Pekerjaan                           |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                                        |     |                    |        |          | Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan                                             |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                              |     |                    |        |          |                                                                                  |
| <b>PN 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan                                    | <b>PD 2:</b> Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                              |     |                    |        |          | Perumahan dan Kawasan Permukiman; Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua                                   |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Program Peningkatan Kesejahteraan Orang Asli Papua                                  |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian dan Perkebunan                         |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                     |     |                    |        |          |                                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                                                               | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                                   |     |                    |        |          |                                                                                  |

| Prioritas Nasional                                                                                                          | Prioritas Daerah                               | Program Prioritas                                                             | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba | PD 3 :<br>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban  | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa                     |     |                    |        |          | Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Pemerintahan Umum, Sekretariat Daerah; Perbatasan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kebudayaan |
|                                                                                                                             | PD 5 :<br>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah                                       |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                            |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua                             |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah             |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah            |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                    |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                           |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                       |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                         |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Kepegawaian Daerah                                                    |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Pendidikan dan Pelatihan                                                      |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                      |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Pengelolaan Perbatasan                                                |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Perekonomian dan Pembangunan                                          |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan                                    |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Penataan Organisasi                                                   |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD                            |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Sekretariat Dewan Rakyat Papua                                        |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Utama dan Penunjang Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan                             |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                             |                                                | Program Peningkatan Pelayanan, Kedinasan Kepala/Wakil Kepala Daerah           |     |                    |        |          |                                                                                                                                                                        |
| PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan                                                                | PD 3 :<br>Peningkatan Keamanan dan Ketertiban  | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          |     |                    |        |          | Kehutanan; Ketentraman dan ketertiban Umum                                                                                                                             |

| Prioritas Nasional                                                                                                   | Prioritas Daerah                               | Program Prioritas                                                                         | SPM | Kemiskinan Ekstrem | Gender | Stunting | Bidang Urusan                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur | PD 5 :<br>Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |     |                    |        |          | Sosial; Pemberdayaan Masyarakat dan desa; Penanggulangan Bencana, Penghubung |
|                                                                                                                      |                                                | Program Penanggulangan Bencana                                                            |     |                    |        |          |                                                                              |
|                                                                                                                      |                                                | Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan                                         |     |                    |        |          |                                                                              |
|                                                                                                                      |                                                | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala/Wakil Kepala Daerah                        |     |                    |        |          |                                                                              |

# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN

## PEMBANGUNAN WILAYAH

### 5.1 Kerangka Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah pasca pemekaran wilayah melalui pembentukan DOB yang baru, arah kebijakan utama pengembangan wilayah Provinsi Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Untuk mewujudkan hal ini, maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat Asli Papua. Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan Karakteristik Wilayah Adat Papua. Dengan memperhatikan Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP), maka sesuai arahan Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua perlu dilakukan upaya Afirmasi untuk Wilayah Adat di Provinsi Papua.

Berdasarkan **Rencana Induk Pengembangan Provinsi Papua (RIPPP)**, arahan **Pengembangan Wilayah di Provinsi Papua perlu dilakukan upaya Afirmasi untuk Wilayah Adat di Provinsi Papua** melalui:

- a. Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembangunan Kampung, dan Pendampingan Masyarakat Adat;
- b. Penguatan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam kepemilikan dan pengelolaan Wilayah adat, meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat, melalui:
  - 1) Pengalokasian Dana dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang secara khusus didedikasikan untuk pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat;
  - 2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang khusus bertugas dan bertanggung jawab menyediakan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP; dan
  - 3) Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/ OAP yang berfungsi mendidik dan melatih pemuda/masyarakat

Papua, terutama masyarakat adat/OAP untuk pemetaan wilayah adat, pengorganisasian masyarakat, penguatan kelembagaan adat, pengembangan mata pencaharian, dan peningkatan ekonomi yang berbasis adat pada setiap wilayah adat.

- c. Peningkatan Keterlibatan Aktif masyarakat Papua, terutama masyarakat adat/OAP dalam pembangunan bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan;
- d. Penguatan komunikasi sosial antar masyarakat/ lembaga adat, maupun antara masyarakat /lembaga adat dengan pemangku kepentingan, serta mendorong kerja sama antar daerah;
- e. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- f. Peningkatan Kedewasaan Politik, Literasi Politik, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- g. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Kebijakan Khusus terhadap Masyarakat Adat/OAP yang tidak mempunyai identitas, melalui:
  - 1) Pembangunan Pusat Data Etnografi Masyarakat Adat/OAP yang menyediakan data spasial dan numerik untuk pencatatan dan pengadministrasian keberadaan masyarakat adat/ OAP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada setiap wilayah adat; dan
  - 2) Pembangunan Sistem Pendaftaran, Verifikasi, dan Pengadministrasian Masyarakat Adat dan Wilayah Adat di tingkat Pemerintah Provinsi.
- h. Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai simpul utama ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat industri dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau beberapa provinsi, serta sebagai pelabuhan hubungan internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan, melalui:
  - 1) Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama di Wilayah Indonesia Bagian Timur, Bagian Barat, dan Negara Asia Pasifik melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi;
  - 2) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
  - 3) Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
  - 4) Pengembangan Kegiatan Ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
  - 5) Pengembangan kerja sama pembangunan dengan kota-kota lain (Sister City); dan Peningkatan Kualitas SDM dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi utama PKN, terutama jasa, industri, dan perdagangan.
- i. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai simpul kedua ekspor impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, melalui:
  - 1) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam Provinsi;



- 2) Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan pembangunan prasarana kota terpadu;
  - 3) Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
  - 4) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
  - 5) Penataan Ruang Kota melalui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Tata Ruang Kota.
- j. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa distrik, melalui:
- 1) Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
  - 2) Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
  - 3) Peningkatan Peran Badan Usaha dalam Pembangunan Prasarana Perkotaan;
  - 4) Pengembangan Kegiatan Ekonomi Kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja; dan
  - 5) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang kota.

Adapun penataan ruang wilayah Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan, sebagaimana yang secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua terdiri atas:

- a. pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
- b. pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
- c. pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
- d. peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;
- e. pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
- f. pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
- g. pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
- h. pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan

- i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

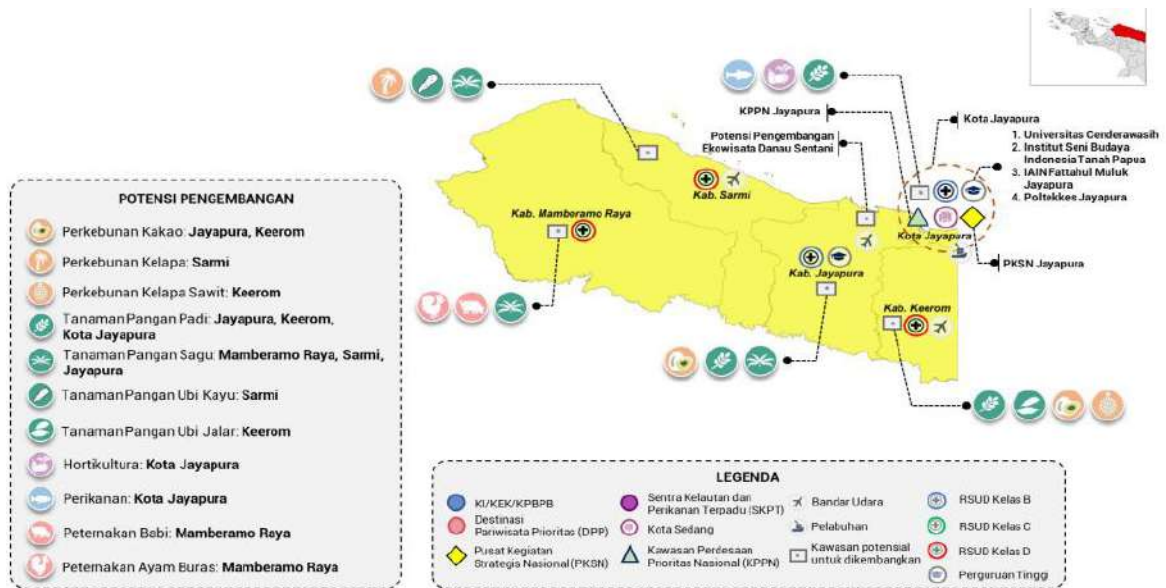
## 5.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua Berbasis Wilayah Adat

### 5.2.1 Wilayah Adat Tabi

Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Tabi yaitu: **“pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta Pengembangan Wilayah Adat Tabi sebagai sentra perkebunan, peternakan, tanaman pangan, hortikultura, kelautan dan perikanan, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, pusat industri, perdagangan, jasa, serta perkotaan yang berkelanjutan”**. Arah Kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- b. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- c. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center);
- d. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- e. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- f. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- g. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- h. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- i. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan:
  - 1) Mengembangkan sentra perkebunan dan peternakan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi dan kemitraan usaha;
  - 2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura, serta kelautan dan perikanan;
  - 3) Mengembangkan pusat industri, perdagangan dan jasa untuk mendukung pasar komoditas unggulan strategis Papua;
  - 4) Mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer dan sekunder serta pengembangan kawasan perbatasan negara;
  - 5) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global serta
  - 6) Mendorong pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara.

**Gambar V.1 Arah Pengembangan Wilayah Adat Tabi**



Sumber: PERPRES No. 24 Tahun 2023 tentang RIPPP

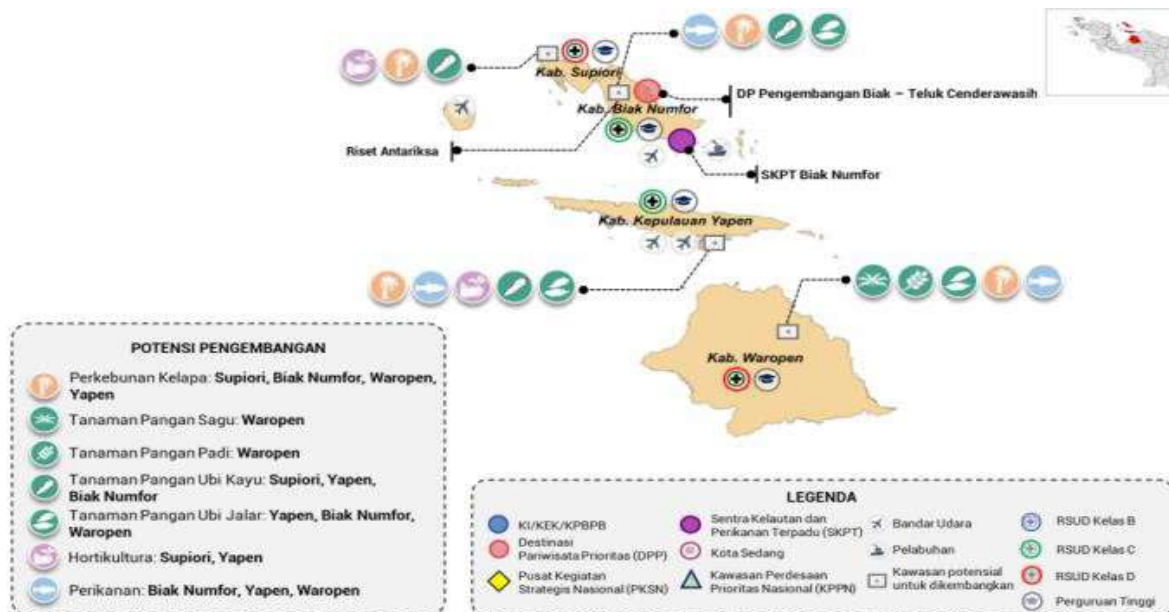
## 5.2.2 Wilayah Adat Saireri

Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Wilayah Adat Saireri yaitu: **“Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan Wilayah Adat Saireri sebagai sentra kelautan dan perikanan, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global, serta riset antariksa”**. Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:

- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan rujukan;
- Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
- Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center);
- Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan aksesibilitas telekomunikasi;
- Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan pembangkit EBT;
- Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyarakat kampung;
- Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
- Mengembangkan pusat riset antariksa;
- Mengelola dan melindungi potensi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil berkelanjutan berbasis kearifan lokal;
- Mengembangkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:

- k. Mengembangkan sentra kelautan dan perikanan yang didukung pemanfaatan teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
- l. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura; serta
- m. Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global.

Gambar V.2 Arah Pengembangan Wilayah Saireri



Sumber: PERPRES No. 24 Tahun 2023 tentang RIPP

### 5.3 Pengembangan Wilayah Berdasarkan Arah RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Skenario pengembangan wilayah Provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

- a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya dengan fokus pengembangan, yaitu (1) Kabupaten Keerom dengan pertanian (food estate, tanaman pangan dan perkebunan) dan pertambangan; (2) Kabupaten Sarmi dengan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICHOL *Papua Home industri Coconut Oil*); (3) Kabupaten Jayapura dengan pertanian dan industri; serta (4) Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata;
- b. **Wilayah pengembangan II**, yaitu: (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari; serta (2) Kabupaten Supiori dengan pengembangan perikanan dan pariwisata; dan
- c. **Wilayah pengembangan III**, yaitu: (1) Kabupaten Mamberamo Raya dengan pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta (2) Kabupaten Waropen meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.



Gambar V.3 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Pemanfaatan ruang Provinsi Papua berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, dengan memperhatikan hak ulayat dan karakteristik masyarakat adat (lihat Gambar V.4 dan Gambar V.5). Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Papua dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya. Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), investasi swasta maupun kerja sama pendanaan. Adapun kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

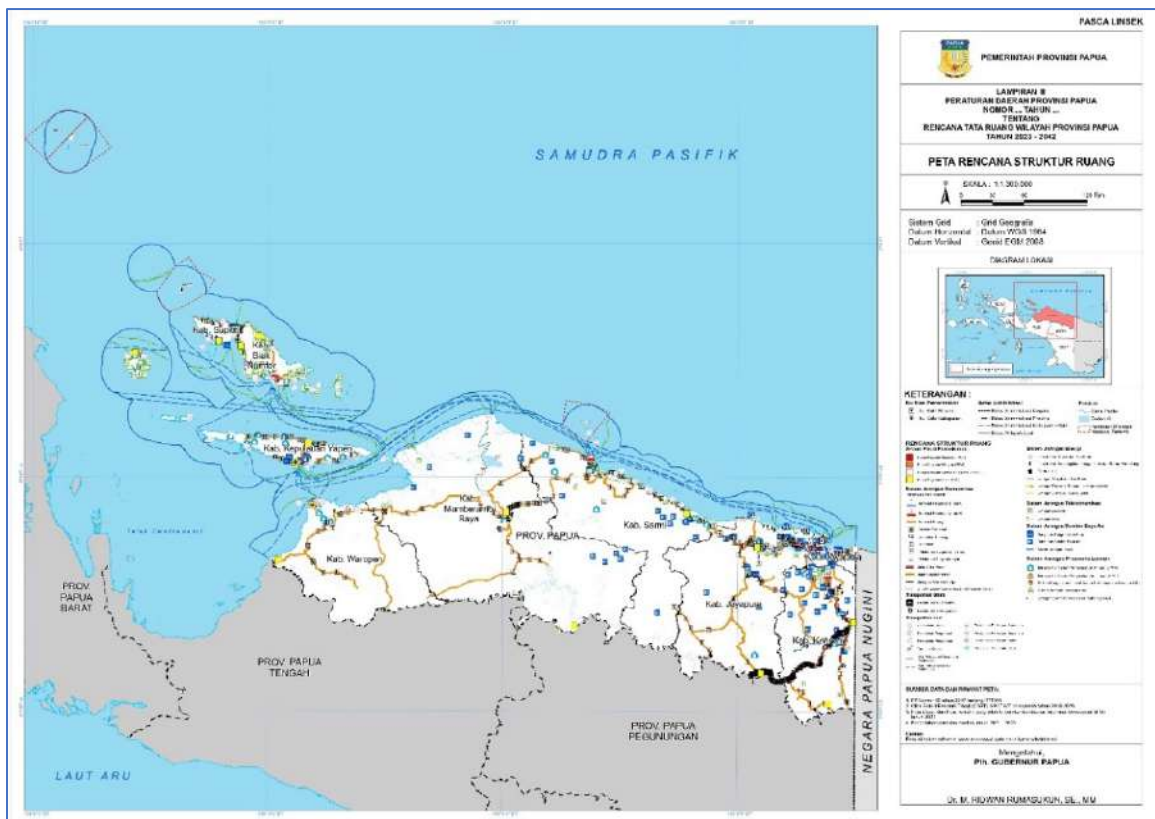
Pusat-pusat kegiatan yang ada di Provinsi Papua terdiri atas (PKN), (PKW), (PKSN) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), sebagaimana yang ditampilkan dalam PKN di Provinsi Papua meliputi Kota Jayapura dan Sebagian Kabupaten Jayapura. PKW di Provinsi Papua meliputi Biak di Kabupaten Biak Numfor, Sarmi di Kabupaten Sarmi, dan Arso di Kabupaten Keerom. PKSN di Provinsi Papua meliputi Jayapura di Kota Jayapura dan Biak di Kabupaten Biak Numfor. Adapun PKL di Provinsi Papua meliputi Perkotaan Genyem dan Airu (Kabupaten Jayapura); Perkotaan Warsa, Swandiwe dan Yenburwo (Kabupaten Biak Numfor); Perkotaan Waris dan Towe (Kabupaten Keerom); Perkotaan Bonggo (Kabupaten Sarmi); Perkotaan Serui dan Saubeba (Kepulauan Yapen); Perkotaan Botawa dan Wapoga (Kabupaten Waropen); Perkotaan Awaki dan Sorendiweri (Kabupaten Supiori); serta Perkotaan Kasonaweja dan Dabra (Mamberamo Raya).

Untuk mendukung fungsi dari pusat kegiatan wilayah tersebut, terdapat indikasi program utama pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana yang ditampilkan dalam Lampiran XV Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun

2023 tentang RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042. Indikasi program utama terdiri atas program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Adapun sumber pendanaan indikasi program utama berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Provinsi Papua memiliki beragam kawasan potensial yang dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi sektoral serta potensi alam yang sangat kaya. Pembangunan Provinsi Papua harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial yang tersedia, serta menekankan pada sektor-sektor unggulan di Provinsi Papua. Berdasarkan karakteristik wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua 2023-2042, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan (kawasan budidaya). Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Provinsi Papua yang dapat dikembangkan terdiri atas 10 kawasan, yaitu: (1) kawasan hutan produksi; (2) kawasan perkebunan rakyat; (3) kawasan pertanian; (4) kawasan perikanan; (5) kawasan pertimbangan dan energi; (6) Kawasan peruntukkan industri; (7) kawasan pariwisata; (8) kawasan permukiman; (9) Kawasan transportasi; serta (10) kawasan pertahanan dan keamanan.

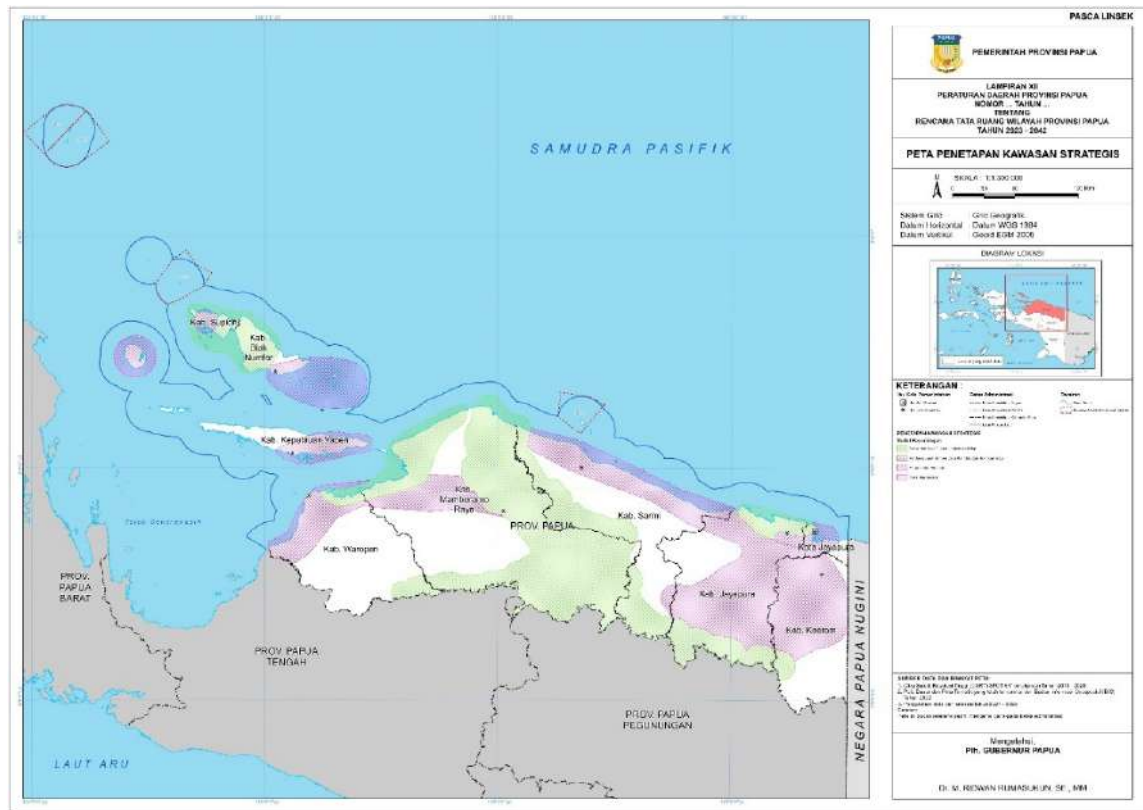
**Gambar V.4 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Papua Tahun 2023-2042**



Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042



**Gambar V.5 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2042**



Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

**Tabel V.1 Pengembangan Sistem Pusat Permukiman dan Kawasan Strategis di Provinsi Papua**

| SWP   | KABUPATEN/<br>KOTA |               | SISTEM PUSAT PERMUKIMAN                                                                                       |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                | KAWASAN STRATEGIS                   |                                               |                                                                                  |                                                                                | POTENSI                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |               | PKN<br>(Pusat Kegiatan Nasional)                                                                              | PKW<br>(Pusat Kegiatan Wilayah)                                                                | PKSN<br>(Pusat Kawasan Strategis Nasional)                                               | PKL<br>(Pusat Kegiatan Lokal)                                                                  | KSN<br>(Kawasan Strategis Nasional) | KSNT<br>(Kawasan Strategis Nasional Tertentu) | KSP<br>(Kawasan Strategis Provinsi)                                              |                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                    |               | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota | Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik |                                     |                                               | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya |                                                                                                                             | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup                                                                                                                                                 |
| SWP 1 | 1                  | Kota Jayapura |                              |                                                                                                |         |                                                                                                |                                     |                                               | Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi                                    | Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura                                      | Kawasan Cagar Alam Cycloops                                                                                                 | a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)<br>b. Perkebunan<br>c. Peternakan<br>d. Perikanan<br>e. Pariwisata<br>f. Jasa                                                                                                                         |
|       | 2                  | Jayapura      |                              |                                                                                                |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Genyem,</li><li>Perkotaan Airu</li></ul>       |                                     |                                               | Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi                                    | Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja</li><li>Kawasan Cagar Alam Cycloops</li></ul> | a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)<br>b. Perkebunan (kelapa sawit, kakao, sagu)<br>c. Peternakan<br>d. Perikanan<br>e. Pariwisata (Kerajinan kapak batu Ormu Wari, Danau Sentani, dsb)<br>f. Pertambangan<br>g. Industri<br>h. Kehutanan |
|       | 3                  | Keerom        |                                                                                                               |             |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Waris,</li><li>Perkotaan Towe</li></ul>        |                                     |                                               | Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi                                    |                                                                                | Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja                                                                                     | a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)<br>b. Perkebunan (kelapa sawit, jaguung, kakao)<br>c. Pariwisata (Telaga Cinta Yowong)<br>d. Pertambangan<br>e. Peternakan                                                                            |

| SWP    | KABUPATEN/<br>KOTA |                 | SISTEM PUSAT PERMUKIMAN                                                                                       |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                         | KAWASAN STRATEGIS                              |                                               |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                      | POTENSI                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                    |                 | PKN<br>(Pusat Kegiatan Nasional)                                                                              | PKW<br>(Pusat Kegiatan Wilayah)                                                                | PKSN<br>(Pusat Kawasan Strategis Nasional)                                               | PKL<br>(Pusat Kegiatan Lokal)                                                                                           | KSN<br>(Kawasan Strategis Nasional)            | KSNT<br>(Kawasan Strategis Nasional Tertentu) | KSP<br>(Kawasan Strategis Provinsi)                                              |                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                    |                 | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota | Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik                          |                                                |                                               | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 4                  | Sarmi           |                                                                                                               |               |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Bonggo</li></ul>                                                        |                                                | KSNT Pulau Liki                               | Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura-Sarmi                                    |                                                                                | Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura)</li><li>b. Perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kakao)</li><li>c. Pertambangan (nikel)</li><li>d. Perikanan</li><li>e. Kehutanan</li><li>f. Pariwisata</li></ul> |
| SWP II | 5                  | Biak Numfor     |                                                                                                               |               |         | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Warsa,</li><li>Perkotaan Swandiwe,</li><li>Perkotaan Yenburwo</li></ul> | KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi |                                               | Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor                                    | Kawasan Goa Jepang Biak                                                        | Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perikanan</li><li>b. Pariwisata</li><li>c. Pertanian</li><li>d. Pertambangan</li><li>e. Peternakan</li></ul>                                                                                                    |
|        | 6                  | Supiori         |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Awaki,</li><li>Perkotaan Sorendiweri</li></ul>                          |                                                | KSNT Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi |                                                                                  | Kawasan Maudori Supiori                                                        | Kawasan Rawan Bencana Biak-Supiori                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pariwisata</li><li>b. Perikanan</li></ul>                                                                                                                                                                       |
|        | 7                  | Kepulauan Yapen |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Serui,</li><li>Perkotaan Saubeba</li></ul>                              |                                                |                                               | Kawasan perikanan dan pariwisata Kep. Yapen                                      |                                                                                | Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pariwisata (Kampung wisata Alam)</li><li>b. Perikanan (ikan dan rumput laut)</li><li>c. Perkebunan (sagu, kakao)</li><li>d. Kehutanan</li><li>e. Pertanian</li><li>f. Peternakan</li></ul>                      |

| SWP     | KABUPATEN/<br>KOTA |                | SISTEM PUSAT PERMUKIMAN                                                                                       |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                | KAWASAN STRATEGIS                   |                                               |                                                                                  |                                                                                |                                                                                                                                           | POTENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                    |                | PKN<br>(Pusat Kegiatan Nasional)                                                                              | PKW<br>(Pusat Kegiatan Wilayah)                                                                | PKSN<br>(Pusat Kawasan Strategis Nasional)                                               | PKL<br>(Pusat Kegiatan Lokal)                                                                  | KSN<br>(Kawasan Strategis Nasional) | KSNT<br>(Kawasan Strategis Nasional Tertentu) | KSP<br>(Kawasan Strategis Provinsi)                                              |                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                    |                | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kab/kota | Kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong Pengembangan kawasan perbatasan negara | Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa distrik |                                     |                                               | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya | Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SWP III | 8                  | Memberamo Raya |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Kasonaweja,</li><li>Perkotaan Dabra</li></ul>  |                                     |                                               | Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen                                         |                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja</li><li>Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pertanian (tanaman pangan dan holtikultura)</li><li>b. Perkebunan rakyat</li><li>c. Pertambangan (batu bara)</li><li>d. Perikanan</li><li>e. Pariwisata (pariwisata alam)</li><li>f. Kehutanan</li></ul>                                      |
|         | 9                  | Waropen        |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Perkotaan Botawa,</li><li>Perkotaan Wapoga</li></ul>     |                                     |                                               | Kawasan pertanian Mamberamo Raya-Waropen                                         |                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja</li><li>Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pariwisata (Wisata Rohani Pulau Nau, Pantai Mangrove)</li><li>b. Perikanan (ikan, udang, kepiting)</li><li>c. Pertanian (tanaman pangan dan holtikultura)</li><li>d. Perkebunan (sagu)</li><li>e. Kehutanan</li><li>f. Pertambangan</li></ul> |

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2023-2042

Selain berdasarkan pemetaan kawasan budidaya, potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua juga diimplementasikan berdasarkan penetapan kawasan strategis yang meliputi kawasan strategis nasional (KSN); kawasan strategis nasional tertentu (KSNT); dan kawasan strategis provinsi (KSP). KSN di Provinsi Papua meliputi: (1) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan Biak; serta (2) kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa Kawasan Perbatasan Negara. KSNT di Provinsi Papua meliputi: (1) Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi di Kabupaten Supiori, serta (2) Pulau Liki di Kabupaten Sarmi. Adapun KSP di Provinsi Papua meliputi:

**a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**, yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan pengolahan hasil pertanian menunjang ekspor.
- 2) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
- 3) Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari.
- 4) Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan dan industri pengolah hasil tanaman pangan sebagai satu kesatuan kegiatan secara terpadu.

**b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya**, yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Danau Sentani sebagai pusat wisata budaya masyarakat Pesisir Pulau Papua.
- 2) kawasan Goa Jepang Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut, yang bertujuan sebagai pusat festival budaya.
- 3) kawasan Maudori Supiori di Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Maudori sebagai kawasan pelestarian budaya yang berbasis religi.

**c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup**, yang terdiri atas:

- 1) Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

- 2) Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Biak-Supiori sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- 3) kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura, yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan darat dan laut Cycloops sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati.
- 4) Kawasan Mangrove Waropen – Mamberamo Raya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.



# BAB VI

## RENCANA KERJA DAN

## PENDANAAN DAERAH

Rencana program pembangunan yang menjadi prioritas daerah pada RKPD Tahun 2026 ini adalah penajaman dari dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025- 2029 serta memperhatikan RKP 2026, RPJMN 2025 - 2029, dan RPJPD 2024-2045. Selain itu, penyusunan RKPD 2026 memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial) dan politis yang antara lain memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRP, hasil masukan oleh Pemerintah Pusat, masyarakat, dan masukan dari hasil proses perencanaan secara keseluruhan. Dalam mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan, dirumuskan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2026 untuk mendukung terwujudnya capaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPD dan Rancangan Teknokratik RPJMD.

**Tabel VI.1 Proyeksi APBD Provinsi Papua Tahun 2025-2029**

| URAIAN                               | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                    | 2.580.518.000.000 | 2.584.112.000.000 | 2.587.711.000.000 | 2.591.315.000.000 | 2.594.925.000.000 |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>        | 515.406.000.000   | 515.989.000.000   | 516.572.000.000   | 517.155.000.000   | 517.740.000.000   |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>           | 2.064.061.000.000 | 2.067.065.000.000 | 2.070.072.000.000 | 2.073.084.000.000 | 2.076.100.000.000 |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b> | 1.050.000.000     | 1.059.000.000     | 1.067.000.000     | 1.076.000.000     | 1.085.000.000     |
| <b>BELANJA</b>                       | 2.627.641.000.000 | 2.634.193.070.000 | 2.650.118.924.650 | 2.666.214.505.027 | 2.682.480.752.502 |
| <b>BELANJA OPERASI</b>               | 2.147.049.000.000 | 2.165.164.000.000 | 2.183.435.000.000 | 2.201.864.000.000 | 2.220.452.000.000 |
| <b>BELANJA MODAL</b>                 | 471.386.000.000   | 469.029.070.000   | 466.683.924.650   | 464.350.505.027   | 462.028.752.502   |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>           | 9.206.000.000     | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>         | 195.408.000.000   | 195.802.000.000   | 196.196.000.000   | 196.592.000.000   | 196.988.000.000   |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>        | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    | 10.000.000.000    |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>              | 185.408.000.000   | 185.777.000.000   | 186.146.000.000   | 186.517.000.000   | 186.888.000.000   |
| <b>SILPA</b>                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Program dan Kegiatan Prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2026 yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel VI.2 Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                                                                                                                           |                                            |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                           |                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                                                                                                                                    | Sumber Dana                                |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                         | 3                                                                                 | 4                                     | 5                     | 6                                                                                                                                                         | 7                                          |
|      |   |   |      |    | <b>DINAS PENDIDIKAN</b>                                                   |                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                                           |                                            |
| 1    |   |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>    |                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                                           |                                            |
| 1    | 1 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                              |                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                                           |                                            |
| 1    | 1 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                     | -                                                                                 | -                                     | <b>28.547.586.522</b> |                                                                                                                                                           |                                            |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 |    | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                                      |                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                                           |                                            |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 4  | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                  | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                           | 3 Ruang                               | 150.000.000           | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 5  | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                   | 2 Ruang                               | 700.000.000           | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Vim                                                                               | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 8  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                 | 1 Unit                                | 600.000.000           | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 15 | Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)                         | Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun                  | 1 Ruang                               | 400.000.000           | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido                                                                                                                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 44 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                 | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 0 Peserta Didik                       | -                     | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kota Jayapura, Abepura, Vim<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 48 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                              | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik       | 500 Peserta Didik                     | 6.000.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi<br>Kota Jayapura, Abepura, Vim<br>Kota Jayapura, Heram, Hedam                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 49 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang                                      | 28 Orang                              | 1.668.000.000         | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Biak Numfor, Biak Barat,                                                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                                                                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                 | 3                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                |
|      |   |   |      |    |                                                                                   | Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus                                                                                                                  |                                       |                     | Sopendo<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala<br>Kota Jayapura, Abepura, Vim<br>Kota Jayapura, Muara Tami, Koya Tengah<br>Kota Jayapura, Heram, Waena<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri                            |                                                                                                  |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 50 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 76 Orang                              | 2.481.000.000       | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Biak Numfor, Biak Barat, Sopendo<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kota Jayapura, Abepura, Vim<br>Kota Jayapura, Muara Tami, Koya Tengah<br>Kota Jayapura, Heram, Waena<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                                       |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 51 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                  | 7 Satuan Pendidikan                   | 1.200.000.000       | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kota Jayapura, Abepura, Vim<br>Kota Jayapura, Heram, Waena<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri                                                                                    | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                                       |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 52 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS                                                                                                | 12 Satuan Pendidikan                  | 8.281.735.000       | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Biak Numfor, Biak Barat, Sopendo<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kota Jayapura, Abepura, Vim<br>Kota Jayapura, Muara Tami, Koya Tengah<br>Kota Jayapura, Heram, Waena<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri | DAK NON FISIK-BOS KINERJA, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                            |                                            |
|------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                          |                                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)    | Lokasi                                                                                                                     | Sumber Dana                                |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                                               | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                          | 7                                          |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 59 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 2 Dokumen                             | 500.000.000            | Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota<br>Kab. Keerom, Arso, Arso Kota                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 63 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                             | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                    | 2 Paket                               | 104.851.522            | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 68 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                                              | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun                                                      | 3 Unit                                | 1.200.000.000          | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 71 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                                        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 500 Satuan Pendidikan                 | 1.600.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                            | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 73 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                           | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 200 Orang                             | 3.162.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                                                                                 | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 1.03 | 79 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah                                                                            | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat                                                               | 1 Ruang                               | 500.000.000            | Kota Jayapura, Abepura, Vim                                                                                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                                    | -                                                                                                                               | -                                     | <b>171.399.702.278</b> |                                                                                                                            |                                            |
| 1    | 1 | 2 | 3.04 |    | <b>Pengelolaan Akademi Komunitas</b>                                                                                     |                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                            |                                            |
| 1    | 1 | 2 | 3.04 | 43 | Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas | Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas  | 2 Lembaga                             | 600.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                                                                                 | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 3.05 |    | <b>Peningkatan Mutu Akademi Komunitas</b>                                                                                |                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                            |                                            |
| 1    | 1 | 2 | 3.05 | 4  | Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                                                                     | Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya                                                                                | 2 Biaya                               | 2.000.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                                                                                 | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                  |                                                                              |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                           | Sumber Dana                                                                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                                                | 7                                                                            |
| 1    | 1 | 2 | 3.06 |   | <b>Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                                  |                                                                              |
| 1    | 1 | 2 | 3.06 | 7 | Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi                                                                                               | Jumlah Mahasiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan                                                                                                  | 1194 Orang                            | 151.664.702.278     | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                       | PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN |
| 1    | 1 | 2 | 3.07 |   | <b>Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                                  |                                                                              |
| 1    | 1 | 2 | 3.07 | 1 | Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan                                                                                                          | Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia                                                                                                             | 4 Satuan Pendidikan                   | 15.735.000.000      | Kab. Biak Numfor, Biak Barat, Sopeno Kota Jayapura, Heram, Waena | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                   |
| 1    | 1 | 2 | 3.07 | 2 | Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan                                                                                                         | Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia                                                                                                            | 1 Satuan Pendidikan                   | 1.200.000.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                   |
| 1    | 1 | 2 | 3.08 |   | <b>Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                                  |                                                                              |
| 1    | 1 | 2 | 3.08 | 1 | Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan | Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan | 7 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                   |
| 1    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                  | -                                     | 950.000.000         |                                                                  |                                                                              |
| 1    | 1 | 3 | 1.02 |   | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                                  |                                                                              |
| 1    | 1 | 3 | 1.02 | 4 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus                                                                                         | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                           | 30 Orang                              | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                   |
| 1    | 1 | 3 | 1.02 | 6 | Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus                                                                                        | Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun                                                                                           | 12 Dokumen                            | 650.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                                   |
| 1    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                                                                       | -                                                                                                                                                                  | -                                     | 240.000.000         |                                                                  |                                                                              |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                                                                                                                                          |                                                         |
|------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                                             |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                           | 4                                     | 5                     | 6                                                                                                                                                                        | 7                                                       |
| 1    | 1 | 4 | 1.01 |    | <b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>                                           |                                                                                                                                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1    | 1 | 4 | 1.01 | 1  | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                                 | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | 12 Dokumen                            | 120.000.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria                                                                                                                               | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN              |
| 1    | 1 | 4 | 1.01 | 2  | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 12 Laporan                            | 120.000.000           | Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Sorido<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Selatan, Serui Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara, Tanjung Ria<br>Kab. Waropen, Waropen Bawah, Uri | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN              |
|      |   |   |      |    | <b>DINAS KESEHATAN</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1    |   |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                     |                                                                                                                                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1    | 2 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                |                                                                                                                                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1    | 2 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                         | -                                                                                                                                           | -                                     | <b>18.308.303.248</b> |                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 |    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 8  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan                        | 1 Unit                                | 1.200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                           | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN      |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 25 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan                                               | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan                                                                    | 9 Dokumen                             | 1.216.046.860         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,                                                                                           | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI, DAU YANG |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                                                                                                                                  |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                            |
|      |   |   |      |    | dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan                                                                                  | Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                   |                                       |                     | Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                             | DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                                                         |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 27 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan     | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 9 Paket                               | 3.171.324.165       | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 |    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                  |                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 1  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau                  | 200 Orang                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                                                                                                    |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                            |                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                                                                                                                                                           |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                          | 3                                                                          | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                     |
|      |   |   |      |   |                                                                            | Berpotensi Bencana<br>Provinsi Sesuai Standar                              |                                       |                        | Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 3 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Ibu dan Anak                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Ibu dan Anak    | 9 Dokumen                             | 2.089.218.700          | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN<br>PENGGUNAANNYA<br>BIDANG KESEHATAN,<br>DAK NON FISIK-DANA<br>BOK-BOK DINAS-BOK<br>PROVINSI, DANA<br>OTONOMI KHUSUS<br>1,25%-PAPUA-<br>KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 6 | Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat | 9 Dokumen                             | 2.479.999.500          | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua                                                                                                                                               | DANA BAGI HASIL<br>(DBH), DAU YANG<br>DITENTUKAN<br>PENGGUNAANNYA<br>BIDANG KESEHATAN,<br>DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>KESEHATAN                            |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                      |                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                               |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                    | 3                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         |
|      |   |   |      |   |                                                                      |                                                                         |                                       |                     | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 7 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 3 Dokumen                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 8 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan         | 3 Dokumen                             | 330.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                 |                                                                                                                      | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                                                            |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                               | 3                                                                                                                    | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                      |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 9 Dokumen                             | 275.200.900         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                                                              |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                              | 9 Dokumen                             | 1.478.883.795       | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN          |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 12 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                            | 2 Dokumen                             | 20.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                                                     |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 17 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                | 9 Dokumen                             | 1.620.609.000       | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAK NON |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan       | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                  |                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                                                   |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                | 3                                                                                                     | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                             |
|      |   |   |      |    |                                                                                  |                                                                                                       |                                       |                        | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                  | FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI                                                         |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota | 9 Dokumen                             | 1.892.738.128          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                  | 9 Dokumen                             | 1.071.010.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                             |                                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                                                                                   |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                             |
| 1    | 2 | 2 | 1.03 |    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                              |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| 1    | 2 | 2 | 1.03 | 2  | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                 | 10 Dokumen                            | 813.272.200         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | -                                                                                                                                           | -                                     | 851.279.400         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 | 44 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 3 Dokumen                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                                                     |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 | 56 | Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar                                                                   | 9 Dokumen                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                       |                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                     | 3                                                                                                            | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                  |
|      |   |   |      |    |                                                                                       |                                                                                                              |                                       |                      | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 | 57 | Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota  | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar | 3 Dokumen                             | 201.279.400          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN          |
| 1    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                    | -                                                                                                            | -                                     | <b>2.732.712.611</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| 1    | 2 | 3 | 1.01 |    | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b> |                                                                                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| 1    | 2 | 3 | 1.01 | 1  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                     | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)      | 200 Orang                             | 500.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Vim Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 |    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi</b>                                   |                                                                                                              |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                                                   |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                             |
|      |   |   |      |    | <b>Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 | 1  | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                                                                            | 350 Orang                             | 2.232.712.611       | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                                                              | -                                                                                                                                                                                    | -                                     | 13.639.792.000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 | 3.02 |    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                |                                                                                                                                                                                      |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 | 3.02 | 11 | Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik | 10 Dokumen                            | 439.792.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN                                            |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                               | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                          |                                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                               |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                             | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                         |
|      |   |   |      |   |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                       |                        | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| 1    | 2 | 3 | 3.03 |   | <b>Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN</b>                           |                                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| 1    | 2 | 3 | 3.03 | 1 | Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN                         | Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat                                                                                | 1000 Orang                            | 13.200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK ROKOK                               |
| 1    | 2 | 4 |      |   | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                                       | -                                                                                                                             | -                                     | 898.755.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| 1    | 2 | 4 | 1.01 |   | <b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b> |                                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| 1    | 2 | 4 | 1.01 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK           | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan | 38 Sarana                             | 898.755.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua                                                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sumber Dana                                        |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                               | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                  |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                       |                     | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| 1    | 2 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                           | -                                                                                                                                               | -                                     | <b>421.466.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 5 | 1.01 |   | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>                            |                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 5 | 1.01 | 1 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi      | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 9 Dokumen                             | 91.466.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |
| 1    | 2 | 5 | 1.02 |   | <b>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 5 | 1.02 | 1 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                                                      | 10 Dokumen                            | 330.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN          |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                               |                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                                      |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                             | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                               |                                                               |                                       |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                              |                                                  |
| 1    | 2 | 7 |      |   | <b>PORGRAM AKREDITASI<br/>PELAYANAN KESEHATAN</b>                                                                                                                             | -                                                             | -                                     | <b>270.000.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 1    | 2 | 7 | 3.01 |   | Penyelenggaraan akreditasi<br>pada puskesmas dan fasilitas<br>pelayanan kesehatan tingkat<br>pertama lain, serta rumah sakit<br>baik milik pemerintah daerah<br>maupun swasta |                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 1    | 2 | 7 | 3.01 | 1 | Peningkatan Mutu Pelayanan<br>Kesehatan Melalui Akreditasi<br>Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                                   | Jumlah Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan yang<br>terakreditasi | 9 Unit                                | 270.000.000            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>KESEHATAN |
|      |   |   |      |   | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH<br/>JAYAPURA</b>                                                                                                                                   |                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                                                                                                                  |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                     |                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                                                                                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                         | 7                                                                                                                |
| 1    |   |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                     |                                                                                                           |                                       |                     |                                           |                                                                                                                  |
| 1    | 2 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                |                                                                                                           |                                       |                     |                                           |                                                                                                                  |
| 1    | 2 | 2 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                         | -                                                                                                         | -                                     | 37.732.994.000      |                                           |                                                                                                                  |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                           |                                       |                     |                                           |                                                                                                                  |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 2  | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                             | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                          | 1 Unit                                | 7.000.000.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 9  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                           | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit | 3 Unit                                | 6.600.000.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                           | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan                    | 6 Unit                                | 10.102.550.000      | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 16 | Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit                                                                                  | Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan                                           | 3 Unit                                | 720.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                                                                        |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar    | 5 Unit                                | 500.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                                                                        |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                                                                         |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                                                             |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                         | 7                                                                       |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 27 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 4 Paket                               | 12.460.444.000      | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                               |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 |    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>               |                                                                                                                             |                                       |                     |                                           |                                                                         |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 18 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota                       | 1 Dokumen                             | -                   | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                       |
| 1    | 2 | 2 | 1.04 |    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>             |                                                                                                                             |                                       |                     |                                           |                                                                         |
| 1    | 2 | 2 | 1.04 | 1  | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya    | 2 Unit                                | 200.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN                               |
| 1    | 2 | 2 | 1.04 | 3  | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                      | 3 Unit                                | 150.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KESEHATAN                                  |
| 1    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                               | -                                                                                                                           | -                                     | <b>480.000.000</b>  |                                           |                                                                         |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 |    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                             |                                       |                     |                                           |                                                                         |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 | 1  | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                   | 16 Orang                              | 480.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
|      |   |   |      |    | <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA</b>                                                                           |                                                                                                                             |                                       |                     |                                           |                                                                         |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                              |                                                                                               |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                       | Sumber Dana                                                                                   |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                      | 6                            | 7                                                                                             |
| 1    |   |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                        |                              |                                                                                               |
| 1    | 2 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                        |                              |                                                                                               |
| 1    | 2 | 2 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN UPAYA<br>KESEHATAN MASYARAKAT                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                     | 13.740.000.000         |                              |                                                                                               |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 |    | Penyediaan Fasilitas<br>Pelayanan, Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan untuk UKP<br>Rujukan, UKM dan UKM<br>Rujukan Tingkat Daerah<br>Provinsi |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                        |                              |                                                                                               |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 9  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Rumah Sakit                                                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana<br>dan Alat Kesehatan yang<br>Dilakukan Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan oleh Rumah<br>Sakit                                                                                                                                                     | 13 Unit                               | -                      | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>KESEHATAN                                                 |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 10 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Layanan Kesehatan                                                                    | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Layanan Kesehatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                           | 2 Unit                                | 540.000.000            | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DAK FISIK-BIDANG<br>KESEHATAN-<br>PENGUATAN SISTEM<br>DAN KAPASITAS<br>PELAYANAN<br>KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 16 | Pengadaan Barang Penunjang<br>Operasional Rumah Sakit                                                                                              | Jumlah Barang Penunjang<br>Operasional Rumah Sakit<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                     | 0 Unit                                | -                      | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>KESEHATAN                                                 |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 17 | Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Layanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Alat Kesehatan/Alat<br>Penunjang Medik Fasilitas<br>Layanan Kesehatan yang<br>Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                           | 12 Unit                               | 1.200.000.000          | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>KESEHATAN                                                 |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 26 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                                           | Jumlah Rumah sakit yang<br>ditingkatkan sarana,<br>prasarana, alat kesehatan<br>dan SDM agar sesuai<br>standar jenis pelayanan<br>rumah sakit berdasarkan<br>kelas rumah sakit yang<br>memenuhi rasio tempat tidur<br>terhadap jumlah penduduk<br>minimal 1:1000 dan/atau | 1 Unit                                | 1.000.000.000          | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DAK FISIK-BIDANG<br>KESEHATAN-<br>PENGUATAN SISTEM<br>DAN KAPASITAS<br>PELAYANAN<br>KESEHATAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                              |                                           |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                  |                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                       | Sumber Dana                               |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                | 3                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                            | 7                                         |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                  | dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit                                                                    |                                       |                     |                              |                                           |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 27 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 20 Paket                              | 11.000.000.000      | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                               | -                                                                                                                           | -                                     | 3.900.000.000       |                              |                                           |
| 1    | 2 | 3 | 1.01 |    | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>                            |                                                                                                                             |                                       |                     |                              |                                           |
| 1    | 2 | 3 | 1.01 | 1  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                     | 10 Orang                              | 2.400.000.000       | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 |    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                             |                                       |                     |                              |                                           |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 | 1  | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                             | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                                                   | 50 Orang                              | 1.500.000.000       | Kota Jayapura, Abepura, Yobe | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
|      |   |   |      |    | <b>RUMAH SAKIT KHUSUS ABEPURA</b>                                                                                |                                                                                                                             |                                       |                     |                              |                                           |
| 1    |   |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                           |                                                                                                                             |                                       |                     |                              |                                           |
| 1    | 2 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                      |                                                                                                                             |                                       |                     |                              |                                           |
| 1    | 2 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                               | -                                                                                                                           | -                                     | 12.201.473.739      |                              |                                           |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 |    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana</b>                                                         |                                                                                                                             |                                       |                     |                              |                                           |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                               |                                           |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                        | Sumber Dana                               |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                               | 3                                                                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                             | 7                                         |
|      |   |   |      |    | <b>dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>                        |                                                                                                                                               |                                       |                     |                               |                                           |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 9  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit                                     | 1 Unit                                | 250.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 13 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                       | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara | 20 Unit                               | 150.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.01 | 27 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                   | 2 Paket                               | 5.601.473.739       | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 |    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>              |                                                                                                                                               |                                       |                     |                               |                                           |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 8  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                               | 5 Dokumen                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 13 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                               | 5 Dokumen                             | 2.500.000.000       | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 16 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                 | 1 Dokumen                             | 3.000.000.000       | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 19 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                                                                          | 9 Dokumen                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 1.03 |    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                           |                                                                                                                                               |                                       |                     |                               |                                           |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                               |                                           |
|------|----|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                |                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                        | Sumber Dana                               |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                            | 4                                     | 5                    | 6                             | 7                                         |
| 1    | 2  | 2 | 1.03 | 2  | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                  | 1 Dokumen                             | 100.000.000          | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2  | 2 |      |    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                                             | -                                                                                                            | -                                     | <b>595.531.144</b>   |                               |                                           |
| 1    | 2  | 2 | 3.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                    |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
| 1    | 2  | 2 | 3.02 | 57 | Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar | 9 Dokumen                             | 595.531.144          | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| 1    | 2  | 7 |      |    | <b>PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN</b>                                                                                                                  | -                                                                                                            | -                                     | <b>100.000.000</b>   |                               |                                           |
| 1    | 2  | 7 | 3.01 |    | Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
| 1    | 2  | 7 | 3.01 | 1  | Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                          | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi                                                      | 1 Unit                                | 100.000.000          | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
| X    |    |   |      |    | <b>NON URUSAN</b>                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
| X    | XX |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>                                                                                                                           |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
|      |    |   |      |    | <b>UPTD BALAI LATIHAN TENAGA KESEHATAN</b>                                                                                                                     |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
| 1    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                         |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
| 1    | 2  |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                    |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |
| 1    | 2  | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                                                             | -                                                                                                            | -                                     | <b>1.399.774.000</b> |                               |                                           |
| 1    | 2  | 3 | 1.02 |    | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi                                                                                                                   |                                                                                                              |                                       |                      |                               |                                           |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                       |                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                                                   |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                     | 3                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                             |
|      |   |   |      |   | <b>Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>                   |                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 | 1.02 | 1 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                               | 200 Orang                             | 1.399.774.000       | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN |
|      |   |   |      |   | <b>UPTD SMK ANALIS KESEHATAN JAYAPURA</b>                                             |                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    |   |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                |                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>                                           |                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                    | -                                                                                                       | -                                     | 4.102.063.500       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 | 1.01 |   | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b> |                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 1    | 2 | 3 | 1.01 | 1 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                     | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 360 Orang                             | 4.102.063.500       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |
|      |   |   |      |   | <b>BALAI P2 AIDS, TB dan MALARIA</b>                                                  |                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                    |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                             |                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                           | 3                                                                                                                | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                  |
| 1    |   |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |                                                                                                                  |                                       |                     |                                                 |                                                    |
| 1    | 2 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                        |                                                                                                                  |                                       |                     |                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 2 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | -                                                                                                                | -                                     | 500.000.000         |                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                  |                                       |                     |                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 2 | 1.02 | 11 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                          | 9 Dokumen                             | 500.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | -                                                                                                                | -                                     | 2.409.498.500       |                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 |    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                                  |                                       |                     |                                                 |                                                    |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 | 35 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 9 Dokumen                             | 1.455.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN          |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 | 37 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar       | 9 Dokumen                             | 499.998.500         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN |
| 1    | 2 | 2 | 3.02 | 38 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 9 Dokumen                             | 454.500.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN          |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                               |                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                                                  |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                             | 3                                                                                                      | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                                                                                                            |
|      |   |   |      |    | UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PAPUA                                                |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    |   |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 2 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                          |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 2 | 2 |      |    | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                   | -                                                                                                      | -                                     | 4.647.861.800       |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 2 | 2 | 1.04 |    | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 2 | 2 | 1.04 | 3  | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan | 5 Unit                                | 4.647.861.800       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-KESEHATAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI |
|      |   |   |      |    | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                          |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    |   |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 3 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                  |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 3 | 2 |      |    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                     | -                                                                                                      | -                                     | 48.914.000.000      |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 3 | 2 | 1.01 |    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                                                                                                              |
| 1    | 3 | 2 | 1.01 | 79 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                  | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                          | 0 KM                                  | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN                                                                                                              |

| Kode |   |   |      |     | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|------|---|---|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |     |                                                                                              |                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                               |
| 1    |   |   |      |     | 2                                                                                            | 3                                                                                                       | 4                                     | 5                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                         |
|      |   |   |      |     |                                                                                              |                                                                                                         |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN                                 |
| 1    | 3 | 2 | 1.01 | 98  | Pembangunan Kanal Banjir                                                                     | Panjang Kanal Banjir yang Dibangun                                                                      | 12.60 KM                              | 48.914.000.000        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 1    | 3 | 2 | 1.01 | 116 | Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku                                                   | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun                                                     | 3 Titik                               | -                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                        |
| 1    | 3 | 2 | 1.01 | 127 | Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai                                                       | Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun                                                        | 1.06 KM                               | -                     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                         |
| 1    | 3 | 3 |      |     | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                      | -                                                                                                       | -                                     | <b>19.900.000.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 1    | 3 | 3 | 1.01 |     | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                         |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 1    | 3 | 3 | 1.01 | 14  | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota     | Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 1 Kabupaten/Kota                      | -                     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                        |
| 1    | 3 | 3 | 1.01 | 17  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                         | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas                                                     | 290 Liter/Detik                       | 17.900.000.000        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                                               |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                         |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                       | Kabupaten/Kota yang dibangun                                                                                       |                                       |                        | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                                           |
| 1    | 3 | 3 | 1.01 | 20 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi                                | 1 Unit                                | 2.000.000.000          | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                          | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 1    | 3 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                                                         | -                                                                                                                  | -                                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| 1    | 3 | 5 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>                                                                               |                                                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| 1    | 3 | 5 | 1.01 | 15 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                     | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 0 Dokumen                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                        |
| 1    | 3 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                           | -                                                                                                                  | -                                     | 4.695.614.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| 1    | 3 | 6 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b> |                                                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
| 1    | 3 | 6 | 1.01 | 8  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                 | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                     | 1,78 KM Sistem Drainase Perkotaan     | 4.695.614.000          | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                       | DTI-PAPUA-SANITASI LINGKUNGAN                             |
| 1    | 3 | 7 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                | -                                                                                                                  | -                                     | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                 |                                                           |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                               |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                            | 4                                     | 5                      | 6                                               | 7                                                         |
| 1    | 3 | 7 | 1.01 |    | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>                                                                     |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                                           |
| 1    | 3 | 7 | 1.01 | 26 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi                                                               | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun                                  | 0 Liter/Detik                         | -                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 1    | 3 | 7 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>                                                                                                                        | -                                                                                                                                            | -                                     | -                      |                                                 |                                                           |
| 1    | 3 | 7 | 3.02 |    | <b>Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP</b> |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                                           |
| 1    | 3 | 7 | 3.02 | 1  | Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar             | Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar | 0 Unit                                | -                      | -                                               | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR                |
| 1    | 3 | 8 |      |    | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                       | -                                                                                                                                            | -                                     | 1.000.000.000          |                                                 |                                                           |
| 1    | 3 | 8 | 1.01 |    | <b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>                                                              |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                                           |
| 1    | 3 | 8 | 1.01 | 20 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                                                  | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala                                  | 1 Unit Bangunan Gedung                | 1.000.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi         | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 1    | 3 | 9 |      |    | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                                                                                                            | -                                                                                                                                            | -                                     | -                      |                                                 |                                                           |
| 1    | 3 | 9 | 1.01 |    | <b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                                           |

| Kode |   |    |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
|------|---|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |    |      |    |                                                                                                        |                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)    | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                                                                                          |
| 1    |   |    |      |    | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                            | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                    |
| 1    | 3 | 9  | 1.01 | 19 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan | 1 Kawasan                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                                                              |
| 1    | 3 | 10 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                                                   | -                                                                                                                            | -                                     | <b>115.465.919.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 1    | 3 | 10 | 1.01 |    | <b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>                                                                  |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 1    | 3 | 10 | 1.01 | 30 | Rehabilitasi Jalan                                                                                     | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                            | 8.20 KM                               | 8.250.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN                                            |
| 1    | 3 | 10 | 1.01 | 31 | Rekonstruksi Jalan                                                                                     | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                            | 24,18 KM                              | 79.066.742.467         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DBH SAWIT, DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 1    | 3 | 10 | 1.01 | 54 | Pembangunan Jembatan                                                                                   | Panjang jembatan yang dibangun                                                                                               | 2 Meter                               | -                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN                                            |
| 1    | 3 | 10 | 1.01 | 57 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                            | Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                | 77500 Meter                           | 500.000.000            | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                         |
| 1    | 3 | 10 | 1.01 | 58 | Pembangunan Jalan                                                                                      | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                  | 27,55 KM                              | 27.649.176.533         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                        | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN                                            |
| 1    | 3 | 11 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                            | -                                                                                                                            | -                                     | <b>861.219.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |
| 1    | 3 | 11 | 1.01 |    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>                                                |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |

| Kode |   |    |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                   | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|------|---|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |    |      |    |                                                                                                              |                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                                                                                                               |
| 1    |   |    |      |    | 2                                                                                                            | 3                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                         |
| 1    | 3 | 11 | 1.01 | 11 | Pelatihan Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi Ahli                                                        | Jumlah Tenaga Kerja<br>Konstruksi Kualifikasi Ahli<br>yang Dilatih | 160 Orang                             | 861.219.000            | Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>INFRASTRUKTUR                                                                         |
| 1    | 4 |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERUMAHAN DAN<br/>KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                   |                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 1    | 4 | 2  |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN<br/>PERUMAHAN</b>                                                                    | -                                                                  | -                                     | <b>6.800.000.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 1    | 4 | 2  | 1.01 |    | <b>Pendataan Penyediaan dan<br/>Rehabilitasi Rumah Korban<br/>Bencana atau Relokasi<br/>Program Provinsi</b> |                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 1    | 4 | 2  | 1.01 | 11 | Identifikasi Perumahan di Lokasi<br>Rawan Bencana Provinsi                                                   | Jumlah Dokumen Data<br>Rumah di Lokasi Rawan<br>Bencana Provinsi   | 0 Dokumen                             | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>INFRASTRUKTUR                                                                         |
| 1    | 4 | 2  | 1.03 |    | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi<br/>Rumah Korban Bencana atau<br/>Relokasi Program Provinsi</b>              |                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
| 1    | 4 | 2  | 1.03 | 1  | Rehabilitasi Rumah bagi Korban<br>Bencana                                                                    | Jumlah Rumah Korban<br>Bencana Provinsi yang<br>Terehabilitasi     | 1 Unit Rumah                          | -                      | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>INFRASTRUKTUR                                                                         |
| 1    | 4 | 2  | 1.03 | 4  | Pembangunan Rumah bagi<br>Korban Bencana                                                                     | Jumlah Rumah bagi Korban<br>Bencana Provinsi yang<br>Terbangun     | 35 Unit Rumah                         | 6.800.000.000          | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>INFRASTRUKTUR, DTI-<br>PAPUA-PENDANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>INFRASTRUKTUR<br>PERHUBUNGAN |



| Kode |   |    |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                 |                                            |
|------|---|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|      |   |    |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                |
| 1    |   |    |      |    | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                            | 4                                     | 5                      | 6                                               | 7                                          |
| 1    | 4 | 3  |      |    | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                               | -                                                                                                                                            | -                                     | -                      |                                                 |                                            |
| 1    | 4 | 3  | 1.02 |    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha             |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    | 4 | 3  | 1.02 | 3  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki | 0 Unit Rumah                          | -                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                    |
| 1    | 4 | 5  |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                                            | -                                                                                                                                            | -                                     | -                      |                                                 |                                            |
| 1    | 4 | 5  | 1.01 |    | Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman                                                                                           |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    | 4 | 5  | 1.01 | 9  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman                                                                   | Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                                | 0 Lokasi                              | -                      | -                                               | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-INFRASTRUKTUR |
|      |   |    |      |    | <b>UPTD LABORATORIUM</b>                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    |   |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                          |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    | 3 |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                                                             |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    | 3 | 11 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                                     | -                                                                                                                                            | -                                     | -                      |                                                 |                                            |
| 1    | 3 | 11 | 1.01 |    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                                                                |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    | 3 | 11 | 1.01 | 16 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi                                                                | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya                                                    | 1 Lembaga                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                    |
|      |   |    |      |    | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>                                                                                               |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |
| 1    |   |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                          |                                                                                                                                              |                                       |                        |                                                 |                                            |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                      |                                                                  |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                               | Sumber Dana                                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                    | 7                                                                |
| 1    | 5 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                      |                                                                  |
| 1    | 5 | 2 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN<br>KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                      | -                                     | 4.321.936.000          |                                                                                                                      |                                                                  |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 |    | Penanganan Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi                                            |                                                                                                                                                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                      |                                                                  |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 8  | Penyusunan SOP Ketertiban<br>Umum dan Ketenteraman<br>Masyarakat                                                                                                        | Jumlah Dokumen SOP<br>Ketertiban Umum dan<br>Ketenteraman Masyarakat<br>yang Telah Dibuat dan<br>Dimutakhirkan                                                                                         | 1 Dokumen                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                   | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 12 | Pembentukan Satgas Linmas<br>Tingkat Provinsi                                                                                                                           | Jumlah Dokumen SK<br>Pembentukan Satgas<br>Linmas ditingkat Provinsi<br>dalam Penyelenggaraan<br>Linmas melalui SK Gubernur                                                                            | 1 Dokumen                             | 150.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Trikora                                                                            | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 14 | Koordinasi Penyelenggaraan<br>Ketenteraman, Ketertiban Umum<br>dan Perlindungan Masyarakat<br>Tingkat Provinsi                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum dan Perlindungan<br>Masyarakat Tingkat Provinsi                                                  | 2 Dokumen                             | 649.026.000            | Kab. Biak Numfor, Biak Kota,<br>Semua Kel/Desa                                                                       | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 15 | Penyediaan Layanan Dasar<br>dalam rangka Dampak<br>Penegakan Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Kepala Daerah                                                            | Jumlah Laporan Pemberian<br>Pelayanan Dasar Kepada<br>Warga Yang Terdampak<br>Penegakan Perda dan<br>Perkada                                                                                           | 1 Laporan                             | 250.000.000            | Kab. Jayapura, Sentani, Sentani<br>Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Trikora<br>Kab. Keerom, Arso, Arso Kota | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 20 | Penindakan atas Gangguan<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Berdasarkan Perda dan<br>Perkada Melalui Penertiban dan<br>Penanganan Unjuk Rasa dan<br>Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>Berdasarkan Perda dan<br>Perkada Melalui Penertiban<br>dan Penanganan Unjuk<br>Rasa dan Kerusuhan Massa<br>yang Dilakukan Penindakan | 2 Laporan                             | 250.000.000            | Kab. Jayapura, Sentani, Sentani<br>Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Trikora<br>Kab. Keerom, Arso, Arso Kota | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                      |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 21 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 4 laporan                             | 736.910.000         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Biak Kota, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Sentani, Sentani Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora<br>Kab. Keerom, Arso, Arso Kota                      | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 22 | Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat                            | Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat            | 1 Laporan                             | 418.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Sentani, Sentani Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 23 | Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi                                                          | Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah                           | 1 Laporan                             | -                   | Kab. Jayapura, Sentani, Sentani Kota<br>Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop<br>Kab. Keerom, Arso, Arso Kota                                                                                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 24 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas                                                                                                          | 20 Orang                              | 350.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora                                                                                                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 29 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                              | 50 Unit                               | 250.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora                                                                                                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.01 | 30 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat                                                                                                             | Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                | 17 Orang                              | 150.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora                                                                                                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                      | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
| 1    | 5 | 2 | 1.02 |    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>                                                                                          |                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 2 | 1.02 | 2  | Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur | 1 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.02 | 8  | Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur                                   | 1 laporan                             | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.02 | 11 | Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum                                  | Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                              | 1 Dokumen                             | 318.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.02 | 12 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP         | 1 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.02 | 14 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum | Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                     | 100 Unit                              | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.03 |    | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>                                                                                             |                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 2 | 1.03 | 3  | Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                                                                               | Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS                                                                     | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.03 | 4  | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam                                                          | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                                        |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                                      |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                                         | Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 2 | 1.03 | 5  | Dukungan Operasional Sekretariat PPNS                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS                                                                                                                                                                                                                | 1 laporan                             | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 2 | 1.03 | 7  | Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda | 1 Laporan                             | 200.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                     | <b>1.070.386.000</b> |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 |    | <b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 4  | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan                                                                                          | 1 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kel/Desa   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 18 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                               | Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                             | 227.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Semua Kel/Desa   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 19 | Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                             | 258.386.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                          | Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 22 | Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran                                                     | Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal                                     | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 23 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota                                           | 1 Laporan                             | 185.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 26 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi | Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                      | 10 Unit                               | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.01 | 27 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                              | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait | 10 Unit                               | 100.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.02 |    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>        |                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 1    | 5 | 4 | 1.02 | 3  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                       | Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran                                | 1 Laporan                             | -                   | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 1    | 5 | 4 | 1.02 | 7  | Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota                                  | 1 Laporan                             | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Trikora          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
|      |   |   |      |    | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>                                                                               |                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                 |                                                        |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                               | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                               |                                          |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                        | Sumber Dana                              |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                             | 7                                        |
| 1    |   |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN DASAR                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                               |                                          |
| 1    | 5 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM SERTA<br>PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                               |                                          |
| 1    | 5 | 3 |      |    | PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     | 4.691.665.031          |                                                                                                                                                               |                                          |
| 1    | 5 | 3 | 1.01 |    | Pelayanan Informasi Rawan<br>Bencana Provinsi                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                               |                                          |
| 1    | 5 | 3 | 1.01 | 3  | Penyusunan Kajian Risiko<br>Bencana Provinsi                                                             | Jumlah Dokumen Kajian<br>Risiko Bencana yang<br>Dilegalkan                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                             | 250.000.000            | Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS-PROVINSI<br>PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.01 | 4  | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi<br>dan Edukasi (KIE) Rawan<br>Bencana Provinsi (Per Jenis<br>Ancaman) | Jumlah warga negara<br>termasuk kelompok rentan<br>dan aparatur di kawasan<br>risiko tinggi bencana lintas<br>Kabupaten/Kota yang<br>menerima sosialisasi,<br>komunikasi, informasi dan<br>edukasi rawan bencana (per<br>jenis ancaman) lintas<br>Kabupaten/Kota | 1000 Orang                            | 85.000.000             | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                             | DANA OTONOMI<br>KHUSUS-PROVINSI<br>PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 |    | Pelayanan Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan Terhadap<br>Bencana                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                               |                                          |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 13 | Penguatan Kapasitas Kawasan<br>untuk Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan bencana                             | Jumlah laporan yang<br>memuat kawasan rawan<br>bencana (per jenis ancaman<br>bencana) dan/atau<br>kawasan-kawasan strategis<br>Kabupaten/Kota yang<br>memiliki mekanisme dan<br>prosedur tetap<br>kesiapsiagaan menghadapi<br>bencana                            | 1 Kawasan                             | 250.000.000            | Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | DANA OTONOMI<br>KHUSUS-PROVINSI<br>PAPUA |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                    |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                  |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 23 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                | Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana | 30 Orang                              | -                   | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 25 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas                                                                                                                                           | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 26 | Pengelolaan Risiko Bencana                                                          | Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani                                                                                                                                                              | 1 Kegiatan                            | -                   | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 27 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana                               | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                                                                                                       | 30 Orang                              | 250.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 28 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                         | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                     | 180 Keluarga                          | -                   | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 29 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana                                 | 1 Dokumen                             | 250.768.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.02 | 30 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                           | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan                                                                                                                                                                  | 50 Orang                              | -                   | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                    |
|------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                      |                                                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                    | 3                                                                                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                  |
|      |   |   |      |    |                                                                                      | risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana                      |                                       |                     |                                                 |                                    |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 |    | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                            |                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                    |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 | 9  | Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi                              | Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal                                                                                          | 100 Dokumen                           | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 | 25 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                      | 1 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 | 26 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi | Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 30 Orang                              | 250.025.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 | 28 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                         | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                | 300 Orang                             | 499.898.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 | 30 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana                                                                                 | 1 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.03 | 31 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                      | 1 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 |    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                  |                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                    |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 6  | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                             | 50 Keluarga                           | 250.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                      |                                    |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                               | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                    | 7                                  |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 7  | Penanganan Pasca Bencana Provinsi                                                         | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                             | 395.725.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 9  | Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi                                               | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan                                                                                                                                                                                                    | 2 Kegiatan                            | 255.475.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 10 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi | Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal | 2 Lembaga                             | 348.800.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 13 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi                                                   | Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)                                                                                                                               | 40 Orang                              | -                   | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                           | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                      | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                | 7                                  |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 16 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah                                                    | Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                             | 1 Dokumen                             | 300.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 18 | Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah                                                                 | Jumlah Dokumen yang dilegalkan                                                                                                                                         | 1 Dokumen                             | 650.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 22 | Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                 | Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)                                                    | 7 Dokumen                             | 450.421.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 5 | 3 | 1.04 | 23 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun | 9 kabupaten/kota                      | 205.553.031          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
|      |   |   |      |    | <b>DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>                                                   |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1    |   |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1    | 6 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                                             |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1    | 6 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                   | -                                                                                                                                                                      | -                                     | <b>1.566.414.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1    | 6 | 2 | 1.02 |    | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>                                     |                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 1    | 6 | 2 | 1.02 | 3  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi               | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi                                                                                                     | 120 Keluarga                          | 816.414.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                 |                                    |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                          | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                   | 6                                                                               | 7                                  |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                       |                     | Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                    |
| 1    | 6 | 2 | 1.02 | 8 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi                                                                                      | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya  | 27 Orang                              | 750.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                            | -                                     | -                   |                                                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 2 | 3.01 |   | <b>Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                       |                     |                                                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 2 | 3.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                                   | Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan                                                                                    | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>                                                                                                           | -                                                                                                                                                                            | -                                     | 450.000.000         |                                                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 3 | 1.01 |   | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>                           |                                                                                                                                                                              |                                       |                     |                                                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 3 | 1.01 | 3 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | 10 Orang                              | 450.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                 | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 |      |   | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                            | -                                     | 6.200.000.003       |                                                                                 |                                    |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                     |                                    |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                           |                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                              | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                         | 3                                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                   | 7                                  |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 |    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>                          |                                                                                                                     |                                       |                     |                                     |                                    |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 | 1  | Penyediaan Permakanan                                                                                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 18 Orang                              | 459.900.000         | Kab. Biak Numfor, Samofa, Brambaken | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 | 2  | Penyediaan Sandang                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 18 Orang                              | 153.729.500         | Kab. Biak Numfor, Samofa, Brambaken | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 | 3  | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                      | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 18 Orang                              | 422.495.600         | Kab. Biak Numfor, Samofa, Brambaken | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 | 5  | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 18 Orang                              | 27.588.903          | Kab. Biak Numfor, Samofa, Brambaken | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 | 6  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 18 Orang                              | 232.000.000         | Kab. Biak Numfor, Samofa, Brambaken | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.01 | 21 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar           | 5 Dokumen                             | 204.286.000         | Kab. Biak Numfor, Samofa, Brambaken | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.02 |    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>                                            |                                                                                                                     |                                       |                     |                                     |                                    |
| 1    | 6 | 4 | 1.02 | 1  | Pengasuhan                                                                                                | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                                 | 60 Orang                              | 56.900.000          | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombé   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.02 | 3  | Penyediaan Sandang                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 60 Orang                              | 15.000.000          | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombé   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode     |          |          |             |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                   |                                    |
|----------|----------|----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|          |          |          |             |    |                                                                                                            |                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                            | Sumber Dana                        |
| 1        |          |          |             |    | 2                                                                                                          | 3                                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                 | 7                                  |
| 1        | 6        | 4        | 1.02        | 4  | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                       | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 60 Orang                              | 345.463.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.02        | 5  | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 60 Orang                              | 2.400.000           | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.02        | 6  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                    | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 60 Orang                              | 108.700.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.02        | 7  | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                            | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                            | 60 Orang                              | 320.000.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.02        | 15 | Penyediaan Permakanan                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 60 Orang                              | 189.000.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.02        | 17 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti               | 60 Dokumen                            | 162.537.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| <b>1</b> | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>1.03</b> |    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>                                      |                                                                                                                     |                                       |                     |                                   |                                    |
| 1        | 6        | 4        | 1.03        | 1  | Penyediaan Permakanan                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 50 Orang                              | 1.149.750.000       | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.03        | 2  | Penyediaan Sandang                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 50 Orang                              | 164.643.925         | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1        | 6        | 4        | 1.03        | 3  | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                                                       | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi                                                    | 50 Orang                              | 1.283.178.073       | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                     |                                    |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                              | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                | 3                                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                   | 7                                  |
| 1    | 6 | 4 | 1.03 | 5  | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 50 Orang                              | 49.998.320          | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh       | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.03 | 6  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 50 Orang                              | 50.000.000          | Kab. Jayapura, Sentani, Hinekombe   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.03 | 7  | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                                                                  | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                            | 50 Orang                              | 139.995.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh       | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.03 | 12 | Pemulasaraan                                                                                                                     | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi                                                                             | 50 Orang                              | 120.000.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh       | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.03 | 17 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi   | 1 Dokumen                             | 42.434.682          | Kab. Jayapura, Sentani, Sereh       | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.05 |    | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b> |                                                                                                                     |                                       |                     |                                     |                                    |
| 1    | 6 | 4 | 1.05 | 1  | Penyediaan Permakanan                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 40 Orang                              | 94.500.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.05 | 2  | Penyediaan Sandang                                                                                                               | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 40 Orang                              | 25.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.05 | 3  | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                                                                                       | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                              | 40 Orang                              | 181.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 4 | 1.05 | 7  | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                                                                                           | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                                        | 40 Orang                              | 143.200.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                    |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                  |
| 1    | 6 | 4 | 1.05 | 11 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 40 Dokumen                            | 56.300.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                                                       | -                                                                                                                                                         | -                                     | <b>1.950.000.000</b> |                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 5 | 1.01 |    | <b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                       |                      |                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 5 | 1.01 | 1  | Pengangkatan Anak antar WNI                                                                                                                                          | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi                                            | 25 Orang                              | 450.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 5 | 1.02 |    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                       |                      |                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 5 | 1.02 | 3  | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi                                                                      | 30 Orang                              | 750.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 5 | 1.02 | 8  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi                                                                                                                | Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin                                                                              | 9 Kab/Kota                            | 750.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                         | -                                     | <b>2.070.000.000</b> |                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 6 | 1.01 |    | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                       |                      |                                                 |                                    |
| 1    | 6 | 6 | 1.01 | 1  | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                                | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi                                                      | 200 Orang                             | 920.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6 | 6 | 1.01 | 4  | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok                                                                                             | 30 Orang                              | 350.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                     |                                    |
|------|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                          |                                                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                              | Sumber Dana                        |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                        | 3                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                   | 7                                  |
|      |    |   |      |    |                                                                                          | Rentan Kewenangan Provinsi                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                     |                                    |
| 1    | 6  | 6 | 1.01 | 5  | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                           | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi                                                                   | 35 Orang                              | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6  | 6 | 1.01 | 11 | Penyediaan Sandang                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | 200 Orang                             | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6  | 6 | 1.01 | 13 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                  | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi                                                                                                             | 200 Orang                             | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 1    | 6  | 7 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                          | -                                                                                                                                                         | -                                     | <b>500.000.000</b>  |                                                                                                                                     |                                    |
| 1    | 6  | 7 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>                                |                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                     |                                    |
| 1    | 6  | 7 | 1.01 | 2  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                      | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                                                   | 3 Makam                               | 500.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Heram, Waena | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 2    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>             |                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                     |                                    |
| 2    | 12 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>         |                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                     |                                    |
| 2    | 12 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                      | -                                                                                                                                                         | -                                     | <b>650.000.000</b>  |                                                                                                                                     |                                    |
| 2    | 12 | 2 | 1.01 |    | <b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>                                                |                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                     |                                    |
| 2    | 12 | 2 | 1.01 | 1  | Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional | Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk                                                                                            | 1 Dokumen                             | 650.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                   |                                    |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                            | Sumber Dana                        |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                               | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                 | 7                                  |
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                             | Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                   |                                    |
| 2    | 12 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                               | -                                     | <b>900.000.000</b>     |                                                                                                                                                   |                                    |
| 2    | 12 | 3 | 1.01 |   | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                   |                                    |
| 2    | 12 | 3 | 1.01 | 2 | Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi                                                                                           | 1 Dokumen                             | 450.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |
| 2    | 12 | 3 | 1.02 |   | <b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                   |                                    |
| 2    | 12 | 3 | 1.02 | 4 | Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil                                        | 1 Dokumen                             | 450.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |
| 2    | 12 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                                                                                                              | -                                                                                                                                                                               | -                                     | <b>2.009.999.145</b>   |                                                                                                                                                   |                                    |
| 2    | 12 | 4 | 1.01 |   | <b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                   |                                    |
| 2    | 12 | 4 | 1.01 | 1 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen                             | 200.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 2    | 12 | 4 | 1.01 | 2 | Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota           | 1 Dokumen                             | 759.999.145            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]  |
| 2    | 12 | 4 | 1.02 |   | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                   |                                    |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                      |                                   |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                              |                                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                               | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                            | 3                                                                                                                                                      | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                    | 7                                 |
| 2    | 12 | 4 | 1.02 | 2 | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                          | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                                                                      | 1 Laporan                             | 350.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 12 | 4 | 1.02 | 4 | Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi                                        | 1 Dokumen                             | 350.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 12 | 4 | 1.03 |   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>                     |                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    | 12 | 4 | 1.03 | 2 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 14 Orang                              | 350.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 12 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                                                               | -                                                                                                                                                      | -                                     | <b>115.000.000</b>  |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    | 12 | 5 | 1.01 |   | <b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>                                                                        |                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    | 12 | 5 | 1.01 | 2 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain                      | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun                                                   | 10 Dokumen                            | 115.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM</b>                                                                  |                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                 |                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    | 7  |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                                               |                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    | 7  | 2 |      |   | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                                                                      | -                                                                                                                                                      | -                                     | <b>134.539.978</b>  |                                                                                                                                                      |                                   |
| 2    | 7  | 2 | 1.01 |   | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>                                                                 |                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                      |                                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                                                                 |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                       |                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                                                     |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                   | 7                                                               |
| 2    | 7 | 2 | 1.01 | 1 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                         | 1 Dokumen                             | 134.539.978         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                                                         | -                                                                                 | -                                     | <b>312.800.000</b>  |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 3 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>                                                                                       |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 3 | 1.01 | 1 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi                                            | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n      | 20 Orang                              | 312.800.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                                                                                                | -                                                                                 | -                                     | <b>180.000.000</b>  |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 4 | 1.03 |   | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>                                                                                                              |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 4 | 1.03 | 3 | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja      | 40 Orang                              | 180.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                                                                                                | -                                                                                 | -                                     | <b>535.781.000</b>  |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 4 | 3.01 |   | <b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                             |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 4 | 3.01 | 7 | Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan                                                                                                  | Jumlah OAP Yang Diberdayakan melalui Kegiatan Kewirausahaan                       | 40 Orang                              | 535.781.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 7 | 5 |      |   | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                                                                    | -                                                                                 | -                                     | <b>913.650.000</b>  |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 5 | 1.01 |   | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b> |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                     |                                                                 |
| 2    | 7 | 5 | 1.01 | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial                                                                               | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online | 15 Perusahaan                         | 175.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                 |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                     |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                               |
| 2    | 7 | 5 | 1.02 |   | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 7 | 5 | 1.02 | 1 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                         | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                                                   | 25 Perkara                            | 400.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 5 | 1.03 |   | <b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>          |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 7 | 5 | 1.03 | 1 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)                                                                                                                                            | Jumlah Penetapan UMP                                                                                               | 1 Surat Keputusan                     | 338.650.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>                                                                                                                                        | -                                                                                                                  | -                                     | <b>480.000.000</b>  |                                                 |                                                                 |
| 2    | 7 | 6 | 1.01 |   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>                                                                                                                                |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 7 | 6 | 1.01 | 1 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan                                                                                                                                 | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 20 Perusahaan                         | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 6 | 1.01 | 2 | Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan                                                                                                                                    | Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan                                                                  | 2 Kasus                               | 80.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 7 | 6 | 1.01 | 3 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                                                                                                                          | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3                                                                               | 53 Perusahaan                         | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                 |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                       |                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                     | 3                                                               | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                               |
| 2    | 17 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                                        |                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 3 |      |   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                           | -                                                               | -                                     | 219.999.665         |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 3 | 1.02 |   | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 3 | 1.02 | 2 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                               | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | 20 Unit Usaha                         | 219.999.665         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 17 | 4 |      |   | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                          | -                                                               | -                                     | 300.000.000         |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 4 | 1.01 |   | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi        |                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 4 | 1.01 | 3 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                                    | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan              | 20 Unit Usaha                         | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 17 | 5 |      |   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                          | -                                                               | -                                     | 356.840.005         |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 5 | 1.01 |   | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                           |                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 5 | 1.01 | 1 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                       | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian              | 120 Orang                             | 356.840.005         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                 |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                               |
| 2    | 17 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                             | -                                     | 856.795.825         |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 6 | 1.01 |   | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                           |                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 6 | 1.01 | 2 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha              | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 20 Unit Usaha                         | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 17 | 6 | 1.01 | 3 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                     | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya            | 245 Keluarga                          | 356.795.825         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 17 | 6 | 1.01 | 6 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                           | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya                                                                                                                                | 30 Unit Usaha                         | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 17 | 7 |      |   | <b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                         | -                                                                                                                                                                             | -                                     | 1.200.000.000       |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 7 | 1.01 |   | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b> |                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 7 | 1.01 | 1 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan                                  | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja,                                                                        | 60 Unit Usaha                         | 500.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                 |
|------|----|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                     | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                               |
|      |    |   |      |    | Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                                                                           | Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 7 | 1.01 | 6  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan                                                                            | 160 Orang                             | 350.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 17 | 7 | 1.01 | 12 | Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil                                                                                                   | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi                                                                                                 | 150 Unit Usaha                        | 350.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 17 | 8 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                      | -                                                                                                                                     | -                                     | <b>585.000.000</b>  |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 8 | 1.01 |    | <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>                                       |                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 2    | 17 | 8 | 1.01 | 1  | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 25 Unit Usaha                         | 450.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 2    | 17 | 8 | 1.01 | 2  | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM                                | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum                                                                                       | 123 Orang                             | 135.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 3    | 32 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>                                                                                        |                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 3    | 32 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>                                                                                       | -                                                                                                                                     | -                                     | <b>188.891.150</b>  |                                                 |                                                                 |
| 3    | 32 | 3 | 1.01 |    | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                     |                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                 |                                                                 |
| 3    | 32 | 3 | 1.01 | 6  | Pelatihan Transmigrasi                                                                                                                | Jumlah Calon Transmigran/Transmigran                                                                                                  | 20 Orang                              | 188.891.150         | -                                               | SISA LEBIH PERHITUNGAN                                          |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                       |                                   |
|------|---|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                         |                                                                                      | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                | Sumber Dana                       |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                       | 3                                                                                    | 4                                     | 5                   | 6                                                     | 7                                 |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                         | yang Mendapatkan Pelatihan                                                           |                                       |                     |                                                       | ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA         |
|      |   |   |      |    | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                            |                                                                                      |                                       |                     |                                                       |                                   |
| 2    |   |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                            |                                                                                      |                                       |                     |                                                       |                                   |
| 2    | 8 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>                                          |                                                                                      |                                       |                     |                                                       |                                   |
| 2    | 8 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                        | -                                                                                    | -                                     | 1.223.070.400       |                                                       |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 1.01 |    | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                              |                                                                                      |                                       |                     |                                                       |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 1.01 | 5  | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                            | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi                             | 1 Kebijakan                           | 162.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 8 | 2 | 1.01 | 9  | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi                                             | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi | 1 laporan                             | 235.535.200         | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 8 | 2 | 1.01 | 11 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                    | jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan                     | 1 Lembaga                             | 214.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa           | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 8 | 2 | 1.02 |    | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                      |                                       |                     |                                                       |                                   |
| 2    | 8 | 2 | 1.02 | 5  | Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi        | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi  | 2 Lembaga                             | 200.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                                                                                                 |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                                                     |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                | 4                                     | 5                   | 6                                                 | 7                                                                                               |
| 2    | 8 | 2 | 1.02 | 8 | sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                                            | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi   | 120 Orang                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                                               |
| 2    | 8 | 2 | 1.02 | 9 | peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi                              | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan | 120 Orang                             | 211.535.200         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                                               |
| 2    | 8 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                                          | -                                                                                                                                                | -                                     | <b>608.605.199</b>  |                                                   |                                                                                                 |
| 2    | 8 | 3 | 1.01 |   | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                   |                                                                                                 |
| 2    | 8 | 3 | 1.01 | 6 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                                 | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                       | 1 Kebijakan                           | 85.500.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 |   | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                   |                                                                                                 |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 | 4 | layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | 34 Orang                              | 77.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 | 6 | layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat                                                   | 2 Orang                               | 3.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                                                                                                 |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                                                     |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                      | 4                                     | 5                   | 6                                                 | 7                                                                                               |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                            | Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                       |                                       |                     |                                                   |                                                                                                 |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 | 7  | layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 34 Orang                              | 18.027.199          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 | 8  | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 | 34 Orang                              | 163.107.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 | 9  | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                    | 2 Orang                               | 3.770.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 8 | 3 | 1.02 | 10 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            | 2 Orang                               | 6.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 8 | 3 | 1.03 |    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                                                                      |                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                   |                                                                                                 |
| 2    | 8 | 3 | 1.03 | 5  | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                                   | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                                     | 34 Orang                              | 58.140.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 8 | 3 | 1.03 | 6  | penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan                                                                                                  | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                                 | 1 Dokumen                             | 194.061.000         | Kab. Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Kasonaweja | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                                               |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                     |                                                              |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                              | Sumber Dana                                                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                      | 4                                     | 5                   | 6                                                                   | 7                                                            |
|      |   |   |      |   | Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                       | -                                                                                                                                                                      | -                                     | 320.517.000         |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>                            |                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 6 | 1.01 | 7 | Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                         | Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 1 Lembaga                             | 230.382.500         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                       | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                            |
| 2    | 8 | 6 | 1.02 |   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>                |                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 6 | 1.02 | 7 | Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                      | jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi                                          | 1 Dokumen                             | 90.134.500          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                            |
| 2    | 8 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                       | -                                                                                                                                                                      | -                                     | 278.137.000         |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 7 | 1.01 |   | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 7 | 1.01 | 8 | Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                         | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi                                                                                                      | 2 Kebijakan                           | 96.957.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Kayo Batu Kota Jayapura, Heram, Yoka | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                            |
| 2    | 8 | 7 | 1.02 |   | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>    |                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                     |                                                              |
| 2    | 8 | 7 | 1.02 | 8 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban                                                                                                      | 34 Orang                              | 40.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                     | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |



| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                                                 |
|------|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                     |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                                                               |
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                        | Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                                                                 |
| 2    | 8  | 7 | 1.02 | 9  | layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                   | 2 Orang                               | 3.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                                                                           |
| 2    | 8  | 7 | 1.02 | 10 | Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | 34 Orang                              | 126.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK |
| 2    | 8  | 7 | 1.02 | 13 | layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota& | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | 34 Orang                              | 6.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 8  | 7 | 1.02 | 14 | layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 2 Orang                               | 3.090.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 8  | 7 | 1.02 | 15 | layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 34 Orang                              | 3.090.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK                                    |
| 2    | 14 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                       |                     |                                                 |                                                                                                 |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                            |                                   |
|------|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                     | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                          | 7                                 |
| 2    | 14 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                | -                                     | <b>464.230.934</b>  |                                                                                                                                            |                                   |
| 2    | 14 | 3 | 1.01 |    | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal      |                                                                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                                                                                                            |                                   |
| 2    | 14 | 3 | 1.01 | 10 | Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana                                                                   | Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 3 Daerah                              | 200.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB             |
| 2    | 14 | 3 | 1.01 | 13 | Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.                                      | 1 Dokumen                             | 132.115.467         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 14 | 3 | 1.02 |    | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                                                                                                            |                                   |
| 2    | 14 | 3 | 1.02 | 2  | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                                                | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                                 | 20 Organisasi                         | 132.115.467         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 14 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                | -                                     | <b>131.115.467</b>  |                                                                                                                                            |                                   |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                 |                                                              |
|------|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                              |                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                                             | 4                                     | 5                      | 6                                               | 7                                                            |
| 2    | 14 | 4 | 1.02 |    | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                               |                                       |                        |                                                 |                                                              |
| 2    | 14 | 4 | 1.02 | 7  | Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota                                                                                     | Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota        | 1 Laporan                             | 131.115.467            | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                            |
|      |    |   |      |    | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PANGAN                                                                                                                               |                                                                                               |                                       |                        |                                                 |                                                              |
| 2    |    |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                        |                                                                                               |                                       |                        |                                                 |                                                              |
| 2    | 9  |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                                            |                                                                                               |                                       |                        |                                                 |                                                              |
| 2    | 9  | 3 |      |    | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                                            | -                                                                                             | -                                     | 2.350.000.000          |                                                 |                                                              |
| 2    | 9  | 3 | 1.01 |    | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan                         |                                                                                               |                                       |                        |                                                 |                                                              |
| 2    | 9  | 3 | 1.01 | 7  | Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                              | Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal                | 1 Laporan                             | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 9  | 3 | 1.01 | 9  | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi                                                                                               | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins | 1 Laporan                             | 350.000.000            | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 9  | 3 | 1.01 | 13 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                                                                                                        | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)                                                          | 1 Dokumen                             | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                              |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                            |                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                          | 3                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                            |
| 2    | 9 | 3 | 1.01 | 15 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                                                         | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi                                  | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 9 | 3 | 1.02 |    | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>                                                               |                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 9 | 3 | 1.02 | 2  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                                  | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENCAIRAN DANA CADANGAN                                      |
| 2    | 9 | 3 | 1.02 | 6  | Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                             | Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                         | 35 Ton                                | 700.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 2    | 9 | 3 | 1.02 | 7  | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                                                                              | Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi                          | 35 Ton                                | 800.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 2    | 9 | 3 | 1.04 |    | <b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b> |                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 9 | 3 | 1.04 | 1  | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                        | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal    | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 9 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                 | -                                                                             | -                                     | 100.000.000         |                                                 |                                                              |
| 2    | 9 | 4 | 1.01 |    | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>                                                 |                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 9 | 4 | 1.01 | 1  | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota                     | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 9 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                                                                                  | -                                                                             | -                                     | 800.000.000         |                                                 |                                                              |
| 2    | 9 | 5 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 9 | 5 | 1.01 | 6  | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                                                                   | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan               | 30 Sertifikat                         | 400.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-                                |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
|------|----|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                        |                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                      | 3                                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                            |
|      |    |   |      |    |                                                                                        |                                                                                                               |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                              |
| 2    | 9  | 5 | 1.01 | 8  | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 1 Dokumen                             | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 9  | 5 | 1.01 | 10 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                     |                                                                                                               |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3    | 27 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                            |                                                                                                               |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3    | 27 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                            | -                                                                                                             | -                                     | 3.900.000.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3    | 27 | 2 | 1.01 |    | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>                                           |                                                                                                               |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3    | 27 | 2 | 1.01 | 1  | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian          | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian         | 1 Laporan                             | 1.000.000.000       | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 |    | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>                         |                                                                                                               |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 1  | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih                                                | Jumlah Sertifikat Benih                                                                                       | 35 Sertifikat                         | 400.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                  |                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                                                    | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                | 3                                                                                                   | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                                                         | 7                                                            |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 7  | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                                      | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak                           | 15000 Batang                          | 1.000.000.000        | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 13 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                                | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak                     | 13 Ton                                | 1.500.000.000        | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                   | -                                                                                                   | -                                     | <b>4.215.685.000</b> |                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 |    | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>                                                              |                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 1  | Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                              | Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian                              | 1 Dokumen                             | 865.685.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 3  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                            | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani                                    | 1 Dokumen                             | 200.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi | 1 Unit                                | 150.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                           | PENCAIRAN DANA CADANGAN                                      |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 13 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian                                                   | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan                                                           | 715 Ha                                | 3.000.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                 | -                                                                                                   | -                                     | <b>401.180.000</b>   |                                                                                                                                                                                           |                                                              |
| 3    | 27 | 5 | 1.01 |    | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                                |                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                                                           |                                                              |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                                              |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                   |                                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                       | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                                            |
| 3    | 27 | 5 | 1.01 | 1 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                     | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 715 Ha                                | 401.180.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                               | -                                                                                                                       | -                                     | <b>1.650.000.000</b> |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 7 | 1.01 |   | <b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                               |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 7 | 1.01 | 3 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian                                                                        | Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya                                                  | 2 Unit                                | 250.000.000          | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 7 | 1.01 | 4 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                                           | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya                                                   | 100 Orang                             | 1.000.000.000        | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA                           |
| 3    | 27 | 7 | 1.02 |   | <b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 7 | 1.02 | 2 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                                                    | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan                                                        | 9 Kelompok                            | 400.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ADAT</b>                                                             |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                 |                                                              |
| 2    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                      |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                 |                                                              |
| 2    | 13 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>                                                |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                 |                                                              |
| 2    | 13 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                                                      | -                                                                                                                       | -                                     | <b>1.188.975.000</b> |                                                 |                                                              |
| 2    | 13 | 2 | 1.01 |   | <b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b> |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                 |                                                              |
| 2    | 13 | 2 | 1.01 | 1 | Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi                                                                        | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-                                |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                 |                                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                               | 3                                                                                                                       | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                            |
|      |    |   |      |   | Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi            | dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan |                                       |                      | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT                                 |
| 2    | 13 | 2 | 1.01 | 2 | Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat                                                          | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENGUATAN KELEMBAGAAN           |
| 2    | 13 | 2 | 1.01 | 3 | Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa                                      | 1 Dokumen                             | 1.188.975.000        | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENGUATAN KELEMBAGAAN           |
| 2    | 13 | 4 |      |   | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                   | -                                                                                                                       | -                                     | <b>1.000.000.000</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 |   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>               |                                                                                                                         |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 2 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa                                                              | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 4 | Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa | jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa                    | 1 Dokumen                             | 1.000.000.000        | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 5 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                            | Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi                                                                           | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-                                |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                  |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                            | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                | 7                                                            |
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                              | Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                    |                                       |                      |                                                                                                  | PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                              |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 9  | Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan                                                        | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 15 | Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 16 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                      | 0 Dokumen                             | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |
| 2    | 13 | 4 | 1.01 | 20 | Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi                                                                              | 0 Desa                                | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                            | -                                     | <b>1.500.000.000</b> |                                                                                                  |                                                              |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 |    | <b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                              |                                       |                      |                                                                                                  |                                                              |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 | 1  | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                    | 1 Dokumen                             | 500.000.000          | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT    |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 | 2  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan                                                                | 0 Dokumen                             | -                    | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-                                |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                  |                                                              |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                | 7                                                            |
|      |    |   |      |   | Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                   | Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                       |                                       |                     |                                                                                                  | PENGUATAN KELEMBAGAAN                                        |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 | 3 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya | 1 Lembaga                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENGUATAN KELEMBAGAAN           |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 | 5 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                              | 0 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 | 6 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                         | 1 Laporan                             | 500.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 5 | 1.01 | 9 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                             | 0 Laporan                             | -                   | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA</b>                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                              | -                                     | -                   |                                                                                                  |                                                              |
| 2    | 13 | 6 | 3.01 |   | <b>Pengembangan Data/Informasi</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                  |                                                              |
| 2    | 13 | 6 | 3.01 | 1 | Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat                                                                                       | 0 Orang                               | -                   | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT    |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                       |                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                     | 3                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                            |
| 2    | 13 | 6 | 3.01 | 2 | Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK              | 0 Dokumen                             | -                   | Kota Jayapura, Abepura, Awiyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |
| 2    | 13 | 6 | 3.02 |   | <b>Pemberdayaan Masyarakat Kampung</b>                                |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| 2    | 13 | 6 | 3.02 | 1 | Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional                       | Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional                    | 0 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 6 | 3.02 | 2 | Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna                          | Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna                                          | 0 Laporan                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2    | 13 | 6 | 3.03 |   | <b>Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung</b>            |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| 2    | 13 | 6 | 3.03 | 1 | Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota | 0 Laporan                             | -                   | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PENGUATAN KELEMBAGAAN           |
| 2    | 13 | 8 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA</b>             | -                                                                                 | -                                     | 1.000.000.000       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
| 2    | 13 | 8 | 3.01 |   | <b>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua</b> |                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |

| Kode               |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                    |    |   |      |    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                                                                                                         | Sumber Dana                                                  |
| 1                  |    |   |      |    | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                     | 6                                                                                                                              | 7                                                            |
| 2                  | 13 | 8 | 3.01 | 2  | Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua                                           | Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan                                                           | 0 Unit                                | -                     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2                  | 13 | 8 | 3.01 | 6  | Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat | 1 Dokumen                             | 500.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 2                  | 13 | 8 | 3.01 | 11 | Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat                | Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung                         | 50 Orang                              | 500.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|                    |    |   |      |    | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                       |                       |                                                                                                                                |                                                              |
| <b>2</b>           |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                       |                                                                                                                                                     |                                       |                       |                                                                                                                                |                                                              |
| <b>2 15</b>        |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                                                      |                                                                                                                                                     |                                       |                       |                                                                                                                                |                                                              |
| <b>2 15 2</b>      |    |   |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                                               | -                                                                                                                                                   | -                                     | <b>14.650.000.000</b> |                                                                                                                                |                                                              |
| <b>2 15 2 1.02</b> |    |   |      |    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>                                                             |                                                                                                                                                     |                                       |                       |                                                                                                                                |                                                              |
| 2                  | 15 | 2 | 1.02 | 2  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia                                                                                           | 10 Unit                               | 4.950.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Aिमando Padaido, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi, Sarmi Kota | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN    |
| 2                  | 15 | 2 | 1.02 | 4  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara                                                                                       | 2 Unit                                | 800.000.000           | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN    |
| <b>2 15 2 1.03</b> |    |   |      |    | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                                                       |                                                                                                                                                     |                                       |                       |                                                                                                                                |                                                              |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                                                                                                           |                                                           |
|------|----|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                                                                                                                    | Sumber Dana                                               |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                 | 4                                     | 5                     | 6                                                                                                                                         | 7                                                         |
| 2    | 15 | 2 | 1.03 | 1  | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                                                                           | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B                                                                              | 1 Dokumen                             | 700.000.000           | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa                                                                                                         | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 2    | 15 | 2 | 1.03 | 10 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                      | Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                     | 1 Unit                                | 4.350.000.000         | Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Bosnik Sup                                                                                                  | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 2    | 15 | 2 | 1.03 | 11 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                                      | Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                        | 2 Unit                                | 2.500.000.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Heram, Waena                                                                        | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)                            |
| 2    | 15 | 2 | 1.07 |    | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                                                |                                                                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                           |                                                           |
| 2    | 15 | 2 | 1.07 | 11 | Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                                            | Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)                                                                                   | 1 Lokasi                              | 1.350.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Semua Kel/Desa                                                                                           | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 2    | 15 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                               | -                                                                                                                                 | -                                     | <b>41.740.851.000</b> |                                                                                                                                           |                                                           |
| 2    | 15 | 3 | 1.09 |    | <b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>                                                     |                                                                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                           |                                                           |
| 2    | 15 | 3 | 1.09 | 2  | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional                                                                                                           | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun                                                                                | 3 Unit                                | 40.840.851.000        | Kab. Kepulauan Yapen, Teluk Ampimoi, Ampimoi Kab. Kepulauan Yapen, Windesi, Windesi Kab. Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 2    | 15 | 3 | 1.10 |    | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                                   |                                       |                       |                                                                                                                                           |                                                           |
| 2    | 15 | 3 | 1.10 | 2  | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                            | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun | 0 Unit                                | -                     | Kab. Jayapura, Sentani, Semua Kel/Desa                                                                                                    | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                                                                                                  |                                                           |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                                                                                                           | Sumber Dana                                               |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                | 4                                     | 5                     | 6                                                                                                                                | 7                                                         |
| 2    | 15 | 3 | 1.10 | 3 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan | 2 Unit                                | 400.000.000           | Kab. Jayapura, Sentani, Yahim                                                                                                    | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)                            |
| 2    | 15 | 3 | 1.10 | 9 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia                                                                      | 2 Unit                                | 500.000.000           | Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa                                                                                           | PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)                            |
| 2    | 15 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                | -                                     | <b>38.000.000.000</b> |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2    | 15 | 4 | 3.02 |   | <b>Pembangunan Bandar Udara</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2    | 15 | 4 | 3.02 | 2 | Pembangunan Bandar Udara                                                                                                                                          | Jumlah bandar udara yang terbangun                                                                                                                               | 3 Unit                                | 37.000.000.000        | Kab. Sarmi, Apawer Hulu, Aurimi Kab. Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Waropen Atas, Marikai | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
| 2    | 15 | 4 | 3.02 | 3 | Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara                                                                                                                   | Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun                                                                                                       | 2 Unit/Paket                          | 1.000.000.000         | Kab. Jayapura, Sentani, Sentani Kota                                                                                             | DTI-PAPUA-PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2    | 16 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2    | 16 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                                                                        | -                                                                                                                                                                | -                                     | <b>200.000.000</b>    |                                                                                                                                  |                                                           |
| 2    | 16 | 2 | 1.01 |   | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                       |                       |                                                                                                                                  |                                                           |



| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                 |                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                               | 4                                     | 5                     | 6                                               | 7                            |
| 2    | 16 | 2 | 1.01 | 22 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                               | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                               | 10 Permohonan                         | 100.000.000           | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2    | 16 | 2 | 1.01 | 24 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                                      | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis                                                   | 10 Media                              | 100.000.000           | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 2    | 16 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                               | -                                     | <b>77.992.158.000</b> |                                                 |                              |
| 2    | 16 | 3 | 1.02 |    | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |                                                 |                              |
| 2    | 16 | 3 | 1.02 | 19 | Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                     | Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                 | 9 kabupaten/kota                      | 61.282.158.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-TELEKOMUNIKASI     |
| 2    | 16 | 3 | 1.02 | 30 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                                                                | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                  | 50 perangkat daerah                   | 16.000.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-TELEKOMUNIKASI     |
| 2    | 16 | 3 | 1.02 | 33 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | 15 Aplikasi                           | 710.000.000           | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DTI-PAPUA-TELEKOMUNIKASI     |
| 2    | 21 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |                                                 |                              |
| 2    | 21 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                                                                                                     | -                                                                                                                                                                               | -                                     | <b>50.000.000</b>     |                                                 |                              |
| 2    | 21 | 2 | 1.01 |    | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |                                       |                       |                                                 |                              |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                      |
|------|----|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                    |
| 2    | 21 | 2 | 1.01 | 8  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                               | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. | 12 Dokumen                            | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         |
|      |    |   |      |    | <b>DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | 250.000.000         |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 2 | 1.01 |    | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 2 | 1.01 | 13 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                                                                                                                                    | 30 Orang                              | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2    | 19 | 2 | 1.02 |    | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 2 | 1.02 | 3  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui                          | Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis                                                                                                                                                                                                 | 100 Persentase                        | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                      |
|------|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                          |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                    | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                    |
|      |    |   |      |   | kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda                                                                                                                    | peneguhan kemandirian ekonomi pemuda                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>                                                                                                                        | -                                                                                                    | -                                     | 5.369.716.000       |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 3 | 1.01 |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                      |                                                                                                      |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 3 | 1.01 | 4 | Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi | Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia                                          | 9 Unit                                | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2    | 19 | 3 | 1.02 |   | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 3 | 1.02 | 4 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                                                | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga | 50 Orang                              | 643.324.034         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2    | 19 | 3 | 1.02 | 6 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                                                                                                 | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara                 | 2 Kegiatan                            | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2    | 19 | 3 | 1.03 |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                                                                                                       |                                                                                                      |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 3 | 1.03 | 9 | Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi                                                                                                                | Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan                 | 50 Orang                              | 4.176.355.966       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2    | 19 | 3 | 1.04 |   | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>                                                                                                                      |                                                                                                      |                                       |                     |                                                 |                                                      |
| 2    | 19 | 3 | 1.04 | 5 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                                                                                               | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi          | 10 Dokumen                            | 250.036.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>                                                                                                                                     |                                                                                                      |                                       |                     |                                                 |                                                      |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                                   |
|------|----|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                                 | 7                                 |
| 2    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                        |                                                                                               |                                       |                     |                                                   |                                   |
| 2    | 22 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                                                        |                                                                                               |                                       |                     |                                                   |                                   |
| 2    | 22 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>                                                                              | -                                                                                             | -                                     | 1.829.425.700       |                                                   |                                   |
| 2    | 22 | 2 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                               |                                       |                     |                                                   |                                   |
| 2    | 22 | 2 | 1.01 | 2  | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                      | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                 | 100 Orang                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop           | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 2 | 1.01 | 3  | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara                       | 6 Unit                                | 300.000.000         | Kota Jayapura, Heram, Waena                       | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 2 | 1.01 | 12 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan                               | 5 Dokumen                             | 189.712.850         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 2 | 1.02 |    | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>       |                                                                                               |                                       |                     |                                                   |                                   |
| 2    | 22 | 2 | 1.02 | 1  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | 8 Objek                               | 189.712.850         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 2 | 1.02 | 2  | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional          | 4 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 2 | 1.02 | 3  | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai                            | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa                        | 10 Sertifikat                         | 200.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                 | Sumber Dana                                                                               |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                   | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                      | 7                                                                                         |
|      |    |   |      |   | Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan                                                 | dalam Pemajuan Kebudayaan                                                                                           |                                       |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 2    | 22 | 2 | 1.03 |   | <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  |                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 2    | 22 | 2 | 1.03 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                          | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                   | 10 Objek                              | 200.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                                         |
| 2    | 22 | 2 | 1.03 | 2 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                                   | 100 Orang                             | 200.000.000          | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                                         |
| 2    | 22 | 2 | 1.03 | 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi                                               | 2 Unit                                | 250.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                                                         |
| 2    | 22 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>                                                            | -                                                                                                                   | -                                     | <b>1.734.684.999</b> |                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 2    | 22 | 3 | 1.01 |   | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                            |                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                           |
| 2    | 22 | 3 | 1.01 | 1 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 110 Orang                             | 578.228.333          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA |
| 2    | 22 | 3 | 1.01 | 2 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                  | 20 Sertifikat                         | 578.228.333          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA |
| 2    | 22 | 3 | 1.01 | 3 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 41 Lembaga                            | 578.228.333          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA |
| 2    | 22 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>                                                                            | -                                                                                                                   | -                                     | <b>362.625.000</b>   |                                                                                                                                                        |                                                                                           |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                            |                                   |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                             |                                                                                          | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                     | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                           | 3                                                                                        | 4                                     | 5                    | 6                                                                          | 7                                 |
| 2    | 22 | 4 | 1.01 |   | <b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>                                                     |                                                                                          |                                       |                      |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 4 | 1.01 | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                            | 4 Unit                                | 362.625.000          | Kab. Jayapura, Sentani Timur, Asei Kecil Kota Jayapura, Abepura, Abepantai | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                                     | -                                                                                        | -                                     | <b>656.440.000</b>   |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 5 | 1.01 |   | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                                            |                                                                                          |                                       |                      |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 5 | 1.01 | 1 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                       | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                        | 5 Objek                               | 213.130.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 5 | 1.02 |   | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                                          |                                                                                          |                                       |                      |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 5 | 1.02 | 4 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya                           | Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya           | 30 Orang                              | 443.310.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                                     | -                                                                                        | -                                     | <b>480.935.000</b>   |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 5 | 3.01 |   | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>                                            |                                                                                          |                                       |                      |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 5 | 3.01 | 5 | Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                          | Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi                                            | 10 Orang                              | 145.935.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 5 | 3.01 | 6 | Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih | Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih | 2 Cagar Budaya                        | 335.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>                                                      | -                                                                                        | -                                     | <b>1.114.880.920</b> |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 6 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>                                                          |                                                                                          |                                       |                      |                                                                            |                                   |
| 2    | 22 | 6 | 1.01 | 1 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                           | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan          | 3000 Unit                             | 150.000.000          | Kota Jayapura, Heram, Waena                                                | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                              |                                   |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                             |                                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                       | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                           | 3                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                            | 7                                 |
| 2    | 22 | 6 | 1.01 | 2 | Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman                | Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya                                                                      | 14 Orang                              | 100.000.000          | Kota Jayapura, Heram, Waena                                                                                                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 6 | 1.01 | 3 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                  | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum                                                                                               | 4 Unit                                | 507.439.950          | Kota Jayapura, Heram, Waena                                                                                                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 6 | 1.01 | 4 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia                                                                                                    | 20 Unit                               | 200.000.000          | Kota Jayapura, Heram, Waena                                                                                                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 22 | 6 | 1.01 | 5 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                                                                              | 150 Unit                              | 157.440.970          | Kota Jayapura, Heram, Waena                                                                                                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                          |                                                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                              |                                   |
| 3    | 26 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>                                                |                                                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                              |                                   |
| 3    | 26 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                  | -                                                                                                                                                   | -                                     | <b>1.390.165.364</b> |                                                                                                                                                              |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</b>                                               |                                                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                              |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 1.01 | 5 | Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi | 3 Lokasi                              | 240.000.000          | Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Nimbokrang, Rheapang Muaf<br>Kab. Jayapura, Unurum Guay, Sawa Suma                            | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.01 | 7 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                              | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi                                                     | 1 Laporan                             | 140.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.01 | 8 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi                              | Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                   | 180 Orang                             | 240.000.000          | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.02 |   | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>                                    |                                                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                              |                                   |



| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                     | 7                                 |
| 3    | 26 | 2 | 1.02 | 4  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi                 | 10 Unit                               | 240.000.000         | Kab. Jayapura, Depapre, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Nimbokrang, Berab                                                                                                                            | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 |    | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                               |                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                       |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 7  | Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)                                                                                                                          | Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021                                           | 150 Usaha                             | 180.165.364         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 8  | Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar | Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi                                                    | 100 Usaha Pariwisata                  | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 9  | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)                             | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) | 35 Unit Usaha                         | -                   | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 10 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                                                                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi                                                                          | 150 Laporan                           | -                   | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 11 | Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi                                                       | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi                  | 3 Dokumen                             | -                   | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 12 | Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)                                                                                   | Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi                                                             | 50 Usaha                              | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                  |                                   |
|------|----|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                   |                                                                                                                      | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                 | 3                                                                                                                    | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                | 7                                 |
| 3    | 26 | 2 | 1.04 | 13 | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata                                                          | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha                                                                    | 150 Laporan                           | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                        | -                                                                                                                    | -                                     | <b>240.000.000</b>  |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 3.05 |    | <b>Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi</b>                                                     |                                                                                                                      |                                       |                     |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 2 | 3.05 | 1  | Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                                   | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Wilayah Provinsi                                            | 1 Dokumen                             | 240.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                               | -                                                                                                                    | -                                     | <b>453.397.900</b>  |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 3 | 1.01 |    | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b> |                                                                                                                      |                                       |                     |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 3 | 1.01 | 1  | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 6 Dokumen                             | 453.397.900         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>         | -                                                                                                                    | -                                     | <b>300.000.000</b>  |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 4 | 1.02 |    | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>                                                                     |                                                                                                                      |                                       |                     |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 4 | 1.02 | 19 | Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                                          | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif                                                                                 | 1 Unit                                | 300.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                            | -                                                                                                                    | -                                     | <b>500.000.000</b>  |                                                                                                  |                                   |
| 3    | 26 | 5 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>      |                                                                                                                      |                                       |                     |                                                                                                  |                                   |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                               |                                   |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                         |                                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                       | 3                                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                             | 7                                 |
| 3    | 26 | 5 | 1.01 | 8  | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif            | 9 Laporan                             | 100.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 5 | 1.01 | 11 | Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)                                       | Jumlah produk kreatif                                                                                                   | 15 Produk                             | 200.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 5 | 1.01 | 17 | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                             | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif         | 25 Orang                              | 100.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 5 | 1.02 |    | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>                                    |                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                               |                                   |
| 3    | 26 | 5 | 1.02 | 1  | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                           | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                               | 25 Orang                              | 100.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    | 26 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                  | -                                                                                                                       | -                                     | 100.000.000         |                                                                                               |                                   |
| 3    | 26 | 5 | 3.03 |    | <b>Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>                 |                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                               |                                   |
| 3    | 26 | 5 | 3.03 | 1  | Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif           | Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan | 20 Laporan                            | 100.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
|      |    |   |      |    | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>                                              |                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                               |                                   |
| 2    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>            |                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                               |                                   |
| 2    | 23 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                                          |                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                               |                                   |
| 2    | 23 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                   | -                                                                                                                       | -                                     | 4.302.515.000       |                                                                                               |                                   |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                               |                                                        |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                        | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                    | 4                                     | 5                   | 6                                             | 7                                                      |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                       |                     |                                               |                                                        |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 2 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                 | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya                                        | 1 Perpustakaan                        | 150.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 3 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi                                                                                   | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan                                                                                           | 15 Eksemplar                          | 197.895.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 4 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 10 Perpustakaan                       | 270.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 6 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                                                                     | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                        | 8 Orang                               | 150.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 7 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                                                                                    | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                                            | 4 Layanan                             | 900.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 8 | Pengembangan Perpustakaan Deposit                                                                                                                    | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan                                                                                                                        | 5 Perpustakaan                        | 200.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 9 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                           | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                           | 830 Eksemplar                         | 350.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|----|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                     |                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 14 | Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi                                                                | Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi                                                               | 10 Dokumen                            | -                   | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 15 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK                              | 1 Perpustakaan                        | 250.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 16 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                          | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                    | 1 Dokumen                             | -                   | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa               | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.01 | 17 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi                                                             | Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | 25 Perpustakaan                       | 250.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.02 |    | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                            |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 23 | 2 | 1.02 | 1  | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus            | 2 Lokus                               | 864.620.000         | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.02 | 2  | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi      | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                           | 5 Perpustakaan                        | 320.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 2 | 1.02 | 4  | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                                 | 4 Perpustakaan                        | 400.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 23 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                                         | -                                                                                                                         | -                                     | -                   |                                                 |                                                        |
| 2    | 23 | 3 | 1.04 |    | <b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>                   |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                                        |
|------|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                      |                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                    | 3                                                                                                                      | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                                      |
| 2    | 23 | 3 | 1.04 | 1 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                 | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | 1000 Eksemplar                        | -                    | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN             |
| 2    | 23 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>          | -                                                                                                                      | -                                     | <b>50.000.000</b>    |                                                 |                                                        |
| 2    | 23 | 3 | 3.04 |   | <b>Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi</b>              |                                                                                                                        |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 2    | 23 | 3 | 3.04 | 1 | Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi            | Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua                                               | 2 Kebijakan                           | 50.000.000           | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN             |
| 2    | 23 | 3 | 3.04 | 2 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi           | Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua                                        | 50 Orang                              | -                    | Kota Jayapura, Abepura, Semua Kel/Desa          | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN             |
| 2    | 23 | 4 |      |   | <b>PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN</b>    | -                                                                                                                      | -                                     | <b>150.000.000</b>   |                                                 |                                                        |
| 2    | 23 | 4 | 3.01 |   | <b>Peningkatan Perpustakaan Terakreditasi</b>                        |                                                                                                                        |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 2    | 23 | 4 | 3.01 | 3 | Pelaksanaan akreditasi perpustakaan                                  | Jumlah perpustakaan yang diakreditasi                                                                                  | 20 perpustakaan                       | 150.000.000          | Kota Jayapura, Abepura, Way Mhorock             | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN             |
| 2    | 24 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                          |                                                                                                                        |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                     | -                                                                                                                      | -                                     | <b>1.100.000.000</b> |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>                            |                                                                                                                        |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 | 1.01 | 5 | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi                 | Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi                                                                   | 30 Arsip                              | 200.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop         | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 24 | 2 | 1.01 | 6 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                            | Jumlah Daftar Arsip Dinamis                                                                                            | 25 Arsip                              | 250.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|----|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                         |                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                       | 3                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
| 2    | 24 | 2 | 1.01 | 10 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis                                                | Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis                                                    | 5 Unit                                | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 24 | 2 | 1.01 | 11 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                      | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan                                  | 3 Laporan                             | 250.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop         | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 24 | 2 | 1.02 |    | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>                                                         |                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 | 1.02 | 6  | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                  | jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi                 | 100 Arsip                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 24 | 2 | 1.03 |    | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>           |                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 | 1.03 | 2  | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                             | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi        | 1 Laporan                             | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 24 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                                        | -                                                                                                       | -                                     | <b>227.602.000</b>  |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 | 3.06 |    | <b>Pengawasan kearsipan di provinsi</b>                                                                 |                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 2 | 3.06 | 3  | Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota                                          | Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan                                       | 3 Lembaga                             | 227.602.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 24 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>                                                      | -                                                                                                       | -                                     | <b>250.000.000</b>  |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 3 | 1.01 |    | <b>Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b> |                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 3 | 1.01 | 4  | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi | 1500 Arsip                            | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                             |                                                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                                              | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
|      |    |   |      |   |                                                                                                             | di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 5 |      |   | <b>PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI</b>                                                                   | -                                                                                                                                              | -                                     | 250.000.000         |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 5 | 3.05 |   | <b>Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi</b>                                            |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 24 | 5 | 3.05 | 1 | Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi                                                   | Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertifikasi                                                                                    | 10 orang                              | 250.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                         |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                          |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 3    | 25 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                    |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 3    | 25 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                                          | -                                                                                                                                              | -                                     | 1.520.000.000       |                                                 |                                                        |
| 3    | 25 | 2 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                              |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 3    | 25 | 2 | 1.01 | 3 | Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                 | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi                                                                     | 400 Ha                                | 500.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA       |
| 3    | 25 | 2 | 1.01 | 7 | Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangsa Berwisata di Indonesia    | Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi | 1 Kegiatan                            | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA       |
| 3    | 25 | 2 | 1.01 | 9 | Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan | Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan                                                                                   | 10 Dokumen                            | 120.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA       |
| 3    | 25 | 2 | 1.03 |   | <b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>                                                |                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                                                                                                   |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                         | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                                                                                                 |
| 3    | 25 | 2 | 1.03 | 1 | Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                                | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                            | 20 Orang                              | 500.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                                  |
| 3    | 25 | 2 | 1.03 | 2 | Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                | Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | 5 Kelompok                            | 200.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                                  |
| 3    | 25 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>                                                                                                             | -                                                                                                                         | -                                     | <b>600.000.000</b>   |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 2 | 3.05 |   | <b>Pencadangan kawasan konservasi</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                       |                      |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 2 | 3.05 | 1 | Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil                                                                                                        | Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi  | 500 Ha                                | 600.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                                  |
| 3    | 25 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                                                   | -                                                                                                                         | -                                     | <b>3.850.000.000</b> |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>                                                                                                       |                                                                                                                           |                                       |                      |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 | 2 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                   | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil                               | 15 Unit                               | 1.900.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.02 |   | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                           |                                       |                      |                                                 |                                                                                                                   |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                                                                                                   |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                                                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                        | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                                                                                                 |
| 3    | 25 | 3 | 1.02 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                                                                                        | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat       | 1 Dokumen                             | 200.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.02 | 4 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                                                                                             | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat            | 6 Unit                                | 1.600.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT                                                   |
| 3    | 25 | 3 | 1.05 |   | <b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                          |                                       |                      |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 3 | 1.05 | 3 | Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT                                                                                                                                              | Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan    | 5 Dokumen                             | 150.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                      |
| 3    | 25 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                                                                                         | -                                                                                        | -                                     | <b>2.889.000.000</b> |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 4 | 1.05 |   | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                       |                      |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 4 | 1.05 | 1 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | 10 Dokumen                            | 289.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                                  |
| 3    | 25 | 4 | 1.05 | 2 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                                                                                                                                                       | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut                                              | 15 Unit                               | 1.200.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 4 | 1.06 |   | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>                                                                                                                                                               |                                                                                          |                                       |                      |                                                 |                                                                                                                   |
| 3    | 25 | 4 | 1.06 | 3 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                          | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 10 Unit                               | 1.400.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT, SISA                                             |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                    |                                                                                                                                         |
|------|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                             | Sumber Dana                                                                                                                             |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                           | 4                                     | 5                      | 6                                                  | 7                                                                                                                                       |
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                       |                        |                                                    | LEBIH PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA                                                                                       |
| 3    | 25 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENGAWASAN<br/>SUMBER DAYA KELAUTAN<br/>DAN PERIKANAN</b>                                                                                 | -                                                                                                                           | -                                     | <b>2.000.000.000</b>   |                                                    |                                                                                                                                         |
| 3    | 25 | 5 | 1.01 |    | <b>Pengawasan Sumber Daya<br/>Kelautan dan Perikanan sampai<br/>dengan 12 Mil</b>                                                                    |                                                                                                                             |                                       |                        |                                                    |                                                                                                                                         |
| 3    | 25 | 5 | 1.01 | 10 | Operasi Kapal Pengawas<br>Kelautan dan Perikanan                                                                                                     | Jumlah hari operasi Kapal<br>Pengawas Kelautan dan<br>Perikanan                                                             | 20 Hari Operasi                       | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA                                                                               |
| 3    | 25 | 5 | 1.01 | 11 | Perawatan Kapal Pengawas<br>Kelautan dan Perikanan                                                                                                   | Jumlah Kapal Pengawas<br>Kelautan dan Perikanan<br>yang dirawat                                                             | 3 Unit                                | 500.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA                                                                               |
| 3    | 25 | 5 | 1.01 | 16 | Pengawasan usaha pemanfaatan<br>sumber daya kelautan<br>kewenangan provinsi                                                                          | Jumlah Pelaku usaha<br>pemanfaatan sumber daya<br>kelautan yang diperiksa<br>kepatuhannya sesuai<br>kewenangan provinsi     | 30 Pelaku<br>Usaha                    | 300.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA                                                                               |
| 3    | 25 | 5 | 1.01 | 17 | Penumbuhan dan Pengembangan<br>Kelompok Masyarakat Pengawas<br>(POKMASWAS)                                                                           | Jumlah POKMASWAS yang<br>ditumbuhkan, dan<br>dikembangkan                                                                   | 10 Kelompok<br>Masyarakat             | 700.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA, DANA<br>OTONOMI KHUSUS<br>1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 25 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN<br/>PEMASARAN HASIL<br/>PERIKANAN</b>                                                                                      | -                                                                                                                           | -                                     | <b>200.000.000</b>     |                                                    |                                                                                                                                         |
| 3    | 25 | 6 | 1.01 |    | <b>Penerbitan Izin Usaha<br/>Pemasaran dan Pengolahan<br/>Hasil Perikanan Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)<br/>Daerah Provinsi</b>    |                                                                                                                             |                                       |                        |                                                    |                                                                                                                                         |
| 3    | 25 | 6 | 1.01 | 4  | Penyediaan Data dan Informasi<br>Usaha Pemasaran dan<br>Pengolahan Hasil Perikanan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi<br>Usaha Subsektor<br>Pengolahan Ikan, Subsektor<br>Pemasaran Ikan, dan<br>Usaha Jasa Pasca Panen | 1 Dokumen                             | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA                                                                               |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                 |                                                  |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                      | 6                                               | 7                                                |
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko                                                                                                                                                 |                                       |                        |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                   | -                                     | 1.200.000.000          |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 3.04 |   | <b>Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 3.04 | 1 | Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri                                                                                                                         | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri | 2 Unit Usaha                          | 300.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 6 | 3.07 |   | <b>Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 3.07 | 1 | Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar | Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan                                                                                    | 20 unit                               | 900.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PELABUHAN PENDERATAN IKAN (PPI) HAMADI</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                                 |                                                  |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                  |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                    |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                  | 3                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                |
| 3    | 25 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                       | -                                                                                  | -                                     | <b>500.000.000</b>  |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>           |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 | 6 | Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur              | Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 |   | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                      | 1 Unit                                | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 | 3 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana            | 4 Layanan                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PELABUHAN PENDERATAN IKAN (PPI) WAIYAI DEPAPRE</b>                         |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                 |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                           |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                       | -                                                                                  | -                                     | <b>500.000.000</b>  |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>           |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 | 6 | Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur              | Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 |   | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                  |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                    |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                  | 3                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                      | 1 Unit                                | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 | 3 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana            | 4 Layanan                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PELABUHAN Pendaratan Ikan (PPI) FANDOI</b>                                 |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                 |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                           |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                       | -                                                                                  | -                                     | 500.000.000         |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>           |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.01 | 6 | Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur              | Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 |   | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 | 2 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia                      | 1 Unit                                | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 3 | 1.06 | 3 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana            | 4 Layanan                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PEMBINAAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP) BIAK</b>              |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                 |                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                  |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                    |                                                           |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                             | Sumber Dana                                               |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                        | 4                                     | 5                      | 6                                                  | 7                                                         |
| 3    | 25 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                                           |
| 3    | 25 | 6 |      |   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN<br>PEMASARAN HASIL<br>PERIKANAN                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                        | -                                     | 150.000.000            |                                                    |                                                           |
| 3    | 25 | 6 | 1.01 |   | Penerbitan Izin Usaha<br>Pemasaran dan Pengolahan<br>Hasil Perikanan Lintas Daerah<br>Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)<br>Daerah Provinsi                    |                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                                           |
| 3    | 25 | 6 | 1.01 | 4 | Penyediaan Data dan Informasi<br>Usaha Pemasaran dan<br>Pengolahan Hasil Perikanan<br>Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi      | Jumlah Data dan Informasi<br>Usaha Subsektor<br>Pengolahan Ikan, Subsektor<br>Pemasaran Ikan, dan<br>Usaha Jasa Pasca Panen<br>Penangkapan Ikan<br>berdasarkan skala usaha<br>dan risiko | 1 Dokumen                             | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 6 |      |   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN<br>PEMASARAN HASIL<br>PERIKANAN                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                        | -                                     | 200.000.000            |                                                    |                                                           |
| 3    | 25 | 6 | 3.05 |   | Pengujian mutu dan keamanan<br>hasil kelautan dan perikanan<br>untuk skala usaha menengah<br>dan skala usaha besar dengan<br>penanaman modal dalam negeri |                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                                           |
| 3    | 25 | 6 | 3.05 | 1 | Pengujian mutu dan keamanan<br>hasil kelautan dan perikanan<br>untuk skala usaha menengah dan<br>besar dengan penanaman modal<br>dalam negeri             | Jumlah sampel yang diuji<br>mutu dan keamanannya                                                                                                                                         | 5 Sampel                              | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | UPTD PEMBINAAN DAN<br>PENERAPAN MUTU HASIL<br>PERIKANAN (PPMHP)<br>JAYAPURA                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                                           |
| 3    |    |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>PILIHAN                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                                           |
| 3    | 25 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                                           |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                  |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                |
| 3    | 25 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                              | -                                                                                                                                                                   | -                                     | <b>200.000.000</b>  |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 1.01 |   | <b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                    |                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 1.01 | 4 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi             | Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 25 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                              | -                                                                                                                                                                   | -                                     | <b>150.000.000</b>  |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 3.05 |   | <b>Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri</b> |                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 6 | 3.05 | 1 | Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri                    | Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya                                                                                                                       | 10 Sampel                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN PERIKANAN AIR TAWAR (PPPAT) BERAP</b>                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                        | -                                                                                                                                                                   | -                                     | <b>364.069.070</b>  |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 4 | 1.01 |   | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang</b>                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                 |                                                  |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                  |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                       |                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                     | 3                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                |
|      |    |   |      |   | <b>Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                                            |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 4 | 1.01 | 3 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                            | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | 1 Dokumen                             | 364.069.070         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN PERIKANAN AIR TAWAR (PPPAT) BOSNIK BIAK</b>                                                       |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                    |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                              |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                         | -                                                                                                                         | -                                     | 400.000.000         |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 4 | 1.01 |   | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 25 | 4 | 1.01 | 3 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan                                                            | Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko | 1 Dokumen                             | 400.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN</b>                                                                                                |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                    |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 27 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                                                                           |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |
| 3    | 27 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                           | -                                                                                                                         | -                                     | 1.900.000.000       |                                                 |                                                  |
| 3    | 27 | 2 | 1.01 |   | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>                                                                                          |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                  |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                         |                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                     | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                               |
| 3    | 27 | 2 | 1.01 | 1 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                                                           | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian | 1 Laporan                             | 350.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 2 | 1.01 | 3 | Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan                                                                                         | Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan                               | 1 laporan                             | 350.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 |   | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>                                                                          |                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 6 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                                               | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan                                                | 25000 Anakan                          | 600.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 2 | 1.05 |   | <b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b> |                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 | 1.05 | 4 | Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak                                                        | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi                  | 1 laporan                             | 600.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                           |                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                                                               |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                         | 3                                                                                                               | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                                                                         |
|      |    |   |      |    |                                                                                                           |                                                                                                                 |                                       |                        | Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              |                                                                           |
| 3    | 27 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br/>PENGEMBANGAN<br/>PRASARANA PERTANIAN</b>                                    | -                                                                                                               | -                                     | <b>1.479.572.945</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 |    | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>                                                                       |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 10 | Pembangunan, Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Rutin Gedung<br>UPTD Pertanian serta Sarana<br>Pendukungnya | Jumlah Gedung UPTD<br>Pertanian serta Sarana<br>Pendukungnya yang<br>Dibangun, Dipelihara dan<br>Direhabilitasi | 4 Unit                                | 279.572.945            | Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                      | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 13 | Pengendalian dan Pemanfaatan<br>Kawasan Pertanian                                                         | Luas kawasan pertanian<br>yang dimanfaatkan                                                                     | 100 Ha                                | 500.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 20 | Pengendalian dan Pemanfaatan<br>Prasarana Pengolahan Hasil<br>Perkebunan                                  | Jumlah prasarana<br>pengolahan hasil<br>perkebunan yang<br>dikendalikan dan<br>dimanfaatkan                     | 5 Unit                                | 350.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                     | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 3 | 1.01 | 26 | Pengendalian dan Pemanfaatan<br>Prasarana Pengolahan Hasil<br>Pernakan                                    | Jumlah prasarana<br>pengolahan hasil<br>peternakan yang<br>dikendalikan dan<br>dimanfaatkan                     | 5 Unit                                | 350.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                     | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN<br/>KESEHATAN HEWAN DAN<br/>KESEHATAN MASYARAKAT<br/>VETERINER</b>                | -                                                                                                               | -                                     | <b>700.000.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |
| 3    | 27 | 4 | 1.01 |    | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan,<br/>Penutupan dan Pembukaan</b>                                            |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                              | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                         |                                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Dana                                                               |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                         |
|      |    |   |      |   | <b>Daerah Wabah Penyakit Hewan<br/>Menular Lintas Daerah<br/>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)<br/>Daerah Provinsi</b>      |                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 3    | 27 | 4 | 1.01 | 3 | Penanggulangan Daerah<br>Terdampak Wabah Penyakit<br>Hewan Menular                                                      | Jumlah Daerah Terdampak<br>Wabah yang Terkendali                                                           | 1 Laporan                             | 350.000.000            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa        | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 4 | 1.03 |   | <b>Penerapan Persyaratan Teknis<br/>Sertifikasi Zona/Kompartemen<br/>Bebas Penyakit dan Unit Usaha<br/>Produk Hewan</b> |                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 3    | 27 | 4 | 1.03 | 5 | Pembinaan Penerapan<br>persyaratan higiene sanitasi pada<br>unit usaha produk hewan                                     | Jumlah unit usaha produk<br>hewan yang telah dibina<br>untuk penerapan<br>persyaratan higiene sanitasi     | 5 Unit Usaha                          | 350.000.000            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN<br/>DAN PENANGGULANGAN<br/>BENCANA PERTANIAN</b>                                                | -                                                                                                          | -                                     | 350.000.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 3    | 27 | 5 | 1.01 |   | <b>Pengendalian dan<br/>Penanggulangan Bencana<br/>Pertanian Provinsi</b>                                               |                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
| 3    | 27 | 5 | 1.01 | 2 | Penanganan Dampak Perubahan<br>Iklim (DPI) Tanaman Pangan,<br>Hortikultura, dan Perkebunan                              | Jumlah Area Terdampak<br>Perubahan Iklim Tanaman<br>Pangan, Hortikultura, dan<br>Perkebunan yang Ditangani | 100 Ha                                | 350.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|------|----|---|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                           |                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                         | 3                                                                | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                               |
| 3    | 27 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                  | -                                                                | -                                     | <b>350.000.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 6 | 1.01 |    | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                  |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 6 | 1.01 | 5  | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                       | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi              | 1 Laporan                             | 350.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 7 |      |    | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                       | -                                                                | -                                     | <b>500.000.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 7 | 1.02 |    | <b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>                                        |                                                                  |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 7 | 1.02 | 2  | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani                                            | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan | 3 Kelompok                            | 500.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | <b>UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PERKEBUNAN</b>                                          |                                                                  |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                        |                                                                  |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>                                               |                                                                  |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                               | -                                                                | -                                     | <b>2.110.202.055</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 |    | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>                            |                                                                  |                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 10 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek                                  | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek            | 5000 Setek                            | 1.450.000.000        | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT    |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 11 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji                                   | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji             | 5500 Gram                             | 660.202.055          | -                                                                                                                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |



| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                               |
|      |    |   |      |    | UPTD BALAI DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN                                           |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    |    |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 |      |    | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                          | -                                                                                                                                                                                                                              | -                                     | 400.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 |    | Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                       |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 | 2 | 1.02 | 20 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan                                        | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 1 Laporan                             | 400.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    |    |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 |   |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 | 5 |      |    | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                     | -                                                                                                                                                                                                                              | -                                     | 850.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 | 5 | 1.01 |    | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi                                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 27 | 5 | 1.01 | 1  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                                                                                        | 20 Ha                                 | 850.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                              | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                              |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                           |                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                         | 3                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                            |
|      |    |   |      |   | UPTD BALAI PEMBIBITAN TERNAK                                                                                                              |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                               |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                      |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 2 |      |   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                                                      | -                                                                                 | -                                     | 3.800.000.000       |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 2 | 1.05 |   | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi          |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 2 | 1.05 | 5 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan                                                                       | Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar                | 1 Dokumen                             | 3.800.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | UPTD LABORATORIUM VETERINER DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT                                                                                |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                               |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                      |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 4 |      |   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                   | -                                                                                 | -                                     | 2.721.258.000       |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 4 | 1.02 |   | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi                                                        |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 27 | 4 | 1.02 | 4 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | 1 Laporan                             | 471.258.000         | Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Entrop         | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 27 | 4 | 1.03 |   | Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen                                                                                 |                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                             | 3                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                                                  |
|      |    |   |      |   |                                                                               |                                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                            |
|      |    |   |      |   | <b>Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>                             |                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 3    | 27 | 4 | 1.03 | 3 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner     | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner                                      | 1 Dokumen                             | 2.250.000.000       | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                   |                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>  |                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2    | 11 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                            |                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2    | 11 | 2 |      |   | <b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>                                   | -                                                                                                                     | -                                     | 500.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2    | 11 | 2 | 1.01 |   | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b> |                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2    | 11 | 2 | 1.01 | 4 | Penyusunan RPPLH Provinsi                                                     | jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |
| 2    | 11 | 2 | 1.01 | 5 | Penetapan RPPLH Provinsi                                                      | Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan                                                                                | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |
| 2    | 11 | 2 | 1.02 |   | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>      |                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2    | 11 | 2 | 1.02 | 2 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                    | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun                                                                 | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                  |                                                        |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                           | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                | 7                                                      |
| 2    | 11 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                              | -                                                                                                                                           | -                                     | <b>850.000.000</b>  |                                                                                                  |                                                        |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 |    | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                  |                                                        |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 | 1  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                        | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 | 2  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan                           | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 | 11 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                                           | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK                                                                                  | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 3 | 1.02 |    | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>                                                                    |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                  |                                                        |
| 2    | 11 | 3 | 1.02 | 1  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                           | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 1 Laporan                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 3 | 1.02 | 3  | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                              | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                                                  | 5 Titik                               | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                               | -                                                                                                                                           | -                                     | <b>550.000.000</b>  |                                                                                                  |                                                        |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>                                                                                       |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                  |                                                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 1 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                             | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Ha                                  | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 6 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Orang                               | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Unit                                | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | 150.000.000         |                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 5 | 1.01 |   | <b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 5 | 1.01 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN</b>                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                     | 200.000.000         |                                                 |                                                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                        |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                              | 7                                                      |
|      |    |   |      |   | <b>PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 6 | 1.01 |   | <b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 6 | 1.01 | 1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                 | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan                                                                                         | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 6 | 1.01 | 5 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                        | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                | 5 Orang                               | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                                  | -                                                                                                                                                                                                          | -                                     | <b>200.000.000</b>  |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 6 | 3.02 |   | <b>Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>                         |                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 6 | 3.02 | 1 | Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan , persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>                                            | -                                                                                                                                                                                                          | -                                     | <b>150.000.000</b>  |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 7 | 1.01 |   | <b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                     |                                                        |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                              | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                   | 7                                                      |
|      |    |   |      |   | <b>dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                     |                                                        |
| 2    | 11 | 7 | 1.01 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 8 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                     | 300.000.000         |                                                                                                                                                     |                                                        |
| 2    | 11 | 8 | 1.01 |   | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                                                                                     |                                                        |
| 2    | 11 | 8 | 1.01 | 3 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                 | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat                                                                                                                                                             | 500 Orang                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 8 | 1.01 | 5 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH                                                                                             | 3 Lembaga                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 8 | 1.01 | 7 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                     | Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan                                                                                                                                     | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                         | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 9 |      |   | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                     | -                                     | 150.000.000         |                                                                                                                                                     |                                                        |



| Kode |    |    |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                 |                                                        |
|------|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                               | 7                                                      |
| 2    | 11 | 9  | 1.01 |    | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                        |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 9  | 1.01 | 1  | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                      | 3 Entitas                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 10 |      |    | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                         | -                                                                                                                                           | -                                     | 50.000.000          |                                                                                                                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 10 | 1.01 |    | <b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>                             |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 10 | 1.01 | 10 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi                                                                               | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 1 Sanksi                              | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 11 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                       | -                                                                                                                                           | -                                     | 150.000.000         |                                                                                                                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 |    | <b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>                                                                                                |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                 |                                                        |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 | 5  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan   | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                     | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 | 9  | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi                                                                | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan                                        | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 3    |    |    |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                 |                                                        |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                             | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                           |                                           |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                        |                                                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                    | Sumber Dana                               |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                      | 3                                                                                                                                                           | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                         | 7                                         |
| 3    | 28 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG KEHUTANAN</b>                                                        |                                                                                                                                                             |                                       |                        |                                                                                                                                                           |                                           |
| 3    | 28 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PERENCANAAN<br/>HUTAN</b>                                                                   | -                                                                                                                                                           | -                                     | <b>200.000.000</b>     |                                                                                                                                                           |                                           |
| 3    | 28 | 2 | 3.05 |    | <b>Penyusunan Rencana<br/>Kehutanan Tingkat Provinsi</b>                                               |                                                                                                                                                             |                                       |                        |                                                                                                                                                           |                                           |
| 3    | 28 | 2 | 3.05 | 1  | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penyusunan Rencana Kehutanan<br>Tingkat Provinsi                        | Jumlah dokumen rencana<br>Kehutanan Tingkat Provinsi<br>yang disusun                                                                                        | 1 Dokumen                             | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                        | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>HUTAN</b>                                                                   | -                                                                                                                                                           | -                                     | <b>3.051.153.000</b>   |                                                                                                                                                           |                                           |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Rencana Tata<br/>Hutan Kesatuan Pengelolaan<br/>Hutan (KPH) Kewenangan<br/>Provinsi</b> |                                                                                                                                                             |                                       |                        |                                                                                                                                                           |                                           |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 4  | Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Usulan Perubahan Fungsi dan<br>Peruntukan Hutan                         | Jumlah Dokumen Koordinasi<br>dan Sinkronisasi Usulan<br>Perubahan Peruntukkan dan<br>Fungsi Kawasan Hutan<br>untuk Wilayah Provinsi                         | 1 Dokumen                             | 100.000.000            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 7  | Fasilitasi kegiatan pembangunan<br>dan pengembangan KPH                                                | Jumlah kegiatan/layanan<br>yang difasilitasi oleh KPH                                                                                                       | 1 Dokumen                             | 200.000.000            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.03 |    | <b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan<br/>Hutan Produksi dan Hutan<br/>Lindung</b>                           |                                                                                                                                                             |                                       |                        |                                                                                                                                                           |                                           |
| 3    | 28 | 3 | 1.03 | 1  | Penyediaan Data dan Informasi<br>Wilayah Usaha di Kawasan Hutan<br>Produksi                            | Jumlah Data dan Informasi<br>Terkait Luas Perizinan<br>Berusaha Pemanfaatan<br>Hutan di Kawasan Hutan<br>Produksi dalam 1 (Satu)<br>Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen                             | 100.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.03 | 2  | Penyediaan Data dan Informasi<br>Wilayah Usaha di Kawasan Hutan<br>Lindung                             | Jumlah Dokumen Data dan<br>Informasi Mengenai<br>Pemanfaatan Hutan di<br>Kawasan HL Provinsi<br>Secara Berkala                                              | 1 Dokumen                             | 50.000.000             | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                       | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.03 | 10 | Penilaian Rencana Kerja Tahunan<br>Pemanfaatan Hutan Produksi                                          | Jumlah Dokumen Rencana<br>Kerja Tahunan Pemanfaatan                                                                                                         | 1 Dokumen                             | 150.000.000            | Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR) |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                 |                                       |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                          | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                               | 7                                     |
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                                   | Hutan Produksi yang Disahkan                                                                                        |                                       |                     | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                  |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.03 | 11 | Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani | Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)      | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.03 | 13 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi | 1 Dokumen                             | 251.153.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                       |                     |                                                                                                                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 1  | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)                                              | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                             | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                                        | 40 Ha                                 | 200.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 4  | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                                                                                                                   | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                                                             | 10 Ha                                 | 200.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 9  | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan                                                                                                                                                                                       | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi                                                        | 5 Ha                                  | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                                                                                                                                  | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                                            | 2 Ha                                  | 100.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                            |                                       |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                     | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                          | 7                                     |
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                       |                     | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                             |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |   | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                                               |                                                                                                                     |                                       |                     |                                                                                                                                            |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                                             | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                          | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                            | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun                                              | 1 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 7 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan                                                                                                    | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                                                                  | 100 Ha                                | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.06 |   | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>                                                                                             |                                                                                                                     |                                       |                     |                                                                                                                                            |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.06 | 5 | Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                               | Jumlah Unit manajemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH        | 5 Unit Manajemen                      | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.06 | 7 | Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi     | Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani                             | 2 Unit Manajemen                      | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.06 | 8 | Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan | 5 Unit Manajemen                      | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.07 |   | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>                                                              |                                                                                                                     |                                       |                     |                                                                                                                                            |                                       |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                               |                                       |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                        | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                             | 7                                     |
| 3    | 28 | 3 | 1.07 | 4 | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                                                | Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi    | 1 Laporan                             | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.07 | 5 | Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi                                                            | Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindakanjutrnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif | 2 Unit Managemen                      | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |   | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                                                       | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                                                                             | 25000 Batang                          | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                                                             | -                                                                                                                                           | -                                     | 100.000.000         |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 3.10 |   | <b>Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain</b>                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 3.10 | 1 | Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan                                                                          | Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan                 | 1 Unit                                | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 3.10 | 2 | Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                                                                          | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain                                                          | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>                                                                                           | -                                                                                                                                           | -                                     | 250.000.000         |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 4 | 1.02 |   | <b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In</b> |                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                               |                                       |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                        | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                                        | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                             | 7                                     |
|      |    |   |      |   | <b>Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                                             |                                                                                                                                          |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 4 | 1.02 | 1 | Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES     | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES | 1 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 4 | 1.03 |   | <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b> |                                                                                                                                          |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 4 | 1.03 | 5 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi        | Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan                                                                                             | 50 Orang                              | 50.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                     | -                                                                                                                                        | -                                     | 400.000.000         |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                        |                                                                                                                                          |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 1.01 | 2 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                                              | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan                                            | 10 Kelompok                           | 200.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 | 1.01 | 4 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan                                                                 | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                                                                           | 15 Orang                              | 100.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 | 1.01 | 7 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan                                                               | Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya                                                                                  | 15 Orang                              | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN</b>                                                    | -                                                                                                                                        | -                                     | 300.000.000         |                                                                                                                                               |                                       |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                  | 7                                                            |
|      |    |   |      |   | <b>MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 4 | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                | Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial                                | 50 Ha                                 | 100.000.000            | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                                                                                                                                                       | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                          | 3 Unit                                | 200.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 28 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                  | -                                     | 200.000.000            |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                                                                                                             |                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 50 Orang                              | 200.000.000            | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 28 | 8 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT</b>                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                  | -                                     | 250.000.000            |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
| 3    | 28 | 8 | 3.01 |   | <b>Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                               |                                       |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                        | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                             | 7                                     |
| 3    | 28 | 8 | 3.01 | 1 | Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]     |
| 3    | 28 | 8 | 3.03 |   | <b>Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 8 | 3.03 | 1 | Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan                                                                                                                 | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 8 | 3.04 |   | <b>Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 8 | 3.04 | 4 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan                                                                                                                                                                             | 2 Lembaga MHA                         | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                               | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
|      |    |   |      |   | <b>CABANG DINAS KEHUTANAN JAYAPURA</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                     | 600.000.000         |                                                                                                                                               |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |   | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                                                                                                                                               |                                       |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                              | 7                                                            |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 4 Ha                                  | 250.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                               | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000          | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                      |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 5000 Batang                           | 200.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                          | -                                     | 50.000.000          |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 1 Unit                                | 50.000.000          | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                          | -                                     | 150.000.000         |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS         | 25 Orang                              | 150.000.000         | Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                             |                                       |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                     |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                   | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                           | 7                                     |
|      |    |   |      |    | <b>CABANG DINAS KEHUTANAN SARMI</b>                                                                 |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                  |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    | 28 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                         |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                    | -                                                                                          | -                                     | <b>600.000.000</b>  |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                        |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                               | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 4 Ha                                  | 200.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                    | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                           |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                         | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa           | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                     |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                              | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 10000 Batang                          | 250.000.000         | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa           | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | -                                                                                          | -                                     | <b>100.000.000</b>  |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>    |                                                                                            |                                       |                     |                                             |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 1 Unit                                | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa           | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                               | -                                                                                          | -                                     | <b>100.000.000</b>  |                                             |                                       |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                              |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                       | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                            | 7                                                            |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS         | 50 Orang                              | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Sarmi, Semua Kel/Desa            | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | <b>CABANG DINAS KEHUTANAN KEEROM</b>                                                                                           |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                          | -                                     | <b>599.000.000</b>  |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                   |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 4 Ha                                  | 250.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa            | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                               | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | -                   | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                                            |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                      |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 149.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 8000 Batang                           | 200.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa            | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                          | -                                     | <b>100.000.000</b>  |                                              |                                                              |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                      |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                               | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                     | 5                      | 6                                                    | 7                                                            |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 1 Unit                                | 100.000.000            | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa                    | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                          | -                                     | <b>200.000.000</b>     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS         | 100 Orang                             | 200.000.000            | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa                    | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | <b>CABANG DINAS KEHUTANAN MAMBERAMO RAYA</b>                                                                                   |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                          | -                                     | <b>370.000.000</b>     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                   |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 3 Ha                                  | 150.000.000            | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                               | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000             | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                      |                                                                                            |                                       |                        |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 70.000.000             | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                      |                                                              |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                               | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                              | 3                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                                    | 7                                                            |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |   | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                    | 4000 Batang                           | 100.000.000         | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                  | -                                     | <b>80.000.000</b>   |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                          | 1 Unit                                | 80.000.000          | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                  | -                                     | <b>50.000.000</b>   |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 25 Orang                              | 50.000.000          | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>KPHP Unit XVII Waropen</b>                                                                                                  |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                  | -                                     | <b>585.000.000</b>  |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                                     |                                                                                    |                                       |                     |                                                      |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 2 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                              | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)                    | 1 Unit                                | 50.000.000          | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                       |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                 |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                               | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                     |
|      |    |   |      |    |                                                                                                                 | yang Telah Dilakukan Pembagian Blok                                                        |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                              | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                              | 3 Unit                                | 35.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 |    | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 | 1  | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                    |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 3 Ha                                  | 150.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000          | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                 |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                          | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 5000 Batang                           | 150.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>             | -                                                                                          | -                                     | 100.000.000         |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |



| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                               |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                        | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                              | 3                                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                                             | 7                                                            |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                          | 1 Unit                                | 100.000.000            | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                  | -                                     | <b>100.000.000</b>     |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 50 Orang                              | 100.000.000            | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | <b>KPHP UNIT XXI LINTAS SARMI MAMBERAMO RAYA</b>                                                                               |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                  | -                                     | <b>250.000.000</b>     |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                                     |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                             | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                      | 1 Unit                                | 20.000.000             | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                   |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                       | 2 Ha                                  | 100.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                               | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                           | 1 Ha                                  | 50.000.000             | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                      |                                                                                    |                                       |                        |                                               |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat                                                     | 1 Dokumen                             | 30.000.000             | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                             |                                                              |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                              | 3                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                           | 7                                                            |
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                        |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |   | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                    | 1500 Batang                           | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                  | -                                     | <b>49.000.000</b>   |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                          | 1 Unit                                | 49.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                  | -                                     | <b>150.000.000</b>  |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 50 Orang                              | 150.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>KPHP UNIT XXIII SARMI</b>                                                                                                   |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                  | -                                     | <b>550.000.000</b>  |                                             |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                                     |                                                                                    |                                       |                     |                                             |                                                              |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                       |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                 |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                               | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                     |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                              | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                              | 2 Unit                                | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 |    | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 | 1  | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                    |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 2 Ha                                  | 250.000.000         | Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | -                   | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                 |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                          | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 5000 Batang                           | 150.000.000         | Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>             | -                                                                                          | -                                     | 100.000.000         |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                |                                                                                            |                                       |                     |                                                 |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                            | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 2 Unit                                | 100.000.000         | Kab. Sarmi, Bonggo, Semua Kel/Desa              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                          |                                                                        |
|------|----|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                   | Sumber Dana                                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                              | 3                                                                                                               | 4                                     | 5                      | 6                                                        | 7                                                                      |
| 3    | 28 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>DAERAH ALIRAN SUNGAI<br/>(DAS)</b>                                                                                  | -                                                                                                               | -                                     | <b>100.000.000</b>     |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS<br/>Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br/>dan dalam Daerah<br/>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)<br/>Daerah Provinsi</b> |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                                      | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Kegiatan<br>Pengelolaan DAS                     | 25 Orang                              | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa       | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>KPHP UNIT XIX KEPULAUAN<br/>YAPEN</b>                                                                                                       |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>PILIHAN</b>                                                                                                         |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                                |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>HUTAN</b>                                                                                                           | -                                                                                                               | -                                     | <b>900.000.000</b>     |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Rencana Tata<br/>Hutan Kesatuan Pengelolaan<br/>Hutan (KPH) Kewenangan<br/>Provinsi</b>                                         |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 2 | Pembagian Blok/Petak<br>Pengelolaan Hutan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                                        | Jumlah Unit Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan<br>Produksi/Lidung (KPHP/L)<br>yang Telah Dilakukan<br>Pembagian Blok | 1 Unit                                | 50.000.000             | Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR)                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana<br>Operasionalisasi KPH                                                                                          | Jumlah sarana prasarana<br>operasionalisasi KPH yang<br>terpelihara                                             | 5 Unit                                | 100.000.000            | Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR)                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 |   | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan<br/>Pengelolaan Hutan kecuali<br/>pada Kesatuan Pengelolaan<br/>Hutan Konservasi (KPHK)</b>                    |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 | 1 | Penyusunan Rencana<br>Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Kesatuan<br>Pengelolaan Hutan yang<br>Tersusun                            | 1 Dokumen                             | 100.000.000            | Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-<br>DANA REBOISASI (DR)                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |   | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di<br/>Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                               |                                                                                                                 |                                       |                        |                                                          |                                                                        |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                       |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                                     | 7                                                            |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 3 Ha                                  | 300.000.000         | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                               | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000          | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                      |                                                                                            |                                       |                     |                                                       |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                            |                                       |                     |                                                       |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 6000 Batang                           | 200.000.000         | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                          | -                                     | 150.000.000         |                                                       |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                            |                                       |                     |                                                       |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 2 Unit                                | 150.000.000         | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                          | -                                     | 50.000.000          |                                                       |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                                       |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS         | 25 Orang                              | 50.000.000          | Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | <b>KPHL UNIT XX BIAK</b>                                                                                                       |                                                                                            |                                       |                     |                                                       |                                                              |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                                       |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                               | 3                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                                 | 7                                     |
| 3    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                              |                                                                                                     |                                       |                     |                                                   |                                       |
| 3    | 28 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                     |                                                                                                     |                                       |                     |                                                   |                                       |
| 3    | 28 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                | -                                                                                                   | -                                     | <b>900.000.000</b>  |                                                   |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                      |                                                                                                     |                                       |                     |                                                   |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 2  | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                               | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit                                | -                   | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6  | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                              | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                                       | 5 Unit                                | 100.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 |    | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> |                                                                                                     |                                       |                     |                                                   |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 | 1  | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                         | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                    |                                                                                                     |                                       |                     |                                                   |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | 6 Ha                                  | 350.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                            | 1 Ha                                  | -                   | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       |                                                                                                     |                                       |                     |                                                   |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan          | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                                                              |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                              | 3                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                                 | 7                                                            |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |   | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                    | 5000 Batang                           | 200.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                  | -                                     | 150.000.000         |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |   | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5 | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                          | 3 Unit                                | 150.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                  | -                                     | 50.000.000          |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS | 50 Orang                              | 50.000.000          | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>KPHP UNIT XXVIII KOTA JAYAPURA</b>                                                                                          |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                  | -                                     | 399.000.000         |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                                     |                                                                                    |                                       |                     |                                                   |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                             | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                      | 2 Unit                                | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |



| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                       |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                 |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                           |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                               | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                              | 7                                     |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 |    | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 | 1  | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                | 1 Dokumen                             | 24.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                    |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2  | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                           | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                               | 3 Ha                                  | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                       |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                     | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 75.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                 |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                       |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                          | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 1500 Batang                           | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>             | -                                                                                          | -                                     | 50.000.000          |                                                |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                |                                                                                            |                                       |                     |                                                |                                       |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                            | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 1 Unit                                | 50.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR) |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                           | -                                                                                          | -                                     | 100.000.000         |                                                |                                       |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                              |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                |                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                              | 3                                                                                                   | 4                                     | 5                   | 6                                              | 7                                                            |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                  | 50 Orang                              | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>KPHP UNIT XXIX KEEROM</b>                                                                                                   |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                             |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                                                                                    |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                                                                               | -                                                                                                   | -                                     | <b>584.000.000</b>  |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</b>                                     |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 2 | Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                              | Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok | 1 Unit                                | 50.000.000          | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.01 | 6 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH                                                                             | Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara                                       | 5 Unit                                | 84.000.000          | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 |   | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>                |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.02 | 1 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun                         | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 |   | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>                                                                   |                                                                                                     |                                       |                     |                                                |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 2 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                                                          | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                                        | 4 Ha                                  | 150.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa              | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                              |                                                              |
|------|----|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                |                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                       | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                              | 3                                                                                          | 4                                     | 5                   | 6                                            | 7                                                            |
| 3    | 28 | 3 | 1.04 | 11 | Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2                                                               | Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara                                                   | 1 Ha                                  | 50.000.000          | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 |    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>                                                      |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.05 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan                                                                    | Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa            | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                                                                                |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7  | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan                                                                         | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan                            | 5000 Batang                           | 100.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa            | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 5 |      |    | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                            | -                                                                                          | -                                     | 100.000.000         |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 |    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                               |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 5 | 3.01 | 5  | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                                           | jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya                                                  | 2 Unit                                | 100.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa            | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 6 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>                                                                          | -                                                                                          | -                                     | 200.000.000         |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 |    | <b>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 3    | 28 | 6 | 1.01 | 4  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS         | 100 Orang                             | 200.000.000         | Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa            | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |    | <b>UPTD KEBUN RAYA KOYA KOSO</b>                                                                                               |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |
| 2    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK</b>                                                                                    |                                                                                            |                                       |                     |                                              |                                                              |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                              |
|------|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                      |                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                    | 3                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                            |
|      |    |   |      |   | <b>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                              |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 11 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                   |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 11 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>            | -                                                                 | -                                     | 996.000.000         |                                                 |                                                              |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>                    |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 3 | Pengelolaan Kebun Raya                                               | Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi         | 150 Ha                                | 600.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Koya Koso               | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN       |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 7 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati               | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola   | 2 Unit                                | 396.000.000         | Kota Jayapura, Abepura, Koya Koso               | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
|      |    |   |      |   | <b>BPTH PAPUA</b>                                                    |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                   |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 28 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>                          |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 28 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>                                     | -                                                                 | -                                     | 900.000.000         |                                                 |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 |   | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>                                      |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 2 | Sertifikasi Sumber Benih                                             | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                   | 2 Sertifikat                          | 250.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 4 | Sertifikasi Mutu Bibit                                               | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan                     | 2 Sertifikat                          | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 5 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                            | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar | 1 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 6 | Pembangunan Sumber Benih                                             | Luas Sumber Benih yang Dibangun                                   | 2 Ha                                  | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 28 | 3 | 1.09 | 7 | Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan               | Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan   | 25000 Batang                          | 100.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                        |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD TAMAN BURUNG DAN TAMAN ANGGREK</b>                           |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |
| 2    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK</b>                          |                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                              |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                |                                                        |
|------|----|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                              |                                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                         | Sumber Dana                                            |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                            | 3                                                                                           | 4                                     | 5                    | 6                                              | 7                                                      |
|      |    |   |      |    | <b>BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                                      |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    | 11 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 4 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                    | -                                                                                           | -                                     | <b>1.258.078.000</b> |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>                            |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 7  | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                             | 1 Unit                                | 750.000.000          | Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Ruar             | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 2    | 11 | 4 | 1.01 | 9  | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                              | Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi                         | 1 Unit                                | 508.078.000          | Kab. Biak Numfor, Biak Timur, Ruar             | DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)                  |
|      |    |   |      |    | <b>UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA</b>                     |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    |    |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    | 11 |   |      |    | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | -                                                                                           | -                                     | <b>1.000.000.000</b> |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 |    | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>             |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 | 4  | Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan           | Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | 1 Paket                               | 200.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                      |
| 2    | 11 | 3 | 1.01 | 15 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi                           | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                             | 1 Dokumen                             | 800.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
|      |    |   |      |    | <b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL,</b>                                  |                                                                                             |                                       |                      |                                                |                                                        |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                               | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                     |                                   |
|------|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                          |                                                                                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                              | Sumber Dana                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                        | 3                                                                                                                                                          | 4                                     | 5                      | 6                                   | 7                                 |
|      |    |   |      |   | PENANAMAN MODAL DAN PTSP                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 2    |    |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                    |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 2    | 18 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                               |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 2    | 18 | 3 |      |   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                          | -                                                                                                                                                          | -                                     | 1.714.882.500          |                                     |                                   |
| 2    | 18 | 3 | 1.01 |   | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                          |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 2    | 18 | 3 | 1.01 | 2 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                                                                             | 4 Dokumen                             | 1.714.882.500          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 2    | 18 | 4 |      |   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                        | -                                                                                                                                                          | -                                     | 1.500.000.000          |                                     |                                   |
| 2    | 18 | 4 | 1.02 |   | Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 2    | 18 | 4 | 1.02 | 6 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 100 Pelaku Usaha                      | 1.500.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 3    |    |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                              |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 3    | 29 |   |      |   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL                                                |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |
| 3    | 29 | 2 |      |   | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                                    | -                                                                                                                                                          | -                                     | 1.416.526.500          |                                     |                                   |
| 3    | 29 | 2 | 3.04 |   | Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada                          |                                                                                                                                                            |                                       |                        |                                     |                                   |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                         |                              |
|------|----|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                  | Sumber Dana                  |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                     | 4                                     | 5                   | 6                                                                                       | 7                            |
|      |    |   |      |   | <b>cekungan air tanah dalam daerah provinsi</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                         |                              |
| 3    | 29 | 2 | 3.04 | 1 | Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                                             | 1 Laporan                             | 1.155.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Arso, Semua Kel/Desa       | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 3    | 29 | 2 | 3.12 |   | <b>Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                         |                              |
| 3    | 29 | 2 | 3.12 | 1 | Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi                                                                                                                                                                                        | Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia                                                                               | 2 Dokumen                             | 261.526.500         | Kab. Jayapura, Sentani Barat, Semua Kel/Desa                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 3    | 29 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                     | -                                     | <b>361.352.000</b>  |                                                                                         |                              |
| 3    | 29 | 3 | 1.03 |   | <b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b> |                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                         |                              |
| 3    | 29 | 3 | 1.03 | 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | 2 Laporan                             | 215.000.000         | Kab. Jayapura, Sentani Barat, Semua Kel/Desa Kab. Keerom, Senggi, Semua Kel/Desa        | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 3    | 29 | 3 | 1.14 |   | <b>Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                       |                     |                                                                                         |                              |
| 3    | 29 | 3 | 1.14 | 2 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)                                                                     | 1 Laporan                             | 146.352.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sarmi, Sarmi Timur, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)        |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
|------|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                             | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                               |
| 3    | 29 | 4 |      |   | <b>PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI</b>                                                                                                                       | -                                                                                                             | -                                     | <b>1.026.352.000</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 29 | 4 | 3.12 |   | <b>Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua</b>                                                                    |                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 29 | 4 | 3.12 | 2 | Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua                                                                                        | Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua                    | 4 Laporan                             | 1.026.352.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                   | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                               |
| 3    | 29 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                                                                                                             | -                                                                                                             | -                                     | <b>16.712.604.900</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 29 | 6 | 1.06 |   | <b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b> |                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 29 | 6 | 1.06 | 6 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan                                                            | Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | 15 Unit                               | 16.712.604.900         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Yapen Utara, Yobi<br>Kab. Mamberamo Raya, Waropen Atas, Semua Kel/Desa | DTI-PAPUA-ENERGI LISTRIK                                        |
|      |    |   |      |   | <b>DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</b>                                                                                                               |                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                                       |                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 30 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                                                                                                            |                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 30 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>                                                                                                      | -                                                                                                             | -                                     | <b>150.000.000</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 30 | 2 | 3.05 |   | Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan                                                                                                                    |                                                                                                               |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| 3    | 30 | 2 | 3.05 | 1 | Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                                                                                      | Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran                                               | 1 Kegiatan                            | 150.000.000            | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                         |                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                       | 3                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                       | 7                                                               |
|      |    |   |      |   |                                                                                                                         | Perusahaan Yang Dilaksanakan                                                                                              |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                                | -                                                                                                                         | -                                     | 1.000.000.000       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 3 | 1.01 |   | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b> |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 3 | 1.01 | 1 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi                                       | 6 Unit                                | 1.000.000.000       | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Muara Tami, Semua Kel/Desa                                                                                                                 | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 30 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                                                | -                                                                                                                         | -                                     | -                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 3 | 3.01 |   | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b> |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 3 | 3.01 | 4 | Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi                                                   | Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan                                         | 0 Unit                                | -                   | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | -                                                               |
| 3    | 30 | 4 |      |   | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                              | -                                                                                                                         | -                                     | 550.000.000         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 4 | 1.01 |   | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>                       |                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |
| 3    | 30 | 4 | 1.01 | 1 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor              | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor | 2 Laporan                             | 150.000.000         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
|------|----|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Dana                                                                                                       |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                 |
| 3    | 30 | 4 | 1.02 |   | <b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b> |                                                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| 3    | 30 | 4 | 1.02 | 2 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                                                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan                             | 400.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                      | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 30 | 4 | 1.03 |   | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>                                             |                                                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| 3    | 30 | 4 | 1.03 | 3 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                                                 | 0 Laporan                             | -                   | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                                                                  |
| 3    | 30 | 4 |      |   | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                 | -                                     | 350.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |
| 3    | 30 | 4 | 3.01 |   | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                               |                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                         | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                             | 3                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                               |
| 3    | 30 | 4 | 3.01 | 3 | Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP                                                                                                     | Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi | 6 Unit                                | 350.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 30 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                                            | -                                                                                       | -                                     | 500.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 3    | 30 | 5 | 1.01 |   | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi |                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 3    | 30 | 5 | 1.01 | 1 | Pameran Dagang Internasional/Nasional                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                              | 5 Pelaku Usaha                        | 300.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                           | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |
| 3    | 30 | 5 | 1.01 | 2 | Pameran Dagang Lokal                                                                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal                  | 10 Pelaku Usaha                       | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                 | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 30 | 6 |      |   | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                                                        | -                                                                                       | -                                     | 530.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 3    | 30 | 6 | 1.01 |   | Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            |                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 3    | 30 | 6 | 1.01 | 1 | Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen                                                                                                                   | Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif                            | 1 BPSK                                | 200.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA                |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|------|----|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                 | Sumber Dana                                      |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                          | 3                                                                                               | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                      | 7                                                |
| 3    | 30 | 6 | 1.01 | 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen                                                                                                  | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani                                                        | 10 Pengaduan                          | 180.000.000         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 30 | 6 | 1.03 |   | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                |                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 3    | 30 | 6 | 1.03 | 3 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi | 1 Laporan                             | 150.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 30 | 7 |      |   | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                                                                                                | -                                                                                               | -                                     | 300.000.000         |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 3    | 30 | 7 | 1.03 |   | <b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                                                                                                              |                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 3    | 30 | 7 | 1.03 | 2 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                                                                     | Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                           | 1 Laporan                             | 300.000.000         | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                           | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |
| 3    | 31 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                                                                                                            |                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 3    | 31 | 2 |      |   | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                                                                                        | -                                                                                               | -                                     | 700.000.000         |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 3    | 31 | 2 | 1.01 |   | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>                                                                                           |                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
| 3    | 31 | 2 | 1.01 | 1 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                     | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                         | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA |

| Kode |    |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|------|----|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |    | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                      | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                               |
| 3    | 31 | 2 | 1.01 | 4  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                               | 1 Dokumen                             | 300.000.000         | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 31 | 2 | 1.01 | 5  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                        | 1 Dokumen                             | 250.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                        | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 31 | 2 |      |    | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                                                           | -                                                                                                                                      | -                                     | <b>700.000.000</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 3    | 31 | 2 | 3.01 |    | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>                                                              |                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 3    | 31 | 2 | 3.01 | 8  | Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP                                                        | Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan                                      | 4 Unit                                | 300.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
| 3    | 31 | 2 | 3.01 | 9  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PENDIDIKAN                      |
| 3    | 31 | 2 | 3.01 | 10 | Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan        | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |

| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
|------|----|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sumber Dana                                                     |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                                               |
|      |    |   |      |   |                                                                                                                                                                           | perindustrian Bagi OAP di Provinsi                                                                                                                                                             |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 31 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                              | -                                     | 200.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 31 | 4 | 1.01 |   | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>                             |                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 31 | 4 | 1.01 | 1 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                       | DANA OTONOMI KHUSUS 1,25%-PAPUA-PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD LABORATORIUM DA KALIBRASI</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 30 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 30 | 6 |      |   | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                              | -                                     | 800.000.000         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 30 | 6 | 1.02 |   | <b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 3    | 30 | 6 | 1.02 | 4 | Pengembangan Layanan Kalibrasi                                                                                                                                            | Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan                                                                                                                                                   | 50 Sertifikat                         | 400.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)                                           |



| Kode |    |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                            | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|------|----|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |      |   |                                                                                                       |                                                                        | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                                                                                            |
| 1    |    |   |      |   | 2                                                                                                     | 3                                                                      | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                                                                      |
| 3    | 30 | 6 | 1.02 | 5 | Pengembangan Layanan<br>Pengujian                                                                     | Jumlah Laporan/Sertifikat<br>Pengujian Mutu Barang<br>yang Diterbitkan | 50 laporan                            | 400.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1,25%-PAPUA-<br>PEMBERDAYAAN<br>EKONOMI<br>MASYARAKAT, DANA<br>BAGI HASIL (DBH) |
|      |    |   |      |   | <b>UPTD PENGUJIAN MUTU<br/>PRODUK INDUSTRI</b>                                                        |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 3    |    |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>PILIHAN</b>                                                                |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 3    | 30 |   |      |   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERDAGANGAN</b>                                                     |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 3    | 30 | 6 |      |   | <b>PROGRAM STANDARDISASI<br/>DAN PERLINDUNGAN<br/>KONSUMEN</b>                                        | -                                                                      | -                                     | 100.000.000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 3    | 30 | 6 | 1.02 |   | <b>Pelaksanaan Pengujian dan<br/>Sertifikasi Mutu Produk di<br/>Seluruh Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 3    | 30 | 6 | 1.02 | 6 | Pemantauan Mutu Produk                                                                                | Jumlah produk potensial<br>yang dipantau                               | 5 Produk                              | 100.000.000            | Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                          | SISA LEBIH<br>PERHITUNGAN<br>ANGGARAN TAHUN<br>SEBELUMNYA                                              |
|      |    |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                             |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 4    |    |   |      |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                                        |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| 4    | 1  |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                             |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
|      |    |   |      |   | <b>BIRO UMUM DAN<br/>ADMINISTRASI PIMPINAN</b>                                                        |                                                                        |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                    |                                         |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                            |                                                                                          | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                             | Sumber Dana                             |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                          | 3                                                                                        | 4                                     | 5                      | 6                                                  | 7                                       |
| 4    |   |   |      |   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                     |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    | 1 |   |      |   | SEKRETARIAT DAERAH                                                         |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
|      |   |   |      |   | BIRO TATA PEMERINTAHAN<br>OTONOMI KHUSUS DAN<br>KESEJAHTERAAN RAKYAT       |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    |   |   |      |   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN<br>PEMERINTAHAN                                     |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    | 1 |   |      |   | SEKRETARIAT DAERAH                                                         |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    | 1 | 2 |      |   | PROGRAM PENATAAN<br>ORGANISASI                                             | -                                                                                        | -                                     | 200.000.000            |                                                    |                                         |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 |   | Fasilitasi Reformasi Birokrasi<br>dan Akuntabilitas Kinerja                |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 4 | Pengelolaan Tatalaksana<br>Pemerintahan                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Tata Laksana<br>Pemerintahan                         | 1 Dokumen                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 5 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan<br>Publik                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Peningkatan<br>Pelayanan Publik                       | 10 Dokumen                            | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 4    | 1 | 3 |      |   | PROGRAM PEMERINTAHAN<br>DAN OTONOMI DAERAH                                 | -                                                                                        | -                                     | 1.200.000.000          |                                                    |                                         |
| 4    | 1 | 3 | 1.01 |   | Pelaksanaan Tugas<br>Pemerintahan                                          |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    | 1 | 3 | 1.01 | 1 | Pengelolaan Administrasi<br>Kebijakan Pemerintahan                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Administrasi<br>Kebijakan Pemerintahan               | 1 Dokumen                             | 100.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.01 | 2 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Pemerintahan Umum                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Pemerintahan Umum                      | 1 Dokumen                             | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.01 | 3 | Fasilitasi Penataan Wilayah                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penataan Wilayah                                      | 1 Dokumen                             | 150.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.02 |   | Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 |                                                                                          |                                       |                        |                                                    |                                         |
| 4    | 1 | 3 | 1.02 | 1 | Fasilitasi Administrasi Kepala<br>Daerah dan DPRD                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Administrasi<br>Kepala Daerah dan DPRD                | 10 Dokumen                            | 200.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.02 | 2 | Pengembangan Otonomi dan<br>Penataan Urusan                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengembangan Otonomi<br>dan Penataan Urusan yang<br>Dilaksanakan | 1 Dokumen                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                   |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                       |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                              | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                 |
| 4    | 1 | 3 | 1.02 | 3 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                                 | 10 Laporan                            | 500.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.02 | 4 | Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                              | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah   | 9 Perangkat Daerah                    | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.02 | 5 | Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                            | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 40 Perangkat Daerah                   | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.03 |   | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                                                |                                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 3 | 1.03 | 1 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah                                                                             | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi                                                                           | 1 Dokumen                             | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.03 | 2 | Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta                                                                           | Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi                                                                         | 1 Dokumen                             | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 3 | 1.03 | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                    | Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi                                                                                              | 1 Laporan                             | -                    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           |
| 4    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                                                                | -                                                                                                                              | -                                     | <b>2.850.000.000</b> |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 4 | 1.01 |   | <b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>                                                                       |                                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 4 | 1.01 | 1 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                            | 15 Unit                               | 150.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |
| 4    | 1 | 4 | 1.01 | 2 | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual                                                                              | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                | 5 Lembaga                             | 2.500.000.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |
| 4    | 1 | 4 | 1.02 |   | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>                                                |                                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 4 | 1.02 | 3 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan                             | 15 Dokumen                            | 200.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                   |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                      |                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                       |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                    | 3                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                 |
|      |   |   |      |   |                                                                      | Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                      |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 9 |      |   | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA</b>                 | -                                                                       | -                                     | 350.000.000         |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 9 | 3.01 |   | <b>Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri</b>             |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 9 | 3.01 | 2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                    | Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi                         | 1 Dokumen                             | -                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)           |
| 4    | 1 | 9 | 3.02 |   | <b>Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus</b>                     |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 9 | 3.02 | 1 | Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus          | 1 Dokumen                             | 200.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 9 | 3.02 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus                   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus | 1 Laporan                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
|      |   |   |      |   | <b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>                                |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                           |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    | 1 |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                            |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 7 |      |   | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>     | -                                                                       | -                                     | 7.033.463.000       |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 7 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                         |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 7 | 1.01 | 1 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                 | 1 Laporan                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.01 | 2 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa              | 1 Laporan                             | 2.483.463.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.01 | 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                    | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa  | 3 Laporan                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.02 |   | <b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>               |                                                                         |                                       |                     |                                                 |                                   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                   |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                               |                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                       |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                             | 3                                                                                                              | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                 |
| 4    | 1 | 7 | 1.02 | 1 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                                  | 1 Laporan                             | 1.000.000.000        | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.02 | 2 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                         | 1 Laporan                             | 400.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.02 | 3 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | 1 Laporan                             | 400.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.03 |   | <b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>                       |                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 7 | 1.03 | 1 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                            | 50 Orang                              | 1.000.000.000        | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.03 | 2 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                               | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 1 Dokumen                             | 300.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 4    | 1 | 7 | 1.03 | 3 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 1 Dokumen                             | 450.000.000          | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
|      |   |   |      |   | <b>BIRO HUKUM</b>                                                             |                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                    |                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                     |                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 5 |      |   | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>                                | -                                                                                                              | -                                     | <b>1.781.436.000</b> |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 5 | 1.01 |   | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>                               |                                                                                                                |                                       |                      |                                                 |                                   |
| 4    | 1 | 5 | 1.01 | 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br><br>Pengaturan                          | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                                                    | 1 Dokumen                             | 634.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                              |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                      |                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                    | 3                                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                            |
| 4    | 1 | 5 | 1.01 | 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya               | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya                            | 1 Dokumen                             | 314.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 1 | 5 | 1.01 | 4 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                  | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                               | 1 Dokumen                             | 621.156.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 1 | 5 | 1.02 |   | <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>                                      |                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4    | 1 | 5 | 1.02 | 1 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                                | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                            | 30 Kasus                              | 212.280.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    |   |   |      |   | <b>BIRO ORGANISASI</b>                                               |                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                           |                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4    | 1 |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                            |                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4    | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>                                   | Persentase Kelembagaan dan Analis Jabatan Provinsi dan Kab/Kota                                   | 1 Dokumen                             | 599.313.520         |                                                 |                              |
| 4    | 1 | 2 | 1.01 |   | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan                          |                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4    | 1 | 2 | 1.01 | 1 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi                             | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                                          | 44 Dokumen                            | 150.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 4    | 1 | 2 | 1.01 | 2 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota                               | 9 Dokumen                             | 299.751.300         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 4    | 1 | 2 | 1.01 | 3 | Penataan Analisis Jabatan                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan     | 1 Dokumen                             | 149.562.220         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 4    | 1 | 2 | 1.01 | 3 | Penataan Analisis Jabatan                                            | Nilai Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja di lingkungan pemerintah daerah | 1 Dokumen                             | 1.484.290.000       |                                                 |                              |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 |   | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja             |                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 1 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                              | 1 Dokumen                             | 199.028.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                | 1 Dokumen                             | 299.942.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                               |                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                             | 3                                                                                                                  | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 3 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja                                                             | 1 Laporan                             | 299.968.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 4 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                                         | 1 Dokumen                             | 299.675.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |
| 4    | 1 | 2 | 1.02 | 5 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                                                       | 1 Dokumen                             | 385.677.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Imbi             | DANA ALOKASI UMUM (DAU)                                |
|      |   |   |      |   | <b>BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                         |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 4    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                    |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                                                                     |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                                   | -                                                                                                                  | -                                     | 1.330.000.000       |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 6 | 1.01 |   | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>                                      |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 6 | 1.01 | 1 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                           | 1 Dokumen                             | 250.000.000         | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 6 | 1.01 | 2 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                           | 1 Dokumen                             | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 6 | 1.02 |   | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>                                  |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 6 | 1.02 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 1 Dokumen                             | 230.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 6 | 1.02 | 2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 6 | 1.03 |   | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>                                     |                                                                                                                    |                                       |                     |                                                 |                                                        |



| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                 |                                                        |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                    | 4                                     | 5                    | 6                                               | 7                                                      |
| 4    | 1 | 6 | 1.03 | 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 1 Dokumen                             | 300.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 6 | 1.03 | 4 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                              | 1 Dokumen                             | 100.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 8 |      |   | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>                                                                               | -                                                                                                                                                    | -                                     | <b>1.170.000.000</b> |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 8 | 1.01 |   | <b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                                                                 |                                                                                                                                                      |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 8 | 1.01 | 1 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                                                                          | 2 Laporan                             | 400.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 8 | 1.01 | 2 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                                                                          | 1 Laporan                             | 100.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 8 | 1.02 |   | <b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                       |                      |                                                 |                                                        |
| 4    | 1 | 8 | 1.02 | 1 | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan                                                                     | 1 Dokumen                             | 120.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 8 | 1.02 | 2 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                                                                  | 1 Laporan                             | 350.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 4    | 1 | 8 | 1.02 | 3 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                                                        | 1 Dokumen                             | 200.000.000          | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                    |                                 |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                            |                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                             | Sumber Dana                     |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                          | 3                                                                                               | 4                                     | 5                      | 6                                                  | 7                               |
|      |   |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DEWAN<br/>PERWAKILAN RAKYAT PAPUA</b>                       |                                                                                                 |                                       |                        |                                                    |                                 |
| 4    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                             |                                                                                                 |                                       |                        |                                                    |                                 |
| 4    | 2 |   |      |   | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                                    |                                                                                                 |                                       |                        |                                                    |                                 |
| 4    | 2 | 2 |      |   | <b>PROGRAM DUKUNGAN<br/>PELAKSANAAN TUGAS DAN<br/>FUNGSI DPRD</b>          | -                                                                                               | -                                     | <b>44.819.808.631</b>  |                                                    |                                 |
| 4    | 2 | 2 | 1.01 |   | <b>Pembentukan Perda dan<br/>Peraturan DPRD</b>                            |                                                                                                 |                                       |                        |                                                    |                                 |
| 4    | 2 | 2 | 1.01 | 1 | Penyusunan dan Pembahasan<br>Program<br><br>Pembentukan Peraturan Daerah   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyusunan dan<br>Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan<br>Daerah | 5 Dokumen                             | 510.100.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.01 | 2 | Pembahasan Rancangan Perda                                                 | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Rancangan<br>Perda                                           | 5 Dokumen                             | 493.318.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.02 |   | <b>Pembahasan Kebijakan<br/>Anggaran</b>                                   |                                                                                                 |                                       |                        |                                                    |                                 |
| 4    | 2 | 2 | 1.02 | 1 | Pembahasan KUA dan PPAS                                                    | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan KUA dan<br>PPAS                                              | 1 Dokumen                             | 5.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.02 | 2 | Pembahasan Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Perubahan<br>KUA dan Perubahan PPAS                          | 1 Dokumen                             | 5.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.02 | 3 | Pembahasan APBD                                                            | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan APBD                                                         | 1 Dokumen                             | 5.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.02 | 4 | Pembahasan Perubahan APBD                                                  | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan Perubahan<br>APBD                                            | 1 Dokumen                             | 5.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.02 | 6 | Pembahasan<br>Pertanggungjawaban APBD                                      | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembahasan<br>Pertanggungjawaban APBD                                   | 1 Dokumen                             | 5.000.000              | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.03 |   | <b>Pengawasan Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan</b>                         |                                                                                                 |                                       |                        |                                                    |                                 |
| 4    | 2 | 2 | 1.03 | 1 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan Hukum         | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan Hukum      | 12 Laporan                            | 455.940.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.03 | 2 | Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan Bidang Infrastruktur                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Urusan                                                       | 12 Laporan                            | 504.540.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |

| Kode     |          |          |             |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                              |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|          |          |          |             |   |                                                                                           |                                                                                                                | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
| 1        |          |          |             |   | 2                                                                                         | 3                                                                                                              | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                            |
|          |          |          |             |   |                                                                                           | Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                                                              |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4        | 2        | 2        | 1.03        | 3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      | 12 Laporan                            | 455.940.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.03        | 4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 12 Laporan                            | 455.940.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.03        | 6 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen                             | 183.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.03        | 7 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 12 Dokumen                            | 455.940.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.03        | 8 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        | 1 Dokumen                             | 123.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| <b>4</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1.04</b> |   | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                                                         |                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4        | 2        | 2        | 1.04        | 1 | Orientasi DPRD                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                            | 56 Dokumen                            | 2.525.678.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.04        | 2 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 56 Dokumen                            | 2.238.962.631       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.04        | 4 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                 | 30 Orang                              | 1.200.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.04        | 5 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                                      | 15 Orang                              | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4        | 2        | 2        | 1.04        | 6 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 1 Dokumen                             | 100.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| <b>4</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1.05</b> |   | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                                    |                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                              |
| 4        | 2        | 2        | 1.05        | 1 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                                              | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                                      | 3 Laporan                             | 2.033.500.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                 |                              |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                       |                                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                     | 3                                                                                                                 | 4                                     | 5                     | 6                                               | 7                            |
| 4    | 2 | 2 | 1.05 | 2 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                                                   | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                              | 56 Dokumen                            | 10.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.05 | 3 | Pelaksanaan Reses                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                            | 56 Dokumen                            | 18.169.200.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.06 |   | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                                                      |                                                                                                                   |                                       |                       |                                                 |                              |
| 4    | 2 | 2 | 1.06 | 1 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                                                             | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                                           | 1 Dokumen                             | 306.000.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.07 |   | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                                                                   |                                                                                                                   |                                       |                       |                                                 |                              |
| 4    | 2 | 2 | 1.07 | 2 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                                                             | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                                        | 1 Dokumen                             | 359.784.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.08 |   | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                                                          |                                                                                                                   |                                       |                       |                                                 |                              |
| 4    | 2 | 2 | 1.08 | 1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                             | 12 Dokumen                            | 7.725.686.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.08 | 3 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                                | 1 Dokumen                             | 1.501.080.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.08 | 4 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                               | 12 Dokumen                            | 3.882.240.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 2 | 1.08 | 5 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                                  | 1 Dokumen                             | 1.004.960.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 3 |      |   | <b>PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA</b>                                              | -                                                                                                                 | -                                     | <b>38.058.619.419</b> |                                                 |                              |
| 4    | 2 | 3 | 3.01 |   | <b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>                                         |                                                                                                                   |                                       |                       |                                                 |                              |
| 4    | 2 | 3 | 3.01 | 1 | Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama | 56 Dokumen                            | 26.943.979.419        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 4    | 2 | 3 | 3.01 | 3 | Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                     | Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus                                                                  | 56 Dokumen                            | 10.113.600.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                        |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                               |                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                             | 3                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                      |
| 4    | 2 | 3 | 3.01 | 4 | Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua                     | 12 Dokumen                            | 1.001.040.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
|      |   |   |      |   | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH</b>                                |                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 5    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                    |                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 5    | 1 |   |      |   | <b>PERENCANAAN</b>                                                                            |                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 5    | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                      | -                                                                                         | -                                     | 12.305.000.000      |                                                 |                                                        |
| 5    | 1 | 2 | 1.01 |   | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                   |                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 5    | 1 | 2 | 1.01 | 2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | 1 Dokumen                             | 420.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
| 5    | 1 | 2 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                 | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                     | 2 Berita Acara                        | 530.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
| 5    | 1 | 2 | 1.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                         | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                        | 2 Berita Acara                        | 700.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
| 5    | 1 | 2 | 1.01 | 5 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi                                                               | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi                                                   | 3 Berita Acara                        | 3.000.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 1 | 2 | 1.01 | 6 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen                             | 1.000.000.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA BAGI HASIL (DBH)                                  |
| 5    | 1 | 2 | 1.02 |   | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  |                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                                                        |
| 5    | 1 | 2 | 1.02 | 1 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan     | 1 Dokumen                             | 1.000.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)                                  |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                                                               |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                                                                   |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                               | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                                                             |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                       | Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                                                                               |
| 5    | 1 | 2 | 1.02 | 2 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi                                                                                                   | 100 Orang                             | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  |
| 5    | 1 | 2 | 1.02 | 3 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 Orang                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  |
| 5    | 1 | 2 | 1.02 | 4 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi                                                                         | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                          | 2 Buku                                | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                  |
| 5    | 1 | 2 | 1.03 |   | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                     |                                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                                               |
| 5    | 1 | 2 | 1.03 | 1 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                       | 1 Laporan                             | 800.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                         |
| 5    | 1 | 2 | 1.03 | 2 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                            | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                                                                    | 10 Kerja Sama                         | 655.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                         |
| 5    | 1 | 2 | 1.03 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                        | 1 Laporan                             | 1.500.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                         |
| 5    | 1 | 2 | 1.03 | 4 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi                                                                                | 1 Dokumen                             | 600.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)                                                         |
| 5    | 1 | 2 | 1.04 |   | <b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>                                 |                                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                 |                                                                               |
| 5    | 1 | 2 | 1.04 | 2 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                                                                | 1 Dokumen                             | 1.000.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DANA BAGI HASIL (DBH) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                        |                                                        |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                            |                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                 | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                          | 3                                                                                                                                   | 4                                     | 5                     | 6                                      | 7                                                      |
| 5    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                  | -                                                                                                                                   | -                                     | <b>12.959.285.000</b> |                                        |                                                        |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 |   | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                                  |                                                                                                                                     |                                       |                       |                                        |                                                        |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 1 Dokumen                             | 1.050.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                      | 1 Laporan                             | 700.000.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 1 Laporan                             | 600.000.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)                                  |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                          | 1 Laporan                             | 800.000.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)                                  |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Dokumen                             | 653.485.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan                             | 600.000.000           | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)                                  |



| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                        |                       |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                     |                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                 | Sumber Dana           |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                   | 3                                                                                                                            | 4                                     | 5                   | 6                                      | 7                     |
| 5    | 1 | 3 | 1.01 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia         | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                            | 1 Laporan                             | 900.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 |   | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                        |                                                                                                                              |                                       |                     |                                        |                       |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian               | 1 Laporan                             | 450.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan                             | 800.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                   | 1 Laporan                             | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 1 Dokumen                             | 400.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                        | 1 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                        |                              |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                      |                                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                 | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                    | 3                                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                      | 7                            |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                       | 1 Laporan                             | 250.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5    | 1 | 3 | 1.02 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                         | 1 Laporan                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 |   | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>                                                   |                                                                                                                                           |                                       |                     |                                        |                              |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 1 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen                             | 425.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 2 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 1 Laporan                             | 474.800.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 3 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan                             | 1.575.000.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 4 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                               | 1 Laporan                             | 425.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 5 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 1 Dokumen                             | 934.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 6 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan                                                                             | 1 Laporan                             | 472.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala | DANA BAGI HASIL (DBH)        |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                              |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                  | 3                                                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                            |
|      |   |   |      |   | Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                                                                | Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 7 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan                             | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5    | 1 | 3 | 1.03 | 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                               | 1 Laporan                             | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5    | 5 |   |      |   | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>                                                                                 |                                                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 5 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                  | -                                                                                                                                       | -                                     | 1.550.000.000       |                                                 |                              |
| 5    | 5 | 2 | 1.01 |   | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                    |                                                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 5 | 2 | 1.01 | 3 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan      | 1 Laporan                             | 500.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 5 | 2 | 1.02 |   | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>                                                  |                                                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 5 | 2 | 1.02 | 1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                              | 1 Dokumen                             | 50.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)        |
| 5    | 5 | 2 | 1.03 |   | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                                  |                                                                                                                                         |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 5 | 2 | 1.03 | 4 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                       | 1 Dokumen                             | 500.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)        |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                       | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                         |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana             |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                               | 3                                                                                                                                 | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                       |
| 5    | 5 | 2 | 1.04 |    | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                                                                       |                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 5 | 2 | 1.04 | 3  | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 1 Laporan                             | 500.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Mandala          | DANA BAGI HASIL (DBH)   |
|      |   |   |      |    | <b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET</b>                                                                                     |                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    |   |   |      |    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                                                      |                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 2 |   |      |    | <b>KEUANGAN</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 2 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                      | -                                                                                                                                 | -                                     | 179.585.061.317     |                                                 |                         |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 |    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        |                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 1  | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                          | 2 Dokumen                             | 1.500.003.441       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                      | 1 Dokumen                             | 2.158.920.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)   |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 3  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD                                                                                 | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                 | 60 Dokumen                            | 2.125.496.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)   |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 5  | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD                                                                                 | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                 | 60 Dokumen                            | 2.073.593.876       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                          | 60 Dokumen                            | 1.494.864.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 8  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                      | 60 Dokumen                            | 3.036.325.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)   |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 9  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                           | 0 Dokumen                             | 1.480.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)   |
| 5    | 2 | 2 | 1.01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan                                                                   | 30 Dokumen                            | 1.500.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)   |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                         |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana             |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                       |
| 5    | 2 | 2 | 1.02 |    | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 2 | 2 | 1.02 | 2  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota                                                                                                                       | 9 Laporan                             | 2.329.007.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.02 | 4  | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 9 Laporan                             | 1.328.895.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.02 | 12 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah                                                    | 9 Dokumen                             | 646.258.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 |    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 | 5  | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                          | 0 Dokumen                             | 439.841.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 | 6  | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga                                                                                                                 | 0 Dokumen                             | 939.153.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                         |
|------|---|---|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana             |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                       |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                                            | Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                 |                         |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 | 7  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 0 Laporan                             | 600.906.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 | 9  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 Dokumen                             | 811.453.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Dokumen                             | 561.132.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.03 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 Orang                               | 647.515.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU) |
| 5    | 2 | 2 | 1.04 |    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                     |                                                 |                         |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                              |
|------|---|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                            |
| 5    | 2 | 2 | 1.04 | 2  | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                         | 1 Dokumen                             | 708.400.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 2 | 1.04 | 3  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                            | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                        | 3 Laporan                             | 777.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 2 | 1.04 | 4  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                | 3 Laporan                             | 1.014.600.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 2 | 1.04 | 5  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 8 Dokumen                             | 1.500.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 2 | 1.05 |    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 2 | 2 | 1.05 | 9  | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                   | 1 Laporan                             | 10.000.000.000      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 2 | 1.05 | 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                                                                                                                                    | 1 Laporan                             | 140.068.000.000     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 2 | 1.06 |    | <b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                       |                     |                                                 |                              |
| 5    | 2 | 2 | 1.06 | 2  | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah                                                                                                               | 0 Dokumen                             | 1.843.699.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                              | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                    |                              |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                             | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                            | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                  | 7                            |
|      |   |   |      |    |                                                                                                         | Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                |                                       |                        |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                          | -                                                                                                                            | -                                     | <b>4.000.000.000</b>   |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                  |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 1  | Penyusunan Standar Harga                                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                            | 1 Dokumen                             | 970.792.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 2  | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                 | 2 Dokumen                             | 360.744.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 3  | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | 1 Dokumen                             | 248.351.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 7  | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 1 Laporan                             | 675.077.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen                             | 261.272.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 11 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 1 Laporan                             | 1.483.764.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                    | DANA ALOKASI UMUM (DAU)      |
|      |   |   |      |    | <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                              |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                    |                              |
| 5    |   |   |      |    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                              |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 |   |      |    | <b>KEUANGAN</b>                                                                                         |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 | 3 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                          | -                                                                                                                            | -                                     | <b>462.000.000</b>     |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 |    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                  |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                    |                              |
| 5    | 2 | 3 | 1.01 | 7  | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 13 Laporan                            | 462.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                            |                                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                     |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                          | 3                                                                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                               |
|      |   |   |      |   |                                                                            |                                                                                                                    |                                       |                        | Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi                                                                                                                                    |                                 |
| 5    | 2 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PENDAPATAN DAERAH</b>                           | -                                                                                                                  | -                                     | <b>4.848.999.968</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 |   | <b>Kegiatan Pengelolaan<br/>Pendapatan Daerah</b>                          |                                                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                    | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                           | 5 Laporan                             | 272.075.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 5 | Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah,<br>Subyek Pajak dan Wajib<br>Pajak Daerah | 5 Laporan                             | 244.840.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data Pajak<br>Daerah      | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                      | 1 Laporan                             | 2.443.800.008          | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 8 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak<br>Daerah                                   | Jumlah Laporan<br>Permasalahan yang Telah                                                                          | 5 Laporan                             | 980.367.920            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan   | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|------|---|---|------|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                              |                                                                                                    | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Dana                     |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                            | 3                                                                                                  | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                               |
|      |   |   |      |    |                                                                              | Ditindaklanjuti dan Belum<br>Ditindaklanjuti.                                                      |                                       |                        | Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                      |                                 |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 9  | Penelitian dan Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak Daerah                     | Jumlah Dokumen yang<br>Telah Dilakukan Penelitian<br>dan Verifikasi Data<br>Pelaporan Pajak Daerah | 2 Dokumen                             | 83.575.000             | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 10 | Penagihan Pajak Daerah                                                       | Jumlah Dokumen<br>Tertanggihnya WP yang<br>Memiliki Piutang Pajak.                                 | 1 Dokumen<br>SSPD                     | 315.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                     | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan Pajak Daerah                                | 8 Laporan                             | 265.786.000            | Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
| 5    | 2 | 4 | 1.01 | 13 | Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengawasan Pengelolaan<br>Retribusi Daerah                | 1 Laporan                             | 243.556.040            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD) |
|      |   |   |      |    | <b>BADAN KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>                                          |                                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                            |                                                                  |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                            |                                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                     | Sumber Dana                                                      |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                          | 3                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                      | 6                                          | 7                                                                |
| 5    |   |   |      |    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                             |                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                            |                                                                  |
| 5    | 3 |   |      |    | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                         |                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                            |                                                                  |
| 5    | 3 | 2 |      |    | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN<br/>DAERAH</b>                                      | -                                                                                                                                                   | -                                     | <b>5.017.204.000</b>   |                                            |                                                                  |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 |    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan<br/>Informasi Kepegawaian ASN</b>          |                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                            |                                                                  |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 | 3  | Koordinasi dan Fasilitasi<br>Pengadaan PNS dan PPPK                        | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Koordinasi dan Fasilitasi<br>Pengadaan PNS dan PPPK                                                                      | 5 Dokumen                             | 200.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 | 4  | Evaluasi Pengadaan ASN dan<br>Pengadaan ASN                                | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Pengadaan ASN                                                                                                      | 5 Laporan                             | 150.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 | 6  | Koordinasi Pelaksanaan<br>Administrasi Pemberhentian                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kegiatan Koordinasi<br>Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian                                                            | 5 Dokumen                             | 200.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 | 8  | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                             | Jumlah Lembaga Profesi<br>ASN yang Difasilitasi                                                                                                     | 1 Lembaga                             | 50.000.000             | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 | 10 | Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kepegawaian                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kepegawaian                                                                                 | 2 Dokumen                             | -                      | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.01 | 11 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                               | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Data<br>Kepegawaian                                                                                             | 2 Dokumen                             | 100.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.02 |    | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                              |                                                                                                                                                     |                                       |                        |                                            |                                                                  |
| 5    | 3 | 2 | 1.02 | 1  | Pengelolaan Mutasi ASN                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Mutasi<br>Jabatan Pimpinan Tinggi,<br>Jabatan Administrasi,<br>Jabatan Pelaksana dan<br>Mutasi ASN Antar Daerah | 2 Dokumen                             | 150.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.02 | 2  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat<br>ASN                                        | Jumlah Pengelolaan<br>Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                          | 5 Laporan                             | 250.000.000            | Kota Jayapura, Jayapura Utara,<br>Gurabesi | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                         |                                                        |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                      |                                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                  | Sumber Dana                                            |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                    | 3                                                                           | 4                                     | 5                   | 6                                       | 7                                                      |
| 5    | 3 | 2 | 1.02 | 3  | Pengelolaan Promosi ASN                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                | 2 Dokumen                             | 300.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.03 |    | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                   |                                                                             |                                       |                     |                                         |                                                        |
| 5    | 3 | 2 | 1.03 | 4  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                  | 2 Dokumen                             | 2.800.000.000       | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.03 | 6  | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                                   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN                 | 300 Orang                             | 200.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.03 | 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | 2 Dokumen                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.04 |    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                       |                                                                             |                                       |                     |                                         |                                                        |
| 5    | 3 | 2 | 1.04 | 4  | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                       | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                       | 100 Orang                             | 267.204.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.04 | 5  | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                  | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                        | 100 Orang                             | 150.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
| 5    | 3 | 2 | 1.04 | 7  | Pembinaan Disiplin ASN                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                          | 100 Orang                             | 100.000.000         | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Gurabesi | DANA OTONOMI KHUSUS 1%-PAPUA-ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
|      |   |   |      |    | <b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR</b>                       |                                                                             |                                       |                     |                                         |                                                        |
| 5    |   |   |      |    | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                           |                                                                             |                                       |                     |                                         |                                                        |
| 5    | 4 |   |      |    | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                      |                                                                             |                                       |                     |                                         |                                                        |
| 5    | 4 | 2 |      |    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                      | -                                                                           | -                                     | 14.759.310.000      |                                         |                                                        |
| 5    | 4 | 2 | 1.01 |    | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                |                                                                             |                                       |                     |                                         |                                                        |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                |                                                                 |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                         | Sumber Dana                                                     |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                     | 5                   | 6                                                                                              | 7                                                               |
| 5    | 4 | 2 | 1.01 | 3 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                                           | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                               | 90 Orang                              | 1.047.155.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                               |
| 5    | 4 | 2 | 1.01 | 4 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen                             | 1.185.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                               |
| 5    | 4 | 2 | 1.02 |   | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                                                                |                                                                 |
| 5    | 4 | 2 | 1.02 | 5 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                             | 1.227.155.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                               |
| 5    | 4 | 2 | 1.02 | 7 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                         | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                               | 400 Orang                             | 11.000.000.000      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT], PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 5    | 4 | 2 | 1.02 | 8 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan | 1 Dokumen                             | 300.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                               |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                | Sumber Dana                                                                                |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                          | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                     | 7                                                                                          |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                | Tinggi, Kepemimpinan, dan<br>Prajabatan                                                                                                    |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|      |   |   |      |   | <b>BADAN PENGELOLA<br/>PERBATASAN DAN<br/>KERJASAMA</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 5    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 5    | 6 |   |      |   | <b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 5    | 6 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN<br/>PERBATASAN</b>                                                                                                                                      | -                                                                                                                                          | -                                     | 5.200.000.000          |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 5    | 6 | 2 | 1.01 |   | <b>Perencanaan dan Fasilitas<br/>Kerja Sama</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 5    | 6 | 2 | 1.01 | 1 | Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Kebijakan Otonomi<br>Daerah                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Kebijakan<br>Otonomi Daerah                                             | 4 Dokumen                             | 2.000.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT]                                                    |
| 5    | 6 | 2 | 1.01 | 2 | Penyusunan Rencana Aksi<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan                                                                                                                   | Jumlah Rencana Aksi<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan yang Disusun                                                                      | 1 Dokumen                             | -                      | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                    | DANA OTONOMI<br>KHUSUS 1%-PAPUA-<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN, DANA<br>BAGI HASIL (DBH) |
| 5    | 6 | 2 | 1.02 |   | <b>Pelaksanaan Kewilayahan<br/>Perbatasan</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 5    | 6 | 2 | 1.02 | 1 | Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Pembangunan<br>Kawasan Perbatasan                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Pembangunan<br>Kawasan Perbatasan                                       | 2 Dokumen                             | 700.000.000            | Kab. Keerom, Waris, Semua<br>Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Arso, Semua<br>Kel/Desa                                                                         | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT]                                                    |
| 5    | 6 | 2 | 1.02 | 2 | Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Pemanfaatan<br>Kawasan Perbatasan                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Integrasi, dan<br>Sinkronisasi Pemanfaatan<br>Kawasan Perbatasan                                       | 1 Dokumen                             | 700.000.000            | Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT]                                                    |
| 5    | 6 | 2 | 1.02 | 3 | Fasilitasi Penegasan,<br>Pemeliharaan, dan<br><br>Pengamanan Batas Wilayah<br>Negara                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Fasilitasi Penegasan,<br>Pemeliharaan, dan<br>Pengamanan Batas Wilayah<br>Negara                                   | 3 Dokumen                             | 700.000.000            | Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                  | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT]                                                    |
| 5    | 6 | 2 | 1.02 | 4 | Inventarisasi Potensi Sumber<br>Daya untuk Pengusulan<br>Penetapan Zona Pengembangan<br>Ekonomi, Sosial Budaya,<br>Lingkungan Hidup, dan Zona<br>Lainnya di Kawasan Perbatasan | Jumlah Dokumen Hasil<br>Inventarisasi Potensi<br>Sumber Daya untuk<br>Pengusulan Penetapan<br>Zona Pengembangan<br>Ekonomi, Sosial Budaya, | 1 Dokumen                             | 700.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT]                                                    |



| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                           | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|------|---|---|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                            | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Dana                             |
|      |   |   |      |   |                                                                                                      |                                                                                                                              | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                       |
|      |   |   |      |   |                                                                                                      | Lingkungan Hidup, dan<br>Zona Lainnya di Kawasan<br>Perbatasan                                                               |                                       |                        | Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Muara Tami,<br>Semua Kel/Desa                                                                                                                                                          |                                         |
| 5    | 6 | 2 | 1.03 |   | <b>Monitoring dan Evaluasi</b>                                                                       |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5    | 6 | 2 | 1.03 | 3 | Pengawasan Pelaksanaan<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan oleh Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengawasan Pelaksanaan<br>Pembangunan Kawasan<br>Perbatasan oleh Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota | 1 Laporan                             | 400.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Muara Tami,<br>Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
|      |   |   |      |   | <b>BADAN PENGHUBUNG<br/>DAERAH</b>                                                                   |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN</b>                                                       |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5    | 7 |   |      |   | <b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>                                                                        |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5    | 7 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PELAYANAN<br/>PENGHUBUNG</b>                                                              | -                                                                                                                            | -                                     | 1.500.472.000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5    | 7 | 2 | 1.01 |   | <b>Pelaksanaan Pelayanan<br/>Penghubung</b>                                                          |                                                                                                                              |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| 5    | 7 | 2 | 1.01 | 1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan<br>Publik bagi<br><br>Aparatur dan Masyarakat                         | Jumlah Laporan Hasil<br>Kualitas Pelayanan Publik<br>bagi Aparatur dan<br>Masyarakat yang<br>Ditingkatkan                    | 1 Laporan                             | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 5    | 7 | 2 | 1.01 | 2 | Pelayanan Kelembagaan<br>Aparatur dan<br><br>Masyarakat                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pelayanan Kelembagaan<br>Aparatur dan Masyarakat                                                     | 1 Laporan                             | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |
| 5    | 7 | 2 | 1.01 | 3 | Peningkatan Fasilitas Promosi<br>Produk<br><br>Unggulan dan Pelestarian Seni<br>Budaya               | Jumlah Laporan Hasil<br>Promosi Produk Unggulan<br>dan Pelestarian Seni<br>Budaya yang Ditingkatkan                          | 1 Laporan                             | 250.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                 | DANA OTONOMI<br>KHUSUS [BLOCK<br>GRANT] |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                       |                                                 |                                   |
|------|---|---|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                         |                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)   | Lokasi                                          | Sumber Dana                       |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                       | 3                                                                                                                            | 4                                     | 5                     | 6                                               | 7                                 |
| 5    | 7 | 2 | 1.01 | 4 | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                  | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya                                  | 1 Laporan                             | 750.472.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
|      |   |   |      |   | <b>INSPEKTORAT</b>                                                                                      |                                                                                                                              |                                       |                       |                                                 |                                   |
| 6    |   |   |      |   | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                                             |                                                                                                                              |                                       |                       |                                                 |                                   |
| 6    | 1 |   |      |   | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>                                                                               |                                                                                                                              |                                       |                       |                                                 |                                   |
| 6    | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                               | -                                                                                                                            | -                                     | <b>13.195.902.000</b> |                                                 |                                   |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 |   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                              |                                                                                                                              |                                       |                       |                                                 |                                   |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 1 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 62 Laporan                            | 3.723.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 2 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 79 Laporan                            | 3.302.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 3 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 1 Laporan                             | 55.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 4 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 48 Laporan                            | 2.077.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 5 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota                                                               | 9 Laporan                             | 1.197.600.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 6 | Kerjasama Pengawasan Internal                                                                           | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk                                                                        | 1 Kesepakatan                         | 447.622.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] |
| 6    | 1 | 2 | 1.01 | 7 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 60 Dokumen                            | 1.634.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |
| 6    | 1 | 2 | 1.02 |   | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                                                |                                                                                                                              |                                       |                       |                                                 |                                   |
| 6    | 1 | 2 | 1.02 | 1 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 1 Laporan                             | 448.680.000           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA BAGI HASIL (DBH)             |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                             |                                                   |
|------|---|---|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                          |                                                                                                               | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                      | Sumber Dana                                       |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                             | 4                                     | 5                    | 6                                                                                           | 7                                                 |
| 6    | 1 | 2 | 1.02 | 2 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                        | 4 Laporan                             | 311.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                 |
| 6    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                           | -                                                                                                             | -                                     | <b>6.387.629.000</b> |                                                                                             |                                                   |
| 6    | 1 | 3 | 1.01 |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang</b>                                                                              |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
|      |   |   |      |   | <b>Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan</b>                                                                               |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
| 6    | 1 | 3 | 1.01 | 1 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                                          | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                         | 1 Rekomendasi                         | 1.432.479.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT]                 |
| 6    | 1 | 3 | 1.02 |   | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>                                                                                        |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
| 6    | 1 | 3 | 1.02 | 2 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 39 Perangkat Daerah                   | 497.600.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA BAGI HASIL (DBH)                             |
| 6    | 1 | 3 | 1.02 | 3 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi     | 8 Kegiatan                            | 4.457.550.000        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                             | DANA BAGI HASIL (DBH)                             |
|      |   |   |      |   | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                                                 |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
| 8    |   |   |      |   | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                           |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
| 8    | 1 |   |      |   | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                                                       |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
| 8    | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                      | -                                                                                                             | -                                     | <b>3.100.000.000</b> |                                                                                             |                                                   |
| 8    | 1 | 2 | 1.01 |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>           |                                                                                                               |                                       |                      |                                                                                             |                                                   |
| 8    | 1 | 2 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,                      | 0 Orang                               | 2.000.000.000        | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                                                                                                                          |                              |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                     | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                     | 5                    | 6                                                                                                                                                        | 7                            |
|      |   |   |      |   | Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                                                     | Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                      |                                       |                      | Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 2 | 1.01 | 6 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 3 Dokumen                             | 150.000.000          | Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 2 | 1.01 | 9 | Pelaksanaan tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                             | 950.000.000          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                   | -                                     | <b>3.444.670.000</b> |                                                                                                                                                          |                              |
| 8    | 1 | 3 | 1.01 |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                      |                                                                                                                                                          |                              |
| 8    | 1 | 3 | 1.01 | 1 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta                                                             | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum                           | 1 Dokumen                             | 150.000.000          | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                    |                              |
|------|---|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                             | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                  | 7                            |
|      |   |   |      |   | Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                                                                                                                                       | Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                     |                                                                                                                                                    |                              |
| 8    | 1 | 3 | 1.01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun                     | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 3 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 100 Orang                             | 3.144.670.000       | Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                     | <b>150.000.000</b>  |                                                                                                                                                    |                              |
| 8    | 1 | 4 | 1.01 |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     |                                                                                                                                                    |                              |
| 8    | 1 | 4 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,                                                                                                                                                  | 210 Orang                             | 150.000.000         | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                   | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                                                                                                                       |                              |
|------|---|---|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                                                                                                                                | Sumber Dana                  |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                     | 5                      | 6                                                                                                                                                     | 7                            |
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                              |
| 8    | 1 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     | 150.000.000            |                                                                                                                                                       |                              |
| 8    | 1 | 5 | 1.01 |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                              |
| 8    | 1 | 5 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                          | 210 Orang                             | 150.000.000            | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 6 |      |   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                     | 2.300.000.000          |                                                                                                                                                       |                              |
| 8    | 1 | 6 | 1.01 |   | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                        |                                                                                                                                                       |                              |
| 8    | 1 | 6 | 1.01 | 2 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen                             | 150.000.000            | Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 8    | 1 | 6 | 1.01 | 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                          | 315 Orang                             | 2.000.000.000          | Kab. Sarmi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

| Kode |   |   |      |   | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|------|---|---|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |   | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                  |
|      |   |   |      |   | Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                               | Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                              |                                       |                     | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Waropen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Mamberamo Raya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Biak Numfor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Jayapura, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |                                    |
| 8    | 1 | 6 | 1.01 | 4 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 210 Orang                             | 150.000.000         | Kab. Keerom, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Supiori, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kepulauan Yapen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |
|      |   |   |      |   | <b>SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 9    |   |   |      |   | <b>UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 9    | 2 |   |      |   | <b>KEKHUSUSAN PAPUA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 9    | 2 | 2 |      |   | <b>PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA</b>                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                     | 67.990.143.088      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 9    | 2 | 2 | 3.01 |   | <b>Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 9    | 2 | 2 | 3.01 | 1 | Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pemberian Saran,                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                             | 450.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |



| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                  | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                 |                                    |
|------|---|---|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              | Target 2026                           | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                          | Sumber Dana                        |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                            | 4                                     | 5                   | 6                                               | 7                                  |
|      |   |   |      |    |                                                                                                                                                         | Pertimbangan, dan Persetujuan                                                                                                                                                |                                       |                     |                                                 |                                    |
| 9    | 2 | 2 | 3.01 | 2  | Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya                                               | Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya                                                          | 1 Dokumen                             | 20.223.000.000      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.01 | 3  | Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya | 1 Dokumen                             | 9.605.355.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.01 | 7  | Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP                                                                                                         | 1 Dokumen                             | 150.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.01 | 8  | Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP                                                                                                                           | 1 Dokumen                             | 2.500.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 |    | <b>Pelaksanaan Hak dan Kewajiban</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                       |                     |                                                 |                                    |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 | 1  | Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota                                                                                                           | Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan                                                                                                                       | 42 Orang                              | 31.011.788.088      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 | 6  | Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan yang Dilaksanakan                                                                                                           | 1 Laporan                             | 1.800.000.000       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 | 9  | Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua                                                                                 | 1 Dokumen                             | 600.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 | 10 | Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama                                                                                                                 | 1 Dokumen                             | 600.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 | 11 | Monitoring Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                       | 1 Dokumen                             | 600.000.000         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI PAPUA |

| Kode |   |   |      |    | Urusan / Bidang Urusan /<br>Program / Outcome / Kegiatan /<br>Sub Kegiatan | Indikator Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan              | Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                        |                                                    |                                          |
|------|---|---|------|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |   |   |      |    |                                                                            |                                                             | Target 2026                           | Pagu Indikatif<br>(Rp) | Lokasi                                             | Sumber Dana                              |
| 1    |   |   |      |    | 2                                                                          | 3                                                           | 4                                     | 5                      | 6                                                  | 7                                        |
| 9    | 2 | 2 | 3.02 | 12 | Peningkatan Kapasitas MRP                                                  | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Peningkatan<br>Kapasitas MRP | 42 Orang                              | 450.000.000            | Semua Kota/Kab, Semua<br>Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI<br>KHUSUS-PROVINSI<br>PAPUA |

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan yang mengacu kepada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Berikut masing-masing indikator kinerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua, dapat dikemukakan pada Tabel VII.1 sebagai berikut:

Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua Tahun 2026

| No | Sasaran Strategi                                                            | No  | Indikator                                                   | Satuan              | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan | 1.1 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS)                                | Tahun               | 8.84                                   |
|    |                                                                             | 1.2 | Harapan Lama Sekolah                                        | Tahun               | 15.69                                  |
|    |                                                                             | 1.3 | Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf                 | Persen              | 82.4                                   |
| 2  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                   | 2.1 | Angka Harapan Hidup                                         | Tahun               | 72                                     |
| 3  | Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga                                    | 3.1 | Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional | Atlet               | 50                                     |
| 4  | Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah                    | 4.1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif                     | Persen              | 78.6                                   |
| 5  | Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan                         | 5.1 | Cakupan daerah rawan pangan                                 | Jumlah Kab/Kota     | 6                                      |
|    |                                                                             | 5.2 | Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan                     | Rp. Ribu per kapita | 7630                                   |
| 6  | Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat                        | 6.1 | Indeks Kerukunan Umat Beragama                              | Indeks              | 80.68                                  |

| No | Sasaran Strategi                                                                                                               | No   | Indikator                                                                                                                  | Satuan         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 7  | Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak- Hak Politik dan Lembaga Demokras                                                            | 7.1  | Nilai skor aspek kebebasan sipil                                                                                           | Skor           | 96                                     |
|    |                                                                                                                                | 7.2  | Nilai skor aspek hak- hak politik                                                                                          | Skor           | 51                                     |
|    |                                                                                                                                | 7.3  | Nilai skor aspek lembaga demokrasi                                                                                         | Skor           |                                        |
| 8  | Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua                                                                      | 8.1  | Tingkat capaian realisasi program program Otsus yang direncanakan                                                          | Persen         | 100                                    |
| 9  | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                               | 9.1  | Capaian Nilai SAKIP                                                                                                        | predikat       | BB                                     |
|    |                                                                                                                                | 9.2  | Capaian implementasi e-government                                                                                          | persen         | 95                                     |
| 10 | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah                   | 10.1 | Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD                                                                                    | persen         | 95                                     |
|    |                                                                                                                                | 10.2 | Tingkat konsistensi KUAPPS terhadap RKPD                                                                                   | persen         | 95                                     |
|    |                                                                                                                                | 10.3 | Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RAP                                                                                      | persen         | 95                                     |
| 11 | Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah                                 | 11.1 | Opini BPK Atas Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan                                                                        | Opini          | WTP                                    |
|    |                                                                                                                                |      | Daerah Provinsi Papua                                                                                                      |                |                                        |
|    |                                                                                                                                | 11.2 | Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah                                                                                  | persen         | 16.21                                  |
|    |                                                                                                                                | 11.3 | Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah                                                                                      | persen         | 66.3                                   |
| 12 | Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas                      | 12.1 | Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB                                                                             | persen         | 6.5                                    |
|    |                                                                                                                                | 12.2 | Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB                                                                                 | persen         | 8.0                                    |
|    |                                                                                                                                | 12.3 | Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB                                                                                 | persen         | 8.0                                    |
| 13 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim                                                        | 13.1 | Indeks Kualitas Udara                                                                                                      | indeks         | 95                                     |
|    |                                                                                                                                | 13.2 | Indeks Kualitas Air                                                                                                        | indeks         | 80                                     |
|    |                                                                                                                                | 13.3 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                              | indeks         | 85                                     |
|    |                                                                                                                                | 13.4 | Intensitas penurunan emisi                                                                                                 | Ton CO2/rupiah |                                        |
| 14 | Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan | 14.1 | Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB                                                                              | persen         | 12.3                                   |
|    |                                                                                                                                | 14.2 | Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM) | STC per tahun  | 20                                     |

| No | Sasaran Strategi                                                                                                                       | No   | Indikator                                                        | Satuan               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 15 | Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja                                                                    | 15.1 | Tingkat Kesempatan Kerja                                         | persen               | 91.78                                  |
| 16 | Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah                                                      | 16.1 | Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan                  | Rp. Triliun          |                                        |
| 17 | Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah | 17.1 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap                   | persen               | 70.00                                  |
| 18 | Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten                                                                                       | 18.1 | Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang                          | persen               | 50                                     |
| 19 | Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah                                                        | 19.1 | Persentase pemanfaatan sumberdaya air                            | persen               | 83                                     |
| 20 | Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman                                                                     | 20.1 | Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik                        | persen               | 43                                     |
| 21 | Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung                                                                                     | 21.1 | Indeks Kampung Membangun                                         | indeks               | 52.5                                   |
| 22 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP                                                                                        | 22.1 | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP                         | persen               | 74.5                                   |
| 23 | Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan                                                                                 | 23.1 | Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan                        | tahun                | 12.15                                  |
|    |                                                                                                                                        | 23.2 | Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan                           | tahun                | 70.4                                   |
|    |                                                                                                                                        | 23.3 | Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan                        | Rp juta per kapita   | 14.2                                   |
| 24 | Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS                                                                         | 24.1 | Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan) | KAT per tahun        | 80                                     |
|    |                                                                                                                                        | 24.2 | Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial                      | ribu orang per tahun | 80                                     |
| 25 | Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana                  | 25.1 | Indeks Resiko Bencana (IRBI)                                     | Kategori             | rendah                                 |
| 26 | Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Anak                                               | 26.1 | Indeks Pembangunan Gender                                        | indeks               | 80.3                                   |
|    |                                                                                                                                        | 26.2 | Indeks Pemberdayaan Gender                                       | indeks               | 65.3                                   |

Tabel VII.2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Papua Tahun 2026

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                                                                                                    |                                                                                               | Satuan Indikator    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>                                   |                                                                                                                    |                                                                                               |                     |                                             |
| <b>Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi</b>                             |                                                                                                                    |                                                                                               |                     |                                             |
| 1.                                                                      | <b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b> |                                                                                               |                     |                                             |
|                                                                         | 1.1                                                                                                                | Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan               | Rp. Juta            | 25.00                                       |
|                                                                         | 1.2                                                                                                                | Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)                    | Persen              | 90.61                                       |
|                                                                         | 1.3                                                                                                                | Capaian Implementasi e-government terintegrasi (masuk e-planning dll ke program)              | Persen              | 100                                         |
|                                                                         | 1.4                                                                                                                | Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPD yang mencapai target                    | Persen              | 85.00                                       |
|                                                                         | 1.5                                                                                                                | Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD                                                   | Persen              | 95.00                                       |
|                                                                         | 1.6                                                                                                                | Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah | Persen              | 58.48                                       |
|                                                                         | 1.7                                                                                                                | Ketepatan waktu Penetapan APBD                                                                | Kategori            | tepat waktu                                 |
|                                                                         | 1.8                                                                                                                | Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus                 | Jumlah Kab/Kota     | 9                                           |
|                                                                         | 1.9                                                                                                                | Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua                                              | Indeks              | 6.92                                        |
|                                                                         | 1.10                                                                                                               | Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan                                                     | Rp. Ribu per kapita | 15.00                                       |
|                                                                         | 1.11                                                                                                               | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                    | Nilai Indeks        | A                                           |
|                                                                         | 1.12                                                                                                               | Indeks Pelayanan Publik                                                                       | Nilai Indeks        | A                                           |
|                                                                         | 1.13                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                    | Nilai indeks        | A                                           |
|                                                                         | 1.14                                                                                                               | Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah                                            | Orang per hari      | 450                                         |
|                                                                         | 1.15                                                                                                               | Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM                                                               | Nilai Indeks        | 80                                          |
|                                                                         | 1.16                                                                                                               | Tingkat Kerentanan Sosial                                                                     | Kategori            | -                                           |
| <b>Kesejahteraan Sosial</b>                                             |                                                                                                                    |                                                                                               |                     |                                             |
| 1.                                                                      | <b>Pendidikan</b>                                                                                                  |                                                                                               |                     |                                             |
|                                                                         | 1.1                                                                                                                | Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3                                 | Persen              | 69.03                                       |
|                                                                         | 1.2                                                                                                                | Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan                                                     | tahun               | 12.00                                       |
|                                                                         | 1.3                                                                                                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                                                            | persen              | 100                                         |
|                                                                         | 1.4                                                                                                                | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat                                        | persen              | 87.31                                       |
|                                                                         | 1.5                                                                                                                | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat                                      | persen              | 71.61                                       |
| 2.                                                                      | <b>Kesehatan</b>                                                                                                   |                                                                                               |                     |                                             |
|                                                                         | 2.1                                                                                                                | Angka Kematian Bayi (AKB)                                                                     | per 1.000 klh       | 3.00                                        |
|                                                                         | 2.2                                                                                                                | Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita                            | persen              | 4.60                                        |
| 3.                                                                      | <b>Pangan</b>                                                                                                      |                                                                                               |                     |                                             |
|                                                                         | 3.1                                                                                                                | Indeks Ketahanan Pangan                                                                       | Nilai Indeks        | 59.16                                       |
|                                                                         | 3.2                                                                                                                | Persentase kenaikan cadangan pangan                                                           | persen              | 45.00                                       |
|                                                                         | 3.3                                                                                                                | Persentase penduduk tahan pangan                                                              | persen              | 60.90                                       |
| 4.                                                                      | <b>Ketenagakerjaan</b>                                                                                             |                                                                                               |                     |                                             |
|                                                                         | 4.1                                                                                                                | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                  | persen              | 4.00                                        |
|                                                                         | 4.2                                                                                                                | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                            | persen              | 80.99                                       |
| 5.                                                                      | <b>Pemberdayaan</b>                                                                                                |                                                                                               |                     |                                             |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                                                                                                    |                                                                                                | Satuan Indikator   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 5.1                                                                                                                | Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang                | persen             | 28.00                                       |
|                                                                         | 5.2                                                                                                                | Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil                                  | persen             | 60.90                                       |
|                                                                         | 5.3                                                                                                                | Indeks Ketimpangan Gender                                                                      | Indeks             | 0.434                                       |
| <b>6.</b>                                                               | <b>Seni Budaya dan Olahraga</b>                                                                                    |                                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 6.1                                                                                                                | Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan                                              | persen             | 60.00                                       |
|                                                                         | 6.2                                                                                                                | Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan                                                           | jumlah             | 1                                           |
|                                                                         | 6.3                                                                                                                | Cakupan kurikulum muatan lokal                                                                 | persen             | 5                                           |
|                                                                         | 6.4                                                                                                                | Indeks Pembangunan Olahraga                                                                    | Tingkatan Status   | Sedang                                      |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>                                          |                                                                                                                    |                                                                                                |                    |                                             |
| <b>Kemampuan Ekonomi Daerah</b>                                         |                                                                                                                    |                                                                                                |                    |                                             |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b> |                                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 1.1                                                                                                                | NTP perikanan tangkap                                                                          | Skor               | 105.00                                      |
|                                                                         | 1.2                                                                                                                | NTP perikanan budidaya                                                                         | Skor               | 100.00                                      |
|                                                                         | 1.3                                                                                                                | Tingkat konsumsi ikan per kapita                                                               | kg/kapita/ bln     | 2.47                                        |
|                                                                         | 1.4                                                                                                                | Pendapatan Per Kapita Petani                                                                   | Rp juta per kapita | 13.15                                       |
|                                                                         | 1.5                                                                                                                | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                                                      | Skor               | 90.15                                       |
|                                                                         | 1.6                                                                                                                | Cakupan penanganan daerah rawan pangan                                                         | persen             | 68                                          |
|                                                                         | 1.7                                                                                                                | Lama Tinggal Wisatawan                                                                         | Hari               | 3.53                                        |
|                                                                         | 1.8                                                                                                                | Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan                                                          | persen             | 3.3                                         |
|                                                                         | 1.9                                                                                                                | Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan                                               | Jumlah             | 5                                           |
|                                                                         | 1.10                                                                                                               | Persentase koperasi aktif dan berkembang                                                       | persen             | 61                                          |
|                                                                         | 1.11                                                                                                               | Jumlah UMKM yang berkembang                                                                    | Jumlah             | 4030                                        |
| <b>Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>                                  |                                                                                                                    |                                                                                                |                    |                                             |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Perhubungan</b>                                                                                                 |                                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 1.1                                                                                                                | Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan | persen             | 93.4                                        |
| <b>2.</b>                                                               | <b>Listrik Dan Air Bersih</b>                                                                                      |                                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 2.1                                                                                                                | Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan                              | unit               | 46                                          |
|                                                                         | 2.2                                                                                                                | Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik                                                      | persen             | 40.3                                        |
|                                                                         | 2.3                                                                                                                | Backlog perumahan layak huni dan sehat                                                         | ribu juta          | 97                                          |
| <b>3.</b>                                                               | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                            |                                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 3.1                                                                                                                | Laju Deforestasi                                                                               | ribu hektar        | 22                                          |
|                                                                         | 3.2                                                                                                                | Tingkat Emisi Karbon                                                                           | Ton CO2            | -                                           |
|                                                                         | 3.3                                                                                                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                               | nilai indeks       | 85.06                                       |
|                                                                         | 3.4                                                                                                                | Persentase penerapan <i>green economy</i>                                                      | persen             | 71.5                                        |
|                                                                         | 3.5                                                                                                                | Intensitas penurunan emisi                                                                     | Ton CO2/ Rp        |                                             |
|                                                                         | 3.6                                                                                                                | Persentase pemanfaatan sumberdaya air                                                          | persen             | 81                                          |
|                                                                         | 3.7                                                                                                                | Persentase pengendalian daya rusak air                                                         | persen             | 63                                          |
| <b>4.</b>                                                               | <b>Informasi dan Komunikasi</b>                                                                                    |                                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 4.1                                                                                                                | Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi                                                      | Kategori           | B                                           |
|                                                                         | 4.2                                                                                                                | Cakupan layanan telekomunikasi                                                                 | persen             | 63                                          |
|                                                                         | 4.3                                                                                                                | Proporsi rumah tangga dengan akses internet                                                    | persen             | 13                                          |



| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                   |                                                                                    | Satuan Indikator     | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>5.</b>                                                               | <b>Iklim Berinvestasi</b>         |                                                                                    |                      |                                             |
|                                                                         | 5.1                               | Angka Kriminalitas                                                                 | per 100.000 penduduk | 141                                         |
|                                                                         | 5.2                               | Indeks Demokrasi                                                                   | Nilai Indeks         | 63.11                                       |
|                                                                         | 5.3                               | Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)        | Jumlah               | 6                                           |
|                                                                         | 5.4                               | Lama hari pengurusan ijin investasi                                                | hari                 | 15                                          |
|                                                                         | 5.5                               | ICOR                                                                               | nilai                | 3.24                                        |
|                                                                         | 5.6                               | Indeks Kemahalan Konstruksi                                                        | persen               | 194                                         |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b> |                                                                                    |                      |                                             |
| <b>1.1.</b>                                                             | <b>Pendidikan</b>                 |                                                                                    |                      |                                             |
|                                                                         | 1.1.1                             | Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat                                | persen               | 0.13                                        |
|                                                                         | 1.1.2                             | Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat                                      | persen               | 0.91                                        |
|                                                                         | 1.1.3                             | Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik          | persen               | 35.23                                       |
|                                                                         | 1.1.4                             | Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik        | persen               | 35.29                                       |
|                                                                         | 1.1.5                             | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar                                          | murid per guru       | 26.42                                       |
|                                                                         | 1.1.6                             | Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama                               | murid per guru       | 27.88                                       |
|                                                                         | 1.1.7                             | Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar                 | murid per sekolah    | 213.6                                       |
|                                                                         | 1.1.8                             | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama       | murid per sekolah    | 209.9                                       |
|                                                                         | 1.1.9                             | Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas                                  | persen               | 100                                         |
|                                                                         | 1.1.10                            | Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)         | persen               | 100                                         |
|                                                                         | 1.1.12                            | Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat                           | persen               | 0.20                                        |
|                                                                         | 1.1.13                            | Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik     | persen               | 41.80                                       |
|                                                                         | 1.1.14                            | Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan                         | murid per guru       | 27.70                                       |
|                                                                         | 1.1.15                            | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan | murid per sekolah    | 189.20                                      |
|                                                                         | 1.1.16                            | Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun                             | persen               | 95.50                                       |
|                                                                         | 1.1.17                            | Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun       | persen               | 97.18                                       |
|                                                                         | 1.1.18                            | Jumlah PKBM aktif                                                                  | unit                 |                                             |
|                                                                         | 1.1.19                            | Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV                                  | persen               | 76.50                                       |
|                                                                         | 1.1.20                            | Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik                                     | persen               | 81.35                                       |
|                                                                         | 1.1.21                            | Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik                                     | persen               | 86.32                                       |
|                                                                         | 1.1.22                            | Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik                                    | persen               | 87.00                                       |
|                                                                         | 1.1.23                            | Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik                                | persen               | 90.00                                       |
|                                                                         | 1.1.24                            | Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik                                   | persen               | 72.00                                       |
|                                                                         | 1.1.25                            | Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus                               | persen               | 70.00                                       |
|                                                                         | 1.1.26                            | Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran   | persen               | 30.50                                       |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                  |                                                                                        | Satuan Indikator           | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 1.1.27           | Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan                   | unit per tahun             | 6                                           |
|                                                                         | 1.1.28           | Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama          | unit                       | 58.00                                       |
|                                                                         | 1.1.29           | Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring                                | persen                     | 54.20                                       |
|                                                                         | 1.1.30           | Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu               | persen                     | 96.23                                       |
|                                                                         | 1.1.31           | Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu               | persen                     | 70.90                                       |
|                                                                         | 1.1.32           | Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu               | persen                     | 65.84                                       |
|                                                                         | 1.1.33           | Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)                                    | persen                     | 28.70                                       |
|                                                                         | 1.1.34           | Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi                          | orang per tahun            | 250                                         |
|                                                                         | 1.1.35           | Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi                                      | orang                      | 1625                                        |
|                                                                         | 1.1.36           | Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina                                            | unit                       | 10                                          |
|                                                                         | 1.1.37           | Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa                                                 | persen                     | 13.25                                       |
|                                                                         | 1.1.38           | Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB                                              | rasio siswa SLB per rombel | 25.7                                        |
|                                                                         | 1.1.39           | APM Pendidikan khusus (SPM Provinsi)                                                   | persen                     | 100.00                                      |
| <b>1.2.</b>                                                             | <b>Kesehatan</b> |                                                                                        |                            |                                             |
|                                                                         | 1.2.1            | Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas                                          | persen                     | 41.20                                       |
|                                                                         | 1.2.2            | Cakupan puskesmas terakreditasi                                                        | persen                     | 15.92                                       |
|                                                                         | 1.2.3            | Cakupan puskesmas pembantu                                                             | per 100,000 penduduk       | 152.30                                      |
|                                                                         | 1.2.4            | Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan                                            | persen                     | 80.00                                       |
|                                                                         | 1.2.5            | Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)                              | persen                     | 55.00                                       |
|                                                                         | 1.2.6            | Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap              | persen                     | 93.36                                       |
|                                                                         | 1.2.7            | Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas | persen                     | 90.00                                       |
|                                                                         | 1.2.8            | Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                               | persen                     | 47.30                                       |
|                                                                         | 1.2.9            | Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS                                    | persen                     | 60.57                                       |
|                                                                         | 1.2.10           | Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin                       | persen                     | 100                                         |
|                                                                         | 1.2.11           | Persentase PAK yang diawasi                                                            | persen                     | 100                                         |
|                                                                         | 1.2.12           | Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat                                 | jumlah                     | 40.00                                       |
|                                                                         | 1.2.13           | API Malaria                                                                            | persen                     | 23.70                                       |
|                                                                         | 1.2.14           | Tingkat prevalensi Tuberkulosis                                                        | per 100.000 penduduk       | 29.95                                       |
|                                                                         | 1.2.15           | Tingkat prevalensi DBD                                                                 | persen                     | 49.94                                       |
|                                                                         | 1.2.16           | Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)                                                 | per 100.000 penduduk       | 27.87                                       |
|                                                                         | 1.2.17           | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                       | per 1000 penduduk          | 7.10                                        |
|                                                                         | 1.2.18           | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk                                                | per 1000 penduduk          | 21.94                                       |
|                                                                         | 1.2.19           | Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara  | persen                     | 45.00                                       |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |        |                                                                                                                                    | Satuan Indikator     | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 1.2.20 | Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa                                                                           | persen               |                                             |
|                                                                         | 1.2.21 | Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra                                                                                          | kabupaten/kota       | 9                                           |
|                                                                         | 1.2.22 | Prevalensi penyalahgunaan narkoba                                                                                                  | persen               | 5.00                                        |
|                                                                         | 1.2.23 | Unmet need pelayanan kesehatan                                                                                                     | persen               | 60.00                                       |
|                                                                         | 1.2.24 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup                                                                                     | kasus                | 109.35                                      |
|                                                                         | 1.2.25 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                                                                     | persen               | 43.74                                       |
|                                                                         | 1.2.26 | Cakupan pelayanan nifas                                                                                                            | persen               | 47.69                                       |
|                                                                         | 1.2.27 | Cakupan Kelurahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)                                                                       | persen               | 70.56                                       |
|                                                                         | 1.2.28 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita                                                | persen               | 13,08                                       |
|                                                                         | 1.2.29 | Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita                                                                          | persen               | 0.47                                        |
|                                                                         | 1.2.30 | Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif                                                            | persen               | 45.00                                       |
|                                                                         | 1.2.31 | Angka Kematian Balita (AKBa)                                                                                                       | per 1.000 klh        | 2.91                                        |
|                                                                         | 1.2.32 | Rasio posyandu yang aktif                                                                                                          | persen               | 80.86                                       |
|                                                                         | 1.2.33 | Cakupan kunjungan bayi (KN1)                                                                                                       | persen               | 70.90                                       |
|                                                                         | 1.2.34 | Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi                                                                                          | persen               | 62.80                                       |
|                                                                         | 1.2.35 | Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) | persen               | 2204.00                                     |
|                                                                         | 1.2.36 | Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi                                                                                     | persen               | 65.54                                       |
|                                                                         | 1.2.37 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin                                               | persen               | 81.02                                       |
|                                                                         | 1.2.38 | Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit                                                                            | jumlah per tahun     |                                             |
|                                                                         | 1.2.39 | Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan                                                                           | unit                 | 5.00                                        |
|                                                                         | 1.2.40 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk                                                                             | per 30.000 penduduk  | 29.10                                       |
|                                                                         | 1.2.41 | Rasio rumah sakit per satuan penduduk                                                                                              | per 100.000 penduduk | 6.81                                        |
|                                                                         | 1.2.42 | Rasio Dokter per satuan penduduk                                                                                                   | per 100.000 penduduk | 32.95                                       |
|                                                                         | 1.2.43 | Rasio Tenaga medis per satuan penduduk                                                                                             | per 1.000 penduduk   | 1.28                                        |
|                                                                         | 1.2.44 | Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan                                                                 | persen               | 90.00                                       |
|                                                                         | 1.2.45 | Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel                                             | persen               | 95.00                                       |
|                                                                         | 1.2.46 | Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani                                                                                       | persen               | 75.00                                       |
|                                                                         | 1.2.47 | Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa                                   | kabupaten per tahun  | 200                                         |
|                                                                         | 1.2.48 | Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi                                                                                | persen               | 63.92                                       |
|                                                                         | 1.2.49 | Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ                                                                              | persen               | 44.70                                       |
|                                                                         | 1.2.50 | Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target                                              | persen               | 95.00                                       |
|                                                                         | 1.2.52 | Cakupan rumah sakit kelas C                                                                                                        | persen               | 68.53                                       |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                        |                                                                                        | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 1.2.53                                 | Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional                    | persen           | 100.00                                      |
|                                                                         | 1.2.54                                 | Bed Occupancy Ratio (BOR)                                                              | rasio            | 47.72                                       |
|                                                                         | 1.2.55                                 | Cakupan rumah sakit kelas C                                                            | persen           | 61.33                                       |
|                                                                         | 1.2.56                                 | Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target  | persen           | 95.00                                       |
|                                                                         | 1.2.57                                 | Tingkat kecukupan tenaga medis sesuai dengan standar rumah sakit                       | persen           | 79.50                                       |
|                                                                         | 1.2.58                                 | Tingkat kecukupan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar               | persen           | 95.00                                       |
|                                                                         | 1.2.59                                 | Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit                                  | persen           | 98.00                                       |
|                                                                         | 1.2.60                                 | Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik                               | persen           | 47.12                                       |
|                                                                         | 1.2.61                                 | Cakupan keluarga terakses air bersih                                                   | persen           | 51.75                                       |
|                                                                         | 1.2.62                                 | Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi) | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.2.63                                 | Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)     | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.2.65                                 | Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak bencana (SPM Provinsi) | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.2.66                                 | Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB (SPM Provinsi)     | persen           | 100                                         |
| <b>1.3.</b>                                                             | <b>Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</b> |                                                                                        |                  |                                             |
| <b>1.3.1</b>                                                            | <b>Pekerjaan Umum</b>                  |                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 1.3.1.1                                | Daerah irigasi provinsi yang berfungsi                                                 | hektar           | -                                           |
|                                                                         | 1.3.1.2.                               | Persentas luas lahan yang terlayani irigasi                                            | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.3.1.3                                | Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi                               | ton per hektar   | -                                           |
|                                                                         | 1.3.1.4                                | Cakupan layanan air minum (SPM Provinsi)                                               | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.3.1.5                                | Terpeliharanya sempadan sumber air                                                     | sungai/lokasi    |                                             |
|                                                                         | 1.3.1.6                                | Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik                              | m                | -                                           |
|                                                                         | 1.3.1.7                                | Panjang jalan provinsi yang fungsional                                                 | km               | 30                                          |
|                                                                         | 1.3.1.8                                | Panjang jembatan yang fungsional                                                       | m'               | 500                                         |
|                                                                         | 1.3.1.9                                | Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap                                 | persen           | 50                                          |
|                                                                         | 1.3.1.10                               | Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap                              | km               | 60                                          |
|                                                                         | 1.3.1.11                               | Panjang jalan dalam kondisi mantap                                                     | meq              | 30                                          |
|                                                                         | 1.3.1.12                               | Panjang jembatan dalam kondisi mantap                                                  | persen           | 30                                          |
|                                                                         | 1.3.1.13                               | Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan                                          | persen           | 80                                          |
|                                                                         | 1.3.1.14                               | Cakupan keterlayanan air baku                                                          | persen           | 50                                          |
|                                                                         | 1.3.1.15                               | Cakupan keterlayanan air bersih                                                        | persen           | 50.00                                       |
|                                                                         | 1.3.1.16                               | Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar                        | persen           | 80.00                                       |
|                                                                         | 1.3.1.17                               | Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani                                           | persen           | 50.00                                       |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                                                  |                                                                                                         | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 1.3.1.1<br>8                                                     | Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani                                                            | persen           | 85.00                                       |
|                                                                         | 1.3.1.1<br>9                                                     | Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)                        | persen           | 100                                         |
| <b>1.3.2</b>                                                            | <b>Penata Ruang</b>                                              |                                                                                                         |                  |                                             |
|                                                                         | 1.3.2.1                                                          | Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang                                            | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.3.2.2                                                          | Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh                     | persen           | 100                                         |
| <b>1.4.</b>                                                             | <b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                    |                                                                                                         |                  |                                             |
|                                                                         | 1.4.1                                                            | Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh                                                            | persen           | 95.00                                       |
|                                                                         | 1.4.2                                                            | Cakupan rumah layak huni yang terbangun                                                                 | persen           | 3000                                        |
|                                                                         | 1.4.3                                                            | Persentase lingkungan permukiman yang sehat                                                             | persen           | 65.00                                       |
|                                                                         | 1.4.4                                                            | Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng                                                        | per 1000 kk      | 570                                         |
|                                                                         | 1.4.5                                                            | Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)                      | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.4.6                                                            | Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi) | persen           | 100                                         |
| <b>1.5.</b>                                                             | <b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b> |                                                                                                         |                  |                                             |
|                                                                         | 1.5.1                                                            | Jumlah konflik horisontal                                                                               | kasus            | 1.45                                        |
|                                                                         | 1.5.2                                                            | Cakupan penegakan Perda                                                                                 | persen           | 100.00                                      |
|                                                                         | 1.5.3                                                            | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk                                                    | rasio            | -                                           |
|                                                                         | 1.5.4                                                            | Angka korban kejahatan pembunuhan per100.000 penduduk                                                   | kasus            | -                                           |
|                                                                         | 1.5.5                                                            | Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan                                    | persen           | 78.00                                       |
|                                                                         | 1.5.6                                                            | Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk                                                                 | rasio            | 85.00                                       |
|                                                                         | 1.5.7                                                            | Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat                                               | persen           | 85.00                                       |
|                                                                         | 1.5.8                                                            | Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan                | persen           | 50.00                                       |
|                                                                         | 1.5.9                                                            | Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil                                       | persen           | 65.00                                       |
|                                                                         | 1.5.10                                                           | Jumlah Pertemuan FKUB per tahun                                                                         | kali             | 2                                           |
|                                                                         | 1.5.11                                                           | Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan       | orang            | 250                                         |
|                                                                         | 1.5.12                                                           | Cakupan fasilitasi Forkompimda                                                                          | kali             | 5                                           |
|                                                                         | 1.5.13                                                           | Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM                                                | persen           | 3.00                                        |
|                                                                         | 1.5.14                                                           | Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM                                                             | persen           | 50.00                                       |
|                                                                         | 1.5.15                                                           | Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah                               | persen           | 10.00                                       |
|                                                                         | 1.5.16                                                           | Persentase lembaga dan partai politik yang dibina                                                       | persen           | 90.00                                       |
|                                                                         | 1.5.17                                                           | Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu                                                             | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.5.18                                                           | Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas                                                             | persen           | 90.00                                       |
|                                                                         | 1.5.19                                                           | Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan        | kali             | 2                                           |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                       |                                                                                                                                     | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 1.5.20                                | Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana                                                                                       | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.5.21                                | Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah                                                                          | lokasi           | 2                                           |
|                                                                         | 1.5.22                                | Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana                                                                                         | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.5.23                                | Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana                                                                                         | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.5.24                                | Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan                                                                        | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.5.25                                | Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana                                                              | persen           | -                                           |
|                                                                         | 1.5.26                                | Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)                                              | persen           | 100                                         |
| <b>1.6.</b>                                                             | <b>Sosial</b>                         |                                                                                                                                     |                  |                                             |
|                                                                         | 1.6.1                                 | Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial                                                                                       | persen           | 60                                          |
|                                                                         | 1.6.2                                 | Persentase PMKS yang tertangani                                                                                                     | persen           | 65                                          |
|                                                                         | 1.6.3                                 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar                                                      | persen           | 74.05                                       |
|                                                                         | 1.6.4                                 | Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha                                                        | KK               | 600                                         |
|                                                                         | 1.6.5                                 | Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama                                            | persen           | 90                                          |
|                                                                         | 1.6.6                                 | Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.6.7                                 | Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan                                                                         | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.6.8                                 | Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan                                                     | persen           | 65                                          |
|                                                                         | 1.6.9                                 | Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar                                 | persen           | 50                                          |
|                                                                         | 1.6.10                                | Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial                                                                | kab/kota         | 9                                           |
|                                                                         | 1.6.11                                | Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial                                       | orang            | 50                                          |
|                                                                         | 1.6.12                                | Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)                              | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.6.13                                | Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)                                    | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.6.14                                | Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial                                             | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.6.15                                | Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial                                     | dokumen          | 2                                           |
| <b>2.</b>                                                               | <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b> |                                                                                                                                     |                  |                                             |
| <b>2.1.</b>                                                             | <b>Tenaga Kerja</b>                   |                                                                                                                                     |                  |                                             |
|                                                                         | 2.1.1                                 | Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap                                                                          | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 2.1.2                                 | Frekuensi promosi bursa tenaga kerja                                                                                                | kali             | 2                                           |
|                                                                         | 2.1.5                                 | Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja                                    | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 2.1.6                                 | Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi                                                              | persen           | 70                                          |
|                                                                         | 2.1.7                                 | Persentase kenaikan UMP                                                                                                             | persen           | 5.5                                         |



| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                                       |                                                                                                                   | Satuan Indikator    | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 2.1.8                                                 | Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan                                                | persen              | 80                                          |
|                                                                         | 2.1.9                                                 | Tingkat partisipasi angkatan kerja                                                                                | persen              | 81.04                                       |
|                                                                         | 2.1.10                                                | Tingkat pengangguran terbuka                                                                                      | persen              | 1.46                                        |
|                                                                         | 2.1.11                                                | Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial                                                             | persen              | 70                                          |
|                                                                         | 2.1.12                                                | Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3                                                                       | persen              | 90                                          |
| <b>2.2.</b>                                                             | <b>Pangan</b>                                         |                                                                                                                   |                     |                                             |
|                                                                         | 2.2.1                                                 | Cakupan penanganan daerah rawan pangan                                                                            | persen              | 35.00                                       |
|                                                                         | 2.2.2                                                 | Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan | persen              | 34.00                                       |
|                                                                         | 2.2.3                                                 | Skor PPH                                                                                                          | skor                | 93.00                                       |
| <b>2.3.</b>                                                             | <b>Pertanahan</b>                                     |                                                                                                                   |                     |                                             |
|                                                                         | 2.3.1                                                 | Persentase penyelesaian konflik pertanahan                                                                        | persen              | 90.00                                       |
|                                                                         | 2.3.2                                                 | Cakupan tanah adat yang terpetakan                                                                                | persen              | 90.00                                       |
| <b>2.4.</b>                                                             | <b>Lingkungan Hidup</b>                               |                                                                                                                   |                     |                                             |
|                                                                         | 2.4.1                                                 | Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air                                                                  | titik sungai        | 20                                          |
|                                                                         | 2.4.2                                                 | Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara                                                         | lokasi per kab/kota | 50/10                                       |
|                                                                         | 2.4.3                                                 | Proporsi degradasi lahan yang tercemar                                                                            | persen              | 1.08                                        |
|                                                                         | 2.4.4                                                 | Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan                                                                         | persen              | 90.00                                       |
|                                                                         | 2.4.5                                                 | Cakupan akses informasi LH yang berkualitas                                                                       | kali                | 12                                          |
|                                                                         | 2.4.6                                                 | Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan                                                   | lokasi              | 1                                           |
|                                                                         | 2.4.7                                                 | Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi                                                       | persen              | 90.00                                       |
|                                                                         | 2.4.8                                                 | Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi                                                      | persen              | 65.00                                       |
|                                                                         | 2.4.9                                                 | Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi                                                      | persen              | 65.00                                       |
|                                                                         | 2.4.10                                                | Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi                                                                          | orang               | 20                                          |
|                                                                         | 2.4.11                                                | Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina                                                                                | orang               | 2                                           |
| <b>2.5.</b>                                                             | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b> |                                                                                                                   |                     |                                             |
|                                                                         | 2.5.1                                                 | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                                                                 | ada/tidak           | Ada                                         |
|                                                                         | 2.5.2                                                 | Cakupan penduduk ber KTP elektronik                                                                               | persen              | 98.18                                       |
|                                                                         | 2.5.3                                                 | Persentase kepemilikan KK elektronik                                                                              | persen              | 61.67                                       |
|                                                                         | 2.5.4                                                 | Persentase kepemilikan akta kelahiran                                                                             | persen              | 85.79                                       |
|                                                                         | 2.5.5                                                 | Persentase pasangan berakte nikah                                                                                 | persen              | 80                                          |
| <b>2.6.</b>                                                             | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>               |                                                                                                                   |                     |                                             |
|                                                                         | 2.6.1                                                 | Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG                                                                | persen              | 60                                          |
|                                                                         | 2.6.2                                                 | Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan                                                                      | unit                | 90                                          |
|                                                                         | 2.6.3                                                 | Persentase kampung tertinggal                                                                                     | persen              | 20.50                                       |
|                                                                         | 2.6.4                                                 | Cakupan kampung mandiri                                                                                           | kampung             | 1                                           |
|                                                                         | 2.6.5                                                 | Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat                                 | kampung             | 40                                          |
|                                                                         | 2.6.6                                                 | Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi                                                       | persen              | 45                                          |
| <b>2.7.</b>                                                             | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>   |                                                                                                                   |                     |                                             |
|                                                                         | 2.7.1                                                 | Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina                                                         | kelompok per tahun  | 100                                         |



| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                            |                                                                                              | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 2.7.2                                      | Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( <i>Unmet need</i> )                          | persen           | 2.00                                        |
|                                                                         | 2.7.3                                      | Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi                                     | persen           | 90                                          |
|                                                                         | 2.7.4                                      | Cakupan kampung KB                                                                           | persen           | 55                                          |
|                                                                         | 2.7.5                                      | Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih                                                     | orang per tahun  | 30                                          |
| <b>2.8.</b>                                                             | <b>Perhubungan</b>                         |                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 2.8.1                                      | Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat                               | wilayah adat     | -                                           |
|                                                                         | 2.8.2                                      | Cakupan pelayanan moda angkutan                                                              | persen           | 55                                          |
|                                                                         | 2.8.3                                      | Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor                                                        | jiwa             | 1500                                        |
|                                                                         | 2.8.4                                      | Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer                                       | unit             | -                                           |
|                                                                         | 2.8.5                                      | Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II                                                        | unit             | 1                                           |
|                                                                         | 2.8.6                                      | Jumlah pelabuhan strategis provinsi                                                          | unit             | -                                           |
|                                                                         | 2.8.7                                      | Jumlah terminal Tipe B yang fungsional                                                       | unit             | 1                                           |
|                                                                         | 2.8.8                                      | Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara                                                    | persen           | 9.00                                        |
|                                                                         | 2.8.9                                      | Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut                                                     | persen           | 90.00                                       |
|                                                                         | 2.8.10                                     | Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan                                             | persen           | 90.00                                       |
| <b>2.9.</b>                                                             | <b>Komunikasi dan Informatika</b>          |                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 2.9.2                                      | Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan                         | kerjasama        | 1                                           |
|                                                                         | 2.9.3                                      | Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi                          | persen           | 50.00                                       |
|                                                                         | 2.9.4                                      | Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi                                       | persen           | 80.00                                       |
|                                                                         | 2.9.5                                      | Persentase penduduk yang mengakses internet                                                  | persen           | 70.00                                       |
|                                                                         | 2.9.6                                      | Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi                              | persen           | 8.75                                        |
| <b>2.10.</b>                                                            | <b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b> |                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 2.10.1                                     | Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan                                        | persen           | -                                           |
|                                                                         | 2.10.2                                     | Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda                           | unit             | 500                                         |
|                                                                         | 2.10.3                                     | Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha                                               | unit             | 30                                          |
|                                                                         | 2.10.4                                     | Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri                            | kali             | 15                                          |
|                                                                         | 2.10.5                                     | Cakupan fasilitasi pemasaran produk UMKM unggulan daerah                                     | kelompok         | 10                                          |
|                                                                         | 2.10.6                                     | Jumlah usaha dalam bentuk koperasi                                                           | Rp milyar        | 15                                          |
|                                                                         | 2.10.7                                     | Persentase koperasi aktif dan berkembang                                                     | unit             | 85                                          |
| <b>2.11.</b>                                                            | <b>Penanaman Modal</b>                     |                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 2.11.1                                     | Persentase realisasi investasi                                                               | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 2.11.2                                     | Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan                                          | persen           | 8.5                                         |
|                                                                         | 2.11.3                                     | Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN                                         | persen           | 35                                          |
|                                                                         | 2.11.4                                     | Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional | kali             | 5                                           |
|                                                                         | 2.11.5                                     | Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional           | persen           | 80                                          |
|                                                                         | 2.11.6                                     | Lama waktu penerbitan izin investasi                                                         | hari             | 10                                          |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                       |                                                                                                          | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 2.11.7                                | Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan                                             | Skor             | 79.02                                       |
|                                                                         | 2.11.8                                | Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti                                    | persen           | 95                                          |
| <b>2.12.</b>                                                            | <b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>       |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 2.12.1                                | Jumlah organisasi olahraga yang dibina                                                                   | organisasi       | 10                                          |
|                                                                         | 2.12.2                                | Cakupan monitoring atlet berprestasi                                                                     | persen           | 80                                          |
|                                                                         | 2.12.3                                | Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional       | orang            | 15                                          |
|                                                                         | 2.12.4                                | Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun                                              | unit             | -                                           |
|                                                                         | 2.12.5                                | Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun                                            | unit             | -                                           |
|                                                                         | 2.12.6                                | Cakupan venue berstandar internasional                                                                   | persen           | -                                           |
|                                                                         | 2.12.7                                | Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan                             | orang            | 100                                         |
|                                                                         | 2.12.8                                | Jumlah organisasi kepemudaan                                                                             | organisasi       | 15                                          |
| <b>2.13</b>                                                             | <b>Statistik</b>                      |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 2.13.1                                | Cakupan ketersediaan data SIPD                                                                           | persen           | 95.00                                       |
|                                                                         | 2.13.2                                | Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas                                      | dokumen          | 5                                           |
| <b>2.14.</b>                                                            | <b>Persandian</b>                     |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 2.14.1                                | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah               | persen           | 100                                         |
| <b>2.15.</b>                                                            | <b>Kebudayaan</b>                     |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 2.15.1                                | Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu                                                                 | kurikulum        | 2                                           |
|                                                                         | 2.15.2                                | Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional                                    | kali             | 4                                           |
|                                                                         | 2.15.3                                | Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan                                                                 | jumlah           | 16                                          |
|                                                                         | 2.15.4                                | Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional | kali             | 5                                           |
|                                                                         | 2.15.5                                | Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan                                                                     | jumlah           | 5                                           |
|                                                                         | 2.15.6                                | Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina                                                  | persen           | 53.00                                       |
|                                                                         | 2.15.7                                | Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua                         | jumlah           | 6                                           |
| <b>2.16.</b>                                                            | <b>Perpustakaan</b>                   |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 2.16.1                                | Cakupan pelayanan perpustakaan keliling                                                                  | persen           | 80.00                                       |
|                                                                         | 2.16.2                                | Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan                                             | persen           | 100.00                                      |
| <b>2.17.</b>                                                            | <b>Kearsipan</b>                      |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 2.17.1                                | Persentase peningkatan arsip daerah yang telah Kearsipan dilakukan penyelamatan                          | jumlah           | 100.00                                      |
|                                                                         | 2.17.2                                | Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepastakaan                                           | persen           | 5.50                                        |
| <b>3.</b>                                                               | <b>Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b> |                                                                                                          |                  |                                             |
| <b>3.1.</b>                                                             | <b>Pariwisata</b>                     |                                                                                                          |                  |                                             |
|                                                                         | 3.1.1                                 | Destinasi wisata unggulan yang berkembang                                                                | destinasi        | 18                                          |
|                                                                         | 3.1.2                                 | Kawasan wisata yang berstandar internasional                                                             | kawasan          | 8                                           |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                       |                                                                                                              | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 3.1.3                                 | Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif                                                        | perusahaan       | 50                                          |
|                                                                         | 3.1.4                                 | Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional                     | orang            | 250                                         |
|                                                                         | 3.1.5                                 | Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina                                                                      | pengusaha        | 50                                          |
| <b>3.2.</b>                                                             | <b>Pertanian</b>                      |                                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 3.2.1                                 | Cakupan bina kelompok tani                                                                                   | persen           | 20                                          |
|                                                                         | 3.2.2                                 | NTP peternakan                                                                                               | persen           | 100.00                                      |
|                                                                         | 3.2.3                                 | NTP tanaman pangan                                                                                           | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 3.2.5                                 | NTP perkebunan                                                                                               | persen           |                                             |
|                                                                         | 3.2.7                                 | Produktifitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama                                                | ton per hektar   | 100                                         |
|                                                                         | 3.2.8                                 | Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas                                                                    | persen           |                                             |
|                                                                         | 3.2.9                                 | Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan                                                                  | juta hektar      | 4.89                                        |
|                                                                         | 3.2.10                                | Tingkat swasembada pangan                                                                                    | persen           | 60                                          |
|                                                                         | 3.2.11                                | Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai                                                | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 3.2.12                                | Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis                                                | persen           | 65                                          |
|                                                                         | 3.2.13                                | Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat                                           | persen           | 3.5                                         |
|                                                                         | 3.2.14                                | Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura                                                 | kawasan          | 2                                           |
|                                                                         | 3.2.15                                | Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan                                     | jenis            | 20                                          |
|                                                                         | 3.2.16                                | Tingkat produktifitas tanaman perkebunan                                                                     | kg per hektar    | 512.70                                      |
|                                                                         | 3.2.17                                | Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat                                          | persen           | 60.00                                       |
|                                                                         | 3.2.18                                | Frekwensi promosi produk perkebunan                                                                          | kali             | 2                                           |
|                                                                         | 3.2.19                                | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak                                                        | persen           | 85.00                                       |
|                                                                         | 3.2.20                                | Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas                                                                     | ton              | 39,000,00                                   |
|                                                                         | 3.2.21                                | Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat                                      | persen           | 46.00                                       |
|                                                                         | 3.2.22                                | Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan                                                         | persen           | 40.00                                       |
| <b>3.3.</b>                                                             | <b>Kehutanan</b>                      |                                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 3.3.1                                 | Nilai produksi sumber daya kehutanan                                                                         | Rp triliun       | 4.60                                        |
|                                                                         | 3.3.2                                 | Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan | persen           | 32.28                                       |
|                                                                         | 3.3.3                                 | Rehabilitasi hutan dan lahan kritis                                                                          | Ribu Ha          | 5.53                                        |
|                                                                         | 3.3.4                                 | Rasio pencapaian restorasi lahan gambut                                                                      | persen           | 40.00                                       |
|                                                                         | 3.3.5                                 | Luasan tutupan kawasan konservasi                                                                            | Ha               | 7,755,284                                   |
|                                                                         | 3.3.6                                 | Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem                                       | persen           | 60.00                                       |
| <b>3.4.</b>                                                             | <b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b> |                                                                                                              |                  |                                             |
|                                                                         | 3.4.1                                 | Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan                | persen           | 90                                          |
|                                                                         | 3.4.2                                 | Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina                                          | persen           | 70                                          |
|                                                                         | 3.4.3                                 | Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan                                                               | persen           | 100                                         |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                 |                                                                                                    | Satuan Indikator          | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 3.4.4                           | Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral                                       | persen                    | 100                                         |
|                                                                         | 3.4.5                           | Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi                                          | persen                    | 80                                          |
|                                                                         | 3.4.6                           | Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)                                 | persen                    | 100                                         |
|                                                                         | 3.4.7                           | Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi                                                    | persen                    | 80                                          |
|                                                                         | 3.4.8                           | Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali                                                    | rp per liter              | 10.00                                       |
|                                                                         | 3.4.9                           | Tingkat elektrifikasi                                                                              | persen                    | 80.24                                       |
|                                                                         | 3.4.10                          | Persentase kampung terakses listrik                                                                | persen                    | 70.00                                       |
|                                                                         | 3.4.11                          | Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)                                    | rumah tangga              | 250.00                                      |
|                                                                         | 3.4.12                          | Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)                             | rumah tangga              | 500                                         |
|                                                                         | 3.4.13                          | Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan                                     | kampung                   | 50                                          |
| <b>3.5.</b>                                                             | <b>Perdagangan</b>              |                                                                                                    |                           |                                             |
|                                                                         | 3.5.1                           | Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi               | persen rata-rata kab/kota |                                             |
|                                                                         | 3.5.2                           | Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen                                  | persen                    | 90                                          |
|                                                                         | 3.5.3                           | Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa                                                       | persen                    | 100                                         |
|                                                                         | 3.5.4                           | Nilai ekspor Non Migas Papua                                                                       | Rp milyar                 |                                             |
|                                                                         | 3.5.5                           | Cakupan pasar rakyat yang fungsional                                                               | unit                      | 15                                          |
|                                                                         | 3.5.6                           | Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua                                 | persen                    | 5.00                                        |
|                                                                         | 3.5.7                           | Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok                                         | persen                    | 100                                         |
|                                                                         | 3.5.8                           | Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumahtangga                                    | persen                    | 16.23                                       |
| <b>3.6.</b>                                                             | <b>Perindustrian</b>            |                                                                                                    |                           |                                             |
|                                                                         | 3.6.1                           | Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat                                                 | unit per tahun            |                                             |
|                                                                         | 3.6.2                           | Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina                                                    | unit usaha                |                                             |
|                                                                         | 3.6.3                           | Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi                                                      | kawasan                   |                                             |
| <b>3.7.</b>                                                             | <b>Kelautan dan Perikanan</b>   |                                                                                                    |                           |                                             |
|                                                                         | 3.7.1                           | Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | Persen                    | 70                                          |
|                                                                         | 3.7.2                           | Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi                                           | Jumlah Kabupaten          | 8                                           |
|                                                                         | 3.7.3                           | Produksi perikanan budidaya                                                                        | ton                       | 15.000                                      |
|                                                                         | 3.7.4                           | Produksi perikanan tangkap                                                                         | ton                       | 190.000                                     |
|                                                                         | 3.7.5                           | Nilai ekspor produk perikanan                                                                      | Rp. juta                  | 4.000.00                                    |
|                                                                         | 3.7.6                           | Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan                                               | Rp. juta                  | 5.000.00                                    |
|                                                                         | 3.7.7                           | Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi                                       | Jumlah                    | 5                                           |
|                                                                         | 3.7.8                           | Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan                                                         | Jumlah                    | 8                                           |
|                                                                         | 3.7.9                           | Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil                                      | Jumlah                    | 8                                           |
| <b>4.</b>                                                               | <b>Layanan Penunjang Urusan</b> |                                                                                                    |                           |                                             |
| <b>4.1</b>                                                              | <b>Perencanaan Pembangunan</b>  |                                                                                                    |                           |                                             |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                 |                                                                                          | Satuan Indikator  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 4.1.1           | Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan                        | persen            |                                             |
|                                                                         | 4.1.2           | Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi                               | jumlah kab/kota   | 9                                           |
|                                                                         | 4.1.3           | Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD                                         | persen            | 100.00                                      |
|                                                                         | 4.1.4           | Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD                                        | persen            | 100.00                                      |
|                                                                         | 4.1.7           | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu                        | tepat/tidak tepat | Ya                                          |
|                                                                         | 4.1.8           | Penyusunan LKPJ tepat Waktu                                                              | tepat/tidak tepat | Ya                                          |
|                                                                         | 4.1.9           | Cakupan Evaluasi RPD Kabupaten/Kota se Papua                                             | persen            | 100                                         |
|                                                                         | 4.1.10          | Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota se Papua                                            | persen            | 100                                         |
|                                                                         | 4.1.11          | Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan | persen            | 95                                          |
|                                                                         | 4.1.12          | Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi      | persen            | 95                                          |
|                                                                         | 4.1.13          | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi                               | persen            | 95                                          |
|                                                                         | 4.1.14          | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud                                | persen            | 95                                          |
|                                                                         | 4.1.15          | Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra                                | persen            | 95                                          |
|                                                                         | 4.1.16          | Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah      | jumlah            | 4                                           |
|                                                                         | 4.1.17          | Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan     | persen            | 95                                          |
|                                                                         | 4.1.18          | Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh      | persen            | 95                                          |
| <b>4.2.</b>                                                             | <b>Keuangan</b> |                                                                                          |                   |                                             |
|                                                                         | 4.2.1           | Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus                    | persen            | 100                                         |
|                                                                         | 4.2.2           | Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik                    | Kabupaten         | 9                                           |
|                                                                         | 4.2.3           | Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus                                     | persen            | 100                                         |
|                                                                         | 4.2.4           | Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas                   | ya/tidak          | Ya                                          |
|                                                                         | 4.2.5           | Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah                                     | persen            | 100                                         |
|                                                                         | 4.2.6           | Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi              | persen            | 65                                          |
|                                                                         | 4.2.7           | Penyampaian LKPD Tepat Waktu                                                             | ya/tidak          | Ya                                          |
|                                                                         | 4.2.8           | Tertib Administrasi BMD                                                                  | ya/tidak          | Ya                                          |
|                                                                         | 4.2.9           | Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas      | persen            | -                                           |
|                                                                         | 4.2.10          | Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua  | persen            | 100                                         |
|                                                                         | 4.2.14          | Opini Pemeriksaan BPK                                                                    | Opini             | WTP                                         |
|                                                                         | 4.2.17          | Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah                                                       | persen            | 4,75                                        |
|                                                                         | 4.2.18          | Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah                                          | persen            | 14.00                                       |
|                                                                         | 4.2.19          | Efektifitas pendapatan asli daerah                                                       | persen            | 3.00                                        |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        | Satuan Indikator | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 4.2.20                                            | Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah                                                                                                                                                           | jenis            | 3                                           |
| <b>4.3.</b>                                                             | <b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 4.3.1                                             | Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang                                                                                                                                                                                   | orang            | 100                                         |
|                                                                         | 4.3.2                                             | Jenis Diklat yang terakreditasi A                                                                                                                                                                                                      | jumlah           | -                                           |
|                                                                         | 4.3.3                                             | Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan                                                                                                                                           | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 4.3.4                                             | Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan                                                                                                                                          | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 4.3.5                                             | Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan                                                                                                                                           | persen           | 90                                          |
|                                                                         | 4.3.6                                             | Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya                                                                                                                                                                                     | orang            | -                                           |
| <b>4.4.</b>                                                             | <b>Pelatihan dan Pengembangan</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 4.4.1                                             | Jumlah hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah                                                                                                                                                    | jenis per tahun  | 10                                          |
|                                                                         | 4.4.2                                             | Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah                                                                                                                                                | persen           | 70                                          |
| <b>4.5.</b>                                                             | <b>Penerapan SIDA</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 4.5.1                                             | Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah                                                                                                                                                            | jenis            | 1                                           |
| <b>4.6.</b>                                                             | <b>Pengawasan</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 4.6.1                                             | Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani                                                                                                                                                                              | persen           | 95.00                                       |
|                                                                         | 4.6.2                                             | Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                          | persen           | 45.00                                       |
|                                                                         | 4.6.3                                             | Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                     | orang per tahun  | 2                                           |
|                                                                         | 4.6.4                                             | Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                           | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 4.6.5                                             | Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan                                                                                                                                                                        | persen           | 60.00                                       |
|                                                                         | 4.6.6                                             | Persentase OPD dengan nilai SAKIP B                                                                                                                                                                                                    | persen           | 45.00                                       |
|                                                                         | 4.6.7                                             | Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua                                                                                                                                                            | persen           | 80.00                                       |
| <b>4.7.</b>                                                             | <b>Sekretariat Dewan</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 4.7.1                                             | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja Pengawasan DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | ada/tidak        | Ada                                         |
|                                                                         | 4.7.2                                             | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD                                                                    | ada/tidak        | Ada                                         |
| <b>1.</b>                                                               | <b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
| <b>1.1.</b>                                                             | <b>Pendidikan</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                             |
|                                                                         | 1.1.1                                             | Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD                                                                                                                                                                                           | persen           | 60                                          |
|                                                                         | 1.1.2                                             | Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil                                                                                                                                                                                                   | persen           | 100                                         |
|                                                                         | 1.1.3                                             | Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD                                                                                                                                                                                          | persen           | 0,75                                        |
|                                                                         | 1.1.4                                             | Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP                                                                                                                                                                                         | persen           | 0,15                                        |

| Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah |                                        |                                                                                | Satuan Indikator   | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                         | 1.1.5                                  | Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata     | persen             | 65                                          |
|                                                                         | 1.1.6                                  | Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN                                 | per 1000 siswa OAP | 200                                         |
|                                                                         | 1.1.7                                  | Satu Angka Melek Huruf penduduk OAP                                            | persen             | 55                                          |
|                                                                         | 1.1.8                                  | Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan | persen             | 90                                          |
|                                                                         | 1.1.9                                  | Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK            | persen             | 70                                          |
|                                                                         | 1.1.10                                 | Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat             | sekolah per tahun  | 5                                           |
|                                                                         | 1.1.11                                 | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP                                       | persen             | 75                                          |
| <b>1.2.</b>                                                             | <b>Kesehatan</b>                       |                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 1.2.1                                  | Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3                 | persen             | 50                                          |
|                                                                         | 1.2.2                                  | Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan             | persen             | 100                                         |
|                                                                         | 1.2.3                                  | Cakupan balita OAP yang bergizi baik                                           | persen             | 90                                          |
|                                                                         | 1.2.4                                  | Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat             | persen             | 100                                         |
| <b>1.3.</b>                                                             | <b>Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</b> |                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 1.3.1                                  | Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni                            | persen             | 65                                          |
| <b>1.4.</b>                                                             | <b>Sosial</b>                          |                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 1.4.1                                  | Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial           | per 1000 keluarga  | 1000                                        |
| <b>1.5.</b>                                                             | <b>Pangan</b>                          |                                                                                |                    |                                             |
|                                                                         | 1.5.1                                  | Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang                         | persen             | 5.00                                        |







# BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari Tanggal 01 Januari sampai Tanggal 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyusunan Renja untuk Perangkat Daerah Provinsi dan RKPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan dokumen RKPD 2026, baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan, wajib dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Harapannya kemudian hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih nyata bagi seluruh masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai wujud dari pelaksanaan tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 dan Tahun ke-dua dari Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini juga memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tahun 2025-2045.

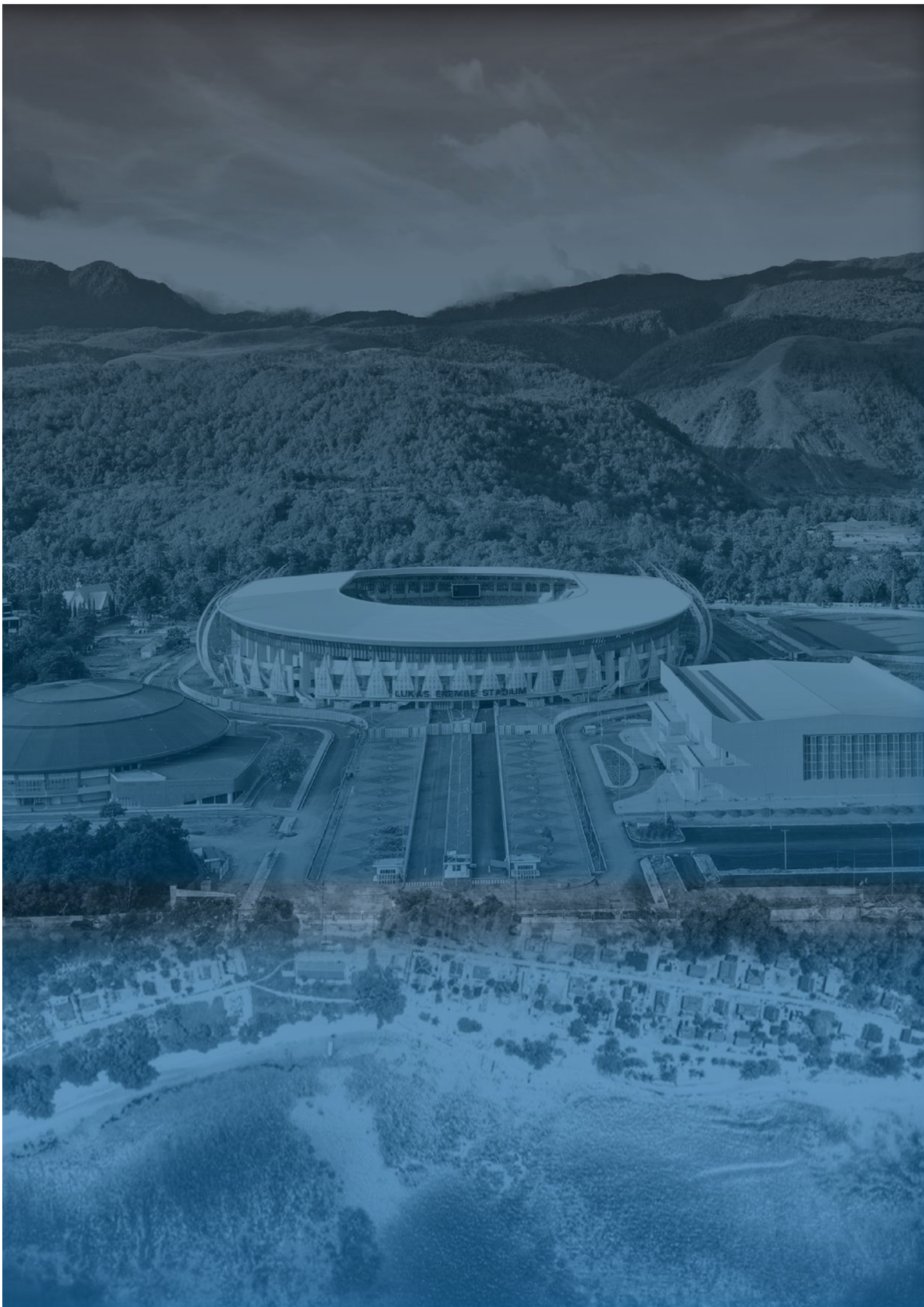
Terimakasih....















# RKPD TAHUN 2026 PAPUA



**BAPPEDA**  
Provinsi Papua